SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1 – 2850 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 050-5889 TAHUN 2021
TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAN KEUANGAN DAERAH

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Pasal 6 dan Lampiran Huruf A angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Menteri Dalam Negeri melakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah oleh Kementerian Dalam Negeri melalui verifikasi, validasi, dan inventarisasi oleh Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

c. bahwa setelah dilakukan pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat data yang perlu dilakukan penyesuaian dengan kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat ini, sehingga terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah perlu diubah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
10. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 333); dan
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TAHUN 2021 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH.

KESATU : Menetapkan Perubahan Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi koreksi atas kesalahan pengetikan, perubahan kodefikasi, nomenklatur, kinerja, indikator dan satuan, penambahan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah serta penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.

KETIGA : Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan melalui penyesuaian klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang telah dibakukan secara terpusat di Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait berdasarkan usulan pemerintah daerah, perubahan kebijakan, dan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Khusus terkait dengan penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, berlaku ketentuan:

a. penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan diberlakukan dari penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahun 2026 sebagaimana terlampir;
b. penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah diberlakukan untuk penyusunan dokumen penganggaran daerah tahun anggaran 2025 dan 2026 sebagaimana terlampir;
c. untuk keterbandingan laporan keuangan pemerintah daerah penonaktifan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur keuangan daerah diberlakukan untuk penyusunan laporan keuangan tahun 2026 dan 2027 sebagaimana terlampir.

KELIMA : Hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditambahkan dalam *database* klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya diakomodir dalam perubahan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

KEENAM : Keputusan Menteri Dalam Negeri ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2025
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan:
1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan;
5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
7. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan;
8. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
9. Menteri Koordinator Bidang Pangan;

10. Menteri Sekretaris Negara;
11. Menteri Keuangan;
12. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
14. Menteri Kebudayaan;
15. Menteri Kesehatan;
16. Menteri Sosial;
17. Menteri Ketenagakerjaan;
18. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
19. Menteri Perindustrian;
20. Menteri Perdagangan;
21. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
22. Menteri Pekerjaan Umum;
23. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman;
24. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal;
25. Menteri Transmigrasi;
26. Menteri Perhubungan;
27. Menteri Komunikasi dan Digital;
28. Menteri Pertanian;
29. Menteri Kehutanan;
30. Menteri Kelautan dan Perikanan;
31. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
32. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
33. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
34. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
35. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
36. Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
37. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
38. Menteri Koperasi;
39. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
40. Menteri Pariwisata;
41. Menteri Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif;
42. Menteri Pemuda dan Olahraga;
43. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
44. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
45. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
46. Gubernur Seluruh Indonesia;
47. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia;
48. Bupati dan Wali Kota Seluruh Indonesia;
49. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia; dan
50. Anggota Tim Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Dr. Asmawa, AP.,M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197410151993111003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 900.1-2850 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-5889 TENTANG HASIL VERIFIKASI, VALIDASI DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

HASIL VERIFIKASI, VALIDASI, DAN INVENTARISASI PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

I. PEMUTAKHIRAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

B. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X					URUSAN X.XX			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			
X	XX	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	1.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan
X	XX	01	1.01	0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data
X	XX	01	1.01	0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.01	0010	Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen
X	XX	01	1.01	0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara
X	XX	01	1.01	0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen
X	XX	01	1.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen
X	XX	01	1.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
X	XX	01	1.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
X	XX	01	1.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	1.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	1.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	1.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	1.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	1.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
X	XX	01	1.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
X	XX	01	1.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket
X	XX	01	1.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	1.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	1.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang
X	XX	01	1.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan
X	XX	01	1.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang Dipindahtugaskan	Orang
X	XX	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	XX	01	1.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	1.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
X	XX	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	1.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
X	XX	01	1.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	XX	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	1.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	1.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit
X	XX	01	1.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit
X	XX	01	1.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	1.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	1.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	1.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	1.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha
X	XX	01	1.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
X	XX	01	1.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja
X	XX	01	1.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
X	XX	01	1.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	1.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang
X	XX	01	1.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			
X	XX	01	1.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	1.13		Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan			
X	XX	01	1.13	0001	Penyiapan Materi Pimpinan	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.13	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	1.13	0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	1.14		Fasilitasi Keprotokolan			
X	XX	01	1.14	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Laporan
X	XX	01	1.14	0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Laporan
X	XX	01	1.14	0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Laporan
X	XX	01	1.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
X	XX	01	1.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/ Bulan
X	XX	01	1.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	1.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang
X	XX	01	1.16		Layanan Administrasi DPRD			
X	XX	01	1.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen
X	XX	01	1.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan
X	XX	01	1.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan
X	XX	01	1.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket
X	XX	01	3.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Otonomi Khusus Papua			
X	XX	01	3.01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Orang/bulan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	3.01	0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Orang/bulan
X	XX	01	4.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Otonomi Khusus Papua			
X	XX	01	4.01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Orang/bulan
X	XX	01	4.01	0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Orang/bulan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	1.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	02	1.01	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.01	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	1.01	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.01	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	1.01	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	1.01	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.01	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	1.01	0055	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	1.01	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.01	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.01	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.01	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	1.01	0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	1.01	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	1.01	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	1.01	0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	1.01	0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.01	0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.01	0070	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.01	0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.01	0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.01	0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.01	0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.01	0076	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	1.01	0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.01	0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.01	0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.01	0080	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	1.02	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.02	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	1.02	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	1.02	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.02	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.02	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	1.02	0048	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.02	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.02	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.02	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	1.02	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	1.02	0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	1.02	0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	1.02	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	1.02	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang
1	01	02	1.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	1.02	0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.02	0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik	Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.02	0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.02	0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.02	0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.02	0068	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	1.02	0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.02	0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.02	0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.02	0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.02	0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	1.02	0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.02	0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.02	0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.02	0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	1.02	0079	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1	01	02	1.03	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0007	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0009	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0010	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0012	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	1.03	0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas	Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)	Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)	Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)	Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)	Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	1.03	0035	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	1.03	0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	1.03	0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	1.03	0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	1.03	0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Orang
1	01	02	1.03	0054	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	1.03	0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	1.03	0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	1.03	0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	1.03	0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus	Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	1.03	0063	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	1.03	0064	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	1.03	0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang
1	01	02	1.03	0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	1.03	0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	1.03	0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	Ruang
1	01	02	1.03	0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	1.03	0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	1.03	0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.03	0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	1.03	0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	1.03	0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	1.03	0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	1.03	0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	1.03	0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	1.03	0084	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1	01	02	3.03	0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Data Peserta Didik BagiSatuan Pendidikan Khusus yang Tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.03	0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga
1	01	02	3.04		Pengelolaan Akademi Komunitas			
1	01	02	3.04	0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
1	01	02	3.04	0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas	Terbangunnya Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit
1	01	02	3.04	0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terbangunnya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
1	01	02	3.04	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terbangunnya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit
1	01	02	3.04	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
1	01	02	3.04	0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/Akademi Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	3.04	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terpeliharanya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Yang Dipelihara	Ruang
1	01	02	3.04	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	3.04	0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terpeliharanya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	3.04	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/ Akademi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Terehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.04	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Serba GunaAkademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Terehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.04	0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas	Tersedianya Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang Tersedia	Unit
1	01	02	3.04	0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Akademi Komunitas	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia	Orang
1	01	02	3.04	0021	Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	3.04	0022	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenAkademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Akademi Komunitas	Jumlah Akademi Komunitas Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan	Pendidikan
1	01	02	3.04	0023	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.04	0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas	Tersedianya Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas Diterima oleh Mahasiswa/i	Jumlah Mahasiswa/i Akademi Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i	Peserta didik
1	01	02	3.04	0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas	Satuan Pendidikan Akademi Komunitas Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Akademi Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.04	0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i	Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.04	0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas	Perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.04	0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Tersedianya bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas yang disediakan	Paket
1	01	02	3.04	0030	Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	Tersusunnya Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	Jumlah Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0031	Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas	Tersedianya Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas	Jumlah Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas yang tersedia	Dokumen
1	01	02	3.04	0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas	Terlaksananya Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas	Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	3.04	0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Tersedianya Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Orang
1	01	02	3.04	0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	3.04	0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten	Digital
1	01	02	3.04	0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.04	0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	3.04	0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	3.04	0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.04	0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Lembaga
1	01	02	3.05		Peningkatan Mutu Akademi Komunitas			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang
1	01	02	3.05	0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
1	01	02	3.05	0003	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
1	01	02	3.05	0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
1	01	02	3.06		Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP			
1	01	02	3.06	0001	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahsiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Tersedianya Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Mahasiswa
1	01	02	3.07		Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan			
1	01	02	3.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.08		Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan			
1	01	02	3.08	0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	4.03		Pengelolaan Pendidikan Khusus			
1	01	02	4.03	0061	Penyediaan Data Peserta Didik bagi satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya Data Peserta Didik Bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Data Peserta Didik BagiSatuan Pendidikan Khusus yang Tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.03	0062	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Khusus	Lembaga
1	01	02	4.04		Pengelolaan Akademi Komunitas			
1	01	02	4.04	0001	Pembangunan Gedung Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0002	Pembangunan Laboratorium Akademi Komunitas	Terbangunnya Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0003	Pembangunan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terbangunnya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
1	01	02	4.04	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terbangunnya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0005	Pembangunan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terbangunnya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
1	01	02	4.04	0007	Pemeliharaan Gedung Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/SekolahTinggi/ Akademi Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	4.04	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terpeliharanya Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi Yang Dipelihara	Ruang
1	01	02	4.04	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terpeliharanya Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	4.04	0010	Pemeliharaan Perpustakaan Akademi Komunitas	Terpeliharanya Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	4.04	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Dipelihara	Unit
1	01	02	4.04	0012	Rehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0013	Rehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Terehabilitasi Laboratorium Akademi Komunitas	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Terehabilitasi Ruang Belajar Akademi Komunitas	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.04	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Terehabilitasi Gedung Serba Guna Akademi Komunitas	Jumlah Gedung Serba Guna yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0016	Rehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Terehabilitasi Perpustakaan Akademi Komunitas	Jumlah Perpustakaan yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga Akademi Komunitas	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0018	Penyediaan Sarana Akademi Komunitas	Tersedianya Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang Tersedia	Unit
1	01	02	4.04	0019	Rehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Terehabilitasi Sarana Akademi Komunitas	Jumlah Sarana Pendidikan Tinggi yang direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.04	0020	Penyediaan Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Akademi Komunitas	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas yang Tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0021	Pengembangan Karir Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Dosen dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi KenaikanPangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	4.04	0022	Pembinaan Kelembagaan dan ManajemenAkademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan danAkademi Komunitas	Jumlah Akademi Komunitas Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Satuan	Pendidikan
1	01	02	4.04	0023	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Kompetensi bagi Mahasiswa/i	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian Kompetensi	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.04	0024	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas	Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Mahasiswa/i yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0025	Penyediaan Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas	Tersedianya Biaya Personil Mahasiswa/i Akademi Komunitas Diterima oleh Mahasiswa/i	Jumlah Mahasiswa/i Akademi Komunitas yang Menerima Biaya Personil Mahasiswa/i	Peserta didik
1	01	02	4.04	0026	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Akademi Komunitas	Satuan Pendidikan Akademi Komunitas Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Jumlah Satuan Pendidikan Akademi Komunitas yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.04	0027	Pengadaan Perlengkapan Mahasiswa/i	Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Mahasiswa/i yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.04	0028	Pengadaan Perlengkapan Akademi Komunitas	Perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Akademi Komunitas yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.04	0029	Penyediaan bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Tersedianya bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas	Jumlah bahan-bahan praktek mahasiswa akademi komunitas yang disediakan	Paket
1	01	02	4.04	0030	Penyusunan Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	Tersusunnya Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja	Jumlah Kurikulum bersama Akademi Komunitas dengan Dunia Kerja yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0031	Penyediaan Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas	Tersedianya Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas	Jumlah Data Penelusuran tamatan (Tracer Study) Akademi Komunitas yang tersedia	Dokumen
1	01	02	4.04	0035	Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas	Terlaksananya Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas	Jumlah Penyelarasan dan Kerjasama Kemitraan Akademi Komunitas yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	4.04	0036	Penyediaan Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Tersedianya Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Jumlah Data Mahasiswa Akademi Komunitas	Orang
1	01	02	4.04	0037	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	4.04	0038	Pengembangan konten digital untuk pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan Konten	Digital
1	01	02	4.04	0039	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.04	0040	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	4.04	0041	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	4.04	0042	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan Akademi Komunitas	Terlaksananya bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.04	0043	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Akademi Komunitas	Lembaga
1	01	02	4.05		Peningkatan Mutu Akademi Komunitas			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma/ Akademi Komunitas	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang
1	01	02	4.05	0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
1	01	02	4.05	0003	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
1	01	02	4.05	0004	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
1	01	02	4.06		Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi OAP			
1	01	02	4.06	0001	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa PAUD	Jumlah Siswa PAUD Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0002	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Siswa Nonformal/Kesetaraan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0003	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Dasar	Jumlah Siswa Sekolah Dasar Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0004	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0005	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Atas	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Atas Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0006	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0007	Penyediaan Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Tersedianya Pembiayaan Pendidikan Bagi Pendidikan Tinggi	Jumlah Mahsiswa Pendidikan Tinggi Yang Menerima Biaya Pendidikan	Orang
1	01	02	4.06	0008	Penyediaan Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Tersedianya Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Jumlah Beasiswa Beasiswa bagi Mahasiswa Ikatan Dinas pada Perguruan Tinggi yang diprioritaskan bagi OAP	Mahasiswa
1	01	02	4.07		Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0001	Penyediaan Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.07	0002	Penyediaan Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.08		Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Tambahan			
1	01	02	4.08	0001	Pelaksanaan Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Terlaksananya Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan	Jumlah Layanan Pendidikan Tambahan yang diprioritaskan bagi OAP Untuk Membantu Penyiapan Memasuki Perguruan Tinggi dan/atau Pendidikan Kedinasan Yang Dilaksanakan	Dokumen
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1	01	03	1.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
1	01	03	1.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	1.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	Buku
1	01	03	1.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah	Buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Buku
1	01	03	1.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	Dokumen
1	01	03	1.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	1.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	1.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	1.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	Buku
1	01	03	1.02	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	1.02	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus	Buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Buku
1	01	03	1.02	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	1.02	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	3.02		Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus			
1	01	03	3.02	0005	Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal	Terlaksananya Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal	Jumlah Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	03	4.02		Penetapan Kurikulum Muatan pendidikan khusus			
1	01	03	4.02	0005	Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal	Terlaksananya Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal	Jumlah Pembinaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	01	04	1.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	1.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Dokumen
1	01	04	1.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Laporan
1	01	04	3.01		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi			
1	01	04	3.01	0003	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Dasar di Papua yang Tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.01	0004	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah di Papua	Tersedianya Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan dari Orang Asli Papua bagi Satuan Pendidikan untuk Sekolah Menengah di Papua yang Tersedia	Orang
1	01	04	3.02		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua			
1	01	04	3.02	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Dokumen
1	01	04	3.02	0002	Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	Tersedianya Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	Jumlah Dokumen Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas Yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.02	0003	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan
1	01	04	3.02	0004	Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Laporan
1	01	04	3.02	0005	Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua	Terlaksananya Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Yang Diterima Pindah	Orang
1	01	04	3.02	0006	Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua ke Provinsi Papua Barat Yang Dilakukan Pemindahan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.03		Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya			
1	01	04	3.03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	Orang
1	01	04	4.02		Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Provinsi Papua Barat			
1	01	04	4.02	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Tersedianya dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah dokumen hasil perhitungan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus	Dokumen
1	01	04	4.02	0002	Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	Tersedianya Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas	Jumlah Dokumen Pengajuan Formasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendidikan Akademi Komunitas Yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	4.02	0003	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan
1	01	04	4.02	0004	Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Penataan Pendistribusian Dosen dan Tenaga Kependidikan bagi Akademi Komunitas	Laporan
1	01	04	4.02	0005	Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat	Terlaksananya Penerimaan pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari provinsi lain ke Papua Barat Yang Diterima Pindah	Orang
1	01	04	4.02	0006	Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua	Terlaksananya Pemindahan Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua	Jumlah Pendidik dan tenaga kependidikan dari Provinsi Papua Barat ke Provinsi Papua Yang Dilakukan Pemindahan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	4.03		Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya			
1	01	04	4.03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Provinsi Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Provinsi Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	Orang
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
1	01	05	1.01		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	1.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02		Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	1.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	1.02	0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1	01	06	1.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06	1.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi	Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	Orang
1	01	06	1.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi	Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Dokumen
1	01	06	1.01	0008	Fasilitasi media publik berbahasa daerah	Media publik berbahasa daerah terfasilitasi	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	Media
1	01	06	1.01	0009	Penyusunan Ensiklopedia Budaya Daerah	Tersusunnya Ensiklopedia Budaya Daerah kewenangan provinsi	Jumlah Ensiklopedia Budaya Daerah kewenangan provinsi	Buku
1	01	06	1.01	0010	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah	Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan provinsi tersusun	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan provinsi	Judul

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06	1.01	0011	Penyusunan Kebijakan Strategis	Terprogramnya kegiatan utama pelestarian bahasa daerah dan terumuskannya kebijakan strategis, baik berupa peraturan perudangan-undangan (regulasi) dan/atau kebijakan program terkait pelestarian bahasa daerah di wilayah provinsi.	Jumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendukung upaya pelestarian bahasa daerah di lingkup provinsi.	Dokumen
1	01	06	1.01	0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	Buku
1	01	06	1.01	0013	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi	Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di provinsi	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi	Orang
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH			
1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	07	7.01	0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya	Orang
1	01	07	7.01	0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0005	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Dokumen
1	01	07	7.01	0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0012	Fasilitasi Pendirian Sekolah Tinggi/Ma''had Aly	Sekolah Sekolah Tinggi/Ma''had Aly yang Berdiri	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma''had Aly yang Berdiri	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	07	7.01	0013	Fasilitasi Akreditasi Sekolah Tinggi/Ma''had Aly	Sekolah Tinggi/Ma''had Aly Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Akreditasi	Jumlah Sekolah Tinggi/Ma''had Aly Terfasilitasi dalam Pelaksanaan Akreditasi	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	07	7.01	0014	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0015	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Dokumen
1	01	07	7.01	0017	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0018	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dokumen
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			
1	01	08	7.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.01	0001	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Ditetapkannya Standar Pendidikan Aceh	Jumlah Standar Pendidikan Aceh yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.01	0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.01	0003	Fasilitasi Pendirian Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh	Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri	Jumlah Universitas, Institut, Politeknik, Akademi, Fakultas, Jurusan dan/atau Program Studi yang Dibutuhkan Aceh yang Berdiri	Satuan Pendidikan Tinggi
1	01	08	7.01	0004	Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pengawasan, Pengendalian, dan Pembinaan Terhadap Perguruan Tinggi Swasta dan Asing yang Beroperasi di Aceh Bersama dengan Majelis Pendidikan Daerah Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen
1	01	08	7.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.02	0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	0002	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Non Formal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.02	0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Satuan Pendidikan Tinggi Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.03	0001	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen
1	01	08	7.03	0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.03	0003	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.04	0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	08	7.04	0002	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Orang
1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.05	0001	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.05	0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Terevaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	0004	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	1.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit Beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit
1	02	02	1.01	0002	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit
1	02	02	1.01	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit
1	02	02	1.01	0006	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0007	Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Terlaksananya Pengembangan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Dilakukan Pengembangan	Unit
1	02	02	1.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit
1	02	02	1.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	Unit
1	02	02	1.01	0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
1	02	02	1.01	0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	Unit
1	02	02	1.01	0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit
1	02	02	1.01	0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0024	Pembangunan Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Terbangunnya Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center yang dibangun	Unit
1	02	02	1.01	0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.01	0026	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
1	02	02	1.01	0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket
1	02	02	1.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang
1	02	02	1.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	1.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen
1	02	02	1.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen
1	02	02	1.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen
1	02	02	1.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen
1	02	02	1.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
1	02	02	1.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen
1	02	02	1.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen
1	02	02	1.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen
1	02	02	1.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Kecanduan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapakan Rehabilitasi Medis	Orang
1	02	02	1.02	0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen
1	02	02	1.02	0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	1.02	0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Dokumen
1	02	02	1.02	0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	1.02	0022	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit
1	02	02	1.02	0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.02	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket
1	02	02	1.02	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.02	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga
1	02	02	1.02	0031	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen
1	02	02	1.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
1	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	1.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	1.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit
1	02	02	1.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	1.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit
1	02	02	3.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	3.01	0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas	Tersedinya Dukungan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.01	0042	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Terselenggaranya pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan berbasis pelayanan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasi masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lain dalam rangka mendekatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan spesialistik pada daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan lintas kabupaten/kota di wilayahnya.	Kabupaten/Kota
1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/Fasyankes
1	02	02	3.02	0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun	Unit
1	02	02	3.02	0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Terlaksananya Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Dokumen
1	02	02	3.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0041	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	dokumen
1	02	02	3.02	0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	3.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.01	0041	Mendukung Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat(Puskesmas) yang Dibangun	Unit
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	02	4.02	0031	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/Fasyankes
1	02	02	4.02	0032	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Terlaksananya Pembangunan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	Jumlah fasilitas Pelayanan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0033	Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Terlaksananya Penguatan kemampuan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Jumlah dokumen hasil penguatan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Provinsi	Dokumen
1	02	02	4.02	0034	Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen
1	02	02	4.02	0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0040	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0042	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kecacingan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0043	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0045	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di Wilayah Papua yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0046	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	dokumen
1	02	02	4.02	0047	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit HIV/AIDS Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0048	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit IMS Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0049	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit TB	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit TB Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Malaria	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Malaria Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0051	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kusta Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0052	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0053	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0054	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Frambusia Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0055	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi Sesuai Standar	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Terlaksananya Penanggulangan Penyakit tidak Menular Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0057	Pengelolaan Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit kesehatan jiwa pada lintas daerah kabupaten/kota Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	4.02	0058	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	dokumen
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1	02	03	1.01		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi			
1	02	03	1.01	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	1.01	0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	Orang
1	02	03	1.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	03	1.02	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang
1	02	03	1.02	0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen
1	02	03	3.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	03	3.02	0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	unit
1	02	03	3.02	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang
1	02	03	3.02	0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas	Tersedianya Beasiswa Ikatan Dinas	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	Orang
1	02	03	3.02	0007	Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Tersedianya Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Jumlah Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah yang tersedia	Orang
1	02	03	3.02	0008	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	Orang
1	02	03	3.02	0009	Penyedian pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan	Tersedianya pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan	Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.02	0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	Tersedianya balai pelatihan kesehatan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	Unit
1	02	03	3.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Terlaksananya Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Dokumen
1	02	03	3.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN			
1	02	03	3.03	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi PapuaMeningkat	Orang
1	02	03	3.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang
1	02	03	3.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			
1	02	03	3.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang
1	02	03	3.06		Pendayagunaan tenaga kesehatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.06	0001	Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	Orang
1	02	03	3.07		Pendayagunaan tenaga kesehatan			
1	02	03	3.07	0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Orang
1	02	03	3.08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,Peningkatan Peran Serta OAP			
1	02	03	3.08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Terlaksananya pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Dokumen
1	02	03	4.02		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.02	0003	Pengembangan Rumah Sakit Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Rumah Sakit yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Rumah Sakit yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	unit
1	02	03	4.02	0004	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Untuk Wahana Pendidikan	Tersedianya Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi kriteria sebagai wahana pendidikan	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang memenuhi riteria sebagai wahana pendidikan	unit
1	02	03	4.02	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang
1	02	03	4.02	0006	Penyediaan Beasiswa Ikatan Dinas	Tersedianya Beasiswa Ikatan Dinas	Jumlah Beasiswa Ikatan Dinas Yang Tersedia	Orang
1	02	03	4.02	0007	Penyediaan dan Pembiayaan Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Tersedianya Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah	Jumlah Staf pengajar dengan keahlian tertentu yang tidak tersedia di daerah yang tersedia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.02	0008	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	Orang
1	02	03	4.02	0009	Penyedian pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan	Tersedianya pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan	Jumlah pembiayaan akreditasi dan upaya peningkatan mutu pendidikan kesehatan yang tersedia	Unit
1	02	03	4.02	0010	Pembentukan balai pelatihan kesehatan untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan	Tersedianya balai pelatihan kesehatan untuk peningkatan kualitas tenaga kesehatan	Jumlah balai pelatihan kesehatan sesuai standar mutu	Unit
1	02	03	4.02	0011	Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Terlaksananya Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan data, informasi, dan indikator Sumber Daya Manusia Kesehatan yang dikelola secara terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan berbasis elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.03		Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN			
1	02	03	4.03	0001	Pengelolaan Manfaat JaminanKesehatan Papua yang terintegrasidengan Program JKN	Terlaksana Jaminan Kesehatan kepada OAP yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi PapuaMeningkat	Orang
1	02	03	4.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil			
1	02	03	4.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang
1	02	03	4.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang
1	02	03	4.06		Pendayagunaan tenaga kesehatan			
1	02	03	4.06	0001	Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan termasuk tenaga kesehatan yang ditempatkan atau ditugaskan Pemerintah Pusat di Fasyankes sesuai standar	Orang
1	02	03	4.07		Pendayagunaan tenaga kesehatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.07	0002	Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Terlaksananya Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Jumlah Hasil Pemberdayaan tenaga kesehatan yang telah lulus uji kompetensi pada institusi pendidikan kesehatan setempat	Orang
1	02	03	4.08		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta OAP			
1	02	03	4.08	0001	Pemberian stimulan bagi kader kesehatan Kampung yang berasal dari OAP	Terlaksananya pemberian stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP	Jumlah stimulan bagi kader kesehatan kampung yang berasal dari OAP yang diberikan	Dokumen
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	02	04	1.01		Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)			
1	02	04	1.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana
1	02	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	1.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	1.01	0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
1	02	05	1.02		Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	05	1.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
1	02	05	1.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penumbuhan Kesadaran dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
1	02	05	1.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	1.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen
1	02	05	3.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	05	3.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	dokumen
1	02	05	4.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi			
1	02	05	4.01	0002	Penyusunan Kebijakan/Regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi bagi lembaga non pemerintah yang ikut serta di dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bermutu bagi OAP pada Bidang kesehatan yang disusun	dokumen
1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN			
1	02	07	3.01		Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	3.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Unit
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit
1	02	07	4.01		Penyelenggaraan akreditasi pada puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lain, serta rumah sakit baik milik pemerintah daerah maupun swasta			
1	02	07	4.01	0001	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terakreditasi	Unit
1	02	07	4.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Pengukuran Indikator Mutu Nasional (INM)	Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan PengukuranIndikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang DilakukanPengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	4.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien)	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien	Unit
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	03	02	1.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.01	0005	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan
1	03	02	1.01	0009	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0015	Pembangunan Bangunan Sabo	Terbangunnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0031	Rehabilitasi Check Dam	Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendungan
1	03	02	1.01	0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0071	Rehabilitasi Bendungan	Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Bendungan
1	03	02	1.01	0072	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0073	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	0074	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	Danau

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga
1	03	02	1.01	0079	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM
1	03	02	1.01	0080	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	0081	Peningkatan Kanal Banjir	Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	0084	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0085	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	03	02	1.01	0088	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0089	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga
1	03	02	1.01	0091	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0092	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0094	Peningkatan Tanggul Sungai	Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.01	0095	Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0097	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	0098	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	0099	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	0102	Pembangunan Check Dam	Terbangunnya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0104	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM
1	03	02	1.01	0109	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0110	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	1.01	0111	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	1.01	0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik
1	03	02	1.01	0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	0119	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.01	0123	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0124	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	KM
1	03	02	1.01	0125	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Beroperasi dan terpeliharanya unit air baku	Jumlah unit air baku yang dioperasi dan dipelihara	UNIT

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0126	Pemeliharaan bangunan sabo	Terpeliharanya bangunan sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0127	Pembangunan Bangunan Pengamanan Pantai	Terbangunnya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang Bangunan Pengamanan Pantai yang Dibangun	KM
1	03	02	1.01	0128	Revitalisasi Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya	Terevitalisasinya Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya	Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang direvitalisasi	UNIT
1	03	02	1.01	0129	Rehabilitasi bangunan pengamanan pantai	Terehabilitasinya bangunan pengamanan pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang direhabilitasi	KM
1	03	02	1.01	0130	Pembangunan Embung	Terbangunnya Embung untuk fungsi konservasi dan penyediaan air baku	Jumlah Embung yang dibangun	Unit
1	03	02	1.01	0131	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah Untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah Untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	1.01	0132	Pemeliharaan Sungai	Terpeliharanya sungai	Panjang sungai yang dipeliharra	KM
1	03	02	1.01	0133	Pemeliharaan danau	Terpeliharanya danau	Jumlah danau yang dipelihara	Danau

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.01	0134	Rehabilitasi Embung	Terehabilitasinya Embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	1.01	0135	Pemeliharaan Situ dan Tampungan Air Alami Lainnya	Terpeliharanya situ dan tampungan air alami lainnya	Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang dipelihara	Unit
1	03	02	1.01	0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	03	02	1.01	0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung	Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	Unit
1	03	02	1.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	1.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	0003	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	Bendung
1	03	02	1.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM
1	03	02	1.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0009	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	Bendung
1	03	02	1.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	1.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung
1	03	02	1.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	1.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Bendung
1	03	02	1.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	1.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga
1	03	02	1.02	0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen
1	03	02	1.02	0040	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	UNIT
1	03	02	1.02	0041	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	UNIT
1	03	02	1.02	0042	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	UNIT
1	03	02	1.02	0043	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Irigasi	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan irigasi yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan irigasi	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	1.02	0044	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	UNIT
1	03	02	1.02	0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga
1	03	02	1.02	0046	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen
1	03	02	3.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	3.01	0069	Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Terfasilitasinya pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota yang difasilitasi	Dokumen
1	03	02	4.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	4.01	0069	Fasilitasi pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Terfasilitasinya pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah pemanfaatan dan penyelesaian sengketa terkait SDA yang masuk dalam hak ulayat pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota yang difasilitasi	Dokumen
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	03	03	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota			
1	03	03	1.01	0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota
1	03	03	1.01	0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	1.01	0018	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Liter/Detik
1	03	03	1.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit
1	03	03	1.01	0020	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit
1	03	03	1.01	0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	1.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Dokumen
1	03	03	1.01	0026	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1	03	04	1.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional			
1	03	04	1.01	0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA	Meningkatnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	04	1.01	0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	Unit
1	03	04	1.01	0012	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan	Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	1.01	0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Terbangunnya TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Ton/hari
1	03	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang
1	03	04	1.01	0015	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Lembaga Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	04	1.01	0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen
1	03	04	1.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	Tersedianya sarana pendukung TPA/TPST/SPA	Jumlah sarana pendukung TPA/TPST/SPA yang disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Terbinanya dan Terawasinya Kabupaten/Kota dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dibina dalam Pengembangan dan Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional			
1	03	05	1.01	0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	1.01	0012	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	1.01	0013	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang dibangun	MÂ³/Hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	1.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen
1	03	05	1.01	0016	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	kabupaten/kota
1	03	05	1.01	0018	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dioperasikan dan dipelihara	Unit
1	03	05	1.01	0019	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sambungan Rumah (SR)
1	03	05	1.01	0020	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MÂ³/Hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Lembaga Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	05	1.01	0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kabupaten/Kota
1	03	05	1.01	0023	Pembinaan dan/atau Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan/atau Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan/atau diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1	03	06	1.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	06	1.01	0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0009	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	1.01	0011	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit
1	03	06	1.01	0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen
1	03	06	1.01	0013	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terlaksananya Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
1	03	07	1.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	07	1.01	0020	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi yang Disediakan	Unit
1	03	07	1.01	0022	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
1	03	07	1.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Liter/Detik
1	03	07	1.01	0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Liter/Detik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0027	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	1.01	0028	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	unit
1	03	07	1.01	0029	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Unit
1	03	07	1.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	SR
1	03	07	1.01	0038	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provins	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	07	1.01	0039	Penyediaan Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Tersedianya Unit pengolahan setempat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Provinsi yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0040	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	1.01	0041	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	07	1.01	0042	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	07	1.01	0043	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	1.01	0044	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Unit
1	03	07	1.01	0045	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	07	1.01	0046	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi yang terbangun	MÂ³/Hari
1	03	07	3.02		Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	3.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit
1	03	07	3.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	3.02	0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Tersusunnya kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang Ditetapkan	Dokumen
1	03	07	3.02	0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersusunnya pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersedianya dokumen pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Dokumen
1	03	07	4.02		Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	4.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit
1	03	07	4.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dna utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	4.02	0003	Penyusunan kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Tersusunnya kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi	Jumlah kebijakan pembangunan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga terutama OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP dengan tidak menghilangkan hak OAP untuk memperoleh kompensasi akibat relokasi Yang Ditetapkan	Dokumen
1	03	07	4.02	0007	Penyusunan pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Tersusunnya pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhuni	Jumlah dokumen pedoman tentang kewajiban pihak yang melakukan relokasi Penduduk OAP untuk menyediakan perumahan dan permukiman layakhun Yang Ditetapkan	Dokumen
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			
1	03	08	1.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	1.01	0012	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang
1	03	08	1.01	0013	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara	Terlaksananya Pengelolaan Rumah Negara	Jumlah Rumah Negara yang Dikelola	Rumah Negara
1	03	08	1.01	0014	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya
1	03	08	1.01	0015	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	1.01	0016	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung
1	03	08	1.01	0017	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Terselenggaranya Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek	Jumlah Lisensi Arsitek yang Diterbitkan dan Diperpanjang	Lisensi
1	03	08	1.01	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara	Kabupaten/Kota
1	03	08	1.01	0019	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	1.01	0020	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung
1	03	08	1.01	0021	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Orang
1	03	08	6.01		Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1	03	08	6.01	0009	Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat	Orang
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	09	1.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	1.01	0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	09	1.01	0014	Pendampingan Legalisasi Perencanaan Teknis dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen legal sebagai acuan perencanan detil dan pengendalian dalam rangka penyelenggaraan penataan bangunan gedung dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen legal yang disahkan terkait perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	09	1.01	0017	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	09	1.01	0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	kabupaten/kota
1	03	09	1.01	0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1	03	10	1.01		Penyelenggaraan Jalan Provinsi			
1	03	10	1.01	0030	Rehabilitasi Jalan	Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM
1	03	10	1.01	0031	Rekonstruksi Jalan	Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	1.01	0035	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Jalan yang mendapatkan Pelebaran Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM
1	03	10	1.01	0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen
1	03	10	1.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM
1	03	10	1.01	0044	Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen
1	03	10	1.01	0045	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	KM
1	03	10	1.01	0046	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter
1	03	10	1.01	0047	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter
1	03	10	1.01	0048	Pembangunan Underpass	Terlaksananya Pembangunan Underpass	Panjang Underpass yang Dibangun	Meter

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	1.01	0049	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter
1	03	10	1.01	0050	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terlaksananya Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang Terowongan/ Tunnel yang Dibangun	Meter
1	03	10	1.01	0051	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM
1	03	10	1.01	0052	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter
1	03	10	1.01	0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM
1	03	10	1.01	0054	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter
1	03	10	1.01	0055	Pembangunan Flyover	Terlaksananya Pembangunan Flyover	Panjang Flyover yang Dibangun	Meter
1	03	10	1.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	KM
1	03	10	1.01	0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Meter

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	1.01	0058	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	KM
1	03	10	1.01	0059	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	1.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	1.01	0009	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Orang
1	03	11	1.01	0010	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0011	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.01	0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	1.01	0013	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.01	0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Orang
1	03	11	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Orang
1	03	11	1.01	0016	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.01	0020	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Terfasilitasi pengembangan kompetensi Keahlian Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Keahlian Konstruksi	Orang
1	03	11	1.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi			
1	03	11	1.02	0006	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi
1	03	11	1.02	0007	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	1.02	0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	1.03		Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.03	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan
1	03	11	1.03	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi
1	03	11	1.03	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga
1	03	11	1.03	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	1.03	0008	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi	Jumlah Dokumen Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Provinsi yang Disusun	Dokumen
1	03	11	3.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1	03	11	3.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik Konstruksi	Orang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	1.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi			
1	03	12	1.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.01	0005	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi
1	03	12	1.01	0006	Penetapan RTRW Provinsi	Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.01	0007	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.01	0008	Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi	Dokumen
1	03	12	1.01	0009	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan ruang	Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi	Orang
1	03	12	1.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
1	03	12	1.02	0004	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.02	0005	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang
1	03	12	1.02	0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	1.02	0007	Penyusunan RTRW Provinsi	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.02	0008	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.02	0009	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Dokumen
1	03	12	1.02	0010	Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta
1	03	12	1.02	0011	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan ranperda RTRW Kab/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota	Berita Acara
1	03	12	1.02	0012	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksana Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat hasil fasilitasi	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	1.02	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Dokumen
1	03	12	1.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	1.03	0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Laporan
1	03	12	1.03	0005	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	1.03	0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Dokumen
1	03	12	1.03	0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen
1	03	12	1.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus
1	03	12	1.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.04	0005	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus
1	03	12	1.04	0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	1.04	0007	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.04	0008	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus
1	03	12	1.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	1.04	0010	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Kegiatan yang sesuai Tugas dan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	1.04	0011	Penilaian Perwujudan RTR	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
1	03	12	1.04	0012	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah dokumen penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	1.04	0013	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.04	0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen
1	03	12	1.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal	Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah Berita Acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara
1	03	12	3.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			
1	03	12	3.02	0005	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksanana Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	3.02	0006	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.02	0007	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progress dan tindak lanjut dari Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	3.02	0008	Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan
1	03	12	3.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	3.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	3.03	0005	Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	3.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.04	0005	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen
1	03	12	3.04	0006	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
1	03	12	3.04	0007	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara
1	03	12	3.04	0008	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus
1	03	12	3.04	0009	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus
1	03	12	3.05		Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			
1	03	12	3.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.06		Pengawasan Penataan Ruang			
1	03	12	3.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	3.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	3.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	3.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	4.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.02	0005	Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksanana Koordinasi Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi Penyusunan Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	4.02	0006	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Materi Teknis dan Ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota	Berita Acara
1	03	12	4.02	0007	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progress dan tindak lanjut dari Provinsi	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	4.02	0008	Pelaksanaan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Bimbingan Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTR kepada Kabupaten/Kota	Laporan
1	03	12	4.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	4.03	0005	Pelaksanaan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	4.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	4.04	0005	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen
1	03	12	4.04	0006	Penilaian Perwujudan Rencana Tata Ruang	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
1	03	12	4.04	0007	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.04	0008	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus
1	03	12	4.04	0009	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus
1	03	12	4.05		Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			
1	03	12	4.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Dokumen
1	03	12	4.06		Pengawasan Penataan Ruang			
1	03	12	4.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	4.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	4.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	6.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi			
1	03	12	6.03	0003	Pengelolaan Kawasan Khusus	Tersedianya Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus	Jumlah Dokumen Tentang Pengelolaan Kawasan Khusus	Dokumen
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
1	03	13	5.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.01	0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.01	0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Jumlah Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan
1	03	13	5.01	0007	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	0008	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL Pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen
1	03	13	5.02	0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen
1	03	13	5.02	0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Dokumen
1	03	13	5.02	0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen
1	03	13	5.02	0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen
1	03	13	5.02	0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermowates	Dokumen
1	03	13	5.02	0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen
1	03	13	5.02	0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen
1	03	13	5.02	0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen
1	03	13	5.02	0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen
1	03	13	5.02	0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen
1	03	13	5.02	0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen
1	03	13	5.03		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis			
1	03	13	5.03	0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	13	5.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang			
1	03	13	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	1.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen
1	04	02	1.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	1.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	1.01	0007	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.01	0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.01	0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	1.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	1.01	0011	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.01	0012	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah provinsi	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah provinsi	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)
1	04	02	1.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang
1	04	02	1.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang
1	04	02	1.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan Berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen
1	04	02	1.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	orang
1	04	02	1.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang
1	04	02	1.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
1	04	02	1.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Provinsi yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.03	0008	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0009	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana Provinsi yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Provinsi	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Provinsi	Unit Rumah
1	04	02	1.03	0013	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah provinsi	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	1.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1	04	02	1.04	0003	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Dokumen
1	04	02	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Perumahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	1.04	0005	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	1.04	0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Dokumen
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	1.01		Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.01	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.01	0011	Pembangunan/Pengembangan /Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi
1	04	03	1.01	0012	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.01	0013	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Penataan Kawasan Permukiman Kumuh yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.01	0014	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibina	Kelompok Masyarakat
1	04	03	1.01	0015	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	1.01	0016	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	1.01	0017	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.01	0018	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang
1	04	03	1.01	0019	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	1.01	0020	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	03	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1	04	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan
1	04	03	1.02	0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Laporan
1	04	03	1.02	0008	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Hektar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0009	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Rumah Tangga
1	04	03	1.02	0010	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dimukimkan Kembali	Hektar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Unit Rumah
1	04	03	1.02	0012	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Dokumen Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Dokumen
1	04	03	1.02	0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	Hektar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	1.02	0014	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Terlaksananya Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Dipugar	Ha
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			
1	04	05	1.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman			
1	04	05	1.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Dokumen
1	04	05	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Laporan
1	04	05	1.01	0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Permukiman yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	1.01	0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman	Dokumen
1	04	05	1.01	0007	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi pada Permukiman yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi
1	04	05	1.01	0008	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	Jumlah Lokasi PSU Permukiman yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi
1	04	05	1.01	0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	1.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	06	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	Laporan
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	05	02	1.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	05	02	1.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen
1	05	02	1.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Terbentuknya Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SK Pembentukaan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi	Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Dokumen
1	05	02	1.01	0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Dokumen
1	05	02	1.01	0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan
1	05	02	1.01	0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat	Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Laporan
1	05	02	1.01	0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Laporan
1	05	02	1.01	0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Dokumen
1	05	02	1.01	0026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0027	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Dokumen
1	05	02	1.01	0028	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
1	05	02	1.01	0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.01	0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang
1	05	02	1.02		Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur			
1	05	02	1.02	0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Laporan
1	05	02	1.02	0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan
1	05	02	1.02	0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.02	0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	laporan
1	05	02	1.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen
1	05	02	1.02	0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
1	05	02	1.02	0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.02	0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Laporan
1	05	02	1.02	0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Istrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen
1	05	02	1.02	0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Unit
1	05	02	1.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.03	0003	Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen
1	05	02	1.03	0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
1	05	02	1.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	1.03	0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan
1	05	02	1.03	0008	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan
1	05	02	3.05		Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi			
1	05	02	3.05	0001	Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	3.05	0002	Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Dokumen
1	05	02	3.05	0003	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	3.05	0004	Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	4.05		Pembentukan Satgas daerah di wilayah provinsi			
1	05	02	4.05	0001	Pembentukan Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Linmas di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Wilayah Provinsi	Dokumen
1	05	02	4.05	0002	Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Daerah Wilayah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	4.05	0003	Fasilitasi Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan satgas linmas di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	4.05	0004	Fasilitasi Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen hasil pembentukan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh			
1	05	02	7.04	0001	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
1	05	02	7.04	0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam yang Diselenggarakan	Laporan
1	05	02	7.04	0005	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0006	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis yang Dilaksanakan bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	02	7.04	0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan
1	05	02	7.04	0008	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Laporan
1	05	02	7.04	0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Jumlah Dokumen yang Memuat Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Yustisi	Dokumen
1	05	02	7.04	0011	Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi			
1	05	03	1.01	0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalkan	Dokumen
1	05	03	1.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	Orang
1	05	03	1.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan
1	05	03	1.02	0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	Orang
1	05	03	1.02	0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen
1	05	03	1.02	0025	Penyusunan Rencana Kontijensi	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi Yang Sah dan Legal (Per Jenis Ancaman) Bencana Prioritas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	0026	Pengelolaan Risiko Bencana	Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan
1	05	03	1.02	0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang
1	05	03	1.02	0028	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana	Tersedianya peralatan perlindungan diri bagi keluarga di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang berada di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang memperoleh peralatan perlindungan diri dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.02	0029	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terbentuknya Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap (SOP) untuk pengendalian operasi yang sah dan legal dengan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (SKPDB) dengan proses bisnis dan prosedur tetap yang dilegalkan dan mendapatkan dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Dokumen
1	05	03	1.02	0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Orang
1	05	03	1.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah laporan Hasil koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Laporan
1	05	03	1.03	0009	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi kedaruratan yang sah/legal	Dokumen
1	05	03	1.03	0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Laporan
1	05	03	1.03	0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.03	0027	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Laporan
1	05	03	1.03	0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang
1	05	03	1.03	0029	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Provinsi	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen
1	05	03	1.03	0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Laporan
1	05	03	1.03	0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Laporan
1	05	03	1.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0006	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga
1	05	03	1.04	0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	Dokumen
1	05	03	1.04	0008	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0010	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0011	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi lintas sektor perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Laporan
1	05	03	1.04	0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang
1	05	03	1.04	0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)	Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana yang terpilah dengan memprioritaskan GEDSI	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0016	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	Tersedianya regulasi di daerah untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen
1	05	03	1.04	0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	Dokumen
1	05	03	1.04	0021	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	1.04	0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Dokumen
1	05	03	1.04	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	kabupaten/kota
1	05	03	1.04	0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	1.01		Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran			
1	05	04	1.01	0002	Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang sah dan legal	Dokumen
1	05	04	1.01	0004	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0006	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri secara Berkala, Sah dan Legal	Dokumen
1	05	04	1.01	0007	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen Secara Periodik Penyelenggaraan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Dokumen secara Periodik Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0009	Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur Kebakaran yang Mengikuti Bimbingan Teknis Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Provinsi dan Kabupaten/Kota)	Orang
1	05	04	1.01	0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	Dokumen
1	05	04	1.01	0013	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga
1	05	04	1.01	0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0015	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Dokumen
1	05	04	1.01	0016	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Terlaksananya pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakarann	Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	laporan
1	05	04	1.01	0017	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	1.01	0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0019	Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen
1	05	04	1.01	0020	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	laporan
1	05	04	1.01	0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0022	Penyediaan Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Informasi Daerah (Kabupaten/Kota) Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran yang Sah dan Legal	Dokumen
1	05	04	1.01	0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	1.01	0025	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Sistem Komunikasi dan Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) nya Terintegrasi dengan Provinsi	Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Unit
1	05	04	1.01	0027	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung diri sesuai Standar Teknis Terkait	Unit
1	05	04	1.01	0028	Penyusunan Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya Dokumen Peta Rawan Kebakaran Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	04	1.01	0029	Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Rawan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0030	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	04	1.01	0031	Pembinaan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan pembinaan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Dokumen
1	05	04	1.01	0032	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten/Kota	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0033	Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Asistensi dan Fasilitasi Kerja Sama dan Koordinasi Antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Laporan
1	05	04	1.01	0034	Fasilitasi Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan yang melibatkan Kabupaten/Kota agar dapat dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan fasilitasi Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota
1	05	04	1.01	0035	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi	Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah Provinsi	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0036	Pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya kegiatan pengembangan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan pengembangan kompetensi	Orang
1	05	04	1.01	0037	Pengembangan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.01	0038	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) yang Bisa Diperbaharui Atau Dimutakhirkan secara Berkala, Berkelanjutan dan Real Time yang terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Kabupaten/Kota dan dapat Menjangkau Masyarakat	Laporan
1	05	04	1.01	0039	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang
1	05	04	1.02		Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.02	0002	Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan
1	05	04	1.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Terlaksananya pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Jumlah laporan pembinaan dan pegawasan penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran	Laporan
1	05	04	1.02	0004	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	1.02	0005	Penyusunan SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Tersusunnya SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SOP Layanan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Lintas Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	04	1.02	0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Laporan
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	06	02	1.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	06	02	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen
1	06	02	1.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	1.02	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Keluarga
1	06	02	1.02	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	Lembaga
1	06	02	1.02	0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	Lembaga
1	06	02	1.02	0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	1.02	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang
1	06	02	1.02	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang
1	06	02	1.02	0012	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	1.02	0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Tersedianya Usulan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	Orang
1	06	02	1.02	0014	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang
1	06	02	1.02	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Badan Usaha
1	06	02	1.02	0016	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota	Meningkatnya Peran Puskesos sebagai Layanan Sosial Satu Pintu dan Hub Program Graduasi	Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	1.02	0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	Orang
1	06	02	3.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	06	02	3.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan LintasDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Menerbitkan Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan	Dokumen
1	06	02	3.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
1	06	02	3.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	Keluarga
1	06	02	3.03		Penetapan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
1	06	02	3.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penetapan lokasi dan bentuk pemberdayaan komunitas adat terpencil (KAT)	Menetapkan Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Lokasi dan Bentuk Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang Ditetapkan	Lokasi
1	06	02	3.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	3.04	0001	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT	Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Dokumen
1	06	02	4.01		Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
1	06	02	4.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan LintasDaerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Menerbitkan Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Jumlah Izin Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah yang Diterbitkan	Dokumen
1	06	02	4.02		Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi			
1	06	02	4.02	0005	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi DI Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan di Provinsi	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi di Provinsi	Keluarga
1	06	02	4.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	4.04	0001	Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan bentuk pengakuan dan penghormatan terhadap karakteristik sosial KAT	Meningkatnya Fasilitasi Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Jumlah yang Terfasilitasi untuk Penetapan Bentuk Pengakuan dan Penghormatan terhadap Karakteristik Sosial KAT	Dokumen
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
1	06	03	1.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
1	06	03	1.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Orang
1	06	03	3.06		Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			
1	06	03	3.06	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang
1	06	03	4.06		Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	03	4.06	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	06	04	1.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti			
1	06	04	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01	0004	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dikoordinasikan dan Disinkronisasikan dalam Rehabilitasi Sosial Bersumberdaya Masyarakat bagi Penyandang Disabilitas serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01	0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.01	0019	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.01	0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	orang
1	06	04	1.01	0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Dokumen
1	06	04	1.02		Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti			
1	06	04	1.02	0001	Pengasuhan	Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0003	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.02	0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.02	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0015	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.02	0018	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang
1	06	04	1.02	0019	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan bagi Anak Terlantar Kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi anak terlantar kewenangan provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0021	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.02	0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.02	0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti	Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03		Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti			
1	06	04	1.03	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.03	0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0004	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.03	0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0012	Pemulasaraan	Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.03	0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.03	0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Dokumen
1	06	04	1.03	0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04		Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti			
1	06	04	1.04	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.04	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.04	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.04	0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis	TTerpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.04	0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Gelandangan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.04	0017	Pemulasaraan	Terlaksananya pemulasaraan bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi gelandangan dan pengemis kewenangan provinsi	Orang
1	06	04	1.05		Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti			
1	06	04	1.05	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0010	Pemulangan ke Daerah Asal	Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	Orang
1	06	04	1.05	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	1.05	0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang
1	06	04	1.05	0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Terlaksananya Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Orang
1	06	04	1.05	0018	Pemulasaraan	Terlaksananya pemulasaraan bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	1.05	0019	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	04	3.06		Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.			
1	06	04	3.06	0001	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Lembaga
1	06	04	3.06	0002	Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Teredianya Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Orang
1	06	04	3.07		Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	3.07	0001	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Orang
1	06	04	3.08		Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.			
1	06	04	3.08	0001	Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Terlaksananya Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Lembaga yang dikelola dan dikoordinasikan dalam Pemberian Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di dalam Panti Sosial sesuai dengan Kewenangannya.	Lembaga
1	06	04	3.09		Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	3.09	0001	Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta Pembinaan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Kewenangannya.	Jumlah Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan dalam Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial di luar Panti Sosial serta dibina sesuai dengan Kewenangannya.	Kab/Kota
1	06	04	4.06		Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.			
1	06	04	4.06	0001	Koordinasi Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pembentukan Institusi Penerima Wajib Lapor didaerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Institusi Penerima Wajib Lapor di daerah Kabupaten/Kota yang dibentuk	Lembaga
1	06	04	4.06	0002	Penyediaan Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Teredianya Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Jumlah Data Korban Penyalahgunaan NAPZA Calon Penerima Layanan IPWL	Orang
1	06	04	4.07		Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	4.07	0001	Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah	Terlaksananya Penerbitan Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Jumlah Izin Pengangkatan Anak antar-WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Pelaksanaannya dilakukan melalui Sidang Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Daerah.	Orang
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	1.01		Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
1	06	05	1.01	0001	Pengangkatan Anak antar WNI	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	1.01	0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal	Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	1.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi			
1	06	05	1.02	0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	1.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	1.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	Kab/Kota
1	06	05	1.02	0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial	Terlaksananya pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	1.02	0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Dokumen
1	06	05	1.02	0011	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	Orang
1	06	05	1.02	0012	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	05	3.03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP.			
1	06	05	3.03	0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Kebijakan program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	3.04		Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1	06	05	3.04	0001	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen
1	06	05	3.05		Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat			
1	06	05	3.05	0001	Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Tersusunnya Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Dokumen
1	06	05	3.06		Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.			
1	06	05	3.06	0001	Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Tersusunnya Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Jumlah Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	4.03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP.			
1	06	05	4.03	0001	Fasilitasi Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Kebijakan program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen
1	06	05	4.04		Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanggulangan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial			
1	06	05	4.04	0001	Penyusunan Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Tersusunnya Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah Rencana Induk dan RAD Penanganan Kemiskinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dokumen
1	06	05	4.05		Penetapan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	4.05	0001	Penyusunan Model dan Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Tersusunnya Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Jumlah Standar Bantuan Langsung Tunai dan/atau Bantuan Sosial lainnya yang Bersumber dari APBD atau Dana Otonomi Khusus bagi OAP yang Memenuhi Syarat	Dokumen
1	06	05	4.06		Penetapan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial			
1	06	05	4.06	0001	Penyusunan Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Tersusunnya Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.	Jumlah Standar Jaminan Hidup Layak bagi OAP Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Dokumen
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	06	06	1.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi			
1	06	06	1.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	1.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06	1.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06	1.01	0011	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Orang
1	06	06	1.01	0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	1.01	0015	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
1	06	06	1.01	0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang
1	06	06	1.01	0017	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga
1	06	06	1.01	0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	1.01	0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang
1	06	06	1.01	0020	Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial	Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah
1	06	06	1.01	0021	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen
1	06	06	1.01	0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	1.01	0023	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	1.01		Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi			
1	06	07	1.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Dokumen
1	06	07	1.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Makam
1	06	07	1.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Laporan
1	06	07	1.01	0004	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	07	1.01	0005	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Orang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2	07	02	1.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			
2	07	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen
2	07	02	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan yang mampu menyusun RTK Makro	Orang
2	07	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	Orang
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	1.01		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
2	07	03	1.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	Orang
2	07	03	1.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga
2	07	03	1.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	1.01	0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kesepakatan
2	07	03	1.02		Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja			
2	07	03	1.02	0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	LPK
2	07	03	1.03		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah			
2	07	03	1.03	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan
2	07	03	1.04		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi			
2	07	03	1.04	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	3.03		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
2	07	03	3.03	0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Tersedianya Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Jumlah Insentif Berupa ProgramPelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP Yang Disediakan	LPK
2	07	03	4.03		Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi			
2	07	03	4.03	0004	Penyediaan Bantuan Berupa Insentif Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Tersedianya Insentif Berupa Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP	Jumlah Insentif Berupa ProgramPelatihan dan Peningkatan Kompetensi Instruktur Bagi Lembaga Pelatihan Kerja Yang Menyelenggarakan Pelatihan Kerja Bagi OAP Yang Disediakan	LPK
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2	07	04	1.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	1.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	Orang
2	07	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang
2	07	04	1.01	0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	Orang
2	07	04	1.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	Orang
2	07	04	1.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	1.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga
2	07	04	1.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga
2	07	04	1.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	1.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen
2	07	04	1.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Melalui sistem online (KarirHub)	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja Yang Terdaftar Dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (KarirHub)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang
2	07	04	1.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi			
2	07	04	1.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	1.04	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	Perusahaan
2	07	04	1.04	0003	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam LTSA	Orang
2	07	04	1.04	0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	1.05		Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	04	1.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	Orang
2	07	04	3.01		Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	3.01	0005	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Perusahaan
2	07	04	3.01	0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yangMendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang
2	07	04	3.01	0007	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	3.01	0008	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
2	07	05	1.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota			
2	07	05	1.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan
2	07	05	1.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama yang terkait dengan Hubungan Industrial	Terlaksananya Perjanjian Kerja Bersama yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama dan Terdaftar Di WLKP Online	Perusahaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Laporan
2	07	05	1.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	07	05	1.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara
2	07	05	1.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja
2	07	05	1.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga
2	07	05	1.02	0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Perusahaan
2	07	05	1.03		Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	1.03	0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	Surat Keputusan
2	07	05	1.03	0003	Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)	Jumlah penetapan UMK	Surat Keputusan
2	07	05	1.03	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Orang
2	07	06			PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN			
2	07	06	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan			
2	07	06	1.01	0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	Perusahaan
2	07	06	1.01	0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	Kasus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	06	1.01	0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	Perusahaan
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2	08	02	1.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.01	0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan
2	08	02	1.01	0009	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	laporan
2	08	02	1.01	0010	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek	orang
2	08	02	1.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.01	0012	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga
2	08	02	1.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi			
2	08	02	1.02	0005	Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi	Lembaga
2	08	02	1.02	0006	pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.02	0007	monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	laporan
2	08	02	1.02	0008	sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	Orang
2	08	02	1.02	0009	peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang
2	08	02	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.03	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	laporan
2	08	02	1.03	0008	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang
2	08	02	1.03	0009	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	1.03	0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	08	02	1.03	0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
2	08	03	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	1.01	0003	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.01	0004	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang
2	08	03	1.01	0005	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	laporan
2	08	03	1.01	0006	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan
2	08	03	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Kegiatan
2	08	03	1.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.02	0003	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang
2	08	03	1.02	0004	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	03	1.02	0005	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.02	0006	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	03	1.02	0007	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	03	1.02	0009	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.02	0010	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	03	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2	08	03	1.03	0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	Orang
2	08	03	1.03	0006	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	1.03	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan
2	08	03	1.03	0008	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	08	03	1.03	0009	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	04	1.01	0004	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04	1.01	0005	penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluargaKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga
2	08	04	1.01	0006	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Kebijakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga
2	08	04	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
2	08	04	1.02	0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	04	1.02	0005	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.02	0006	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan provinsi	Lembaga
2	08	04	1.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga
2	08	04	1.02	0008	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	08	04	1.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.03	0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	04	1.03	0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	04	1.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	1.03	0005	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	04	1.03	0006	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			
2	08	05	1.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi			
2	08	05	1.01	0003	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	05	1.01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	Lembaga
2	08	05	1.01	0005	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Provinsi	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Provinsi yang Tersedia	Dokumen
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
2	08	06	1.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
2	08	06	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	Kebijakan
2	08	06	1.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	1.01	0006	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi	jumlah SDM OPD (provinsi) dan kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Orang
2	08	06	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak AnakKewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Lembaga
2	08	06	1.01	0008	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Laporan
2	08	06	1.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan		Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	1.02	0006	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak	Terselenggaranya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak	Jumlah kegiatan KIE Pemenuhan Hak Anak	Kegiatan
2	08	06	1.02	0007	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan provinsi	Dokumen
2	08	06	1.02	0008	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga
2	08	06	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimtek	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	1.02	0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	08	06	1.02	0011	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Laporan
2	08	06	1.02	0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
2	08	07	1.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.01	0006	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Orang
2	08	07	1.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga
2	08	07	1.01	0008	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan
2	08	07	1.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	08	07	1.01	0010	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi			
2	08	07	1.02	0008	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	1.02	0009	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.02	0010	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	1.02	0011	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	1.02	0012	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.02	0013	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	1.02	0014	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.02	0015	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	1.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	1.03	0006	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak Kewenangan Provinsi	Jumlah KIE Perlindungan AMPK Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.03	0009	penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Dokumen
2	08	07	1.03	0010	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Lembaga
2	08	07	1.03	0011	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	1.03	0012	Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga
2	08	07	1.03	0013	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Laporan
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN			
2	09	02	1.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	02	1.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Unit
2	09	02	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan
2	09	02	1.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang tersedia	Unit
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
2	09	03	1.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	1.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan
2	09	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.01	0006	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Dokumen
2	09	03	1.01	0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan
2	09	03	1.01	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	Laporan
2	09	03	1.01	0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Laporan
2	09	03	1.01	0011	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan Provinsi	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Provinsi	Laporan
2	09	03	1.01	0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen
2	09	03	1.01	0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	Dokumen
2	09	03	1.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi			
2	09	03	1.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen
2	09	03	1.02	0005	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi yang terpelihara	Ton
2	09	03	1.02	0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton
2	09	03	1.02	0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.02	0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Laporan
2	09	03	1.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			
2	09	03	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan
2	09	03	1.04		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi			
2	09	03	1.04	0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen
2	09	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	1.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan
2	09	03	1.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Laporan
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	09	04	1.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi			
2	09	04	1.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	Dokumen
2	09	04	1.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	04	1.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	09	04	1.02	0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen
2	09	04	1.02	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Laporan
2	09	04	1.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Dokumen
2	09	04	1.02	0006	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala provinsi yang Ditetapkan	Dokumen
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	1.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	1.01	0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Sertifikat
2	09	05	1.01	0007	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	09	05	1.01	0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	Dokumen
2	09	05	1.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	09	05	1.01	0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	1.01	0011	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
2	10	03	1.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	1.01	0002	Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Dokumen Pemberitahuan Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Dokumen
2	10	03	1.01	0003	Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya koordinasi kegiatan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum	Jumlah Dokumen koordinasi pelaksanaan pengadaan tanah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	1.01	0004	Pengumuman Hasil Penetapan Lokasi untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Jumlah Surat Pengumuman Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum	Dokumen
2	10	03	1.01	0005	Pendataan Awal Lokasi Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Tersedianya Data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Daftar Sementara Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah pada Lokasi Rencana Pembangunan	Dokumen
2	10	03	1.01	0006	Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Laporan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dalam rangka Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Laporan
2	10	03	3.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	3.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	3.04		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua			
2	10	03	3.04	0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	4.01		Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi			
2	10	03	4.01	0002	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	4.04		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi Papua Barat			
2	10	03	4.04	0001	Koordinasi pengadaan tanah di Wilayah Provinsi	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Provinsi Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	7.02		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	7.02	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah Berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen
2	10	03	7.03		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)			
2	10	03	7.03	0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2	10	04	1.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	04	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	04	1.01	0004	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	04	1.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	04	1.01	0006	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			
2	10	05	1.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	05	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Dokumen
2	10	05	1.01	0002	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	1.01	0003	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	1.01	0004	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	05	1.01	0005	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	10	06	1.01		Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	06	1.01	0002	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	1.01	0004	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Provinsi	Laporan
2	10	06	1.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	Berita Acara
2	10	06	1.01	0006	Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Berita Acara
2	10	06	1.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	06	1.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	1.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	1.02	0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen
2	10	06	1.02	0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
2	10	07	1.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	10	07	1.01	0002	Penetapan Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Melalui peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Gubernur	Penetapan batas Tanah Ulayat Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi oleh Gubernur	Dokumen
2	10	07	3.02		Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi			
2	10	07	3.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara
2	10	07	3.02	0003	Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan
2	10	07	3.03		Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya			
2	10	07	3.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen
2	10	07	3.04		Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.04	0001	Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Tersusunnya Kebijakan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	3.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan
2	10	07	3.05		Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	3.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	3.06		Pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.06	0001	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan	Dokumen
2	10	07	3.07		Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan			
2	10	07	3.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasiTanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Dokumen
2	10	07	3.08		Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum			
2	10	07	3.08	0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Dokumen
2	10	07	3.09		Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota			
2	10	07	3.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota.	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota.	Berita Acara
2	10	07	3.10		Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota			
2	10	07	3.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan
2	10	07	3.10	0002	Pemanfaatan tanah adat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	3.11		Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Provinsi			
2	10	07	3.11	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua	Data ttanah adat/ulayat di Provinsi Papua Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan
2	10	07	3.11	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.02		Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi			
2	10	07	4.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Laporan
2	10	07	4.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Berita Acara
2	10	07	4.02	0003	Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Hasil Fasilitasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat lintas kabupaten/ kota dalam1(satu) daerah provinsi	Laporan
2	10	07	4.03		Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen
2	10	07	4.04		Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	4.04	0001	Penyusunan kebijakan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Tersusunnya Kebijakan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak Masyarakat Hukum Adat	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	4.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan
2	10	07	4.05		Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	4.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MoU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	4.06		Pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.06	0003	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Ditetapkan	Dokumen
2	10	07	4.07		Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan			
2	10	07	4.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasiTanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan lintas kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di Tingkat Provinsi	Dokumen
2	10	07	4.08		Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum			
2	10	07	4.08	0001	Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Laporan Koordinasi menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Dokumen
2	10	07	4.09		Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota			
2	10	07	4.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota.	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak lintas daerah kabupaten/kota.	Berita Acara
2	10	07	4.10		Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat dan tanag kosong lintas daerah kabupaten/Kota			
2	10	07	4.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	4.11		Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Provinsi			
2	10	07	4.11	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat	Data tanah adat/ulayat di Provinsi Papua Barat Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan
2	10	07	4.11	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat	Data tanah adat/ulayat yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
2	10	08	1.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	08	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan
2	10	08	1.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			
2	10	08	1.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi yang Diinventarisasi	Laporan
2	10	08	1.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananyan Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen
2	10	08	1.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Berita Acara
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
2	10	10	1.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan
2	10	10	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	10	10	1.01	0003	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah Sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen
2	10	10	1.01	0004	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	1.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Provinsi (Konsolidasi Tanah skala besar)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerinta Provinsi	Dokumen
2	10	10	1.01	0006	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Dokumen
2	10	10	3.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	3.01	0005	Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota Yang Tersedia	Dokumen
2	10	10	4.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	4.01	0005	Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota	Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah [Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang lintas daerah kabupaten/kota Yang Tersedia	Dokumen
2	10	10	7.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	7.01	0004	Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Fasilitasi Penetapan Zona Nilai Tanah Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	10	10	7.02		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	7.02	0001	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dokumen
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
2	10	11	5.01		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten Dalam Rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, Dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen
2	10	11	5.01	0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Terlaksananya Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	0003	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.01	0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen
2	10	11	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan
2	10	11	5.01	0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.02		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.02	0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.02	0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara
2	10	11	5.02	0003	Penyusunan dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Tersusunnya Dokumen penanganan permasalahan hukum pertanahan	Jumlah Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.03		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
2	10	11	5.03	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasaranaa Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit
2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH			
2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Aset Pemerintah			
2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data aset Tanah Pemerintah	Laporan
2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak atas Tanah Milik Masyarakat Miskin			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	12	7.02	0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Terinventarisasinya Tanah - Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data tanah Mlik Masyarakat Miskin	Laporan
2	10	13			PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN			
2	10	13	7.01		Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat			
2	10	13	7.01	0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Terlaksananya Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen
2	10	13	7.01	0002	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen
2	10	13	7.01	0003	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen
2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN			
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	14	7.01	0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.01	0002	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Terlaksananya kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.02		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan			
2	10	14	7.02	0001	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti kegiatan Pembinaan Pertanahan	Orang
2	10	15			PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU			
2	10	15	7.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil			
2	10	15	7.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di wilayah Pesisir	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	15	7.01	0002	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0003	Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan	Jumlah Data Tanah Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0004	Identifikasi,Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0005	Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), Wilayah Tertentu dan Perbatasan	Terlaksananya Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil (terdalam), dan Wilayah Tertentu	Jumlah dokumen hasil Pengendalian Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil (terdalam), dan Wilayah Tertentu	Dokumen
2	10	16			PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN			
2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	16	7.01	0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	0002	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	0003	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pemanfataan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN			
2	10	17	7.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik- Konflik Pertanahan			
2	10	17	7.01	0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Provinsi	Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	17	7.01	0002	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Terlaksananya peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan
2	10	17	7.01	0003	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Berita Acara
2	10	17	7.01	0004	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam Lintas Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02			PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	1.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
2	11	02	1.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Dokumen
2	11	02	1.01	0003	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG, RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	1.01	0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Dokumen
2	11	02	1.01	0005	Penetapan RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen RPPLH Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
2	11	02	1.01	0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi	RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen
2	11	02	1.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
2	11	02	1.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	Dokumen
2	11	02	1.02	0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	1.02	0008	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen
2	11	02	1.02	0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Dokumen
2	11	02	3.03		Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup			
2	11	02	3.03	0001	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	02	4.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
2	11	02	4.01	0004	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kesesuaian Kaidah Dalam Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kesesuaian Kaidah Dalam Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	4.01	0005	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Provinsi yang telah ditetapkan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Provinsi	Dokumen RPPLH Provinsi yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen
2	11	02	4.03		Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup			
2	11	02	4.03	0001	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	1.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup			
2	11	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen
2	11	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket
2	11	03	1.01	0005	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat provinsi	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	1.01	0006	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	1.01	0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi	Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0008	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	laporan
2	11	03	1.01	0009	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi
2	11	03	1.01	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	1.01	0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen
2	11	03	1.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit
2	11	03	1.01	0014	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di Provinsi dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di Provinsi yang dilakukan pemeliharaan	Unit
2	11	03	1.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0016	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Laporan
2	11	03	1.01	0017	Penyusunan Neraca SDA-LH Provinsi	Tersusunnya Neraca SDA-LH sesuai kewenangan Provinsi	Dokumen Neraca SDA-LH yang disusun sesuai kewenangannya	Dokumen
2	11	03	1.01	0018	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen
2	11	03	1.01	0019	Penyusunan dan Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah	Tersusunnya laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya	Jumlah laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.01	0020	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Laporan
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
2	11	03	1.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	11	03	1.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi
2	11	03	1.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.02	0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Laporan
2	11	03	1.02	0005	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen
2	11	03	1.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Kabupaten/Kota dan/atau Sektor Lain Hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	1.03	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	1.03	0007	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.03	0008	Pelaksanaan Restorasi	kegiatan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha
2	11	03	1.03	0009	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	1.03	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota	Kegiatan
2	11	03	1.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	pembersihan unsur pencemar dengan dampak lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	1.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi lintas kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	1.03	0013	Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi lintas kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi	Ha
2	11	03	1.03	0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Laporan
2	11	03	1.03	0015	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	3.04		Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota			
2	11	03	3.04	0001	Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Terlaksananya Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Laporan
2	11	03	4.04		Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	4.04	0001	Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Terlaksananya Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi terhadap upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Jumlah laporan pembinaan, penilaian, dan evaluasi terhadap pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dilaksanakan di tingkat kabupaten/ kota	Laporan
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen
2	11	04	1.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola lingkup Kewenangan Provinsi	Ha
2	11	04	1.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	1.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya jumlah orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang
2	11	04	1.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
2	11	04	1.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit
2	11	04	1.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Unit
2	11	04	3.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
2	11	04	3.01	0008	Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	3.01	0009	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	04	4.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi			
2	11	04	4.01	0008	Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Dokumen
2	11	04	4.01	0009	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati lintas Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati lintas kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	1.01	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Dokumen
2	11	05	1.01	0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	Usaha
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	Dokumen
2	11	06	1.01	0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	11	06	1.01	0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	1.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha/Kegiatan
2	11	06	1.01	0010	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	Unit
2	11	06	3.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	3.01	0005	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	06	3.02		Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			
2	11	06	3.02	0001	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan , persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	3.02	0002	Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Terlaksananya pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Jumlah laporan Pembinaan dan evaluasi terhadap kinerja tim uji kelayakan lingkungan hidup tingkat kabupaten/ kota bersama lembaga uji kelayakan	Laporan
2	11	06	4.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	11	06	4.01	0005	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	06	4.02		Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	4.02	0001	Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pembinaan dan Evaluasi terhadap Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
2	11	07	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	07	1.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
2	11	07	1.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	08	1.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
2	11	08	1.01	0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08	1.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman Yang Sehat	Keluarga
2	11	08	1.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08	1.01	0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	10	1.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	Perkara
2	11	10	1.01	0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Provinsi sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	Perkara
2	11	10	1.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	Pengaduan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	10	1.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Sanksi
2	11	10	1.01	0011	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup	PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	11	10	1.01	0012	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Orang
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
2	11	11	1.01	0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	Ton
2	11	11	1.01	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	11	1.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	Unit
2	11	11	1.01	0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	Dokumen
2	11	11	1.01	0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	Dokumen
2	11	11	1.01	0011	Pengelolaan sampah Regional	Terlaksananya pengelolaan sampah regional	Jumlah sampah regional yang dikelola	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	1.01	0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Unit
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Dokumen
2	11	11	1.01	0015	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	Ton
2	11	11	1.01	0016	Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Terlaksananya penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota	Ton
2	11	11	1.01	0017	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	1.01	0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
2	12	02	1.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	Dokumen
2	12	02	1.01	0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	1.01	0003	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil tata kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	Dokumen
2	12	02	1.01	0004	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	Dokumen
2	12	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen
2	12	02	1.02		Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	1.02	0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.02	0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pendaftaran Penduduk	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	3.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	3.01	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	02	3.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	3.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	02	3.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	02	4.01		Pelayanan Pendaftaran Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	4.01	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	02	4.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan			
2	12	02	4.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	02	4.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	1.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			
2	12	03	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	1.01	0002	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Terlaksananya Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	Dokumen
2	12	03	1.01	0003	Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Terlaksananya Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data atas Peristiwa Penting	Dokumen
2	12	03	1.01	0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Laporan
2	12	03	1.01	0005	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Tersusunnya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen
2	12	03	1.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			
2	12	03	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	1.02	0004	Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	1.02	0005	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	1.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	1.03	0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	3.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			
2	12	03	3.02	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	03	3.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	3.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03	3.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03	4.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	4.02	0006	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	03	4.03		Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			
2	12	03	4.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03	4.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
2	12	04	1.01		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	1.01	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersedianya Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dokumen
2	12	04	1.01	0002	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	12	04	1.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	1.02	0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	1.02	0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.02	0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Dokumen
2	12	04	1.02	0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	12	04	1.02	0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	Dokumen
2	12	04	1.02	0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	1.02	0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	1.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	1.03	0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Orang
2	12	04	3.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	3.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	04	3.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	3.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	04	3.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	04	4.02		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	4.02	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	04	4.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi			
2	12	04	4.03	0003	Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Jumlah Laporan Supervisi kegiatan verifikasi dan validasi Data Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	04	4.03	0004	Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi Provinsi	Jumlah Laporan Pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
2	12	05	1.01		Penyediaan Profil Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	05	1.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	Dokumen
2	12	05	1.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	Dokumen
2	12	05	3.01		Penyediaan Profil Kependudukan			
2	12	05	3.01	0003	Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	05	3.02		Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi			
2	12	05	3.02	0001	Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk	Dinas
2	12	05	4.01		Penyediaan Profil Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	05	4.01	0003	Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi Penyediaan Profil Kependudukan Provinsi Ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	12	05	4.02		Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi			
2	12	05	4.02	0001	Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Terlaksananya Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi	Jumlah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Yang Dibentuk	Dinas
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			
2	13	02	1.01		Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat			
2	13	02	1.01	0001	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dokumen
2	13	02	1.01	0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen
2	13	02	1.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Tersedianya Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Unit
2	13	02	3.02		Penataan Desa Adat			
2	13	02	3.02	0001	Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Tersusunnya Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota yang Disusun	Dokumen
2	13	02	4.02		Penataan Desa Adat			
2	13	02	4.02	0005	Penetapan pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Tersusunnya Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota	Jumlah Pedoman dan standar penyelenggaraan pemerintahan Kampung adat di wilayah kabupaten/kota yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
2	13	03	1.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
2	13	03	1.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	03	1.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	03	1.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen
2	13	03	3.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
2	13	03	3.01	0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	3.01	0005	Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	Terlaksananya Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	jumlah Laporan Hasil Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	03	4.01		Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi			
2	13	03	4.01	0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	03	4.01	0005	Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	Terlaksananya Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung	jumlah Laporan Hasil Pengawasan kerjasama Kampung dan lembaga kerjasama Kampung Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	13	04	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang
2	13	04	1.01	0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	04	1.01	0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	04	1.01	0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang
2	13	04	1.01	0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	0012	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Terlaksananya Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen
2	13	04	1.01	0013	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0017	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen
2	13	04	1.01	0018	Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	04	1.01	0019	Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	1.01	0020	Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	Desa
2	13	04	1.01	0021	Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan
2	13	04	1.01	0022	Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	04	3.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	13	04	3.01	0023	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung	terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	04	4.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2	13	04	4.01	0023	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung	terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah provinsi kepada kampung/kampung adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	1.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	1.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	13	05	1.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga
2	13	05	1.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	1.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen
2	13	05	1.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan
2	13	05	1.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan
2	13	05	1.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	1.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan
2	13	05	1.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
2	13	05	1.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga
2	13	05	3.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	3.01	0013	Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	05	3.01	0014	Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	05	3.01	0015	Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Menerima Penghargaan atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Instansi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	3.01	0016	Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Lembaga
2	13	05	3.01	0017	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	05	3.01	0018	Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	3.01	0019	Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Laporan
2	13	05	4.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	4.01	0013	Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	05	4.01	0014	Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan LKK/LAK di Provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	4.01	0015	Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Jumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Yang Menerima Penghargaan atas prestasi pembinaan dan pembimbingan yang dilakukan terhadap LKK/LAK	Instansi
2	13	05	4.01	0016	Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian Penghargaan kepada LKK/LAK yang memiliki prestasi sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Lembaga
2	13	05	4.01	0017	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di Provinsi Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	4.01	0018	Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Monitoring dan evaluasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan masyarakat hukum adat ke Kabupaten/Kota	Laporan
2	13	05	4.01	0019	Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Terlaksananya Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Pelaporan Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Masyarakat Hukum Adat di wilayah Kabupaten/Kota Ke Pemerintah Pusat	Laporan
2	13	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA			
2	13	06	3.01		Pengembangan Data/Informasi			
2	13	06	3.01	0001	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di 5 Wilayah Adat	Orang
2	13	06	3.01	0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Terlaksananya Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputan dan Publikasi Data DPMK	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.02		Pemberdayaan Masyarakat Kampung			
2	13	06	3.02	0001	Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Terlaksananya Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Jumlah Laporan Pelaksanaan Gelar Teknologi Tepat Guna Nasional	Laporan
2	13	06	3.02	0002	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Laporan
2	13	06	3.02	0003	Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Terlaksananya Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Jumlah dokumen hasil identifikasi Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Dokumen
2	13	06	3.03		Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung			
2	13	06	3.03	0001	Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Lomba Kampung/Kelurahan di 29 Kabupaten/Kota	Laporan
2	13	06	3.04		Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			
2	13	06	3.04	0001	Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) tingkat Provinsi dan Nasional	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.05		Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan			
2	13	06	3.05	0001	Fasilitasi, Asistensi dan Pembinaan Pemberdayaan Perempuan bersama Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Terlaksananya Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Jumlah Laporan Kunjungan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua	Laporan
2	13	06	3.06		Pemberdayaan Orang Asli Papua di wilayah adat			
2	13	06	3.06	0001	Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Terlaksananya identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Dokumen
2	13	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT			
2	13	07	4.01		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kampung			
2	13	07	4.01	0001	Pembangunan Sanggar PKK di Kampung	Terbangunnya Sanggar PKK di Kampung	Jumlah Sanggar PKK di Kampung	Unit
2	13	07	4.01	0002	Pelatihan dan bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di kampung	Terlaksananya Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelatihan dan Bantuan Mesin Jahit bagi Masyarakat dan Ibu PKK di Kampung	Orang
2	13	07	4.02		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Kampung			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.02	0001	Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat kampung	Terselenggaranya Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung	Jumlah Laporan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat Kampung	Laporan
2	13	07	4.02	0002	Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Terselenggaranya Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Jumlah Laporan Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Nasional	Laporan
2	13	07	4.03		Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung			
2	13	07	4.03	0001	Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan Dana Kampung	Terlaksananya Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung	Jumlah Laporan Evaluasi dan Monitoring P3MD, PPMD dan Penggunaan dana Kampung	Laporan
2	13	07	4.03	0002	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Terselenggaranya Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pembina Teknis Pemerintah Kampung (PTPK)	Orang
2	13	07	4.03	0003	Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Lomba Kampung dan Kelurahan Tingkat Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.03	0004	Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenagan Kampung Adat	Terlaksananya Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Penyusunan Penataan dan Kewenangan Kampung Adat	Orang
2	13	07	4.04		Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Lokal Kampung			
2	13	07	4.04	0001	Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha (Mama-Mama dan Pemuda)	Terselenggaranya Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Manajemen Pemasaran bagi Kelompok Usaha Papua (Mama - Mama dan Pemuda)	Orang
2	13	07	4.04	0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengadaan Barang dan Jasa bagi Pengusaha OAP	Orang
2	13	07	4.04	0003	Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Stimulasi Usaha Kuliner bagi Orang Asli Papua (OAP)	Orang
2	13	07	4.04	0004	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi	Tersedianya Air Bersih dan Sanitasi	Jumlah Unit Air Bersih dan Sanitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.04	0005	Penyedia Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Tersedianya Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Jumlah Orang yang memperoleh Bantuan Seni Budaya Orang Asli Papua	Orang
2	13	07	4.04	0006	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Tersedianya Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Jumlah Solar Sel bagi Masyarakat Kampung	Unit
2	13	07	4.04	0007	Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Tersedianya Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Jumlah Bahan Bangunan Rumah (BBR) Untuk Masyarakat di Kampung	Unit
2	13	07	4.04	0008	Pembangunan dan Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung	Terlaksananya Pembangunan dan Tersedianya Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung	Jumlah Bantuan Perlengkapan Sanggar TTG bagi Masyarakat di Kampung yang Terbangun dan Tersedia	Unit
2	13	07	4.05		Peningkatan Perencanaan Pelayanan SKPD			
2	13	07	4.05	0001	Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Teknis dan Gelar Potensi Daerah	Dokumen
2	13	07	4.05	0002	Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Terlaksananya Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Jumlah Dokumen Penyediaan Sistem Informasi Pembangunan Kampung Berbasis Teknologi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.06		Pengembangan Ekonomi Kampung			
2	13	07	4.06	0001	Bantuan Mesin Babat/Pemotong Rumput bagi Masyarakat di Kampung	Terlaksananya identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Jumlah dokumen hasil identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung di wilayah adat	Dokumen
2	13	07	4.06	0002	Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Terselenggaranya Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pendampingan Pengelolaan Kampung Wisata	Orang
2	13	07	4.06	0003	Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Terselenggaranya Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Jumlah orang yang Mengikuti Pelatihan dan Pemberian Simulasi bagi Kelompok Masyarakat Pesisir Papua di kampung	Orang
2	13	07	4.06	0004	Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Tersedianya Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Jumlah Bantuan Mesin Cetak Batu Bata dan Batu Tela	Unit
2	13	07	4.07		Pemberdayaan Masyarakat Kampung			
2	13	07	4.07	0001	Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Terlaksananya Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Jumlah dokumen hasil identifikasi Identifikasi potensi dan masalah pembangunan kampung	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.08		Pengembangan Data/Informasi			
2	13	07	4.08	0001	Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat di Wilayah Adat	Terlaksananya Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Mekanisme dan Tahapan Pembentukan Kampung Adat	Orang
2	13	07	4.08	0002	Pengolahan, Penginputan dan Publikasi DataDPMK	Terlaksananya Pengolahan, Penginputan danPublikasi Data DPMK	Jumlah Dokumen Hasil Pengolahan, Penginputandan Publikasi Data DPMK	Dokumen
2	13	08			PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ORANG ASLI PAPUA			
2	13	08	3.01		Pengelolaan Sarana dan Prasarana Wilayah Adat Orang Asli Papua			
2	13	08	3.01	0001	Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pembangunan Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Unit Rumah Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	0002	Penyediaan Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Tersedianya Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua	Jumlah Unit Infrastruktur Dasar Kampung dan Rumah Tangga Orang Asli Papua yang Disediakan	Unit
2	13	08	3.01	0003	Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembangunan Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Unit Pasar Mama-mama Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.01	0004	Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembangunan Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Unit Rumah Layak Huni Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	0005	Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pembangunan Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Unit Jaringan Internet di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Dibangun	Unit
2	13	08	3.01	0006	Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemanfaatan Potensi Kampung dan Pembangunan Ekonomi Kampung dan Kearifan Lokal di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.01	0007	FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Terlaksananya FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan FGD Isu Aktual dan Pembangunan Orang Asli Papua	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.01	0008	Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Benda Adat, Adat Istiadat dan Budaya Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.01	0009	Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Bimtek dan Supervisi Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Orang dari Lembaga Adat di 5 (Lima) Wilayah Adat yang mengikuti Bimtek dan Supervisi	Orang
2	13	08	3.01	0010	Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Terlaksananya Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan Pengurus di 5 (Lima) Wilayah Adat Provinsi Papua	Dokumen
2	13	08	3.01	0011	Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Wirausaha Pemula dan Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Wirausaha Pemula di 5 (Lima) Wilayah Adat yang Diidentifikasi dan Mengikuti Pelatihan Bisnis bagi Masyarakat Kampung	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.01	0012	Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Terlaksananya Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Jumlah Kajian Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga Orang Asli Papua	Dokumen
2	13	08	3.02		Pemberdayaan Orang Asli Papua			
2	13	08	3.02	0001	Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	0002	Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Orang Asli Papua di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	0003	Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Fasilitasi Orang Asli Papua dalam Pendidikan Sekolah Lanjutan dan Penerimaan Pekerjaan di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.02	0004	Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Terlaksananya Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi dan Masalah Pembangunan Kampung di 5 (Lima) Wilayah Adat	Dokumen
2	13	08	3.02	0005	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Khusus/Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur terkait Orang Asli Papua	Dokumen
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2	14	02	1.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0007	Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Dokumen
2	14	02	1.01	0013	Penguatan Pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang efektif	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan Kelompok Kerja Bangga Kencana yang Efektif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi kegiatan kelompok kerja Bangga Kencana tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan oleh provinsi	Kabupaten/Kota
2	14	02	1.01	0014	Fasilitasi pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	tersedianya fasilitasi penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah fasilitasi provinsi dalam penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Kab/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0018	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen
2	14	02	1.01	0019	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan untuk Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal	Dokumen
2	14	02	1.01	0020	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Terwujudnya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0021	Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi GDPK	Laporan
2	14	02	1.01	0022	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi	Dokumen
2	14	02	1.01	0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Daerah
2	14	02	1.01	0025	Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah kab/kota yang menerima Sosialisasi alat ukur Indeks Kepedulian terhadap isu Kependudukan (IKIK) serta advokasi pemanfaatan IKIK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	kabupaten/kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.01	0026	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan tingkat Provinsi	Jumlah Provinsi yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Dokumen
2	14	02	1.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Nonformal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Informal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal	Dokumen
2	14	02	1.01	0028	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi			
2	14	02	1.02	0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Tersedianya Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SLTA-MA, Jalur Nonformal dan Informal Pada Ormas Pengelola Kelompok Kegiatan Masyarakat	Organiasasi
2	14	02	1.02	0010	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat provinsi (Termasuk diseminasi hasil penyusunan profil, penetapan parameter, dan evaluasi parameter Pengendalian Penduduk dan KB dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah)	Jumlah Dokumen Profil program Bangga Kencana tingkat provinsi, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	1.02	0011	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen
2	14	02	1.02	0012	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Pemetaan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	Dokumen
2	14	02	1.02	0013	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Terlaksananya Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	Dokumen
2	14	02	3.03		Penyelarasan Kebijakan Kependudukan Pemerintah Daerah Provinsi Papua			
2	14	02	3.03	0001	Penyusunan Kebijakan Kependudukan OAP	Tersusunnya Kebijakan Kependudukan OAP	Jumlah Kebijakan Kependudukan OAP yang Disusun	Dokumen
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
2	14	03	1.01		Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.01	0001	Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Strategi Operasional Advokasi, Promosi Sesuai Kearifan Lokal	Laporan
2	14	03	1.01	0007	Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan dan Penyediaan Materi Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi dan Hak-Hak Reproduksi sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal	Dokumen
2	14	03	1.01	0009	Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Terlaksananya Promosi Penurunan Kehamilan yang tidak diinginkan	Jumlah Promosi Kehamilan yang tidak diinginkan	Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.01	0010	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana	Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Daerah
2	14	03	1.01	0011	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Digunakannya Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Laporan Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.01	0012	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Mitra Kerja	Daerah
2	14	03	1.01	0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	Dokumen
2	14	03	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.02	0001	Pengembangan Strategi Operasional dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terlaksananya Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi KeMasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Strategi Operasional dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Dokumen
2	14	03	1.02	0002	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi KeMasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	1.02	0004	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Bangga Kencana	Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Organisasi
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2	14	04	1.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	1.01	0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.01	0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga
2	14	04	1.01	0018	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Terlaksananya Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Jumlah dokumen Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan	Dokumen
2	14	04	1.01	0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.01	0020	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja	Daerah
2	14	04	1.01	0021	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Jumlah kelompok PIK-R yang mengikuti peningkatan kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)	Kelompok
2	14	04	1.01	0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Daerah
2	14	04	1.01	0025	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.01	0027	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Daerah
2	14	04	1.01	0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Laporan
2	14	04	1.01	0029	Penyusunan dan pengembangan kebijakan Pembangunan Keluarga tingkat daerah	Tersedianya kebijakan Pembangunan Keluarga tingkat daerah	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan Pembangunan Keluarga tingkat Daerah	Dokumen
2	14	04	1.02		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	1.02	0006	Fasilitasi pemerintah daedrah Kabupaten/Kota dalam Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kabupaten/kota yang mendapat fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung Keluarga Berkualitas	Kabupaten/Kota

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.02	0007	Fasilitasi kegiatan pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah fasilitasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga di tingkat provinsi dan kabupaten/kota	Laporan
2	14	04	1.02	0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	1.02	0010	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Terlaksananya Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Laporan
2	14	04	1.02	0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Laporan
2	14	04	3.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	3.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB	Terlaksananya fasilitasi pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di kampung KB	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan di Kampung KB	kelompok
2	14	04	3.01	0017	Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	4.01		Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	4.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di Kampung KB	Terlaksananya fasilitasi pembinaan Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) di kampung KB	Jumlah Bina Keluarga Remaja (BKR) yang mendapat fasilitasi pembinaan di Kampung KB	kelompok
2	14	04	4.01	0017	Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Terlaksananya Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Jumlah Pelaksanaan Sosialisasi dan Promosi 7 Dimensi Lansia Tangguh dan Pendampingan Lansia Jangka Panjang	Laporan
2	14	04	4.01	0018	Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Koordinasi pembinaan Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Kab/Kota
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2	15	02	1.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan dan sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi			
2	15	02	1.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Provinsi yang Terbangun	Unit
2	15	02	1.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	Unit
2	15	02	1.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	1.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	1.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B			
2	15	02	1.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B	Dokumen
2	15	02	1.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe B	Terlaksananya Pengawasan Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal Penumpang Tipe B yang diawasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit
2	15	02	1.03	0008	Penyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Terselenggaranya Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Jumlah Terminal yang Menyelenggaran Sistem Informasi Manajemen Terminal Penumpang Tipe B	Unit
2	15	02	1.03	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe B	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe B yang terpenuhi.	Orang
2	15	02	1.03	0010	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe B yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe B yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit
2	15	02	1.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	1.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.05	0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.05	0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Dokumen Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.05	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.05	0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.05	0006	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.05	0007	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Dilaksanakan Pengadaan dan Pemasangan	Unit
2	15	02	1.06		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi			
2	15	02	1.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
2	15	02	1.06	0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Laporan
2	15	02	1.06	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang
2	15	02	1.06	0007	Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen
2	15	02	1.07		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.07	0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	15	02	1.07	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan
2	15	02	1.07	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Provinsi	Laporan
2	15	02	1.07	0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan
2	15	02	1.07	0006	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.07	0007	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit
2	15	02	1.07	0008	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Dokumen
2	15	02	1.07	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan / Dokumen
2	15	02	1.07	0010	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	15	02	1.07	0011	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Lokasi
2	15	02	1.07	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Terbangunnya implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.07	0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen
2	15	02	1.07	0014	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Penumpang Tipe B	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan
2	15	02	1.07	0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	1.08		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.08	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan KeTersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi	Laporan
2	15	02	1.08	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Unit
2	15	02	1.09		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.09	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.09	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.10		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	1.10	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.10	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.10	0005	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Kebijakan Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.11	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.11	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.12		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya Melampaui Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.12	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.12	0003	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.12	0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.13		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	02	1.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.14	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.14	0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit
2	15	02	1.15		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	15	02	1.15	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	1.15	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
2	15	02	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	02	3.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	3.05	0006	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang dilaksanakan	Laporan
2	15	02	3.17		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ			
2	15	02	3.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang
2	15	02	4.05		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	4.05	0006	Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia	Terlaksananya Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan provinsi berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik Indonesia yang dilaksanakan	Laporan
2	15	02	4.17		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ			
2	15	02	4.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang
2	15	02	6.04		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A			
2	15	02	6.04	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	6.04	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Tipe A (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	6.04	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe A	Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe A	Jumlah Terminal Penumpang Tipe A yang diawasi	Laporan
2	15	02	6.04	0007	Penyelenggaran sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe A	Terselenggaranya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe A	Jumlah terminal yang menyelenggaran sistem informasi manajemen terminal tipe A	Unit
2	15	02	6.04	0008	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe A yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe A yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe A yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit
2	15	02	6.04	0009	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe A	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe A yang terpenuhi.	Orang
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Wilayah dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Daerah Provinsi			
2	15	03	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Laut Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Unit
2	15	03	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	03	1.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Jumlah Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Perizinan	Unit
2	15	03	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	03	1.03		Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Bersangkutan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izinangkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Memenuhi Syarat Serizinan	Jumlah Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Semenuhi Syarat Perizinan	Unit
2	15	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	03	1.04		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.04	0002	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Dokumen
2	15	03	1.05		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.05	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	1.06		Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen terkait Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Laporan
2	15	03	1.07		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.07	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	1.07	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	1.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.08	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.08	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Dokumen
2	15	03	1.08	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.09		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.09	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Memenuhi Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian	Unit
2	15	03	1.09	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Terbangun	Unit
2	15	03	1.09	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	Unit
2	15	03	1.09	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.09	0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan Regional	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Regional yang Tersedia	Unit
2	15	03	1.10		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.10	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang memenuhi persyaratan perizinan	Laporan
2	15	03	1.10	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Terbangun	Unit
2	15	03	1.10	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang dilakukan Pengoperasian dan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.10	0006	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang
2	15	03	1.10	0007	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang
2	15	03	1.10	0008	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.10	0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit
2	15	03	1.11		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.11	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.11	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.12		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.12	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.13		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	1.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang memenuhi Persyaratan Izin Pengoperasian Selama 24 Jam dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit
2	15	03	1.13	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.14		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.15		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	1.16		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	1.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	1.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional	Laporan
2	15	03	3.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	3.08	0004	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Terlaksananya penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan	Laporan
2	15	03	3.10		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar D			
2	15	03	3.10	0006	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	3.17		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	3.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang
2	15	03	4.08		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional			
2	15	03	4.08	0004	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Terlaksananya penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional	Jumlah Laporan penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan rencana induk pelabuhan dan rencana induk pelabuhan nasional yang dilaksanakan	Laporan
2	15	03	4.10		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan antar D			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	4.10	0007	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Tarif Angkutan sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan
2	15	03	4.17		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran			
2	15	03	4.17	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
2	15	04	3.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
2	15	04	3.01	0003	Pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Penetapan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Jumlah Rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Rute

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.01	0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	3.01	0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia	Laporan
2	15	04	3.01	0006	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	04	3.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	3.02		Pembangunan Bandar Udara			
2	15	04	3.02	0002	Pembangunan Bandar Udara	Terbangunnya bandar udara	Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit
2	15	04	3.02	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	Unit/Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	3.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan			
2	15	04	3.03	0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Tersedianya rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Jumlah rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Dokumen
2	15	04	3.03	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Laporan
2	15	04	3.03	0003	Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersosialisasi	Dokumen
2	15	04	3.03	0004	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang terkendali	Dokumen
2	15	04	3.04		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang Penerbangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.04	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang Penerbangan	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang Penerbangan	orang
2	15	04	3.05		Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan			
2	15	04	3.05	0001	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk	Unit
2	15	04	3.05	0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen
2	15	04	3.06		Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.06	0001	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah yang Tersusun	Dokumen
2	15	04	3.08		Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi			
2	15	04	3.08	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi yang disediakan	Unit
2	15	04	3.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	04	3.10		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.10	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang
2	15	04	4.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi			
2	15	04	4.01	0003	Pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Penetapan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Jumlah Rute penerbangan baru ke dan dari Daerah di wilayah provinsi	Rute
2	15	04	4.01	0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	4.01	0005	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia	Laporan
2	15	04	4.01	0006	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	4.02		Pembangunan Bandar Udara			
2	15	04	4.02	0002	Pembangunan Bandar Udara	Terbangunnya bandar udara	Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit
2	15	04	4.02	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	Unit/Paket
2	15	04	4.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan			
2	15	04	4.03	0001	Rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Tersedianya rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Jumlah rekomendasi penetapan lokasi bandar udara	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.03	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Laporan
2	15	04	4.03	0003	Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersosialisasi	Dokumen
2	15	04	4.03	0004	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang terkendali	Dokumen
2	15	04	4.04		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang Penerbangan			
2	15	04	4.04	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang Penerbangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang Penerbangan	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang Penerbangan	orang
2	15	04	4.05		Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.05	0001	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk	Unit
2	15	04	4.05	0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen
2	15	04	4.06		Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan			
2	15	04	4.06	0001	Penyusunan Peraturan Daerah tentang Besaran Tarif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah	Jumlah Peraturan Daerah tentang Taif Jasa Kebandarudaraan untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah yang Tersusun	Dokumen
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
2	15	05	1.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	1.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	1.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan
2	15	05	1.01	0004	Penyediaan PeraIatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Tersedianya PeraIatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Provinsi	Unit
2	15	05	1.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	1.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan
2	15	05	1.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	05	1.03	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	05	1.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			
2	15	05	1.04	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi	Jumlah Dokumen kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
2	15	05	1.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	1.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	05	1.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.06	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
2	15	05	1.06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	15	05	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	1.07	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	1.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	4.09		Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi			
2	15	05	4.09	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi yang disediakan	Unit
2	15	05	4.09	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Provinsi	Laporan
2	15	05	4.10		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian			
2	15	05	4.10	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2	16	02	1.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	1.01	0014	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan
2	16	02	1.01	0015	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten
2	16	02	1.01	0016	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang
2	16	02	1.01	0017	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase
2	16	02	1.01	0018	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	1.01	0019	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen
2	16	02	1.01	0020	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan
2	16	02	1.01	0021	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas
2	16	02	1.01	0022	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan
2	16	02	1.01	0023	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	1.01	0024	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
2	16	03	1.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	1.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah	Dokumen
2	16	03	1.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	1.02	0013	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	0019	Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	kabupaten/kota
2	16	03	1.02	0020	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi
2	16	03	1.02	0021	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan
2	16	03	1.02	0023	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	0024	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen
2	16	03	1.02	0030	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	perangkat daerah
2	16	03	1.02	0031	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Provinsi Cerdas	Dokumen
2	16	03	1.02	0032	Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	0033	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi
2	16	03	1.02	0034	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen
2	16	03	1.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	1.02	0036	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi
2	16	03	1.02	0037	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan
2	16	03	3.01		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			
2	16	03	3.01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	Tersedianya start-up digital di wilayah provinsi yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit
2	16	03	3.01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase
2	16	03	3.01	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang
2	16	03	4.01		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	4.01	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah provinsi	Tersedianya start-up digital di wilayah provinsi yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah provinsi yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit
2	16	03	4.01	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital (Mencakup sektor prioritas dan UMKM)	Meningkatnya adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah provinsi Papua	Persentase
2	16	03	4.01	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	02	1.01	0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	02	1.02	0003	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	Unit Usaha
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	03	1.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	03	1.02	0002	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	04	1.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
2	17	05	1.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	05	1.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	17	06	1.01	0002	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha
2	17	06	1.01	0003	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	1.01	0004	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat
2	17	06	1.01	0005	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang Dipulihkan Usahanya	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	1.01	0006	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha
2	17	06	1.01	0007	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	1.01	0008	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha
2	17	06	1.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Koperasi dengan Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diberdayakan	Unit Usaha
2	17	07			PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	1.01	0001	Menumbuhkembangkan UMKM untuk Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Berkembangnya UMKM Menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Tangguh dan Mandiri Sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang
2	17	07	1.01	0003	Pemulihan Usaha-Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Kecil dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	1.01	0004	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0005	Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Kecil	Jumlah Unit Usaha Kecil Terdata	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang
2	17	07	1.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil Dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0008	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	1.01	0009	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0010	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standarisasi Usaha	Jumlah Usaha Kecil yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	1.01	0012	Perizinan Barusaha bagi Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Mengakses Perizinan Berusaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	3.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	3.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/Perkada
2	17	07	3.03		Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			
2	17	07	3.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	UMKM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	4.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM			
2	17	07	4.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/ Perkada
2	17	07	4.03		Mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	4.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM OAP yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	UMKM
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2	17	08	1.01		Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah			
2	17	08	1.01	0001	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha
2	17	08	1.01	0002	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Literasi Hukum dan Bantuan Penyelesaian Perkara bagi Pelaku UMKM	Jumlah Pelaku UMKM yang Memahami Literasi Hukum	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	08	1.01	0003	Pengembangan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Kecil menjadi Usaha menengah melalui pendampingan, kemitraan, perluasan pasar, akses pembiayaan dan investasi, pengembangan SDM, dan/atau kegiatan lainnya	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	08	1.01	0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga
2	17	08	1.01	0005	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Wirausaha yang Difasilitasi	Orang
2	17	08	1.01	0006	Fasilitasi Inkubator Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha Kecil dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Kecil yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	08	3.02		Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	08	3.02	0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Terfasilitasinya UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok dan bermitra dengan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	UMKM
2	17	08	4.02		Memfasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.			
2	17	08	4.02	0001	Peningkatan Kemitraan Usaha melalui rantai pasok antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar	Terfasilitasinya UMKM untuk masuk ke dalam rantai pasok dan bermitra dengan Usaha Besar	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terfasilitasi untuk bermitra dengan Usaha Menengah dan Besar	UMKM
2	17	09			PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI			
2	17	09	3.01		Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi			
2	17	09	3.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok Pra Koperasi
2	17	09	3.02		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi			
2	17	09	3.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	09	4.01		Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.			
2	17	09	4.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok Pra Koperasi
2	17	09	4.02		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi			
2	17	09	4.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2	18	02	1.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	02	1.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	18	02	1.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	1.01	0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen
2	18	02	1.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			
2	18	02	1.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Dokumen
2	18	02	1.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah
2	18	02	1.02	0004	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen
2	18	02	1.02	0005	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Provinsi	Dokumen
2	18	02	3.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	3.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha
2	18	02	3.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi			
2	18	02	3.04	0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Badan Usaha
2	18	02	3.05		Kemitraan Usaha Nasional			
2	18	02	3.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM
2	18	02	3.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	3.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	18	02	4.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			
2	18	02	4.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha
2	18	02	4.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi			
2	18	02	4.04	0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Provinsi	Badan Usaha
2	18	02	4.05		Kemitraan Usaha Nasional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	4.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM
2	18	02	4.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.			
2	18	02	4.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi yang Dilaksanakan	Laporan
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	1.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	03	1.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	03	1.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2	18	04	1.01		Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	04	1.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	1.01	0007	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang Mendapat Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah	Kegiatan usaha
2	18	04	1.01	0008	Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	1.02		Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	18	04	1.02	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	1.02	0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	1.02	0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	1.02	0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	1.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	05	1.01	0004	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan usaha
2	18	05	1.01	0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	05	1.01	0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
2	18	06	1.01		Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			
2	18	06	1.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen
2	18	06	3.02		Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	06	3.02	0001	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Tersedianya Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Helpdesk
2	18	06	4.02		Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi			
2	18	06	4.02	0001	Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Tersedianya Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Jumlah Pembinaan dan Pendampingan Optimalisasi Pengelolaan Data dan Informasi Penanaman Modal melalui Sistem Pengolahan dan Penyajian Data dan Informasi Penanaman Modal di Wilayah Provinsi	Helpdesk
2	18	07			PROGRAM KERJA SAMA PENANAMAN MODAL			
2	18	07	3.01		Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	07	3.01	0001	Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi yang telah Disusun	Dokumen
2	18	07	3.02		Dukungan Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi			
2	18	07	3.02	0001	Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
2	18	07	3.02	0002	Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Tercapainya Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	18	07	3.03		Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip Saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	07	3.03	0001	Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.	Terlaksananya Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
2	18	07	4.01		Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi			
2	18	07	4.01	0001	Penyiapan Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Materi Kerja sama dengan Dunia Usaha sesuai Kewenangan Provinsi yang telah Disusun	Dokumen
2	18	07	4.02		Dukungan Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	07	4.02	0001	Penyiapan Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Tersusunnya Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Bahan Posisi Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi yang Disusun	Dokumen
2	18	07	4.02	0002	Partisipasi Aktif Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Tercapainya Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Jumlah Kesepakatan Dalam Kerja sama Internasional di Bidang Penanaman Modal sesuai Kewenangan Provinsi	Dokumen
2	18	07	4.03		Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip Saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	07	4.03	0001	Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Koordinasi Kerja sama Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan/atau Bekerja Sama dengan Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dengan Prinsip saling Menguntungkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
2	19	02	1.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi			
2	19	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.01	0005	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit
2	19	02	1.01	0010	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang
2	19	02	1.01	0011	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.01	0012	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	Persentase
2	19	02	1.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang
2	19	02	1.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	1.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang
2	19	02	1.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi			
2	19	02	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase organisasi kepemudaan yang diberdayakan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	Persentase
2	19	02	1.02	0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
2	19	03	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			
2	19	03	1.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Berkembangnya Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha yang Dikembangkan	Unit
2	19	03	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Terselenggaranya Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	1.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	Unit
2	19	03	1.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga			
2	19	03	1.02	0004	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Orang
2	19	03	1.02	0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Kegiatan
2	19	03	1.02	0006	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	Kegiatan
2	19	03	1.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	1.03	0001	Seleksi Atlet Daerah	Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang
2	19	03	1.03	0006	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang
2	19	03	1.03	0007	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Pelatda
2	19	03	1.03	0008	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	Dokumen
2	19	03	1.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	1.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
2	19	03	1.04	0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Dokumen
2	19	03	1.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Terlaksananya Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Jumlah dokumen pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di provinsi	Dokumen
2	19	03	3.05		Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi			
2	19	03	3.05	0001	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga
2	19	03	4.05		Fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	4.05	0001	Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitasi Induk Cabang Olahraga atau Organisasi Keolahragaan dalam menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Provinsi	Lembaga
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
2	19	04	1.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			
2	19	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan termanfaatkan	Dokumen
2	19	04	1.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi
2	19	04	1.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi yang Berkualitas	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	04	1.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Provinsi	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Provinsi	Jumlah SDM Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
2	19	04	1.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Provinsi	Laporan
2	19	04	1.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
2	19	04	1.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Provinsi yang terkelola dan termanfaatkan	Unit
2	19	04	1.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organiasasi
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2	20	02	1.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	20	02	1.01	0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%
2	20	02	1.01	0017	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%
2	20	02	1.01	0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%
2	20	02	1.01	0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral	Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%
2	20	02	1.01	0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	20	02	1.01	0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral	Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2	21	02	1.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
2	21	02	1.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan
2	21	02	1.01	0006	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21	02	1.01	0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan
2	21	02	1.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	Dokumen
2	21	02	1.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21	02	1.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	1.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	22	02	1.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang
2	22	02	1.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
2	22	02	1.01	0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	1.01	0011	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	Lembaga
2	22	02	1.01	0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen
2	22	02	1.01	0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kegiatan
2	22	02	1.01	0014	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	Orang
2	22	02	1.01	0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PPKD Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	Laporan
2	22	02	1.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	1.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	1.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan
2	22	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat
2	22	02	1.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	22	02	1.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	1.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang
2	22	02	1.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit
2	22	02	3.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	22	02	3.01	0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	3.01	0005	Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terintegrasinya Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	3.01	0006	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Kab/Kota	Laporan
2	22	02	4.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah Provinsi			
2	22	02	4.01	0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	4.01	0005	Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terintegrasinya Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	4.01	0006	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya laporan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan PPKD Kab/Kota	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPKD Kab/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
2	22	03	1.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	03	1.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang
2	22	03	1.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat
2	22	03	1.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
2	22	04	1.01		Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	04	1.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang
2	22	04	1.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit
2	22	04	1.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	Dokumen
2	22	04	1.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal	Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah Lokal Jumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	Dokumen
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
2	22	05	1.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	1.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek
2	22	05	1.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	1.01	0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek
2	22	05	1.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	1.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	Objek
2	22	05	1.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	05	1.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek
2	22	05	1.02	0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya	Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
2	22	05	1.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			
2	22	05	1.03	0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Terbitnya Perizinan Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek
2	22	05	1.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	3.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	3.01	0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Orang
2	22	05	3.01	0006	Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Terlaksananya Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Cagar Budaya
2	22	05	3.01	0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapakan	Cagar Budaya
2	22	05	3.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	3.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia
2	22	05	3.02	0006	Pelaksanaan Upaya Pengembalian cagar budaya yang berada diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia	Terlaksananya Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia	Jumlah Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	3.02	0007	Penyelenggaraan Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Jumlah Kegiatan Promosi Cagar bBudaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Kegiatan
2	22	05	3.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			
2	22	05	3.03	0003	Penerbitan izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi	Terbitnya izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi	Jumlah izin pemugaran, pengembangan, pengubahan fungsi ruang, pemanfaatan cagar budaya peringkat provinsi yang diterbitkan	Dokumen
2	22	05	3.04		Penetapan Sistem Zonasi			
2	22	05	3.04	0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Telaksananya Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih yang Ditetapkan	Dokumen
2	22	05	4.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	4.01	0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	4.01	0006	Penetapan itus atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Terlaksananya Penetapan Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Berasa di 2 (dua) Kabupaten/Kota atau Lebih	Cagar Budaya
2	22	05	4.01	0007	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Ditetapakan	Cagar Budaya
2	22	05	4.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi			
2	22	05	4.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Warisan Budaya Dunia yang Dimiliki atau Dikuasai Pemerintah Daerah Provinsi yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia
2	22	05	4.02	0006	Pelaksanaan Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang Berada Diluar Provinsi Papuadalam Wilayah Republik Indonesia	Terlaksananya Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang berada Diluar Provinsi Papuadalam wilayah Republik Indonesia	Jumlah Upaya Pengembalian Cagar Budaya yang berada Diluar Provinsi Papuadalam Wilayah Republik Indonesia yang Dilaksanakan	Laporan
2	22	05	4.02	0007	Penyelenggaraan kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Terselenggaranya Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Jumlah Kegiatan Promosi Cagar Budaya di Tingkat Lokal, Nasional dan Internasional	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	4.02	0009	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	Objek
2	22	05	4.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi			
2	22	05	4.03	0003	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Provinsi yang Diterbitkan	Dokumen
2	22	05	4.04		Penetapan Sistem Zonasi			
2	22	05	4.04	0001	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atauBerada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Telaksananya Penetapan sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkannya atau Berada di 2 (dua) Kabupaten/ Kota atau Lebih yang Ditetapkan	Dokumen
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
2	22	06	1.01		Pengelolaan Museum Provinsi			
2	22	06	1.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	06	1.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang
2	22	06	1.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Unit
2	22	06	1.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	Unit
2	22	06	1.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit
2	22	06	1.01	0006	Revitalisasi Taman Budaya	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi	Unit
2	22	06	1.01	0007	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	06	1.01	0008	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Orang
2	22	06	1.01	0010	Pengelolaan Operasional Museum	Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	Layanan
2	22	06	1.01	0011	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Jumlah kegiatan publik di taman budaya	Kegiatan
2	22	06	1.01	0012	Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya	Layanan
2	22	06	1.01	0013	Pengelolaan Koleksi Museum	Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Unit
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)			
2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			
2	22	07	7.01	0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Laporan
2	22	07	7.01	0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Tersedianya Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.01	0003	Sosialisasi Adat Istiadat	Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang
2	22	07	7.01	0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina	Keluarga
2	22	07	7.01	0005	Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Tersedianya Pengadaan Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Jumlah Buku-Buku Tentang Adat Aceh	Buku
2	22	07	7.01	0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang dipublikasikan	Dokumen
2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			
2	22	07	7.02	0001	Pelatihan Peradilan Adat	Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	Orang
2	22	07	7.02	0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Dokumen
2	22	07	7.02	0003	Pembinaan Mediasi Adat	Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.02	0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Orang
2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			
2	22	07	7.03	0001	Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Orang
2	22	07	7.03	0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Orang
2	22	07	7.03	0003	Rapat Kerja MAA	Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	Dokumen
2	22	07	7.03	0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Eksemplar
2	22	07	7.03	0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	Orang
2	22	07	7.03	0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang terdata dan Terdokumentasi	Kasus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.03	0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	Unit
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen
2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra	Laporan
2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit
2	22	08	5.02		Perlindungan dan Konservasi Arsip Kraton dan Kadipaten			
2	22	08	5.02	0001	Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Perpustakaan dan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Koleksi Perpustakaan Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten yang Dikelola	Unit
2	22	08	5.02	0002	Pengelolaan Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Arsip Bernilai Sejarah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.02	0003	Pengelolaan Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Tersedianya Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Jumlah Koleksi dan Pengembangan Literasi Budaya	Unit
2	22	08	5.03		Penguatan Museum Sonobudoyo			
2	22	08	5.03	0001	Pengelolaan Museum Sonobudoyo	Tersedianya Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikelola	Unit
2	22	08	5.03	0002	Pengembangan Museum Sonobudoyo	Terlaksananya Pengembangan Museum Sonobudoyo	Jumlah Museum Sonobudoyo yang Dikembangkan	Unit
2	22	08	5.04		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
2	22	08	5.04	0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek
2	22	08	5.04	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.04	0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang masuk Nominasi	Objek
2	22	08	5.05		Pengelolaan Taman Budaya			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.05	0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Yogyakarta	Jumlah Taman Budaya Yogyakarta yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.06	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit
2	22	08	5.06	0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek
2	22	08	5.06	0003	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Tersedianya Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.06	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit
2	22	08	5.07		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.07	0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan ****)	Laporan
2	22	08	5.07	0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Terbangunnya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen
2	22	08	5.08		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			
2	22	08	5.08	0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan
2	22	08	5.08	0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.08	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit
2	22	08	5.08	0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit
2	22	08	5.08	0005	Pengembangan Budaya Bahari	Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.08	0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.08	0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen
2	22	08	5.09		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			
2	22	08	5.09	0001	Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Desa Budaya	Jumlah Desa Budaya yang Dibina dan Dikembangkan	Desa
2	22	08	5.09	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga
2	22	08	5.09	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan
2	22	08	5.09	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang
2	22	08	5.09	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.09	0006	Gelar Budaya Yogyakarta	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.09	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen
2	22	08	5.09	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang
2	22	08	5.09	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan
2	22	08	5.09	0010	Selendang Sutera	Tersedianya Selendang Sutera	Jumlah Laporan Selendang Sutera	Laporan
2	22	08	5.09	0011	Penyelenggaraan Even Penggiat Seni	Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan
2	22	08	5.09	0012	Gelar Seni Budaya Daerah	Terselenggaranya Gelar Seni Budaya Daerah	Jumlah Laporan Gelar Seni Budaya Daerah	Laporan
2	22	08	5.09	0013	Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	Terlaksananya Pembinaan dan Pelatihan Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta	Jumlah Objek Seni dan Budaya Tradisional Yogyakarta yang Dibina	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.09	0014	Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Terlaksananya Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Laporan Penguatan Lembaga Pelestari Budaya	Laporan
2	22	08	5.09	0015	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan
2	22	08	5.09	0016	Pembinaan Jagawarga	Terlaksananya Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang
2	22	08	5.09	0017	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan
2	22	08	5.09	0018	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Terlaksananya Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga
2	22	08	5.09	0019	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan perekonomiannya	Orang
2	22	08	5.09	0020	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan
2	22	08	5.09	0021	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.09	0022	Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Terlaksananya Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Jumlah Laporan Revitalisasi Budaya Gotong Royong Untuk Pemberdayaan Ekonomi Desa	Laporan
2	22	08	5.09	0023	Penumbuhan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Terlaksananya Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Jumlah Dokumen terkait Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial	Dokumen
2	22	08	5.10		Pendidikan Berbasis Budaya			
2	22	08	5.10	0001	Pembinaan Muatan Lokal	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan
2	22	08	5.10	0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.10	0003	Kependidikan Kepramukaan	Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan	Jumlah Orang Mengikuti kegiatan Kependidikan Kepramukaan	Orang
2	22	08	5.10	0004	Penyelenggaraan Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Terselenggaranya Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Jumlah Orang Mengikuti Akademi Komunitas Seni dan Budaya Yogyakarta	Orang
2	22	09			PROGRAM PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT BALI			
2	22	09	8.01		Pembinaan Kelembagaan Desa Adat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	09	8.01	0001	Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemerintahan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina pemerintahannya	Desa
2	22	09	8.01	0002	Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Terlaksananya Fasilitasi Produk Hukum Desa Adat	Jumlah Produk Hukum Desa Adat	Dokumen
2	22	09	8.01	0003	Pembinaan Tata Kelola Keuangan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Tata Kelola Usaha Bidang Keuangannya	Desa
2	22	09	8.02		Pembinaan Tata Kelola Perekonomian Desa Adat			
2	22	09	8.02	0001	Pembinaan Tata Kelola Usaha Bidang Keuangan Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa
2	22	09	8.02	0002	Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Tata Kelola Bidang Perekonomian Desa Adat	Jumlah Desa Adat yang Dibina Pengelolaan Perekonomiannya	Desa
2	22	09	8.02	0003	Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Lembaga yang menjalin Kerja Sama	Lembaga
2	22	09	8.03		Penyelenggaraan Desa Adat			
2	22	09	8.03	0001	Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Parahyangan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Parahyangan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	09	8.03	0002	Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Pawongan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pawongan	Laporan
2	22	09	8.03	0003	Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyelenggaraan Palemahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Palemahan	Laporan
2	22	09	8.04		Pembinaan Sumber Daya Manusia			
2	22	09	8.04	0001	Pembinaan Prajuru Desa Adat	Terlaksananya Pembinaan Prajuru Desa Adat	Jumlah Prajuru Desa Adat yang Dibina	Orang
2	22	09	8.04	0002	Pembinaan Pendidikan Pasraman	Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Pasraman	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pendidikan Pasraman	Orang
2	22	09	8.04	0003	Pembinaan SDM Lembaga Adat	Terfasilitasinya Pembinaan SDM Lembaga Adat	Jumlah SDM Lembaga Adat yang Dibina	Orang
2	22	10			PROGRAM PERFILMAN NASIONAL			
2	22	10	3.01		Pendukungan Ekositem Perfilman Daerah di Provinsi			
2	22	10	3.01	0001	Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi	Jumlah Pembinaan Insan perfilman daerah di Provinsi yang dilaksanakan	Orang
2	22	10	4.01		Pendukungan Ekositem Perfilman Daerah di Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	10	4.01	0001	Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi	Jumlah Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Provinsi yang Dilaksanakan	Orang
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2	23	02	1.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi			
2	23	02	1.01	0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Perpustakaan
2	23	02	1.01	0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	1.01	0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Orang
2	23	02	1.01	0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.01	0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	1.01	0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar
2	23	02	1.01	0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Dokumen
2	23	02	1.01	0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Terlaksananya Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Nilai
2	23	02	1.01	0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Indeks
2	23	02	1.01	0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.01	0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan
2	23	02	1.01	0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen
2	23	02	1.01	0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	1.02		Pembudayaan Gemar Membaca	Tingkat Daerah Provinsi		
2	23	02	1.02	0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	Lokus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	1.02	0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Perpustakaan
2	23	02	1.02	0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Orang
2	23	02	1.02	0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	1.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang
2	23	02	3.03		Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	3.03	0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran IPLM	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks
2	23	02	4.03		Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
2	23	02	4.03	0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran IPLM	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
2	23	03	1.01		Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi			
2	23	03	1.01	0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	1.01	0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Penerbit
2	23	03	1.02		Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah			
2	23	03	1.02	0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah	Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	Entry
2	23	03	1.02	0002	Penerbitan Bibliografi Daerah	Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	Naskah
2	23	03	1.03		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi			
2	23	03	1.03	0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	1.03	0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang
2	23	03	1.04		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2	23	03	1.04	0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar
2	23	03	1.04	0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Eksemplar
2	23	03	3.04		Penetapan kebijakan pelestarian koleksi provinsi			
2	23	03	3.04	0001	Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Pelestarian Koleksi Tingkat Provinsi	Jumlah Kebijakan Pelestarian Koleksi yang disusun tingkat Provinsi Papua	Kebijakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	3.04	0002	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi	Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi Papua	Orang
2	23	03	4.04		Penetapan kebijakan pelestarian koleksi provinsi			
2	23	03	4.04	0001	Penyusunan Kebijakan Bidang Perpustakaan tingkat Provinsi	Tersusunnya Kebijakan Pelestarian Koleksi Tingkat Provinsi	Jumlah Kebijakan Pelestarian Koleksi yang disusun tingkat Provinsi Papua	Kebijakan
2	23	03	4.04	0002	Sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi	Terlaksananya sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi	Jumlah peserta sosialisasi Kebijakan Bidang Perpustakaan Tingkat Provinsi Papua	Orang
2	23	04			PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN			
2	23	04	3.01		Peningkatan Perpustakaan Terakreditasi			
2	23	04	3.01	0001	Peningkatan Kapasitas Assessor	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Assessor	Jumlah assesor yang ditingkatkan kapasitasnya	orang
2	23	04	3.01	0002	Sosialisasi pelaksanaan akreditasi	Terselenggaranya sosialisasi akreditasi perpustakaan tingkat provinsi	Jumlah perpustakaan yang mengikuti sosialisasi akreditasi	Perpustakaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	04	3.01	0003	Pelaksanaan akreditasi perpustakaan	Terlaksananya akreditasi perpustakaan di wilayah provinsi	Jumlah perpustakaan yang diakreditasi	perpustakaan
2	23	04	4.01		Peningkatan pustakawan tersertifikasi			
2	23	04	4.01	0001	Peningkatan Kapasitas Assessor Sertifikasi Pustakawan	Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas Assessor Sertifikasi Pustakawan	Jumlah assesor yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	23	04	4.01	0002	Sosialisasi sertifikasi pustakawan	Terselenggaranya sosialisasi sertifikasi pustakawan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi sertifikasi pustakawan	Orang
2	23	04	4.01	0003	Penyelenggaraan sertifikasi pustakawan	Terselenggaranya sertifikasi pustakawan	jumlah pustakawan yang disertifikasi	orang
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			
2	24	02	1.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi			
2	24	02	1.01	0004	Penyusutan Arsip Dinamis	Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	Arsip
2	24	02	1.01	0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi	Terlaksananya Alih Media Arsip dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	1.01	0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis	Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	Arsip
2	24	02	1.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Terlaksananya pemilihan arsiparis teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	Orang
2	24	02	1.01	0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi	Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi
2	24	02	1.01	0009	Penyusunan Database Arsiparis	Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	Dokumen
2	24	02	1.01	0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Unit
2	24	02	1.01	0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	1.01	0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga
2	24	02	1.01	0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	Lembaga
2	24	02	1.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi			
2	24	02	1.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	Arsip
2	24	02	1.02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	Orang
2	24	02	1.02	0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	1.02	0005	Akuisisi Arsip Statis	Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	Arsip
2	24	02	1.02	0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	terlaksananya akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	Arsip
2	24	02	1.03		Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi			
2	24	02	1.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Pengguna
2	24	02	1.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Laporan
2	24	02	3.04		Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	3.04	0001	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Laporan
2	24	02	3.04	0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan	Lembaga
2	24	02	3.06		Pengawasan kearsipan di provinsi			
2	24	02	3.06	0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Jumlah perangkat daerah provinsi yang diakukan pengawasan	Instansi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	3.06	0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di provinsi	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah provinsi	Jumlah badan usaha milik daerah provinsi yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	02	3.06	0003	Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	02	4.06		Pengawasan kearsipan di provinsi			
2	24	02	4.06	0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi	Jumlah perangkat daerah provinsi yang diakukan pengawasan	Instansi
2	24	02	4.06	0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di provinsi	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah provinsi	Jumlah badan usaha milik daerah provinsi yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	02	4.06	0003	Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
2	24	03	1.01		Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.01	0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas
2	24	03	1.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip
2	24	03	1.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi			
2	24	03	1.02	0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	1.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	1.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Daftar
2	24	03	1.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Arsip
2	24	03	1.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota	Arsip
2	24	03	1.04		Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip
2	24	03	1.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip
2	24	03	1.05		Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang			
2	24	03	1.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	Arsip
2	24	03	1.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	1.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
2	24	04	1.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi			
2	24	04	1.01	0004	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkanJumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan ditetapkan	SOP
2	24	04	1.01	0005	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Tersedianya Daftar Arsip Hasil Penyediaan dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip
2	24	05			PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI			
2	24	05	3.01		Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi			
2	24	05	3.01	0001	Pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi	Terlaksananya akreditasi lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi	Jumlah lembaga pelatihan kearsipan di wilayah provinsi yang diakreditasi	Sertifikat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	05	3.03		Pemberian akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi			
2	24	05	3.03	0001	Pelaksanaan akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	Telaksananya akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diakreditasi	Sertifikat
2	24	05	3.05		Pelaksanaan sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi			
2	24	05	3.05	0001	Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Terselenggaranya Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertfikasi	orang
2	24	05	4.04		Pemberian akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi			
2	24	05	4.04	0001	Pelaksanaan akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	Telaksananya akreditasi unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah unit kearsipan dan lembaga kearsipan kabupaten/kota di wilayah provinsi yang diakreditasi	Sertifikat
2	24	05	4.06		Pelaksanaan sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi			
2	24	05	4.06	0001	Pelaksanaan Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Terselenggaranya Sertifikasi SDM kearsipan di wilayah provinsi	Jumlah SDM kearsipan di wilayah provinsi yang disertfikasi	orang
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	02			PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL			
3	25	02	1.01		Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.01	0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	Ha
3	25	02	1.01	0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	Ha
3	25	02	1.01	0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang
3	25	02	1.01	0005	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3-K/	Tersusunnya Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen Materi Teknis Muatan Perairan Pesisir pada RTRW Provinsi/Dokumen Final RZWP-3-K	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.01	0006	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Tersusunnya dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir yang menginformasikan perwujudan ruang sesuai Materi Teknis Perairan Pesisir/ dalam Perda RTRWP	Dokumen
3	25	02	1.01	0007	Penyelenggaraan Turnamen Memancing mendukung Program Perikanan Terukur dan Bangga Berwisata di Indonesia	Terselenggaranya kegiatan turnamen memancing secara berkala di wilayah perairan yang menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah kegiatan turnamen memancing yang sudah memperoleh persetujuan memancing dan diselenggarakan di wilayah yang menjadi kewenangan Provinsi	Kegiatan
3	25	02	1.01	0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	Dokumen
3	25	02	1.01	0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon	Meningkatnya kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok Masyarakat
3	25	02	1.01	0011	Pelibatan masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Terlibatnya masyarakat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam operasional dan pemeliharaan prasarana tambak garam	Kelompok
3	25	02	1.01	0012	Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.01	0013	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Terintegrasinya Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	Dokumen
3	25	02	1.01	0014	Penetapan Rekomendasi Prioritas dan Desain pembangunan prasarana usaha pergaraman	Ditetapkannya rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman	Jumlah rekomendasi prioritas dan desain pembangunan prasarana usaha pergaraman yang ditetapkan	Dokumen
3	25	02	1.01	0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman	Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	Dokumen
3	25	02	1.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	1.02	0004	Penerbitan Rekomendasi Izin Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir	Jumlah Rekomendasi Perizinan dalam Pelaksanaan Reklamasi di Perairan Pesisir yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.02	0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	Dokumen
3	25	02	1.02	0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Dokumen
3	25	02	1.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3	25	02	1.03	0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
3	25	02	1.03	0002	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Meningkatnya Kualitas Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mengikuti Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.03	0003	Pelibatan Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Orang
3	25	02	1.03	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah kelompok Masyarakat yang memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok
3	25	02	1.03	0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman	Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit
3	25	02	1.03	0006	Pelaksanaan Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Akses Kemitraan Usaha	Jumlah Unit Usaha Sektor Kelautan dan Perikanan yang difasilitasi Kemitraan Usaha	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	1.03	0007	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman	Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	Unit
3	25	02	3.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	3.02	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen
3	25	02	3.02	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Rekomendasi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	3.02	0008	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Terasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Dokumen
3	25	02	3.02	0009	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah data base perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	dokumen
3	25	02	3.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	3.03	0005	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Orang
3	25	02	3.04		Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut			
3	25	02	3.04	0001	penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	Jumlah Dokumen penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	Dokumen
3	25	02	3.05		Pencadangan kawasan konservasi			
3	25	02	3.05	0001	Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dicadangkan	Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	3.06		Pelibatan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut.			
3	25	02	3.06	0001	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Orang
3	25	02	3.07		Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan			
3	25	02	3.07	0001	Fasilitasi perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Terfasilitasinya perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penetapannya dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Komunitas
3	25	02	3.08		Pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai dengan karakteristik dan budaya asli Papua berdasarkan kebijakan yang ditetapkan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	3.08	0001	Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Ditetapkannya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Jumlah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua yang ditetapkan	Perkada
3	25	02	4.02		Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3	25	02	4.02	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen
3	25	02	4.02	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Ditetapkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah Rekomendasi SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	4.02	0008	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Terasilitasinya Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Jumlah Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Penerbitan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber Daya Persisir dan Laut yang menjadi kewenangan provinsi di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional	Dokumen
3	25	02	4.02	0009	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha	Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah data base perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	dokumen
3	25	02	4.03		Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	4.03	0005	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Orang
3	25	02	4.04		Penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut			
3	25	02	4.04	0001	penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Terlaksananya penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	Jumlah Dokumen penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut	Dokumen
3	25	02	4.05		Pencadangan kawasan konservasi			
3	25	02	4.05	0001	Pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Identifikasi dan inventarisasi Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dicadangkan	Luasan pencadangan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang teridentifikasi dan terinventarisasi	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	4.06		Melibatkan Masyarakat Adat setempat yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut.			
3	25	02	4.06	0001	Pelibatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Terlaksananya pengelolaan sumber daya alam laut dengan melibatkan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Jumlah masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional yang hidup di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilibatkan dalam pengelolaan sumber daya alam laut	Orang
3	25	02	4.07		Perlindungan dan pengembangan kearifan lokal dalam pengelolaan bidang kelautan dan perikanan, antara lain pengelolaan sumber daya alam kelautan dan perikanan			
3	25	02	4.07	0001	Fasilitasi perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Terfasilitasinya perlindungan, penguatan, dan penetapan masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang difasilitasi perlindungan, penguatan dan penetapannya dalam pengelolaan perikanan dan kelautan	Komunitas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	02	4.08		Pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai dengan karakteristik dan budaya asli Papua berdasarkan kebijakan yang ditetapkan			
3	25	02	4.08	0001	Penetapan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Ditetapkannya kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua	Jumlah kebijakan pengelolaan sumberdaya alam laut sesuai karakteristik dan budaya asli Papua yang ditetapkan	Perkada
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	03	1.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil			
3	25	03	1.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Dokumen
3	25	03	1.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit
3	25	03	1.01	0004	Penerbitan rekomendasi surat izin penempatan rumpon (SIPR)	Diterbitkannya rekomendasi surat izin penempatan rumpon	Jumlah rekomendasi Surat izin penempatan rumpon yang diterbitkan	rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.01	0005	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah prasarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit
3	25	03	1.01	0006	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Tersedianya data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Dokumen
3	25	03	1.01	0007	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Tersedianya sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Jumlah sarana pendukung yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	Unit
3	25	03	1.01	0008	Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon / Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	Diterbitkannya surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon	Jumlah Surat rekomendasi tanda penangkapan ikan andon yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	1.01	0009	Penerbitan rekomendasi surat tanda keterangan andon	Diterbitkannya rekomendasi surat tanda keterangan andon	Jumlah rekomendasi surat tanda keterangan andon yang diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.01	0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Unit
3	25	03	1.02		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.02	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Dokumen
3	25	03	1.02	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Perairan Darat	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Perairan Darat	Unit
3	25	03	1.03		Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.03	0004	Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tingkat Penyelesaian Rekomendasi Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan dan Pengangkutan Ikan untuk kapal ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Persentase
3	25	03	1.03	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil	Jumlah data dan informasi perizinan usaha untuk kapal penangkap dan pengangkut ikan ukuran diatas 5 GT - 30 GT dan beroperasi sampai dengan 12 mil yang tersedia	Dokumen
3	25	03	1.05		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.05	0003	Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Diterbitkannya Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang diterbitkan	Dokumen
3	25	03	1.05	0004	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Bukti Pencatatan Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT yang ditetapkan	Dokumen
3	25	03	1.06		Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi			
3	25	03	1.06	0001	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Jumlah Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	Pelabuhan Perikanan
3	25	03	1.06	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	Unit
3	25	03	1.06	0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.07		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.07	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.07	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	1.08		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.08	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.08	0003	Penerbitan surat rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi
3	25	03	1.09		Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3	25	03	1.09	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	1.09	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	1.10		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	03	1.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	25	03	1.10	0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	3.11		Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.11	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.11	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	25	03	3.11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.12		Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	25	03	3.12	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.12	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.12	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen
3	25	03	3.13		Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.13	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.13	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	25	03	3.14		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.14	0001	Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan.	rekomendasi
3	25	03	3.15		Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT			
3	25	03	3.15	0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Terlaksananya peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.	Jumlah kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang diremajakan	unit
3	25	03	3.16		Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.16	0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.	Terlaksananya pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.	Jumlah usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan yang diberdayakan	Unit Usaha
3	25	03	4.11		Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			
3	25	03	4.11	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang ditetapkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.11	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan dan subsektor pengangkutan ikan untuk kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan yang diterbitkan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	25	03	4.11	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia untuk Kapal Perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.12		Penerbitan rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	25	03	4.12	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.12	0002	Penerbitan Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Rekomendasi perizinan berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.12	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Usaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen
3	25	03	4.13		Penerbitan persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.13	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.13	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang diterbitkan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	25	03	4.14		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.14	0001	Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.	Jumlah surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) untuk kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang diterbitkan.	rekomendasi
3	25	03	4.15		Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT			
3	25	03	4.15	0001	Peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 GT	Terlaksananya peremajaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT.	Jumlah kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang diremajakan	unit
3	25	03	4.16		Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut dan di perairan daratan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.16	0001	Pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.	Terlaksananya pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan.	Jumlah usaha kecil pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 (dua belas) mil dan di perairan daratan yang diberdayakan	Unit Usaha
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			
3	25	04	1.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	04	1.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.01	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.01	0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Dokumen
3	25	04	1.01	0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.02		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya di Laut Sampai Dengan 12 Mil serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			
3	25	04	1.02	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.02	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.02	0003	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.03		Penerbitan Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT yang Beroperasi di Wilayah Administrasinya, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing			
3	25	04	1.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.03	0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan Berukuran sampai dengan 30 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Izin Kapal Pengangkut Hasil Pembudidayaan Ikan yang menjadi Kewenangan Provinsi yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	1.04		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	04	1.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi
3	25	04	1.04	0002	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.04	0003	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Diterbitkannya Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil bagi Pembudi Daya Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	rekomendasi
3	25	04	1.04	0004	Penerbitan Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala Mikro dan Kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Rekomendasi Teknis Perizinan Berusaha skala mikro dan kecil yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Rekomendasi
3	25	04	1.05		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut			
3	25	04	1.05	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	04	1.05	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit
3	25	04	1.05	0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.05	0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	Orang
3	25	04	1.05	0010	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya Ikan yang memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit
3	25	04	1.05	0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.05	0012	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Ditetapkan untuk Dikembangkan, Dimanfaatkan, dan Dilindungi	Jumlah Usulan Dokumen Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen
3	25	04	1.05	0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	04	1.05	0014	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan	Unit
3	25	04	1.06		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat			
3	25	04	1.06	0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	1.06	0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	05	1.01		Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil			
3	25	05	1.01	0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Perkara
3	25	05	1.01	0008	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	Perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan dan perikanan yang memiliki izin provinsi yang ditangani	Perkara
3	25	05	1.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.01	0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Hari Operasi
3	25	05	1.01	0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Unit
3	25	05	1.01	0012	Pengadaan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang diadakan	Unit
3	25	05	1.01	0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha
3	25	05	1.01	0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.01	0015	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibangun	Unit
3	25	05	1.01	0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi	Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha
3	25	05	1.01	0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Kelompok Masyarakat
3	25	05	1.01	0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah	Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Forum
3	25	05	1.02		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.02	0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi	Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha
3	25	05	1.02	0005	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diriksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	1.02	0006	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi	Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Pelaku Usaha
3	25	05	3.03		Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	25	05	3.03	0001	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terawasinya pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terawasi	Kegiatan
3	25	05	3.04		Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	3.04	0001	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin di wilayah provinsi	Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	perkara
3	25	05	3.04	0002	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah provinsi	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	perkara
3	25	05	3.04	0003	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	perkara
3	25	05	4.03		Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	4.03	0001	Pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terawasinya pelaksanaan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi yang dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terawasi	Kegiatan
3	25	05	4.04		Pemberian sanksi hukum bagi pelaku yang melakukan kegiatan penangkapan secara ilegal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	25	05	4.04	0001	Penanganan perkara sanksi administratif bidang kelautan izin di wilayah provinsi	Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	perkara
3	25	05	4.04	0002	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah provinsi	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah provinsi yang ditangani	perkara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	4.04	0003	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	perkara
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
3	25	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	25	06	1.01	0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.01	0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi
3	25	06	1.01	0006	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Menengah dan Besar dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.01	0007	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Subsektor Pengolahan Ikan dan Subsektor Pemasaran Ikan Skala Usaha Menengah dan Besar	Rekomendasi
3	25	06	1.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			
3	25	06	1.02	0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.02	0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	Kegiatan
3	25	06	1.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	1.03	0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	25	06	1.03	0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	Unit Usaha
3	25	06	1.03	0004	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	Meningkatnya ketersediaan bahan baku untuk konsumsi dan usaha pengolahan ikan	Jumlah peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan bahan baku usaha pengolahan dan pemasaran ikan	Ton
3	25	06	1.03	0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.04		Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri			
3	25	06	3.04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Unit Usaha
3	25	06	3.05		Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri			
3	25	06	3.05	0001	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.06		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar			
3	25	06	3.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	kg/kap/tahun
3	25	06	3.07		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			
3	25	06	3.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan	unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.08		Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar			
3	25	06	3.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan	rekomendasi
3	25	06	3.09		Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar			
3	25	06	3.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi	unit
3	25	06	4.04		Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.04	0001	Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Unit Usaha
3	25	06	4.05		Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar dengan penanaman modal dalam negeri			
3	25	06	4.05	0001	Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha menengah dan besar dengan penanaman modal dalam negeri	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel
3	25	06	4.06		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan besar	terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	kg/kap/tahun
3	25	06	4.07		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			
3	25	06	4.07	0001	Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya dan dimanfaatkan	unit
3	25	06	4.08		Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha menengah dan skala usaha besar yang diterbitkan	rekomendasi
3	25	06	4.09		Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar			
3	25	06	4.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentrapengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan besar	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha menengah dan skala usaha besar yang direvitalisasi	unit
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
3	26	02	1.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.01	0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.01	0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.01	0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	Dokumen
3	26	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
3	26	02	1.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.02	0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Laporan
3	26	02	1.02	0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang
3	26	02	1.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3	26	02	1.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	Lokasi
3	26	02	1.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
3	26	02	1.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Lokasi
3	26	02	1.03	0008	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.03	0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.03	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.03	0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi	Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	Kegiatan
3	26	02	1.03	0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Laporan
3	26	02	1.03	0013	Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi Pengumpulan Data Dukung Dalam Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Jumlah dokumen yang memuat data dukung dalam rangka menudukung Indeks Pembangunan Kepariwisataan Nasional	Dokumen
3	26	02	1.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	26	02	1.04	0007	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE)	Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.04	0008	Pembinaan dan Pengawasan Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata
3	26	02	1.04	0009	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha
3	26	02	1.04	0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.04	0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	Dokumen
3	26	02	1.04	0012	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Usaha
3	26	02	1.04	0013	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata	Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan
3	26	02	1.04	0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	1.04	0016	Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	Badan Usaha
3	26	02	3.05		Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi			
3	26	02	3.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiatataan di Wilayah Provinsi	Dokumen
3	26	02	4.05		Penetapan rencana induk pariwisata di wilayah provinsi			
3	26	02	4.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiatataan di Wilayah Provinsi	Dokumen
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3	26	03	1.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	1.01	0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	1.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen
3	26	03	1.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan
3	26	03	3.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	03	3.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	3.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga
3	26	03	4.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3	26	03	4.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen
3	26	03	4.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
3	26	04	1.01		Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Laporan
3	26	04	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	Laporan
3	26	04	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronissi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.01	0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	Dokumen
3	26	04	1.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3	26	04	1.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	1.02	0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.02	0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen
3	26	04	1.02	0013	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Terlaksananya kegiatan konsultasi kekayaan intelektual	Jumlah orang yang mendapatkan konsultasi kekayaan intelektual	Orang
3	26	04	1.02	0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi
3	26	04	1.02	0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga
3	26	04	1.02	0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	1.02	0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Dokumen
3	26	04	1.02	0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Unit
3	26	04	1.02	0020	Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pelindungan kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah produk pariwisata dan ekonomi kreatifyang mendapat fasilitasi pelindungan Kekayaan Intelektual	Produk
3	26	04	1.02	0021	Pelaksanaan Fasilitasi Komersialisasi Produk Kekayaan Intelektual	Terlaksananya kegiatan fasilitasi komersialisasi kekayaan intelektual bagi pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang Memperoleh fasilitasi komersialisasi kekayaan intelektual	Pelaku Usaha
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3	26	05	1.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.01	0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang
3	26	05	1.01	0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Laporan
3	26	05	1.01	0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	1.01	0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)	Terciptanya produk kreatif memalui kegiatan pemdampingan	Jumlah produk kreatif	Produk
3	26	05	1.01	0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata	Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.01	0013	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata	Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Orang
3	26	05	1.01	0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang
3	26	05	1.01	0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang
3	26	05	1.01	0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.01	0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	1.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3	26	05	1.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.02	0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.02	0004	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	1.02	0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	1.02	0006	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Lembaga
3	26	05	1.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	3.03		Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	3.03	0001	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan
3	26	05	4.03		Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	4.03	0001	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	1.01		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian			
3	27	02	1.01	0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Dokumen
3	27	02	1.01	0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	laporan
3	27	02	1.01	0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	laporan
3	27	02	1.01	0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	laporan
3	27	02	1.01	0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.01	0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	laporan
3	27	02	1.01	0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan
3	27	02	1.01	0009	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Peternakan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	Laporan
3	27	02	1.01	0010	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Peternakan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	Laporan
3	27	02	1.02		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman			
3	27	02	1.02	0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	Sertifikat
3	27	02	1.02	0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.02	0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang
3	27	02	1.02	0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata
3	27	02	1.02	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Setek
3	27	02	1.02	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek
3	27	02	1.02	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram
3	27	02	1.02	0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
3	27	02	1.02	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.02	0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton
3	27	02	1.02	0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.02	0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
3	27	02	1.02	0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	Laporan
3	27	02	1.03		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.03	0002	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai	Varietas Unggul Baru (VUB)
3	27	02	1.03	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Laporan
3	27	02	1.03	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Laporan
3	27	02	1.03	0005	Penilaian rumpun SDG Hewan	Terlaksananya penilaian rumpun SDG Hewan	Jumlah rumpun SDG hewan yang dinilai	Rumpun
3	27	02	1.03	0006	Penilaian galur SDG Hewan	Terlaksananya penilaian galur SDG Hewan	Jumlah galur SDG hewan yang dinilai	Galur
3	27	02	1.04		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.04	0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Dokumen
3	27	02	1.04	0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	laporan
3	27	02	1.04	0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3	27	02	1.05	0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	Laporan
3	27	02	1.05	0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	laporan
3	27	02	1.05	0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	Dokumen
3	27	02	1.06		Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor			
3	27	02	1.06	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan
3	27	02	1.06	0002	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	Kasus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	1.07		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			
3	27	02	1.07	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Ton
3	27	02	1.07	0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Dosis
3	27	02	1.07	0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Ekor
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	1.01		Penataan Prasarana Pertanian			
3	27	03	1.01	0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Dokumen
3	27	03	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Dokumen
3	27	03	1.01	0007	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian	Terbangun dan Terpeliharanya Laboratorium Pertanian	Jumlah Laboratorium Pertanian yang Dibangun dan Dipelihara	Unit
3	27	03	1.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	Unit
3	27	03	1.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.01	0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Unit
3	27	03	1.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.01	0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen
3	27	03	1.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Dokumen
3	27	03	1.01	0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	Dokumen
3	27	03	1.01	0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.01	0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Terbangunnya, terehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Unit
3	27	03	1.01	0022	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)	Terbangun dan terpeliharanya laboratorium benih atau balai benih ternak	Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	Unit
3	27	03	1.01	0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.01	0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan terselenggaranya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Unit
3	27	03	1.01	0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.01	0026	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Peternakan	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	1.02		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	1.02	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan
3	27	03	1.02	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3	27	04	1.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	27	04	1.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan
3	27	04	1.01	0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.01	0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Terlayaninya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Laporan
3	27	04	1.01	0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen
3	27	04	1.01	0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	27	04	1.01	0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus
3	27	04	1.01	0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi			
3	27	04	1.02	0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan
3	27	04	1.02	0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan
3	27	04	1.02	0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.02	0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Laporan
3	27	04	1.03		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan			
3	27	04	1.03	0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Terpenuhinya Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	Unit
3	27	04	1.03	0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan	Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.03	0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen
3	27	04	1.03	0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Unit Usaha
3	27	04	1.03	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha
3	27	04	1.03	0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.03	0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	Orang
3	27	04	1.03	0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	Produk
3	27	04	1.04		Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3	27	04	1.04	0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	1.04	0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang
3	27	04	1.05		Kesejahteraan Hewan			
3	27	04	1.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus
3	27	04	1.05	0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Sertifikat
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	1.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05	1.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3	27	05	1.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha
3	27	05	1.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05	1.01	0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan
3	27	05	1.01	0006	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Laporan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
3	27	06	1.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	06	1.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen
3	27	06	1.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian di Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	1.01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit
3	27	06	1.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan
3	27	06	1.02		Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Daerah Provinsi			
3	27	06	1.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	1.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Laboratorium	Terawasinya Pelaksanaan Izin Laboratorium	Jumlah Izin Laboratorium yang Diawasi	Laporan
3	27	06	1.03		Penerbitan Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	1.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Distributor Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Distributor Obat Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	1.01		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.01	0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit
3	27	07	1.01	0004	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
3	27	07	1.02		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	1.02	0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07	1.02	0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	Kelompok
3	27	07	1.03		Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan			
3	27	07	1.03	0005	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi	Unit
3	27	07	1.03	0006	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang dibentuk dan beroperasi	Unit
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	02			PROGRAM PERENCANAAN HUTAN			
3	28	02	3.01		Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi			
3	28	02	3.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua	Dokumen
3	28	02	3.02		Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	3.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua	Dokumen
3	28	02	3.03		Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH			
3	28	02	3.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Dokumen
3	28	02	3.04		Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung			
3	28	02	3.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	3.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Dokumen
3	28	02	3.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang dibentuk	Unit
3	28	02	3.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang dibentuk	Unit
3	28	02	3.04	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung	Jumlah Organisasi KPH dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung yang dibentuk	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	3.04	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah pengelolaan KPH pada hutan produksi KPH	Jumlah Organisasi dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH yang dibentuk	Unit
3	28	02	3.05		Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi			
3	28	02	3.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun	Dokumen
3	28	02	3.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Dokumen
3	28	02	4.01		Penyelenggaraan Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	4.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Provinsi Papua Barat	Dokumen
3	28	02	4.02		Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat			
3	28	02	4.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat DAS yang wilayahnya di dalam Provinsi Papua Barat	Dokumen
3	28	02	4.03		Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH			
3	28	02	4.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Jumlah Dokumen Inventarisasi Hutan Tingkat Unit Pengelolaan Hutan dan dilaksanakan oleh KPH	Dokumen
3	28	02	4.04		Pembentukan wilayah pengelolaan hutan lindung			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	4.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang disusun	Dokumen
3	28	02	4.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Rancang Bangun Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Dokumen
3	28	02	4.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Lindung	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Lindung yang dibentuk	Unit
3	28	02	4.04	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Unit Pengelolaan Hutan Produksi	Jumlah Unit Pengelolaan Hutan Produksi yang dibentuk	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	4.04	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi KPH dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung	Jumlah Organisasi KPH dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Lindung yang dibentuk	Unit
3	28	02	4.04	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembentukan Organisasi dan Wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH	Jumlah Organisasi dan wilayah Pengelolaan KPH pada Hutan Produksi KPH yang dibentuk	Unit
3	28	02	4.05		Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi			
3	28	02	4.05	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen rencana Kehutanan Tingkat Provinsi yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	02	4.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Jumlah dokumen Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi, KPH Lindung dan KPH Produksi	Dokumen
3	28	03			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN			
3	28	03	1.01		Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi			
3	28	03	1.01	0001	Penyusunan Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Rancang Bangun Tata Hutan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Disusun	Dokumen
3	28	03	1.01	0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Dokumen
3	28	03	1.01	0005	Penyusunan Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Terlaksananya penyusunan dan penetapan RKTP	Dokumen RKTP yang disahkan	Dokumen
3	28	03	1.01	0006	Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Terpeliharanya Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH	Jumlah sarana prasarana operasionalisasi KPH yang terpelihara	Unit
3	28	03	1.01	0007	Fasilitasi kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Telaksananya kegiatan pembangunan dan pengembangan KPH	Jumlah kegiatan/layanan yang difasilitasi oleh KPH	Dokumen
3	28	03	1.01	0008	Pembangunan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana KPH berbasis resor	Tersedianya Kantor resor KPH dan Sarana Prasarana Operasionalisasi resor	Jumlah sarana dan prasarana operasionalisasi resor yang terbangun	Unit
3	28	03	1.01	0010	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)	Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.01	0011	Review atau revisi Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)	Terlaksananya review atau revisi RKTP dan penetapan review atau revisi RKTP	Dokumen review atau revisi RKTP yang disahkan	Dokumen
3	28	03	1.02		Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)			
3	28	03	1.02	0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	Dokumen
3	28	03	1.02	0002	Pelaksanaan inventarisasi hutan pada KPHL/P	Tersedianya data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Jumlah Dokumen/Laporan data dan informasi hasil inventarisasi KPHL/P	Dokumen
3	28	03	1.02	0003	Penyusunan Perubahan Peta Tata Hutan	Tersusunnya Peta Perubahan Tata Hutan	Jumlah Peta Perubahan Tata Hutan	Dokumen
3	28	03	1.02	0004	Penyusunan Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan	Tersusunnya Peta Tata Hutan Rencana Pengelolaan	Jumlah Peta	Dokumen
3	28	03	1.02	0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.02	0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan	Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	Dokumen
3	28	03	1.03		Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung			
3	28	03	1.03	0001	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Produksi	Tersedianya Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Jumlah Data dan Informasi Terkait Luas Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dalam 1 (Satu) Provinsi Secara Berkala	Dokumen
3	28	03	1.03	0002	Penyediaan Data dan Informasi Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Tersedianya Data dan Informasi Luas Wilayah Usaha di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Mengenai Pemanfaatan Hutan di Kawasan HL Provinsi Secara Berkala	Dokumen
3	28	03	1.03	0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi	Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.03	0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani	Tersedianya Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Dokumen
3	28	03	1.03	0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	Dokumen
3	28	03	1.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.03	0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P	Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P	Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P	Laporan
3	28	03	1.03	0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Dokumen
3	28	03	1.04		Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara			
3	28	03	1.04	0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	Dokumen
3	28	03	1.04	0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	0003	Pembangunan Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Terbangunnya Hutan Kota di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Kota yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.04	0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	Ha
3	28	03	1.04	0007	Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Diterapkannya Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas Area Penerapan Pengembangan Teknologi Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Ha
3	28	03	1.04	0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Laporan
3	28	03	1.04	0009	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	Terlaksananya Rehabilitasi Mangrove Di Luar Kawasan Hutan	Luas Area Mangrove Di Luar Kawasan Hutan yang Direhabilitasi	Ha
3	28	03	1.04	0010	Pembangunan Sumur resapan	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Sumur Resapan	Jumlah Sumur Resapan yang terbangun	Unit
3	28	03	1.04	0011	Pemeliharaan Tanaman Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) pasca P2	Terlaksananya Pemeliharaan Tanaman RHL pasca P2	Luas Areal RHL pasca P2 yang terpelihara	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.04	0012	Pembangunan gully plug	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	Unit
3	28	03	1.04	0013	Pembangunan Dam Penahan	Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	Unit
3	28	03	1.05		Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi			
3	28	03	1.05	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Dokumen
3	28	03	1.05	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	Laporan
3	28	03	1.05	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	Operasi
3	28	03	1.05	0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan	Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.05	0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	Operasi
3	28	03	1.06		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)			
3	28	03	1.06	0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terpenuhinya hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah	Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	Unit Managemen
3	28	03	1.06	0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar	Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	Unit Managemen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.06	0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	Unit Managemen
3	28	03	1.06	0008	Pelaksanaan Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pembinaan (Bimbingan Teknis) Kegiatan Pengolahan Hasil Hutan (Kayu dan/atau HHBK)	Jumlah Pemegang PBPHH yang taat dalam pemenuhan kewajiban dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan	Unit Managemen
3	28	03	1.07		Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.07	0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan
3	28	03	1.07	0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	Unit Managemen
3	28	03	1.07	0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Unit Managemen
3	28	03	1.08		Pelaksanaan Pengelolaan KHDTK untuk Kepentingan Religi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.08	0003	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Pengelolaan KHDTK	Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan KHDTK	Jumlah Laporan kegiatan pengawasan KHDTK	Dokumen
3	28	03	1.08	0004	Perencanaan pengelolaan KHDTK	Terlaksananya fasilitasi rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK	Jumlah Dokumen Rencana pengelolaan jangka panjang KHDTK yang difasilitasi	Dokumen
3	28	03	1.09		Perbenihan Tanaman Hutan			
3	28	03	1.09	0002	Sertifikasi Sumber Benih	Terlaksananya Sertifikasi Sumber Benih	Jumlah Sertifikat Sumber Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
3	28	03	1.09	0003	Sertifikasi Mutu Benih	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Benih	Jumlah Sertifikat Mutu Benih yang Diterbitkan	Sertifikat
3	28	03	1.09	0004	Sertifikasi Mutu Bibit	Terlaksananya Sertifikasi Mutu Bibit	Jumlah Sertifikat Mutu Bibit yang Diterbitkan	Sertifikat
3	28	03	1.09	0005	Pengawasan Peredaran Benih dan/atau Bibit	Terlaksananya Pengawasan Peredaran Benih dan/Atau Bibit	Jumlah Data (Asal Usul, Jenis Mutu) Benih Atau Bibit yang Beredar	Laporan
3	28	03	1.09	0006	Pembangunan Sumber Benih	Terlaksananya Pembangunan Sumber Benih	Luas Sumber Benih yang Dibangun	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	1.09	0007	Pembuatan dan Pengadaan Bibit untuk Rehabilitasi Lahan	Tersedianya bibit berkualitas untuk Rehabilitasi Lahan	Jumlah bibit berkualitas yang tersedia untuk Rehabilitasi Lahan	Batang
3	28	03	1.09	0008	Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Terlaksananya Pembinaan Perbenihan Tanaman Hutan	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan dalam setahun	Kali
3	28	03	1.09	0009	Pengelolaan Sumber Benih	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Benih	Luas sumber benih yang dikelola	Ha
3	28	03	1.09	0010	Pelayanan Perizinan berusaha berbasis risiko bidang perbenihan tanaman hutan	Terlaksananya pelayanan periijinan berusaha berbasis risiko untuk kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran bibit serta kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih dan bibit bagi pelaku usaha perorangan dan badan usaha non Perhutani	Jumlah penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko (perorangan dan badan usaha non Perhutani) kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih, pengadaan dan pengedaran bibit, serta pengadaan dan pengedaran benih dan bibit dalam provinsi	Unit Usaha
3	28	03	3.10		Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	3.10	0001	Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Terlaksananya pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Jumlah unit manajemen yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Unit
3	28	03	3.10	0002	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Dokumen
3	28	03	3.11		Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan non - komersial			
3	28	03	3.11	0001	Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial	Unit
3	28	03	3.12		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	3.12	0001	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Dokumen
3	28	03	4.10		Pemanfaatan Kayu pada areal penggunaan lain			
3	28	03	4.10	0001	Pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Terlaksananya pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Jumlah unit manajemen yang melaksanakan pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain untuk kegiatan di luar sektor kehutanan	Unit
3	28	03	4.10	0002	Monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi pemanfaatan kayu pada areal penggunaan lain	Dokumen
3	28	03	4.11		Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan non - komersial			
3	28	03	4.11	0001	Pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Terlaksananya pengelolaan KHDTK untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta religi dan budaya	Jumlah KHDTK untuk kepentingan non-komersial	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	03	4.12		Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan			
3	28	03	4.12	0001	Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Laporan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemegang persetujuan kawasan hutan	Dokumen
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
3	28	04	1.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi			
3	28	04	1.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di Tahura	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di Tahura yang Ditindak Lanjuti	Permohonan
3	28	04	1.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraaan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara Tahura Provinsi	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Provinsi	Dokumen
3	28	04	1.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Desa

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	Dokumen
3	28	04	1.01	0012	Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya kegiatan penanganan konflik tenurial pada kawasan TAHURA	Luas areal konflik tenurial yang ditangani	Ha
3	28	04	1.01	0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi	Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Ha
3	28	04	1.01	0014	Pemulihan Ekosistem TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pemulihan Ekosistem Tahura Provinsi	Luas Areal Tahura yang Dilakukan Pemulihan Ekosistem	Ha
3	28	04	1.01	0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi	Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	Ha
3	28	04	1.01	0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi	Pelaksanan Penataan Blok TAHURA Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.02		Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi			
3	28	04	1.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Laporan
3	28	04	1.03		Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam			
3	28	04	1.03	0001	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Karst	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Karst	Dokumen
3	28	04	1.03	0002	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Karst	Luas Kerusakan Karst yang Tertangani	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	1.03	0004	Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Terlaksananya Pengendalian Kerusakan dan Pemeliharaan Ekosistem Lahan Basah	Luas Kerusakan Lahan Basah yang Tertangani	Ha
3	28	04	1.03	0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	Orang
3	28	04	1.03	0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha
3	28	04	1.03	0007	Pengelolaan koridor hidupan liar	Meningkatnya nilai efektivitas pengelolaan koridor hidupan liar	Luas koridor hidupan liar yang dikelola	Ha
3	28	04	1.03	0008	Penetapan koridor hidupan liar	Terlaksananya penetapan koridor hidupan liar satwa	dokumen Peta koridor hidupan liar satwa yang disepakati mulitipihak	Dokumen
3	28	04	1.03	0009	Perencanaan Pengelolaan Ekosistem Lahan Basah	Terencananya Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pemanfaatan Lahan Basah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN			
3	28	05	1.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3	28	05	1.01	0002	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Mandiri yang Mengikuti Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan	Kelompok
3	28	05	1.01	0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	Orang
3	28	05	1.01	0005	Penilaian/Uji Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Jumlah SDM bidang kehutanan yang memiliki sertifikat kompetensi meningkat jumlahnya	Orang
3	28	05	1.01	0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan	Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	05	1.01	0008	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Hektar
3	28	05	1.01	0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	Unit
3	28	05	3.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3	28	05	3.01	0004	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya persetujuan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
3	28	05	3.01	0005	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	Terlaksananya peningkatan kualitas KUPS	jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit
3	28	05	4.01		Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan			
3	28	05	4.01	0004	Penyiapan Perhutanan Sosial	Terfasilitasinya persetujuan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	Ha
3	28	05	4.01	0005	pengembangan Usaha Perhutanan sosial	Terlaksananya peningkatan kualitas KUPS	jumlah KUPS yang ditingkatkan kualitasnya	Unit
3	28	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
3	28	06	1.01		Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	06	1.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Orang
3	28	06	1.01	0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS	Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	Lembaga
3	28	06	1.01	0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah	Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	Dokumen
3	28	06	1.01	0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	Dokumen
3	28	08			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.01		Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	28	08	3.01	0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	28	08	3.02		Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.02	0001	Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan	Lembaga
3	28	08	3.03		Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan			
3	28	08	3.03	0001	Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.04		Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat			
3	28	08	3.04	0001	Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Terlaksananya Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Jumlah Kegiatan Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Laporan
3	28	08	3.04	0002	Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Jumlah Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Laporan
3	28	08	3.04	0003	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Yang Dilaksanakan	Lembaga MHA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.04	0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan	Lembaga MHA
3	28	08	4.01		Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	28	08	4.01	0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.02		Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
3	28	08	4.02	0001	Peningkatan kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Meningkatnya kapasitas Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah SDM Kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Yang Ditingkatkan	Lembaga
3	28	08	4.03		Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu dalam rangka peningkatan kesejahteraan MHA setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.03	0001	Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Ditetapkannya pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan pemanfaatan hasil hutan kayu dan non kayu setelah ditetapkannya hutan adat sesuai fungsi kawasan hutan melalui peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	28	08	4.04		Penguatan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Adat			
3	28	08	4.04	0001	Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Terlaksananya Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Jumlah Kegiatan Perlindungan Terhadap pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan	Laporan
3	28	08	4.04	0002	Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Terlaksananya Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Jumlah Pengawasan Terhadap Fungsi Kawasan Hutan Adat Yang Telah Ditetapkan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.04	0003	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	Jumlah Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Masyarakat Hukum Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat Yang Dilaksanakan	Lembaga MHA
3	28	08	4.04	0004	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Kelembagaan Masyarakat Hukum Adat yang Diberdayakan Baik Secara Ekonomi untuk Menjaga Kelestarian Hutan	Lembaga MHA
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN			
3	29	02	1.01		Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
3	29	02	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	02	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	1.03		Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi			
3	29	02	1.03	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	Dokumen
3	29	02	1.03	0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	1.03	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah	Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	3.04		Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi			
3	29	02	3.04	0001	Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	3.05		Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi			
3	29	02	3.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	3.06		Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.06	0001	Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Tersedianya izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan	Dokumen
3	29	02	3.06	0002	Penetapan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Tersedianya iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	3.07		Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi			
3	29	02	3.07	0001	Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Laporan
3	29	02	3.09		Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.09	0001	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi	Dokumen
3	29	02	3.10		Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah			
3	29	02	3.10	0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	3.11		Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana			
3	29	02	3.11	0001	Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	Terlaksananya Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	02	3.12		Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.12	0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	3.13		Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)			
3	29	02	3.13	0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	Tersedianya peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	Jumlah peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000) Yang Disediakan	Peta
3	29	02	4.04		Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi			
3	29	02	4.04	0001	Pengendalian dan pengawasan kondisi air tanah di zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	4.05		Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	02	4.06		Penerbitan izin penggunaan air tanah dan menetapkan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi			
3	29	02	4.06	0001	Penerbitan izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Tersedianya izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen izin penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Diterbitkan	Dokumen
3	29	02	4.06	0002	Penetapan iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Tersedianya iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Dokumen iuran penggunaan air tanah untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.08		Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.08	0001	Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan pengawasan kegiatan untuk kebutuhan usaha di dalam daerah provinsi	Laporan
3	29	02	4.09		Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)			
3	29	02	4.09	0001	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), pengusulan penetapan warisan geologi (geoheritage) dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi	Dokumen
3	29	02	4.10		Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah			
3	29	02	4.10	0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.11		Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.11	0001	Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	Terlaksananya Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi efektivitas peringatan dini gerakan tanah lokal pada lokasi spesifik rawan bencana Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	02	4.12		Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi			
3	29	02	4.12	0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.13		Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)			
3	29	02	4.13	0001	Penyusunan peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	Tersedianya peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000)	Jumlah peta kawasan rawan bencana detail (skala>1:25.000) Yang Disediakan	Peta
3	29	03			PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA			
3	29	03	1.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.01	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen
3	29	03	1.01	0002	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Terlaksananya Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pemanfaatan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi atau Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Laporan
3	29	03	1.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.01	0005	Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Terlaksananya Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Jumlah Pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dengan ketentuan berada dalam 1 (satu) daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut	Laporan
3	29	03	1.01	0006	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 (dua belas) Mil laut	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	Tersedianya Data dan Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam, Mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.03	0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.03	0005	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang Baik dan Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kaidah Teknis Pertambangan yang baik dan Kaidah Pengusahaan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.04	0003	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.04	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Laporan
3	29	03	1.04	0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan
3	29	03	1.04	0006	Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Iuran Pertambangan Rakyat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.04	0007	Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA, serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian, Pembinaan, dan Pengawasan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat, IPERA serta Pelaksanaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Dokumen
3	29	03	1.04	0008	Pelaksanaan dan Pelaporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	Terlaksananya dan terlaporkannya hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	Tersedianya laporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	Laporan
3	29	03	1.04	0009	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat	Tersedianya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Izin Pertambangan Rakyat	Dokumen
3	29	03	1.04	0010	Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.04	0011	Pemberian Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Rekomendasi Teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Dokumen
3	29	03	1.06		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.06	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Pertambangan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	29	03	1.07		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan			
3	29	03	1.07	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen
3	29	03	1.07	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan
3	29	03	1.12		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3	29	03	1.12	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.12	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.12	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.12	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.13		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.13	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan Dalam Penetapan Wilayah Pertambangan Oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan Wilayah Usaha Pertambangan dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	1.13	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.13	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.13	0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Terlaksananya Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang Baik Perizinan Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Laporan
3	29	03	1.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			
3	29	03	1.14	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Dokumen Rekomendasi Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.14	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)	Laporan
3	29	03	1.14	0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Jumlah rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Dokumen
3	29	03	1.14	0004	Penetapan Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Tersedianya Prosedur terhadap pemberian Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Dokumen
3	29	03	1.15		Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.15	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.15	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen
3	29	03	1.15	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.16		Penetapan Harga Patokan Batuan			
3	29	03	1.16	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Batuan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Terkumpul dan Terolah	Dokumen
3	29	03	1.16	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Harga Patokan Mineral Bukan Logam yang Telah Ditentukan dan Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Laporan
3	29	03	1.17		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	1.17	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen
3	29	03	1.17	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.17	0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Jumlah Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	1.17	0004	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	1.18		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.18	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.18	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.18	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen
3	29	03	1.18	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen
3	29	03	1.19		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.19	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	1.19	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Laporan
3	29	03	1.19	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	1.19	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.20		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	29	03	1.20	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	03	1.20	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	29	03	1.20	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.20	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk 1 (satu) daerah provinsi	Dokumen
3	29	03	1.21		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	1.21	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Dokumen
3	29	03	1.21	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.21	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	1.21	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Jumlah rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	1.22		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu			
3	29	03	1.22	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.22	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu	Laporan
3	29	03	1.22	0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen
3	29	03	1.22	0004	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas mineral bukan logam jenis tertentu	Dokumen
3	29	03	1.23		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.23	0001	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Tersusunnya dan Terumusnya Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Dokumen Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	1.23	0002	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan Komoditas Batuan	Laporan
3	29	03	1.23	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Dokumen
3	29	03	1.23	0004	Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Jumlah rekomendasi teknis yang Berkaitan dengan Pemberian Izin Usaha Pertambangan untuk penjualan komoditas batuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.24		Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan			
3	29	03	1.24	0001	Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Laporan
3	29	03	1.24	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pertambangan	Terlaksananya Pengawasan Izin Usaha Pertambangan	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Hasil Pengawasan	Dokumen
3	29	03	1.24	0003	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi	Terlaksananya bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi dan/atau fasilitasi	Laporan
3	29	03	1.24	0004	Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha	Terlaksananya Pemberian norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha	Tersedia norma, standar, pedoman, dan kriteria pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dokumen
3	29	03	1.24	0005	Perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Terlaksananya perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Tersedianya dokumen perencanaan pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.24	0006	Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Jumlah laporan hasil Monitoring dan Evaluasi pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha	Laporan
3	29	03	1.24	0007	Pelaksanaan pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Terlaksananya pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Jumlah laporan hasil pengawasan atas kaidah teknik Pertambangan yang baik dan tata kelola pengusahaan Pertambangan	Laporan
3	29	03	1.25		Penatausahaan Sertifikasi Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi			
3	29	03	1.25	0001	Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	1.25	0002	Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	1.25	0003	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	3.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.01	0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	3.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	3.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0006	Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0007	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0008	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0009	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.03	0010	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	3.04		Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.04	0006	Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.04	0007	Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Penyusunan dan Perumusan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	3.04	0008	Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Reklamasi dan Pascatambang pada Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Laporan
3	29	03	3.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.14	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data danInformasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Tersedianya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Laporan
3	29	03	3.14	0002	Penentuan dan Penetapan Harga PatokanMineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Jumlah Dokumen Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Dokumen
3	29	03	3.14	0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Tersedianya laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Laporan
3	29	03	3.17		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.17	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	3.19		Penatausahaan Izin Pengangkutan danPenjualan untuk Komoditas Batuan			
3	29	03	3.19	0002	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	3.25		Pemberian sertifikat standar kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan			
3	29	03	3.25	0001	Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.25	0002	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	3.25	0003	Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.25	0004	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum	Dokumen
3	29	03	3.25	0005	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang eksplorasi	Dokumen
3	29	03	3.25	0006	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang studi kelayakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.25	0007	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Dokumen
3	29	03	3.25	0008	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang pengangkutan	Dokumen
3	29	03	3.25	0009	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.25	0010	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Dokumen
3	29	03	3.25	0011	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Dokumen
3	29	03	3.25	0012	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penambangan	Dokumen
3	29	03	3.26		Pembinaan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.26	0001	Pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Terlaksananya pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Dokumen
3	29	03	3.26	0002	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Terlaksananya pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Laporan
3	29	03	3.26	0003	Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Jumlah Laporan Hasil pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Laporan
3	29	03	3.27		Pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi			
3	29	03	3.27	0001	Perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Tersusunnya perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Dokumen
3	29	03	3.27	0002	Pelaksanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.27	0003	Monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Laporan
3	29	03	3.28		Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	29	03	3.28	0001	Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan
3	29	03	3.29		Penatausahaan Rekomendasi dan Persetujuan terkait dengan Kewenangan Perizinan			
3	29	03	3.29	0001	Penetapan Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Tersedianya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	3.29	0002	Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Jumlah Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Dokumen
3	29	03	3.29	0003	Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Laporan
3	29	03	3.30		Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			
3	29	03	3.30	0001	Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya pemberian perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.01		Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil			
3	29	03	4.01	0004	Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Dokumen Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil yang Ditentukan dan Ditetapkan yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	4.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Tersedianya Usulan penentuan WUP dalam rangka penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Laporan
3	29	03	4.03		Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.03	0006	Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan serta SIPB dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.03	0007	Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang berada di dalam wilayah pertambangan dan sesuai dengan ketentuan perundangan	Terlaksananya Pemberian Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut, yang mencakup aspek kewilayahan	Dokumen
3	29	03	4.14		Penatausahaan Pemberian Surat Izin Pengelolaan Batuan (SIPB)			
3	29	03	4.14	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data danInformasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Tersedianya Data dan Informasi Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.14	0002	Penentuan dan Penetapan Harga PatokanMineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Jumlah Dokumen Penentuan dan Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Dokumen
3	29	03	4.14	0003	Pemberian rekomendasi teknis dan persetujuan yang berkaitan dengan pemberian Perizinan dalam rangka Penatausahaan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Tersedianya laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan	Laporan
3	29	03	4.17		Penatausahaan Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Mineral Bukan Logam			
3	29	03	4.17	0003	Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Terlaksananya Penetapan Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Tersedianya Prosedur terhadap Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas mineral bukan logam	Dokumen
3	29	03	4.19		Penatausahaan Izin Pengangkutan danPenjualan untuk Komoditas Batuan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.19	0002	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan untuk Komoditas Batuan	Dokumen
3	29	03	4.25		Pemberian sertifikat standar kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan			
3	29	03	4.25	0001	Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Tersedianya Prosedur pemberian sertifikat standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.25	0002	Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pemberian rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah rekomendasi teknis yang berkaitan dengan pemberian Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Dokumen
3	29	03	4.25	0003	Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan atas Pelaksanaan Sertifikat Standar pada Kegiatan Konsultasi dan Perencanaan Usaha Jasa Pertambangan dalam lingkup 1 (satu) Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.25	0004	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penyelidikan umum	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penyelidikan umum	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penyelidikan umum	Dokumen
3	29	03	4.25	0005	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang eksplorasi	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang eksplorasi	Dokumen
3	29	03	4.25	0006	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang studi kelayakan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang studi kelayakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.25	0007	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang kontruksi pertambangan	Dokumen
3	29	03	4.25	0008	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang pengangkutan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang pengangkutan	Dokumen
3	29	03	4.25	0009	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang lingkungan pertambangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.25	0010	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang	Dokumen
3	29	03	4.25	0011	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang keselamatan pertambangan	Dokumen
3	29	03	4.25	0012	Pemberian sertifikat standar meliputi kegiatankonsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan	Terlaksananya pemberian sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasaPertambangan di bidang penambangan	Jumlah sertifikat standar meliputi kegiatan konsultasi dan perencanaan usaha jasa Pertambangan di bidang penambangan	Dokumen
3	29	03	4.26		Pembinaan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.26	0001	Pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Terlaksananya pemberian norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Jumlah norma, standar, prosedur dan kriteria pelaksanaan usaha pertambangan	Dokumen
3	29	03	4.26	0002	Pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Terlaksananya pemberian bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Jumlah Laporan Hasil pelaksanaan bimbingan teknis, konsultasi, mediasi, dan/atau fasilitasi	Laporan
3	29	03	4.26	0003	Pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Terlaksananya pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Jumlah Laporan Hasil pengembangan kompetensi tenaga kerja pertambangan	Laporan
3	29	03	4.27		Pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi			
3	29	03	4.27	0001	Perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Tersusunnya perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Dokumen
3	29	03	4.27	0002	Pelaksanaan pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Terlaksananya pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan hasil pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.27	0003	Monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pengawasan Terhadap Izin Perizinan Minerba Pada di Wilayah Provinsi	Laporan
3	29	03	4.28		Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	29	03	4.28	0001	Pembinaan dan Pengawasan Mineral dan Batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Laporan
3	29	03	4.29		Penatausahaan Rekomendasi dan Persetujuan terkait dengan Kewenangan Perizinan			
3	29	03	4.29	0001	Penetapan Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Tersedianya Prosedur Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.29	0002	Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Jumlah Pemberian Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Dokumen
3	29	03	4.29	0003	Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan atas Rekomendasi dan Persetujuan pada pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan	Laporan
3	29	03	4.30		Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	03	4.30	0001	Pemberian Perizinan Berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Terlaksananya pemberian perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah dokumen perizinan berusaha sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat	Dokumen
3	29	04			PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI			
3	29	04	3.01		Koordinasi terkait Tenaga Kerja berdasarkan spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi			
3	29	04	3.01	0001	Koordinasi prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi	Terlaksananya prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi	Jumlah Laporan prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi Yang Tersedia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.01	0002	Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan OAP untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja sampai ke tingkat manajemen Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	3.02		Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi			
3	29	04	3.02	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Jumlah Hasil Laporan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi	Laporan
3	29	04	3.03		Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.03	0001	Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Dokumen
3	29	04	3.04		Koordinasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Dari OAP			
3	29	04	3.04	0001	Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Dokumen
3	29	04	3.05		Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.05	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Penawaran partisipasi interes (PI) 10% (sepuluh persen) kepada BUMD yang ditetapkan oleh Gubernur dengan ketentuan dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan
3	29	04	3.06		Pengawasan kegiatan usaha hulu migas pada wilayah kewenangan Provinsi Papua Dalam Rangka Penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua			
3	29	04	3.06	0001	Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua	Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua	Laporan
3	29	04	3.07		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	3.07	0002	Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua	Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua	Jumlah Pembangunan Sumber Daya Industri Yang Dilaksanakan	Unit
3	29	04	3.08		Penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Gubernur Papua merekomendasikan wakil dari pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.08	0001	Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Tersedianya Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Jumlah Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.08	0002	Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	3.09		Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi			
3	29	04	3.09	0001	Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Jumlah laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	3.10		Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.10	0001	Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Tersedianya Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Jumlah Dokumen Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Yang Disediakan	Dokumen
3	29	04	3.11		Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua			
3	29	04	3.11	0001	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Terlaksananya Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua	Jumlah Laporan Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	3.12		Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua			
3	29	04	3.12	0001	Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Terlaksananya Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya	Jumlah Laporan Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	3.12	0002	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Terlaksananya Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Jumlah Laporan BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya Yang Didistribusikan di Provinsi Papua	Laporan
3	29	04	3.13		Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.13	0001	Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	29	04	3.14		Penetapan dan Pembangunan Posko BBM			
3	29	04	3.14	0001	Penetapan dan Pembangunan Posko BBM	Terlaksananya Penetapan dan Pembangunan Posko BBM	Jumlah Penetapan dan Pembangunan Posko BBM Yang Dilaksanakan	Unit
3	29	04	3.15		Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM			
3	29	04	3.15	0001	Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM	Tersusunnya Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM	Junlah Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM Yang Ditetapkan	Rekomendasi
3	29	04	3.16		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.16	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	3.17		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	3.17	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	4.01		Koordinasi terkait Tenaga Kerja berdasarkan spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi			
3	29	04	4.01	0001	Koordinasi prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi	Terlaksananya prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi	Jumlah Laporan prakiraan kebutuhan, jenis dan jumlah tenaga kerja menurut spesifikasi dan keahlian sesuai rencana dan tahapan operasi Yang Tersedia	Laporan
3	29	04	4.02		Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.02	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi	Jumlah Hasil Laporan mediasi dalam penyelesaian sengketa kompensasi pemanfaatan sumber daya, pemanfaatan tanah ulayat untuk kegiatan usaha minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan dan Difasilitasi	Laporan
3	29	04	4.03		Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah			
3	29	04	4.03	0001	Rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Tersusunnya rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Jumlah dokumen hasil rekomendasi penggunaan dana pengembangan masyarakat yang sejalan dengan rencana pembangunan daerah	Dokumen
3	29	04	4.04		Koordinasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Dari OAP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.04	0001	Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Jumlah Dokumen Hasil Rekomendasi Pelaksanaan Rekruitment Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan perusahaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat OAP	Dokumen
3	29	04	4.06		Pengawasan kegiatan usaha hulu migas pada wilayah kewenangan Provinsi Papua Barat Dalam Rangka Penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat			
3	29	04	4.06	0001	Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat	Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hulu migas dalam rangka penyampaian laporan realisasi lifting secara berkala kepada Gubernur Papua Barat	Laporan
3	29	04	4.07		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Terhadap Kewajiban perusahaan kehutanan, perikanan, pertambangan umum, pertambangan dan perusahaan sejenis yang mengelola sumber daya alam Papua Barat, untuk membangun industri pengolahan di Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	4.07	0002	Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua	Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Industri Pengolahan di Provinsi Papua	Jumlah Pembangunan Sumber Daya Industri Yang Dilaksanakan	Unit
3	29	04	4.08		Penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat Gubernur Papua Barat merekomendasikan wakil dari pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.08	0001	Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Tersedianya Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Jumlah Kebijakan Terkait Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Barat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.08	0002	Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Dalam Rangka Penetapan Kebijakan Terkait Keikutsertaan Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagai anggota tim wilayah kerja miyak dan gas bumi di wilayah Provinsi Papua Dalam rangka penyiapan wilayah kerja di wilayah Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	4.09		Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi			
3	29	04	4.09	0001	Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Terlaksananya Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi	Jumlah laporan Hasil Pengawasan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	4.10		Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.10	0001	Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Tersedianya Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Jumlah Dokumen Pengusulan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat Yang Disediakan	Dokumen
3	29	04	4.11		Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat			
3	29	04	4.11	0001	Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat	Jumlah Laporan Pengawasan Kuota Bahan Bakar Minya (BBM) di Provinsi Papua Barat Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	4.12		Pengawasan dan Distribusi BBM pada SPBU, APMS dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat			
3	29	04	4.12	0001	Pengawasan BBM pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya	Jumlah Laporan Pengawasan BBM Pada SPBU, APMS, dan Sejenisnya Yang Dilaksanakan	Laporan
3	29	04	4.12	0002	Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua Barat	Terlaksananya Distribusi BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya di Provinsi Papua	Jumlah Laporan BBM Pada SPBU, A PMS, dan Sejenisnya Yang Didistribusikan di Provinsi Papua	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.13		Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
3	29	04	4.13	0001	Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Koordinasi Perhitungan Bagi hasil minyak bumi dan/atau gas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Dokumen
3	29	04	4.14		Penetapan dan Pembangunan Posko BBM			
3	29	04	4.14	0001	Penetapan dan Pembangunan Posko BBM	Terlaksananya Penetapan dan Pembangunan Posko BBM	Jumlah Penetapan dan Pembangunan Posko BBM Yang Dilaksanakan	Unit
3	29	04	4.15		Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM			
3	29	04	4.15	0001	Pernerbitan Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM	Tersusunnya Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM	Junlah Rekomendasi Teknis Izin Pembangunan Posko BBM Yang Ditetapkan	Rekomendasi
3	29	04	4.16		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.16	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan pertambangan yang berinvestasi di wilayah Provinsi Papua membina dan memanfaatkan konsumsi pangan lokal guna peningkatan ekonomi masyarakat setempat Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	04	4.17		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	04	4.17	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Terhadap Kewajiban setiap perusahaan melibatkan perusahaan daerah, memanfaatkan tenaga kerja lokal, dan pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan perusahaan Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
3	29	05	1.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil Diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.01	0001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah Dokumen rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (dua belas) Mil diukur dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Diukur dari Garis Pantai Ke Arah Laut Lepas dan/atau Ke Arah Perairan Kepulauan	Laporan
3	29	05	1.03		Penatausahaan Izin, Pembinaan, dan Pengawasan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.03	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terlaksananya penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun yang Ditetapkan	Dokumen
3	29	05	1.03	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.03	0003	Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terbinanya Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan
3	29	05	1.03	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Sebagai Bahan Bakar lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) Ton Per Tahun	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan Kapasitas Penyediaan sampai dengan 10.000 (Sepuluh Ribu) Ton Per Tahun	Laporan
3	29	05	1.05		Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi			
3	29	05	1.05	0001	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa	terkumpulnya data potensi biomassa	jumlah dokumen data potensi biomassa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.05	0002	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biogas	Laporan
3	29	05	1.05	0003	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Terlaksananya kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa	Laporan
3	29	05	1.05	0004	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa	Tersusunnya rencana kegiatan penyediaan biomassa	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa	Dokumen
3	29	05	1.05	0005	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa	Laporan
3	29	05	1.05	0006	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi biogas	Terkumpulnya data potensi biogas	Jumlah dokumen data potensi biogas	Dokumen
3	29	05	1.05	0007	Perencanaan kegiatan penyediaan biogas	Tersusunnya rencana kegiatan penyediaan biogas	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biogas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.05	0008	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Terlaksananya kegiatan penyediaan biogas	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biogas	Laporan
3	29	05	1.06		Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi			
3	29	05	1.06	0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Terlaksananya revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi	Unit
3	29	05	1.06	0002	Pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Terlaksananya pengoperasian infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Orang
3	29	05	1.06	0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.06	0004	Pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas)	Laporan
3	29	05	1.06	0005	Pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)	Tersusunnya laporan pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading , dst)	Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif pemanfaatan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst)	Laporan
3	29	05	1.07		Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi			
3	29	05	1.07	0001	Pemberian evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemanfaatan aneka EBT	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.07	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	1.07	0003	Pemberian bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis pemanfaatan aneka EBT	Laporan
3	29	05	1.07	0004	Pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Tersusunnya laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBTJumlah laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah laporan pemberian insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	laporan
3	29	05	1.07	0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	Unit
3	29	05	1.07	0006	Perencanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Tersusunnya rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah rencana kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.07	0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	unit
3	29	05	1.07	0008	Pengoperasian infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya pengoperasian infrastruktur aneka EBT	Jumlah personil yang dibiayai untuk mengoperasionalkan infrastruktur aneka EBT	orang
3	29	05	1.07	0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	unit
3	29	05	1.07	0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen
3	29	05	1.08		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi			
3	29	05	1.08	0001	Penyusunan dan pemutakhiran data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terkumpulnya data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah dokumen data kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.08	0002	Sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terlaksananya sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan
3	29	05	1.08	0003	Pemberian Insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Tersusunnya laporan pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian insentif dan/atau disinsentif konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan
3	29	05	1.08	0004	Bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi terhadap pelaku usaha yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.08	0005	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi pada kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi	Laporan
3	29	05	1.09		Pelaksanaan Konservasi Energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			
3	29	05	1.09	0001	Evaluasi terhadap kegiatan konservasi energi	Terlaksananya evaluasi kegiatan konservasi energi	Jumlah laporan pelaksanaan evaluasi kegiatan konservasi energi	Laporan
3	29	05	1.09	0002	Pelaksanaan kegiatan konservasi energi	Terlaksananya kegiatan konservasi energi	Jumlah hasil kegiatan konservasi energi	Unit
3	29	05	1.09	0003	Perencanaan kegiatan konservasi energi	Tersusunnya rencana kegiatan konservasi energi	Jumlah rencana kegiatan konservasi energi	Dokumen
3	29	05	1.10		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.10	0001	Bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan bimbingan teknis konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	laporan
3	29	05	1.10	0002	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	laporan
3	29	05	1.10	0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	laporan
3	29	05	1.10	0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan Konservasi Energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	1.10	0005	Sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota	Laporan
3	29	05	3.05		Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan			
3	29	05	3.05	0001	Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Dokumen
3	29	05	3.05	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Dokumen
3	29	05	3.05	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.05	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Dokumen
3	29	05	3.05	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Dokumen
3	29	05	3.06		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas lintas wilayah kabupaten/kota.			
3	29	05	3.06	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah	Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah	Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	3.06	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	3.06	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.06	0004	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	3.07		Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah kabupaten/kota.			
3	29	05	3.07	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Laporan
3	29	05	3.07	0002	Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Dokumen
3	29	05	3.08		Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.08	0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Dokumen
3	29	05	3.08	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	3.08	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Dokumen
3	29	05	3.09		Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi.			
3	29	05	3.09	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.09	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi	Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Laporan
3	29	05	3.09	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Laporan
3	29	05	3.09	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.09	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.09	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.10		Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.			
3	29	05	3.10	0001	Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.	Terlaksananya konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Laporan
3	29	05	3.11		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.			
3	29	05	3.11	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh PemerintahDaerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
3	29	05	3.12		Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.12	0001	Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.	Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Dokumen
3	29	05	3.13		Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)			
3	29	05	3.13	0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Terlaksananya penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Dokumen
3	29	05	4.05		Penyelenggaraan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.05	0001	Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Dokumen
3	29	05	4.05	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Dokumen
3	29	05	4.05	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Laporan
3	29	05	4.05	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah provinsi	Dokumen
3	29	05	4.05	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah provinsi	Dokumen
3	29	05	4.06		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas lintas wilayah kabupaten/kota.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.06	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah	Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah	Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	4.06	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	4.06	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	4.06	0004	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	4.07		Pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar lintas wilayah kabupaten/kota.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.07	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Laporan
3	29	05	4.07	0002	Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Dokumen
3	29	05	4.08		Pengelolaan aneka energi baru dan energi terbaru kan lintas wilayah kabupaten/kota.			
3	29	05	4.08	0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.08	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	4.08	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Dokumen
3	29	05	4.08	0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen
3	29	05	4.09		Pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh pemerintah daerah provinsi.			
3	29	05	4.09	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.09	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi	Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.09	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.09	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.09	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.09	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.10		Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.10	0001	Pelaksanaan konservasi energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral.	Terlaksananya konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Laporan
3	29	05	4.11		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.			
3	29	05	4.11	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh PemerintahDaerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
3	29	05	4.12		Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.			
3	29	05	4.12	0001	Pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan barang milik daerah.	Terlaksananya pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.13		Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)			
3	29	05	4.13	0001	Penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Terlaksananya penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Jumlah dokumen penelitian dan pengembangan/pemasangan infrastruktur energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE)	Dokumen
3	29	06			PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN			
3	29	06	1.01		Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi			
3	29	06	1.01	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan.	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	06	1.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Mengendalikan dan Mengawasi Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.02		Penatausahaan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.02	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Prosedur dan Persyaratan Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang Ditetapkan	Dokumen
3	29	06	1.02	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.04		Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.04	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Terkait Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen
3	29	06	1.04	0002	Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Penentuan dan Penetapan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Pemberian Rekomendasi Persetujuan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.04	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	1.05		Penatausahaan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri			
3	29	06	1.05	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah Kebijakan terkait Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.05	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Jumlah surat Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki Oleh Penanam Modal dalam Negeri	Dokumen
3	29	06	1.05	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha Dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik bagi Badan Usaha dalam Negeri/Mayoritas Sahamnya Dimiliki oleh Penanam Modal Dalam Negeri	Laporan
3	29	06	1.06		Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.06	0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Dokumen
3	29	06	1.06	0002	Penetapan Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Penetapan Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Penerima Manfaat Dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Keluarga
3	29	06	1.06	0003	Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Laporan
3	29	06	1.06	0004	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Dokumen yang Terkumpul Terkait Data dan Informasi Sasaran Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	1.06	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan
3	29	06	1.06	0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Unit
3	29	06	1.06	0007	Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Terkendalinya dan Terawasinya Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Laporan
3	29	06	3.07		Penatausahaan Izun Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	3.07	0001	Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
3	29	06	3.07	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Yang Disusun	Dokumen
3	29	06	3.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	29	06	4.07		Penatausahaan Izun Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUPTLS) yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	06	4.07	0001	Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Prosedur dan Persyaratan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi yang ditetapkan	Dokumen
3	29	06	4.07	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terlaksananya Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah Rekomendasi Rekomendasi Perizinan dan Informasi IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi Yang Disusun	Dokumen
3	29	06	4.07	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Terkendalinya dan Terawasinya Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan IUPTLS yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi	Laporan
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	1.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	1.01	0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	1.02		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.02	0001	Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	1.02	0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.02	0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terlaksananya Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen
3	30	02	1.02	0005	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemberian surat rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.02	0006	Fasilitasi Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Terfasilitasinya Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
3	30	02	1.02	0007	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.02	0008	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	laporan
3	30	02	1.03		Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar			
3	30	02	1.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Dokumen Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya untuk Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.03	0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Dokumen
3	30	02	1.03	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.03	0004	Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya Adalah Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya dengan alat ukur Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya sebagai dokumen lampiran Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	1.03	0005	Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelaberan Bahan Berbahaya	Tersedianya laporan Pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelaberan Bahan Berbahaya	Jumlah laporan pengawasan Distribusi Pelaku Usaha Bahan Berbahaya di wilayah Provinsi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	laporan
3	30	02	1.03	0006	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Rekomendasi sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan Bagi Distributor Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah pemberian surat rekomendasi Pemenuhan Komitmen sebagai syarat Perizinan Berusaha Surat Keterangan Perdagangan bagi Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen
3	30	02	1.04		Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) bagi Daerah Provinsi yang Telah Ditetapkan Sebagai Instansi Penerbit SKA dan Angka Pengenal Importir (API)			
3	30	02	1.04	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen
3	30	02	3.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	3.01	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Penerbitan SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	3.05		Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan			
3	30	02	3.05	0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan
3	30	02	4.01		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	4.01	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Keterangan Minuman Beralkohol (SKMB) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Penerbitan SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SKMB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SKMB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	4.05		Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan			
3	30	02	4.05	0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Yang Dilaksanakan	Kegiatan
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	1.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
3	30	03	1.01	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	03	1.01	0002	Pembinaan dan Pengendalian Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Laporan
3	30	03	1.01	0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas	Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Orang
3	30	03	1.01	0004	Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dalam rangka implementasi SRG di masing-masing kabupaten/kota dalam provinsi	Terselenggaranya kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Jumlah kegiatan fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang	Kegiatan
3	30	03	3.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			
3	30	03	3.01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan	Unit
3	30	03	4.01		Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	03	4.01	0004	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi yang diberikan	Unit
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	1.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	04	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Laporan
3	30	04	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	laporan
3	30	04	1.02		Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	1.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Laporan
3	30	04	1.02	0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan
3	30	04	1.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya			
3	30	04	1.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	1.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan
3	30	04	1.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Laporan
3	30	04	1.03	0005	Pemeriksaan dokumen persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Tersedianya laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Jumlah laporan pemeriksaan persyaratan perizinan distributor pupuk bersubsidi	Laporan
3	30	04	3.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	04	3.01	0003	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Tersedianya bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	3.01	0005	Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	Terselenggaranya Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	Jumlah Kegiatan Penguatan dan Pengawasan Perdagangan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting(bapokting), Barang Modal Penunjang Produksi OAP, serta Barang Strategis lainnya di Provinsi Papua	Kegiatan
3	30	04	4.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi			
3	30	04	4.01	0004	Fasilitasi bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Tersedianya bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP	Jumlah bantuan peralatan dan sarana perdagangan bagi pelaku usaha OAP yang difasilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	4.01	0005	Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Terselenggaranya Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting(bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Jumlah Kegiatan Penguatan dan pengawasan perdagangan barang kebutuhan pokok dan barang penting(bapokting), barang modal penunjang produksi OAP, serta barang strategis lainnya di Provinsi Papua	Kegiatan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
3	30	05	1.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi			
3	30	05	1.01	0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha
3	30	05	1.01	0002	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	05	1.01	0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha
3	30	05	1.01	0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	Produk
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
3	30	06	1.01		Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	06	1.01	0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	BPSK
3	30	06	1.01	0002	Peningkatan Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen	Meningkatnya Hubungan Kerja dengan Lembaga Perlindungan Konsumen dalam Menyuarakan Aspirasi dan Memperjuangkan Hak Konsumen	Jumlah Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) yang Aktif	LPKSM
3	30	06	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen	Tersedianya Layanan Penanganan Pengaduan Konsumen	Jumlah Pengaduan Konsumen yang Ditangani	Pengaduan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	06	1.02		Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	06	1.02	0004	Pengembangan Layanan Kalibrasi	Meningkatnya Layanan Kalibrasi	Jumlah Sertifikat Kalibrasi yang Diterbitkan	Sertifikat
3	30	06	1.02	0005	Pengembangan Layanan Pengujian	Meningkatnya Layanan Pengujian Mutu Barang	Jumlah Laporan/Sertifikat Pengujian Mutu Barang yang Diterbitkan	laporan
3	30	06	1.02	0006	Pemantauan Mutu Produk	Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau	Produk
3	30	06	1.02	0007	Pengembangan Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeksi	Meningkatnya Layanan Sertifikasi/Lembaga Inspeks	Jumlah Sertifikat Produk/person/sertifikat Inspeksi yang Diterbitkan	Sertifikat
3	30	06	1.03		Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	06	1.03	0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	06	1.03	0004	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Meningkatnya Penegakan Hukum di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Kasus yang Ditangani	Kasus
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3	30	07	1.01		Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri			
3	30	07	1.01	0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	UMKM
3	30	07	1.02		Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	07	1.02	0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM
3	30	07	1.03		Pelaksanaan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			
3	30	07	1.03	0002	Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Tersedianya Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri melalui Peningkatan Literasi Anak Didik, Generasi Muda dan Masyarakat Tentang Kecintaan dan Kebanggaan dalam Menggunakan Produk Dalam Negeri	Jumlah Laporan Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	07	1.03	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah orang yang mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang
3	30	07	1.03	0005	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	Tersedianya laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Jumlah laporan kegiatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri oleh masyarakat yang melibatkan stakeholder, tokoh masyarakat atau influencer	Laporan
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02			PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			
3	31	02	1.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	1.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	1.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	1.01	0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	02	1.01	0007	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	Laporan
3	31	02	1.01	0008	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi
3	31	02	1.01	0009	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	1.01	0010	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Provinsi	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen
3	31	02	3.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	3.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Dilaksanakan	Dokumen
3	31	02	3.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	3.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Dokumen
3	31	02	3.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Dokumen
3	31	02	4.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	4.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	4.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP Yang Diberikan	Unit
3	31	02	4.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Provinsi	Dokumen
3	31	02	4.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP di Provinsi	Dokumen
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	1.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi			
3	31	03	1.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	1.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	1.01		Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			
3	31	04	1.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen
3	31	04	1.01	0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	04	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	02			PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	02	1.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			
3	32	02	1.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Dokumen
3	32	02	1.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	02	1.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar
3	32	02	1.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	03	1.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3	32	03	1.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi Antar Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (Yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen
3	32	03	1.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi penduduk yang memiliki tanah dan rumah di kawasan transmigrasi yang berpotensi untuk menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang
3	32	03	1.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga
3	32	03	1.01	0008	Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Verifikasi Hasil Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Verifikasi Hasil Penjajakan	Lokasi
3	32	03	1.01	0009	Penyuluhan dan Sosialisasi Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal Dan OPD Tingkat Kabupaten/ Kota	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal dan OPD Tingkat Kabupaten yang Mendapatkan Penyuluhan dan Sosialisasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	0010	Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Wawasan Kebangsaan dan Karakter Lokasi Daerah Tujuan)	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK
3	32	03	1.01	0011	Pengangkutan dari Kabupaten/Kota ke Embarkasi	Terlaksananya Pengangkutan Transmigran Dari Kabupaten/Kota Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK
3	32	03	1.01	0012	Penampungan Provinsi	Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Provinsi Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Provinsi Daerah Asal	KK
3	32	03	1.01	0013	Pelayanan Kesehatan Transmigran	Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK
3	32	03	1.01	0014	Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Terselenggaranya Seleksi Akhir Pra Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Terseleksi Akhir Pra Pemberangkatan	KK
3	32	03	1.01	0015	Pengangkutan dari Penampungan Provinsi Ke Embarkasi	Terlaksananya Pengangkutan Dari Provinsi Asal Ke Embarkasi Pemberangkatan	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	1.01	0016	Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai Ke Lokasi	Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan Dari Penampungan Provinsi Sampai ke Lokasi	KK
3	32	03	1.01	0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	Paket
3	32	03	1.01	0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	04	1.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan			
3	32	04	1.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga
3	32	04	1.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02			PROGRAM PENATAAN ORGANISASI			
4	01	02	1.01		Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan			
4	01	02	1.01	0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	02	1.01	0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	02	1.01	0003	Penataan Analisis Jabatan	Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Dokumen
4	01	02	1.02		Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja			
4	01	02	1.02	0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Dokumen
4	01	02	1.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	1.02	0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Laporan
4	01	02	1.02	0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Dokumen
4	01	02	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Dokumen
4	01	03			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH			
4	01	03	1.01		Pelaksanaan Tugas Pemerintahan			
4	01	03	1.01	0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Dokumen
4	01	03	1.01	0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Dokumen
4	01	03	1.01	0003	Fasilitasi Penataan Wilayah	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	Dokumen
4	01	03	1.02		Pelaksanaan Otonomi Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	1.02	0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Dokumen
4	01	03	1.02	0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	Dokumen
4	01	03	1.02	0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Laporan
4	01	03	1.02	0004	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	1.02	0005	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
4	01	03	1.03		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			
4	01	03	1.03	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	03	1.03	0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	03	1.03	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	Laporan
4	01	04			PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	04	1.01		Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual			
4	01	04	1.01	0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual	Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	Unit
4	01	04	1.01	0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	1.02		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar			
4	01	04	1.02	0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Dokumen
4	01	04	1.02	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Dokumen
4	01	04	1.02	0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Dokumen
4	01	04	1.03		Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	1.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Dokumen
4	01	04	1.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	1.03	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Dokumen
4	01	05			PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM			
4	01	05	1.01		Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan			
4	01	05	1.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	Dokumen
4	01	05	1.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	Dokumen
4	01	05	1.01	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	Dokumen
4	01	05	1.01	0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	Dokumen
4	01	05	1.02		Fasilitasi Bantuan Hukum			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	05	1.02	0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	Kasus
4	01	05	1.02	0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	Kasus
4	01	06			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	06	1.01		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian			
4	01	06	1.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Dokumen
4	01	06	1.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Dokumen
4	01	06	1.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Dokumen
4	01	06	1.02		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	06	1.02	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Dokumen
4	01	06	1.02	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Dokumen
4	01	06	1.02	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Dokumen
4	01	06	1.03		Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD			
4	01	06	1.03	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	06	1.03	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Dokumen
4	01	06	1.03	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen
4	01	06	1.03	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Dokumen
4	01	06	1.03	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BLUD	Dokumen
4	01	07			PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	07	1.01		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
4	01	07	1.01	0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.01	0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.02		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik			
4	01	07	1.02	0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Laporan
4	01	07	1.02	0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.02	0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Laporan
4	01	07	1.03		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	07	1.03	0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Orang
4	01	07	1.03	0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	07	1.03	0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	08			PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			
4	01	08	1.01		Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
4	01	08	1.01	0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	08	1.01	0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Laporan
4	01	08	1.01	0003	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Laporan
4	01	08	1.02		Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			
4	01	08	1.02	0001	Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah yang Disediakan	Dokumen
4	01	08	1.02	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Laporan
4	01	08	1.02	0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Dokumen
4	01	09			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.01		Pengelolaan Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri			
4	01	09	3.01	0001	Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Perbatasan	Laporan
4	01	09	3.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Kerja Sama Luar Negeri yang Difasilitasi	Dokumen
4	01	09	3.02		Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus			
4	01	09	3.02	0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksanananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Dokumen
4	01	09	3.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Laporan
4	01	09	3.03		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi			
4	01	09	3.03	0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terbangunnya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.03	0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
4	01	09	3.03	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna	Terbangunnya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	0005	Pembangunan Perpustakaan	Terbangunnya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit
4	01	09	3.03	0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terpeliharanya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit
4	01	09	3.03	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terpeliharanya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	09	3.03	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna	Terpeliharanya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	09	3.03	0010	Pemeliharaan Perpustakaan	Terpeliharanya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	09	3.03	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.03	0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit
4	01	09	3.03	0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	09	3.03	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	09	3.03	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna	Terehabilitasi Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	09	3.03	0016	Rehabilitasi Perpustakaan	Terehabilitasi Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	09	3.03	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit
4	01	09	3.03	0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	09	3.04		Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi			
4	01	09	3.04	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	09	3.04	0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
4	01	09	3.04	0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Tersedianya Bantuan Akhir Studi	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang
4	01	09	3.04	0004	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	09	3.04	0005	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang
4	01	09	3.04	0006	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya
4	01	09	3.04	0007	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
4	01	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Urusan Keistimewaan			
4	01	10	5.01	0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Dirumuskan	Dokumen
4	01	10	5.01	0002	Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Jumlah Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan	Dokumen
4	01	10	5.01	0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Bentuk Kelembagaan Asli DIY	Dokumen
4	01	10	5.01	0004	Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbinanya Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	10	5.01	0005	Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Kelembagaan Asli	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kelembagaan Asli	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.01	0006	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen
4	01	10	5.01	0007	Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Diawasi	Dokumen
4	01	10	5.01	0008	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen
4	01	10	5.01	0009	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Tersusunnya Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Rancangan Produk Hukum Daerah Tindak Lanjut Pelaksanaan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.01	0010	Pembinaan Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Terbinanya Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Dibina	Dokumen
4	01	10	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan			
4	01	10	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan DIY	Dokumen
4	01	10	5.02	0002	Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Terlaksananya Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Jumlah PNS Mutasi Luar Daerah yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan	Orang
4	01	10	5.02	0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Terselenggaranya Diklat Keistimewaan	Jumlah PNS yang Ikut Diklat Keistimewaan	Orang
4	01	10	5.03		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara			
4	01	10	5.03	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.03	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Tata Cara	Laporan
4	01	10	5.04		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
4	01	10	5.04	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Dokumen
4	01	10	5.04	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan
4	01	10	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			
4	01	10	5.05	0001	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan
4	01	10	5.05	0003	Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen
4	01	10	5.05	0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan
4	01	10	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			
4	01	10	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	10	5.06	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan se-DIY	Laporan
4	01	10	5.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
4	01	10	5.07	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Keistimewan yang Disediakan	Unit
4	01	10	5.08		Peningkatan Pelayanan Parampara Praja			
4	01	10	5.08	0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Tersedianya Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Diterbitkan	Rekomendasi
4	01	10	5.09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan			
4	01	10	5.09	0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Terbinanya Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Dokumen
4	01	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN URUSAN TATA CARA PENGISIAN JABATAN KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DIY			
4	01	11	5.01		Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	11	5.01	0001	Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terlaksananya Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pemberhentian, Penetapan dan Pengesahan Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Dokumen
4	01	11	5.01	0002	Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselenggaranya Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Penetapan dan Pengusulan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan
4	01	11	5.01	0003	Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Terselenggaranya Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan
4	01	11	5.01	0004	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Tersosialisanya Informasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Jumlah Laporan Sosialisasi Penyelenggaraan Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY	Laporan
4	01	12			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI KHUSUS PAPUA BARAT			
4	01	12	4.01		Pengelolaan dan Koordinasi Otonomi Khusus			
4	01	12	4.01	0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksanananya Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Otonomi Khusus	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12	4.01	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi Khusus	Laporan
4	01	12	4.02		Fasilitasi Penyediaan Infrastruktur Pendidikan Tinggi			
4	01	12	4.02	0001	Pembangunan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terbangunnya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	0002	Pembangunan Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	0003	Pembangunan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terbangunnya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi yang Dibangun	Ruang
4	01	12	4.02	0004	Pembangunan Gedung Serba Guna	Terbangunnya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	0005	Pembangunan Perpustakaan	Terbangunnya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun	Unit
4	01	12	4.02	0006	Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12	4.02	0007	Pemeliharaan Gedung Universitas/ Sekolah Tinggi/Akademi	Terpeliharanya Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit
4	01	12	4.02	0008	Pemeliharaan Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terpeliharanya Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	12	4.02	0009	Pemeliharaan Gedung Serba Guna	Terpeliharanya Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	12	4.02	0010	Pemeliharaan Perpustakaan	Terpeliharanya Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	12	4.02	0011	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit
4	01	12	4.02	0012	Rehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Terehabilitasi Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Jumlah Gedung Universitas/Sekolah Tinggi/Akademi	Unit
4	01	12	4.02	0013	Rehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Laboratorium Pendidikan Tinggi	Jumlah Laboratorium Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	12	4.02	0014	Rehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Terehabilitasi Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Jumlah Ruang Belajar Pendidikan Tinggi	Ruang
4	01	12	4.02	0015	Rehabilitasi Gedung Serba Guna	Terehabilitasi Gedung Serba Guna	Jumlah Gedung Serba Guna	Unit
4	01	12	4.02	0016	Rehabilitasi Perpustakaan	Terehabilitasi Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan	Unit
4	01	12	4.02	0017	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Terehabilitasi Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12	4.02	0018	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Tinggi	Unit
4	01	12	4.03		Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi			
4	01	12	4.03	0001	Penyediaan Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Mahasiswa Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	12	4.03	0002	Penyediaan Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Tersedianya Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Status Dosen Jenjang Strata Dua dan Tiga	Orang
4	01	12	4.03	0003	Penyediaan Bantuan Akhir Studi	Tersedianya Bantuan Akhir Studi	Jumlah Orang yang Menerima Bantuan Akhir Studi	Orang
4	01	12	4.03	0004	Penyediaan Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Tersedianya Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Prestasi Jenjang Diploma dan Strata	Orang
4	01	12	4.03	0005	Penyediaan Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Tersedianya Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Beasiswa Studi Khusus dan Sesuai Kebutuhan Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	12	4.03	0006	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK)	Biaya
4	01	12	4.03	0007	Penyediaan Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Tersedianya Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Jumlah Biaya Afirmasi Pendidikan Sebutan Lainnya	Biaya
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	1.01		Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD			
4	02	02	1.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	1.01	0002	Pembahasan Rancangan Perda	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	Dokumen
4	02	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen
4	02	02	1.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang
4	02	02	1.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			
4	02	02	1.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen
4	02	02	1.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen
4	02	02	1.02	0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen
4	02	02	1.02	0004	Pembahasan Perubahan APBD	Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen
4	02	02	1.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen
4	02	02	1.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
4	02	02	1.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan
4	02	02	1.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan
4	02	02	1.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan
4	02	02	1.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan
4	02	02	1.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen
4	02	02	1.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen
4	02	02	1.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen
4	02	02	1.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.04	0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen
4	02	02	1.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	1.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang
4	02	02	1.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang
4	02	02	1.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen
4	02	02	1.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen
4	02	02	1.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen
4	02	02	1.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	1.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.05	0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen
4	02	02	1.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang
4	02	02	1.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			
4	02	02	1.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen
4	02	02	1.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan
4	02	02	1.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah			
4	02	02	1.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	1.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen
4	02	02	1.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	1.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	1.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan
4	02	02	1.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen
4	02	02	1.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen
4	02	02	1.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen
4	02	03			PROGRAM SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA			
4	02	03	3.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	03	3.01	0001	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen
4	02	03	3.01	0002	Penyusunan LKPJ dan Rencana Kerja	Tersusunnya LKPJ dan Rencana Kerja	Jumlah Dokumen LKPJ dan Rencana Kerja yang Disusun	Dokumen
4	02	03	3.01	0003	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen
4	02	03	3.01	0004	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen
4	02	05			PROGRAM SEKRETARIAT DPRD PAPUA BARAT			
4	02	05	4.01		Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	05	4.01	0006	Dialog dan Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Terlaksananya Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Jumlah Dokumen Hasil Dialog dan Koordinasi DPRP dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	Dokumen
4	02	05	4.01	0007	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Terlaksananya Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Jumlah Dokumen Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus	Dokumen
4	02	05	4.01	0008	Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Masyarakat Papua	Dokumen
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	1.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen
5	01	02	1.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen
5	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara
5	01	02	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara
5	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.01	0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen
5	01	02	1.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen
5	01	02	1.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.02	0003	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terbinanya Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang
5	01	02	1.02	0004	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku
5	01	02	1.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
5	01	02	1.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan
5	01	02	1.03	0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen
5	01	02	1.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
5	01	02	1.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen
5	01	02	1.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	1.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dokumen
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	1.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5	01	03	1.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	1.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	1.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	1.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	1.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	1.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5	01	03	1.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	1.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	1.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	1.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
5	01	03	1.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
5	01	03	1.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan
5	01	03	1.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			
5	01	03	1.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	1.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	1.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	1.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	1.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan
5	01	03	1.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan
5	01	03	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan
5	02				KEUANGAN			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	1.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5	02	02	1.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	1.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	1.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen
5	02	02	1.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen
5	02	02	1.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen
5	02	02	1.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen
5	02	02	1.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen
5	02	02	1.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02		Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota			
5	02	02	1.02	0001	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	1.02	0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	Dokumen
5	02	02	1.02	0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Laporan
5	02	02	1.02	0007	Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD yang Diasistensi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0008	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Dokumen
5	02	02	1.02	0009	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0010	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen
5	02	02	1.02	0011	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.02	0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.03		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5	02	02	1.03	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen
5	02	02	1.03	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan
5	02	02	1.03	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.03	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen
5	02	02	1.03	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen
5	02	02	1.03	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.03	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen
5	02	02	1.03	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	1.04		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	02	02	1.04	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.04	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen
5	02	02	1.04	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan
5	02	02	1.04	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.04	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen
5	02	02	1.04	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	1.04	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.04	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	1.04	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	1.04	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	1.04	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang
5	02	02	1.04	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	Lembaga
5	02	02	1.05		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.05	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Dana Cadangan Pemerintah Daerah yang Dikelola	Dokumen
5	02	02	1.05	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.05	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	1.05	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan
5	02	02	1.05	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
5	02	02	1.05	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan
5	02	02	1.05	0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan
5	02	02	1.05	0011	Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Terkelolanya Dana Abadi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Laporan
5	02	02	1.06		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	1.06	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.06	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	1.06	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5	02	03	1.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5	02	03	1.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	1.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	1.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	1.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	1.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	1.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	1.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	02	04	1.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	1.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Sarana dan Prasarana

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	1.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen Ketetapan
5	02	04	1.01	0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	Laporan
5	02	04	1.01	0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	1.01	0010	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	Dokumen SSPD

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	1.01	0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	Dokumen Surat Persetujuan/ Penolakan
5	02	04	1.01	0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan
5	02	04	1.01	0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5	03	02	1.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen
5	03	02	1.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan
5	03	02	1.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen
5	03	02	1.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Laporan
5	03	02	1.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.01	0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen
5	03	02	1.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	1.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	1.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan
5	03	02	1.02		Mutasi dan Promosi ASN			
5	03	02	1.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Laporan
5	03	02	1.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen
5	03	02	1.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	03	02	1.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
5	03	02	1.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen
5	03	02	1.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen
5	03	02	1.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	Dokumen
5	03	02	1.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen
5	03	02	1.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan
5	03	02	1.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang
5	03	02	1.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	1.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terfasilitasinya Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Orang
5	03	02	1.03	0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan
5	03	02	1.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	Orang
5	03	02	1.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terfasilitasinya Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	1.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan
5	03	02	1.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5	03	02	1.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	1.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	1.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan
5	03	02	1.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	1.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang
5	03	02	1.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen
5	03	02	1.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang
5	03	02	1.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan
5	03	02	1.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen
5	03	02	1.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	04	02	1.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen
5	04	02	1.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang
5	04	02	1.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	Dokumen
5	04	02	1.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	Dokumen
5	04	02	1.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	Dokumen
5	04	02	1.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan
5	04	02	1.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	Dokumen
5	04	02	1.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Orang
5	04	02	1.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
5	04	02	1.03	0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	1.03	0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	1.03	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	1.03	0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	1.03	0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Laporan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	1.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			
5	05	02	1.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan
5	05	02	1.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan
5	05	02	1.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	1.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan
5	05	02	1.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan
5	05	02	1.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan
5	05	02	1.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan
5	05	02	1.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan
5	05	02	1.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Tersedianya Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	Rekomendasi
5	05	02	1.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan
5	05	02	1.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Tersedianya Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang yang Diterbitkan	Rekomendasi
5	05	02	1.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5	05	02	1.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen
5	05	02	1.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen
5	05	02	1.02	0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen
5	05	02	1.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen
5	05	02	1.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen
5	05	02	1.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen
5	05	02	1.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen
5	05	02	1.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen
5	05	02	1.02	0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen
5	05	02	1.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen
5	05	02	1.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen
5	05	02	1.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen
5	05	02	1.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen
5	05	02	1.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen
5	05	02	1.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
5	05	02	1.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen
5	05	02	1.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen
5	05	02	1.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen
5	05	02	1.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen
5	05	02	1.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen
5	05	02	1.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	1.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen
5	05	02	1.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	1.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan
5	05	02	1.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan
5	05	02	1.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan
5	05	02	8.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	8.04	0012	Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Bali	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	8.04	0013	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Penguatan Desa Adat Bali	Dokumen
5	05	02	8.04	0014	Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Riset dan Inovasi Pengembangan Tata Kehidupan Krama Bali	Dokumen
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
5	05	03	1.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			
5	05	03	1.01	0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.01	0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen
5	05	03	1.01	0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah
5	05	03	1.01	0004	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.01	0005	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan
5	05	03	1.01	0006	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan
5	05	03	1.02		Invensi dan Inovasi			
5	05	03	1.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Laporan
5	05	03	1.02	0003	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0004	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Pelatihan
5	05	03	1.02	0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0009	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	Laporan
5	05	03	1.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0012	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi
5	05	03	1.02	0013	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan
5	05	03	1.02	0015	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0016	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0018	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0019	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan
5	05	03	1.02	0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan
5	05	03	1.02	0021	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan
5	05	03	1.02	0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	1.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan
5	05	03	1.02	0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Laporan
5	05	03	1.02	0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan
5	05	03	1.02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			
5	06	02	1.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen
5	06	02	1.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen
5	06	02	1.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5	06	02	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan	Dokumen
5	06	02	1.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	1.02	0003	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	1.02	0004	Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya untuk Pengusulan Penetapan Zona Pengembangan Ekonomi, Sosial Budaya, Lingkungan Hidup, dan Zona Lainnya di Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	1.03		Monitoring dan Evaluasi			
5	06	02	1.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	1.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Laporan
5	06	02	1.03	0003	Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	03			PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA			
5	06	03	1.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama			
5	06	03	1.01	0001	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang disusun	Dokumen
5	06	03	1.02		Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara			
5	06	03	1.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen
5	06	03	1.02	0002	Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penegasan, Pemeliharaan, dan Pengamanan Batas Wilayah Negara	Dokumen
5	06	03	1.02	0003	Inventarisasi Potensi dan Pemanfaatan Sumber daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi Potensi Sumber Daya dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	03	1.02	0004	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara.	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasaan Negara	Dokumen
5	06	03	1.03		Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama Kawasan Perbatasan Negara			
5	06	03	1.03	0001	Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara	Terlaksananya Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan koordinasi kerjasama antar negara	Dokumen
5	06	03	1.04		Pelaksanaan Koordinasi Pembangunan Perbatasan Negara			
5	06	03	1.04	0001	Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Penyelesaian Batas Wilayah Negara.	Dokumen
5	06	03	1.05		Monitoring dan Evaluasi			
5	06	03	1.05	0001	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	03	1.05	0002	Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Tersedianya Dukungan Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Laporan
5	06	03	1.05	0003	Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Laporan
5	06	03	1.06		Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara			
5	06	03	1.06	0001	Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	Tersedianya Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	07				PENGELOLAAN PENGHUBUNG			
5	07	02			PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG			
5	07	02	1.01		Pelaksanaan Pelayanan Penghubung			
5	07	02	1.01	0001	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Kualitas Pelayanan Publik bagi Aparatur dan Masyarakat yang Ditingkatkan	Laporan
5	07	02	1.01	0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Laporan
5	07	02	1.01	0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	Laporan
5	07	02	1.01	0004	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	07	02	1.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Laporan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6	01	02	1.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6	01	02	1.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	1.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	1.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
6	01	02	1.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan
6	01	02	1.01	0005	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	02	1.01	0006	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan
6	01	02	1.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
6	01	02	1.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
6	01	02	1.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan
6	01	02	1.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Laporan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6	01	03	1.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	03	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	1.02		Pendampingan dan Asistensi			
6	01	03	1.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
6	01	03	1.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Perangkat Daerah
6	01	03	1.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	03	1.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN ADMINISTRASI			
7	01	03			PROGRAM PENGELOLAAN KECAMATAN DAN KELURAHAN			
7	01	03	6.01		Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan			
7	01	03	6.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan	
7	01	03	6.01	0002	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat	Terlaksananya Program Kewaspadaan Dini Masyarakat	Jumlah Laporan Program Kewaspadaan Dini Masyarakat yang Disediakan	
7	01	03	6.01	0003	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	Terlaksananya Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK	Jumlah RT, RW, dan/atau LMK yang Mengikuti Peningkatan Peran Kelembagaan	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	6.01	0004	Pelaksanaan Bina Mental Spritual	Terlaksananya Bina Mental Spritual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual	
7	01	03	6.01	0005	Penanganan Bencana	Terlaksananya Penanganan Bencana	jumlah pelaksanaan penanganan bencana	
7	01	03	6.01	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya	
7	01	03	6.01	0007	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	Terselenggaranya Posko Bersama Pemilu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu	
7	01	03	6.01	0008	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan	
7	01	03	6.01	0009	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas	
7	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	04	6.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	04	6.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	
7	01	04	6.02		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Ditugaskan kepada Camat dan/atau Lurah			
7	01	04	6.02	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Ditugaskan	
7	01	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	05	6.01		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	05	6.01	0001	Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberdayakan	
7	01	05	6.02		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			
7	01	05	6.02	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	05	6.02	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
7	01	06			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	06	6.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	06	6.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan dan Kelurahan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7	02				KOTA ADMINISTRASI			
7	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KOTA ADMINISTRASI			
7	02	02	6.03		Peningkatan Penyelenggaraan Kota Administrasi			
7	02	02	6.03	0001	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kota Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Meningkat Kapasitasnya	Lembaga
7	02	02	6.03	0002	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0003	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0004	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0005	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0009	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0010	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Terselenggaranya Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Sehat di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0012	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kota Layak Anak di Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0015	Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Terlaksananya Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Partisipasi Kota Administrasi dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI)	Dokumen
7	02	02	6.03	0016	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0018	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0019	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0024	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kota Administrasi yang Disusun dan dievaluasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0025	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0026	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0027	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kota Administrasi yang Dilaksanakan	Dokumen
7	02	02	6.03	0028	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kota Administrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0039	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0041	Pelaksanaan Character Building Pegawai Kota Administrasi	Terlaksananya Character Building Pegawai Kota Administrasi	Jumlah Pegawai Kota Administrasi yang Mengikuti Character Building yang Dilaksanakan	Orang
7	02	02	6.03	0043	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Ketahanan Pangan pada Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0044	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kota Administrasi	Dokumen
7	02	02	6.03	0047	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kota Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0048	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kota Administrasi	
7	02	02	6.03	0049	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kota Administrasi	
7	02	02	6.03	0050	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi	
7	02	02	6.03	0051	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kota Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	02	02	6.03	0052	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kota Administrasi	
7	02	02	6.03	0053	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Walikota/Camat/Lurah pada Kota Administrasi	
7	02	02	6.03	0054	Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	Terlaksananya Bina Mental Spritual Kota Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kota Administrasi	
7	03				KABUPATEN ADMINISTRASI			
7	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN KABUPATEN ADMINISTRASI			
7	03	03	6.01		Peningkatan Penyelenggaraan Kabupaten Administrasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0001	Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Terlaksananya Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	Jumlah Dokumen Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI	
7	03	03	6.01	0002	Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Penyusunan dan Evaluasi Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Standar Operasional dan Prosedur Kabupaten Administrasi yang Disusun dan Dievaluasi	
7	03	03	6.01	0003	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0004	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0005	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi	Meningkatnya Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0006	Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan dan Pembinaan Kabupaten Peduli HAM (Hak Asasi Manusia) Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0007	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0008	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0009	Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0010	Pelaksanaan Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi	Jumlah Pegawai Kabupaten Administrasi yang Mengikuti Character Building	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0011	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0012	Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0013	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Administrasi	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Kabupaten Administrasi	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0014	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0015	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0016	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kabupaten Sehat di Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0017	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0018	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0019	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0020	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0021	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perekonomian Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pemerintahan Kabupaten Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0023	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0024	Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi	Meningkatnya Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Tugas dan Fungsi Dewan Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis I di Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0026	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi pada Unit Kerja Teknis II di Kabupaten Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0027	Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelesaian Sengketa Pertanahan Tingkat Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0028	Penyelenggaraan Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Keprotokolan Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0029	Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi	Terselenggaranya Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Tamu dan Jamuan Resmi Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0030	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Pengendalian dan Evaluasi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0031	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di Kabupaten Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0032	Pelaksanaan Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Monitoring Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0033	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Lurah pada Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Bupati/Camat/Lurah pada Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Berat/Rehab Sedang/Rehab Ringan Gedung Bupati/Camat/Lurah pada Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0034	Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bina Mental Spritual Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0035	Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Evaluasi Pelayanan Publik Tingkat Kabupaten Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	03	6.01	0036	Pelaksanaan Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Koordinasi Pengukuran Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik di Kabupaten Administrasi yang Dilaksanakan	
7	03	03	6.01	0037	Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Pembinaan Administrasi Kepegawaian Kabupaten Administrasi	
7	03	03	6.01	0038	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	
7	03	03	6.01	0039	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas Kabupaten Administrasi	
7	03	04			PROGRAM PELIMPAHAN KEWENANGAN KABUPATEN ADMINISTRASI			
7	03	04	6.01		Pengelolaan Pelimpahan Kewenangan Administrasi			
7	03	04	6.01	0001	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	04	6.01	0002	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman Kabupaten Administrasi	
7	03	04	6.01	0003	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi yang Dibangun	
7	03	04	6.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Titik Pencahayaan Kota yang Bertambah	
7	03	04	6.01	0005	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencahayaan di Kabupaten Administrasi yang dipelihara	
7	03	04	6.01	0006	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Panjang Jalan yang Dibangun	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	04	6.01	0007	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	
7	03	04	6.01	0008	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	
7	03	04	6.01	0009	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kota Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Pencahayaan Kota Kabupaten Administrasi	
7	03	04	6.01	0010	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan bahan Pustaka untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	04	6.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Kabupaten Administrasi	Terlaksananya Pengembangan perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah Kabupaten sesuai kewenangannya	
7	03	04	6.01	0012	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Administrasi	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten Administrasi	
7	03	04	6.01	0013	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	04	6.01	0014	Penyediaan Permakanan	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	
7	03	04	6.01	0015	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	
7	03	04	6.01	0016	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	
7	03	04	6.01	0017	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten Administrasi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi	
7	03	04	6.01	0018	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	04	6.01	0019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi yang Tersedia dan Termanfaatkan	
7	03	04	6.01	0020	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	
7	03	04	6.01	0021	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi event dan Single Event Tingkat Kabupaten Administrasi	
7	03	04	6.01	0022	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Administrasi	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Kabupaten Administrasi	

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	03	04	6.01	0023	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten Administrasi	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Kader Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	
7	03	04	6.01	0024	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten Administrasi yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	
7	03	04	6.01	0025	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Kabupaten Administrasi	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten Administrasi yang Berkualitas	Jumlah Pusat dan Aktivitas Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten Administrasi yang Berkualitas	
7	03	04	6.01	0026	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Organisasi Kepramukaan Kabupaten Administrasi yang Meningkat Kapasitasnya	
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			
8	01	02	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8	01	02	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen
8	01	02	1.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang
8	01	02	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan
8	01	02	1.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Dokumen Hasil Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Dokumen
8	01	02	1.01	0007	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	1.01	0008	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen
8	01	02	1.01	0009	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Dokumen
8	01	02	1.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen
8	01	02	1.01	0011	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen
8	01	02	1.01	0012	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8	01	03	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
8	01	04	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	04	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
8	01	05	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
8	01	05	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	05	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8	01	06	1.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	1.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan
8	01	06	1.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Dokumen
9					UNSUR KEKHUSUSAN			
9	01				KEKHUSUSAN ACEH			
9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			
9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.01	0001	Pelatihan Mawaris	Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	Orang
9	01	02	7.01	0002	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman	Orang
9	01	02	7.01	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	0004	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru''yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
9	01	02	7.01	0005	Seminar Problematika Syariat Islam	Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.01	0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat Mental Spiritualnya yang Dibina	Orang
9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al-quran			
9	01	02	7.02	0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	Orang
9	01	02	7.02	0002	Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang
9	01	02	7.02	0003	Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.02	0004	Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Orang
9	01	02	7.02	0005	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.02	0006	Pemberangkatan Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Terberangkatkannya Kafilah Aceh Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Kafilah Aceh yang Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan	Orang
9	01	02	7.03		Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			
9	01	02	7.03	0001	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Terlaksananya Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			
9	01	02	7.04	0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04	0002	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Dibina	Orang
9	01	02	7.04	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat kualitasnya	Orang
9	01	02	7.04	0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.04	0005	Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh	Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid Se Aceh	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	Orang
9	01	02	7.04	0006	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam	Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.04	0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina	Gampong
9	01	02	7.04	0008	Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum'at ke Kabupaten/Kota	Jumlah Khatib Jum''at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota	Orang
9	01	02	7.04	0009	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan	Laporan
9	01	02	7.04	0010	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.04	0011	Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Terlaksananya Penyedian, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	Unit
9	01	02	7.04	0012	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir	Unit
9	01	02	7.04	0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	Unit
9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam			
9	01	02	7.05	0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Laporan
9	01	02	7.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.05	0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.05	0004	Pembinaan Keluarga Islami	Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	Keluarga
9	01	02	7.05	0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina	Pelaku Ekonomi
9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan, dan Peningkatan Kerjasama Peradilan Syariat Islam			
9	01	02	7.06	0001	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0002	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Orang
9	01	02	7.06	0003	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.06	0004	Workshop dan FGD Perkara Syariah	Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah	Orang
9	01	02	7.06	0005	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Tersusunnya Regulasi Syariat Islam	Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun	Dokumen
9	01	02	7.06	0006	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0008	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Orang
9	01	02	7.06	0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	Orang
9	01	02	7.07		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturahman Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.07	0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah Pada Masjid Raya Baiturrahman	Lembaga
9	01	02	7.07	0002	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Raya Baiturahman	Orang
9	01	02	7.07	0003	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Raya Baiturrahman	Orang
9	01	02	7.07	0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Raya Baiturrahman	Orang
9	01	02	7.07	0005	Mendatangkan Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	Didatangkannya Imam Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan dari Luar Negeri	Jumlah Imam dari Luar Negeri saat Sholat Terawih Bulan Suci Ramadhan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.07	0006	Pelayanan BLUD	Terselenggaranya Pelayanan BLUD	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pelayanan BLUD	Laporan
9	01	02	7.07	0007	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terpeliharanya Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh Secara Rutin/Berkala	Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara rutin/berkala	Unit
9	01	02	7.07	0008	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh Secara Rutin/Berkala	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Unit
9	01	02	7.07	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh	Jumlah Gedung dan Bangunan Masjid Raya Baiturahman Aceh yang Direhab Sedang/Berat	Unit
9	01	03			PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH			
9	01	03	7.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama			
9	01	03	7.01	0001	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Terbinaanya Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	0002	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Dokumen Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Dokumen
9	01	03	7.01	0003	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0004	Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Terlaksananya Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Laporan
9	01	03	7.01	0005	Muzakarah Masalah Keagamaan	Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	0006	Pengkajian Aliran Sempalan	Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Aliran Sempalan	Dokumen
9	01	03	7.01	0007	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Terlaksananya Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Jumlah Dokumen Hasil Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Dokumen
9	01	03	7.01	0008	Kajian Kebijakan Daerah	Terlaksananya Kajian Kebijakan Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah yang dikaji	Dokumen
9	01	03	7.01	0009	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Dokumen Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	0010	Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Terlaksananya Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Orang
9	01	03	7.01	0011	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Orang
9	01	03	7.01	0012	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Terlaksananya Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Jumlah Laporan Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	0013	Kajian Pedoman Keagamaan	Terlaksananya Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Kajian Pedoman Keagamaan yang Dihasilkan	Laporan
9	01	03	7.01	0014	Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Kader Ulama (Migas Kabupaten/Kota) yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0015	Pendidikan Kader Ulama (Otsus)	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama (Otsus)	Jumlah Kader Ulama (Otsus) yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0016	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.02		Silaturahmi Ulama-Ulama			
9	01	03	7.02	0001	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Terselenggaranya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya	Orang
9	01	03	7.02	0002	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah	Orang
9	01	03	7.02	0003	Kunjungan Muhibah Ulama	Terlaksanya Kunjungan Muhibah Ulama	Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama	Laporan
9	01	03	7.03		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama			
9	01	03	7.03	0001	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0002	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Terlaksananya Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0003	Kerjasama Sistem Jaminan Produk Halal	Terbentuknya Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0004	Peningkatan Kapasistas Laboratorium Halal	Meningkatnya Kapasistas Laboratorium Halal	Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.03	0005	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Orang
9	01	03	7.03	0006	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Dokumen
9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL ACEH			
9	01	04	7.01		Pengelolaan ZISWAF			
9	01	04	7.01	0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Tersusunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Dokumen Perencanaan Ziswaf yang Disusun	Dokumen
9	01	04	7.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal			
9	01	04	7.02	0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Orang
9	01	04	7.02	0002	Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.02	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Dokumen
9	01	04	7.02	0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf			
9	01	04	7.03	0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Orang
9	01	04	7.03	0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.03	0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Orang
9	01	04	7.03	0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Orang
9	01	04	7.03	0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Orang
9	01	04	7.03	0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Orang
9	01	04	7.03	0009	Pengelolaan Wakaf	Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	05			PROGRAM REINTEGRASI ACEH			
9	01	05	7.01		Konsolidasi Perdamaian Aceh			
9	01	05	7.01	0001	Penguatan Reintegrasi	Terlaksananya Penguatan Reintegrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Reintegrasi	Dokumen
9	01	05	7.02		Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Korban Konflik			
9	01	05	7.02	0001	Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Terlaksanya Pemberdayaan Ekonomi Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Diberdayakan Ekonominya	Laporan
9	01	05	7.02	0002	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan	Laporan
9	01	05	7.03		Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Masyarakat Korban Konflik			
9	01	05	7.03	0001	Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Mengikuti Kegiatan Penguatan Rehabilitasi Sosial	Orang
9	01	05	7.03	0002	Perlindungan Sosial Korban Konflik	Terlindunginya Sosial Korban Konflik	Jumlah Korban Konflik yang Mendapatkan Perlindungan	Orang
9	01	05	7.04		Pendidikan Damai			
9	01	05	7.04	0001	Peringatan Hari Damai Aceh	Terlaksananya Peringatan Hari Damai Aceh	Jumlah Laporan Peringatan Hari Damai Aceh	Laporan
9	01	05	7.05		Pencegahan dan Mitigasi Konflik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	05	7.05	0001	Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Diselesaikannya Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Jumlah Laporan Penyelesaian Permasalahan Implementasi MoU Helsinki	Laporan
9	01	06			PROGRAM KEURUKON KATIBUL WALI/ SEKRETARIAT LEMBAGA WALI NANGGROE ACEH			
9	01	06	7.01		Pemberdayaan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Aceh			
9	01	06	7.01	0001	Penyusunan Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat	Tersusunnya Fatwa Hukum Syar'i dan Regulasi tentang Adat Istiadat	Jumlah Dokumen Fatwa Hukum Syar''i dan Regulasi tentang Adat Istiadat yang Disusun	Dokumen
9	01	06	7.01	0002	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim	Terbinanya Kelembagaan Adat dan Imeum Mukim	Jumlah Lembaga Adat dan Imeum Mukim yang Dibina	Lembaga
9	01	06	7.01	0003	Penyusunan Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Tersusunnya Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe yang Disusun	Dokumen
9	01	06	7.01	0004	Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Hasil Singkronisasi dan Harmonisasi Fatwa, Reusam dan Pertimbangan Lembaga Wali Nanggroe	Dokumen
9	01	06	7.01	0005	Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Dokumen Hasil Sidang Raya Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.01	0006	Peningkatan Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe	Meningkatnya Kapasitas Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Perangkat Wali Nanggroe yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas	Orang
9	01	06	7.01	0007	Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Terkelolanya Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Jumla Laporan Pengelolaan Ketatalaksanaan Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.01	0008	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Tersedianya gaji dan tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Orang/Bulan
9	01	06	7.02		Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh			
9	01	06	7.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Lembaga Keistimewaan Aceh	Dokumen
9	01	06	7.02	0002	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh	Laporan
9	01	06	7.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan MoU Helsinki	Laporan
9	01	06	7.03		Peradaban dan Tamadhun Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.03	0001	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kehidupan Lembaga-Lembaga Adat	Dokumen
9	01	06	7.03	0002	Pembinaan Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri	Terbinanya Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri	Jumlah Khazanah Aceh Dalam Negeri dan Luar Negeri yang Dibina	Unit
9	01	06	7.03	0003	Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, Baik Dalam maupun Luar Negeri	Terlaksananya Pemberian Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga, Baik Dalam maupun Luar Negeri	Jumlah Sertifikat Gelar Kehormatan atau Derajat Adat kepada Perorangan atau Lembaga Baik Dalam maupun Luar Negeri	Dokumen
9	01	06	7.03	0004	Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Berkembangnya Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Sistem Informasi Tamadhun Aceh (SITA)	Laporan
9	01	06	7.04		Fasilitasi Kerumahtanggaan Lembaga Wali Nanggroe Aceh			
9	01	06	7.04	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Nanggroe	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wali Nanggroe	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wali Nanggroe yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.04	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Waliyul Ahdi	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wahyu Ahdi	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Waliyul Ahdi yang Disediakan	Paket
9	01	06	7.04	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Perangat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang Disediakan	Paket
9	01	06	7.04	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe yang Disediakan	Paket
9	01	06	7.05		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Lembaga Wali Nanggroe Aceh			
9	01	06	7.05	0001	Fasilitasi Keprotokolan Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0002	Fasilitasi Keprotokolan Waliyul Ahdi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.05	0003	Fasilitasi Keprotokolan Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0004	Fasilitasi Keprotokolan Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0005	Fasilitasi Komunikasi Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0006	Fasilitasi Komunikasi Waliyul Ahdi	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0007	Fasilitasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Perangkat Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0008	Fasilitasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasiltiasi Komunikasi Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.05	0009	Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Wali Nanggroe	Terlaksanananya Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0010	Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Waliyul Ahdi	Terlaksanananya Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0011	Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksanananya Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Perangkat Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0012	Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksanananya Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Pendokumentasian Tugas Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0013	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Wali Nanggroe	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.05	0014	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0015	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Perangkat Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0016	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0017	Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Wali Nanggroe	Laporan
9	01	06	7.05	0018	Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Waliyul Ahdi	Laporan
9	01	06	7.05	0019	Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Perangkat Wali Nanggroe	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	06	7.05	0020	Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe	Laporan
9	02				KEKHUSUSAN PAPUA			
9	02	02			PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA			
9	02	02	3.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9	02	02	3.01	0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Dokumen
9	02	02	3.01	0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Tersalurkannya Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.01	0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Terlaksananya Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen
9	02	02	3.01	0004	Orientasi MRP	Terlaksananya Orientasi MRP	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP	Dokumen
9	02	02	3.01	0005	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	02	02	3.01	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Unit
9	02	02	3.01	0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Dokumen
9	02	02	3.01	0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Dokumen
9	02	02	3.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.02	0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan	Orang
9	02	02	3.02	0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Terlaksananya Hak dalam Permintaan Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Dokumen
9	02	02	3.02	0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Terlaksananya Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksananaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasidan Pergub	Dokumen
9	02	02	3.02	0004	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Terlaksananya Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Dokumen
9	02	02	3.02	0005	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	02	02	3.02	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Terlaksananya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan yang Dilaksanakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.02	0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Dokumen
9	02	02	3.02	0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan	Dokumen
9	02	02	3.02	0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Terlaksananya Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Dokumen
9	02	02	3.02	0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan kehidupan Beragama	Dokumen
9	02	02	3.02	0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	02	02	3.02	0012	Peningkatan Kapasitas MRP	Meningkatnya Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP	Orang
9	02	02	3.02	0013	Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran	Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran	Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran	Lembaga
9	03				KEKHUSUSAN PAPUA BARAT			
9	03	02			PROGRAM UTAMA DAN PENUNJANG LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA (MRP) PROVINSI PAPUA BARAT			
9	03	02	4.01		Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Anggota MRP			
9	03	02	4.01	0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Terlaksananya Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Jumlah Dokumen Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan	Dokumen
9	03	02	4.01	0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Terlaksananya Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.01	0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya	Dokumen
9	03	02	4.01	0004	Orientasi MRP	Terlaksananya Orientasi MRP	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi MRP	Dokumen
9	03	02	4.01	0005	Penyusunan Peraturan MRP	Tersusunnya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	03	02	4.01	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Unit
9	03	02	4.01	0007	Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Jumlah Dokumen Hasil Publikasi dan Dokumentasi Pelaksanaan Tugas MRP	Dokumen
9	03	02	4.01	0008	Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan MRP	Dokumen
9	03	02	4.02		Pelaksanaan Hak dan Kewajiban			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.02	0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Terlaksananya Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota	Jumlah Pimpinan dan Anggota yang Menerima Hak Keuangan	Orang
9	03	02	4.02	0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Terlaksananya Hak dalam Permintaan Keterangan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan	Dokumen
9	03	02	4.02	0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi dan Pergub	Terlaksananya Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi	Dokumen
9	03	02	4.02	0004	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Terlaksananya Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP	Dokumen
9	03	02	4.02	0005	Penyusunan Peraturan MRP	Terususunya Peraturan MRP	Jumlah Peraturan MRP yang Disusun	Dokumen
9	03	02	4.02	0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Tersedianya Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Jumlah Laporan Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.02	0007	Pelaksanaan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mempertahankan Keutuhan NKRI dan Mengabdi kepada Masyarakat Papua	Dokumen
9	03	02	4.02	0008	Pelaksanaan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Terselenggaranya Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Penyebarluasan Kewajiban Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan	Dokumen
9	03	02	4.02	0009	Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Terlaksananya Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pelestarian Penyelenggaraan Kehidupan Adat Budaya Asli Papua	Dokumen
9	03	02	4.02	0010	Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Terlaksananya Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Kerukunan Kehidupan Beragama	Dokumen
9	03	02	4.02	0011	Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Terlaksananya Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Pemberdayaan Perempuan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	03	02	4.02	0012	Peningkatan Kapasitas MRP	Meningkatnya Kapasitas MRP	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas MRP	Orang
9	03	02	4.02	0013	Pembentukan MRP di Wilayah Pemekaran	Terbentuknya MRP di Wilayah Pemekaran	Jumlah MRP yang Dibentuk di Wilayah Pemekaran	Lembaga

C. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X					URUSAN X.XX			
X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX			
X	XX	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			
X	XX	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan
X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Data
X	XX	01	2.01	0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara
X	XX	01	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.01	0012	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi
X	XX	01	2.01	0013	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan
X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan
X	XX	01	2.02	0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan
X	XX	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan
X	XX	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.04		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.04	0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.04	0002	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Tersedianya Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta Pengembangan Retribusi Daerah dan Kebijakan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.04	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	2.04	0004	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Tersedianya Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.04	0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Laporan
X	XX	01	2.04	0006	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.04	0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
X	XX	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit
X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket
X	XX	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	2.05	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
X	XX	01	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang
X	XX	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Laporan
X	XX	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	Orang
X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang
X	XX	01	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan
X	XX	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen
X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit
X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan
X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan
X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit
X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit
X	XX	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	Unit
X	XX	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit
X	XX	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	Ha
X	XX	01	2.10		Peningkatan Pelayanan BLUD			
X	XX	01	2.10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Unit Kerja

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			
X	XX	01	2.11	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	2.11	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.11	0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang
X	XX	01	2.11	0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Orang/Bulan
X	XX	01	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.13		Penataan Organisasi			
X	XX	01	2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Dokumen
X	XX	01	2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Laporan
X	XX	01	2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Dokumen
X	XX	01	2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Dokumen
X	XX	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan			
X	XX	01	2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Laporan
X	XX	01	2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Laporan
X	XX	01	2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Laporan
X	XX	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	2.15	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	Orang/Bulan
X	XX	01	2.15	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	Paket
X	XX	01	2.15	0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	Orang
X	XX	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD			
X	XX	01	2.16	0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Dokumen
X	XX	01	2.16	0002	Fasilitasi Fraksi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	Laporan
X	XX	01	2.16	0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Laporan
X	XX	01	2.16	0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	3.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Otonomi Khusus Papua			
X	XX	01	3.01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Orang/bulan
X	XX	01	3.01	0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Orang/bulan
X	XX	01	4.01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Otonomi Khusus Papua			
X	XX	01	4.01	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Pendidik Otonomi Khusus Papua	Orang/bulan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
X	XX	01	4.01	0002	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Tenaga Kesehatan Otonomi Khusus Papua	Orang/bulan
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
1	01				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN			
1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
1	01	02	2.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	2.01	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	0007	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah DiRehabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	0015	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.01	0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0026	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang
1	01	02	2.01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Orang
1	01	02	2.01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	0032	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar	Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.01	0033	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.01	0034	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Dasar	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0035	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2.01	0036	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	2.01	0037	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2.01	0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2.01	0042	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	2.01	0043	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2.01	0044	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	2.01	0045	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Tersedianya Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.01	0049	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.01	0052	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	2.01	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.01	0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.01	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	2.02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0006	Pembangunan Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0008	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0011	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.02	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.02	0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.02	0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	2.02	0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.02	0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.02	0047	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Pertama	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	2.02	0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2.02	0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	2.02	0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2.02	0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2.02	0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2.02	0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2.02	0056	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.02	0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.02	0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.02	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	2.02	0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	2.02	0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.02	0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.02	0066	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	2.02	0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.02	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	2.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	01	02	2.03	0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.03	0007	Pengadaan Mebel PAUD	Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD	Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik
1	01	02	2.03	0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	Orang
1	01	02	2.03	0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.03	0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.03	0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Orang
1	01	02	2.03	0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah	Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	Unit
1	01	02	2.03	0021	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	2.03	0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2.03	0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.03	0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2.03	0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2.03	0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.03	0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.03	0031	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0032	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	2.03	0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.03	0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta didik
1	01	02	2.03	0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	2.03	0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	2.03	0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	2.03	0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.03	0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	2.03	0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0043	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	2.03	0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.03	0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.03	0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.03	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.03	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.03	0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	2.03	0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.03	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	02	2.04	0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Orang
1	01	02	2.04	0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	2.04	0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	2.04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Orang
1	01	02	2.04	0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.04	0023	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	2.04	0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	2.04	0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.04	0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	2.04	0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	2.04	0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	2.04	0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	2.04	0033	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0034	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	2.04	0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik	Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	2.04	0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	2.04	0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	2.04	0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Unit
1	01	02	2.04	0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	2.04	0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04	0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Peserta Didik
1	01	02	2.04	0047	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.04	0048	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	2.04	0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal	Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	unit
1	01	02	2.04	0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0054	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus	Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	2.04	0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	Paket
1	01	02	2.04	0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04	0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	2.04	0058	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Ruang
1	01	02	2.04	0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat	Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	2.04	0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	2.04	0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			
1	01	02	3.01	0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	Lembaga
1	01	02	3.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	3.02	0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.03		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
1	01	02	3.03	0029	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan PAUD	Lembaga
1	01	02	3.04		Pengelolaan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan			
1	01	02	3.04	0030	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal/Keseteraan	Lembaga
1	01	02	3.05		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	02	3.05	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi	Ruang Laboratorium Biologi yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Biologi yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia	Ruang Laboratorium Kimia yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Kimia yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer	Ruang Laboratorium Komputer yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium Komputer yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.05	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit
1	01	02	3.05	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	3.05	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.05	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	3.05	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	3.05	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	3.05	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	3.05	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.05	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	3.05	0055	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.05	0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	3.05	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	3.05	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.05	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	3.05	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0063	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas	Lembaga
1	01	02	3.05	0064	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	3.05	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	3.05	0066	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	3.05	0067	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.05	0068	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	3.05	0069	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	3.05	0070	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	3.05	0071	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.05	0072	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.06		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	02	3.06	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	3.06	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	3.06	0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	3.06	0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.06	0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.06	0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.06	0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	3.06	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	3.06	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	3.06	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.06	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	3.06	0039	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik
1	01	02	3.06	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	3.06	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	3.06	0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.06	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.06	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	3.06	0048	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	3.06	0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada	Satuan Pendidikan Menengah KejuruanPelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	3.06	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yangdikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	3.06	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.06	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	3.06	0056	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan	Lembaga
1	01	02	3.06	0057	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	3.06	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	3.06	0060	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit
1	01	02	3.06	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	3.06	0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	3.06	0063	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang
1	01	02	3.06	0064	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	3.06	0065	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.06	0066	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	3.07		Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP			
1	01	02	3.07	0001	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Peserta Didik
1	01	02	3.07	0002	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0003	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik
1	01	02	3.07	0004	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peserta Didik
1	01	02	3.07	0005	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0006	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0007	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0008	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.07	0010	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada PendidikanSekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.08		Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	3.08	0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.08	0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	3.09		Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota			
1	01	02	3.09	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.01	0041	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dasar	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar	Lembaga
1	01	02	4.02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1	01	02	4.02	0054	Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat	Terselenggaranya Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama yang Melibatkan Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha	Jumlah Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Lembaga
1	01	02	4.05		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	02	4.05	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0013	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0015	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0016	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.05	0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi	Unit
1	01	02	4.05	0036	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0040	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit
1	01	02	4.05	0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.05	0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	4.05	0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.05	0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	4.05	0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	4.05	0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.05	0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Orang
1	01	02	4.05	0055	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.05	0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas	Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	4.05	0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	Orang
1	01	02	4.05	0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.05	0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	4.05	0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen
1	01	02	4.05	0063	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Atas	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0064	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.05	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	4.05	0066	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	4.05	0067	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	4.05	0068	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	4.05	0069	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.05	0070	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Ruang
1	01	02	4.05	0071	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	4.05	0072	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	4.06		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	02	4.06	0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)	Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0005	Pembangunan Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	Ruang
1	01	02	4.06	0009	Pembangunan Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0011	Pembangunan Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0012	Pembangunan Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah	Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa	Ruang Praktik Siswa yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium	Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah	Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula	Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi	Ruang
1	01	02	4.06	0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah	Asrama Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.06	0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah	Kantin Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.06	0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah	Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	02	4.06	0028	Pengadaan Mebel Sekolah	Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah	Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah	Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.06	0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Peserta didik
1	01	02	4.06	0039	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Terselenggaranya Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.06	0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	4.06	0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Orang
1	01	02	4.06	0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi	Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	Unit
1	01	02	4.06	0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.06	0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Orang
1	01	02	4.06	0048	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	Unit
1	01	02	4.06	0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada	Satuan Pendidikan Menengah KejuruanPelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Orang
1	01	02	4.06	0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi danKomunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan PembinaanPenggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)untuk Pendidikan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yangdikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	Konten Digital
1	01	02	4.06	0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.06	0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan EvaluasiLayanan di Bidang Pendidikan	Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen
1	01	02	4.06	0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0056	Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Terselenggaranya Dukungan Terhadap Lembaga Keagamaan, Lembaga Swadaya Masyarakat Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Lembaga Keagamaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat Yang Mendapat Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Sekolah Menengah Kejuruan	Lembaga
1	01	02	4.06	0057	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Orang
1	01	02	4.06	0058	Penyediaan infrastruktur TIK	Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	Paket
1	01	02	4.06	0059	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Orang
1	01	02	4.06	0060	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir	Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.06	0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	Buku
1	01	02	4.06	0062	Penataan Ruang/Sudut Baca	Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	Ruang
1	01	02	4.06	0063	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Ruang
1	01	02	4.06	0064	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Komunitas
1	01	02	4.06	0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan
1	01	02	4.06	0066	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	Orang
1	01	02	4.07		Penyediaan Pendidikan layanan khusus bagi OAP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0001	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Dasar	Peserta Didik
1	01	02	4.07	0002	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik
1	01	02	4.07	0003	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0004	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Peserta Didik
1	01	02	4.07	0005	Penyediaan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi yang diprioritaskan bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Peserta Didik yang Menerima beasiswa bagi OAP pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Peserta Didik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0006	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0007	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0008	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0009	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.07	0010	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Satuan Pendidikan Yang Menerima Dukungan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi OAP Yang Berada di Daerah yang Terpencil Atau Terbelakang, Daerah Dengan Kondisi Masyarakat Adat Yang Terpencil, Daerah Perbatasan Dengan Negara Lain, Daerah Yang Mengalami Bencana Alam, Bencana Sosial, Atau Daerah Yang Berada Dalam Keadaan Darurat Lain Pada PendidikanSekolah Menengah Kejuruan	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.08		Penyediaan bantuan fasilitas dan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	02	4.08	0001	Penyediaan Bantuan Fasilitas Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan fasilitas bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.08	0002	Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan pembiayaan bagi pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Satuan Pendidikan
1	01	02	4.09		Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha di Kabupaten/Kota			
1	01	02	4.09	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPenyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi danPelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah Satuan Pendidikan yang Terfasilitasi Kemitraan dengan Dunia Usaha	Satuan Pendidikan
1	01	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM			
1	01	03	2.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	2.01	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.01	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	Buku
1	01	03	2.01	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar	Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Buku
1	01	03	2.01	0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	2.01	0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
1	01	03	2.02	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	2.02	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	Buku
1	01	03	2.02	0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	2.02	0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	Dokumen
1	01	03	2.02	0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	Dokumen
1	01	03	3.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1	01	03	3.01	0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan	Dokumen
1	01	03	3.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	3.02	0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan	Dokumen
1	01	03	3.02	0005	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Non Formal yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	03	3.03		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	03	3.03	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Dokumen
1	01	03	3.03	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	3.03	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia	Buku
1	01	03	3.03	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah yang meningkat kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meningkat kompetensinya	Orang
1	01	03	3.04		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	03	3.04	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen
1	01	03	3.04	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	3.04	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia	Buku
1	01	03	3.04	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya	Orang
1	01	03	4.01		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar			
1	01	03	4.01	0005	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar	Jumlah kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Dasar yang dikembangkan	Dokumen
1	01	03	4.02		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	4.02	0004	Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Terlaksananya Pengembangan kurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	Jumlah kkurikulum muatan lokal sesuai karakteristik dan budaya daerah bagi Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal yang dikembangkan	Dokumen
1	01	03	4.03		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas			
1	01	03	4.03	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Dokumen
1	01	03	4.03	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas Yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersusun	Dokumen
1	01	03	4.03	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang tersedia	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	4.03	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah yang meningkat kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Atas yang meningkat kompetensinya	Orang
1	01	03	4.04		Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	03	4.04	0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersusunnya Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen
1	01	03	4.04	0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Kejuruan yang tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersusun	Dokumen
1	01	03	4.04	0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang tersedia	Buku

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	03	4.04	0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan yang meningkat kompetensinya	Orang
1	01	04			PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN			
1	01	04	2.01		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1	01	04	2.01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	2.01	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Laporan
1	01	04	3.02		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan			
1	01	04	3.02	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	3.02	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Penataan PendistribusianPendidik dan Tenaga Kependidikan SatuanSatuan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Laporan
1	01	04	3.03		Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya.			
1	01	04	3.03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	Orang
1	01	04	4.02		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	4.02	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Dokumen
1	01	04	4.02	0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Terlaksananya Penataan PendistribusianPendidik dan Tenaga Kependidikan SatuanSatuan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan	Laporan
1	01	04	4.03		Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	04	4.03	0001	Penjaminan keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Terselenggaranya keamanan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di Kabupaten/Kota Sesuai dengan kewenangannya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota Yang Mendapatkan Jaminan Kemanan	Orang
1	01	05			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN			
1	01	05	2.01		Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	2.01	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.01	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.02		Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	2.02	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.02	0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	2.02	0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	3.03		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	3.03	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Menengah yangDiselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan UsulPerizinan Pendidikan Menengah yangDiselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	3.03	0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil PelaksanaanPengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	05	4.03		Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1	01	05	4.03	0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan olehMasyarakat	Usul Perizinan Pendidikan Menengah yangDiselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan UsulPerizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	05	4.03	0002	Pengendalian dan Pengawasan PerizinanPendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Dokumen
1	01	06			PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA			
1	01	06	2.01		Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	01	06	2.01	0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota	Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Bahasa
1	01	06	2.01	0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota	Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06	2.01	0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota	Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Dokumen
1	01	06	2.01	0008	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	Buku
1	01	06	2.01	0009	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah	Tersusunnya kamus bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota	Buku
1	01	06	2.01	0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota	Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	Orang
1	01	06	2.01	0011	Fasilitasi media publik berbahasa daerah	Media publik berbahasa daerah terfasilitasi	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	Media

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	06	2.01	0012	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah	Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	Judul
1	01	07			PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH			
1	01	07	7.01		Pengelolaan Pendidikan Dayah			
1	01	07	7.01	0001	Pembangunan Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terbangun	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Dibangun	Unit
1	01	07	7.01	0002	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dayah	Sarana dan Prasarana Dayah Terehabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Dayah yang Telah Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	0003	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Meningkat Mutunya	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah yang Meningkat Mutunya	Orang
1	01	07	7.01	0004	Pemberdayaan dan Pendidikan Santri	Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Jumlah Santri yang Telah Dididik dan Diberdayakan	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0005	Pembinaan Manajemen Dayah	Manajemen Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Jumlah Dayah yang Telah Dibina Sesuai dengan Ketentuan	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0006	Penelitian dan Pengembangan Dayah	Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Jumlah Dayah yang Telah Diteliti dan Dikembangkan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0007	Peningkatan Kualitas dan Pengembangan Kelembagaan Dayah	Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Jumlah Dayah yang Meningkat Kualitas dan Pengembangan Kelembagaannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0008	Pengadaan Kitab/Buku Pendidikan Dayah	Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Jumlah Kitab/Buku Pendidikan Dayah Tersedia	Buku
1	01	07	7.01	0009	Pembangunan dan Rehabilitasi Tempat Ibadah Dayah	Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Terehabilitasi	Jumlah Tempat Ibadah Dayah yang Terbangun/Direhabilitasi	Unit
1	01	07	7.01	0010	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kependidikan Dayah	Dokumen
1	01	07	7.01	0011	Pelaksanaan Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Terlaksananya Akreditasi Pendidikan Dayah/Pesantren	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren yang Terakreditasi	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	07	7.01	0012	Fasilitasi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian	Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Pendidikan Dayah/Pesantren dan Balai Pengajian Terkendali dalam Penyelenggaraannya	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0013	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Dayah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dayah Mendapatkan Bantuan Pembiayaan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	07	7.01	0014	Fasilitasi Penyusunan Kurikulum Dayah Salafiah	Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Jumlah Kurikulum Dayah Salafiah Tersusun	Dokumen
1	01	07	7.01	0015	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Dayah yang Berskala Provinsi Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	07	7.01	0016	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dayah/Pesantren untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH			
1	01	08	7.01		Penyelenggaraan Kebijakan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.01	0001	Penetapan Standar Pendidikan Aceh	Standar Pendidikan Aceh Tersusun	Jumlah Standar Pendidikan Aceh Tersusun	Dokumen
1	01	08	7.01	0002	Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan yang Telah Menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.02		Penyelenggaraan Pembiayaan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.02	0001	Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Terkelolanya TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan TDBH Migas untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Aceh	Dokumen
1	01	08	7.02	0002	Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Terkelolanya Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Jumlah Dokumen Pengelolaan Dana Otsus untuk Membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Pendidikan Alokasi Pemerintah Aceh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.02	0003	Pembiayaan Pendidikan Formal, dan Pendidikan Nonformal bagi Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal yang Menerima Pembiayaan dari Pemerintah Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.02	0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah, dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya pemberian Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menerima Bantuan Pembiayaan untuk Madrasah dan Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.03		Penyelenggaraan Kurikulum dan Pengajaran Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.03	0001	Penyusunan Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Tersusunnya Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	Jumlah Kurikulum Aceh yang Islami untuk Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.03	0002	Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Terlaksananya Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Jumlah Dokumen Pengawasan Kurikulum Pendidikan Agama pada Sekolah Umum dan Madrasah	Dokumen
1	01	08	7.03	0003	Implementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Terimplementasi Kurikulum Aceh yang Islami	Jumlah Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Aceh yang Islami	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.04		Penyelenggaraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Aceh			
1	01	08	7.04	0001	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dayah Salafiah dan Diniyah	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah Salafiah dan Diniyah yang Meningkat Kompetensinya	Orang
1	01	08	7.04	0002	Peningkatan Kesejahteraan, Memberikan Penghargaan dan Perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan	Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Setiap Satuan Pendidikan yang Memperoleh Peningkatan Kesejahteraan, Mendapatkan Penghargaan dan Perlindungan	Orang
1	01	08	7.05		Penyelenggaraan Penjaminan dan Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.05	0001	Penyediaan Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Provinsi	Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Jumlah Peserta Didik pada Sekolah/Madrasah dan Dayah yang Berskala Kabupaten/Kota yang Menerima Biaya Penyelenggaraan Proses Evaluasi Hasil Belajar	Peserta Didik
1	01	08	7.05	0002	Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Terlaksananya Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah untuk Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang Telah Disupervisi dan Difasilitasi Pengendalian Mutu Pendidikan Aceh	Satuan Pendidikan
1	01	08	7.05	0003	Evaluasi Pencapaian Standar Pendidikan Aceh pada Setiap Satuan Pendidikan di Aceh	Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Jumlah Satuan Pendidikan di Aceh yang Dievaluasi Pencapaian Standar Pendidikannya	Satuan Pendidikan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	01	08	7.05	0004	Penilaian Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Telah Dilakukan Penilaian Terkait Pencapaian Standar Pendidikan Aceh dan Standar Pelayanan Minimal	Satuan Pendidikan
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	2.01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Terpenuhinya Rumah Sakit Baru dengan Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit
1	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas	Terbangunnya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas)	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	Unit
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terbangunnya Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Terbangunnya Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Dibangun	Unit
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas	Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.01	0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.01	0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	Unit
1	02	02	2.01	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit
1	02	02	2.01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	Unit
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Unit
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0022	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Unit
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	Keluarga
1	02	02	2.01	0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan
1	02	02	2.01	0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Paket
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	2.02	0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Dokumen
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang
1	02	02	2.02	0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Orang
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Terlaksananya Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	Orang
1	02	02	2.02	0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket
1	02	02	2.02	0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine Untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit
1	02	02	2.02	0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Tersedianya Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dokumen
1	02	02	2.02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	Dokumen
1	02	02	2.02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Laporan
1	02	02	2.02	0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Terlaksananya Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Dokumen
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit
1	02	02	2.02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang
1	02	02	2.02	0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	Orang
1	02	02	2.02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Terlaksananya penerapan kawasan tanpa rokok	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	Tatanan
1	02	02	2.02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Dokumen
1	02	02	2.02	0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	2.02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.02	0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kelanjutusiaan	Dokumen
1	02	02	2.02	0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dokumen
1	02	02	2.02	0049	Pengelolaan layanan rujukan dan rujuk balik	Terlaksananya Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen hasil Pengelolaan layanan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.02	0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Tersedianya Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Unit
1	02	02	2.04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	Unit
1	02	02	2.04	0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Terlaksananya Penyiapan Perumusan dan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	3.02	0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen
1	02	02	3.02	0045	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	02	02	3.02	0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/Fasyankes

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen
1	02	02	3.02	0048	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen
1	02	02	3.02	0050	Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi orangdengan penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0052	Pelayanan Kesehatan Penderita Campak	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0053	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0054	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0055	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0056	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0057	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	3.02	0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang
1	02	02	3.02	0059	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen
1	02	02	3.02	0060	Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Tersusunnya tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Jumlah dokumen kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan yang dibentuk	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0061	Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya verifikasi dan penerbitan terhadap permohonan perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen
1	02	02	3.02	0062	Penanggulangan penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan penyakit IMS	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit IMS	Dokumen
1	02	02	3.02	0064	Penanggulangan penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta	Dokumen
1	02	02	3.02	0065	Penanggulangan penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kecacingan	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kecacingan	Dokumen
1	02	02	3.02	0067	Penanggulangan penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia	Dokumen
1	02	02	3.02	0068	Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi	Dokumen
1	02	02	3.02	0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	3.02	0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Tersedianya Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit
1	02	02	4.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	02	4.02	0044	Pengelolaan Manajemen Puskesmas	Terlaksananya Peningkatan Manajemen Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Manajemen Puskesmas	Dokumen
1	02	02	4.02	0045	Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil pengelolaan layanan kesehatan dasar, pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis yang mendukung penguatan layanan unggulan diwilayah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0046	Pengelolaan Pelayanan Rujukan dan Rujuk Balik Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Terlaksananya Layanan Rujukan dan Rujukan Balik Antara Fasilitas Pelayanan Kesehatan Melalui Sistem Rujukan Terintegrasi (SISRUTE)	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang telah Terdaftar serta aktif menggunakan SISRUTE untuk melakukan Rujukan dan Rujukan Balik	Unit/Fasyankes
1	02	02	4.02	0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksanannya dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah dukungan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen
1	02	02	4.02	0048	Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Terlaksananya pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan pelayanan kesehatan bergerak/ pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0050	Pelayanan Kesehatan Penderita IMS	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi orangdengan penyakit IMS Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit IMS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0052	Pelayanan Kesehatan Penderita Campak	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Campak Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Campak yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0053	Pelayanan Kesehatan Penderita Kusta	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kusta Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0054	Pelayanan Kesehatan Penderita Filariasis	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Filariasis Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Filariasis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0055	Pelayanan Kesehatan Penderita Kecacingan	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan bagi Orang dengan penyakit Kecacingan Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Kecacingan yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0056	Pelayanan Kesehatan Penderita Frambusia	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit Frambusia Sesuai Standar	Jumlah Orang dengan penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0057	Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Orang
1	02	02	4.02	0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota	Terlaksananya Pelayanan kesehatan bagi Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota sesuai standar	Jumlah Orang dengan penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	orang
1	02	02	4.02	0059	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan	Tersusunnya Dokumen kebijakan/regulasi lingkup provinsi	Jumlah dokumen kebijakan/regulasi yang disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0060	Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Tersusunnya tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.	Jumlah dokumen kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan yang dibentuk	Dokumen
1	02	02	4.02	0061	Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit diwilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya verifikasi dan penerbitan terhadap permohonan perizinan	Jumlah perizinan yang diterbitkan	Dokumen
1	02	02	4.02	0062	Penanggulangan penyakit IMS	Terlaksananya Penanggulangan penyakit IMS	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit IMS	Dokumen
1	02	02	4.02	0064	Penanggulangan penyakit Kusta	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kusta	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kusta	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0065	Penanggulangan penyakit Filariasis	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Filariasis	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Filariasis	Dokumen
1	02	02	4.02	0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Kecacingan	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Kecacingan	Dokumen
1	02	02	4.02	0067	Penanggulangan penyakit Frambusia	Terlaksananya Penanggulangan penyakit Frambusia	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Frambusia	Dokumen
1	02	02	4.02	0068	Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Terlaksananya Penangulangan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit Imunisasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	02	4.02	0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Jumlah Kab/kota yang melaksanakan penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota	Dokumen
1	02	02	4.02	0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Tersedianya Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Obstetri Neonathal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan yang dibina dan dikembangkan	Unit
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN			
1	02	03	2.01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	2.01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dokumen
1	02	03	2.02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen
1	02	03	2.02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang
1	02	03	2.02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	Orang
1	02	03	3.03		Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	3.03	0002	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang
1	02	03	3.03	0003	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota			
1	02	03	3.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang
1	02	03	3.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	3.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang
1	02	03	4.03		Pengembangan Mutu dan PeningkatanKompetensi Teknis Sumber Daya ManusiaKesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	03	4.03	0002	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.03	0003	Peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Terlaksananya peningkatan kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal	Jumlah kualitas tenaga pengajar ilmu kesehatan melalui pendidikan formal dan/atau non formal yang meningkat	Orang
1	02	03	4.04		Penyelenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota			
1	02	03	4.04	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil di Kabupaten/Kota	Terlaksananya jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Orang
1	02	03	4.05		Penyelenggaraan Jaminan Keamanan bagi tenaga kesehatan, khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	03	4.05	0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Telaksananya jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya didaerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tersedia	Orang
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN			
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			
1	02	04	2.02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Dokumen
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dokumen
1	02	04	2.04		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Dokumen
1	02	04	2.05		Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan			
1	02	04	2.05	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Dokumen
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN			
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dokumen
1	02	05	2.01	0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Tersedianya Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman	Jumlah rumah tangga/masyarakat komunal Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik dalam kualitas air minum dan sanitasi aman	Unit
1	02	05	2.02		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	05	2.02	0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Dokumen
1	02	05	2.02	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Sersih dan Sehat	Keluarga
1	02	05	2.03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	05	2.03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dokumen
1	02	07			PROGRAM AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	3.01		pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasi seluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	07	3.01	0001	pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
1	02	07	3.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Unit
1	02	07	3.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Kabupaten/Kota	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	3.02		Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota			
1	02	07	3.02	0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit
1	02	07	4.01		pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasiseluruh puskesmas, dan rumah sakit milih Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
1	02	07	4.01	0001	pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pembinaan dan dukungan sumber daya yangdibutuhkan dalam pelaksanaan akreditasipuskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	02	07	4.01	0002	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Akreditasi puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota	puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Puskesmas dan rumah sakit di Kabupaten/Kota yang terakreditasi	Unit
1	02	07	4.01	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Melalui Budaya Zero Harm (Insiden Keselamatan Pasien) di Kabupaten/Kota	Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Budaya Zero Harm di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien di Kabupaten/Kota	Unit
1	02	07	4.02		Dukungan pelaksanaan akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota			
1	02	07	4.02	0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota	fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang Dilakukan Penilaian Sesuai Standar Akreditasi	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota yang terakreditasi	Unit
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG			
1	03	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)			
1	03	02	2.01		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0013	Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	Terbangunnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0015	Pembangunan Bangunan Sabo	Terbangunnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0019	Pembangunan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Terbangunnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0026	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terehabilitasinya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0028	Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir	Terehabilitasinya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0031	Rehabilitasi Check Dam	Terehabilitasinya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0069	Revitalisasi Situ	Terlaksananya Revitalisasi Situ	Jumlah Situ yang Direvitalisasi	SITU

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0072	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek)	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	02	2.01	0073	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	0075	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga
1	03	02	2.01	0078	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0080	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Beroperasi dan Terpeliharanya Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	0081	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Beroperasi dan Terpeliharanya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0083	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam	Beroperasi dan Terpeliharanya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0084	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo	Beroperasi dan Terpeliharanya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0085	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir	Beroperasi dan Terpeliharanya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0086	Revitalisasi Danau	Terlaksananya Revitalisasi Danau	Jumlah Danau yang Direvitalisasi	Danau
1	03	02	2.01	0088	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Terbangunnya Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air	Jumlah Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0089	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Beroperasi dan Terpeliharanya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0090	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Meningkatnya Flood Forecasting And Warning System (FFWS)	Jumlah Flood Forecasting And Warning System (FFWS) yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0091	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendungan
1	03	02	2.01	0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Terlaksananya Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	KM
1	03	02	2.01	0095	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Titik
1	03	02	2.01	0096	Peningkatan Bangunan Sabo	Meningkatnya Bangunan Sabo	Jumlah Bangunan Sabo yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Meningkatnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0098	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir	Meningkatnya Stasiun Pompa Banjir	Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0099	Peningkatan Kanal Banjir	Meningkatnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	0100	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Meningkatnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Ditingkatkan	Unit
1	03	02	2.01	0101	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Meningkatnya Bangunan Perkuatan Tebing	Panjang Bangunan Perkuatan Tebing yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	0102	Pembangunan Breakwater	Terbangunnya Breakwater	Panjang Breakwater yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	0103	Peningkatan Tanggul Sungai	Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.01	0104	Pembangunan Check Dam	Terbangunnya Check Dam	Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0106	Rehabilitasi Breakwater	Terehabilitasinya Breakwater	Panjang Breakwater yang Direhabilitasi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0107	Pembangunan Unit Air Baku	Terbangunnya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0108	Rehabilitasi Unit Air Baku	Terehabilitasinya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0111	Pembangunan Bendungan	Terbangunnya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dibangun	Bendungan
1	03	02	2.01	0112	Rehabilitasi Bendungan	Terehabilitasinya Bendungan	Jumlah Bendungan yang Direhabilitasi	Bendungan
1	03	02	2.01	0113	Pembangunan Kanal Banjir	Terbangunnya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	0115	Pembangunan Tanggul Sungai	Terbangunnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM
1	03	02	2.01	0116	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terehabilitasinya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Direhabilitasi	Titik
1	03	02	2.01	0118	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	Titik
1	03	02	2.01	0120	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	0121	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Terbangunnya Embung dan Penampung Air Lainnya	Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0122	Rehabilitasi Kanal Banjir	Terehabilitasinya Kanal Banjir	Panjang Kanal Banjir yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0123	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi	Terehabilitasinya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Direhabilitasi	Unit
1	03	02	2.01	0124	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Terbangunnya Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0125	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Terbangunnya Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Dibangun	Unit
1	03	02	2.01	0126	Rehabilitasi Tanggul Sungai	Terehabilitasinya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.01	0127	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.01	0129	Rehabilitasi Embung	Terehabilitasinya embung	Jumlah Embung yang Direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.01	0130	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	02	2.01	0131	Pemeliharaan situ dan tampungan air alami lainnya	Terpeliharanya situ dan tampungan air alami lainnya	Jumlah situ dan tampungan air alami lainnya yang dipelihara	UNIT
1	03	02	2.01	0132	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku	Beroperasi dan Terpeliharanya Unit Air Baku	Jumlah Unit Air Baku yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	02	2.01	0133	Pemeliharaan Bangunan Pengamanan Pantai	Terpeliharanya Bangunan Pengamanan Pantai	Panjang bangunan pengamanan pantai yang dipelihara	KM
1	03	02	2.01	0134	Pemeliharaan danau	Terpeliharanya danau	Jumlah danau yang dipelihara	Danau
1	03	02	2.02		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	02	2.02	0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	0004	Pembangunan Jaringan Irigasi Rawa	Terbangunnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	0005	Pembangunan Jaringan Irigasi Tambak	Terbangunnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	0007	Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	KM
1	03	02	2.02	0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	0010	Peningkatan Jaringan Irigasi Rawa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	0011	Peningkatan Jaringan Irigasi Tambak	Meningkatnya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	0013	Peningkatan Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	KM
1	03	02	2.02	0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	KM

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	0017	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tambak	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	0019	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	KM
1	03	02	2.02	0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	0024	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tambak	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Tambak	Panjang Jaringan Irigasi Tambak yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	0026	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Air Tanah	Panjang Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	KM
1	03	02	2.02	0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	0042	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terbangunnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dibangun	UNIT
1	03	02	2.02	0043	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Terehabilitasinya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Direhabilitasi	UNIT
1	03	02	2.02	0044	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Terfasilitasinya operasional kegiatan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga
1	03	02	2.02	0045	Penyiapan, Pelaksanaan dan Pengawasan Alokasi Air	Rencana Alokasi Air yang Ditetapkan	Jumlah rekomendasi kebijakan alokasi air yang disiapkan, dilaksanakan dan diawasi	Dokumen
1	03	02	2.02	0046	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Beroperasi dan Terpeliharanya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Dioperasikan dan Dipelihara	UNIT
1	03	02	2.02	0047	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi yang terkoordinasi, sinkron dan terlaksanakan	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	02	2.02	0048	Peningkatan Bendung Irigasi	Meningkatnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Ditingkatkan	UNIT
1	03	02	2.02	0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	Dokumen
1	03	02	2.02	0051	Pembangunan Bendung Irigasi	Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	UNIT
1	03	02	2.02	0052	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Meningkatnya Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah	Jumlah Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah yang Ditingkatkan	UNIT
1	03	02	2.02	0053	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Terehabilitasinya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	UNIT
1	03	02	2.02	0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	UNIT
1	03	03			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM			
1	03	03	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	03	2.01	0022	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	2.01	0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang
1	03	03	2.01	0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen
1	03	03	2.01	0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik
1	03	03	2.01	0027	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa	Terbinanya Desa dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Desa

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	2.01	0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik
1	03	03	2.01	0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	03	2.01	0030	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit
1	03	03	2.01	0031	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	03	2.01	0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR
1	03	03	2.01	0033	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang dioptimalisasi	Unit
1	03	03	2.01	0034	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga
1	03	04			PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL			
1	03	04	2.01		Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	04	2.01	0009	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	2.01	0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Persampahan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
1	03	04	2.01	0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Ton/hari
1	03	04	2.01	0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Dokumen
1	03	04	2.01	0016	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang dioptimalisasi	Unit
1	03	04	2.01	0017	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Tersedianya Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	04	2.01	0018	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Masyarakat yang mendapatkan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat yang diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan	Orang
1	03	04	2.01	0019	Pembinaan dan Pengawasan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Terbina dan Terawasinya pengelola/operator dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Jumlah pengelola/operator yang dibina dan diawasi dalam pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Pengelola
1	03	04	2.01	0020	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS3R yang dibangun	Ton/hari
1	03	04	2.01	0021	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa	Terbinanya pengelola Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa	Jumlah unit Sistem Pengelolaan Persampahan di Desa yang terbina	Unit
1	03	05			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH			
1	03	05	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0020	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dioptimalisasi	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0021	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ditingkatkan	MÂ³/Hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0023	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0024	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dioptimalisasi	Unit
1	03	05	2.01	0025	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang dibangun	MÂ³/Hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0026	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/Kota yang Difasilitasi Kerja Sama	Unit
1	03	05	2.01	0027	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) kala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0028	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Perkotaan yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0029	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0030	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0031	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Kawasan Tertentu yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0033	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0034	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Desa	Terbinanya Desa dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Desa yang Dibina dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Desa
1	03	05	2.01	0036	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MÂ³/Hari
1	03	05	2.01	0037	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit
1	03	05	2.01	0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Unit
1	03	05	2.01	0040	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pemberdayaan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0042	Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat yang mendapatkan perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Pengelolaan Air LImbah Domestik (SPALD) Terpusat	Sambungan Rumah (SR)
1	03	05	2.01	0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang mendapatkan Peningkatan kapasitas	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Penyelenggara
1	03	05	2.01	0044	Penyediaan Unit pengolahan setempat	Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	05	2.01	0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen
1	03	06			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE			
1	03	06	2.01		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	06	2.01	0012	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Terbangunnya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun	M
1	03	06	2.01	0017	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Drainase Lingkungan	Kelembagaan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang mendapatkan Pengembangan Kapasitas	Jumlah pelaksana penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Drainase Lingkungan yang ditingkatkan kapasitasnya	Penyelenggara
1	03	06	2.01	0018	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan Sistem Drainase Lingkungan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	06	2.01	0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Lingkungan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Beroperasi dan Terpelihara	Meter
1	03	06	2.01	0020	Optimalisasai Sistem Drainase Lingkungan	Teroptimalisasinya Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Sistem Drainase Lingkungan yang Dioptimalisasi	M
1	03	06	2.01	0021	Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan	Meningkatnya Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Lingkungan
1	03	06	2.01	0022	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Lingkungan yang Disediakan	Unit
1	03	06	2.01	0023	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan yang disusun	Dokumen
1	03	06	2.01	0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	Sistem Drainase Perkotaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	06	2.01	0025	Pembinaan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Terbinanya secara Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibina secara Teknis	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	0026	Penyediaan Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Tersedianya Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sarana Pendukung Sistem Drainase Perkotaan yang Disediakan	Unit
1	03	06	2.01	0027	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan	Tersusunnya Outline Plan pada Kawasan Genangan	Jumlah Kawasan Genangan yang Disusun Outline Plannya	Kawasan Genangan
1	03	06	2.01	0028	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Terehabilitasinya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan
1	03	06	2.01	0030	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen
1	03	06	2.01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	Sistem Drainase Perkotaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07			PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN			
1	03	07	2.01		Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	07	2.01	0006	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Tersedianya Jasa Penyedotan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga
1	03	07	2.01	0007	Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT
1	03	07	2.01	0010	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang Disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0011	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	UNIT
1	03	07	2.01	0015	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Ton/hari
1	03	07	2.01	0018	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0020	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	SR
1	03	07	2.01	0021	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Liter/Detik
1	03	07	2.01	0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	Liter/Detik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0025	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit
1	03	07	2.01	0026	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	MÂ³/Hari
1	03	07	2.01	0030	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dioptimalisasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0032	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	07	2.01	0033	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Tersedianya Sub Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar	Rumah Tangga
1	03	07	2.01	0034	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	MÂ³/Hari

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	2.01	0036	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang dibangun	Unit
1	03	07	2.01	0037	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Meningkatnya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang ditingkatkan	MÂ³/Hari
1	03	07	3.02		Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota			
1	03	07	3.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	3.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dam utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen
1	03	07	3.02	0003	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	Tersedianya perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	Jumlah perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP Yang Dibangun	Unit
1	03	07	4.02		Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman melalui pemberian bantuan untuk pembangunan layak huni dan kawasan permukiman layak terutama bagi OAP dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	07	4.02	0001	Pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar dalam satu (1) wilayah Kabupaten/kota	Tersedianya pembangunan rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Jumlah rumah sehat yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana utilitas umum, terutama bagi OAP di daerah terisolasi, terpencil, dan terluar	Unit
1	03	07	4.02	0002	Peningkatan akses kredit atau pembiayaan dan bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Memenuhi kebutuhan akses kredit atau pembiayaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Jumlah akta akad kredit terhadap Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Dokumen
1	03	07	4.02	0003	Penyediaan perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	Tersedianya perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP	Jumlah perumahan dan permukiman layak huni bagi setiap rumah tangga OAP dengan kriteria dan prioritas sesuai karakteristik dan budaya OAP Yang Dibangun	Unit
1	03	08			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung			
1	03	08	2.01	0014	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Terdaftarnya Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara	Jumlah Bangunan Gedung Negara yang Terdaftar Huruf Daftar Nomor (HDNo)	Bangunan Gedung Negara
1	03	08	2.01	0015	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diidentifikasi, Ditetapkan dan Diselenggarakan	Bangunan Gedung Cagar Budaya
1	03	08	2.01	0016	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan Disinsentif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01	0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengubahsuaian	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Bangunan Gedung
1	03	08	2.01	0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Bangunan Gedung
1	03	08	2.01	0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen
1	03	08	2.01	0020	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01	0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	08	2.01	0022	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	08	2.01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Terselenggaranya Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Dokumen
1	03	09			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA			
1	03	09	2.01		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	09	2.01	0010	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	09	2.01	0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kawasan
1	03	09	2.01	0012	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan penataan dan lingkungan	Jumlah penyelenggara bangunan gedung yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	Orang
1	03	10			PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN			
1	03	10	2.01		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota			
1	03	10	2.01	0028	Pengelolaan Leger Jalan	Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen
1	03	10	2.01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	2.01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	KM
1	03	10	2.01	0049	Pelebaran Jembatan	Terlaksananya Pelebaran Jembatan	Panjang jembatan yang dilebarkan	Meter
1	03	10	2.01	0050	Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menambah Lajur	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menambah Lajur	KM
1	03	10	2.01	0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	KM
1	03	10	2.01	0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	KM
1	03	10	2.01	0053	Pembangunan Jalan	Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	KM
1	03	10	2.01	0054	Pembangunan Terowongan/Tunnel	Terlaksananya Pembangunan Terowongan/Tunnel	Panjang Terowongan/ Tunnel yang Dibangun	Meter

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	2.01	0055	Rehabilitasi Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	KM
1	03	10	2.01	0056	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	KM
1	03	10	2.01	0057	Penggantian Jembatan	Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Meter
1	03	10	2.01	0058	Rehabilitasi Jembatan	Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	Meter
1	03	10	2.01	0059	Rekonstruksi Jalan	Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	KM
1	03	10	2.01	0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	KM
1	03	10	2.01	0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Meter
1	03	10	2.01	0066	Pembangunan Flyover	Terbangunnya Flyover	Jumlah Flyover yang Dibangun	Flyover
1	03	10	2.01	0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	10	2.01	0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar	Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	KM
1	03	10	2.01	0069	Pembangunan Jembatan	Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	Meter
1	03	10	2.01	0070	Pembangunan Underpass	Terlaksananya Pembangunan Uncerpass	Panjang Underpass yang Dibangun	Meter
1	03	11			PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			
1	03	11	2.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1	03	11	2.01	0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
1	03	11	2.01	0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tersedianya Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Orang
1	03	11	2.01	0013	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Teridentifikasinya Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Diidentifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaannya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.01	0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	Dokumen
1	03	11	2.01	0015	Penyediaan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tersedianya SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Dokumen SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang
1	03	11	2.02		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.02	0012	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Disediakan	Perangkat Pendukung
1	03	11	2.02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen
1	03	11	2.02	0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
1	03	11	2.02	0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi
1	03	11	2.04		Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1	03	11	2.04	0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	2.04	0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Bangunan Konstruksi
1	03	11	2.04	0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga
1	03	11	2.04	0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha
1	03	11	2.04	0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	11	3.01		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	11	3.01	0009	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan	Orang
1	03	12			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG			
1	03	12	2.01		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.01	0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	0005	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.01	0006	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan pada forum lintas sektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	0007	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi
1	03	12	2.01	0008	Pelaksanaan Fasilitasi RDTR Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Dokumen
1	03	12	2.01	0009	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen
1	03	12	2.01	0010	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.01	0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.01	0013	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan
1	03	12	2.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.02	0004	Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta
1	03	12	2.02	0005	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.02	0006	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM perencana tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.02	0007	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	2.02	0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Terlaksananya Peningkatan pemahaman dan tanggung jawabMasyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan
1	03	12	2.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.03	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antarpemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen
1	03	12	2.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.03	0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen
1	03	12	2.03	0007	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi
1	03	12	2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			
1	03	12	2.04	0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Kasus
1	03	12	2.04	0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	2.04	0005	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.04	0006	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus
1	03	12	2.04	0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	Kasus
1	03	12	2.04	0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen
1	03	12	2.04	0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	2.04	0011	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	2.04	0012	Penilaian Perwujudan RTR	Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen
1	03	12	2.04	0013	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara
1	03	12	2.04	0014	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	2.04	0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Berita Acara
1	03	12	3.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	3.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	3.05		Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			
1	03	12	3.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	3.06		Pengawasan Penataan Ruang			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	3.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	3.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	3.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	3.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	12	4.03		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.03	0003	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	4.03	0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR untuk kegiatan non berusaha sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan
1	03	12	4.05		Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang			
1	03	12	4.05	0001	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Dokumen
1	03	12	4.06		Pengawasan Penataan Ruang			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	12	4.06	0001	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen
1	03	12	4.06	0002	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen
1	03	12	4.06	0003	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen
1	03	12	4.06	0004	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan
1	03	13			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN TATA RUANG			
1	03	13	5.01		Perencanaan Tata Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.01	0003	Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	03	13	5.01	0006	Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan Penyebarluasan Informasi Rencana Tata Ruang	Laporan
1	03	13	5.01	0007	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen RTBL pada Ruang Strategis Kesultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.01	0008	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Tersusunnya Dokumen dan Laporan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
1	03	13	5.02		Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0001	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu Filosofis Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sumbu	Dokumen
1	03	13	5.02	0002	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan	Dokumen
1	03	13	5.02	0003	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karst Gunung Sewu	Dokumen
1	03	13	5.02	0004	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Perbukitan Menoreh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0005	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Makam Raja-Raja Mataram di Imogiri	Dokumen
1	03	13	5.02	0006	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Candi Prambanan-Candi Ijo	Dokumen
1	03	13	5.02	0007	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotabaru	Dokumen
1	03	13	5.02	0008	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Merapi	Dokumen
1	03	13	5.02	0009	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kotagede	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kotagede	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0010	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Samas-Parangtritis	Dokumen
1	03	13	5.02	0011	Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Kawasan Kiskendo-Sermo-Wates	Dokumen
1	03	13	5.02	0012	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kawasan Kerto-Pleret	Dokumen
1	03	13	5.02	0013	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Kulon Progo	Dokumen
1	03	13	5.02	0014	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.02	0015	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Sokoliman	Dokumen
1	03	13	5.02	0016	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Puro Pakualaman	Dokumen
1	03	13	5.02	0017	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Makam Girindo	Dokumen
1	03	13	5.02	0018	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Gunungkidul	Dokumen
1	03	13	5.02	0019	Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Masjid Pathok Nagoro	Terlaksananya Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Pantai Selatan Pathok Nagoro	Dokumen
1	03	13	5.03		Pengendalian Pemanfaatan Penataan Ruang Satuan Ruang Strategis			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	03	13	5.03	0001	Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlaksananya Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dokumen
1	03	13	5.04		Sarana dan Prasarana Keistimewaan Urusan Tata Ruang			
1	03	13	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Dokumen
1	04				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN			
1	04	02	2.01		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.01	0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.01	0003	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen Data Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Dokumen
1	04	02	2.01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Dokumen
1	04	02	2.01	0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Dokumen
1	04	02	2.01	0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.01	0008	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	2.01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	02	2.02		Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.02	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Terlaksananya Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih	Orang
1	04	02	2.02	0006	Koordinasi untuk Menyepakati Penerima dan Jenis Pelayanan	Tersusunnya Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Jumlah Dokumen Data Penerima Bantuan berdasarkan Jenis Layanan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.02	0007	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumla orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya masyarakat dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Orang
1	04	02	2.02	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Tersosialisasinya Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.02	0010	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Tersosialisasinya Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	Orang
1	04	02	2.03		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.03	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Terbangunnya rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.03	0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.03	0008	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0010	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan di lingkungan perumahan bagi korban bencana	Jumlah Rumah pada Perumahan bagi Korban Bencana kabupaten/kota yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.03	0011	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Progaram Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Unit Rumah
1	04	02	2.03	0012	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terbangunnya Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Unit Rumah
1	04	02	2.04		Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1	04	02	2.04	0003	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.04	0004	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.04	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Dokumen
1	04	02	2.04	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah	Rumah Tangga
1	04	02	2.05		Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			
1	04	02	2.05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Terfasilitasinya Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Laporan
1	04	02	2.05	0002	Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Terlaksananya Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.05	0003	Pembangunan Rumah Khusus	Terbangunnya Rumah Khusus	Jumlah Rumah Khusus yang Dibangun	Unit
1	04	02	2.05	0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Penjualan Rumah	Dokumen
1	04	02	2.05	0007	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah khusus yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah rumah khusus beserta PSU pendukungnya yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Rumah
1	04	02	2.05	0008	Operasional dan Pemeliharaan Rumah Susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Terlaksananya operasional dan pemeliharaan rumah susun yang merupakan aset pemerintah kabupaten/kota	Jumlah Tanah dan/atau Bangunan Milik Bersama yang menjadi bagian rumah susun yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Unit Bangunan Rumah Susun (Hunian Vertikal)
1	04	02	2.06		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
1	04	02	2.06	0002	Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Terlaksananya Penguatan dan Pembinaan kepada BLU/BUMD untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Jumlah Pegawai BLU/BUMD yang Mengikuti Penguatan dan Pembinaan untuk Penyelenggaraan Rumah Sederhana	Orang
1	04	02	2.06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.06	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Laporan
1	04	02	2.06	0005	Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terbentuknya/terpeliharanya Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara	Sistem Informasi
1	04	02	2.06	0006	Fasilitasi Pemenuhan Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Terwujudnya Kesesuaian Rencana Tapak dan Lantai Perumahan	Jumlah Dokumen Rencana Tapak dan Lantai Perumahan yang Diselaraskan	Dokumen
1	04	02	2.07		Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	02	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Laporan
1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	03	2.01		Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman			
1	04	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Kesepakatan Komitmen dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
1	04	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Laporan
1	04	03	2.02		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	03	2.02	0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	Dokumen
1	04	03	2.02	0010	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas dibawah 10 (Sepuluh) Ha	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.02	0011	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Pembagian Rumah bagi Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga Terdampak Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan luasan di bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga
1	04	03	2.02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Terbinanya Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina	Kelompok Masyarakat
1	04	03	2.02	0013	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	03	2.02	0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Rumah Tangga yang Terfasilitasi Peningkatan Kesadaran dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Rumah Tangga
1	04	03	2.03		Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1	04	03	2.03	0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Unit Rumah
1	04	03	2.03	0003	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Terlaksananya Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Jumlah Dokumen Kesepakatan Kerja Sama dalam Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.03	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Laporan
1	04	03	2.03	0007	Pendataan dan Verifikasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pendataan dan Verifikasi Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Data Permukiman Kumuh yang Terverifikasi	Dokumen
1	04	03	2.03	0009	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Diremajakan	Ha
1	04	03	2.03	0010	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terfasilitasinya Masyarakat dalam Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Perumahan Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemukiman Kembali dalam rangka Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimukimkan Kembali	Ha
1	04	03	2.03	0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit
1	04	03	2.03	0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	Ha
1	04	03	2.03	0014	Operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Terlaksanananya operasional dan Pemeliharaan Kawasan Permukiman Kumuh yang Telah Dilakukan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	Hektar
1	04	04			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	04	2.01		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota			
1	04	04	2.01	0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki	Unit Rumah
1	04	04	2.01	0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	04	2.01	0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Penatausahaan Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Dokumen Serah Terima Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Dokumen
1	04	04	2.01	0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Pembagian Rumah Baru Layak Huni bagi Masyarakat untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Penyediaan Rumah untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah Tangga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	04	2.01	0007	Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Laporan
1	04	04	2.01	0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Orang
1	04	04	2.01	0009	Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru	Orang
1	04	05			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	2.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	04	05	2.01	0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Dokumen
1	04	05	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Laporan
1	04	05	2.01	0006	Sosialisasi standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Tersosialisasikannya standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Jumlah pelaku pembangunan yang tersosialisasikan standar, prosedur, dan kriteria serah terima PSU	Kelompok
1	04	05	2.01	0008	Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi pada Perumahan yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	2.01	0009	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Terlaksananya Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Perumahan	Dokumen
1	04	05	2.01	0010	Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Terlaksananya Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang	Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang	Laporan
1	04	05	2.01	0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	Lokasi
1	04	05	2.01	0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Lokasi
1	04	05	3.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			
1	04	05	3.01	0006	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	Unit Rumah
1	04	05	4.01		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	04	05	4.01	0009	Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Tersedianya Jaringan Tenaga Listrik untuk Masyarakat	Jumlah Rumah Penerima Manfaat Dari Penyediaan Jaringan Tenaga Listrik	Unit Rumah
1	04	06			PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
1	04	06	2.01		Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil			
1	04	06	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Laporan
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			
1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
1	05	02	2.01	0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Dokumen
1	05	02	2.01	0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PP bagi Polisi Pamong Praja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Orang
1	05	02	2.01	0011	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Pengelolaan Jabatan Fungsional Pol PP	Melakukan Penilaian terhadap kinerja Pejabat Fungsional	Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0012	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan	meningkatnya Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional Pol PP	Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Orang
1	05	02	2.01	0013	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	Orang
1	05	02	2.01	0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan
1	05	02	2.01	0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit
1	05	02	2.01	0019	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Kab/Kota	Terbentuknya Satgas Linmas di tingkat Kab/Kota dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat melalui SK Bupati/Wali Kota	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas	Dokumen
1	05	02	2.01	0020	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
1	05	02	2.01	0021	Penyusunan SOP Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Jumlah Dokumen SOP penanggulangan kebakaran dan penyelamatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0022	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Dokumen
1	05	02	2.01	0023	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.01	0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
1	05	02	2.01	0025	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1	05	02	2.02	0004	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.02	0005	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	dokumen
1	05	02	2.02	0006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit
1	05	02	2.02	0007	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
1	05	02	2.02	0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.02	0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen
1	05	02	2.02	0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
1	05	02	2.02	0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.02	0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan
1	05	02	2.02	0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Istrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	Dokumen
1	05	02	2.03		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			
1	05	02	2.03	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	2.03	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen
1	05	02	2.03	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan
1	05	02	2.03	0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan
1	05	02	2.03	0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Laporan
1	05	02	3.05		Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	3.05	0001	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan
1	05	02	3.05	0002	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan
1	05	02	4.05		Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota			
1	05	02	4.05	0001	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan
1	05	02	4.05	0002	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Terbentuknya Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota	Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan
1	05	02	7.04		Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0001	Penyusunan Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Tersedianya Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Program dan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam yang Telah Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
1	05	02	7.04	0002	Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0003	Pengawasan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Telah Dilakukan Terhadap Masyarakat Agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0004	Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan dan Sosialisasi Qanun dan Peraturan Perundang-Undangan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penyuluhan dan sosialisasi Qanun dan peraturan Perundang-undangan Syariat Islam	Laporan
1	05	02	7.04	0005	Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota, yang Telah Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Konsultasi, Informasi dan Instruksi Terhadap Polisi Wilayatul Hisbah Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	02	7.04	0006	Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Bimbingan Teknis bagi Polisi Wilayatul Hisbah Aceh dan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0007	Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Terlaksananya Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Eksekusi Cambuk Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Laporan
1	05	02	7.04	0008	Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Konsultasi dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Konsultasi Dengan Badan Legislatif, Yudikatif, Ulama dan Instansi Terkait dalam rangka Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0009	Pemberdayaan untuk Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Terlaksananya Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Penyelesaian Qanun Syariat Islam yang Bersifat Non Justisi Bekerja Sama dengan Aparat Gampong dan Mukim	Laporan
1	05	02	7.04	0010	Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Tersedianya Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Laporan dan Pengaduan Masyarakat serta Penanganan Pelanggaran Qanun yang Bersifat Non Justisi	Doumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	02	7.04	0011	Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Organisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dengan 0rganisasi Masyarakat, Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam, yang Telah Dilakukan	Laporan
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA			
1	05	03	2.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.01	0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)	Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	Orang
1	05	03	2.01	0008	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang Sah dan Legal	Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	Kegiatan
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	Orang
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	Kawasan
1	05	03	2.02	0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.02	0023	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	laporan
1	05	03	2.02	0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.02	0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	Kawasan
1	05	03	2.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Laporan
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	Orang
1	05	03	2.03	0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Kabupaten/Kota	Tersusunnya dokumen rencana operasi kedaruratan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana operasi yang sah/legal	Dokumen
1	05	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	Orang
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.03	0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu	Dokumen
1	05	03	2.03	0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Laporan
1	05	03	2.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Dokumen
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Laporan
1	05	03	2.04	0007	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya kompetensi teknis dan manajerial SDM aparatur penanggulangan bencana pada setiap tahapan (Pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana)	Jumlah SDM aparatur penanggulangan bencana yang memiliki kompetensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknnis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0011	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal	Lembaga
1	05	03	2.04	0012	Fasilitasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana lintas Kab/Kota	Tersedianya data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Jumlah data penduduk terpilah di daerah rawan bencana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	03	2.04	0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	03	2.04	0016	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Dokumen
1	05	04			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN			
1	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1	05	04	2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	04	2.01	0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
1	05	04	2.01	0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Orang
1	05	04	2.01	0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0011	Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen
1	05	04	2.01	0012	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran Terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran	laporan
1	05	04	2.01	0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0014	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analis kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	0015	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	2.01	0016	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran	Terlaksananya kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional pemadam kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0018	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga
1	05	04	2.01	0020	Penyusunan Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Tersedianya Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Akademis Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0021	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.01	0022	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0023	Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan penyelamatan yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dokumen
1	05	04	2.01	0024	Pembinaan dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran dan Jabatan Fungsional Analis Kebakaran	Jumlah pejabat fungsional Pemadam Kebakaran dan Analis Kebakaran yang mendapatkan pembinaan dan pengembangan kompetensi	Orang
1	05	04	2.01	0025	Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Norma, Standar, Prosedur, dan Manual yang Berkaitan Dengan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran/Penyelamatan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.01	0026	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
1	05	04	2.01	0027	Penguatan Kelembagaan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	Jumlah dokumen tata kelola kelembagaan pemadam kebakaran dan penyelamatan daerah kabupaten/kota	Dokumen
1	05	04	2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			
1	05	04	2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Dokumen
1	05	04	2.02	0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
1	05	04	2.02	0004	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang pencegahan	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.02	0005	Pemeriksaan, Penilaian dan Inspeksi Berkala Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Laporan
1	05	04	2.03		Investigasi Kejadian Kebakaran			
1	05	04	2.03	0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	Dokumen
1	05	04	2.03	0002	Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Tersedianya Laporan yang Memuat Hasil Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian dan Penelitian	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.03	0003	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran	Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Orang
1	05	04	2.03	0004	Penyusunan Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Tersedianya Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Jumlah Laporan Lanjutan Penyebab Kebakaran	Laporan
1	05	04	2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			
1	05	04	2.04	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.04	0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan
1	05	04	2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana	Tersedianya Dokumen yang Memuat SKKL Pada Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarana dan Prasarana	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sapras Damkar	Dokumen
1	05	04	2.04	0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Orang
1	05	04	2.04	0005	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Unit yang diberikan untuk mendukung Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.04	0006	Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Terlaksananya Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan Sosialisasi, Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Masyarakat Setiap Tahunnya	Orang
1	05	04	2.04	0007	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Terlaksananya pembentukan dan pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran	Desa/Kelurahan
1	05	04	2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			
1	05	04	2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Tersedianya Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.05	0002	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar Secara Berkala, Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sesuai Standar	Dokumen
1	05	04	2.05	0004	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit
1	05	04	2.05	0006	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.05	0007	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Terselenggaranya pengadaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit
1	05	04	2.05	0008	Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Identifikasi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	05	04	2.05	0009	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai standar	Terselenggaranya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana pemadam kebakaran yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran, serta Alat Pelindung Diri Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit
1	05	04	2.05	0010	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Tersedianya Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi & Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time terintegrasi serta dapat Digunakan di Tingkat Desa/Kelurahan dan dapat Menjangkau Masyarakat	Laporan
1	06				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL			
1	06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)			
1	06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	02	2.01	0004	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT yang terpadu dan berkelanjutan	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Pemberdayaan Sosial yang terpadu dan berkelanjutan Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	02	2.01	0005	Pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Terlaksananya pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT	Jumlah Lokasi yang telah dilakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial KAT Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi
1	06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen
1	06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Keluarga
1	06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	2.03	0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	Orang
1	06	02	2.03	0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	2.03	0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	02	2.03	0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	2.03	0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
1	06	02	2.03	0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Orang
1	06	02	2.03	0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan
1	06	02	2.03	0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	3.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota			
1	06	02	3.03	0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga
1	06	02	3.04		Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial			
1	06	02	3.04	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang
1	06	02	3.05		Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah			
1	06	02	3.05	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga
1	06	02	4.03		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	4.03	0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi	Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah Keluarga Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	Keluarga
1	06	02	4.03	0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	Laporan
1	06	02	4.03	0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	Orang
1	06	02	4.04		Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial			
1	06	02	4.04	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Sertifikasi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial DaerahKabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Orang
1	06	02	4.05		Pendataan Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	02	4.05	0001	Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Pendataan, Verifikasi, dan Validasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.	Jumlah Lembaga yang Terdata, Terverifikasi, dan Tervalidasi	Lembaga
1	06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN			
1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	03	3.02		Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	03	3.02	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang
1	06	03	4.02		Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri			
1	06	03	4.02	0001	Penyediaan Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Tersedianya Layanan Psikososial terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Layanan Psikososial	Orang
1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL			
1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			
1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.01	0016	Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0017	Penyediaan Perbekalan Kesehatan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.01	0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial	Orang
1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0003	Penyediaan Permakanan	Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Terlakasananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0009	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0010	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen
1	06	04	2.02	0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)	Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	04	2.02	0016	Pengembangan dan Kampanye Sosial Peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah peserta yang mengikuti pengembangan dan kampanye sosial peduli Anak, Lanjut Usia dan Disabilitas serta Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Lainnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	04	2.02	0017	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	Aduan
1	06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			
1	06	05	2.01		Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar			
1	06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	2.01	0002	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Terlaksananya Rujukan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Terlaksananya Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	2.01	0004	Fasilitasi Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Terfasilitasinya Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Jumlah Anak yang terfasilitasi dalam Proses Pengangkatan Anak untuk Diusulkan kepada Provinsi	Orang
1	06	05	2.02		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1	06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang
1	06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	2.02	0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	05	2.02	0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	Usulan
1	06	05	2.02	0009	Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	Terpenuhinya Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	05	2.02	0010	Fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha Lintas Daerah	Orang
1	06	05	3.03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP			
1	06	05	3.03	0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Dokumen
1	06	05	4.03		Penetapan Kebijakan dan Program, serta Skema Perlindungan Sosial dengan Mengutamakan dan Mengikutsertakan OAP			
1	06	05	4.03	0001	Penetapan Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Tersusunnya Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial	Jumlah Kebijakan Program dan Skema Perlindungan Sosial Yang Disusun	Dokumen
1	06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA			
1	06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	2.01	0005	Pelayanan Dukungan Psikososial	Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang
1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
1	06	06	2.02	0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung
1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	2.02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda	Tersedianya Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Jumlah Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
1	06	06	2.02	0004	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam	Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Orang
1	06	06	2.02	0005	Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Terfasilitasinya Kampung Siaga Bencana dan Lumbung Sosial bagi masyarakat di wilayah rawan bencana	Jumlah kampung siaga bencana dan lumbung sosial yang difasilitasi	Desa/Kelurahan
1	06	06	2.02	0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	2.02	0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	Keluarga
1	06	06	2.02	0008	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	Orang
1	06	06	2.02	0009	Monitoring dan evaluasi kegiatan Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan lokal (KL)	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan Lokal (KL)	Dokumen
1	06	06	2.02	0010	Fasilitasi Pemetaan Rawan Konflik Sosial	Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	06	2.02	0011	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	Orang
1	06	06	4.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota			
1	06	06	4.02	0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana	Jumlah SDM Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas	Orang
1	06	07			PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN			
1	06	07	2.01		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota			
1	06	07	2.01	0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
1	06	07	2.01	0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam
1	06	07	2.01	0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan
1	06	07	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang
1	06	07	2.01	0005	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Orang
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	Dokumen
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	Orang
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang
2	07	03	2.01	0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	Unit
2	07	03	2.01	0004	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	Orang
2	07	03	2.01	0005	Pengadaan Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Tersedianya Sarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah pengadaan dan pemeliharaan sarana pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Lembaga
2	07	03	2.01	0006	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	Kesepakatan
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	Lembaga
2	07	03	2.03		Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja			
2	07	03	2.03	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Perizinan
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil			
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Perusahaan
2	07	03	2.05		Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	03	2.05	0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	Dokumen
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	Orang
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	Orang
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	2.02		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.02	0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	Lembaga
2	07	04	2.02	0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			
2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Dokumen
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Terselenggaranya Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	Orang
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang
2	07	04	2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang
2	07	04	3.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	3.01	0008	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Perusahaan
2	07	04	3.01	0009	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	Orang
2	07	04	3.01	0010	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen
2	07	04	3.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerjadalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	3.05	0002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	SKRD
2	07	04	4.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	4.01	0008	Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	Perusahaan
2	07	04	4.01	0009	Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Terselenggaranya Pemberdayaan Bagi OAP Melalui Kegiatan Kewirausahaan	Jumlah OAP Yang Diberdayakan melaui Kegiatan Kewirausahaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	04	4.01	0010	Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Terlaksananya Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi ke Perusahaan dalam Penempatan OAP pada semua jenis pekerjaan dengan memperhatikan kompetensi Sesuai Kebutuhan Yang Telah Dilaksanakan	Dokumen
2	07	04	4.05		Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	04	4.05	0002	Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Terlaksananya Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	SKRD
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Perusahaan
2	07	05	2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	Perusahaan
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perkara
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	Perkara
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Terselenggaranya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	Asosiasi dan Serikat Pekerja

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Lembaga
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Orang
2	08				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK			
2	08	02			PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN			
2	08	02	2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.01	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	Laporan
2	08	02	2.01	0010	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi	Kebijakan
2	08	02	2.01	0011	Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	08	02	2.01	0012	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.01	0013	Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga
2	08	02	2.01	0014	Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang
2	08	02	2.02		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.02	0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota	Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Lembaga
2	08	02	2.02	0005	Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.02	0006	Pendampinganlembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	08	02	2.02	0007	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan
2	08	02	2.02	0008	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.02	0009	Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan	Orang
2	08	02	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	02	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.03	0008	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	dokumen
2	08	02	2.03	0009	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	laporan
2	08	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi	jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	02	2.03	0011	mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota.	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga
2	08	03			PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN			
2	08	03	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.01	0003	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	laporan
2	08	03	2.01	0004	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	03	2.01	0005	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi	orang
2	08	03	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.01	0007	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi	Kebijakan
2	08	03	2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.02	0003	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	08	03	2.02	0004	layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkatataen/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.02	0005	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	orang
2	08	03	2.02	0006	layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	08	03	2.02	0007	layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang
2	08	03	2.02	0009	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	orang
2	08	03	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	03	2.03	0005	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.03	0006	Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Laporan
2	08	03	2.03	0007	pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan	Orang
2	08	03	2.03	0008	Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	03	2.03	0009	Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	Dokumen
2	08	04			PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA			
2	08	04	2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.01	0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Lembaga
2	08	04	2.01	0005	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kebijakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	2.01	0006	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kotaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	2.01	0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	Dokumen
2	08	04	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	2.02	0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	04	2.02	0005	pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	08	04	2.02	0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	2.02	0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	Lembaga
2	08	04	2.02	0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga
2	08	04	2.03		Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	04	2.03	0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	04	2.03	0003	layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang
2	08	04	2.03	0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	Orang
2	08	04	2.03	0005	Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota	Orang
2	08	04	2.03	0006	Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota	Orang
2	08	05			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	05	2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	05	2.01	0003	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	08	05	2.01	0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	Lembaga
2	08	05	2.01	0005	Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA	Dokumen
2	08	06			PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)			
2	08	06	2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	2.01	0003	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga
2	08	06	2.01	0004	Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	2.01	0005	Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga
2	08	06	2.01	0006	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	08	06	2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	2.02	0005	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang
2	08	06	2.02	0006	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	06	2.02	0007	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	06	2.02	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	08	06	2.02	0009	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	08	07			PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK			
2	08	07	2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.01	0006	koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota	Dokumen
2	08	07	2.01	0007	Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkat Kab/Kota	Kegiatan
2	08	07	2.01	0008	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Laporan
2	08	07	2.01	0009	Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.01	0010	Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA	Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota	Orang
2	08	07	2.01	0011	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota	Kebijakan
2	08	07	2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.02	0008	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.02	0009	layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	2.02	0010	layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	2.02	0011	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.02	0012	layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	2.02	0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	2.02	0014	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.02	0015	layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	08	07	2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	08	07	2.03	0007	Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah KIE Perlindungan khusus anak	Dokumen
2	08	07	2.03	0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.03	0010	monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	08	07	2.03	0011	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.03	0012	penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	08	07	2.03	0013	Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai	terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	08	07	2.03	0014	pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan	Lembaga
2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN			
2	09	02			PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN			
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	02	2.01	0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	Unit
2	09	02	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tersedia	unit
2	09	03			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT			
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan			
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan
2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Laporan
2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	laporan
2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	Unit
2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Tersedianya Informasi Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	Dokumen
2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.01	0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen
2	09	03	2.01	0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Tersusunnya Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Dokumen
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton
2	09	03	2.02	0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.02	0006	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Terlaksananya pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota yang terpelihara	Ton
2	09	03	2.02	0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	kelompok
2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi			
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Laporan
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan
2	09	03	2.04	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi konsumsi Per Kapita Per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	Laporan
2	09	03	2.04	0005	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Dokumen
2	09	04			PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN			
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan			
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	Dokumen
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	04	2.02	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan
2	09	04	2.02	0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Dokumen
2	09	04	2.02	0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	04	2.02	0008	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan	Terlaksananya Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Kajian Kesiapsiagaan Krisis Pangan untuk skala kabupaten/kota	Dokumen
2	09	05			PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
2	09	05	2.01	0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen
2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Dokumen
2	10				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN			
2	10	03			PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM			
2	10	03	3.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	10	03	3.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	3.03		Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	3.03	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen
2	10	03	4.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	10	03	4.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah di Wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan di Wilayah Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	03	4.03		Penetapan lokasi pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di tingkat kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	4.03	0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untukKepentingan Umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen
2	10	03	7.01		Koordinasi Pengadaan Tanah di Wilayah Provinsi			
2	10	03	7.01	0001	Koordinasi Teknis Pengadaan Tanah	Tersedianya Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Jumlah Data Rencana Pengadaan Tanah berdasarkan Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, RKPD, DIPA)	Dokumen
2	10	03	7.02		Percepatan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PPSN)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	03	7.02	0001	Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah dan Fasilitasi Percepatan Pengadaan Tanah untuk PPSN	Dokumen
2	10	04			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN			
2	10	04	2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	04	2.01	0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA di Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	04	2.01	0004	Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	04	2.01	0005	Inventarisasi Kasus Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kasus Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	05			PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	05	2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	05	2.01	0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah	Dokumen
2	10	05	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	05	2.01	0003	Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan koordinasi penyelesaian permasalahan ganti kerugian dan santunan tanah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	05	2.01	0004	Penyelesaian Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian santunan tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	2.01	0005	Penyelesaian masalah Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya permasalahan Ganti Kerugian Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan penyelesaian Permasalahan Ganti Kerugian tanah untuk pembangunan	Laporan
2	10	05	2.01	0006	Penyelesaian santunan tanah musnah pada Pembangunan untuk Kepentingan Umum oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyelesaian dana kerohiman pada tanah musnah untuk pembangunan	Jumlah laporan penyelesaian santunan pada tanah musnah	Laporan
2	10	05	2.01	0007	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan Potensi TORA dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06			PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE			
2	10	06	2.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	2.01	0002	Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi dan Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Jumlah Dokumen Sidang Panitia Pertimbangan Landreform dalam rangka Kegiatan Redistribusi Tanah	Dokumen
2	10	06	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	2.01	0005	Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Koordinasi Pengusulan TORA dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	06	2.01	0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	Berita Acara
2	10	06	2.01	0007	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Terlaksananya Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan
2	10	06	2.01	0008	Inventarisasi Subjek Redistribusi Tanah	Tersedianya Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Subyek Penerima Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.02		Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	2.02	0001	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.02	0002	Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absente dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	2.02	0003	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penetapan Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	2.02	0004	Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Pelaksanaan Penetapan Bentuk, Jumlah dan Cara Pemberian Ganti Kerugian kepada bekas pemilik Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Dokumen
2	10	06	3.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	06	3.01	0003	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	06	4.01		Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	06	4.01	0003	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria di tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	07			PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT			
2	10	07	2.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	07	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	10	07	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	2.01	0003	Penetapan Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku	Ditetapkannya Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Melalui Peraturan Perundang-Undangan yang Ditetapkan oleh Bupati/Walikota	Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota	Dokumen
2	10	07	3.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	07	3.01	0004	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	Dokumen
2	10	07	3.02		Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota			
2	10	07	3.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara
2	10	07	3.03		Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya			
2	10	07	3.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen
2	10	07	3.04		Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	3.04	0001	Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak	Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	Dokumen
2	10	07	3.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan
2	10	07	3.05		Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	3.06		Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertipikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	3.06	0001	Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat
2	10	07	3.07		Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	10	07	3.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen
2	10	07	3.08		Kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.08	0001	Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan	Dokumen
2	10	07	3.09		Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
2	10	07	3.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara
2	10	07	3.10		Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota			
2	10	07	3.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan
2	10	07	3.10	0002	Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	3.12		Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota			
2	10	07	3.12	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	3.12	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan
2	10	07	4.01		Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	07	4.01	0004	Penyusunan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Tersedianya tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir	Jumlah Kebijakan tata cara pengembalian status tanah ulayat atau tanah Masyarakat Hukum Adat apabila jangka waktu hak guna usaha atau hak guna bangunan telah berakhir Yang Disusun	Dokumen
2	10	07	4.02		Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota			
2	10	07	4.02	0001	Inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Tersedianya data inventarisasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.02	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sengketa tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara
2	10	07	4.03		Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas hutan dan tanah serta sumber daya alam yang terkandung di dalamnya			
2	10	07	4.03	0001	Penetapan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat atas bidang tanah adat/Ulayat	Terlaksananya penetapan bidang tanah ulayat dan penetapan Hak Masyarakat Hukum Adat atas tanah ulayat	Jumlah Penetapan Hak atas tanah ulayat	Dokumen
2	10	07	4.04		Pelepasan Hak Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	4.04	0001	Penyusunan peraturan atau petunjuk teknis terkait pelepasan hak	Tersusunnya peraturan atau Petunjuk Teknis terkait pelepasan hak	Jumlah NSPK terkait pelepasan Hak	Dokumen
2	10	07	4.04	0002	Identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari Masyarakat Hukum Adat untuk diterbitkan Hak Milik	Terlaksananya identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA untuk diterbitkan Hak Milik	Laporan identifikasi bidang tanah yang akan dilepaskan dari MHA	Laporan
2	10	07	4.05		Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.05	0001	Penyusunan Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Jumlah MOU/Perjanjian Kerjasama pemanfaatan tanah Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	10	07	4.06		Pemberiant anda bukti kepemilikan tanah atau sertipikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat			
2	10	07	4.06	0001	Pemberian tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Tersedianya tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Jumlah tanda bukti kepemilikan tanah atau sertifikat hak atas tanah atas nama Masyarakat Hukum Adat	Sertifikat
2	10	07	4.07		Inventarisasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.07	0001	Koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Terlaksananya penyiapan usulan sertipikasiTanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyiapan usulan sertipikasi Tanah Wakaf atau tempat peribadatan yang digunakan untuk pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keagamaan Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	10	07	4.07	0002	Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Jumlah laporan Kerjasama dengan Pemerintah Pusat menyediakan dan penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum di tingkat kabupaten/kota	Dokumen
2	10	07	4.08		Kerjasama dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.08	0001	Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi Terkait Penyediaan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Terlaksananya Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dalam rangka menyediakan dana penyelesaian masalah yang terkait tanah-tanah adat yang digunakan untuk keperluan umum Yang Dilaksanankan	Dokumen
2	10	07	4.09		Penyelesaian tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak pada 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
2	10	07	4.09	0001	Inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Tersedianya data inventarisasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan inventarisasi data masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota.	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.09	0002	Fasilitasi dan Mediasi Penyelesaian masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas tanah hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi dan Mediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Berita Acara Mediasi sMediasi masalah tanah adat dalam kawasan hutan dan bekas hak dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Berita Acara
2	10	07	4.10		Inventarisasi dan Identifikasi Pengelolaan dan Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/Kota			
2	10	07	4.10	0001	Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Terlaksananya Inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan inventarisasi dan identifikasi pengelolaan tanah adat di wilayah provinsi	Laporan
2	10	07	4.10	0002	Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pemanfaatan tanah adat lintas daerah kabupaten/kota	Laporan pemanfaatan tanah adat lintas kabupaten/kota	Laporan
2	10	07	4.12		Inventarisasi dan identifikasi, pemetaan dan registrasi/pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota			
2	10	07	4.12	0001	Inventarisasi dan identifikasi tanah adat/ulayat di di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inventarisasi dan Identifikasi tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data ttanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota Yang di Inventarisasi dan Identifikasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	07	4.12	0002	Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemetaan dan Registrasi/ pendaftaran tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota	Data tanah adat/ulayat di Kabupaten/Kota yang dilakukan Pemetaan dan Registrasi/Pendaftaran	Laporan
2	10	08			PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG			
2	10	08	2.01		Penyelesaian Masalah Tanah Kosong			
2	10	08	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka Penyelesaian Tanah Kosong	Laporan
2	10	08	2.02		Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong			
2	10	08	2.02	0001	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Terlaksananya Inventarisasi Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.	Laporan
2	10	08	2.02	0002	Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	08	2.02	0003	Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kosong	Terlaksananya koordinasi pemanfataan Tanah Kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara koordinasi dalam rangka pemanfataan tanah kosong dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	09			PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH			
2	10	09	2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah			
2	10	09	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah	Dokumen
2	10	10			PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH			
2	10	10	2.01		Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota			
2	10	10	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	2.01	0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	Dokumen
2	10	10	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	10	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya tahapan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota (KT skala kecil)	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	2.01	0005	Koordinasi dalam rangka Penegasan Status Tanah Timbul	Terlaksananya koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dalam rangka penegasan status tanah timbul	Dokumen
2	10	10	2.01	0006	Inventarisasi dalam rangka Penataan Lokasi Pelaku Usaha UMK	Terlaksananya inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK dan analisis dalam rangka pembentukan lembaga dan pengaturan kelembagaan yang terkait dengan jenis usaha pelaku usaha sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil pada dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kegiatan Inventarisasi lokasi pelaku usaha UMK	Dokumen
2	10	10	3.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	10	3.01	0004	Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	10	4.01		Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2	10	10	4.01	0004	Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan penggunaan tanah Land-Use Planning) tindak lanjut rencana tata ruang di Kabupaten/Kota Yang Disediakan	Dokumen
2	10	10	7.02		Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi			
2	10	10	7.02	0001	Koordinasi Perencanaan Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Tersusunnya Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Pasca Reklamasi	Jumlah Dokumen Rencana Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Dokumen
2	10	11			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN PERTANAHAN			
2	10	11	5.01		Pengelolaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.01	0001	Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten	Terlaksananya Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Penatausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten dalam rangka Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan Sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat	Dokumen
2	10	11	5.01	0002	Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Terlaksananya Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Dokumen Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	0003	Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen
2	10	11	5.01	0004	Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Terlaksananya Kegiatan Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Jumlah Dokumen Pengawasan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten, dan Tanah Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.01	0005	Perencanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.01	0006	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Urusan Pertanahan	Laporan
2	10	11	5.01	0007	Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Pertanahan	Jumlah Dokumen Kegiatan Pengembangan dan Pemanfataan Sistem Informasi Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.02		Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten			
2	10	11	5.02	0001	Penyiapan Bahan Pertimbangan Teknis Izin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Tersedianya Bahan Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Ijin Penggunaan Tanah Kasultanan dan Kadipaten	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	11	5.02	0002	Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Tertanganinya Keberatan dan Sengketa Pertanahan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Jumlah Berita Acara Penyelesaian Penanganan Keberatan dan Sengketa Pertanahanan Tanah Kasultanan, Tanah Kadipaten dan Tanah Desa	Berita Acara
2	10	11	5.02	0003	Penyusunan Dokumentasi Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Tersusunnya Dokumen Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Data Hasil Penanganan Permasalahan Hukum Pertanahan	Dokumen
2	10	11	5.03		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
2	10	11	5.03	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Urusan Keistimewaan (Pertanahan)	Unit
2	10	12			PROGRAM PENGURUSAN HAK HAK ATAS TANAH			
2	10	12	7.01		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Aset Pemerintah			
2	10	12	7.01	0001	Inventarisasi Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Terinventarisasinya Pengurusan Administrasi Aset Tanah Pemerintah	Jumlah Data Aset Tanah Pemerintah	Laporan
2	10	12	7.02		Fasilitasi, Inventarisasi dan Pengurusan Hak Atas Tanah Milik Masyarakat Miskin			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	12	7.02	0001	Inventarisasi Administrasi Tanah Milik Masyarakat Miskin	Terinventarisasinya Tanah-Tanah Milik Masyarakat Miskin	Jumlah Data Tanah Milik Masyarakat Miskin	Laporan
2	10	13			PROGRAM SURVEI, PENGUKURAN DAN PEMETAAN			
2	10	13	7.01		Survei, Pengukuran dan Pemetaan Tanah Instansi Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat Gampong			
2	10	13	7.01	0001	Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Survei dan Pengukuran Tanah Instansi Pemerintah dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Pemerintah/Pemda	Dokumen
2	10	13	7.01	0002	Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah HGU/HGB dan Pembuatan Peta Lokasi HGU/HGB	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	13	7.01	0003	Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat Gampong	Tersurveinya dan Terukurnya Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Jumlah Dokumen Survei dan Pengukuran Tanah Hak Milik Masyarakat dan Pembuatan Peta Lokasi Tanah Hak Milik Masyarakat	Dokumen
2	10	14			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SDM DAN KELEMBAGAAN PERTANAHAN			
2	10	14	7.01		Pembinaan dan Kerja Sama Kelembagaan Pertanahan Kabupaten			
2	10	14	7.01	0001	Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Kerja Sama Pendidikan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.01	0002	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Terlaksananya Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kegiatan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pertanahan	Dokumen
2	10	14	7.02		Peningkatan Kapasitas dan Pembinaan SDM Pertanahan			
2	10	14	7.02	0001	Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Pertanahan bagi Imeum Mukim/Keuchik	Jumlah Imeum Mukim/Keuchik yang Mengikuti Kegiatan Pembinaan Pertanahan	Orang
2	10	15			PROGRAM PENGATURAN PERTANAHAN DI WILAYAH PESISIR, LAUT DAN PULAU			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	15	7.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau Kecil, Sempadan Pantai, Wilayah Perbatasan dan Pulau Terpencil			
2	10	15	7.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Wilayah Pesisir	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Wilayah Pesisir	Jumlah Data Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi di Wilayah Pesisir	Dokumen
2	10	15	7.01	0002	Identifikasi, Inventarisasi, Pengelolaan Sempadan Pantai	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Terkelolanya Sempadan Pantai	Jumlah Data Sempadan Pantai yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0003	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah Wilayah Perbatasan	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah Wilayah Perbatasan	Jumlah Data Wilayah Perbatasan yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	15	7.01	0004	Identifikasi, Inventarisasi, Pemanfaatan Tanah pada Pulau Terpencil	Teridentifikasinya, Terinventarisasinya, Termanfaatkannya Tanah pada Pulau Terpencil	Jumlah Data Wilayah Pulau Terpencil yang Teridentifikasi dan Terinventarisasi	Dokumen
2	10	16			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PERTANAHAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	16	7.01		Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)			
2	10	16	7.01	0001	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	16	7.01	0002	Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Terlaksananya Pemanfataan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Pertanahan (SIMTANAH)	Dokumen
2	10	17			PROGRAM PENANGANAN KONFLIK, SENGKETA DAN PERKARA PERTANAHAN			
2	10	17	7.01		Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan			
2	10	17	7.01	0001	Inventarisasi dan Penyelesaian Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terinventarisasinya Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	10	17	7.01	0002	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Jumlah Layanan Bantuan Hukum Perkara Pertanahan	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	10	17	7.01	0003	Penyelesaian sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terselesaikannya sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Penyelesaian Sengketa Subyek Hak Potensi TORA dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	10	17	7.01	0004	Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Konflik, Pertanahan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara Hasil Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Berita Acara
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02			PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	02	2.01		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	02	2.01	0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	02	2.01	0003	Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	2.01	0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen
2	11	02	2.01	0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH	Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	Dokumen
2	11	02	2.01	0006	Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota	RPPLH kabupaten/kota yang disusun	jumlah dokumen RPPLH di kabupaten/kota yang berisi arahan/muatan RPPLH kabupaten/kota dan mengakomodir arahan RPPLH Provinsi	Dokumen
2	11	02	2.01	0007	Pemantauan dan Evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan yang dilakukan pemantauan dan evaluasi	Dokumen
2	11	02	2.02		Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	2.02	0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
2	11	02	2.02	0004	Pemantauan dan Evaluasi KLHS	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	Dokumen
2	11	02	2.02	0005	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen
2	11	02	2.02	0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Tersusunnya KLHS untuk KRP Lainnya yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun	Dokumen
2	11	02	3.02		Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup			
2	11	02	3.02	0001	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	02	4.02		Penyusunan Instrumen ekonomi lingkungan hidup			
2	11	02	4.02	0001	Analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Terlaksananya analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam	Jumlah dokumen analisis biaya jasa lingkungan dari eksploitasi sumber daya alam yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	03			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	03	2.01		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2	11	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen
2	11	03	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	2.01	0005	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	Dokumen
2	11	03	2.01	0006	Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Laporan pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut yang disusun	Jumlah laporan pelaksanaan pencegahan pencemaran Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang disusun	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01	0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	Lokasi
2	11	03	2.01	0008	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01	0009	Pengoperasian dan pemeliharaan alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Beroperasi dan berfungsinya alat pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit
2	11	03	2.01	0010	Pelaksanaan upaya mitigasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya upaya mitigasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan mitigasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	2.01	0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Dokumen
2	11	03	2.01	0012	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Paket

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01	0013	Penyediaan sarana dan prasarana pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota	Tersedianya peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Jumlah peralatan pemantau kualitas lingkungan di kabupaten/kota dalam rangka pencegahan dan sebagai peringatan dini pencemaran lingkungan	Unit
2	11	03	2.01	0014	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di Tingkat kabupaten/kota	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	Laporan
2	11	03	2.01	0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	Dokumen
2	11	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca SDA-LH Kabupaten/Kota	Tersusunnya Neraca SDA-LH sesuai kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Neraca SDA-LH yang disusun sesuai kewenangannya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.01	0017	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen
2	11	03	2.01	0018	Penyusunan dan Pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya	Tersusunnya laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya	Jumlah laporan pelaksanaan Kompensasi/Imbal Jasa Lingkungan Hidup antar Daerah sesuai dengan kewenangannya	Laporan
2	11	03	2.01	0019	Penyusunan dan Pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Jumlah laporan pelaksanaan Sistem Pembayaran Jasa Lingkungan Hidup	Laporan
2	11	03	2.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.02	0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Terlaksananya Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	11	03	2.02	0002	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Area Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi	Lokasi
2	11	03	2.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Titik

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.02	0004	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Laporan
2	11	03	2.02	0005	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Penanggulangan dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen
2	11	03	2.03		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	03	2.03	0006	Pelaksanaan remediasi	kegiatan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan remediasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha
2	11	03	2.03	0007	Koordinasi dan Sinkronisasi restorasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi restorasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.03	0008	Koordinasi dan Sinkronisasi remediasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi remediasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	2.03	0009	Pelaksanaan rehabilitasi	kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha
2	11	03	2.03	0010	Pelaksanaan Restorasi	kegiatan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan restorasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Ha
2	11	03	2.03	0011	Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	M2

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.03	0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	Kegiatan
2	11	03	2.03	0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi	kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Kegiatan
2	11	03	2.03	0014	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	03	2.03	0015	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemulihan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut, lahan	Laporan
2	11	03	2.03	0016	Penyusunan Kebijakan terkait dengan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Tersusunnya dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Jumlah dokumen kebijakan terkait Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup sesuai dengan kewenangannya	Dokumen
2	11	04			PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
2	11	04	2.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	2.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	2.01	0003	Pengelolaan Kebun Raya	Kebun Raya yang Dikelola	Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
2	11	04	2.01	0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Ha
2	11	04	2.01	0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Meningkatnya Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Orang
2	11	04	2.01	0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit
2	11	04	2.01	0008	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	2.01	0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola	Unit Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit
2	11	04	3.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	3.01	0008	Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Dokumen
2	11	04	3.01	0009	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	04	4.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
2	11	04	4.01	0008	Promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Tersedianya media promosi Keanekaragaman Hayati termasuk Tumbuhan dan Hewan Endemik Papua	Jumlah media promosi keanekaragaman hayati termasuk tumbuhan dan hewan endemik Papua	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	04	4.01	0009	Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penilaian dan Evaluasi terhadap Pengelolaan Keanekaragaman Hayati tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penilaian dan evaluasi terhadap pengelolaan keanekaragaman hayati tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen
2	11	05			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)			
2	11	05	2.01		Penyimpanan sementara Limbah B3			
2	11	05	2.01	0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	beroperasinya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit
2	11	05	2.01	0004	Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	tersedianya sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	2.01	0005	Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	Dokumen
2	11	05	2.01	0006	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan rincian teknis penyimpanan sementara limbah B3 yang dilakukan	Usaha
2	11	05	2.02		Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Terkait Pengelolaan Limbah B3 dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Dokumen
2	11	05	2.02	0003	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	beroperasinya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang dilakukan pemeliharaan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	2.02	0004	Pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	terlaksananya pembinaan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah B3 yang dibina	Usaha
2	11	05	2.02	0005	Pengadaan sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	tersedianya sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota	jumlah sarana dan prasarana pengumpulan limbah B3 di kabupaten/kota yang tersedia	Unit
2	11	05	2.02	0006	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, Perizinan Berusaha pengumpulan Limbah B3	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	05	2.02	0007	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 yang dilakukan	Usaha
2	11	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
2	11	06	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	06	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Dokumen
2	11	06	2.01	0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	2.01	0007	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	11	06	2.01	0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Badan Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	2.01	0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Usaha/Kegiatan
2	11	06	2.01	0011	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang Disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk Menunjang Kinerja Penegakan Hukum	Unit
2	11	06	3.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	3.01	0005	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	06	4.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	06	4.01	0005	Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Terlaksananya Analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup	Jumlah dokumen analisis denda terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak mentaati persetujuan lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah kabupaten/ kota dan peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup yang dilaksanakan	Dokumen
2	11	07			PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
2	11	07	2.01		Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	07	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Dokumen
2	11	07	2.02		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			
2	11	07	2.02	0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08			PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	08	2.01		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	11	08	2.01	0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen
2	11	08	2.01	0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Meningkatnya Jumlah Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat	Orang
2	11	08	2.01	0004	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	08	2.01	0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat	Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	Lembaga
2	11	09			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT			
2	11	09	2.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	09	2.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Entitas
2	11	10			PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	10	2.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
2	11	10	2.01	0003	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan kabupaten/kota sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Perkara

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	10	2.01	0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Perkara
2	11	10	2.01	0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/dikelola	Pengaduan
2	11	10	2.01	0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan kabupaten/kota	Sanksi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	10	2.01	0011	Pengembangan Kapasitas SDM bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya dalam bidang Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	Orang
2	11	10	2.01	0012	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup	PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	11	11			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
2	11	11	2.01		Pengelolaan Sampah			
2	11	11	2.01	0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Dokumen
2	11	11	2.01	0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0008	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan	Dokumen
2	11	11	2.01	0009	Pengoperasian dan Pemeliharaan sarana penanganan sampah	Fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah fasilitas penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit
2	11	11	2.01	0011	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Tersusunnya laporan pemantauaan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Dokumen
2	11	11	2.01	0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	Sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Unit
2	11	11	2.01	0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah	Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	Persentase
2	11	11	2.01	0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0018	Pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah yang dilaksanakan	Jumlah laporan hasil kegiatan pengurangan sampah melalui pembatasan timbulan sampah	Laporan
2	11	11	2.01	0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Ton
2	11	11	2.01	0023	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Terlaksananya Kerja Sama pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama /kemitraan dalam melakukan pengelolaan sampah	Dokumen
2	11	11	2.01	0024	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah	Jumlah sampah yang dimanfaatkan kembali	Ton
2	11	11	2.01	0025	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus	Tersedianya sarana dan prasarana Pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan Sampah Spesifik atau pada kondisi khusus	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0026	Operasionalisasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Tersedianya dan beroperasinya sarana dan prasarana Pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Jumlah fasilitas pengelolaan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang beroperasi	Unit
2	11	11	2.01	0027	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	Dokumen
2	11	11	2.01	0028	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan sampah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan.	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan	Unit
2	11	11	2.01	0029	Pelaksanaan Penanganan Sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Terlaksananya penanganan sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah tonase sampah spesifik atau pada kondisi khusus yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang ditangani	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.01	0030	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Terlaksananya kegiatan pengurangan sampah melalui proses pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang	Ton
2	11	11	2.02		Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta			
2	11	11	2.02	0001	Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Diterbitkannya Rekomendasi Atas Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Jumlah Rekomendasi Dari Izin/Persetujuan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pengelolaan Sampah yang Difasilitasi	Rekomendasi
2	11	11	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta			
2	11	11	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha Dan Standar Teknis Pengelolaan Sampah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	11	11	2.03	0002	Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Terlaksananya Penilaian Kinerja Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	Unit
2	11	11	2.03	0003	Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Laporan
2	11	11	2.03	0004	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	Jumlah kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan pengelolaan sampah	Badan Usaha
2	12				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK			
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Tersedianya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dokumen
2	12	02	2.01	0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.01	0003	Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Terlasaksananya Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Penyelesaian Masalah Pendaftaran Penduduk	Orang
2	12	02	2.01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.01	0005	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.01	0006	Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan
2	12	02	2.01	0007	Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Terlaksananya Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Laporan
2	12	02	2.01	0008	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	Jumlah Dokumen Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Terkait Pendaftaran Dan Perkembangan Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.02		Penataan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran Penduduk yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.02	0002	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Dokumen
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			
2	12	02	2.03	0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.03	0002	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.03	0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	Laporan
2	12	02	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Dimanfaatkan	Dokumen
2	12	02	2.03	0005	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Tersosialisasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran Penduduk	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Mendapatkan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Orang
2	12	02	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Tesedianya Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang Tersedia	Dokumen
2	12	02	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	02	2.04	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dokumen
2	12	02	2.04	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Terbinanya dan Terawasinya Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk	Laporan
2	12	02	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Laporan
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL			
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil			
2	12	03	2.01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.01	0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Layanan
2	12	03	2.01	0003	Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.01	0004	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Tersedianya Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan Sipil yang Disusun	Dokumen
2	12	03	2.01	0005	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Tersedianya Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia	Paket
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	0001	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Laporan
2	12	03	2.02	0003	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	0004	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.02	0005	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.02	0007	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	0008	Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil	Tersosialisasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.02	0009	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.02	0010	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Pemangku Kepentingan dan Masyarakat yang Menerima Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Terkait Pencatatan Sipil	Orang
2	12	03	2.02	0011	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	03	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.03	0001	Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan Blangko Dokumen Kependudukan, Formulir, dan Buku untuk Pelayanan Pencatatan Sipil	Dokumen
2	12	03	2.03	0002	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Terbinanya dan Terawasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Dilakukan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	03	2.03	0003	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil yang Dilaksanakan	Laporan
2	12	03	2.03	0004	Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Laporan
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN			
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen
2	12	04	2.01	0002	Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen
2	12	04	2.01	0003	Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah	Laporan
2	12	04	2.02		Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			
2	12	04	2.02	0001	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Dokumen
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.03	0001	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.03	0002	Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Terlaksananya Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Jumlah Dokumen Penerimaan dan Permintaan Data Kependudukan dari Perwakilan Republik Indonesia Melalui Menteri	Dokumen
2	12	04	2.03	0003	Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terfasilitasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.03	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.03	0005	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Tersosialisasinya Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.03	0006	Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Dokumen
2	12	04	2.03	0007	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Terlaksananya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Laporan
2	12	04	2.03	0008	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Terlaksananya Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.04	0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Laporan
2	12	04	2.04	0002	Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Terlaksananya Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Supervisi Bersama dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama Mengenai Pelaporan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam dalam rangka Pembangunan Basis Data Kependudukan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	12	04	2.04	0003	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Laporan
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan			
2	12	05	2.01	0001	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Tersedianya Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	12	05	2.01	0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Dokumen
2	13				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA			
2	13	02			PROGRAM PENATAAN DESA			
2	13	02	2.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	2.01	0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Desa
2	13	02	2.01	0002	Fasilitasi Tata Wilayah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Wilayahnya	Desa
2	13	02	2.01	0003	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	Desa
2	13	02	2.01	0004	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Desa
2	13	02	2.01	0005	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	2.01	0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Unit
2	13	02	3.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			
2	13	02	3.01	0007	Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Terlaksananya Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan penetapan status kampung adat Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	02	3.01	0008	Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	Jumlah pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	Tersedianya pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota Tang ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	3.01	0009	pelaksanaan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditugaskan kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan urusan konkuren pemerintah provinsi kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	02	3.01	0010	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	02	3.01	0011	fasilitasi penataan kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung	terfasilitasinya pemerintah kampung/kampung adat dalam penataan kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung	jumlah peraturan kampung/kampung adat tentang kewenangan kampung/kampung adat berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung/kampung adat yang telah ditetapkan	Dokumen
2	13	02	4.01		Penyelenggaraan Penataan Desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	4.01	0007	Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Terlaksananya Identifikasi dan penetapan status kampung adat	Jumlah Dokumen Identifikasi dan penetapan status kampung adat Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	02	4.01	0008	Penetapan pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	Jumlah pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota;	Tersedianya pedoman dan standar pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan kampung/kampung adat pada 1 (satu) wilayah kampung/kampung adat di Daerah kabupaten/kota Tang ditetapkan	Dokumen
2	13	02	4.01	0009	pelaksanaan urusan konkuren pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditugaskan kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan urusan konkuren pemerintah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan urusan konkuren pemerintah provinsi kepada kampung/kampung adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	02	4.01	0010	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	02	4.01	0011	pelaksanaan penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	terlaksananya penugasan kewenangan khusus dari pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	jumlah laporan penugasan kewenangan khusus pemerintah daerah kabupaten/kota kepada kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	03			PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA			
2	13	03	2.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
2	13	03	2.01	0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen
2	13	03	2.01	0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen
2	13	03	3.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			
2	13	03	3.01	0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	3.01	0005	Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Laporan
2	13	03	3.01	0006	Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Terlaksananya Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Dokumen
2	13	03	3.01	0007	Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Dokumen
2	13	03	4.01		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	4.01	0004	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Terlaksananya Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam rangka kerja sama antarKampung maupun kerja sama Kampung dengan pihak ketiga dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota	Dokumen
2	13	03	4.01	0005	Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Terlaksananya Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama Kampung dan peningkatan kapasitas lembaga kerja sama Kampung	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	03	4.01	0006	Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Terlaksananya Koordinasi hasil pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi pelaksanaan Peraturan Bersama Kepala Kampung atau Perjanjian Bersama	Dokumen
2	13	03	4.01	0007	Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Fasilitasi perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Perselisihan kerja sama Kampung pada satu wilayah kecamatan maupun pada wilayah kecamatan yang berbeda pada satu daerah kabupaten/kota Yang Dilaksanakan	Dokumen
2	13	04			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA			
2	13	04	2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			
2	13	04	2.01	0001	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	2.01	0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang
2	13	04	2.01	0006	Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa	Laporan
2	13	04	2.01	0007	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan
2	13	04	2.01	0010	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan
2	13	04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Dokumen
2	13	04	2.01	0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	2.01	0014	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang
2	13	04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Desa
2	13	04	2.01	0016	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Laporan
2	13	04	2.01	0017	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Terlaksananya Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah Dokumen Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen
2	13	04	2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen
2	13	04	3.01		Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	3.01	0019	Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	04	3.01	0020	Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	3.01	0021	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	3.01	0022	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat.	Jumlah kebijakan mengenai pengangkatandan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	3.01	0023	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Tersedianya kebijakan mengenai mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	3.01	0024	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Tersedianya kebijakan mengenai mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	3.01	0025	Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota;	Terlaksananya Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penguatan pengawasan pengelolaan keuangan kampung/kampung Adat oleh APIP Daerah Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	04	3.01	0026	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	04	4.01		Pembinaan dan Pengawasan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintahan Desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	4.01	0019	Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Terlaksananya Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan kampung/kampung adat	Dokumen
2	13	04	4.01	0020	Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai pemilihan kepala kampung/kampung adat yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	4.01	0021	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat	Jumlah Kebijakan mengenai mengenai pengangkatan dan pemberhentian kepala kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	4.01	0022	Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/ Kampung adat.	Tersedianya Penetapan kebijakan mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat.	Jumlah kebijakan mengenai pengangkatandan pemberhentian perangkat Kampung/Kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	04	4.01	0023	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Tersedianya kebijakan mengenai mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai pengelolaan keuangan kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	4.01	0024	Penetapan kebijakan mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Tersedianya kebijakan mengenai mengenai pengelolaan aset kampung/kampung adat.	Jumlah Kebijakan mengenai aset kampung/kampung adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	04	4.01	0026	Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat.	Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat	Jumlah Laporan Monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan dan aset kampung/kampung adat Yang Dilaksanakan	Laporan
2	13	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT			
2	13	05	2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	2.01	0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen
2	13	05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Unit
2	13	05	2.01	0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen
2	13	05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan
2	13	05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen
2	13	05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	13	05	2.01	0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	2.01	0011	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga
2	13	05	3.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	3.01	0012	Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Tersusunnya Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	Dokumen
2	13	05	3.01	0013	Penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.	Terlaksananya penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.	Jumlah pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	3.01	0014	Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Lembaga
2	13	05	3.01	0015	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	05	4.01		Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2	13	05	4.01	0012	Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Tersusunnya Penyusunan peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota	Jumlah peraturan Bupati/Walikota tentang LKK/LAK di pemerintah Daerah Kabupaten/kota Yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	05	4.01	0013	Penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK	Terlaksananya penyusunan pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK.	Jumlah pedoman bagi Pemerintah Kampung dalam menyusun Peraturan Kampung tentang LKK/LAK	Dokumen
2	13	05	4.01	0014	Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Terlaksananya Pemberian penghargaan kepada LKK/LAK sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Jumlah LKK/LAK Yang Menerima Penghargaan sebagai mitra pemerintah Kampung yang baik	Lembaga
2	13	05	4.01	0015	Penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Tersusunnya Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Surat Keputusan Kepala Daerah Tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat Yang Ditetapkan	Dokumen
2	13	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA			
2	13	06	3.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.01	0001	Peningkatan efaktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efaktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Laporan
2	13	06	3.01	0002	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan
2	13	06	3.01	0003	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	13	06	3.02		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.02	0001	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	BUM Kampung/Bum Perkampungan
2	13	06	3.02	0002	Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	Kampung dan perkampungan
2	13	06	3.02	0003	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	06	3.03		Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			
2	13	06	3.03	0001	Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	Kampung dan perkampungan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	06	3.03	0002	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	06	3.03	0003	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	BUM Kampung/Bum Perkampungan
2	13	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG PAPUA BARAT			
2	13	07	4.01		Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			
2	13	07	4.01	0001	Peingkatan efaktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Meningkatnya efaktifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Laporan
2	13	07	4.01	0002	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.01	0003	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Dokumen
2	13	07	4.02		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			
2	13	07	4.02	0001	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	BUM Kampung/Bum Perkampungan
2	13	07	4.02	0002	Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	Kampung dan perkampungan
2	13	07	4.02	0003	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	07	4.03		Pengembangan Ekonomi Kampung Dalam Satu Wilayah Kabupaten/Kota			
2	13	07	4.03	0001	Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Terlaksananya pemberian Bantuan pembiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan di kampung dan perkampungan	Jumlah kampung dan perkampungan yang mendapatkan bantuan embiayaan dalam rangka mendukung pengembangan produk unggulan	Kampung dan perkampungan
2	13	07	4.03	0002	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	07	4.03	0003	Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Kampung bersama di Kampung/Perkampungan	Terlaksananya Fasilitasi pengembangan BUM Kampung/BUM Perkampungan	Jumlah BUM Kampung/Bum Perkampungan Bersama yang sudah difasilitasi	BUM Kampung/Bum Perkampungan
2	13	08			PROGRAM PEMBANGUNAN KAMPUNG DAN PERKAMPUNGAN			
2	13	08	3.01		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	3.01	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan
2	13	08	3.01	0002	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Dokumen
2	13	08	3.02		Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
2	13	08	3.02	0001	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	13	08	4.01		Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Perkampungan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	13	08	4.01	0001	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Lembaga Kemasyarakatan
2	13	08	4.01	0002	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Jumlah dokumen Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Dokumen
2	13	08	4.02		Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi			
2	13	08	4.02	0002	Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Terlaksananya Fasilitasi Promosi, Kerjasama dan Pemasaran Produk Unggulan	Jumlah dokumen kerjasama yang terlaksana	Dokumen
2	14				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			
2	14	02			PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK			
2	14	02	2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan	Kegiatan
2	14	02	2.01	0017	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Kegiatan
2	14	02	2.01	0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kegiatan
2	14	02	2.01	0025	Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0027	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal	Satuan Pendidikan
2	14	02	2.01	0028	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0029	Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Kabupaten/Kota
2	14	02	2.01	0030	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0031	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	14	02	2.01	0032	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)	Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.01	0033	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.01	0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Perangkat Daerah
2	14	02	2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	02	2.02	0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Laporan
2	14	02	2.02	0010	Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga	Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Tersedianya Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	Dokumen
2	14	02	2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Laporan
2	14	02	2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Dokumen
2	14	02	2.02	0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk	Laporan
2	14	02	2.02	0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.02	0022	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.02	0023	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga	Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellaui Sistem Informasi Keluarga	Dokumen
2	14	02	2.02	0024	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan	Dokumen
2	14	02	2.02	0025	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB	Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.02	0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	Unit
2	14	02	2.02	0027	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	02	2.02	0028	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Dokumen
2	14	03			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)			
2	14	03	2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2	14	03	2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK	Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK	Laporan
2	14	03	2.01	0009	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana	Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Laporan
2	14	03	2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Dokumen
2	14	03	2.01	0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.01	0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Organisasi
2	14	03	2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)			
2	14	03	2.02	0002	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia	Unit
2	14	03	2.02	0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Organisasi
2	14	03	2.02	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota			
2	14	03	2.03	0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan
2	14	03	2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Orang
2	14	03	2.03	0004	Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03	0005	Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Dokumen
2	14	03	2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	Unit
2	14	03	2.03	0007	Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Orang
2	14	03	2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03	0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Orang
2	14	03	2.03	0011	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Laporan
2	14	03	2.03	0013	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria	Orang
2	14	03	2.03	0015	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.03	0016	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	Orang
2	14	03	2.03	0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Kegiatan
2	14	03	2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2	14	03	2.04	0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	03	2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Kampung
2	14	03	2.04	0007	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Dokumen
2	14	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)			
2	14	04	2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2	14	04	2.01	0014	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0015	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL	Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia	Kegiatan
2	14	04	2.01	0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Laporan / Dokumen
2	14	04	2.01	0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	Unit
2	14	04	2.01	0019	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Orang
2	14	04	2.01	0021	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)	Laporan
2	14	04	2.01	0023	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga	Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0024	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejaheraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Orang
2	14	04	2.01	0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0026	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan	Kelompok
2	14	04	2.01	0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.01	0028	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk	Kelompok
2	14	04	2.01	0029	Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Laporan
2	14	04	2.02		Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.02	0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	laporan
2	14	04	2.02	0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	2.02	0007	Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga	Laporan
2	14	04	2.02	0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Laporan
2	14	04	3.03		Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)			
2	14	04	3.03	0001	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Kelompok
2	14	04	3.03	0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	3.03	0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan
2	14	04	4.03		Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)			
2	14	04	4.03	0001	Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja	Kelompok
2	14	04	4.03	0002	Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan	Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan	unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	14	04	4.03	0003	Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Terlaksananya orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya	Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana	Laporan
2	15				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN			
2	15	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)			
2	15	02	2.01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.01	0004	Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya dan Tersosialisasinya Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	0005	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Tersusun Rencana Aksi Keselamatan lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/kota	Jumlah dokumen penetapan Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	0006	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.01	0007	Pelaksanaan Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi (Reviu) Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Evaluasi (Reviu) Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.02		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.02	0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Terbangunnya Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun	Unit
2	15	02	2.02	0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.02	0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.02	0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Unit
2	15	02	2.03		Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			
2	15	02	2.03	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Tersusunnya Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.03	0006	Pengawasan Operasional Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksananya pengawasan terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Terminal Penumpang Tipe C yang diawasi	Dokumen
2	15	02	2.03	0007	Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal yang direvitalisasi (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Unit
2	15	02	2.03	0008	Penyediaan sistem informasi manajemen terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya sistem informasi manajemen terminal Penumpang tipe C	Jumlah sistem informasi manajemen yang terpasang di terminal tipe C baik secara Manual dan Digital	Unit
2	15	02	2.03	0009	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Terbangunnya Terminal Tipe C yang dilengkapi fasilitas utama dan fasilitas penunjang	Jumlah terminal Tipe C yang terbangun yang dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas Penunjang	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.03	0010	Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM Pengelola Terminal Penumpang Tipe C	Terlaksana Pemenuhan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C	Jumlah Kebutuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Terminal Tipe C yang terpenuhi.	Orang
2	15	02	2.03	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	Unit
2	15	02	2.04		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir			
2	15	02	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			
2	15	02	2.05	0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.05	0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.05	0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Unit
2	15	02	2.05	0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Dokumen
2	15	02	2.05	0005	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Tersosialisasinya Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah LaporanSosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	0006	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Terlaksananya Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.05	0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Unit
2	15	02	2.05	0008	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	0009	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ditetapkannya Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.05	0010	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.06	0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.06	0006	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Dokumen
2	15	02	2.06	0007	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	Laporan
2	15	02	2.06	0008	Pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terbangunnya Rute Aman Selamat Sekolah	Jumlah kawasan pembangunan Rute Aman Selamat Sekolah yang terbangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.06	0009	Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Rute Aman Selamat Sekolah (RASS)	Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah (RASS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan
2	15	02	2.06	0010	Monitoring dan evaluasi zona selamat sekolah (ZoSS)	Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap zona selamat sekolah (ZOSS)	Jumlah lokasi Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang diidentifikasi dan diawasi	Laporan
2	15	02	2.06	0011	Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Meningkatnya Kompetensi Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Penilai Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	15	02	2.06	0012	Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan	Terbangunnya implementasi batas kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang terpasang implementasi batas kecepatan	Unit
2	15	02	2.06	0013	Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Jumlah Terbangunnya Zona Selamat Sekolah (ZOSS)	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.06	0014	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.06	0015	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.06	0016	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Terlaksananya Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan	Dokumen
2	15	02	2.06	0017	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.06	0018	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Terselenggaranya Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Jumlah Pengadaan dan Pemasangan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas	Unit
2	15	02	2.07		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.07	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Laporan
2	15	02	2.07	0005	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Meningkatnya Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah penilai Andalalin yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang
2	15	02	2.07	0006	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Terlaksananya Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin	Jumlah laporan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin yang terawasi	Laporan
2	15	02	2.07	0008	Penetapan Dokumen Teknis Andalalin	Ditetapkannya Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin	Jumlah Persetujuan Dokumen Teknis Andalalin yang ditetapkan	Dokumen
2	15	02	2.08		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.08	0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan
2	15	02	2.08	0004	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.08	0006	Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C	Terlaksananya Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah laporan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Laporan
2	15	02	2.08	0007	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.08	0008	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Meningkatnya Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ditingkatkan kapasitasnya	Orang
2	15	02	2.08	0009	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Laporan
2	15	02	2.09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.09	0002	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	02	2.09	0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	Unit
2	15	02	2.10		Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.10	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.10	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.11		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.12		Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.12	0001	Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.12	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.13		Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.13	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terciptanya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.13	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersosialisasinya dan Terlaksananya Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.13	0003	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.13	0004	Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kebijakan penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	02	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.14	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Unit
2	15	02	2.15		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.15	0003	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terpenuhinya Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.	Unit
2	15	02	2.15	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.16		Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	2.16	0001	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.16	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	02	2.16	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	02	3.18		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ			
2	15	02	3.18	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang
2	15	02	4.18		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di Bidang LLAJ			
2	15	02	4.18	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua di bidang LLAJ	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP di bidang LLAJ	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan di bidang LLAJ	orang
2	15	03			PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN			
2	15	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.02		Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.03		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.03	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau Sesuai dengan Domisili Orang Perseorangan Warga Negara Indonesia atau Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.04		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.04	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.04	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.05		Penerbitan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha			
2	15	03	2.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Penyelenggaraan Angkutan Penyeberangan Sesuai dengan Domisili Badan Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.06		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			
2	15	03	2.06	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.06	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.07		Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.07	0003	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.07	0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian untuk angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan jumlah laporan pengendalian dan pengawasan izin persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.08		Penerbitan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal			
2	15	03	2.08	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.08	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait dengan Perawatan dan Perbaikan Kapal	Laporan
2	15	03	2.09		Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.09	0001	Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	03	2.09	0002	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.09	0003	Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Terawasinya Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	03	2.10		Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.10	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.10	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen
2	15	03	2.10	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan
2	15	03	2.11		Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.11	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Tersusunnya rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen
2	15	03	2.11	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.11	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Sungai dan Danau	Laporan
2	15	03	2.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.12	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Dokumen
2	15	03	2.12	0002	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terbangunnya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun	Unit
2	15	03	2.12	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.12	0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.12	0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.13		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
2	15	03	2.13	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perizinan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.13	0002	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Terbangunnya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Dibangun	Unit
2	15	03	2.13	0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.13	0006	Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pembangunan	Unit
2	15	03	2.13	0007	Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Terlaksananya Pemeliharaan Dermaga Sungai dan Danau	Jumlah Dermaga Sungai dan Danau yang di Pelihara	Unit
2	15	03	2.13	0008	Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi bidang Pengoperasian & Pemeliharaan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Orang
2	15	03	2.13	0009	Peningkatan Kompetensi Personil di bidang Angkutan Sungai dan Danau	Meningkatnya Kompetensi Personil bidang Angkutan Sungai dan Danau	Jumlah Personil yang ditingkatkan kompetensinya dan tersertifikasi	Orang
2	15	03	2.13	0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.13	0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.14		Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.14	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.14	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilaksanakan	Laporan
2	15	03	2.15		Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			
2	15	03	2.15	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.15	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.15	0003	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Pengumpan lokal	Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan pengumpan Lokal yang Tersedia	Unit
2	15	03	2.16		Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.16	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam Untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal Dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.16	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi yang Dilakukan dalam rangka Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.17		Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.17	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.17	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dilakukan	Laporan
2	15	03	2.18		Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.18	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	03	2.18	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	2.19		Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	2.19	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang Dilaksanakan	Dokumen
2	15	03	2.19	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Laporan
2	15	03	3.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	3.12	0006	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Terkendalinya dan Terawasinya pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Laporan
2	15	03	3.20		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran			
2	15	03	3.20	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang
2	15	03	4.12		Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	03	4.12	0006	Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Terkendalinya dan Terawasinya pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan dalam kabupaten/kota pada jaringan jalan kabupaten/kota	Laporan
2	15	03	4.20		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran			
2	15	03	4.20	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Pelayaran	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Pelayaran	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Pelayaran	orang
2	15	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN			
2	15	04	2.01		Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter			
2	15	04	2.01	0002	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Terfasilitasinya Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter	Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter yang Diterbitkan	Dokumen
2	15	04	3.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.02	0003	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia	Laporan
2	15	04	3.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	3.02	0005	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	04	3.02	0006	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	3.03		Pembangunan Bandar Udara			
2	15	04	3.03	0001	Penyediaan lahan Bandar Udara	Tersedianya lahan Bandar Udara	Jumlah lahan Bandar Udarayang tersedia	M2
2	15	04	3.03	0002	Pembangunan Bandar Udara	Terbangunnya bandar udara	Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.03	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	Unit/Paket
2	15	04	3.03	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	3.03	0005	Pembangunan Lapangan Terbang	Terbangunnya Lapangan Terbang	Jumlah Lapangan Terbang Yang Dibangun	Unit
2	15	04	3.03	0006	Pemeliharaan Lapangan Terbang	Terpeliharanya Lapangan Terbang	Jumlah Lapangan Terbang Yang Dipelihara	Unit
2	15	04	3.04		Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan			
2	15	04	3.04	0001	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk	Unit
2	15	04	3.04	0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	3.05		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan			
2	15	04	3.05	0001	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen
2	15	04	3.05	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Laporan
2	15	04	3.05	0003	Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersosialisasi	Dokumen
2	15	04	3.05	0004	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang terkendali	Dokumen
2	15	04	4.02		Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.02	0003	Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Terlaksananya Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi Penyediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara yang Tersedia	Laporan
2	15	04	4.02	0004	Koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	4.02	0005	Pembangunan Lapangan Terbang	Terbangunnya Lapangan Terbang	Jumlah Lapangan Terbang Yang Dibangun	Unit
2	15	04	4.02	0006	Pemeliharaan Lapangan Terbang	Terpeliharanya Lapangan Terbang	Jumlah Lapangan Terbang Yang Dipelihara	Unit
2	15	04	4.02	0007	Pengelolaan Bandara	Terkelolanya Bandar Udara	Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Unit
2	15	04	4.02	0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara	Tersedianya Fasilitas Bandar Udara	Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia	Unit
2	15	04	4.03		Pembangunan Bandar Udara			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.03	0001	Penyediaan lahan Bandar Udara	Tersedianya lahan Bandar Udara	Jumlah lahan Bandar Udarayang tersedia	M2
2	15	04	4.03	0002	Pembangunan Bandar Udara	Terbangunnya bandar udara	Jumlah bandar udara yang terbangun	Unit
2	15	04	4.03	0003	Penyediaan Infrastruktur Penunjang Bandar Udara	Tersedianya infrastruktur penunjang Bandar Udara	Jumlah infrastruktur penunjang Bandar Udara yang terbangun	Unit/Paket
2	15	04	4.03	0004	Koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandara	Jumlah koordinasi dan sosialisasi pembangunan bandar udara	Kegiatan
2	15	04	4.04		Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan			
2	15	04	4.04	0001	Pembentukan UPTD Penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Terbentuknya UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan	Jumlah Unit UPTD penyelenggara Bandar Udara yang belum diusahakan secara komersil untuk pelayanan jasa kebandarudaraan yang terbentuk	Unit
2	15	04	4.04	0002	Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Terlaksananya Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelayanan Jasa Kebandarudaraan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	04	4.05		Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan			
2	15	04	4.05	0001	Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	Dokumen
2	15	04	4.05	0002	Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	terlaksananya Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Jumlah Laporan Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara	Laporan
2	15	04	4.05	0003	Sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya sosialiasi Pelaksanaan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang tersosialisasi	Dokumen
2	15	04	4.05	0004	Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen yang terkendali	Dokumen
2	15	05			PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN			
2	15	05	2.01		Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.01	0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian	Tersusunnya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	2.01	0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Ditetapkannya Kebijakan dan Tersosialisasinya Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Perkeretaapian	Dokumen
2	15	05	2.01	0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Terkendalinya Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Jumlah Laporan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Perkeretaapian	Laporan
2	15	05	2.01	0004	Penyediaan Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Peralatan Keselamatan Perlintasan Sebidang di Jalan Kabupaten/ Kota yang tersedia	Unit
2	15	05	2.02		Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah	Laporan
2	15	05	2.03		Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.03	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.03	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota dan Pelaksanaan Uji Coba Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	05	2.04		Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota			
2	15	05	2.04	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Tersusunnya Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Kelas Stasiun untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	05	2.05		Penerbitan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.05	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersusunnya Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
2	15	05	2.05	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	05	2.06		Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.06	0001	Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	15	05	2.06	0002	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	15	05	2.07		Penerbitan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.07	0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	2.07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	05	3.06		Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	15	05	3.06	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	3.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	05	3.07		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian			
2	15	05	3.07	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang
2	15	05	4.06		Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2	15	05	4.06	0001	Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Infrastruktur Perkeretapaian Yang Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota yang disediakan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	15	05	4.06	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang Terinstegrasi yang Dilaksanakan Sesuai dengan Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	15	05	4.07		Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian			
2	15	05	4.07	0001	Pembinaan dan Pemberdayaan SDM Orang Asli Papua Bidang Perkeretaapian	Terlaksananya Pembinaan dan Pemberdayaan SDM OAP Bidang Perkeretaapian	Jumlah SDM OAP yang mendapatkan pembinaan dan pemberdayaan Bidang Perkeretaapian	orang
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas
2	16	02	2.01	0016	Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	Permohonan
2	16	02	2.01	0018	Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik	Persentase
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi
2	16	02	2.01	0020	Diseminasi Informasi	Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media
2	16	02	2.01	0022	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun	Dokumen
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	Orang
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA			
2	16	03	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.01	0004	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	2.02	0013	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Pusat Data Nasional	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional	Aplikasi
2	16	03	2.02	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Terlaksananya Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan
2	16	03	2.02	0026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Terlaksananya Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	0032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Terlaksananya pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE	Aplikasi
2	16	03	2.02	0033	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan pusat kendali pemerintah daerah	Jumlah laporan operasionalisasi pusat kendali	Laporan
2	16	03	2.02	0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	Terlaksananya Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Laporan
2	16	03	2.02	0036	Penyediaan Akses Internet	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah
2	16	03	2.02	0037	Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	2.02	0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	Dokumen
2	16	03	2.02	0039	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	Dokumen
2	16	03	3.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	3.02	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit
2	16	03	3.02	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase
2	16	03	3.02	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	16	03	4.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	16	03	4.02	0013	Pembinaan dan fasilitasi start-up digital di wilayah Kabupaten/Kota	Tersedianya start-up digital di wilayah kabupaten/kota yang dirintis	Jumlah start-up digital yang dirintis di wilayah kabupaten/kota yang sudah memiliki purwarupa produk	Unit
2	16	03	4.02	0014	Pendampingan dan fasilitasi adopsi teknologi digital di bidang Ekonomi Digital Mencakup sektor prioritas dan UMKM	Meningkatnya adopsi teknologi digital Digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase tingkat adopsi teknologi digital di sektor prioritas dan UMKM pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Papua	Persentase
2	16	03	4.02	0015	Pendampingan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan edukasi literasi digital	meningkatnya literasi digital di masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital	orang
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH			
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM			
2	17	02	2.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	02	2.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	02	2.02	0001	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Pemenuhan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	03	2.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			
2	17	03	2.01	0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Unit Usaha
2	17	03	2.01	0004	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Unit Usaha
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI			
2	17	04	2.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	04	2.01	0001	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	04	2.01	0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Unit Usaha
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN			
2	17	05	2.01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	05	2.01	0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI			
2	17	06	2.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	2.01	0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga
2	17	06	2.01	0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Meningkatnya Penumbuhan Kesadaran Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat Dalam Peningkatan Taraf Hidup Melalui Kehidupan Berkoperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	Pembinaan dan/atau Pendampingan yang dilaksanakan	Kelompok Masyarakat

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	2.01	0004	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Unit Usaha
2	17	06	2.01	0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	2.01	0006	Pemulihan Usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Pemulihan Usaha Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Koperasi yang dipulihkan usahanya	Unit Usaha
2	17	06	2.01	0007	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Unit Usaha
2	17	06	2.01	0008	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	2.01	0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Usaha
2	17	06	3.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	06	3.01	0003	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	06	3.01	0004	Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi	Terlaksananya Sosialisasi pembentukan koperasi bagi kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat	Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi	Kelompok Pra-Koperasi
2	17	06	4.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	17	06	4.01	0003	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, AksesPasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha Produktif Koperasi yang Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha
2	17	06	4.01	0004	Sosialisasi bagi kelompok masyarakat di wilayah adat untuk membentuk koperasi	Terlaksananya Sosialisasi pembentukan koperasi bagi kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat	Jumlah kelompok masyarakat pra-koperasi di wilayah adat yang mendapatkan sosialisasi pembentukan koperasi	Kelompok Pra-Koperasi
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	2.01		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
2	17	07	2.01	0002	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0003	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0004	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	2.01	0007	Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaataan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Terfasilitasinya Usaha MIkro dalam Proses Pelatihan dan Pendampingan Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembukuan/Pencatatan Keuangan Usaha Mikro dan Usaha Kecil	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0008	Pemulihan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0009	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual Usaha Kecil	Terfasilitasinya Hak Kekayaan Intelektual Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0010	Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Pendampingan dan Bantuan Hukum bagi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	2.01	0011	Fasilitasi Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Terfasilitasinya Sertifikasi dan Standardisasi Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0012	Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0013	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Kecil pada Infrastruktur Publik	Terfasilitasinya Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Mikro pada Infrastruktur Publik meliputi terminal, bandar udara, pelabuhan, stasiun, tempat peristirahatan dan pelayanan jalan tol, dan/atau infrastruktur publik lain	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	07	2.01	0014	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	2.01	0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Orang
2	17	07	3.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM			
2	17	07	3.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/Perkada

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	3.03		Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			
2	17	07	3.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelaku Usaha
2	17	07	3.04		Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.			
2	17	07	3.04	0001	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Terfasilitasinya Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	4.02		Penetapan pedoman mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diaturdengan Perdasus terkait dengan kewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM			
2	17	07	4.02	0001	Penyusunan Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Tersusunnya Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Jumlah Pedoman Mekanisme kepemilikan saham lembaga keuangan mikro yang diatur dengan Perdasus terkait dengankewajiban kepemilikan saham yang bersumber dari APBD dalam rangka meningkatkan akses pembiayaan UMKM	Perdasus/Perkada
2	17	07	4.03		Dukungan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah OAP sebagai penyedia pengadaan barang/ jasa Pemerintah Pusat/Daerah dengan melakukan perjanjian kerjasama memprioritaskan kemitraan dengan usaha mikro dan usaha OAP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	07	4.03	0001	Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Terlaksananya Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP untuk masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah UMKM yang mendapatkan Sosialisasi, Bimtek dan Pendampingan Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah OAP masuk dalam sistem Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Pelaku Usaha
2	17	07	4.04		Fasilitasi kemitraan usaha melalui rantai pasok antara usaha besar, usaha menengah, dengan usaha kecil dan usaha mikro untuk mempercepat transformasi UMKM dalam meningkatkan skala usaha.			
2	17	07	4.04	0001	Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Terfasilitasinya Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan Usaha Mikro dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Jumlah Usaha Mikro yang terfasilitasi Kurasi, Peningkatan mutu produk, dan Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Menengah melalui rantai pasok	Unit Usaha
2	17	08			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM			
2	17	08	2.01		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	08	2.01	0002	Pengembangan Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha
2	17	08	2.01	0003	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi	Orang
2	17	08	2.01	0004	Fasilitasi Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjenjang	Terlaksananya Pengembangan Inkubasi Secara Terpadu dan Berjeniang	Jumlah Inkubator yang Terfasilitasi	Lembaga
2	17	08	2.01	0005	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Unit Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	08	2.01	0006	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Unit Usaha
2	17	09			PROGRAM PENGUATAN BADAN HUKUM KOPERASI			
2	17	09	3.01		Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.			
2	17	09	3.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok
2	17	09	3.02		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi			
2	17	09	3.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi
2	17	09	4.01		Pemberian pendampingan dan penyuluhan pendirian koperasi.			
2	17	09	4.01	0001	Fasilitasi Pendampingan dan Penyuluhan Pendirian Koperasi	Terfasilitasinya Tenaga Pendamping dan Penyuluh Pendirian Koperasi	Jumlah Kelompok Pra Koperasi yang didampingi dan diberikan penyuluhan untuk mendirikan koperasi	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	17	09	4.02		Penguatan peran notaris pembuat akta koperasi			
2	17	09	4.02	0001	Fasilitasi Pemberian Akta Notaris bagi Koperasi	Terfasilitasinya Koperasi yang mendapatkan Akta Notaris	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi akta notaris	Koperasi
2	18				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL			
2	18	02			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			
2	18	02	2.01		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Dokumen
2	18	02	2.01	0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	2.01	0004	Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Ditetapkannya rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Dokumen
2	18	02	2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			
2	18	02	2.02	0001	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	02	2.02	0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	Daerah
2	18	02	2.02	0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	02	3.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	3.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha
2	18	02	3.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	18	02	3.04	0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Badan Usaha
2	18	02	3.05		Kemitraan Usaha Nasional			
2	18	02	3.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM
2	18	02	3.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	3.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	18	02	4.03		Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			
2	18	02	4.03	0001	Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Terlaksananya Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam	Jumlah Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Sektor Industri Berbasis Sumber Daya Alam yang Dilaksanakan	Badan Usaha
2	18	02	4.04		Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota			
2	18	02	4.04	0001	Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Hilirisasi Investasi Strategis di Wilayah Kabupaten/Kota	Badan Usaha
2	18	02	4.05		Kemitraan Usaha Nasional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	02	4.05	0001	Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha OAP dan/atau Masyarakat Hukum Adat dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	UMKM
2	18	02	4.06		Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.			
2	18	02	4.06	0001	Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Terlaksananya koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota.	Jumlah Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Laporan
2	18	03			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			
2	18	03	2.01		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	03	2.01	0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Dokumen
2	18	03	2.01	0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	Dokumen
2	18	04			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			
2	18	04	2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota			
2	18	04	2.01	0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	2.01	0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha
2	18	04	2.01	0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	04	2.01	0008	Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Terlaksananya pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	Kegiatan Usaha
2	18	05			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			
2	18	05	2.01		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	18	05	2.01	0004	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Kegiatan Usaha.

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	05	2.01	0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pelaku Usaha
2	18	05	2.01	0006	Pengawasan Penanaman Modal	Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	Kegiatan Usaha
2	18	06			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			
2	18	06	2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	18	06	2.01	0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Dokumen
2	19				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA			
2	19	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
2	19	02	2.01		Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	2.01	0010	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	Dokumen
2	19	02	2.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	2.01	0012	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	Orang
2	19	02	2.01	0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Kab/Kot dengan Kepemimpinan dan Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Kegiatan
2	19	02	2.01	0014	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat kabupaten/kota	Jumlah pemuda di tingkat kabupaten/kota yang haknya terpenuhi	Orang
2	19	02	2.01	0015	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	2.01	0016	Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana kepemudaan melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota	Jumlah prasarana kepemudaan di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit
2	19	02	2.02		Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	02	2.02	0003	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	02	2.02	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Orang
2	19	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN			
2	19	03	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan sekolah khusus olahragawan di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan penyelenggaraan pembentukan dan pengembangan Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha	Jumlah Sekolah Olahraga yang dibentuk dan dikembangkan di tingkat kabupaten/kota	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.01	0005	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	Unit
2	19	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Dokumen
2	19	03	2.02		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	2.02	0004	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.02	0005	Penyelenggaraan Pekan Paralimpik Pelajar Tingkat Nasional dan kabupaten/kota serta Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat kabupaten/kota dan kabupaten/kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat kabupaten/kota	Kegiatan
2	19	03	2.02	0006	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Orang
2	19	03	2.03		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi			
2	19	03	2.03	0006	Seleksi Atlet Daerah	Terlaksananya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	Orang
2	19	03	2.03	0007	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.03	0008	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)	Pelatda
2	19	03	2.03	0009	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	Orang
2	19	03	2.03	0010	pembentukan dan Penyediaan sistem data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Tersedianya data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di kabupaten/kota	Dokumen
2	19	03	2.04		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga			
2	19	03	2.04	0005	Pelaksanaan Standar nasional pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota	Terlaksananya pengelolaan Organisasi Keolahragaan di kabupaten/kota sesuai standar nasional	Persentase pengelolaan organisasi keolahragaan di kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.04	0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Meningkatnya Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota	Dokumen
2	19	03	2.05		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi			
2	19	03	2.05	0006	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Meningkatnya Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	Laporan
2	19	03	2.05	0007	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Terlaksananya Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Dokumen Lembaga Hasil Penyelenggaraan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Laporan
2	19	03	2.05	0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	2.05	0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan	Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
2	19	03	2.05	0010	Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Lembaga
2	19	03	3.01		Pembinaan dan Pengembangan OlahragaPendidikan pada Jenjang Pendidikan yangMenjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	03	3.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan PerkumpulanOlahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah	Dokumen
2	19	03	4.01		Pembinaan dan Pengembangan OlahragaPendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2	19	03	4.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan PelaksanaanPemberdayaan Perkumpulan Olahraga danPenyelenggaraan Kompetisi oleh SatuanPendidikan Menengah	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Menengah	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan Olahraga dan Satuan Pendidikan Menengah Dokumen	Dokumen
2	19	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN			
2	19	04	2.01		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Meningkatnya Penyediaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik yang Tersedia dan Termanfaatkan	Dokumen
2	19	04	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Organisasi
2	19	04	2.01	0003	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah SDM Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
2	19	04	2.01	0004	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota yang Berkualitas	Unit
2	19	04	2.01	0005	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	19	04	2.01	0006	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	Unit
2	19	04	2.01	0007	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah yang Terkelola dan Termanfaatkan	Unit
2	19	04	2.01	0008	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Organisasi
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK			
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL			
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2	20	02	2.01	0017	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	%

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	20	02	2.01	0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	%
2	20	02	2.01	0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	%
2	20	02	2.01	0020	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang
2	20	02	2.01	0021	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	%
2	20	02	2.01	0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN			
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI			
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	02	2.01	0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan
2	21	02	2.01	0006	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan
2	21	02	2.01	0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	21	02	2.01	0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen
2	21	02	2.02		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	21	02	2.02	0002	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02			PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN			
2	22	02	2.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Orang
2	22	02	2.01	0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	Dokumen
2	22	02	2.01	0004	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan	Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	Orang
2	22	02	2.01	0005	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	2.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	2.02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.02	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Laporan
2	22	02	2.02	0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	Sertifikat
2	22	02	2.03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	2.03	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang Telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek
2	22	02	2.03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	Orang
2	22	02	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	Unit
2	22	02	3.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	3.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
2	22	02	3.01	0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapa PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	02	3.01	0005	Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	4.01		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	02	4.01	0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya di Kabupaten/Kota yang Disediakan dan Dipelihara	Unit
2	22	02	4.01	0004	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapa PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
2	22	02	4.01	0005	Integrasi Dokumen PPKD Kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Terintegrasinya Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Integrasi Dokumen PPKD kedalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Tersedia	Dokumen
2	22	03			PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL			
2	22	03	2.01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	03	2.01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	Orang
2	22	03	2.01	0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	Sertifikat
2	22	03	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga
2	22	04			PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH			
2	22	04	2.01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	04	2.01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	04	2.01	0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Unit
2	22	04	2.01	0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Dokumen
2	22	05			PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA			
2	22	05	2.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	Objek
2	22	05	2.01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Objek
2	22	05	2.01	0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	Objek
2	22	05	2.02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek
2	22	05	2.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya	Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	2.02	0003	Pemanfaatan Cagar Budaya	Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	Objek
2	22	05	2.02	0004	Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Terlaksananya Inventarisasi Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Cagar Budaya dan Objek Pemajuan Kebudayaan yang Diinventarisasi	Objek
2	22	05	2.03		Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	05	2.03	0001	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	Objek
2	22	05	2.03	0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	Laporan
2	22	05	3.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	3.01	0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	3.01	0006	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan	Cagar Budaya
2	22	05	3.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	05	3.02	0004	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yangDidaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Cagar Budaya
2	22	05	3.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia
2	22	05	3.04		Penetapan Sistem Zonasi			
2	22	05	3.04	0001	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	3.04	0009	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Telaksananya Penetapan Sistem Zonasi situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	22	05	4.01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota			
2	22	05	4.01	0005	Pembentukan Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Ahli Cagar Budaya Tingkat Kabupaten/Kota	Orang
2	22	05	4.01	0006	Penetapan cagar budaya peringkat provinsi di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penetapan cagar budaya peringkat di Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat di Kabupaten/Kota yang Ditetapakan	Cagar Budaya
2	22	05	4.02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2	22	05	4.02	0004	Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Terlaksananya Pendaftaran Cagar Budaya Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yangDidaftarkan Kedalam Register Nasional Cagar Budaya	Cagar Budaya

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	05	4.02	0005	Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warisan Budaya Dunia yang di Miliki atau di Kuasai Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Dikelola	Warisan Budaya Dunia
2	22	05	4.04		Penetapan Sistem Zonasi			
2	22	05	4.04	0001	Penerbitan Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Terbitnya Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Pemugaran, Pengembangan, Pengubahan Fungsi Ruang, Pemanfaatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Diterbitkan	Dokumen
2	22	05	4.04	0009	Penetapan Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Telaksananya Penetapan Sistem zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Sistem Zonasi Situs dan/atau Kawasan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen
2	22	06			PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN			
2	22	06	2.01		Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	06	2.01	0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Unit
2	22	06	2.01	0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	Orang
2	22	06	2.01	0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Unit
2	22	06	2.01	0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
2	22	06	2.01	0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Unit
2	22	06	2.01	0013	Pengelolaan Koleksi Museum	Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	06	2.01	0014	Pengelolaan Operasional Museum	Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	Layanan
2	22	06	2.01	0015	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Orang
2	22	06	2.01	0016	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Terlaksananya penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Jumlah penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Taman Budaya	Unit
2	22	06	2.01	0017	Revitalisasi Taman Budaya	Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi	Unit
2	22	06	2.01	0018	Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya	Layanan
2	22	06	2.01	0019	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Orang
2	22	07			PROGRAM MAJELIS ADAT ACEH (MAA)			
2	22	07	7.01		Pelestarian dan Pembinaan Adat Istiadat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.01	0001	Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Terfasilitasinya Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Adat Seumapa/Narit Maja, Meunasib dan Tarian Tradisional	Laporan
2	22	07	7.01	0002	Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Tersedianyan Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Jumlah Lembaga Pemasyarakatan Adat Do Da Idi	Lembaga
2	22	07	7.01	0003	Sosialisasi Adat Istiadat	Terfasilitasinya Sosialisasi Adat Istiadat	Jumlah Peserta Sosialisasi Adat Istiadat	Orang
2	22	07	7.01	0004	Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Terlaksananya Pembinaan Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan	Jumlah Keluarga Meuadab dan Adat Perkawinan yang Dibina	Keluarga
2	22	07	7.01	0005	Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Tersedianya Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Jumlah Pengadaan Buku-Buku tentang Adat Aceh	Buku
2	22	07	7.01	0006	Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Terlaksananya Publikasi Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang	Jumlah Adat dan Adat Istiadat Melalui Media Luar Ruang yang Dipublikasikan	Dokumen
2	22	07	7.02		Pembinaan dan Pengembangan Hukum Adat			
2	22	07	7.02	0001	Penguatan Peradilan Adat	Terlaksananya Pelatihan Peradilan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Peradilan Adat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.02	0002	Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Terlaksananya Rapat Koordinasi/Evaluasi Pelaksanaan Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Jumlah Dokumen Hasil Rapat Koordinasi Peradilan Adat dan Perpolisian Masyarakat (Polmas)	Dokumen
2	22	07	7.02	0003	Pembinaan Mediasi Adat	Terlaksananya Pembinaan Mediasi Adat	Jumlah Laporan Pembinaan Mediasi Adat	Laporan
2	22	07	7.02	0004	Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Terlaksananya Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Jumlah Peserta Sosialisasi Hukum Adat dan Lembaga Adat	Orang
2	22	07	7.03		Pembinaan Lembaga Adat dan Tokoh Adat			
2	22	07	7.03	0001	Pembinaan Kapasitas MAA	Terlaksananya Pembinaan Kapasitas MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Jumlah Peserta Pembinaan MAA Kabupaten/Kota dan Perwakilan	Orang
2	22	07	7.03	0002	Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Terlaksananya Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Jumlah Peserta Pelatihan Pemberdayaan Kelembagaan Adat	Orang
2	22	07	7.03	0003	Rapat Kerja MAA	Terlaksananya Rapat Kerja MAA	Jumlah Laporan Hasil Rapat Kerja MAA	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	07	7.03	0004	Penerbitan Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Terbitnya Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat	Jumlah Majalah dan Buku tentang Adat dan Adat Istiadat yang Diterbitkan	Eksemplar
2	22	07	7.03	0005	Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Terlaksananya Pembinaan Pemuda Pelopor Adat	Jumlah Pemuda Pelopor Adat yang Dibina	Orang
2	22	07	7.03	0006	Pendataan dan Dokumentasi Sengketa Adat	Terlaksananya Pendataan dan Dokumentasi Kasus Sengketa Adat	Jumlah Kasus Sengketa Adat yang Terdata dan Terdokumentasi	Kasus
2	22	07	7.03	0007	Pengadaan Pakaian dan Perlengkapan Adat	Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Adat	Jumlah Pakaian dan Perlengkapan Adat	Unit
2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN			
2	22	08	5.01		Sejarah, Bahasa, Sastra dan Permuseuman			
2	22	08	5.01	0001	Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan	Dokumen
2	22	08	5.01	0002	Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terlaksananya Pembinaan Bahasa dan Sastra	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Bahasa dan Sastra	Laporan
2	22	08	5.01	0003	Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Terlaksananya Pembinaan dan Pengelolaan Permuseuman	Jumlah Permuseuman yang Dibina dan Dikelola	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.02		Pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya			
2	22	08	5.02	0001	Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Terlaksananya Tata Kelola Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikelola	Objek
2	22	08	5.02	0002	Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Meningkatnya Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya dan Warisan Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.02	0003	Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Terlaksananya Nominasi Warisan Budaya Nasional dan Dunia	Jumlah Objek Warisan Budaya Nasional dan Dunia yang Masuk Nominasi	Objek
2	22	08	5.03		Pengelolaan Taman Budaya			
2	22	08	5.03	0001	Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Taman Budaya Kabupaten Kota	Jumlah Taman Budaya Kabupaten/Kota yang Dikelola dan Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.04		Sarana Prasarana Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.04	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Budaya	Unit
2	22	08	5.04	0002	Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Terlaksananya Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital	Jumlah Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital yang Dibangun	Objek

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.04	0003	Pengadaan Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Tersedianya Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Jumlah Sarana Publikasi dan Penanda Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.04	0004	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Budaya	Unit
2	22	08	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kebudayaan			
2	22	08	5.05	0001	Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Perencanaan Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Program dan Kegiatan yang Mengakomodir Urusan Kebudayaan	Dokumen
2	22	08	5.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan Urusan Kebudayaan	Laporan
2	22	08	5.05	0003	Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Terbangunnya Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya	Dokumen
2	22	08	5.06		Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.06	0001	Pengembangan Lumbung Mataraman	Terlaksananya Pengembangan Lumbung Mataraman	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan Lumbung Mataraman	Laporan
2	22	08	5.06	0002	Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Terlaksananya Pengembangan Atraksi Wisata Budaya	Jumlah Objek Atraksi Wisata Budaya yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06	0003	Pengembangan Industri Kreatif	Terlaksananya Pengembangan Industri Kreatif	Jumlah Industri Kreatif yang Dikembangkan	Unit
2	22	08	5.06	0004	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Tradisional	Jumlah Pelayanan Kesehatan Tradisional	Unit
2	22	08	5.06	0005	Pengembangan Budaya Bahari	Terlaksananya Pengembangan Budaya Bahari	Jumlah Objek Budaya Bahari yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06	0006	Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Terlaksananya Pengembangan Wana Wisata Budaya Mataram	Jumlah Objek Wana Wisata Budaya Mataram yang Dikembangkan	Objek
2	22	08	5.06	0007	Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Terlaksananya Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Jumlah Dokumen Pengembangan Sistem Pertanian Tradisional	Dokumen
2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	0001	Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Terfasilitasinya Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Jumlah Laporan Pembinaan Rintisan Desa dan Kantong Budaya	Laporan
2	22	08	5.07	0002	Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Penggiat Seni	Jumlah Lembaga Penggiat Seni yang Dibina	Lembaga
2	22	08	5.07	0003	Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Terlaksananya Misi Kebudayaan ke Dalam dan Luar Negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Jumlah Laporan Pelaksanaan Misi Kebudayaan ke Dalam negeri dalam rangka Diplomasi Budaya	Laporan
2	22	08	5.07	0004	Penghargaan Seniman dan Budayawan	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi Seniman dan Budayawan	Jumlah Seniman dan Budayawan yang Mendapatkan Penghargaan	Orang
2	22	08	5.07	0005	Festival Kebudayaan Yogyakarta	Terlaksananya Festival Kebudayaan Yogyakarta	Jumlah Laporan Festival Kebudayaan Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.07	0006	Gelar Budaya Jogja	Terlaksananya Gelar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Gelar Budaya Yogyakarta	Laporan
2	22	08	5.07	0007	Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Tersedianya Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Jumlah Dokumen Publikasi Seni dan Budaya Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	0008	Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Terlaksananya Pembinaan Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi	Jumlah Penghayat Kepercayaan, Adat dan Tradisi yang Dibina	Orang
2	22	08	5.07	0009	Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Terlaksananya Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Jumlah Laporan Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur dalam Masyarakat	Laporan
2	22	08	5.07	0010	Penyelenggaraan Event Penggiat Seni	Terselenggaranya Even Penggiat Seni	Jumlah Laporan Even Penggiat Seni	Laporan
2	22	08	5.07	0011	Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Terfasilitasinya Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Jumlah Laporan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	Laporan
2	22	08	5.07	0012	Pembinaan Jagawarga	Terfasilitasinya Pembinaan Jagawarga	Jumlah Orang Mengikuti Pembinaan Jagawarga yang Dibina	Orang
2	22	08	5.07	0013	Pengembangan Kewirausahaan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kewirausahaan Desa	Jumlah Laporan Pengembangan Kewirausahaan Desa	Laporan
2	22	08	5.07	0014	Peningkatan Lembaga Wisata Budaya	Meningkatnya Lembaga Wisata Budaya	Jumlah Lembaga Wisata Budaya yang Ditingkatkan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	08	5.07	0015	Pengembangan Ekonomi Perempuan	Terlaksananya Pengembangan Ekonomi Perempuan	Jumlah Perempuan yang Dikembangkan Perekonomiannya	Orang
2	22	08	5.07	0016	Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Pengembangan Museum Gunung Api Merapi	Laporan
2	22	08	5.07	0017	Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Desa	Laporan
2	22	08	5.07	0018	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Terlaksananya Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah Dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Dokumen
2	22	08	5.08		Pendidikan Berbasis Budaya			
2	22	08	5.08	0001	Pembinaan Muatan Lokal	Terlaksananya Pembinaan Muatan Lokal	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Muatan Lokal	Laporan
2	22	08	5.08	0002	Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan Urusan Keistimewaan	Unit
2	22	08	5.08	0003	Kependidikan Kepramukaan	Terlaksananya Kependidikan Kepramukaan	Jumlah Orang Mengikuti Kegiatan Kependidikan Kepramukaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	10			PROGRAM PERFILMAN NASIONAL			
2	22	10	4.01		Pendukungan Ekositem Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota			
2	22	10	4.01	0001	Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Insan Perfilman Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Insan Perfil man Daerah diKabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Orang
2	22	10	4.01	0002	Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua	Terlaksananya Pemberian Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua	Jumlah Keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tertentu untuk Perfilman di Kabupaten/Kota di Papua Yang Dilaksanakan	Lembaga
2	22	10	4.01	0003	Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Kegiatan
2	22	10	4.01	0004	Pemberian Bantuan Pembiayaan Pengarsipan Film di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberian Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Pembiayaan Apresiasi Film di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Film

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	22	10	4.01	0005	Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia	Terlaksananya Penyediaan Bantuan Subsidi dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia	Jumlah Bantuan Subsidi Dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia Yang Dilaksanakan	Film
2	22	10	4.01	0006	Penerbitan Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia	Tersedianya Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia	Jumlah Izin Daerah dalam Pembuatan Film untuk Pemenuhan Ketersediaan Film Indonesia yang Diterbitkan	Dokumen
2	22	10	4.01	0007	Fasilitasi Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembuatan Film tentang Warisan Budaya Bangsa di Daerah Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Film
2	22	10	4.01	0008	Penyediaan Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman	Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pengembangan dan Kemajuan Perfilman yang Disediakan	Unit
2	23				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02			PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN			
2	23	02	2.01		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.01	0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	2.01	0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Perpustakaan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.01	0012	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui peningkatan koleksi	Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi	Layanan
2	23	02	2.01	0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Perpustakaan
2	23	02	2.01	0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	Eksemplar
2	23	02	2.01	0015	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi	Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.01	0016	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Orang
2	23	02	2.01	0017	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	Dokumen
2	23	02	2.01	0018	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Kabupaten/Kota untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Eksemplar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.01	0019	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Eksemplar
2	23	02	2.01	0020	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK	Perpustakaan
2	23	02	2.02		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	02	2.02	0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	2.02	0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	Perpustakaan
2	23	02	2.02	0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perpustakaan
2	23	02	2.02	0009	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	Orang
2	23	02	2.02	0010	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Dasar dan masyarakat dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	Lokus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	02	3.03		Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
2	23	02	3.03	0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks
2	23	02	4.03		Peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			
2	23	02	4.03	0001	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Papua	indeks
2	23	03			PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO			
2	23	03	2.01		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	03	2.01	0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	23	03	2.01	0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	Eksemplar
2	23	03	2.02		Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2	23	03	2.02	0003	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar
2	23	03	2.02	0004	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kota	Eksemplar
2	24				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN			
2	24	02			PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	2.01		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.01	0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Terkelolanya Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	Berkas
2	24	02	2.01	0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Terkelolanya Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Berkas
2	24	02	2.01	0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Laporan
2	24	02	2.01	0004	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis	Terlaksananya pengadaan prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Unit
2	24	02	2.01	0005	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota	Jumlah OPD kabupaten/kota dan BUMD kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	Lembaga
2	24	02	2.01	0006	Penyusunan Database Arsiparis	Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	2.01	0007	Pemilihan Arsiparis Teladan	Terlaksananya Pemilihan Arsiparis Teladan	Jumlah Arsiparis yang dipilih dan didukung kegiatannya	Orang
2	24	02	2.01	0008	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Lembaga
2	24	02	2.01	0009	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	Laporan
2	24	02	2.01	0010	Pembinaan Kearsipan kewenangan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah OPD kab/kota, BUMD kab/kota, ORMAS/ORPOL kab/kota, dan LKD kab/kota telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	Instansi
2	24	02	2.02		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.02	0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Terkelolanya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan kepada ANRI	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	2.02	0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	Naskah
2	24	02	2.02	0004	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Terlaksananya Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Arsip
2	24	02	2.02	0005	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Dokumen
2	24	02	2.03		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			
2	24	02	2.03	0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Pengguna

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	2.03	0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
2	24	02	3.04		Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota			
2	24	02	3.04	0001	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	3.04	0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan	Lembaga
2	24	02	3.06		Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota			
2	24	02	3.06	0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerahkabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Instansi
2	24	02	3.06	0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	02	4.04		Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	4.04	0001	Pelaksanaan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota	Jumlah Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan	Lembaga
2	24	02	4.04	0002	Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Terlaksananya Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan	Lembaga
2	24	02	4.06		Pengawasan kearsipan di kabupaten/kota			
2	24	02	4.06	0001	Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah kabupaten/kota	Jumlah perangkat daerahkabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Instansi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	02	4.06	0002	Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di kabupaten/kota	Terlaksananya Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah kabupaten/kota	Jumlah badan usaha milik daerah kabupaten/kota yang diakukan pengawasan	Lembaga
2	24	03			PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP			
2	24	03	2.01		Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
2	24	03	2.01	0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Berkas
2	24	03	2.01	0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Arsip
2	24	03	2.02		Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	2.02	0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	2.02	0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencama	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Arsip
2	24	03	2.03		Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			
2	24	03	2.03	0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Daftar

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	2.03	0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Arsip
2	24	03	2.03	0003	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan	Arsip
2	24	03	2.03	0004	Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Terlaksananya Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan	Arsip
2	24	03	2.04		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	2.04	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip
2	24	03	2.04	0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Terkelolanya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Arsip
2	24	03	2.05		Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang			
2	24	03	2.05	0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Arsip
2	24	03	2.05	0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Arsip

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
2	24	03	2.05	0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Arsip
2	24	04			PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP			
2	24	04	2.01		Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota			
2	24	04	2.01	0003	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlasksananya Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan	SOP
2	24	04	2.01	0004	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Terlaksananya Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Arsip
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			
3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			
3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	Dokumen
3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	Unit
3	25	03	2.01	0004	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	Unit
3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Unit Usaha
3	25	03	2.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit
3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			
3	25	03	2.03	0001	Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Dokumen
3	25	03	2.03	0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Layanan
3	25	03	2.04		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.04	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	2.04	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Rekomendasi
3	25	03	2.04	0003	Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Diterbitkannya rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	2.04	0004	Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	2.04	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.05		Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	03	2.05	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	2.05	0003	Penerbitan rekomendasi Surat Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP)	Jumlah Rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	2.06		Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	2.06	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	2.06	0003	Penerbitan rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	03	3.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	03	3.02	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	unit
3	25	03	3.07		Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			
3	25	03	3.07	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.07	0002	Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Tercatatnya kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan	Dokumen
3	25	03	3.08		Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
3	25	03	3.08	0001	Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencatatan kapal kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.09		Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			
3	25	03	3.09	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.09	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	3.10		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	3.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	3.10	0002	Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Diterbitkannya Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	4.07		Pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.07	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pencatatan kapal perikanan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	03	4.07	0002	Pelaksanaan pencatatan kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Tercatatnya kapal perikanan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Jumlah bukti pencatatan kapal perikanan	Dokumen
3	25	03	4.08		Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.08	0001	Pelaksanaan pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pencatatan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pencatatan kapal kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	4.09		Penerbitan persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.09	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Persetujuan pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.09	0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan kapal perikanan untuk kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Diterbitkannya rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah rekomendasi Persetujuan Pengadaan Kapal Perikanan (PPKP) berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	4.10		Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	03	4.10	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	03	4.10	0002	Penerbitan Pendaftaran kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Diterbitkannya Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Jumlah Pendaftaran Kapal kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 (lima) GT yang beroperasi di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.01		Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	25	04	2.01	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.01	0002	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing	Terlayaninya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing Melalui Penerbitan Rekomendasi Teknis	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing yang Diterbitkan	Rekomendasi
3	25	04	2.01	0003	Penerbitan Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Diterbitkannya Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.01	0004	Penerbitan Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan kewenangan Kabupaten/Kota yang Diterbitkannya	rekomendasi
3	25	04	2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			
3	25	04	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	Kelompok
3	25	04	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	Kelompok

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.02	0003	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya	Kelompok
3	25	04	2.02	0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Kelompok
3	25	04	2.03		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.03	0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Perizinan Berusaha Skala Mikro dan Kecil bagi Pembudidayaan Ikan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Rekomendasi
3	25	04	2.03	0002	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi
3	25	04	2.03	0003	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Terlayaninya Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rekomendasi
3	25	04	2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.04	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	25	04	2.04	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	04	2.04	0004	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Dokumen
3	25	04	2.04	0008	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.04	0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Unit
3	25	04	2.04	0010	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Unit
3	25	04	2.04	0011	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	Unit
3	25	04	2.04	0012	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Tersedianya Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi	Jumah Usulan Dokumen Pemanfataan dan Perlindungan Lahan Pembudidayaan Ikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	04	2.04	0013	Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia	Unit
3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			
3	25	05	2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			
3	25	05	2.01	0003	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Operasi Kapal Pengawas Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Perikanan	Hari Operasi
3	25	05	2.01	0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha
3	25	05	2.01	0005	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	2.01	0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha
3	25	05	2.01	0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha
3	25	05	2.01	0008	Pengadaan Kapal Pengawas Perikanan	Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang diadakan	Unit
3	25	05	2.01	0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	2.01	0010	Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Perkara
3	25	05	2.01	0011	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Unit
3	25	05	2.01	0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha
3	25	05	3.02		Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota			
3	25	05	3.02	0001	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wiilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara
3	25	05	4.02		Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin di wilayah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	05	4.02	0001	Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara sanksi administratif bidang kelautan yang memiliki izin di wiilayah kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin di wilayah kabupaten/kota yang ditangani	Perkara
3	25	06			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			
3	25	06	2.01		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			
3	25	06	2.01	0002	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Terlaksananya penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Perizinan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitka	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	2.01	0003	Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rekomendasi
3	25	06	2.01	0004	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Rekomendasi
3	25	06	2.01	0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Dokumen
3	25	06	2.02		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	2.02	0002	Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Unit Usaha
3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			
3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ton

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	Pelaku Usaha
3	25	06	3.04		Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	3.04	0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Unit Usaha
3	25	06	3.05		Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.05	0001	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel
3	25	06	3.06		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	3.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	kg/kap/tahun
3	25	06	3.07		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.07	0001	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	unit
3	25	06	3.08		Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	3.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	3.09		Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	3.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	unit
3	25	06	4.04		Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	4.04	0001	Pelaksanaan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan Pembinaan teknis usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Unit Usaha
3	25	06	4.05		Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.05	0001	Pelaksanaan pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Pengujian mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah sampel yang diuji mutu dan keamanannya	Sampel
3	25	06	4.06		Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	4.06	0001	Fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya fasilitasi akses pasar dan promosi peningkatan konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah peningkatan angka konsumsi ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	kg/kap/tahun
3	25	06	4.07		Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.07	0001	Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan untuk meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam kerangka sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah prasarana dan sarana usaha pengolahan dan pemasaran ikan yang difasilitasi penyediaannya	unit
3	25	06	4.08		Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	4.08	0001	Penerbitan rekomendasi sertifikat kelayakan pengolahan/sertifikat Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya Penerbitan rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah rekomendasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan/Good Manufacturing Practices (GMP) untuk Unit Pengolahan Ikan (UPI) skala usaha mikro dan skala usaha kecil	rekomendasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	25	06	4.09		Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil			
3	25	06	4.09	0001	Revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Terlaksananya revitalisasi unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil	Jumlah unit pengolahan ikan dan sentra pengolahan ikan untuk skala usaha mikro dan skala usaha kecil yang direvitalisasi	unit
3	26				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA			
3	26	02			PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA			
3	26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.01	0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi
3	26	02	2.01	0006	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.01	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	Orang
3	26	02	2.01	0009	Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.02		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.02	0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.02	0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.02	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Unit
3	26	02	2.02	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi
3	26	02	2.02	0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.02	0009	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.03		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.03	0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Lokasi
3	26	02	2.03	0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	2.03	0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Lokasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.03	0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	Unit
3	26	02	2.03	0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.03	0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Lokasi
3	26	02	2.03	0008	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kab/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.03	0009	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Kabupaten/Kotamadya	Dokumen
3	26	02	2.03	0010	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Laporan
3	26	02	2.04		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota			
3	26	02	2.04	0006	Pengawasan dan Pembinaan Kepatuhan Pelaku Usaha yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021) dalam melaksanakan Standar CHSE di Kab./Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Kepatuhan Usaha Pariwisata yang telah tersertifikasi CHSE (berdasarkan Permenpar No 13 tahun 2020 dan SNI 9042:2021)Terjaganya konsistensi pelaksanaan standar CHSE	Jumlah usaha pariwisata yang telah terseftifikasi CHSE yang dibina dan diawasi	Usaha Pariwisata

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.04	0008	Fasilitasi Sertifikasi SNI 9042:2021 (SNI CHSE) di Kabupaten Kota	Terlaksananya sertifikasi SNI 9042:2021	Jumlah usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang difasilitasi sertifikasi SNI 9042:2021	Usaha
3	26	02	2.04	0009	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Kab/Kota	Dokumen
3	26	02	2.04	0010	Sertifikat standar usaha pariwisata yg diterbitkan oleh lembaga OSS (tanpa verifikasi)	Meningkatnya jumlah usaha pariwisata yang memiliki sertifikat standar usaha dari lembaga OSS	Jumlah usaha yg tersertifikasi melalui lembaga oss sebelum beroperasi	Usaha
3	26	02	2.04	0011	Kesediaaan pelaku usaha memenuhi standar usaha pariwisata di Kabupaten/Kota	Terlaksananya komitmen melaksanakan standar usaha	Jumlah usaha yang bersedia memenuhi standar usaha	Laporan
3	26	02	2.04	0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Meningkatnya Investasi Pariwisata Kab/Kota	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	2.04	0013	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Tingkat Risiko Menegah Tinggi)	Jumlah Industri/Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Menengah Tinggi)	Unit Usaha
3	26	02	2.04	0015	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam melaksanakan perijinan berusaha berbasis risiko dan standar usaha pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang telah dilaksanakan pembinaan dan pengawasan	Pelaku Usaha
3	26	02	2.04	0016	Pelaksanaan Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bagi Pelaku Ekonomi Kreatif di Daerah	Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Yang di Fasilitasi Standarisasi dan Sertifikasi Usahanya	Badan Usaha
3	26	02	3.05		Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	02	3.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	02	4.05		Penetapan rencana induk pariwisata di Kabupaten/Kota			
3	26	02	4.05	0001	Penetapan/Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwiataan di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	26	03			PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA			
3	26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	03	2.01	0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	2.01	0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Dokumen
3	26	03	2.01	0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dokumen
3	26	03	2.01	0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Kegiatan
3	26	03	2.01	0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi
3	26	03	3.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	3.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen
3	26	03	3.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga
3	26	03	4.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3	26	03	4.01	0006	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Kemudahan Kunjungan Wisatawan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	03	4.01	0007	Fasilitasi pembentukan badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Terbentuknya badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah	Jumlah badan promosi pariwisata daerah yang merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri sebagai mitra pemerintah Yang Dibentuk	Lembaga
3	26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL			
3	26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota			
3	26	04	2.01	0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	Unit
3	26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3	26	04	2.02	0002	Pengembangan Pendidikan	Berkembangnya Pendidikan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Pendidikan Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	Dokumen
3	26	04	2.02	0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Terfasilitasinya Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	2.02	0004	Penyediaan Infrastruktur	Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	Unit
3	26	04	2.02	0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	0011	Fasilitasi pemberian insentif	Terlaksananya fasilitasi pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	Pelaku Usaha
3	26	04	2.02	0012	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Lembaga
3	26	04	2.02	0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	2.02	0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual	Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	Dokumen
3	26	04	2.02	0016	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Dokumen
3	26	04	2.02	0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Promosi
3	26	04	2.02	0018	Penyusunan Skema Insentif Daerah	Terlaksananya skema insentif ekonomi kreatif daerah	Tersedianya skema insentif ekonomi kreatif	Dokumen
3	26	04	2.02	0019	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Kebijakan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	04	2.02	0020	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	04	2.02	0022	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	Produk
3	26	04	2.02	0023	Penilaian Mandiri Kabupaten Kota Kreatif Indonesia (PMK3I)	Ditetapkannya subsektor unggulan daerah melalui dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP) yang disepakati oleh stakeholder	Jumlah dokumen Berita Acara Hasil Uji Petik (BAHUP)	Dokumen
3	26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
3	26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	2.01	0005	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	2.01	0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	2.01	0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	Orang
3	26	05	2.01	0009	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	2.01	0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Orang
3	26	05	2.01	0011	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Laporan
3	26	05	2.02		Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif			
3	26	05	2.02	0001	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	2.02	0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Terlaksanya Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	2.02	0004	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	Lembaga
3	26	05	2.02	0005	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/ Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	2.02	0006	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/ Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang
3	26	05	2.02	0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Profesi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	26	05	3.02		Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	3.02	0004	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan
3	26	05	4.02		Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3	26	05	4.02	0004	Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP	Jumlah Laporan Fasilitasi dan Pembinaan bagi OAP Dalam Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi OAP Yang Dilaksanakan	Laporan
3	27				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN			
3	27	02			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN			
3	27	02	2.01		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian			
3	27	02	2.01	0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.01	0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan
3	27	02	2.01	0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	Ton
3	27	02	2.01	0004	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	Setek
3	27	02	2.01	0005	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Laporan
3	27	02	2.01	0006	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.01	0007	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura	Laporan
3	27	02	2.01	0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Batang
3	27	02	2.01	0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	Batang
3	27	02	2.01	0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Mata
3	27	02	2.01	0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	Gram
3	27	02	2.01	0012	Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasinya penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil Perkebunan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.01	0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	Setek
3	27	02	2.01	0014	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan	Laporan
3	27	02	2.01	0015	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	Ton
3	27	02	2.01	0016	Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura	Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura	Laporan
3	27	02	2.01	0017	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Anakan
3	27	02	2.02		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.02	0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.02	0003	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Dokumen
3	27	02	2.02	0004	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG tanaman	Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	Varietas Unggul Baru (VUB)
3	27	02	2.02	0005	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian	laporan
3	27	02	2.03		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.03	0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Laporan
3	27	02	2.03	0002	Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar	Laporan
3	27	02	2.04		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.04	0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	Laporan
3	27	02	2.04	0002	Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Ditindak	Kasus
3	27	02	2.05		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	02	2.05	0002	Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Dokumen
3	27	02	2.05	0004	Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar	Ton
3	27	02	2.05	0006	Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.05	0007	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat	Laporan
3	27	02	2.05	0008	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar	Laporan
3	27	02	2.05	0009	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia	Laporan
3	27	02	2.06		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain			
3	27	02	2.06	0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Ton
3	27	02	2.06	0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Ekor

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	02	2.06	0004	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Dosis
3	27	03			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN			
3	27	03	2.01		Pengembangan Prasarana Pertanian			
3	27	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan
3	27	03	2.01	0005	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	Ha
3	27	03	2.01	0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0007	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.01	0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0009	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Unit
3	27	03	2.01	0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0012	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.01	0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit
3	27	03	2.01	0014	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Dokumen
3	27	03	2.01	0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.01	0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	Dokumen
3	27	03	2.01	0017	Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian	Dokumen
3	27	03	2.02		Pembangunan Prasarana Pertanian			
3	27	03	2.02	0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.02	0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit
3	27	03	2.02	0011	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.02	0012	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	Unit
3	27	03	2.02	0013	Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi	Unit
3	27	03	2.02	0014	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskeswan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskeswan	Jumlah Puskeswan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit
3	27	03	2.02	0015	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi	Unit
3	27	03	2.03		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	03	2.03	0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	Laporan
3	27	03	2.03	0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Laporan
3	27	03	2.04		Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum			
3	27	03	2.04	0001	Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	Teridentifikasi dan Ditetapkannya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Pengembalaan Umum yang Diidentifikasi dan Ditetapkan	Ha
3	27	03	2.04	0002	Pengelolaan Lahan Penggembalaan Umum	Terkelolanya Lahan Penggembalaan Umum	Luas Lahan Penggembalaan Umum yang Dikelola	Ha
3	27	03	2.04	0003	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Laporan
3	27	04			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER			
3	27	04	2.01		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.01	0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	Laporan
3	27	04	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis	Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	Orang
3	27	04	2.01	0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	Wilayah
3	27	04	2.01	0006	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Kasus
3	27	04	2.01	0007	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis	Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.01	0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	Laporan
3	27	04	2.02		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.02	0004	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	laporan
3	27	04	2.02	0005	Pengawasan Peredaran Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.02	0006	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Laporan
3	27	04	2.02	0007	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Laporan
3	27	04	2.03		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	27	04	2.03	0001	Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Laporan
3	27	04	2.03	0002	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Laporan
3	27	04	2.04		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner			
3	27	04	2.04	0002	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.04	0004	Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dokumen
3	27	04	2.04	0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan	Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	Unit Usaha
3	27	04	2.04	0006	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Dokumen
3	27	04	2.04	0007	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.04	0008	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesmavet dan Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap kesmavet dan kesejahteraan hewan	Orang
3	27	04	2.04	0009	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi persyaratan registrasi produk hewan	Produk
3	27	04	2.04	0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	Unit Usaha
3	27	04	2.05		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan			
3	27	04	2.05	0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya	Jumlah Kasus Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	Kasus

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	04	2.05	0003	Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha	Terlaksananya pembinaan penerapan kesejahteraan hewan pada unit usaha	Jumlah unit usaha yang dibina terhadap penerapan kesejahteraan hewan	Unit
3	27	05			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN			
3	27	05	2.01		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota			
3	27	05	2.01	0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha
3	27	05	2.01	0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	05	2.01	0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Ha
3	27	05	2.01	0004	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Tertanggulanginya Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	laporan
3	27	05	2.01	0006	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Tertanggulanginya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Jumlah penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	Laporan
3	27	05	2.01	0007	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	laporan
3	27	06			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN			
3	27	06	2.01		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	2.01	0001	Penyusunan Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Dokumen
3	27	06	2.01	0002	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen
3	27	06	2.01	0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak	terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	Unit
3	27	06	2.01	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	Laporan
3	27	06	2.02		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	2.02	0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Terlaksananya Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Dokumen
3	27	06	2.02	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan	Jumlah Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan yang Diawasi	Laporan
3	27	06	2.02	0003	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan	Jumlah Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	06	2.02	0005	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Potong Hewan	Jumlah Izin Usaha Rumah Potong Hewan yang Diawasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	06	2.02	0006	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Terawasinya pelaksanaan izin usaha Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan	Jumlah izin usaha Unit Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, Tempat Pelayanan Paramedik veteriner, atau Pasar Hewan yang diawasi	Laporan
3	27	06	2.03		Izin Usaha Pengecer (Toko, Retail, Sub Distributor) Obat Hewan			
3	27	06	2.03	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terfasilitasinya Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Memenuhi Komitmen	Laporan
3	27	06	2.03	0002	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Terawasinya Pelaksanaan Izin Usaha Pengecer Obat Hewan	Jumlah Izin Usaha Pengecer Obat Hewan yang Diawasi	Laporan
3	27	07			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN			
3	27	07	2.01		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian			
3	27	07	2.01	0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07	2.01	0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
3	27	07	2.01	0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit
3	27	07	2.01	0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit
3	27	07	2.01	0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang
3	27	07	2.01	0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	27	07	2.01	0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Terbentuknya Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit
3	27	07	2.01	0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen
3	28				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN			
3	28	04			PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA			
3	28	04	2.01		Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota			
3	28	04	2.01	0006	Pemanfaatan Jasa Lingkungan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Pemanfaatan Hutan di TAHURA	Jumlah Permohonan Pelayanan Pemanfaatan di TAHURA yang Ditindak Lanjuti	Permohonan
3	28	04	2.01	0007	Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kerja Sama Penyelenggara TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	2.01	0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar TAHURA Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi produktif	Desa
3	28	04	2.01	0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	Tersusun dan Ditetapkannya Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek)	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen
3	28	04	2.01	0012	Penanganan konflik tenurial di kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan penanganan konflik tenurial pada kawasan TAHURA	Luas areal konflik tenurial yang ditangani	Ha
3	28	04	2.01	0014	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Luas Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota yang diamankan	Ha
3	28	04	2.01	0015	Pemulihan Ekosistem TAHURA Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemulihan ekosistem Tahura Kabupaten/Kota	Luas areal Tahura yang dilakukan pemulihan ekosistem	Ha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	04	2.01	0016	Penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Blok Pengelolaan dan Penataan Wilayah Kerja dari TAHURA berdasarkan Hasil Penataan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota	Dokumen
3	28	04	2.01	0017	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	Hektar
3	28	08			PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN ADAT			
3	28	08	3.01		Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	3.01	0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	TerlaksananyaPenetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	28	08	3.02		Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota			
3	28	08	3.02	0001	Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Meningkatnya Kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM kelembagaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Lembaga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	28	08	4.01		Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota			
3	28	08	4.01	0001	Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	TerlaksananyaPenetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di daerah kabupaten/kota	Dokumen
3	29				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
3	29	02			PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK GEOLOGI			
3	29	02	3.01		Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)			
3	29	02	3.01	0001	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi	Dokumen
3	29	02	3.02		Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	3.02	0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	3.03		Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.			
3	29	02	3.03	0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.01		Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)			
3	29	02	4.01	0001	Inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Terlaksananya inventarisasi keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage)	Jumlah dokumen keragaman geologi (geodiversity), dan pemanfaatan situs warisan geologi (geoheritage) yang telah terinventarisasi	Dokumen
3	29	02	4.02		Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	02	4.02	0001	Penyediaan data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Tersedianya data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah	Jumlah dokumen data geologi untuk menyusun peringatan dini potensi gerakan tanah Yang Tersedia	Dokumen
3	29	02	4.03		Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi.			
3	29	02	4.03	0001	Penyediaan data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Tersedianya data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi	Jumlah dokumen data geologi untuk penetapan kawasan rawan bencana geologi Yang Tersedia	Dokumen
3	29	05			PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN			
3	29	05	2.01		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			
3	29	05	2.01	0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prosedur dan Pesyaratan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	2.01	0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
3	29	05	2.01	0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
3	29	05	3.02		Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.			
3	29	05	3.02	0001	Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.02	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Dokumen
3	29	05	3.02	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Laporan
3	29	05	3.02	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Dokumen
3	29	05	3.02	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Dokumen
3	29	05	3.03		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.			
3	29	05	3.03	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah	Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah	Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.03	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	3.03	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	3.03	0004	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	3.04		Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.04	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Laporan
3	29	05	3.04	0002	Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Dokumen
3	29	05	3.05		Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.			
3	29	05	3.05	0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.05	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	3.05	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Dokumen
3	29	05	3.05	0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen
3	29	05	3.06		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.			
3	29	05	3.06	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.06	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi	Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.06	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Laporan
3	29	05	3.06	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.06	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Dokumen
3	29	05	3.06	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi	Laporan
3	29	05	3.07		Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.07	0001	Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Laporan
3	29	05	3.08		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
3	29	05	3.08	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
3	29	05	3.09		Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	3.09	0001	Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Dokumen
3	29	05	4.02		Penyelenggaraan panas bumi untuk pemanfaatan langsung yang berada pada wilayah kabupaten/kota, termasuk kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung; dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.			
3	29	05	4.02	0001	Pembentukan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Tersusunnya peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang panas bumi untuk pemanfaatan langsung	Dokumen
3	29	05	4.02	0002	Pemberian Perizinan Berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Terlaksananya perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Jumlah dokumen perizinan berusaha terkait pemanfaatan langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.02	0003	Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan panas bumi	Laporan
3	29	05	4.02	0004	Pengelolaan data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Terkumpulnya data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah dokumen data dan informasi geologi serta potensi panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Dokumen
3	29	05	4.02	0005	Inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Terinventarisir dan tersusunnya neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Jumlah dokumen neraca sumber daya dan cadangan panas bumi pada wilayah kabupaten/kota	Dokumen
3	29	05	4.03		Pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.			
3	29	05	4.03	0001	Pengelolaan data potensi biomassa dan biogas di daerah	Terkumpulnya data potensi biomassa dan biogas di daerah	Jumlah dokumen data potensi biomassa dan biogas di daerah	Dokumen
3	29	05	4.03	0002	Perencanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terencananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah rencana kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.03	0003	Pelaksanaan kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil kegiatan pengembangan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	4.03	0004	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Jumlah laporan hasil pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan biogas di daerah	Laporan
3	29	05	4.04		Pengelolaan Pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota			
3	29	05	4.04	0001	Pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan pengawasan biomassa dan biogas (kapasitas terpasang, investasi, TKDN, SNI, produksi dan distribusi bahan bakar biomassa dan biogas) di daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.04	0002	Kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Tersusunnya kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif pengembangan biomassa dan biogas (carbon tax/carbon trading, dst) di daerah	Dokumen
3	29	05	4.05		Pengelolaan Aneka Energi Baru dan Energi Terbarukan Dalam Wilayah Kabupaten/ Kota.			
3	29	05	4.05	0001	Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dalam RUED	Tersusunnya penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Jumlah dokumen hasil perumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah pengembangan aneka EBT dan RUED	Dokumen
3	29	05	4.05	0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Laporan
3	29	05	4.05	0003	Kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Terlaksananya kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Jumlah dokumen kebijakan insentif/disinsentif daerah pengembangan aneka EBT	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.05	0004	Pengelolaan data potensi aneka EBT di daerah	Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	Dokumen
3	29	05	4.06		Pengelolaan Konservasi Energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.			
3	29	05	4.06	0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi	Tersusunnya perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Jumlah dokumen hasil perumusan dan penetapan kebijakan strategi dan program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.06	0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi	Terkelolanya pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pengembangan sumber daya manusia dalam pelaksanaan konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.06	0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi	Terlaksananya sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Jumlah laporan hasil sosialisasi secara menyeluruh dan komprehensif untuk penggunaan teknologi yang menetapkan konservasi energi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.06	0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi	Terlaksananya pengalokasian anggaran untuk program konservasi energi	Jumlah dokumen pemberian alokasi anggaran untuk program konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.06	0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi	Terlaksananya pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Jumlah dokumen hasil pemberian instentif dan/atau disinsentif konservasi energi	Dokumen
3	29	05	4.06	0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi	Terlaksananya bimbingan teknis konservasi energi	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis konservasi energi	Laporan
3	29	05	4.07		Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral			
3	29	05	4.07	0001	Pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Terlaksananya Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Jumlah laporan hasil pelaksanaan Konservasi Energi pada fasilitas daerah yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	29	05	4.08		Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
3	29	05	4.08	0001	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaanKonservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Laporan
3	29	05	4.09		Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah			
3	29	05	4.09	0001	Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Barudan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Infrastruktur Pemanfaatan Energi Baru dan Energi Terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Jumlah dokumen hasil pengelolaan infrastruktur pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan yang merupakan Barang Milik Daerah	Dokumen
3	30				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN			
3	30	02			PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN			
3	30	02	2.01		Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Tersedianya Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	2.01	0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Tersedianya laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	laporan
3	30	02	2.02		Penerbitan Tanda Daftar Gudang			
3	30	02	2.02	0001	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Tersedianya Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.03		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri			
3	30	02	2.03	0001	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	2.03	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.03	0003	Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Terfasilitasinya Proses Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba dalam negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri yang terintegrasi secara elektronik	Dokumen
3	30	02	2.03	0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) penerima waralaba Dalam Negeri dan penerima waralaba lanjutan dalam negeri melalui sistem yang terintegrasi secara elektronik	dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.04		Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri			
3	30	02	2.04	0001	Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Jumlah Data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi Secara Elektronik Luar Negeri	Dokumen
3	30	02	2.04	0002	Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Verifikasi Persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.04	0003	Fasilitasi Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Verifikasi persyaratan sebagai Proses Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah dokumen yang di verifikasi sebagai Pemenuhan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Dokumen
3	30	02	2.04	0004	Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Terlaksananya Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	Jumlah data dan Informasi Sistem Pelayanan Perizinan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan luar negeri yang terintegrasi secara elektronik	dokumen
3	30	02	2.05		Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.05	0001	Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen
3	30	02	2.05	0002	Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C	Tersedianya Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Surat Keterangan Pengecer (SKP) Untuk Pengecer dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.06		Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
3	30	02	2.06	0001	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Terlaksanakannya Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	Laporan
3	30	02	2.06	0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Terfasilitasinya Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Proses Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2	Dokumen
3	30	02	2.06	0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Laporan
3	30	02	2.07		Penerbitan Surat Keterangan Asal (bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	2.07	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Layanan Penerbitan SKA	Tersedianya Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Jumlah Dokumen Penerbitan Surat Keterangan Asal	Dokumen
3	30	02	3.08		Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bagi OAP			
3	30	02	3.08	0001	Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Tersedianya Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Jumlah Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Unit
3	30	02	3.09		Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan			
3	30	02	3.09	0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Kegiatan
3	30	02	4.08		Fasilitasi Pengelolaan Pasar Rakyat Bagi OAP			
3	30	02	4.08	0001	Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Tersedianya Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Jumlah Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP	Unit
3	30	02	4.09		Pembinaan Perizinan Usaha Perdagangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	02	4.09	0001	Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan OAP dalam Pengurusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Kegiatan
3	30	03			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
3	30	03	2.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			
3	30	03	2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Unit
3	30	03	2.01	0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Unit
3	30	03	2.01	0003	Pelaksanaan fasilitasi terkait Sistem Rersi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Terselenggarannya kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Jumlah Kegiatan fasilitasi Sistem Resi Gudang	Kegiatan
3	30	03	2.01	0004	Identifikasi terhadap lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang di wilayah kabupaten/kota	Tersedianya informasi terkait lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	Jumlah laporan identifikasi lembaga dan komoditas potensial Sistem Resi Gudang	laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	03	2.02		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			
3	30	03	2.02	0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen
3	30	03	2.02	0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Dokumen
3	30	03	3.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan			
3	30	03	3.01	0003	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota yang diberikan	Unit
3	30	03	4.01		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana DistribusiPerdagangan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	03	4.01	0003	Pemberian bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Tersedianya bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota	Jumlah bantuan terhadap OAP Dalam Distribusi Barang Hasil Produksi di Kabupaten/Kota yang diberikan	Unit
3	30	04			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING			
3	30	04	2.01		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			
3	30	04	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
3	30	04	2.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Tersedianya Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Laporan
3	30	04	2.02		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.02	0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	2.02	0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Laporan
3	30	04	2.02	0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan
3	30	04	2.03		Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	04	2.03	0001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Terlengkapinya Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Dokumen
3	30	04	2.03	0002	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	04	2.03	0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Laporan
3	30	05			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR			
3	30	05	2.01		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	30	05	2.01	0002	Pameran Dagang Nasional	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	0003	Pameran Dagang Lokal	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang Lokal	Pelaku Usaha
3	30	05	2.01	0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	Pelaku Usaha

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	05	2.01	0005	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	Produk
3	30	06			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN			
3	30	06	2.01		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			
3	30	06	2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Unit
3	30	06	2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Orang
3	30	06	2.01	0003	Penyidikan Metrologi Legal	Terlaksananya Penyidikan Metrologi Legal	Jumlah Unit Hasil Penyidikan Metrologi Legal	Unit
3	30	07			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI			
3	30	07	2.01		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	30	07	2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Orang
3	30	07	2.01	0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	UMKM
3	30	07	2.01	0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	UMKM
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Dokumen
3	31	02	2.01	0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dievaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Dokumen
3	31	02	2.01	0007	Rekomendasi Kebutuhan Infrastruktur dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebutuhan pengembangan infrastruktur dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi
3	31	02	2.01	0008	Pelaksanaan pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	Terlaksananya pengawasan Jaminan Produk Halal (JPH) di level Kabupaten/Kota	- Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal yang dapat diawasi - Jumlah program pengawasan Jaminan produk halal yang dapat diimplementasikan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	2.01	0009	Penyediaan Data dan Informasi dalam rangka Evaluasi Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersedianya data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Data dan informasi dalam rangka evaluasi percepatan penyabaran dan perwilayahan industri	Laporan
3	31	02	2.01	0010	Rekomendasi Kebijakan Daerah dalam rangka Percepatan Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Tersusunnya rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah rekomendasi kebijakan daerah dalam rangka percepatan penyebaran dan perwilayahan industri	Rekomendasi
3	31	02	3.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	3.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	3.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan	Unit
3	31	02	3.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	02	3.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	3.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	02	4.01		Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi			
3	31	02	4.01	0007	Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil pendampingan akses permodalan/perkreditan bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Dilaksanakan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	4.01	0008	Fasilitasi bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Fasilitasi pendampingan akses permodalan/perkreditan dan bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan peralatan dan/atau mesin bagi industri kecil dan menengah milik OAP di Kabupaten/Kota Yang Diberikan	Unit
3	31	02	4.01	0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	02	4.01	0010	Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Terselenggaranya Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi promosi di dalam negeri dan luar negeri untuk Produk-produk IKM & industri kreatif dalam binaan perindustrian Bagi OAP	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	02	4.01	0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten/Kota	Dokumen
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota			
3	31	04	2.01	0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI			
3	32	02			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	02	2.01		Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi			
3	32	02	2.01	0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	Dokumen
3	32	02	2.01	0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	Kawasan Transmigrasi

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	02	2.01	0003	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Tersedianya Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Hektar
3	32	02	2.01	0004	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Usulan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Dokumen
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3	32	03	2.01	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Laporan
3	32	03	2.01	0002	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran yang Telah Disiapkan	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	0003	Pelaksanaan Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penataan Penduduk Setempat Sekitar Lokasi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Verifikasi Penduduk yang Memiliki Tanah dan Rumah di Kawasan Transmigrasi yang Berpotensi untuk Menjadi Transmigan Penduduk Setempat (TPS)	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	0005	Penyuluhan Transmigrasi	Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	0006	Pelatihan Transmigrasi	Terselenggarakannya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran dan/atau Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	0007	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Terlaksananya Penyesuaian Transmigran di Lingkungan yang Baru pada Satuan Permukiman Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan Diri di Satuan Permukiman Transmigrasi	Kepala Keluarga
3	32	03	2.01	0008	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Setempat	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan	Lokasi
3	32	03	2.01	0010	Penyuluhan Program Transmigrasi Kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Terlaksananya Penyuluhan Program Transmigrasi kepada Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran Penduduk Asal yang Mendapatkan Penyuluhan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	0011	Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya	KK
3	32	03	2.01	0012	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	KK
3	32	03	2.01	0013	Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)	KK
3	32	03	2.01	0014	Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan	KK
3	32	03	2.01	0015	Penampungan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Layanan Penampungan Transmigran di Kabupaten Daerah Asal	Jumlah Transmigran yang Ditampung di Penampungan Kabupaten Daerah Asal	KK
3	32	03	2.01	0016	Cek Kesehatan Calon Transmigran	Terlaksananya Layanan Kesehatan Transmigran	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Transmigran	KK

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	03	2.01	0017	Penyuluhan Transmigrasi Sebelum Keberangkatan (ke Tingkat Desa)	Terlaksananya Penyuluhan Transmigran Sebelum Berangkat (ke Tingkat Desa)	Jumlah Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan Sebelum Keberangkatan (di Tingkat Desa)	Orang
3	32	03	2.01	0018	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Terlaksananya Pendampingan Dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang Diberikan Pendampingan dari Penampungan Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	KK
3	32	03	2.01	0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran	Paket
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	Lokasi
3	32	04			PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI			
3	32	04	2.01		Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian			
3	32	04	2.01	0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	Kepala Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
3	32	04	2.01	0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	Satuan Permukiman
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN			
4	01				SEKRETARIAT DAERAH			
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan			
4	01	02	2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen
4	01	02	2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Dokumen
4	01	02	2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.01	0004	Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terfasilitasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
4	01	02	2.01	0005	Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Terevaluasinya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Evaluasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat			
4	01	02	2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Dokumen
4	01	02	2.02	0004	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.02	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga
4	01	02	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum			
4	01	02	2.03	0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Dokumen
4	01	02	2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kasus
4	01	02	2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Dokumen
4	01	02	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	02	2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Dokumen
4	01	02	2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Dokumen
4	01	02	2.04	0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Laporan
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian			
4	01	03	2.01	0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen
4	01	03	2.01	0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	2.01	0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen
4	01	03	2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pembentukan BLUD	Dokumen
4	01	03	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Dokumen
4	01	03	2.01	0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas TPAKD	Dokumen
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan			
4	01	03	2.02	0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan
4	01	03	2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa			
4	01	03	2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen
4	01	03	2.03	0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen
4	01	03	2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	2.04	0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Dokumen
4	01	03	2.04	0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	03	2.04	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Dokumen
4	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN			
4	01	04	5.01		Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan			
4	01	04	5.01	0001	Perumusan Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Kebijakan Kelembagaan Perangkat Daerah yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.01	0002	Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli	Jumlah Kebijakan Hubungan Kerja Perangkat Daerah DIY dan Kelembagaan Asli yang Dirumuskan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.01	0003	Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga yang Dilakukan Penataan Bentuk Kelembagaan Asli Kabupaten/Kota	Lembaga
4	01	04	5.01	0004	Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan dan Pengembangan Kinerja Jabatan	Dokumen
4	01	04	5.01	0005	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Tersusunnya Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.01	0006	Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengendalian Urusan Kelembagaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.01	0007	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/ Kelurahan	Terlaksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kapanewon/Kemantren dan Kalurahan/Kelurahan yang Didampingi	Dokumen
4	01	04	5.01	0008	Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Terlaksananya Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Produk Hukum Kalurahan Tindak Lanjut Pelaksanaan Kewenangan Keistimewaan	Dokumen
4	01	04	5.02		Peningkatan Budaya Pemerintahan			
4	01	04	5.02	0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	Dokumen
4	01	04	5.02	0002	Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Terlaksananya Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembekalan Keistimewaan bagi PNS Mutasi Luar Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.02	0003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	Laporan
4	01	04	5.03		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kelembagaan			
4	01	04	5.03	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kelembagaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.03	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kelembagaan	Laporan
4	01	04	5.04		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Kebudayaan			
4	01	04	5.04	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Kebudayaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.04	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Laporan
4	01	04	5.05		Perencanaan dan Pengendalian Keistimewaan Urusan Pertanahan dan Tata Ruang			
4	01	04	5.05	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Pertanahan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Pertanahan	Laporan
4	01	04	5.05	0003	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Tersusunnya Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah Dokumen Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan Urusan Tata Ruang yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.05	0004	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Jumlah laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Urusan Tata Ruang	Laporan
4	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan			
4	01	04	5.06	0001	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	Tersusunnya Program dan Kegiatan Keistimewaan	Jumlah Program dan Kegiatan Keistimewaan yang Disusun	Dokumen
4	01	04	5.06	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Keistimewaan Se-DIY	Laporan
4	01	04	5.07		Sarana dan Prasarana Keistimewaan			
4	01	04	5.07	0001	Pengadaan Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Pelaksana Urusan Kelembagaan yang Disediakan	Unit
4	01	04	5.08		Peningkatan Pelayanan Paramparapraja			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	01	04	5.08	0001	Penyusunan Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Tersusunnya Rekomendasi Urusan Keistimewaan	Jumlah Rekomendasi Urusan Keistimewaan yang Disusun	Rekomendasi
4	01	04	5.09		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Keistimewaan			
4	01	04	5.09	0001	Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Jumlah Lembaga yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan Pelaksana Keistimewaan	Lembaga
4	02				SEKRETARIAT DPRD			
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD			
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
4	02	02	2.01	0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Dokumen
4	02	02	2.01	0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	Dokumen
4	02	02	2.01	0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Dokumen
4	02	02	2.01	0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.01	0006	Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Daerah yang Dilakukan Bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah	Orang
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran			
4	02	02	2.02	0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.02	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen
4	02	02	2.02	0003	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen
4	02	02	2.02	0004	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen
4	02	02	2.02	0005	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Dokumen
4	02	02	2.02	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Dokumen
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
4	02	02	2.03	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.03	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Laporan
4	02	02	2.03	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan
4	02	02	2.03	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Laporan
4	02	02	2.03	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Laporan
4	02	02	2.03	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.03	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	Dokumen
4	02	02	2.03	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Dokumen
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD			
4	02	02	2.04	0001	Orientasi DPRD	Terselenggaranya Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	0002	Pendalaman Tugas DPRD	Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang
4	02	02	2.04	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.04	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Dokumen
4	02	02	2.04	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Dokumen
4	02	02	2.04	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Dokumen
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
4	02	02	2.05	0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Laporan
4	02	02	2.05	0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.05	0003	Pelaksanaan Reses	Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Dokumen
4	02	02	2.05	0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Orang
4	02	02	2.06		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.06	0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Dokumen
4	02	02	2.06	0002	Pengawasan Kode Etik DPRD	Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	Laporan
4	02	02	2.07		Pembahasan Kerja Sama Daerah			
4	02	02	2.07	0001	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	Dokumen
4	02	02	2.07	0002	Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	Tersusunnya Bahan Komunikasi dan Publikasi	Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun	Dokumen
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD			
4	02	02	2.08	0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen
4	02	02	2.08	0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
4	02	02	2.08	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Dokumen
4	02	02	2.08	0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Dokumen
4	02	02	2.08	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Dokumen
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN			
5	01				PERENCANAAN			
5	01	02			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	02	2.01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan			
5	01	02	2.01	0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	2.01	0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen
5	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara
5	01	02	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara
5	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara
5	01	02	2.01	0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	2.01	0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen
5	01	02	2.02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.02	0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen
5	01	02	2.02	0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang
5	01	02	2.02	0003	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	Buku
5	01	02	2.03		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	2.03	0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan
5	01	02	2.03	0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama
5	01	02	2.03	0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan
5	01	02	2.04		Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah			
5	01	02	2.04	0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	02	2.04	0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dokumen
5	01	02	2.04	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Dokumen
5	01	03			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH			
5	01	03	2.01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
5	01	03	2.01	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.01	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan
5	01	03	2.01	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.01	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.01	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	2.01	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.01	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan
5	01	03	2.02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)			
5	01	03	2.02	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.02	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.02	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	2.02	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Laporan
5	01	03	2.02	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.02	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
5	01	03	2.02	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Laporan
5	01	03	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Laporan
5	01	03	2.03		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.03	0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.03	0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	2.03	0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan
5	01	03	2.03	0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	01	03	2.03	0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Dokumen
5	01	03	2.03	0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan
5	01	03	2.03	0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Laporan
5	01	03	2.03	0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02				KEUANGAN			
5	02	02			PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH			
5	02	02	2.01		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			
5	02	02	2.01	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Dokumen
5	02	02	2.01	0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	Dokumen
5	02	02	2.01	0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.01	0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Dokumen
5	02	02	2.01	0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Dokumen
5	02	02	2.01	0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Dokumen
5	02	02	2.01	0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Dokumen
5	02	02	2.01	0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.01	0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Dokumen
5	02	02	2.01	0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah			
5	02	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen
5	02	02	2.02	0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan
5	02	02	2.02	0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen
5	02	02	2.02	0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen
5	02	02	2.02	0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Dokumen
5	02	02	2.02	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.02	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Dokumen
5	02	02	2.02	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	2.03		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.03	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.03	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Dokumen
5	02	02	2.03	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan
5	02	02	2.03	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.03	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Dokumen
5	02	02	2.03	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.03	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen
5	02	02	2.03	0008	Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersedianya Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen
5	02	02	2.03	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	2.03	0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.03	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	02	2.03	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota	Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina	Lembaga
5	02	02	2.03	0013	Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	2.04		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah			
5	02	02	2.04	0001	Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Terkelolanya Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Dana Cadangan Pemerintah Daerah	Dokumen
5	02	02	2.04	0002	Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.04	0003	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	0005	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	0006	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	Laporan
5	02	02	2.04	0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.04	0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Laporan
5	02	02	2.04	0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan
5	02	02	2.04	0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Laporan
5	02	02	2.04	0011	Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Terkelolanya Dana Abadi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah	Laporan
5	02	02	2.05		Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah			
5	02	02	2.05	0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	02	2.05	0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen
5	02	02	2.05	0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	03			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH			
5	02	03	2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah			
5	02	03	2.01	0001	Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Dokumen
5	02	03	2.01	0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	2.01	0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	2.01	0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	2.01	0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	2.01	0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen
5	02	03	2.01	0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan
5	02	03	2.01	0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	03	2.01	0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Orang
5	02	04			PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH			
5	02	04	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
5	02	04	2.01	0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	2.01	0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Laporan
5	02	04	2.01	0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Terpenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Obyek Pajak
5	02	04	2.01	0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Layanan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	2.01	0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Dokumen
5	02	04	2.01	0011	Penagihan Pajak Daerah	Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Dokumen
5	02	04	2.01	0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	02	04	2.01	0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Laporan
5	03				KEPEGAWAIAN			
5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH			
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN			
5	03	02	2.01	0001	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Dokumen
5	03	02	2.01	0004	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Terlaksananya Evaluasi Pengadaan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pengadaan ASN	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.01	0005	Perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dirumuskannya Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil perumusan Bahan Kebijakan Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Dokumen
5	03	02	2.01	0007	Evaluasi Pemberhentian ASN	Terlaksananya Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pemberhentian ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lembaga
5	03	02	2.01	0009	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Terlaksananya Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Dokumen
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen
5	03	02	2.01	0011	Pengelolaan Data Kepegawaian	Terkelolanya Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Laporan
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN			
5	03	02	2.02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Dokumen
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Dokumen
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	Dokumen
5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN			
5	03	02	2.03	0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	Orang
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center	Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.03	0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Dokumen
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Orang
5	03	02	2.03	0005	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	Dokumen
5	03	02	2.03	0006	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Jabatan	Orang
5	03	02	2.03	0007	Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan ASN	Laporan
5	03	02	2.03	0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan diklat dan Sertifikasi Jabatan fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.03	0009	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat Jabatan Fungsional	Dokumen
5	03	02	2.03	0010	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitas Sertifikasi Jabatan Fungsional ASN	Orang
5	03	02	2.03	0011	Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Jumah Dokumen Hasil Evaluasi Diklat dan Sertfikasi Pejabat Fungsional	Laporan
5	03	02	2.03	0012	Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN	Dokumen
5	03	02	2.03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah ASN Fungsional yang Dibina	Orang
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.03	0015	Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional	Laporan
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	2.04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Dokumen
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Laporan
5	03	02	2.04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang
5	03	02	2.04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	03	02	2.04	0006	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Penghargaan dan Tanda Jasa Aparatur	Dokumen
5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN	Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan
5	03	02	2.04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	Dokumen
5	03	02	2.04	0010	Evaluasi Disiplin ASN	Terlaksananya Evaluasi Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Disiplin ASN	Laporan
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN			
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA			
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.01	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.01	0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.01	0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Dokumen
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.02	0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerja Sama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan,Serta Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen
5	04	02	2.02	0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota yang Terkelola dengan Baik	Lembaga
5	04	02	2.02	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lingkup Kabupaten/Kota	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.02	0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Laporan
5	04	02	2.02	0005	Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga	Dokumen
5	04	02	2.02	0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.02	0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Koordinasi, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama	Dokumen
5	04	02	2.03		Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri			
5	04	02	2.03	0001	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Fasilitator atau Pengajar Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus sebagai Fasilitator atau Pengajar Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	04	02	2.03	0002	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN yang Tersertifikasi Lulus Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	2.03	0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Jumlah ASN Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Orang
5	04	02	2.03	0004	Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Terlaksananya Pengelolaan Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Akreditasi Lembaga Penyelenggara Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri	Nilai Akreditasi
5	04	02	2.03	0005	Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten atau Kota	Laporan
5	05				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN			
5	05	02			PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH			
5	05	02	2.01		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan
5	05	02	2.01	0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Laporan
5	05	02	2.01	0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan
5	05	02	2.01	0005	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0006	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Perlindungan Masyarakat	Laporan
5	05	02	2.01	0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Terlaksannya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Laporan
5	05	02	2.01	0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Laporan
5	05	02	2.01	0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Laporan
5	05	02	2.01	0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	Laporan
5	05	02	2.01	0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	Rekomendasi
5	05	02	2.01	0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.01	0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Laporan
5	05	02	2.02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan			
5	05	02	2.02	0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Dokumen
5	05	02	2.02	0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.02	0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Dokumen
5	05	02	2.02	0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Dokumen
5	05	02	2.02	0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Dokumen
5	05	02	2.02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Dokumen
5	05	02	2.02	0007	Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.02	0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dokumen
5	05	02	2.02	0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Dokumen
5	05	02	2.02	0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Dokumen
5	05	02	2.02	0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Dokumen
5	05	02	2.03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan			
5	05	02	2.03	0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.03	0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Dokumen
5	05	02	2.03	0003	Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Dokumen
5	05	02	2.03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Dokumen
5	05	02	2.03	0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen
5	05	02	2.03	0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Dokumen
5	05	02	2.03	0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Dokumen
5	05	02	2.03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Dokumen
5	05	02	2.03	0010	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Dokumen
5	05	02	2.03	0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.03	0012	Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Dokumen
5	05	02	2.03	0013	Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Dokumen
5	05	02	2.04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi			
5	05	02	2.04	0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Dokumen
5	05	02	2.04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	02	2.04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan
5	05	02	2.04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Laporan
5	05	02	2.04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Laporan
5	05	03			PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH			
5	05	03	2.01		Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan			
5	05	03	2.01	0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.01	0002	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah
5	05	03	2.01	0003	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan
5	05	03	2.01	0004	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.01	0005	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Pelatihan
5	05	03	2.01	0006	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Dokumen
5	05	03	2.02		Invensi dan Inovasi			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kelembagaan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0003	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0004	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0005	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Laporan
5	05	03	2.02	0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0008	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	Laporan
5	05	03	2.02	0009	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Kegiatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Laporan
5	05	03	2.02	0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Laporan
5	05	03	2.02	0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0013	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Sistem Informasi
5	05	03	2.02	0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Laporan
5	05	03	2.02	0015	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0016	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0018	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Pelatihan
5	05	03	2.02	0019	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Naskah
5	05	03	2.02	0020	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0021	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0022	Fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk reformasi kebijakan Riset dan Inovasi di daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Laporan
5	05	03	2.02	0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah	Laporan
5	05	03	2.02	0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengelolaan kebun raya daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	05	03	2.02	0026	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan
5	06				PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02			PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN			
5	06	02	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerja Sama			
5	06	02	2.01	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Kebijakan Otonomi Daerah	Dokumen
5	06	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan yang Disusun	Dokumen
5	06	02	2.02		Pelaksanaan Kewilayahan Perbatasan			
5	06	02	2.02	0001	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	2.02	0002	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	02	2.02	0003	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Tanda Batas Wilayah Negara yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen
5	06	02	2.02	0004	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Daerah	Jumlah Tanda Batas Daerah yang Dijaga dan Dipelihara	Dokumen
5	06	02	2.02	0005	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Tugas Pembangunan di Kawasan Perbatasan di Wilayah Kabupaten/Kota	Laporan
5	06	02	2.03		Monitoring dan Evaluasi Kewilayahan Perbatasan			
5	06	02	2.03	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	02	2.03	0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Pembangunan Kawasan Perbatasan	Dokumen
5	06	03			PENGELOLAAN PERBATASAN NEGARA			
5	06	03	2.01		Perencanaan dan Fasilitasi Kerjasama			
5	06	03	2.01	0001	Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Tersusunnya Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara yang Disusun	Dokumen
5	06	03	2.02		Pelaksanaan Pembangunan Perbatasan Negara			
5	06	03	2.02	0001	Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Terlaksananya Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Pengembangan dan Penguatan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan guna mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru di PKSN dan Kecamatan Prioritas di Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	03	2.02	0002	Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Jumlah Laporan Hasil Penjagaan dan Pemeliharaan Tanda Batas Wilayah Negara	Laporan
5	06	03	2.02	0003	Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Terlaksananya Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Jumlah Dokumen Dukungan Pemetaan Jalur Tradisional untuk Penguatan Exit Entry Point Antar Negara di Perbatasan Negara.	Dokumen
5	06	03	2.02	0004	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen
5	06	03	2.02	0005	Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Terlaksananya Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Konektivitas dan Akses dalam rangka Mengatasi Keterisolasian di Wilayah Perbatasan Negara	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	03	2.02	0006	Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitasi Layanan Sosial Dasar di Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen
5	06	03	2.02	0007	Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Tersedianya Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Jumlah Laporan Inventarisasi Masalah dan Potensi Sumberdaya Lokal Berbasis Komoditas Unggulan dalam Pembangunan Kawasan Perbatasan	Laporan
5	06	03	2.02	0008	Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Terlaksananya Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Integrasi, dan Sinkronisasi Pemanfaatan Kawasan Perbatasan Negara	Dokumen
5	06	03	2.03		Monitoring dan Evaluasi			
5	06	03	2.03	0001	Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi dan Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	03	2.03	0002	Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Terlaksananya Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah Laporan Fasilitasi Kabupaten/Kota dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Laporan
5	06	03	2.03	0003	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Tersedianya laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara Tingkat Kab/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perbatasan Negara	Laporan
5	06	03	2.04		Fasilitasi Pembinaan Masyarakat Perbatasan Negara			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
5	06	03	2.04	0001	Fasilitasi Pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan negara dalam pengelolaan Batas Wilayah Negara	Terlaksananya Fasilitasi dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Jumlah Laporan Fasilitasi Provinsi dalam dukungan pelaksanaan pengukuran Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) dan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) Kecamatan Lokasi Prioritas	Laporan
6					UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN			
6	01				INSPEKTORAT DAERAH			
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN			
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			
6	01	02	2.01	0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan
6	01	02	2.01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	02	2.01	0003	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan
6	01	02	2.01	0004	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan
6	01	02	2.01	0005	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan
6	01	02	2.01	0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan
6	01	02	2.01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			
6	01	02	2.02	0001	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	02	2.02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI			
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan			
6	01	03	2.01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi			
6	01	03	2.02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	perangkat daerah

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
6	01	03	2.02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah
6	01	03	2.02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan
6	01	03	2.02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah
7					UNSUR KEWILAYAHAN			
7	01				KECAMATAN			
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	2.01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan
7	01	02	2.01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Dokumen
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
7	01	02	2.02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen
7	01	02	2.02	0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	2.02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Dokumen
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Terlaksananya Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum dengan Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Unit
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Dokumen
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Laporan
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.01	0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Laporan
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			
7	01	03	2.03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga Kemasyarakatan
7	01	03	2.03	0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	Unit
7	01	03	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Laporan
7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)			
7	01	03	2.05	0001	Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pencegahan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.05	0002	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.05	0003	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.05	0004	Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Terlaksananya Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Pengadaan Pendukung Pelaksanaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Dokumen
7	01	03	2.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga
7	01	03	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga
7	01	03	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Keluarga
7	01	03	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Keluarga
7	01	03	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Keluarga
7	01	03	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Keluarga
7	01	03	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Keluarga
7	01	03	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Keluarga
7	01	03	7.04		Pemberdayaan Mukim			
7	01	03	7.04	0001	Penyelenggaraan Mukim	Terselenggaranya Mukim	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Mukim	Dokumen
7	01	03	7.04	0002	Peningkatan Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Meningkatnya Kapasitas Mukim dan Tuha Peut Mukim	Jumlah Mukim dan Tuha Peut Mukim yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
7	01	03	7.04	0003	Peresmian Mukim	Terlaksananya Peresmian Mukim	Jumlah Dokumen Hasil Peresmian Mukim	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	03	7.04	0004	Pelantikan Imeum Mukim	Terlaksananya Pelantikan Imeum Mukim	Jumlah Laporan Pelantikan Imeum Mukim	Laporan
7	01	03	7.04	0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Mukim	Tersedianya Sarana dan Prasarana Mukim	Jumlah Sarana dan Prasarana Mukim yang Disediakan	Unit
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	2.01	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	04	2.02	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan
7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
7	01	04	7.03	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan
7	01	04	7.03	0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan
7	01	04	7.04		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Qanun dan Peraturan Kepala Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	04	7.04	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Laporan
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	05	2.01	0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	05	2.01	0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Orang
7	01	05	2.01	0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Orang
7	01	05	2.01	0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	05	2.01	0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	05	2.01	0006	Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Berkembangnya Lembaga Masyarakat dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Lembaga Masyarakat
7	01	05	2.01	0007	Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Terlaksananya Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Jumlah Dokumen Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal	Dokumen
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06	2.01	0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0004	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan
7	01	06	2.01	0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Tersedianya Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0010	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Ditetapkannya Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen
7	01	06	2.01	0012	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Dokumen
7	01	06	2.01	0013	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Dokumen
7	01	06	2.01	0014	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
7	01	06	2.01	0015	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Dokumen
7	01	06	2.01	0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan
7	01	06	2.01	0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Laporan
8					UNSUR PEMERINTAHAN UMUM			
8	01				KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
8	01	02			PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan			
8	01	02	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen
8	01	02	2.01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Laporan
8	01	02	2.01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Keluarga

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	02	2.01	0007	Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka	Terlaksananya pembinaan aktivitas kepaskibrakaan dan purnapaskibraka	Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka	Dokumen
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	Orang
8	01	02	2.01	0009	Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen
8	01	02	2.01	0010	Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terlaksananya penugasan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila	Dokumen
8	01	02	2.01	0011	Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila	Terbentuknya purnapaskibraka duta pancasila	Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila	Orang
8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	03	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Laporan
8	01	03	2.01	0006	Pelaksanaan tugas Paskibraka	Terlaksananya penugasan paskibraka	Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka	Kegiatan
8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	04	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang
8	01	04	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	04	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Laporan
8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
8	01	05	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	Dokumen
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	05	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Orang
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Laporan
8	01	06			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
8	01	06	2.01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
8	01	06	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Laporan
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen
9					UNSUR KEKHUSUSAN			
9	01				KEKHUSUSAN ACEH			
9	01	02			PROGRAM SYARIAT ISLAM ACEH			
9	01	02	7.01		Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam			

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.01	0001	Pelatihan Mawaris	Terlaksananya Pelatihan Mawaris	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Mawaris	Orang
9	01	02	7.01	0002	TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Telaksananya TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas	Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas yang Mengikuti TOT Modul Wawasan Keislaman	Orang
9	01	02	7.01	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terbina dan Meningkatnya Kapasitas Tokoh Masyarakat dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Tokoh Masyarakat yang Dibina dan Ditingkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.01	0004	Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru''yat	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru''yat	Jumlah Tenaga Hisab dan Ru''yat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang
9	01	02	7.01	0005	Seminar Problematika Syariat Islam	Terlaksananya Seminar Problematika Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Seminar Problematika Syariat Islam	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.01	0006	Pembinaan Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Terbinanya Mental Spritual Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat	Jumlah Siswa/Siswi Sekolah Menengah Atas Sederajat yang Terbina Mental Spiritualnya	Orang
9	01	02	7.02		Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Alquran			
9	01	02	7.02	0001	Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan Tilawatil Quran	Jumlah Lembaga Tilawah Quran yang Mengikuti Pembinaan Kelembagaan	Lembaga
9	01	02	7.02	0002	Peningkatan Kualitas Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Terlaksananya Bimbingan Teknis Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran	Jumlah Tenaga Pelatihan/Juri Tilawatil Quran yang Mengikuti Bimbingan Teknis	Orang
9	01	02	7.02	0003	Pembinaan Imam Hafidz pada Masjid	Terlaksananya Pembinaan Imam Hafid pada Masjid	Jumlah Imam Hafid pada Masjid yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.02	0004	Pelaksanaan MTQ	Terlaksananya MTQ	Jumlah Orang yang Mengikuti MTQ	Orang
9	01	02	7.02	0005	Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Terlaksananya Pelatihan/Training Center Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional	Jumlah Peserta MTQ/STQ Tingkat Nasional yang Mengikuti Pelatihan/Training Center	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.02	0006	Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Terlaksananya Pemberangkatan Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional	Jumlah Kafilah Mengikuti MTQ/STQ Tingkat Nasional dan Internasional yang Diberangkatkan	Orang
9	01	02	7.03		Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama			
9	01	02	7.03	0001	Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Terlaksananya Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04		Pembinaan Dakwah dan Syariat Islam			
9	01	02	7.04	0001	Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Terlaksananya Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kualitas Dakwah dan Penyemarakan Syariat Islam	Dokumen
9	01	02	7.04	0002	Pembinaan Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Terbinanya Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil	Jumlah Dai Perbatasan dan Daerah Terpencil yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.04	0003	Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Terbina dan Meningkatnya Kualitas Dai dan Koordinator Lapangan	Jumlah Dai dan Koordinator Lapangan yang Dibina dan Meningkat Kualitasnya	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.04	0004	Pembinaan Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Terbinanya Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan	Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyrakatan yang Mengikuti Pembinaan	Orang
9	01	02	7.04	0005	Pelatihan Takmir Mesjid	Terlaksananya Pelatihan Takmir Mesjid	Jumlah Takmir Masjid yang Mengikuti Pelatihan	Orang
9	01	02	7.04	0006	Pelaksanaan Cerdas Cermat Syariat Islam	Terlaksananya Cerdas Cermat Syariat Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Cerdas Cermat Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.04	0007	Pembinaan Gampong Percontohan Syariat	Terbinanya Gampong Percontohan Syariat	Jumlah Gampong Percontohan Syariat yang Dibina	Gampong
9	01	02	7.04	0008	Pengiriman Khatib Jum''at Ke Gampong	Terlaksananya Pengiriman Khatib Jum''at ke Kabupaten/Kota	Jumlah Khatib Jum''at yang Dikirim ke Kabupaten/Kota	Orang
9	01	02	7.04	0009	Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/ Mushalla	Terlaksananya Ceramah Bulan Suci Ramadhan di Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Laporan Masjid/Meunasah/Mushalla yang Menyelenggarakan Ceramah Bulan Suci Ramadhan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.04	0010	Penyelenggaraan Pengajian di Gampong	Terselenggaranya Pengajian di Gampong	Jumlah Laporan Gampong yang Menyelenggarakan Ceramah	Laporan
9	01	02	7.04	0011	Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Terlaksananya Penyediaan, Pendistribusian dan Pengawasan Sarana Peribadatan	Jumlah Unit Sarana Peribadatan yang Didistribusikan dan Diawasi	Unit
9	01	02	7.04	0012	Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Terlaksananya Pendataan dan Inventarisasi Rumah Ibadah dan Harta Agama	Jumlah Unit Rumah Ibadah dan Harta Agama yang Didata dan Diinvertarisir	Dokumen
9	01	02	7.04	0013	Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Terlaksananya Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Agama	Jumlah Sarana dan Prasarana Agama yang Ditingkatkan Pembangunannya	Unit
9	01	02	7.05		Pengkajian, Pengembangan dan Pembinaan Syariat Islam			
9	01	02	7.05	0001	Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Terlaksananya Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Jumlah Laporan Hasil Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.05	0002	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.05	0003	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Terlaksananya Pelatihan Peningkatan Kapasitas Imeum Masjid/ Meunasah dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Jumlah Imeum Masjid/Meunasah yang Mengikuti Pelatihan Peningkatan Kapasitas dalam Pelaksanaan Syariat Islam	Orang
9	01	02	7.05	0004	Pembinaan Keluarga Islami	Terbinanya Keluarga Islam	Jumlah Keluarga Islam yang Mengikuti Pembinaan	Keluarga
9	01	02	7.05	0005	Pembinaan Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Terbinanya Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah	Jumlah Pelaku Ekonomi Mikro/Kecil Berbasis Syariah yang Dibina	Pelaku Ekonomi
9	01	02	7.05	0006	Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Terlaksananya Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Penyelenggaraan Fardu Kifayah/Tajhiz Mayat	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.05	0007	Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Terlaksananya Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Badan Kemakmuran Masjid/Meunasah/Mushalla	Orang
9	01	02	7.05	0008	Pembinaan Qari Qariah	Terlaksananya Pembinaan Qari Qariah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Qari Qariah	Orang
9	01	02	7.05	0009	Pembinaan Hafizh Hafizhah	Terlaksananya Pembinaan Hafizh Hafizhah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Hafizh Hafizhah	Orang
9	01	02	7.05	0010	Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz	Terlaksananya Pemberian Beasiswa bagi Qari/Hafidz	Jumlah Beasiswa bagi Qari/Hafidz yang Diberikan	Beasiswa
9	01	02	7.06		Penguatan, Pengembangan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kerja Sama Peradilan Syariat Islam			
9	01	02	7.06	0001	Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Terlaksananya Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Regulasi Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0002	Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Terlaksananya Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Peradilan Islam	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.06	0003	Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Terlaksananya Isbat Nikah bagi Korban Konflik dan Masyarakat Miskin	Jumlah Korban Konflik dan Masyarakat Miskin yang Mengajukan Isbat Nikah	Orang
9	01	02	7.06	0004	Workshop dan FGD Perkara Syariah	Terlaksananya Workshop dan FGD Perkara Syariah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Workshop dan FGD Perkara Syariah	Orang
9	01	02	7.06	0005	Penyusunan Regulasi Syariat Islam	Tersusunnya Regulasi Syariat Islam	Jumlah Regulasi Syariat Islam yang Disusun	Dokumen
9	01	02	7.06	0006	Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Terlaksananya Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Penegakan Hukum Syariat Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0007	Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Terlaksananya Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Islam	Laporan
9	01	02	7.06	0008	Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Terlaksananya Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Jumlah Peserta yang Mengikuti Penyelenggaraan Rukyatul Hilal	Orang
9	01	02	7.06	0009	Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Ibadah Haji Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.07		Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Agung Daerah			
9	01	02	7.07	0001	Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Terbinanya Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Agung Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Kelembagaan Pendidikan dan Dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman	Lembaga
9	01	02	7.07	0002	Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Bimbingan Teknis Petugasan IT Masjid Agung Daerah	Orang
9	01	02	7.07	0003	Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengajian Rutin Keislaman Masjid Agung Daerah	Orang
9	01	02	7.07	0004	Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pelatihan Tutor Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Jumlah Tutor yang Mengikuti Pelatihan Pendidikan Al-quran di Masjid Agung Daerah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	02	7.07	0005	Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Masjid Agung Daerah yang Dipelihara Secara Rutin/Berkala	Unit
9	01	03			PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA (MPU) ACEH			
9	01	03	7.01		Peningkatan Sumber Daya dan Peran Ulama			
9	01	03	7.01	0001	Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Badan Otonom Majelis Permusyawaratan Ulama	laporan
9	01	03	7.01	0002	Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Sidang Majelis Permusyawaratan Ulama	laporan
9	01	03	7.01	0003	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0004	Rapat Koordinasi Permusyawaratan Ulama	Terlaksananya Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi Permuswaratan Ulama	Laporan
9	01	03	7.01	0005	Muzakarah Masalah Keagamaan	Terlaksananya Muzakarah Masalah Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Muzakarah Masalah Keagamaan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	0006	Pengkajian Aliran Sempalan	Terlaksananya Pengkajian Aliran Sempalan	Jumlah Dokumen Hasil Pengkajian Aliran Sempalan	Dokumen
9	01	03	7.01	0007	Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Terlaksananya Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Jumlah Dokumen Hasil Penterjemahan Kitab Berbahasa Arab dan Pengadaannya	Dokumen
9	01	03	7.01	0008	Kajian Kebijakan Daerah	Terlaksananya Kajian Kebijakan Daerah	Jumlah Kebijakan Daerah yang Dikaji	Dokumen
9	01	03	7.01	0009	Penerbitan Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Diterbitkannya Media Majelis Permusyawaratan Ulama	Jumlah Media Majelis Permusyawaratan Ulama yang Diterbitkan	Dokumen
9	01	03	7.01	0010	Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Terlaksananya Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Jumlah Laporan Hasil Nadwah/Mubahasah Ilmiah	Laporan
9	01	03	7.01	0011	Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Terlaksananya Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Fatwa dan Hukum Islam	Laporan
9	01	03	7.01	0012	Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Terlaksananya Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Keserasian Pelaksanaan Pembangunan Keagamaan	Laporan

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.01	0013	Kajian Pedoman Keagamaan	Terlaksananya Kajian Pedoman Keagamaan	Jumlah Laporan Hasil Kajian Pedoman Keagamaan	Laporan
9	01	03	7.01	0014	Pendidikan Kader Ulama	Terselenggarakannya Pendidikan Kader Ulama	Jumlah Kader Ulama yang Mengikuti Pendidikan	Orang
9	01	03	7.01	0015	Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Terselenggaranya Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi Fatwah dan Hukum Islam (Migas Kabupaten/Kota)	Orang
9	01	03	7.02		Silaturahmi Ulama-Ulama			
9	01	03	7.02	0001	Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Terselenggaranya Lokakarya Ulama Umara Bidang Muamallah	Jumlah Ulama Umara Bidang Muamallah yang Mengikuti Lokakarya	Orang
9	01	03	7.02	0002	Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Diterapkannya Eksistensi Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah	Jumlah Ulama yang Berperan dalam Pembangunan Daerah	Orang
9	01	03	7.02	0003	Kunjungan Muhibah Ulama	Terlaksanya Kunjungan Muhibah Ulama	Jumlah Laporan Kunjungan Muhibah Ulama	Laporan
9	01	03	7.03		Peningkatan Kualitas Kelembagaan Agama, Pelayanan Kehidupan Beragama dan Peran Ulama			
9	01	03	7.03	0001	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	03	7.03	0002	Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Terlaksananya Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan, Penataan dan Pengawasan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0003	Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Terbentuknya Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Jumlah Dokumen Kerja Sama Sistem Jaminan Produk Halal	Dokumen
9	01	03	7.03	0004	Peningkatan Kapasitas Laboratorium Halal	Meningkatnya Kapasitas Laboratorium Halal	Jumlah Laboratorium Halal yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit
9	01	03	7.03	0005	Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Terlaksananya Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Jumlah Peserta/Pelaku Usaha yang Mengikuti Sosialisasi Sertifikasi Produk Halal	Orang
9	01	03	7.03	0006	Pembinaan Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Terbinanya Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Jumlah Dokumen Hasil Sistem Jaminan Produk Halal (Migas Kabupaten/Kota)	Dokumen
9	01	04			PROGRAM BAITUL MAL			
9	01	04	7.01		Pengelolaan ZISWAF			
9	01	04	7.01	0001	Penyusunan Perencanaan ZISWAF	Tersusunnya Perencanaan Ziswaf	Jumlah Perencanaan Ziswaf yang Disusun	Dokumen

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.02		Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Baitul Mal			
9	01	04	7.02	0001	Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran ZISWAF	Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Jumlah Peserta yang Mengikuti Sosialisasi dan Edukasi Kesadaran Ziswaf	Orang
9	01	04	7.02	0002	Pembinaan dan Koordinasi Badan Baitul Mal	Terlaksananya Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Koordinasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.02	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM	Dokumen
9	01	04	7.02	0004	Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Terlaksananya Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Jumlah Dokumen tentang Pengembangan Data dan Informasi Baitul Mal	Dokumen
9	01	04	7.03		Peningkatan Pendistribusian dan Pendayagunaan Ziswaf			
9	01	04	7.03	0001	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fakir	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.03	0002	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Miskin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Miskin	Orang
9	01	04	7.03	0003	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Amil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Amil	Orang
9	01	04	7.03	0004	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Muallaf	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Muallaf	Orang
9	01	04	7.03	0005	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Gharimin	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Gharimin	Orang
9	01	04	7.03	0006	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Fisabilillah	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fisabilillah	Orang

KODE					NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
URUSAN / UNSUR	BIDANG URUSAN / BIDANG UNSUR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN				
9	01	04	7.03	0007	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Ibnu Sabil	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Fakir	Orang
9	01	04	7.03	0008	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Senif Infaq	Jumlah Orang yang Menerima ZIS Senif Infaq	Orang
9	01	04	7.03	0009	Pengelolaan Wakaf	Terkelolanya Wakaf	Jumlah Laporan Pengelolaan Wakaf	Laporan
9	01	04	7.03	0010	Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat	Terlaksananya Pendistribusian dan Pendayagunaan ZIS Guru SMA dan Sederajat	Jumlah Guru SMA dan Sederajat yang Mendapatkan ZIS	Orang

H. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	04	27			Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah
1	1	04	28			Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah
1	2	01	03	008		Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
1	2	01	03	008	00001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan
1	2	01	03	008	00002	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan
1	2	01	03	008	00003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
1	2	01	03	008	00004	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur
1	2	01	03	008	00005	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih
1	2	01	03	008	00006	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik
1	2	01	03	008	00007	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan
1	2	01	03	008	00008	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan
1	2	01	03	008	00009	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi
1	2	01	03	008	00010	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan
1	2	01	03	008	00011	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
1	2	01	03	008	00012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1	2	01	03	008	00013	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat
1	2	01	03	008	00014	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
1	2	01	03	008	00015	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan
1	2	01	03	008	00016	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian
1	2	01	03	008	00017	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan
1	2	01	03	008	00018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
1	2	01	03	008	00019	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik
2	1	04	26			Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
2	1	04	26	001		Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
2	1	04	26	001	00001	Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
2	2	01	03	005	00002	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
2	2	01	03	005	00003	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
2	2	01	03	005	00004	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
2	2	01	03	005	00005	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan
2	2	01	03	005	00006	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial
2	2	01	03	005	00007	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan
2	2	01	03	005	00008	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh
2	2	01	03	005	00009	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian
2	2	01	03	009		DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
2	2	01	03	009	00001	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan
2	2	01	03	009	00002	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
2	2	01	03	009	00003	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur
2	2	01	03	009	00004	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
2	2	01	03	010		DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
2	2	01	03	010	00001	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan
2	2	01	03	010	00002	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
2	2	01	03	010	00003	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur
2	2	01	03	010	00004	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
2	2	01	03	011		Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
2	2	01	03	011	00001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan
2	2	01	03	011	00002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan
2	2	01	03	011	00003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
2	2	01	03	012		DTI-Papua
2	2	01	03	012	00001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
2	2	01	03	012	00002	DTI-Papua-Energi Listrik
2	2	01	03	012	00003	DTI-Papua-Air Bersih
2	2	01	03	012	00004	DTI-Papua-Telekomunikasi

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	03	012	00005	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
2	2	01	03	013		DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
2	2	01	03	013	00001	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan
2	2	01	03	013	00002	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan
2	2	01	03	013	00003	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur
2	2	01	03	013	00004	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
2	2	01	03	013	00005	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan
2	2	01	03	013	00006	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan
2	2	01	03	013	00007	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
2	2	01	03	013	00008	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
2	2	01	03	013	00009	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
2	2	01	03	013	00010	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
2	2	01	03	013	00011	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan
2	2	01	03	013	00012	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian
2	2	01	03	013	00013	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan
2	2	01	03	013	00014	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial
2	2	01	03	013	00015	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
2	2	01	03	013	00016	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan
2	2	01	03	013	00017	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam
2	2	01	03	013	00018	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam
2	2	01	03	013	00019	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
2	2	01	03	014		DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
2	2	01	03	014	00001	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan
2	2	01	03	014	00002	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan
2	2	01	03	014	00003	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur
2	2	01	03	014	00004	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
2	2	01	03	014	00005	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan
2	2	01	03	014	00006	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan
2	2	01	03	014	00007	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
2	2	01	03	014	00008	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
2	2	01	03	014	00009	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
2	2	01	03	014	00010	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
2	2	01	03	014	00011	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan
2	2	01	03	014	00012	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian
2	2	01	03	014	00013	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan
2	2	01	03	014	00014	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial
2	2	01	03	014	00015	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
2	2	01	03	014	00016	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan
2	2	01	03	014	00017	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam
2	2	01	03	014	00018	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam
2	2	01	03	014	00019	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
2	2	01	09	001	00101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
2	2	01	09	001	00102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar
2	2	01	09	001	00103	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
2	2	01	09	001	00104	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
2	2	01	09	001	00105	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
2	2	01	09	001	00106	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar
2	2	01	09	001	00107	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	2	01	09	001	00108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar
2	2	01	09	001	00109	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
2	2	01	09	001	00110	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar
2	2	01	09	001	00111	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
2	2	01	09	001	00112	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
2	2	01	09	001	00113	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
2	2	01	09	001	00114	DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
2	2	01	09	001	00115	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
2	2	01	09	001	00116	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
2	2	01	09	001	00117	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak
2	2	01	09	002	00040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
2	2	01	09	002	00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
2	2	01	09	002	00042	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan
2	2	01	09	002	00043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian
2	2	01	09	002	00044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
2	2	01	09	003		Hibah kepada Daerah
2	2	01	09	003	00001	Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat
2	2	01	09	003	00002	Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat
2	2	01	09	003	00003	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mas Rapid Transit (MRT) Project
2	2	01	09	003	00004	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)
2	2	01	09	003	00005	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project (UPLAND)
2	2	01	09	003	00006	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
2	2	01	09	003	00007	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ Palembang City Sewerage Project (PCSP)
2	2	01	09	003	00008	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BIO CF ISFL)
2	3	03	05			Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
2	3	03	05	001		Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
2	3	03	05	001	00001	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
2	3	03	06			Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi
2	3	03	06	001		Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi
2	3	03	06	001	00001	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi
2	3	03	07			Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh
2	3	03	07	001		Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh
2	3	03	07	001	00001	Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh
2	4	02				Pencairan Dana Cadangan
2	4	02	02			Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
2	4	02	02	001		Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
2	4	02	02	001	00001	Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
2	4	02	03			Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
2	4	02	03	001		Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
2	4	02	03	001	00001	Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
2	4	08				Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
2	4	08	01			Pinjaman Daerah
2	4	08	01	001		Pinjaman Daerah dari Pemerintah
2	4	08	01	001	00001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah
2	4	08	01	001	00002	Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

KODE						Uraian Akun
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	4	08	01	001	00003	Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
2	4	08	01	002		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
2	4	08	01	002	00001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
2	4	08	01	003		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	4	08	01	003	00001	Pinjaman Daerah dari LKB
2	4	08	01	004		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	4	08	01	004	00001	Pinjaman Daerah dari LKBB
2	4	08	02			Obligasi Daerah
2	4	08	02	001		Obligasi Daerah
2	4	08	02	001	00001	Obligasi Daerah
2	4	08	03			Sukuk Daerah
2	4	08	03	001		Sukuk Daerah
2	4	08	03	001	00001	Sukuk Daerah

I. KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR REKENING-NERACA

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	01	12			Kas Otonomi Khusus
1	1	01	12	001		Kas Otonomi Khusus-Papua
1	1	01	12	001	00001	Kas Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
						Digunakan untuk mencatat kas di kas otonomi khusus 1% Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	01	12	001	00002	Kas Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
						Digunakan untuk mencatat kas di kas otonomi khusus 1,25% Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	01	12	001	00003	Kas Dana Tambahan Infrastruktur-Papua
						Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan infrastruktur Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	01	12	001	00004	Kas Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
						Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	01	12	001	00005	Kas Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
						Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan gas alam Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	01	12	002		Kas Otonomi Khusus-Aceh
1	1	01	12	002	00001	Kas Dana Otonomi Khusus-Aceh
						Digunakan untuk mencatat kas di kas otonomi khusus Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	01	12	002	00002	Kas Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
						Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	01	12	002	00003	Kas Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
						Digunakan untuk mencatat kas di kas tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan gas alam Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	01	13			Kas Dana Abadi Daerah
1	1	01	13	001		Kas Dana Abadi Daerah
1	1	01	13	001	00001	Kas Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat kas di kas dana abadi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1	1	06	05	008		Piutang Jasa Giro pada Rekening Kas Otonomi Khusus
1	1	06	05	008	00001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1% Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1% Papua yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	008	00002	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25% Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25% Papua yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	008	00003	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktrur-Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur Papua yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	008	00004	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Papua yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	008	00005	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan gas alam Papua yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Papua yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	008	00006	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana otonomi khusus Aceh yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana otonomi khusus Aceh yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	008	00007	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Aceh yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Aceh yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	008	00008	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan gas alam Aceh yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya manusia pertambangan minyak bumi Aceh yang belum dibayarkan.
1	1	06	05	009		Piutang Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah
1	1	06	05	009	00001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang timbul apabila sampai tanggal laporan keuangan terdapat hak atas jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang belum dibayarkan.
1	1	06	15	016	01106	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.
1	1	06	15	016	01107	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.
1	1	06	15	016	01108	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.
1	1	06	15	016	01109	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.
1	1	06	15	016	01110	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.
1	1	06	15	016	01111	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.
1	1	06	15	016	01112	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.
1	1	06	15	016	01113	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.
1	1	06	15	016	01114	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
1	1	06	15	016	01115	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
1	1	06	15	016	01116	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
1	1	06	15	016	01117	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
1	1	06	15	016	01118	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
1	1	06	15	016	01119	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
1	1	06	15	016	01120	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
1	1	06	15	016	01121	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
1	1	06	15	016	01122	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
1	1	06	15	016	01123	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
1	1	06	15	016	01124	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
1	1	06	15	016	01125	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01126	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
1	1	06	15	016	01127	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	06	15	016	01128	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
1	1	06	15	016	01129	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
1	1	06	15	016	01130	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
1	1	06	15	016	01131	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
1	1	06	15	016	01132	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
1	1	06	15	016	01133	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
1	1	06	15	016	01134	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
1	1	06	15	016	01135	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
1	1	06	15	016	01136	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
1	1	06	15	016	01137	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
1	1	06	15	016	01138	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
1	1	06	15	016	01139	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
1	1	06	15	016	01140	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01141	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
1	1	06	15	016	01142	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
1	1	06	15	016	01143	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
1	1	06	15	016	01144	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
1	1	06	15	016	01145	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
1	1	06	15	016	01146	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
1	1	06	15	016	01147	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
1	1	06	15	016	01148	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
1	1	06	15	016	01149	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-biaya balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
1	1	06	15	016	01150	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
1	1	06	15	016	01151	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
1	1	06	15	016	01152	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
1	1	06	15	016	01153	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
1	1	06	15	016	01154	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
1	1	06	15	016	01155	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
1	1	06	15	016	01156	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
1	1	06	15	016	01157	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.
1	1	06	15	016	01158	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.
1	1	06	15	016	01159	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.
1	1	06	15	016	01160	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.
1	1	06	15	016	01161	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.
1	1	06	15	016	01162	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01163	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah lebih dari 10 (sepuluh).
1	1	06	15	016	01164	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01165	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01166	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafeteria dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01167	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01168	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01169	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01170	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01171	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.
1	1	06	15	016	01172	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
1	1	06	15	016	01173	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan,binaraga, dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01174	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.
1	1	06	15	016	01175	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
1	1	06	15	016	01176	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.
1	1	06	15	016	01177	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan *bowling*.
1	1	06	15	016	01178	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
1	1	06	15	016	01179	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
1	1	06	15	016	01180	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.
1	1	06	15	016	01181	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron.
1	1	06	15	016	01182	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.
1	1	06	15	016	01183	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.
1	1	06	15	016	01184	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.
1	1	06	15	016	01185	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.
1	1	06	15	016	01186	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.
1	1	06	15	016	01187	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.
1	1	06	15	016	01188	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.
1	1	06	15	016	01189	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame *Film*/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame *film*/*slide*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01190	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.
1	1	06	15	016	01191	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
1	1	06	15	016	01192	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.
1	1	06	15	016	01193	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
1	1	06	15	016	01194	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
1	1	06	15	016	01195	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
1	1	06	15	016	01196	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.
1	1	06	15	016	01197	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.
1	1	06	15	016	01198	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01199	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.
1	1	06	15	016	01200	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.
1	1	06	15	016	01201	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.
1	1	06	15	016	01202	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit.
1	1	06	15	016	01203	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.
1	1	06	15	016	01204	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak felspar.
1	1	06	15	016	01205	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*).
1	1	06	15	016	01206	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.
1	1	06	15	016	01207	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit.
1	1	06	15	016	01208	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.
1	1	06	15	016	01209	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.
1	1	06	15	016	01210	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.
1	1	06	15	016	01211	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.
1	1	06	15	016	01212	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.
1	1	06	15	016	01213	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.
1	1	06	15	016	01214	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.
1	1	06	15	016	01215	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.
1	1	06	15	016	01216	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01217	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.
1	1	06	15	016	01218	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil.
1	1	06	15	016	01219	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.
1	1	06	15	016	01220	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.
1	1	06	15	016	01221	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat*.
1	1	06	15	016	01222	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *talk*.
1	1	06	15	016	01223	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*).
1	1	06	15	016	01224	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah *Diatome*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *diatome*.
1	1	06	15	016	01225	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01226	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum).
1	1	06	15	016	01227	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.
1	1	06	15	016	01228	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif.
1	1	06	15	016	01229	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit.
1	1	06	15	016	01230	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal.
1	1	06	15	016	01231	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit.
1	1	06	15	016	01232	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
1	1	06	15	016	01233	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.
1	1	06	15	016	01234	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya ikutan dalam suatu pertambangan mineral.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01235	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
1	1	06	15	016	01236	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
1	1	06	15	016	01237	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
1	1	06	15	016	01238	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
1	1	06	15	016	01239	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
1	1	06	15	016	01240	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman restoran.
1	1	06	15	016	01241	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman penyedia jasa boga atau katering.
1	1	06	15	016	01242	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01243	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
1	1	06	15	016	01244	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
1	1	06	15	016	01245	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
1	1	06	15	016	01246	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
1	1	06	15	016	01247	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
1	1	06	15	016	01248	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
1	1	06	15	016	01249	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
1	1	06	15	016	01250	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
1	1	06	15	016	01251	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
1	1	06	15	016	01252	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/ bungalo/*resort*/*cottage*.
1	1	06	15	016	01253	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
1	1	06	15	016	01254	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
1	1	06	15	016	01255	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
1	1	06	15	016	01256	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
1	1	06	15	016	01257	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
1	1	06	15	016	01258	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
1	1	06	15	016	01259	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
1	1	06	15	016	01260	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
1	1	06	15	016	01261	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
1	1	06	15	016	01262	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
1	1	06	15	016	01263	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01264	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
1	1	06	15	016	01265	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
1	1	06	15	016	01266	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
1	1	06	15	016	01267	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
1	1	06	15	016	01268	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
1	1	06	15	016	01269	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.
1	1	06	15	016	01270	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
1	1	06	15	016	01271	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.
1	1	06	15	016	01272	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.
1	1	06	15	016	01273	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.
1	1	06	15	016	01274	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
1	1	06	15	016	01275	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
1	1	06	15	016	01276	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
1	1	06	15	016	01277	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01278	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
1	1	06	15	016	01279	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
1	1	06	15	016	01280	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
1	1	06	15	016	01281	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
1	1	06	15	016	01282	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
1	1	06	15	016	01283	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
1	1	06	15	016	01284	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
1	1	06	15	016	01285	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
1	1	06	15	016	01286	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
1	1	06	15	016	01287	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
1	1	06	15	016	01288	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
1	1	06	15	016	01289	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
1	1	06	15	016	01290	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01291	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
1	1	06	15	016	01292	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
1	1	06	15	016	01293	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
1	1	06	15	016	01294	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
1	1	06	15	016	01295	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
1	1	06	15	016	01296	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
1	1	06	15	016	01297	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01298	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
1	1	06	15	016	01299	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
1	1	06	15	016	01300	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
1	1	06	15	016	01301	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
1	1	06	15	016	01302	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
1	1	06	15	016	01303	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
1	1	06	15	016	01304	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
1	1	06	15	016	01305	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
1	1	06	15	016	01306	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
1	1	06	15	016	01307	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
1	1	06	15	016	01308	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
1	1	06	15	016	01309	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
1	1	06	15	016	01310	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
1	1	06	15	016	01311	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
1	1	06	15	016	01312	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
1	1	06	15	016	01313	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
1	1	06	15	016	01314	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitasi pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
1	1	06	15	016	01315	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitasi pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
1	1	06	15	016	01316	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
1	1	06	15	016	01317	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01318	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
1	1	06	15	016	01319	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
1	1	06	15	016	01320	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
1	1	06	15	016	01321	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
1	1	06	15	016	01322	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
1	1	06	15	016	01323	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah ptong hewan.
1	1	06	15	016	01324	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	016	01325	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
1	1	06	15	016	01326	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
1	1	06	15	016	01327	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
1	1	06	15	016	01328	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
1	1	06	15	016	01329	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
1	1	06	15	016	01330	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
1	1	06	15	016	01331	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
1	1	06	15	016	01332	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
1	1	06	15	016	01333	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
1	1	06	15	016	01334	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
1	1	06	15	016	01335	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
1	1	06	15	016	01336	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
1	1	06	15	016	01337	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
1	1	06	15	016	01338	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
1	1	06	15	016	01339	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan peenyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
1	1	06	15	016	01340	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
1	1	06	15	016	01341	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
1	1	06	15	016	01342	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
1	1	06	15	018	00017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan *Block Seat*
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan *block seat*.
1	1	06	15	018	00018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	080	00003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.
1	1	06	15	080	00004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.
1	1	06	15	080	00005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pkerjaan umum dan penataan ruang.
1	1	06	15	080	00006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
1	1	06	15	080	00007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
1	1	06	15	080	00008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.
1	1	06	15	080	00009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.
1	1	06	15	080	00010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
1	1	06	15	080	00011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.
1	1	06	15	080	00012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.
1	1	06	15	080	00013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.
1	1	06	15	080	00014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
1	1	06	15	080	00015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	080	00016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
1	1	06	15	080	00017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubunga.
1	1	06	15	080	00018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.
1	1	06	15	080	00019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
1	1	06	15	080	00020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.
1	1	06	15	080	00021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.
1	1	06	15	080	00022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.
1	1	06	15	080	00023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.
1	1	06	15	080	00024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.
1	1	06	15	080	00025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.
1	1	06	15	080	00026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.
1	1	06	15	080	00027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan.
1	1	06	15	080	00028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	080	00029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.
1	1	06	15	080	00030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.
1	1	06	15	080	00031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.
1	1	06	15	080	00032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.
1	1	06	15	080	00033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.
1	1	06	15	080	00034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.
1	1	06	15	081	00003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	081	00004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.
1	1	06	15	081	00005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
1	1	06	15	081	00006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
1	1	06	15	081	00007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
1	1	06	15	081	00008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.
1	1	06	15	081	00009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	081	00010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
1	1	06	15	081	00011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.
1	1	06	15	081	00012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.
1	1	06	15	081	00013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.
1	1	06	15	081	00014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
1	1	06	15	081	00015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	081	00016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
1	1	06	15	081	00017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubunga.
1	1	06	15	081	00018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
1	1	06	15	081	00019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
1	1	06	15	081	00020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.
1	1	06	15	081	00021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	081	00022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.
1	1	06	15	081	00023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.
1	1	06	15	081	00024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.
1	1	06	15	081	00025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.
1	1	06	15	081	00026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.
1	1	06	15	081	00027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
1	1	06	15	081	00028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.
1	1	06	15	081	00029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.
1	1	06	15	081	00030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.
1	1	06	15	081	00031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
1	1	06	15	081	00032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.
1	1	06	15	081	00033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.
1	1	06	15	081	00034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	082	00003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.
1	1	06	15	082	00004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.
1	1	06	15	082	00005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
1	1	06	15	082	00006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
1	1	06	15	082	00007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
1	1	06	15	082	00008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	082	00009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.
1	1	06	15	082	00010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
1	1	06	15	082	00011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.
1	1	06	15	082	00012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.
1	1	06	15	082	00013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.
1	1	06	15	082	00014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	082	00015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
1	1	06	15	082	00016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
1	1	06	15	082	00017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubunga.
1	1	06	15	082	00018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
1	1	06	15	082	00019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
1	1	06	15	082	00020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	082	00021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
1	1	06	15	082	00022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.
1	1	06	15	082	00023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.
1	1	06	15	082	00024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.
1	1	06	15	082	00025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.
1	1	06	15	082	00026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.
1	1	06	15	082	00027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
1	1	06	15	082	00028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.
1	1	06	15	082	00029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.
1	1	06	15	082	00030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.
1	1	06	15	082	00031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
1	1	06	15	082	00032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.
1	1	06	15	082	00033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	082	00034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.
1	1	06	15	083	00003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.
1	1	06	15	083	00004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.
1	1	06	15	083	00005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
1	1	06	15	083	00006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
1	1	06	15	083	00007	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	083	00008	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.
1	1	06	15	083	00009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.
1	1	06	15	083	00010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
1	1	06	15	083	00011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.
1	1	06	15	083	00012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.
1	1	06	15	083	00013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.
1	1	06	15	083	00014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
1	1	06	15	083	00015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.
1	1	06	15	083	00016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
1	1	06	15	083	00017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubunga.
1	1	06	15	083	00018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.
1	1	06	15	083	00019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
1	1	06	15	083	00020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.
1	1	06	15	083	00021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.
1	1	06	15	083	00022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.
1	1	06	15	083	00023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.
1	1	06	15	083	00024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.
1	1	06	15	083	00025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.
1	1	06	15	083	00026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	083	00027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.
1	1	06	15	083	00028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.
1	1	06	15	083	00029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.
1	1	06	15	083	00030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.
1	1	06	15	083	00031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral.
1	1	06	15	083	00032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.
1	1	06	15	083	00033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.
1	1	06	15	083	00034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.
1	1	06	15	084	00009	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.
1	1	06	15	084	00010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.
1	1	06	15	084	00011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
1	1	06	15	084	00012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
1	1	06	15	084	00013	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
1	1	06	15	084	00014	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.
1	1	06	15	084	00015	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.
1	1	06	15	084	00016	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
1	1	06	15	084	00017	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.
1	1	06	15	084	00018	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.
1	1	06	15	084	00019	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.
1	1	06	15	084	00020	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
1	1	06	15	084	00021	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
1	1	06	15	084	00022	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
1	1	06	15	084	00023	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubunga.
1	1	06	15	084	00024	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.
1	1	06	15	084	00025	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
1	1	06	15	084	00026	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.
1	1	06	15	084	00027	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
1	1	06	15	084	00028	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.
1	1	06	15	084	00029	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.
1	1	06	15	084	00030	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.
1	1	06	15	084	00031	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	084	00032	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.
1	1	06	15	084	00033	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.
1	1	06	15	084	00034	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.
1	1	06	15	084	00035	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.
1	1	06	15	084	00036	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.
1	1	06	15	084	00037	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi sumber daya mineral.
1	1	06	15	084	00038	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.
1	1	06	15	084	00039	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.
1	1	06	15	084	00040	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.
1	1	06	15	084	00041	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.
1	1	06	15	084	00042	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.
1	1	06	15	084	00043	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
1	1	06	15	084	00044	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
1	1	06	15	084	00045	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
1	1	06	15	084	00046	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.
1	1	06	15	084	00047	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.
1	1	06	15	084	00048	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
1	1	06	15	084	00049	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.
1	1	06	15	084	00050	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.
1	1	06	15	084	00051	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.
1	1	06	15	084	00052	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
1	1	06	15	084	00053	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
1	1	06	15	084	00054	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
1	1	06	15	084	00055	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubunga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	084	00056	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.
1	1	06	15	084	00057	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
1	1	06	15	084	00058	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.
1	1	06	15	084	00059	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
1	1	06	15	084	00060	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.
1	1	06	15	084	00061	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	084	00062	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.
1	1	06	15	084	00063	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.
1	1	06	15	084	00064	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.
1	1	06	15	084	00065	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.
1	1	06	15	084	00066	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.
1	1	06	15	084	00067	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	15	084	00068	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.
1	1	06	15	084	00069	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
1	1	06	15	084	00070	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.
1	1	06	15	084	00071	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.
1	1	06	15	084	00072	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.
1	1	06	15	091		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa
1	1	06	15	091	00001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan usaha milik desa.
1	1	06	15	091	00002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan usaha milik desa.
1	1	06	15	091	00003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan usaha milik desa.
1	1	06	15	092		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi
1	1	06	15	092	00001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi.
1	1	06	15	092	00002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi.
1	1	06	15	092	00003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada koperasi.
1	1	06	15	093		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah
1	1	06	15	093	00001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah.
1	1	06	15	094		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
1	1	06	15	094	00001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah.
1	1	06	15	094	00002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
1	1	06	15	094	00003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
1	1	06	15	094	00004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
1	1	06	15	094	00005	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).
1	1	06	15	094	00006	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
1	1	06	15	095		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
1	1	06	15	095	00001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga obligasi daerah.
1	1	06	26			Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
1	1	06	26	001		Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
1	1	06	26	001	00001	Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari hasil pengelolaan dana cadangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27			Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah
1	1	06	27	001		Piutang Pendapatan Denda
1	1	06	27	001	00001	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00002	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00003	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00004	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00005	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00006	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00007	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00008	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00009	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00010	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00011	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00012	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00013	Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00014	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00015	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00016	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00017	Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00018	Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00019	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00020	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00021	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00022	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00023	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00024	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00025	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00026	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00027	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00028	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00029	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00030	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00031	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00032	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00033	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil pnumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00034	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00035	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00036	Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00037	Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00038	Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00039	Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00040	Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00041	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00042	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00043	Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00044	Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00045	Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00046	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00047	Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00048	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00049	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00050	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00051	Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00052	Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00053	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00054	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00055	Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00056	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00057	Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00058	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	001	00059	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00060	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00061	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00062	Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak diskotek, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00063	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00064	Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak permainan biliar dan *bowling* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00065	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00066	Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00067	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	001	00068	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame papan/*billboard*/ videotron/megatron yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00069	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00070	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00071	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00072	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00073	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00074	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00075	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00076	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame *Film*/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame *film*/*slide* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00077	Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	001	00078	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00079	Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00080	Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00081	Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00082	Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00083	Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00084	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00085	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00086	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00087	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	001	00088	Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00089	Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00090	Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00091	Piutang Pendapatan Denda Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak *felspar* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00092	Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak garam batu (*halite*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00093	Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00094	Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00095	Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00096	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00097	Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00098	Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00099	Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00100	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00101	Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00102	Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00103	Piutang Pendapatan Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00104	Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00105	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00106	Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00107	Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00108	Piutang Pendapatan Denda Pajak *Phospat*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak *phospat* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00109	Piutang Pendapatan Denda Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak *talk* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00110	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tanah serap (*fullers earth*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00111	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah *Diatome*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tanah *diatome* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00112	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00113	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00114	Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00115	Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00116	Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00117	Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00118	Piutang Pendapatan Denda Pajak *Trakit*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak *trakit* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00119	Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00120	Piutang Pendapatan Denda Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00121	Piutang Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00122	Piutang Pendapatan Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00123	Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00124	Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00125	Piutang Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00126	Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan bantuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00127	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00128	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00129	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00130	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00131	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00132	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00133	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00134	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00135	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00136	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00137	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00138	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00139	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00140	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00141	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00142	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00143	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00144	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00145	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00146	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00147	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00148	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00149	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00150	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00151	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	001	00152	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00153	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00154	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00155	Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00156	Piutang Pendapatan Denda Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00157	Piutang Pendapatan Denda Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	001	00158	Piutang Pendapatan Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002		Piutang Pendapatan Bunga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	002	00001	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00002	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00003	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00004	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00005	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00006	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00007	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00008	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00009	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00010	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	002	00011	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00012	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00013	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00014	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00015	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00016	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00017	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00018	Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00019	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	002	00020	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00021	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00022	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00023	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00024	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00025	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00026	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00027	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00028	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00029	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00030	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00031	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00032	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00033	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00034	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00035	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00036	Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00037	Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00038	Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00039	Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00040	Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00041	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00042	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00043	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00044	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00045	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00046	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00047	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00048	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pesanggrahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00049	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00050	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00051	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00052	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00053	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00054	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00055	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00056	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00057	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	002	00058	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00059	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00060	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00061	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00062	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejeninsnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00063	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00064	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak biliar dan *bowling* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00065	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00066	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	002	00067	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00068	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/ Megatron
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00069	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00070	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00071	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00072	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00073	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00074	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00075	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00076	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame *Film*/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame *film*/*slide* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	002	00077	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00078	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00079	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00080	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00081	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak parkir air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00082	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00083	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00084	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00085	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu setengah pertama yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00086	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	002	00087	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00088	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00089	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00090	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00091	Piutang Pendapatan Bunga Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak *felspar* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00092	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak garam batu (*halite*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00093	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00094	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00095	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00096	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00097	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kaolin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00098	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00099	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00100	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00101	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00102	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00103	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00104	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00105	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00106	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00107	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Perlit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00108	Piutang Pendapatan Bunga Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak *phospat* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00109	Piutang Pendapatan Bunga Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak *talk* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00110	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tanah serap (*fullers earth*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00111	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00112	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00113	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tanah tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00114	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00115	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00116	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00117	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Basal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00118	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00119	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00120	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00121	Piutang Pendapatan Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00122	Piutang Pendapatan Bunga PBBP2
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00123	Piutang Pendapatan Bunga BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00124	Piutang Pendapatan Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00125	Piutang Pendapatan Bunga Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00126	Piutang Pendapatan Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00127	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00128	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00129	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00130	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00131	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00132	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00133	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00134	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	002	00135	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00136	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00137	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00138	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00139	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00140	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00141	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00142	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00143	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00144	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di satu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00145	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran keseninan, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00146	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00147	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00148	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00149	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00150	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00151	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00152	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00153	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00154	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00155	Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00156	Piutang Pendapatan Bunga Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	002	00157	Piutang Pendapatan Bunga Opsen BBNKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003		Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak
1	1	06	27	003	00001	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00002	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00003	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00004	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00005	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00006	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00007	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00008	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	003	00009	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00010	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00011	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00012	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00013	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00014	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00015	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00016	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00017	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00018	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00019	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00020	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00021	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-*Minibus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00022	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00023	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00024	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00025	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00026	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00027	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00028	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00029	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00030	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00031	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00032	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	003	00033	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00034	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00035	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00036	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00037	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00038	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00039	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00040	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00041	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00042	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00043	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00044	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00045	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00046	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00047	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00048	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00049	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00050	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	003	00051	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00052	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00053	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00054	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00055	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00056	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00057	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00058	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00059	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	003	00060	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00061	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00062	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00063	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00064	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak biliar dan *bowling* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00065	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00066	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00067	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00068	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame papan/*billboard* /videotron/megatron yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00069	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00070	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00071	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00072	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00073	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00074	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00075	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00076	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame *film/slide* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00077	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	003	00078	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00079	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00080	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00081	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00082	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00083	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00084	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00085	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00086	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00087	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00088	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00089	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00090	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00091	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak *felspar* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00092	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak garam batu (*halite*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00093	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00094	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00095	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00096	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00097	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kaolin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00098	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00099	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00100	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00101	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00102	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00103	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak opsidien yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00104	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00105	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00106	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00107	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Perlit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00108	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak *phospat* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00109	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak *talk* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00110	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tanah serap (*fullers earth*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00111	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00112	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00113	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tanah tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00114	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00115	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00116	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00117	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Basal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00118	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00119	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00120	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00121	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00122	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBP2
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00123	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00124	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00125	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00126	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00127	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00128	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00129	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00130	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00131	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00132	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00133	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00134	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00135	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00136	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00137	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00138	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00139	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00140	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00141	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00142	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00143	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00144	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00145	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00146	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00147	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00148	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00149	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00150	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00151	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00152	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00153	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00154	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00155	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	27	003	00156	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	27	003	00157	Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28			Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah
1	1	06	28	001		Piutang Pendapatan Denda
1	1	06	28	001	00001	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00002	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00003	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00004	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00005	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00006	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	28	001	00007	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00008	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00009	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00010	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00011	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00012	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00013	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00014	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00015	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00016	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00017	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00018	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00019	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00020	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00021	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00022	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00023	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00024	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00025	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00026	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00027	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00028	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00029	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00030	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00031	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00032	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00033	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00034	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00035	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00036	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00037	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00038	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00039	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00040	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00041	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00042	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00043	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	28	001	00044	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00045	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar /pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00046	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00047	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00048	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00049	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00050	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00051	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00052	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00053	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00054	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00055	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00056	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyebrangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00057	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyebrangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00058	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00059	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00060	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00061	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00062	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00063	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00064	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00065	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00066	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00067	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00068	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00069	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00070	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00071	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00072	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00073	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00074	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00075	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00076	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00077	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00078	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00079	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	001	00080	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	28	001	00081	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002		Piutang Pendapatan Bunga
1	1	06	28	002	00001	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00002	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00003	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00004	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00005	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00006	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00007	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	28	002	00008	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00009	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00010	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00011	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00012	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00013	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00014	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00015	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00016	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00017	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00018	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00019	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00020	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00021	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00022	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00023	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00024	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00025	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00026	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00027	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00028	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00029	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00030	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00031	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00032	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00033	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00034	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00035	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00036	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00037	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00038	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00039	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00040	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00041	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00042	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00043	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00044	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00045	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00046	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00047	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00048	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00049	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00050	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00051	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00052	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00053	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00054	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00055	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00056	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00057	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00058	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00059	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00060	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00061	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00062	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00063	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00064	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00065	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00066	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00067	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00068	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00069	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00070	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00071	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00072	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00073	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk meenyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00074	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00075	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00076	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00077	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00078	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00079	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	06	28	002	00080	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	06	28	002	00081	Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang yang berasal dari pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	003	00002	Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	003	00003	Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	003	00004	Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	003	00005	Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	003	00006	Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	003	00007	Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	003	00008	Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan kistimewaan Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	003	00009	Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008		Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
1	1	07	03	008	00001	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00002	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00003	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua administrasi pmerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00004	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00005	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur air bersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00006	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00007	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur perhubunga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00008	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur sanitasi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00009	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua infrastruktur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00010	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00011	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00012	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00013	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00014	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00015	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00016	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00017	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00018	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	008	00019	Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1%-Papua teknplogi, informasi, dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	009		Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
1	1	07	03	009	00001	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	009	00002	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	009	00003	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	009	00004	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	010		Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
1	1	07	03	010	00001	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	010	00002	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	010	00003	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	010	00004	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	011		Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
1	1	07	03	011	00001	Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	011	00002	Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	011	00003	Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	012		Piutang DTI-Papua
1	1	07	03	012	00001	Piutang DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	012	00002	Piutang DTI-Papua-Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	012	00003	Piutang DTI-Papua-Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	012	00004	Piutang DTI-Papua-Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	012	00005	Piutang DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013		Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	03	013	00001	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00002	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00003	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00004	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00005	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00006	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-keistimewaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00007	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00008	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00009	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pembeerdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	03	013	00010	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00011	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00012	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00013	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00014	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00015	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00016	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00017	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-implementasi syariat Islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00018	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penerapan syariat Islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	013	00019	Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014		Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
1	1	07	03	014	00001	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00002	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00003	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00004	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00005	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00006	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00007	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00008	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00009	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00010	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00011	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00012	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00013	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00014	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00015	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00016	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	03	014	00017	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00018	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	03	014	00019	Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00101	Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00102	Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00103	Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00104	Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00105	Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00106	Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	07	09	001	00107	Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00108	Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00109	Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00110	Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang irigasi-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00111	Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00112	Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00113	Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00114	Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00115	Piutang DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00116	Piutang DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	001	00117	Piutang DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	002	00040	Piutang DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	002	00041	Piutang DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	002	00042	Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	002	00043	Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	002	00044	Piutang DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
						Digunakan untuk mencatat piutang DAK non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	003		Piutang Hibah kepada Daerah
1	1	07	09	003	00001	Piutang Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	003	00002	Piutang Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat piutang penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	003	00003	Piutang Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Mas Rapid Transit* (MRT) *Project*
						Digunakan untuk mencatat piutang pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*mas rapid transit* (MRT) *project* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	003	00004	Piutang Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative* (READ-SI)
						Digunakan untuk mencatat piutang pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*rural empowerment and agricultural development scaling up initiative* (READ-SI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	003	00005	Piutang Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)
						Digunakan untuk mencatat piutang pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project* (UPLAND) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	003	00006	Piutang Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
						Digunakan untuk mencatat piutang hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	003	00007	Piutang Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ Palembang *City Sewerage Project* (PCSP)
						Digunakan untuk mencatat piutang hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/Palembang *city sewerage project* (PCSP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
1	1	07	09	003	00008	Piutang Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BIO CF ISFL)
						Digunakan untuk mencatat piutang hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon initiative for sustainable forest landscape* (BIO CF ISFL) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07706	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang hasil pengelolaan dana cadangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang hasil pengelolaan dana cadangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang hasil pengelolaan dana cadangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07707	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Uang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah uang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah uang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah uang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07708	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Barang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07709	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Jasa kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07710	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07711	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07712	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07713	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07714	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjamin Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07715	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07716	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07717	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07718	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07719	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07720	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07721	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07722	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07723	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktrur-Papua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07724	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07725	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07726	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07727	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07728	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07729	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang jasa giro pada rekening dana abadi daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07730	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan *Block Seat*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan *block seat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan *block seat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan *block seat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07731	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07732	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07733	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07734	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07735	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07736	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07737	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07738	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07739	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07740	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07741	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07742	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07743	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07744	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan msyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan msyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan msyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07745	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07746	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07747	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07748	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07749	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07750	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07751	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07752	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07753	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07754	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07755	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07756	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07757	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07758	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07759	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07760	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07761	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07762	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07763	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07764	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07765	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07766	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07767	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07768	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07769	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07770	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07771	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07772	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07773	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07774	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07775	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07776	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07777	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07778	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07779	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07780	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07781	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07782	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07783	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07784	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07785	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07786	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubunga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07787	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07788	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07789	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07790	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07791	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07792	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07793	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07794	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07795	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07796	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07797	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07798	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07799	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07800	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07801	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07802	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07803	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07804	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07805	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07806	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07807	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07808	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07809	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07810	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07811	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07812	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07813	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07814	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07815	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07816	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07817	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07818	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubunga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07819	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07820	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07821	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07822	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07823	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07824	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07825	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07826	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07827	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07828	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07829	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07830	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07831	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07832	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07833	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07834	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07835	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07836	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07837	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07838	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07839	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07840	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07841	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07842	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07843	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provins-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07844	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07845	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07846	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07847	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07848	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07849	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07850	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubunga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07851	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07852	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07853	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07854	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07855	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07856	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07857	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07858	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07859	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07860	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07861	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07862	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07863	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07864	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07865	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07866	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07867	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07868	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07869	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07870	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07871	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07872	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07873	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07874	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07875	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07876	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07877	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07878	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07879	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07880	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07881	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07882	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubunga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07883	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07884	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07885	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07886	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07887	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07888	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07889	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07890	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07891	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07892	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07893	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07894	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07895	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07896	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07897	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07898	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07899	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07900	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07901	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07902	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07903	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07904	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07905	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07906	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07907	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07908	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07909	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07910	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07911	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07912	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07913	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07914	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubunga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubunga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07915	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07916	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07917	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07918	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07919	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07920	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07921	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07922	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07923	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07924	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07925	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07926	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07927	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07928	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07929	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07930	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07931	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07932	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07933	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07934	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07935	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07936	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07937	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07938	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07939	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07940	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07941	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07942	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07943	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07944	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07945	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07946	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07947	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07948	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07949	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07950	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07951	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07952	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07953	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07954	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07955	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07956	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07957	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07958	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07959	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07960	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07961	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07962	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07963	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07964	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07965	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07966	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07967	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07968	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	07969	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07970	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07971	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07972	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07973	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rokok

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07974	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07975	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07976	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07977	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07978	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Wisma Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07979	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07980	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07981	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07982	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07983	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07984	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07985	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07986	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Warung dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07987	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07988	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07989	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07990	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07991	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07992	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07993	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07994	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07995	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07996	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07997	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07998	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pertandingan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	07999	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Papan/ *Billboard* /Videotron/ Megatron
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame papan/ *billboard* /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame papan/ *billboard* /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame papan/ *billboard* /videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08000	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08001	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08002	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Selebaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08003	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08004	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08005	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08006	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Suara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08007	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame *Film / Slide*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame *film / slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame *film / slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame *film / slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08008	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08009	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08010	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08011	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08012	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08013	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08014	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08015	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08016	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08017	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08018	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08019	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08020	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08021	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08022	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08023	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak garam batu (*halite* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08024	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08025	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08026	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08027	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08028	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08029	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08030	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08031	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08032	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08033	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08034	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08035	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08036	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08037	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08038	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08039	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08040	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08041	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah serap *(fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08042	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08043	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08044	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08045	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08046	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08047	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08048	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08049	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08050	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08051	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08052	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08053	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08054	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BPHTB-Pemindahan Hak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08055	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08056	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08057	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08058	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08059	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08060	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08061	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08062	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08063	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08064	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08065	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08066	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08067	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08068	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08069	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08070	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/ *resort* / yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08071	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08072	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08073	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08074	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkirpelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08075	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08076	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08077	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08078	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08079	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08080	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08081	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08082	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08083	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08084	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan. wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan. wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan. wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08085	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08086	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08087	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen PKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08088	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08089	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08090	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08091	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Jeep

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08092	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08093	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08094	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08095	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08096	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08097	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08098	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08099	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08100	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08101	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08102	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08103	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08104	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08105	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08106	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08107	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08108	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08109	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08110	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08111	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08112	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08113	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08114	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08115	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08116	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08117	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08118	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08119	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08120	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08121	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08122	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08123	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08124	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08125	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08126	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08127	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08128	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08129	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08130	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08131	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rokok

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08132	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08133	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08134	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08135	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08136	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Wisma Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08137	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08138	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08139	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08140	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08141	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08142	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08143	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08144	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08145	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08146	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08147	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08148	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08149	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08150	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08151	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08152	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08153	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak permainan biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak permainan biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak permainan biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08154	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08155	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08156	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pertandingan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08157	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame papan/*billboard*/videotro/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame papan/*billboard* /videotro/mega yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame papan/*billboard*/videotro/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08158	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08159	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08160	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Selebaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08161	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08162	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08163	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08164	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Suara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08165	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame *film/slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame *film/slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame *film/slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08166	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08167	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08168	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08169	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08170	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08171	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08172	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08173	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08174	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08175	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08176	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08177	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08178	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08179	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08180	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08181	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak garam batu (*halite* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08182	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08183	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08184	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08185	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08186	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08187	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08188	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08189	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08190	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08191	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08192	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08193	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08194	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08195	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08196	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08197	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08198	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08199	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08200	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08201	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08202	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08203	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08204	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08205	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08206	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08207	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08208	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08209	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08210	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08211	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08212	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BPHTB-Pemindahan Hak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08213	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08214	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08215	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08216	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08217	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08218	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08219	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08220	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08221	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08222	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08223	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08224	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08225	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08226	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08227	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08228	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/ *resort* / yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08229	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08230	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08231	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08232	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08233	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08234	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08235	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08236	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08237	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08238	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08239	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08240	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08241	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olaahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olaahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olaahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08242	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08243	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08244	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08245	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen PKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08246	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08247	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08248	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08249	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08250	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08251	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08252	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08253	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08254	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08255	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08256	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08257	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08258	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08259	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08260	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08261	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08262	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08263	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08264	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08265	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08266	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08267	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08268	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08269	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08270	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08271	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08272	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08273	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08274	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08275	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08276	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08277	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08278	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08279	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08280	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08281	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08282	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08283	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08284	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08285	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08286	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08287	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08288	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08289	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08290	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08291	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Losmen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08292	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08293	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08294	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08295	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08296	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08297	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08298	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08299	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08300	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08301	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08302	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08303	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08304	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08305	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08306	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08307	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pameran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08308	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08309	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08310	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak permainan biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak permainan biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak permainan biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08311	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08312	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak panti pijat, rfleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak panti pijat, rfleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak panti pijat, rfleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08313	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pertandigan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pertandigan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pertandigan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08314	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08315	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08316	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08317	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08318	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08319	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08320	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08321	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08322	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame *film/slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame *film/slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame *film/slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08323	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08324	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08325	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08326	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08327	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08328	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08329	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08330	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08331	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08332	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08333	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08334	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08335	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Bentonit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08336	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08337	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08338	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08339	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Grafit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08340	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08341	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08342	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08343	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08344	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08345	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08346	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08347	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08348	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Nitrat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08349	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08350	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08351	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08352	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08353	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08354	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08355	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08356	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08357	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08358	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08359	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08360	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08361	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08362	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08363	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08364	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08365	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08366	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Belerang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08367	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08368	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08369	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08370	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08371	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08372	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08373	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08374	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08375	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08376	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08377	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08378	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08379	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08380	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08381	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08382	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08383	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08384	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08385	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08386	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08387	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08388	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08389	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08390	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08391	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08392	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08393	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08394	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08395	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08396	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08397	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08398	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08399	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, wahana pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, wahana pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, wahana pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08400	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08401	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08402	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen PKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08403	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08404	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08405	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08406	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08407	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08408	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08409	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08410	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08411	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08412	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08413	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08414	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08415	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08416	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08417	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08418	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08419	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08420	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08421	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08422	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08423	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08424	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08425	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08426	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08427	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08428	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08429	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08430	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08431	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08432	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08433	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08434	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08435	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08436	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08437	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08438	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08439	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08440	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08441	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08442	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08443	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08444	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08445	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08446	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08447	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08448	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08449	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08450	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08451	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08452	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08453	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08454	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08455	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08456	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-ppelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08457	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08458	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08459	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08460	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08461	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08462	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08463	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08464	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08465	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08466	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08467	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08468	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08469	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08470	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08471	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08472	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08473	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08474	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08475	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08476	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08477	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08478	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08479	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08480	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08481	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08482	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08483	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08484	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08485	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08486	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08487	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08488	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08489	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08490	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08491	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08492	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08493	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08494	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08495	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08496	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08497	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08498	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08499	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08500	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08501	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08502	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08503	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08504	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08505	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08506	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08507	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08508	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08509	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08510	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08511	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08512	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08513	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08514	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08515	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08516	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08517	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08518	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08519	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08520	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08521	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08522	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08523	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08524	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08525	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08526	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08527	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08528	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08529	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08530	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08531	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08532	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08533	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08534	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08535	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08536	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08537	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08538	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08539	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08540	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08541	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08542	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08543	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08544	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08545	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08546	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08547	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08548	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08549	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08550	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08551	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08552	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08553	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08554	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08555	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08556	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkoho sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkoho yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08557	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08558	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08559	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08560	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08561	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08562	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08563	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujan bangunan gedung sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujan bangunan gedung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08564	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08565	Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat sehingga nilai piutang pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08566	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08567	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08568	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08569	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08570	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08571	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08572	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08573	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08574	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08575	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08576	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08577	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08578	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08579	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08580	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08581	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08582	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08583	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08584	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08585	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08586	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08587	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08588	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08589	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08590	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08591	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08592	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08593	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08594	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08595	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08596	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08597	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08598	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tigaa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08599	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08600	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08601	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08602	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08603	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08604	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08605	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08606	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08607	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08608	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08609	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08610	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08611	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08612	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08613	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08614	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08615	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08616	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08617	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08618	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08619	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08620	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08621	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08622	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08623	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08624	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08625	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08626	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08627	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08628	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08629	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan *bowling* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan *bowling* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08630	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08631	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08632	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08633	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard* /videotron/megat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08634	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08635	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08636	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08637	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08638	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08639	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08640	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08641	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame *film/slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame *film/slide* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame *film/slide* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08642	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08643	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08644	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08645	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08646	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08647	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08648	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08649	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08650	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08651	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08652	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08653	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08654	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08655	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08656	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *felspar* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *felspar* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08657	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08658	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08659	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08660	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08661	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08662	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08663	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08664	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08665	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08666	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08667	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08668	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08669	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08670	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08671	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08672	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08673	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08674	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *talk* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *talk* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08675	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08676	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08677	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08678	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08679	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08680	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08681	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08682	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08683	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08684	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08685	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08686	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08687	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08688	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08689	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08690	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08691	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08692	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08693	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08694	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08695	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08696	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08697	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08698	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08699	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08700	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08701	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08702	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08703	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08704	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/ *resort* / yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/*resort*/*cottage* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/*resort*/*cottage* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08705	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08706	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08707	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08708	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08709	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08710	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08711	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08712	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08713	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08714	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08715	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08716	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08717	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08718	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08719	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08720	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08721	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08722	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08723	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08724	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08725	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08726	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08727	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08728	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08729	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08730	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08731	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08732	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08733	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08734	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08735	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08736	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08737	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08738	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08739	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08740	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08741	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08742	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08743	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08744	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08745	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08746	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08747	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08748	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08749	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08750	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08751	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08752	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08753	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08754	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08755	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08756	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08757	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08758	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08759	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08760	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08761	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08762	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08763	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08764	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08765	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08766	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08767	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08768	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08769	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08770	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	004	08771	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08772	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08773	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08774	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08775	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08776	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08777	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08778	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08779	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08780	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08781	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08782	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08783	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08784	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08785	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-enyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-enyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08786	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-enyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08787	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08788	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan ternak yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08789	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08790	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08791	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jpenyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08792	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08793	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	004	08794	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara sehingga nilai piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00338	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah setempat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah setempat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah setempat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00339	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah terpusat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah terpusat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi air limbah terpusat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00340	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Mas Rapid Transit (MRT) Project

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*mas rapid transit* (MRT) *project* sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mas rapid transit (MRT) project sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-mas rapid transit (MRT) project sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00341	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00342	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00343	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00344	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00345	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-sosial sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-sosial sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00346	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00347	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan Aceh sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan Aceh sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan Aceh sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00348	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00349	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00350	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00351	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00352	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00353	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00354	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00355	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubunga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubunga sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubunga sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00356	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00357	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00358	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00359	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00360	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00361	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00362	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00363	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00364	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00365	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00366	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	005	00367	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00368	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00369	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00370	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00371	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00372	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00373	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00374	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00375	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat Aceh sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat Aceh sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat Aceh sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	005	00376	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00377	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00378	Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00379	Penyisihan Piutang DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubunga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubunga sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubunga sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00380	Penyisihan Piutang DTI-Papua-Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00381	Penyisihan Piutang DTI-Papua-Air Bersih

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00382	Penyisihan Piutang DTI-Papua-Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00383	Penyisihan Piutang DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00384	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00385	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00386	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00387	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00388	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00389	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00390	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	005	00391	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00392	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00393	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00394	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00395	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00396	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pertanahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pertanahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pertanahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00397	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-sosial sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-sosial sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00398	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00399	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	005	00400	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-implmentasi syariat Islam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-implmentasi syariat Islam sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-implmentasi syariat Islam sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00401	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00402	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak dan bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00403	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00404	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00405	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00406	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00407	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00408	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00409	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00410	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00411	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00412	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00413	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	005	00414	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00415	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00416	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00417	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00418	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
1	1	10	01	005	00419	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00420	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00421	Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00422	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative (READ-SI)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00423	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project* (UPLAND) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project* (UPLAND) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project* (UPLAND) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00424	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00425	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ Palembang *City Sewerage Project* (PCSP)
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/Palembang *city sewerage project* (PCSP) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hinstalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/Palembang *city sewerage project* (PCSP) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota Palembang/Palembang *city sewerage project* (PCSP) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00426	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BIO CF ISFL)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape* (BIO CF ISFL) sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape* (BIO CF ISFL) sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape* (BIO CF ISFL) sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00427	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00428	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00429	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00430	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00431	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00432	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00433	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00434	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00435	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00436	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00437	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00438	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00439	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00440	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00441	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00442	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00443	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00444	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00445	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00446	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00447	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	1	10	01	005	00448	Penyisihan Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sejak periode piutang tersebut timbul yang bukan merupakan penghapusan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sejak periode piutang sehingga nilai piutang penyisihan piutang dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian sejak periode piutang yang disajikan pada neraca mencerminkan nilai yang dapat ditagih.
1	4	02				Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
1	4	02	01			Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
1	4	02	01	001		Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
1	4	02	01	001	00001	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
						Digunakan untuk mencatat dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...
1	4	03				Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
1	4	03	01			Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
1	4	03	01	001		Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
1	4	03	01	001	00001	Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
						Digunakan untuk mencatat dana cadangan untuk pembayaran pokok sukuk berdasarkan peraturan daerah nomor ... tahun ...
2	1	02	07			Utang Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
2	1	02	07	001		Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	02	07	001	00001	Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari pemerintah.
2	1	02	07	001	00002	Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada peemerintah daerah.
2	1	02	07	001	00003	Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada peemerintah daerah.
2	1	02	07	002		Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
2	1	02	07	002	00001	Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
2	1	02	07	003		Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	02	07	003	00001	Utang Bunga Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.
2	1	02	07	004		Utang Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	02	07	004	00001	Utang Bunga Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat utang bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.
2	1	02	08			Utang Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
2	1	02	08	001		Utang Bunga Obligasi Daerah
2	1	02	08	001	00001	Utang Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang bunga obligasi daerah.
2	1	02	09			Utang Imbalan Pembiayaan Utang Daerah-Sukuk Daerah
2	1	02	09	001		Utang Imbalan Sukuk Daerah
2	1	02	09	001	00001	Utang Imbalan Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang imbalan sukuk daerah.
2	1	03	05			Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
2	1	03	05	001		Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah
2	1	03	05	001	00001	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	05	001	00002	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamnkan kepada pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	05	001	00003	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamnkan kepada pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	05	002		Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
2	1	03	05	002	00001	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah lain yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	05	003		Utang Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	03	05	003	00001	Utang Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	03	05	004		Utang Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	03	05	004	00001	Utang Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	06			Bagian Lancar Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
2	1	04	06	001		Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah
2	1	04	06	001	00001	Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari pemerintah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	06	001	00002	Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	06	001	00003	Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	06	002		Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	04	06	002	00001	Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	06	003		Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	1	04	06	003	00001	Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	04	06	004		Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	1	04	06	004	00001	Bagian Lancar Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat bagian lancar pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
2	1	06	02	002	01106	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.
2	1	06	02	002	01107	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.
2	1	06	02	002	01108	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.
2	1	06	02	002	01109	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.
2	1	06	02	002	01110	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.
2	1	06	02	002	01111	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.
2	1	06	02	002	01112	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.
2	1	06	02	002	01113	Utang Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.
2	1	06	02	002	01114	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	06	02	002	01115	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	06	02	002	01116	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	06	02	002	01117	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	06	02	002	01118	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	06	02	002	01119	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	06	02	002	01120	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	06	02	002	01121	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01122	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	06	02	002	01123	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	06	02	002	01124	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	06	02	002	01125	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	06	02	002	01126	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
2	1	06	02	002	01127	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	06	02	002	01128	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01129	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	06	02	002	01130	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	06	02	002	01131	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	06	02	002	01132	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	06	02	002	01133	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	06	02	002	01134	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	06	02	002	01135	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	06	02	002	01136	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	06	02	002	01137	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	06	02	002	01138	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	06	02	002	01139	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck.*
2	1	06	02	002	01140	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	06	02	002	01141	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01142	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	06	02	002	01143	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	06	02	002	01144	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
2	1	06	02	002	01145	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	06	02	002	01146	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	06	02	002	01147	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	06	02	002	01148	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	06	02	002	01149	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	06	02	002	01150	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
2	1	06	02	002	01151	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
2	1	06	02	002	01152	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
2	1	06	02	002	01153	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
2	1	06	02	002	01154	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01155	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
2	1	06	02	002	01156	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
2	1	06	02	002	01157	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.
2	1	06	02	002	01158	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.
2	1	06	02	002	01159	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.
2	1	06	02	002	01160	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.
2	1	06	02	002	01161	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.
2	1	06	02	002	01162	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01163	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2	1	06	02	002	01164	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.
2	1	06	02	002	01165	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.
2	1	06	02	002	01166	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya.
2	1	06	02	002	01167	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.
2	1	06	02	002	01168	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.
2	1	06	02	002	01169	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.
2	1	06	02	002	01170	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
2	1	06	02	002	01171	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.
2	1	06	02	002	01172	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
2	1	06	02	002	01173	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisya.
2	1	06	02	002	01174	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.
2	1	06	02	002	01175	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
2	1	06	02	002	01176	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.
2	1	06	02	002	01177	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak biliar dan *bowling* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak biliar dan *bowling*.
2	1	06	02	002	01178	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
2	1	06	02	002	01179	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center)* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
2	1	06	02	002	01180	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.
2	1	06	02	002	01181	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron.
2	1	06	02	002	01182	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.
2	1	06	02	002	01183	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.
2	1	06	02	002	01184	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.
2	1	06	02	002	01185	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.
2	1	06	02	002	01186	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.
2	1	06	02	002	01187	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.
2	1	06	02	002	01188	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.
2	1	06	02	002	01189	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame *film/slide* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame *film/slide*.
2	1	06	02	002	01190	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.
2	1	06	02	002	01191	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
2	1	06	02	002	01192	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.
2	1	06	02	002	01193	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
2	1	06	02	002	01194	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
2	1	06	02	002	01195	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	06	02	002	01196	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.
2	1	06	02	002	01197	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.
2	1	06	02	002	01198	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01199	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.
2	1	06	02	002	01200	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.
2	1	06	02	002	01201	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.
2	1	06	02	002	01202	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit.
2	1	06	02	002	01203	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.
2	1	06	02	002	01204	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *felspar* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *felspar*.
2	1	06	02	002	01205	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*).
2	1	06	02	002	01206	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01207	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit.
2	1	06	02	002	01208	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.
2	1	06	02	002	01209	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.
2	1	06	02	002	01210	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.
2	1	06	02	002	01211	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.
2	1	06	02	002	01212	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.
2	1	06	02	002	01213	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.
2	1	06	02	002	01214	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.
2	1	06	02	002	01215	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.
2	1	06	02	002	01216	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak opsidien.
2	1	06	02	002	01217	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.
2	1	06	02	002	01218	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil.
2	1	06	02	002	01219	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.
2	1	06	02	002	01220	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.
2	1	06	02	002	01221	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat*.
2	1	06	02	002	01222	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *talk* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *talk*.
2	1	06	02	002	01223	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*).
2	1	06	02	002	01224	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome.
2	1	06	02	002	01225	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.
2	1	06	02	002	01226	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum).
2	1	06	02	002	01227	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.
2	1	06	02	002	01228	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif.
2	1	06	02	002	01229	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit.
2	1	06	02	002	01230	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal.
2	1	06	02	002	01231	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit.
2	1	06	02	002	01232	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan lainnya.
2	1	06	02	002	01233	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.
2	1	06	02	002	01234	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan bantuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
2	1	06	02	002	01235	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	06	02	002	01236	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
2	1	06	02	002	01237	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
2	1	06	02	002	01238	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
2	1	06	02	002	01239	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
2	1	06	02	002	01240	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
2	1	06	02	002	01241	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
2	1	06	02	002	01242	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
2	1	06	02	002	01243	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
2	1	06	02	002	01244	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
2	1	06	02	002	01245	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
2	1	06	02	002	01246	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
2	1	06	02	002	01247	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
2	1	06	02	002	01248	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
2	1	06	02	002	01249	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
2	1	06	02	002	01250	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisata pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisata pariwisata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01251	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
2	1	06	02	002	01252	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/ *resort* / yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
2	1	06	02	002	01253	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
2	1	06	02	002	01254	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
2	1	06	02	002	01255	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
2	1	06	02	002	01256	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01257	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
2	1	06	02	002	01258	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
2	1	06	02	002	01259	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
2	1	06	02	002	01260	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
2	1	06	02	002	01261	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
2	1	06	02	002	01262	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
2	1	06	02	002	01263	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
2	1	06	02	002	01264	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
2	1	06	02	002	01265	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
2	1	06	02	002	01266	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01267	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
2	1	06	02	002	01268	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
2	1	06	02	002	01269	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	06	02	002	01270	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	06	02	002	01271	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.
2	1	06	02	002	01272	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.
2	1	06	02	002	01273	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.
2	1	06	02	002	01274	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
2	1	06	02	002	01275	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
2	1	06	02	002	01276	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
2	1	06	02	002	01277	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di persampahan/kebersihan.
2	1	06	02	002	01278	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01279	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	06	02	002	01280	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	06	02	002	01281	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
2	1	06	02	002	01282	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
2	1	06	02	002	01283	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
2	1	06	02	002	01284	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01285	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
2	1	06	02	002	01286	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
2	1	06	02	002	01287	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
2	1	06	02	002	01288	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
2	1	06	02	002	01289	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01290	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
2	1	06	02	002	01291	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
2	1	06	02	002	01292	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
2	1	06	02	002	01293	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	06	02	002	01294	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
2	1	06	02	002	01295	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
2	1	06	02	002	01296	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
2	1	06	02	002	01297	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
2	1	06	02	002	01298	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
2	1	06	02	002	01299	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
2	1	06	02	002	01300	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
2	1	06	02	002	01301	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
2	1	06	02	002	01302	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	06	02	002	01303	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
2	1	06	02	002	01304	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	06	02	002	01305	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
2	1	06	02	002	01306	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01307	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
2	1	06	02	002	01308	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
2	1	06	02	002	01309	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
2	1	06	02	002	01310	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
2	1	06	02	002	01311	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
2	1	06	02	002	01312	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
2	1	06	02	002	01313	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
2	1	06	02	002	01314	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
2	1	06	02	002	01315	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
2	1	06	02	002	01316	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	06	02	002	01317	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	06	02	002	01318	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
2	1	06	02	002	01319	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
2	1	06	02	002	01320	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
2	1	06	02	002	01321	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
2	1	06	02	002	01322	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01323	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.
2	1	06	02	002	01324	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	06	02	002	01325	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	06	02	002	01326	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
2	1	06	02	002	01327	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
2	1	06	02	002	01328	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
2	1	06	02	002	01329	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
2	1	06	02	002	01330	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
2	1	06	02	002	01331	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
2	1	06	02	002	01332	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	06	02	002	01333	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	02	002	01334	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	06	02	002	01335	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	06	02	002	01336	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	06	02	002	01337	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
2	1	06	02	002	01338	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	06	02	002	01339	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.
2	1	06	02	002	01340	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	06	02	002	01341	Utang Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	06	02	002	01342	Utang Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
2	1	06	02	005	00017	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan *Block Seat*
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan *block seat*.
2	1	06	02	005	00018	Utang Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
						Digunakan untuk mencatat utang belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.
2	1	06	03	007		Utang Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
2	1	06	03	007	00001	Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah.
2	1	06	03	007	00002	Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	03	007	00003	Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
2	1	06	03	007	00004	Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
2	1	06	03	007	00005	Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).
2	1	06	03	007	00006	Utang Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
2	1	06	03	008		Utang Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
2	1	06	03	008	00001	Utang Belanja Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bunga obligasi daerah.
2	1	06	05	009		Utang Belanja Hibah kepada BUMDesa
2	1	06	05	009	00001	Utang Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada badan usaha milik desa.
2	1	06	05	009	00002	Utang Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada badan usaha milik desa.
2	1	06	05	009	00003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada badan usaha milik desa.
2	1	06	05	010		Utang Belanja Hibah kepada Koperasi
2	1	06	05	010	00001	Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah uang kepada koperasi.
2	1	06	05	010	00002	Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah barang kepada koperasi.
2	1	06	05	010	00003	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja hibah jasa kepada koperasi.
2	1	06	13	002	00002	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.
2	1	06	13	002	00003	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.
2	1	06	13	002	00004	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	06	13	002	00005	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	06	13	002	00006	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	06	13	002	00007	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.
2	1	06	13	002	00008	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.
2	1	06	13	002	00009	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	06	13	002	00010	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.
2	1	06	13	002	00011	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.
2	1	06	13	002	00012	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.
2	1	06	13	002	00013	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	06	13	002	00014	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	06	13	002	00015	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	06	13	002	00016	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubunga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubunga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubunga.
2	1	06	13	002	00017	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan infromatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan infromatika.
2	1	06	13	002	00018	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	06	13	002	00019	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.
2	1	06	13	002	00020	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.
2	1	06	13	002	00021	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.
2	1	06	13	002	00022	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.
2	1	06	13	002	00023	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.
2	1	06	13	002	00024	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.
2	1	06	13	002	00025	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.
2	1	06	13	002	00026	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan.
2	1	06	13	002	00027	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.
2	1	06	13	002	00028	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.
2	1	06	13	002	00029	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.
2	1	06	13	002	00030	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.
2	1	06	13	002	00031	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.
2	1	06	13	002	00032	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.
2	1	06	13	002	00033	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.
2	1	06	13	004	00002	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.
2	1	06	13	004	00003	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.
2	1	06	13	004	00004	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	06	13	004	00005	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	06	13	004	00006	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	06	13	004	00007	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.
2	1	06	13	004	00008	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.
2	1	06	13	004	00009	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	06	13	004	00010	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.
2	1	06	13	004	00011	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.
2	1	06	13	004	00012	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.
2	1	06	13	004	00013	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	06	13	004	00014	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	06	13	004	00015	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	06	13	004	00016	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus perhubunga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubunga.
2	1	06	13	004	00017	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
2	1	06	13	004	00018	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	06	13	004	00019	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.
2	1	06	13	004	00020	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
2	1	06	13	004	00021	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.
2	1	06	13	004	00022	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.
2	1	06	13	004	00023	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.
2	1	06	13	004	00024	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.
2	1	06	13	004	00025	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.
2	1	06	13	004	00026	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	13	004	00027	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.
2	1	06	13	004	00028	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.
2	1	06	13	004	00029	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.
2	1	06	13	004	00030	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
2	1	06	13	004	00031	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.
2	1	06	13	004	00032	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.
2	1	06	13	004	00033	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.
2	1	06	13	006	00002	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.
2	1	06	13	006	00003	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.
2	1	06	13	006	00004	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	06	13	006	00005	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	06	13	006	00006	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	06	13	006	00007	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.
2	1	06	13	006	00008	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	13	006	00009	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	06	13	006	00010	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.
2	1	06	13	006	00011	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.
2	1	06	13	006	00012	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.
2	1	06	13	006	00013	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.
2	1	06	13	006	00014	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	06	13	006	00015	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	06	13	006	00016	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubunga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubunga.
2	1	06	13	006	00017	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
2	1	06	13	006	00018	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	06	13	006	00019	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal.
2	1	06	13	006	00020	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
2	1	06	13	006	00021	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.
2	1	06	13	006	00022	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.
2	1	06	13	006	00023	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.
2	1	06	13	006	00024	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.
2	1	06	13	006	00025	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.
2	1	06	13	006	00026	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
2	1	06	13	006	00027	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.
2	1	06	13	006	00028	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.
2	1	06	13	006	00029	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.
2	1	06	13	006	00030	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
2	1	06	13	006	00031	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.
2	1	06	13	006	00032	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.
2	1	06	13	006	00033	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.
2	1	06	13	008	00002	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.
2	1	06	13	008	00003	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.
2	1	06	13	008	00004	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	06	13	008	00005	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	06	13	008	00006	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	06	13	008	00007	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.
2	1	06	13	008	00008	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.
2	1	06	13	008	00009	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	06	13	008	00010	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	13	008	00011	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.
2	1	06	13	008	00012	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.
2	1	06	13	008	00013	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	06	13	008	00014	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	06	13	008	00015	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	06	13	008	00016	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubunga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubunga.
2	1	06	13	008	00017	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.
2	1	06	13	008	00018	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	06	13	008	00019	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.
2	1	06	13	008	00020	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.
2	1	06	13	008	00021	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.
2	1	06	13	008	00022	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.
2	1	06	13	008	00023	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.
2	1	06	13	008	00024	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.
2	1	06	13	008	00025	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.
2	1	06	13	008	00026	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.
2	1	06	13	008	00027	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.
2	1	06	13	008	00028	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.
2	1	06	13	008	00029	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.
2	1	06	13	008	00030	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral.
2	1	06	13	008	00031	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.
2	1	06	13	008	00032	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.
2	1	06	13	008	00033	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.
2	1	06	13	010	00006	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.
2	1	06	13	010	00007	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.
2	1	06	13	010	00008	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	06	13	010	00009	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	06	13	010	00010	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	06	13	010	00011	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.
2	1	06	13	010	00012	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.
2	1	06	13	010	00013	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	06	13	010	00014	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.
2	1	06	13	010	00015	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.
2	1	06	13	010	00016	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.
2	1	06	13	010	00017	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	13	010	00018	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	06	13	010	00019	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	06	13	010	00020	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubunga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubunga.
2	1	06	13	010	00021	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.
2	1	06	13	010	00022	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	06	13	010	00023	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.
2	1	06	13	010	00024	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
2	1	06	13	010	00025	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.
2	1	06	13	010	00026	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.
2	1	06	13	010	00027	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.
2	1	06	13	010	00028	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.
2	1	06	13	010	00029	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.
2	1	06	13	010	00030	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perikanan.
2	1	06	13	010	00031	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.
2	1	06	13	010	00032	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.
2	1	06	13	010	00033	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	13	010	00034	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
2	1	06	13	010	00035	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.
2	1	06	13	010	00036	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.
2	1	06	13	010	00037	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.
2	1	06	13	010	00038	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.
2	1	06	13	010	00039	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.
2	1	06	13	010	00040	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	06	13	010	00041	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	06	13	010	00042	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	06	13	010	00043	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.
2	1	06	13	010	00044	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.
2	1	06	13	010	00045	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	06	13	010	00046	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.
2	1	06	13	010	00047	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.
2	1	06	13	010	00048	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.
2	1	06	13	010	00049	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	06	13	010	00050	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	06	13	010	00051	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	06	13	010	00052	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubunga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubunga.
2	1	06	13	010	00053	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.
2	1	06	13	010	00054	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	06	13	010	00055	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.
2	1	06	13	010	00056	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
2	1	06	13	010	00057	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.
2	1	06	13	010	00058	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.
2	1	06	13	010	00059	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.
2	1	06	13	010	00060	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.
2	1	06	13	010	00061	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.
2	1	06	13	010	00062	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	13	010	00063	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.
2	1	06	13	010	00064	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.
2	1	06	13	010	00065	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.
2	1	06	13	010	00066	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
2	1	06	13	010	00067	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.
2	1	06	13	010	00068	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.
2	1	06	13	010	00069	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.
2	1	06	16			Utang Belanja Bantuan Sosial
2	1	06	16	001		Utang Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Individu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	06	16	001	00001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu.
2	1	06	16	001	00002	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada individu.
2	1	06	16	002		Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga
2	1	06	16	002	00001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada keluarga.
2	1	06	16	002	00002	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada keluarga.
2	1	06	16	003		Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat
2	1	06	16	003	00001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
2	1	06	16	003	00002	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada kelompok masyarakat.
2	1	06	16	004		Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
2	1	06	16	004	00001	Utang Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
2	1	06	16	004	00002	Utang Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)
						Digunakan untuk mencatat utang belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya) yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja bantuan sosial barang yang direncanakan kepada lembaga non pemerintahan (bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya).
2	1	06	17			Utang Belanja Imbalan
2	1	06	17	001		Utang Belanja Imbalan Sukuk Daerah
2	1	06	17	001	00001	Utang Belanja Imbalan Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang belanja imbalan sukuk daerah yang belum dibayarkan pemerintah daerah yang disebabkan terjadinya transaksi belanja imbalan sukuk daerah.
2	1	07	01	004	07727	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran hasil pengelolaan dana cadangan.
2	1	07	01	004	07728	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Uang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah uang kepada badan usaha milik desa.
2	1	07	01	004	07729	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Barang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa.
2	1	07	01	004	07730	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Jasa kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07731	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi.
2	1	07	01	004	07732	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi.
2	1	07	01	004	07733	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi.
2	1	07	01	004	07734	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah.
2	1	07	01	004	07735	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah.
2	1	07	01	004	07736	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
2	1	07	01	004	07737	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
2	1	07	01	004	07738	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
2	1	07	01	004	07739	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).
2	1	07	01	004	07740	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
2	1	07	01	004	07741	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah.
2	1	07	01	004	07742	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua.
2	1	07	01	004	07743	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07744	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktrur-Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua.
2	1	07	01	004	07745	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua.
2	1	07	01	004	07746	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua.
2	1	07	01	004	07747	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh.
2	1	07	01	004	07748	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh.
2	1	07	01	004	07749	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh.
2	1	07	01	004	07750	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran jasa giro pada rekening kas dana abadi daerah.
2	1	07	01	004	07751	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan *Block Seat*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan *block seat*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07752	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-uang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.
2	1	07	01	004	07753	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.
2	1	07	01	004	07754	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.
2	1	07	01	004	07755	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.
2	1	07	01	004	07756	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.
2	1	07	01	004	07757	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.
2	1	07	01	004	07758	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.
2	1	07	01	004	07759	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.
2	1	07	01	004	07760	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.
2	1	07	01	004	07761	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.
2	1	07	01	004	07762	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.
2	1	07	01	004	07763	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	07	01	004	07764	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	07	01	004	07765	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	07	01	004	07766	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07767	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.
2	1	07	01	004	07768	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	07	01	004	07769	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.
2	1	07	01	004	07770	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.
2	1	07	01	004	07771	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07772	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	07	01	004	07773	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	07	01	004	07774	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	07	01	004	07775	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubunga.
2	1	07	01	004	07776	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.
2	1	07	01	004	07777	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	07	01	004	07778	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.
2	1	07	01	004	07779	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	01	004	07780	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07781	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.
2	1	07	01	004	07782	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.
2	1	07	01	004	07783	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.
2	1	07	01	004	07784	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.
2	1	07	01	004	07785	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07786	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.
2	1	07	01	004	07787	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.
2	1	07	01	004	07788	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.
2	1	07	01	004	07789	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.
2	1	07	01	004	07790	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07791	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.
2	1	07	01	004	07792	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.
2	1	07	01	004	07793	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.
2	1	07	01	004	07794	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.
2	1	07	01	004	07795	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	07	01	004	07796	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	07	01	004	07797	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	07	01	004	07798	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.
2	1	07	01	004	07799	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07800	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	07	01	004	07801	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.
2	1	07	01	004	07802	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.
2	1	07	01	004	07803	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.
2	1	07	01	004	07804	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	07	01	004	07805	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	07	01	004	07806	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	07	01	004	07807	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubunga.
2	1	07	01	004	07808	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
2	1	07	01	004	07809	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	07	01	004	07810	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.
2	1	07	01	004	07811	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	01	004	07812	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07813	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.
2	1	07	01	004	07814	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.
2	1	07	01	004	07815	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.
2	1	07	01	004	07816	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.
2	1	07	01	004	07817	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
2	1	07	01	004	07818	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.
2	1	07	01	004	07819	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.
2	1	07	01	004	07820	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.
2	1	07	01	004	07821	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07822	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.
2	1	07	01	004	07823	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.
2	1	07	01	004	07824	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.
2	1	07	01	004	07825	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.
2	1	07	01	004	07826	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.
2	1	07	01	004	07827	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	07	01	004	07828	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	07	01	004	07829	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	07	01	004	07830	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.
2	1	07	01	004	07831	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.
2	1	07	01	004	07832	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	07	01	004	07833	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.
2	1	07	01	004	07834	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07835	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.
2	1	07	01	004	07836	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	07	01	004	07837	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	07	01	004	07838	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07839	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubunga.
2	1	07	01	004	07840	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
2	1	07	01	004	07841	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	07	01	004	07842	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal.
2	1	07	01	004	07843	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	01	004	07844	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.
2	1	07	01	004	07845	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.
2	1	07	01	004	07846	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.
2	1	07	01	004	07847	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07848	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.
2	1	07	01	004	07849	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
2	1	07	01	004	07850	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.
2	1	07	01	004	07851	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.
2	1	07	01	004	07852	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.
2	1	07	01	004	07853	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
2	1	07	01	004	07854	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.
2	1	07	01	004	07855	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.
2	1	07	01	004	07856	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07857	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.
2	1	07	01	004	07858	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.
2	1	07	01	004	07859	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	07	01	004	07860	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07861	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	07	01	004	07862	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.
2	1	07	01	004	07863	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.
2	1	07	01	004	07864	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	07	01	004	07865	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.
2	1	07	01	004	07866	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.
2	1	07	01	004	07867	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.
2	1	07	01	004	07868	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	07	01	004	07869	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	07	01	004	07870	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	07	01	004	07871	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubunga.
2	1	07	01	004	07872	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.
2	1	07	01	004	07873	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	07	01	004	07874	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.
2	1	07	01	004	07875	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	01	004	07876	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.
2	1	07	01	004	07877	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07878	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.
2	1	07	01	004	07879	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.
2	1	07	01	004	07880	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.
2	1	07	01	004	07881	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.
2	1	07	01	004	07882	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.
2	1	07	01	004	07883	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.
2	1	07	01	004	07884	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.
2	1	07	01	004	07885	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral.
2	1	07	01	004	07886	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07887	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.
2	1	07	01	004	07888	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.
2	1	07	01	004	07889	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.
2	1	07	01	004	07890	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.
2	1	07	01	004	07891	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	07	01	004	07892	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
2	1	07	01	004	07893	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	07	01	004	07894	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.
2	1	07	01	004	07895	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.
2	1	07	01	004	07896	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
2	1	07	01	004	07897	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.
2	1	07	01	004	07898	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.
2	1	07	01	004	07899	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.
2	1	07	01	004	07900	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
2	1	07	01	004	07901	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	07	01	004	07902	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	07	01	004	07903	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubunga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubunga.
2	1	07	01	004	07904	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.
2	1	07	01	004	07905	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	07	01	004	07906	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.
2	1	07	01	004	07907	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	01	004	07908	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.
2	1	07	01	004	07909	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.
2	1	07	01	004	07910	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.
2	1	07	01	004	07911	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07912	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.
2	1	07	01	004	07913	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.
2	1	07	01	004	07914	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.
2	1	07	01	004	07915	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.
2	1	07	01	004	07916	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.
2	1	07	01	004	07917	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
2	1	07	01	004	07918	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.
2	1	07	01	004	07919	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.
2	1	07	01	004	07920	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07921	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.
2	1	07	01	004	07922	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.
2	1	07	01	004	07923	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
2	1	07	01	004	07924	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07925	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
2	1	07	01	004	07926	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.
2	1	07	01	004	07927	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.
2	1	07	01	004	07928	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07929	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.
2	1	07	01	004	07930	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.
2	1	07	01	004	07931	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.
2	1	07	01	004	07932	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07933	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
2	1	07	01	004	07934	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
2	1	07	01	004	07935	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubunga.
2	1	07	01	004	07936	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07937	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
2	1	07	01	004	07938	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.
2	1	07	01	004	07939	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	01	004	07940	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07941	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.
2	1	07	01	004	07942	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.
2	1	07	01	004	07943	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.
2	1	07	01	004	07944	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07945	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.
2	1	07	01	004	07946	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.
2	1	07	01	004	07947	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.
2	1	07	01	004	07948	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07949	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
2	1	07	01	004	07950	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.
2	1	07	01	004	07951	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.
2	1	07	01	004	07952	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.
2	1	07	01	004	07953	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	004	07954	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	004	07955	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	004	07956	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	07	01	004	07957	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	07	01	004	07958	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	004	07959	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	004	07960	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
2	1	07	01	004	07961	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	07	01	004	07962	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	004	07963	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	07	01	004	07964	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	07	01	004	07965	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
2	1	07	01	004	07966	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	07	01	004	07967	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	004	07968	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	004	07969	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	004	07970	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	07	01	004	07971	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	004	07972	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	004	07973	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	004	07974	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	07	01	004	07975	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	07	01	004	07976	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	004	07977	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	004	07978	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
2	1	07	01	004	07979	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	07	01	004	07980	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	004	07981	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07982	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	07	01	004	07983	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
2	1	07	01	004	07984	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	07	01	004	07985	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	004	07986	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	004	07987	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	004	07988	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	07989	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
2	1	07	01	004	07990	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
2	1	07	01	004	07991	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
2	1	07	01	004	07992	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
2	1	07	01	004	07993	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air permukaan.
2	1	07	01	004	07994	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rokok.
2	1	07	01	004	07995	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak hotel.
2	1	07	01	004	07996	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak motel.
2	1	07	01	004	07997	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Losmen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak losmen.
2	1	07	01	004	07998	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gubuk pariwisata.
2	1	07	01	004	07999	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak wisma pariwisata.
2	1	07	01	004	08000	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pesanggrahan.
2	1	07	01	004	08001	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08002	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2	1	07	01	004	08003	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak restoran dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08004	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak rumah makan dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08005	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kafetaria dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08006	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kantin dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08007	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak warung dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08008	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bar dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08009	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08010	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tontonan film.
2	1	07	01	004	08011	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
2	1	07	01	004	08012	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08013	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pameran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pameran.
2	1	07	01	004	08014	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08015	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sirkus/akrobat/sulap.
2	1	07	01	004	08016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak biliar dan *bowling*.
2	1	07	01	004	08017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
2	1	07	01	004	08018	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
2	1	07	01	004	08019	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pertandingan olahraga.
2	1	07	01	004	08020	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08021	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame kain.
2	1	07	01	004	08022	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame melekat/stiker.
2	1	07	01	004	08023	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame selebaran.
2	1	07	01	004	08024	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame berjalan.
2	1	07	01	004	08025	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame udara.
2	1	07	01	004	08026	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame apung.
2	1	07	01	004	08027	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame suara.
2	1	07	01	004	08028	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame *film/slide*.
2	1	07	01	004	08029	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Reklame Peragaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak reklame peragaan.
2	1	07	01	004	08030	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	004	08031	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak penerangan jalan sumber lain.
2	1	07	01	004	08032	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak parkir.
2	1	07	01	004	08033	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak air tanah.
2	1	07	01	004	08034	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	004	08035	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak asbes.
2	1	07	01	004	08036	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu tulis.
2	1	07	01	004	08037	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Setengah Permata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu setengah permata.
2	1	07	01	004	08038	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu kapur.
2	1	07	01	004	08039	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu apung.
2	1	07	01	004	08040	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak batu permata.
2	1	07	01	004	08041	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bentonit.
2	1	07	01	004	08042	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak dolomit.
2	1	07	01	004	08043	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *felspar*.
2	1	07	01	004	08044	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak garam batu (*halite*).
2	1	07	01	004	08045	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak grafit.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08046	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak granit/andesit.
2	1	07	01	004	08047	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak gips.
2	1	07	01	004	08048	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kalsit.
2	1	07	01	004	08049	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak kaolin.
2	1	07	01	004	08050	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak leusit.
2	1	07	01	004	08051	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak magnesit.
2	1	07	01	004	08052	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mika.
2	1	07	01	004	08053	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak marmer.
2	1	07	01	004	08054	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Nitrat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak nitrat.
2	1	07	01	004	08055	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak opsidien.
2	1	07	01	004	08056	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak oker.
2	1	07	01	004	08057	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir dan kerikil.
2	1	07	01	004	08058	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pasir kuarsa.
2	1	07	01	004	08059	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak perlit.
2	1	07	01	004	08060	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *phospat*.
2	1	07	01	004	08061	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak *talk*.
2	1	07	01	004	08062	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah serap (*fullers earth*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08063	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah diatome.
2	1	07	01	004	08064	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tanah liat.
2	1	07	01	004	08065	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tawas (alum).
2	1	07	01	004	08066	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak tras.
2	1	07	01	004	08067	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak yarosif.
2	1	07	01	004	08068	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak zeolit.
2	1	07	01	004	08069	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak basal.
2	1	07	01	004	08070	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak trakit.
2	1	07	01	004	08071	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
2	1	07	01	004	08072	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak belerang.
2	1	07	01	004	08073	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
2	1	07	01	004	08074	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	004	08075	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
2	1	07	01	004	08076	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
2	1	07	01	004	08077	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak alat berat.
2	1	07	01	004	08078	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08079	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
2	1	07	01	004	08080	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
2	1	07	01	004	08081	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
2	1	07	01	004	08082	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	004	08083	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
2	1	07	01	004	08084	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
2	1	07	01	004	08085	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
2	1	07	01	004	08086	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
2	1	07	01	004	08087	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
2	1	07	01	004	08088	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
2	1	07	01	004	08089	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
2	1	07	01	004	08090	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
2	1	07	01	004	08091	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
2	1	07	01	004	08092	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
2	1	07	01	004	08093	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
2	1	07	01	004	08094	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
2	1	07	01	004	08095	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
2	1	07	01	004	08096	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
2	1	07	01	004	08097	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
2	1	07	01	004	08098	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
2	1	07	01	004	08099	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08100	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
2	1	07	01	004	08101	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
2	1	07	01	004	08102	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08103	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
2	1	07	01	004	08104	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
2	1	07	01	004	08105	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
2	1	07	01	004	08106	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
2	1	07	01	004	08107	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
2	1	07	01	004	08108	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08109	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08110	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-denda pajak pejabat pembuat akta tanah atau notaris.
2	1	07	01	004	08111	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	004	08112	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	004	08113	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	004	08114	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	07	01	004	08115	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	07	01	004	08116	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	004	08117	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	004	08118	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
2	1	07	01	004	08119	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	07	01	004	08120	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	004	08121	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	07	01	004	08122	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	07	01	004	08123	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
2	1	07	01	004	08124	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	07	01	004	08125	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08126	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08127	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	004	08128	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	07	01	004	08129	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	004	08130	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	004	08131	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	004	08132	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	07	01	004	08133	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	07	01	004	08134	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	004	08135	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	004	08136	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
2	1	07	01	004	08137	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	07	01	004	08138	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	004	08139	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	07	01	004	08140	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08141	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
2	1	07	01	004	08142	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	07	01	004	08143	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08144	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08145	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	004	08146	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	07	01	004	08147	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08148	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
2	1	07	01	004	08149	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
2	1	07	01	004	08150	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
2	1	07	01	004	08151	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air permukaan.
2	1	07	01	004	08152	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rokok.
2	1	07	01	004	08153	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak hotel.
2	1	07	01	004	08154	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak motel.
2	1	07	01	004	08155	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak losmen.
2	1	07	01	004	08156	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Gubuk Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gubuk pariwisata.
2	1	07	01	004	08157	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak wisma pariwisata.
2	1	07	01	004	08158	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pesanggrahan.
2	1	07	01	004	08159	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08160	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2	1	07	01	004	08161	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak restoran dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08162	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak rumah makan dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08163	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kafetaria dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08164	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kantin dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08165	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak warung dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08166	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bar dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08167	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08168	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tontonan film.
2	1	07	01	004	08169	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
2	1	07	01	004	08170	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08171	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pameran.
2	1	07	01	004	08172	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08173	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sirkus/akrobat/sulap.
2	1	07	01	004	08174	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak permainan biliar dan *bowling*.
2	1	07	01	004	08175	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
2	1	07	01	004	08176	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran *(Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak panti pijat, refleksi,mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
2	1	07	01	004	08177	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pertandingan olahraga.
2	1	07	01	004	08178	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Papan/*Billboard* /Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame papan/*billboard* /videotron/megatron.
2	1	07	01	004	08179	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame kain.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08180	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame melekat/stiker.
2	1	07	01	004	08181	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame selebaran.
2	1	07	01	004	08182	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame berjalan.
2	1	07	01	004	08183	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame udara.
2	1	07	01	004	08184	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame apung.
2	1	07	01	004	08185	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame suara.
2	1	07	01	004	08186	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame *film/slide* .
2	1	07	01	004	08187	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak reklame peragaan.
2	1	07	01	004	08188	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	004	08189	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak penerangan jalan sumber lain.
2	1	07	01	004	08190	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak parkir.
2	1	07	01	004	08191	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak air tanah.
2	1	07	01	004	08192	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	004	08193	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak asbes.
2	1	07	01	004	08194	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu tulis.
2	1	07	01	004	08195	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu setengah permata.
2	1	07	01	004	08196	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu kapur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08197	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu apung.
2	1	07	01	004	08198	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak batu permata.
2	1	07	01	004	08199	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bentonit.
2	1	07	01	004	08200	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak dolomit.
2	1	07	01	004	08201	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *felspar*.
2	1	07	01	004	08202	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak garam batu (*halite*).
2	1	07	01	004	08203	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak grafit.
2	1	07	01	004	08204	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak granit/andesit.
2	1	07	01	004	08205	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Gips

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak gips.
2	1	07	01	004	08206	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kalsit.
2	1	07	01	004	08207	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak kaolin.
2	1	07	01	004	08208	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak leusit.
2	1	07	01	004	08209	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak magnesit.
2	1	07	01	004	08210	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mika.
2	1	07	01	004	08211	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak marmer.
2	1	07	01	004	08212	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak nitrat.
2	1	07	01	004	08213	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Opsidien
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak opsidien.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08214	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak oker.
2	1	07	01	004	08215	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir dan kerikil.
2	1	07	01	004	08216	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak pasir kuarsa.
2	1	07	01	004	08217	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak perlit.
2	1	07	01	004	08218	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *phospat*.
2	1	07	01	004	08219	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak *talk*.
2	1	07	01	004	08220	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah serap (*fullers earth*).
2	1	07	01	004	08221	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah diatome.
2	1	07	01	004	08222	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tanah Liat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tanah liat.
2	1	07	01	004	08223	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tawas (alum).
2	1	07	01	004	08224	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak tras.
2	1	07	01	004	08225	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak yarosif.
2	1	07	01	004	08226	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak zeolit.
2	1	07	01	004	08227	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak basal.
2	1	07	01	004	08228	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak trakit.
2	1	07	01	004	08229	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
2	1	07	01	004	08230	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak belerang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08231	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
2	1	07	01	004	08232	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBBP2
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	004	08233	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
2	1	07	01	004	08234	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
2	1	07	01	004	08235	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak alat berat.
2	1	07	01	004	08236	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
2	1	07	01	004	08237	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
2	1	07	01	004	08238	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
2	1	07	01	004	08239	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
2	1	07	01	004	08240	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	004	08241	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
2	1	07	01	004	08242	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
2	1	07	01	004	08243	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
2	1	07	01	004	08244	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
2	1	07	01	004	08245	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08246	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
2	1	07	01	004	08247	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
2	1	07	01	004	08248	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
2	1	07	01	004	08249	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
2	1	07	01	004	08250	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
2	1	07	01	004	08251	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-glamping.
2	1	07	01	004	08252	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08253	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir valet).
2	1	07	01	004	08254	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
2	1	07	01	004	08255	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
2	1	07	01	004	08256	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
2	1	07	01	004	08257	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
2	1	07	01	004	08258	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
2	1	07	01	004	08259	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
2	1	07	01	004	08260	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08261	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permaianan ketangkasan.
2	1	07	01	004	08262	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruangdan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
2	1	07	01	004	08263	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
2	1	07	01	004	08264	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08265	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, klab malam, bar, dan mandi uap/spa.
2	1	07	01	004	08266	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08267	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Bunga Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08268	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	004	08269	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	004	08270	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	004	08271	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	07	01	004	08272	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	07	01	004	08273	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	004	08274	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	004	08275	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
2	1	07	01	004	08276	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	07	01	004	08277	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	004	08278	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08279	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	07	01	004	08280	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
2	1	07	01	004	08281	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	07	01	004	08282	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08283	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08284	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	004	08285	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08286	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	004	08287	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	004	08288	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	004	08289	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	07	01	004	08290	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	07	01	004	08291	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	004	08292	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	004	08293	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
2	1	07	01	004	08294	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	07	01	004	08295	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	004	08296	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	07	01	004	08297	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	07	01	004	08298	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08299	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	07	01	004	08300	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08301	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08302	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	004	08303	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	07	01	004	08304	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
2	1	07	01	004	08305	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
2	1	07	01	004	08306	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
2	1	07	01	004	08307	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
2	1	07	01	004	08308	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air permukaan.
2	1	07	01	004	08309	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rokok.
2	1	07	01	004	08310	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak hotel.
2	1	07	01	004	08311	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak motel.
2	1	07	01	004	08312	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak losmen.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08313	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata.
2	1	07	01	004	08314	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak wisma pariwisata.
2	1	07	01	004	08315	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pesanggrahan.
2	1	07	01	004	08316	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08317	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2	1	07	01	004	08318	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08319	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08320	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08321	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08322	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08323	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08324	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08325	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tontonan film.
2	1	07	01	004	08326	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
2	1	07	01	004	08327	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08328	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pameran.
2	1	07	01	004	08329	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08330	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap.
2	1	07	01	004	08331	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak permainan biliar dan *bowling*.
2	1	07	01	004	08332	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
2	1	07	01	004	08333	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
2	1	07	01	004	08334	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga.
2	1	07	01	004	08335	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklamu papan/*billboard*/videotron/megatron.
2	1	07	01	004	08336	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame kain.
2	1	07	01	004	08337	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker.
2	1	07	01	004	08338	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame selebaran.
2	1	07	01	004	08339	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame berjalan.
2	1	07	01	004	08340	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame udara.
2	1	07	01	004	08341	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame apung.
2	1	07	01	004	08342	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame suara.
2	1	07	01	004	08343	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame *Film/Slide*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame *film/slide*.
2	1	07	01	004	08344	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak reklame peragaan.
2	1	07	01	004	08345	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan yang dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	004	08346	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain.
2	1	07	01	004	08347	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak parkir.
2	1	07	01	004	08348	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak air tanah.
2	1	07	01	004	08349	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	004	08350	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak asbes.
2	1	07	01	004	08351	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu tulis.
2	1	07	01	004	08352	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu setengah permata.
2	1	07	01	004	08353	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu kapur.
2	1	07	01	004	08354	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu apung.
2	1	07	01	004	08355	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak batu permata.
2	1	07	01	004	08356	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bentonit.
2	1	07	01	004	08357	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak dolomit.
2	1	07	01	004	08358	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *felspar*.
2	1	07	01	004	08359	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu (*Halite*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak garam batu (*halite*).
2	1	07	01	004	08360	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak grafit.
2	1	07	01	004	08361	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak granit/andesit.
2	1	07	01	004	08362	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak gips.
2	1	07	01	004	08363	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kalsit.
2	1	07	01	004	08364	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak kaolin.
2	1	07	01	004	08365	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak leusit.
2	1	07	01	004	08366	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak magnesit.
2	1	07	01	004	08367	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mika.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08368	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak maemer.
2	1	07	01	004	08369	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak nitrat.
2	1	07	01	004	08370	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *opsidien*.
2	1	07	01	004	08371	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak oker.
2	1	07	01	004	08372	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil.
2	1	07	01	004	08373	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak pasir kuarsa.
2	1	07	01	004	08374	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak perlit.
2	1	07	01	004	08375	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *phospat*.
2	1	07	01	004	08376	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak *Talk*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak *talk*.
2	1	07	01	004	08377	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah serap (*fullers earth*).
2	1	07	01	004	08378	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah diatome.
2	1	07	01	004	08379	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tanah liat.
2	1	07	01	004	08380	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tawas (alum).
2	1	07	01	004	08381	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak tras.
2	1	07	01	004	08382	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak yarosif.
2	1	07	01	004	08383	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak zeolit.
2	1	07	01	004	08384	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak basal.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08385	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak trakit.
2	1	07	01	004	08386	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
2	1	07	01	004	08387	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak belerang.
2	1	07	01	004	08388	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
2	1	07	01	004	08389	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBBP2
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	004	08390	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
2	1	07	01	004	08391	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
2	1	07	01	004	08392	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak alat berat.
2	1	07	01	004	08393	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
2	1	07	01	004	08394	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
2	1	07	01	004	08395	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
2	1	07	01	004	08396	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
2	1	07	01	004	08397	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	004	08398	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08399	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
2	1	07	01	004	08400	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
2	1	07	01	004	08401	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
2	1	07	01	004	08402	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
2	1	07	01	004	08403	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
2	1	07	01	004	08404	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
2	1	07	01	004	08405	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
2	1	07	01	004	08406	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
2	1	07	01	004	08407	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
2	1	07	01	004	08408	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
2	1	07	01	004	08409	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
2	1	07	01	004	08410	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
2	1	07	01	004	08411	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
2	1	07	01	004	08412	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
2	1	07	01	004	08413	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
2	1	07	01	004	08414	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
2	1	07	01	004	08415	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
2	1	07	01	004	08416	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
2	1	07	01	004	08417	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaran bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08418	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
2	1	07	01	004	08419	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat-ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
2	1	07	01	004	08420	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahanan ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
2	1	07	01	004	08421	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
2	1	07	01	004	08422	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
2	1	07	01	004	08423	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08424	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-Kenaikan Pokok Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah-kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08425	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.
2	1	07	01	004	08426	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.
2	1	07	01	004	08427	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.
2	1	07	01	004	08428	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
2	1	07	01	004	08429	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
2	1	07	01	004	08430	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
2	1	07	01	004	08431	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	07	01	004	08432	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	004	08433	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	004	08434	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	004	08435	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
2	1	07	01	004	08436	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
2	1	07	01	004	08437	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
2	1	07	01	004	08438	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08439	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	004	08440	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
2	1	07	01	004	08441	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
2	1	07	01	004	08442	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
2	1	07	01	004	08443	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
2	1	07	01	004	08444	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
2	1	07	01	004	08445	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
2	1	07	01	004	08446	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
2	1	07	01	004	08447	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	004	08448	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08449	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
2	1	07	01	004	08450	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
2	1	07	01	004	08451	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, timbang, dan perlengkapannya.
2	1	07	01	004	08452	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
2	1	07	01	004	08453	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
2	1	07	01	004	08454	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08455	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
2	1	07	01	004	08456	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	07	01	004	08457	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
2	1	07	01	004	08458	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	004	08459	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
2	1	07	01	004	08460	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	004	08461	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
2	1	07	01	004	08462	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
2	1	07	01	004	08463	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
2	1	07	01	004	08464	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
2	1	07	01	004	08465	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
2	1	07	01	004	08466	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08467	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08468	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
2	1	07	01	004	08469	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
2	1	07	01	004	08470	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08471	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08472	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
2	1	07	01	004	08473	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08474	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
2	1	07	01	004	08475	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
2	1	07	01	004	08476	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	07	01	004	08477	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.
2	1	07	01	004	08478	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	07	01	004	08479	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	07	01	004	08480	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
2	1	07	01	004	08481	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
2	1	07	01	004	08482	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
2	1	07	01	004	08483	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
2	1	07	01	004	08484	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
2	1	07	01	004	08485	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
2	1	07	01	004	08486	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, prtokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	07	01	004	08487	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalma lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08488	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalma lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08489	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	07	01	004	08490	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	004	08491	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08492	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	07	01	004	08493	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	004	08494	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	004	08495	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	004	08496	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	07	01	004	08497	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	07	01	004	08498	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.
2	1	07	01	004	08499	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
2	1	07	01	004	08500	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu.
2	1	07	01	004	08501	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.
2	1	07	01	004	08502	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.
2	1	07	01	004	08503	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	07	01	004	08504	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08505	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat.
2	1	07	01	004	08506	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.
2	1	07	01	004	08507	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.
2	1	07	01	004	08508	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.
2	1	07	01	004	08509	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
2	1	07	01	004	08510	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
2	1	07	01	004	08511	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
2	1	07	01	004	08512	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	07	01	004	08513	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	004	08514	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	004	08515	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	004	08516	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
2	1	07	01	004	08517	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
2	1	07	01	004	08518	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
2	1	07	01	004	08519	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08520	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	004	08521	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
2	1	07	01	004	08522	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
2	1	07	01	004	08523	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
2	1	07	01	004	08524	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
2	1	07	01	004	08525	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
2	1	07	01	004	08526	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
2	1	07	01	004	08527	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
2	1	07	01	004	08528	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	004	08529	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08530	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
2	1	07	01	004	08531	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
2	1	07	01	004	08532	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
2	1	07	01	004	08533	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
2	1	07	01	004	08534	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
2	1	07	01	004	08535	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08536	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
2	1	07	01	004	08537	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	07	01	004	08538	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
2	1	07	01	004	08539	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	004	08540	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
2	1	07	01	004	08541	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	004	08542	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
2	1	07	01	004	08543	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
2	1	07	01	004	08544	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
2	1	07	01	004	08545	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
2	1	07	01	004	08546	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
2	1	07	01	004	08547	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08548	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08549	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
2	1	07	01	004	08550	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
2	1	07	01	004	08551	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08552	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08553	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
2	1	07	01	004	08554	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08555	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
2	1	07	01	004	08556	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
2	1	07	01	004	08557	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
2	1	07	01	004	08558	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.
2	1	07	01	004	08559	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	07	01	004	08560	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	07	01	004	08561	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
2	1	07	01	004	08562	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
2	1	07	01	004	08563	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
2	1	07	01	004	08564	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
2	1	07	01	004	08565	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
2	1	07	01	004	08566	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
2	1	07	01	004	08567	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	07	01	004	08568	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08569	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08570	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	07	01	004	08571	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	004	08572	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08573	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	07	01	004	08574	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	004	08575	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	004	08576	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	004	08577	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
2	1	07	01	004	08578	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
2	1	07	01	004	08579	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.
2	1	07	01	004	08580	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
2	1	07	01	004	08581	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu.
2	1	07	01	004	08582	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.
2	1	07	01	004	08583	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.
2	1	07	01	004	08584	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
2	1	07	01	004	08585	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan tenaga kerja asing (TKA).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08586	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah-bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat.
2	1	07	01	004	08587	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	004	08588	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	004	08589	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	004	08590	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	07	01	004	08591	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	07	01	004	08592	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
2	1	07	01	004	08593	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	004	08594	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
2	1	07	01	004	08595	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*
2	1	07	01	004	08596	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	004	08597	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	07	01	004	08598	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
2	1	07	01	004	08599	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
2	1	07	01	004	08600	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
2	1	07	01	004	08601	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08602	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08603	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	004	08604	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	07	01	004	08605	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
2	1	07	01	004	08606	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
2	1	07	01	004	08607	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
2	1	07	01	004	08608	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
2	1	07	01	004	08609	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
2	1	07	01	004	08610	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08611	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban-*light truck*.
2	1	07	01	004	08612	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban-*truck*.
2	1	07	01	004	08613	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban-*blind van*.
2	1	07	01	004	08614	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda dua.
2	1	07	01	004	08615	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
2	1	07	01	004	08616	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08617	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor kendaraan khusus alat berat.
2	1	07	01	004	08618	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil roda tiga.
2	1	07	01	004	08619	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil penumpang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08620	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang-roda tiga.
2	1	07	01	004	08621	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor mobil barang/beban-*pick up box*.
2	1	07	01	004	08622	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
2	1	07	01	004	08623	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
2	1	07	01	004	08624	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
2	1	07	01	004	08625	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
2	1	07	01	004	08626	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
2	1	07	01	004	08627	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
2	1	07	01	004	08628	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok
2	1	07	01	004	08629	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08630	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.
2	1	07	01	004	08631	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.
2	1	07	01	004	08632	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.
2	1	07	01	004	08633	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.
2	1	07	01	004	08634	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.
2	1	07	01	004	08635	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08636	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2	1	07	01	004	08637	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08638	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08639	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08640	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08641	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08642	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08643	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08644	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.
2	1	07	01	004	08645	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
2	1	07	01	004	08646	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
2	1	07	01	004	08647	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.
2	1	07	01	004	08648	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejeninsnya.
2	1	07	01	004	08649	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.
2	1	07	01	004	08650	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan *bowling*.
2	1	07	01	004	08651	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
2	1	07	01	004	08652	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
2	1	07	01	004	08653	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.
2	1	07	01	004	08654	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron.
2	1	07	01	004	08655	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.
2	1	07	01	004	08656	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.
2	1	07	01	004	08657	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.
2	1	07	01	004	08658	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.
2	1	07	01	004	08659	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.
2	1	07	01	004	08660	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.
2	1	07	01	004	08661	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08662	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame *Film/Slide*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame *film/slide*.
2	1	07	01	004	08663	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.
2	1	07	01	004	08664	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	004	08665	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.
2	1	07	01	004	08666	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
2	1	07	01	004	08667	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
2	1	07	01	004	08668	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
2	1	07	01	004	08669	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.
2	1	07	01	004	08670	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.
2	1	07	01	004	08671	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata.
2	1	07	01	004	08672	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.
2	1	07	01	004	08673	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.
2	1	07	01	004	08674	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08675	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit.
2	1	07	01	004	08676	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.
2	1	07	01	004	08677	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Felspar*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *felspar*.
2	1	07	01	004	08678	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*).
2	1	07	01	004	08679	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.
2	1	07	01	004	08680	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit.
2	1	07	01	004	08681	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.
2	1	07	01	004	08682	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.
2	1	07	01	004	08683	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.
2	1	07	01	004	08684	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.
2	1	07	01	004	08685	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.
2	1	07	01	004	08686	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.
2	1	07	01	004	08687	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08688	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.
2	1	07	01	004	08689	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *opsidien*.
2	1	07	01	004	08690	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.
2	1	07	01	004	08691	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil.
2	1	07	01	004	08692	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.
2	1	07	01	004	08693	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.
2	1	07	01	004	08694	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Phospat*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat*.
2	1	07	01	004	08695	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Talk*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *talk*.
2	1	07	01	004	08696	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*).
2	1	07	01	004	08697	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome.
2	1	07	01	004	08698	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.
2	1	07	01	004	08699	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum).
2	1	07	01	004	08700	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08701	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif.
2	1	07	01	004	08702	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit.
2	1	07	01	004	08703	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal.
2	1	07	01	004	08704	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit.
2	1	07	01	004	08705	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
2	1	07	01	004	08706	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.
2	1	07	01	004	08707	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
2	1	07	01	004	08708	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
2	1	07	01	004	08709	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
2	1	07	01	004	08710	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
2	1	07	01	004	08711	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerahpajak alat berat.
2	1	07	01	004	08712	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
2	1	07	01	004	08713	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
2	1	07	01	004	08714	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
2	1	07	01	004	08715	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-komunikasi tenaga listrik dari sumber lain.
2	1	07	01	004	08716	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-komunikasi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
2	1	07	01	004	08717	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
2	1	07	01	004	08718	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
2	1	07	01	004	08719	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
2	1	07	01	004	08720	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
2	1	07	01	004	08721	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
2	1	07	01	004	08722	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
2	1	07	01	004	08723	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
2	1	07	01	004	08724	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
2	1	07	01	004	08725	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
2	1	07	01	004	08726	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
2	1	07	01	004	08727	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
2	1	07	01	004	08728	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
2	1	07	01	004	08729	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
2	1	07	01	004	08730	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08731	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
2	1	07	01	004	08732	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
2	1	07	01	004	08733	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
2	1	07	01	004	08734	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
2	1	07	01	004	08735	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
2	1	07	01	004	08736	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08737	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
2	1	07	01	004	08738	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
2	1	07	01	004	08739	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
2	1	07	01	004	08740	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08741	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotek, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
2	1	07	01	004	08742	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08743	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08744	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.
2	1	07	01	004	08745	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.
2	1	07	01	004	08746	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08747	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
2	1	07	01	004	08748	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
2	1	07	01	004	08749	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
2	1	07	01	004	08750	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
2	1	07	01	004	08751	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	004	08752	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
2	1	07	01	004	08753	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
2	1	07	01	004	08754	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
2	1	07	01	004	08755	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
2	1	07	01	004	08756	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
2	1	07	01	004	08757	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08758	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran/pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
2	1	07	01	004	08759	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran/pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
2	1	07	01	004	08760	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran/pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
2	1	07	01	004	08761	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
2	1	07	01	004	08762	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08763	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
2	1	07	01	004	08764	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
2	1	07	01	004	08765	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
2	1	07	01	004	08766	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	004	08767	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
2	1	07	01	004	08768	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
2	1	07	01	004	08769	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
2	1	07	01	004	08770	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
2	1	07	01	004	08771	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
2	1	07	01	004	08772	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
2	1	07	01	004	08773	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08774	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
2	1	07	01	004	08775	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
2	1	07	01	004	08776	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
2	1	07	01	004	08777	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
2	1	07	01	004	08778	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
2	1	07	01	004	08779	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
2	1	07	01	004	08780	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
2	1	07	01	004	08781	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
2	1	07	01	004	08782	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
2	1	07	01	004	08783	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
2	1	07	01	004	08784	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08785	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
2	1	07	01	004	08786	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
2	1	07	01	004	08787	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
2	1	07	01	004	08788	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
2	1	07	01	004	08789	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08790	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08791	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
2	1	07	01	004	08792	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
2	1	07	01	004	08793	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
2	1	07	01	004	08794	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
2	1	07	01	004	08795	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	01	004	08796	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.
2	1	07	01	004	08797	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
2	1	07	01	004	08798	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
2	1	07	01	004	08799	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
2	1	07	01	004	08800	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
2	1	07	01	004	08801	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
2	1	07	01	004	08802	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
2	1	07	01	004	08803	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
2	1	07	01	004	08804	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
2	1	07	01	004	08805	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
2	1	07	01	004	08806	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08807	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
2	1	07	01	004	08808	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
2	1	07	01	004	08809	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
2	1	07	01	004	08810	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
2	1	07	01	004	08811	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
2	1	07	01	004	08812	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
2	1	07	01	004	08813	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
2	1	07	01	004	08814	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
2	1	07	01	004	08815	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran jasa-jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
2	1	07	02	001	00343	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat.
2	1	07	02	001	00344	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat.
2	1	07	02	001	00345	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Mas Rapid Transit* (MRT) *Project*
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang dihibahkan-*mas rapid transit* (MRT) *project*.
2	1	07	02	001	00346	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
2	1	07	02	001	00347	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat.
2	1	07	02	001	00348	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan.
2	1	07	02	001	00349	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan.
2	1	07	02	001	00350	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-sosial.
2	1	07	02	001	00351	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan.
2	1	07	02	001	00352	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan aceh.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	001	00353	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian.
2	1	07	02	001	00354	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan.
2	1	07	02	001	00355	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan.
2	1	07	02	001	00356	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan.
2	1	07	02	001	00357	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur.
2	1	07	02	001	00358	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih.
2	1	07	02	001	00359	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik.
2	1	07	02	001	00360	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubunga.
2	1	07	02	001	00361	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan.
2	1	07	02	001	00362	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi.
2	1	07	02	001	00363	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan.
2	1	07	02	001	00364	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	02	001	00365	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2	1	07	02	001	00366	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat.
2	1	07	02	001	00367	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
2	1	07	02	001	00368	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan.
2	1	07	02	001	00369	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian.
2	1	07	02	001	00370	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan.
2	1	07	02	001	00371	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial.
2	1	07	02	001	00372	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik.
2	1	07	02	001	00373	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-pendidikan.
2	1	07	02	001	00374	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi.
2	1	07	02	001	00375	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-infrastruktur.
2	1	07	02	001	00376	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat.
2	1	07	02	001	00377	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan.
2	1	07	02	001	00378	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi.
2	1	07	02	001	00379	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	001	00380	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat.
2	1	07	02	001	00381	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan.
2	1	07	02	001	00382	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan.
2	1	07	02	001	00383	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat.
2	1	07	02	001	00384	Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubunga
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubunga.
2	1	07	02	001	00385	Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik.
2	1	07	02	001	00386	Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih.
2	1	07	02	001	00387	Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi.
2	1	07	02	001	00388	Utang Kelebihan Pembayaran DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan.
2	1	07	02	001	00389	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pendidikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	001	00390	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kesehatan.
2	1	07	02	001	00391	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur.
2	1	07	02	001	00392	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik.
2	1	07	02	001	00393	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kebudayaan.
2	1	07	02	001	00394	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-keistimewaan.
2	1	07	02	001	00395	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	02	001	00396	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi.
2	1	07	02	001	00397	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat.
2	1	07	02	001	00398	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
2	1	07	02	001	00399	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh penguatan kelembagaan.
2	1	07	02	001	00400	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh penguatan perdamaian.
2	1	07	02	001	00401	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh pertanahan.
2	1	07	02	001	00402	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh sosial.
2	1	07	02	001	00403	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh teknologi informasi dan komunikasi publik.
2	1	07	02	001	00404	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh administrasi pemerintahan.
2	1	07	02	001	00405	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh implementasi syariat Islam.
2	1	07	02	001	00406	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Penerapan Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh penerapan syariat Islam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	001	00407	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan.
2	1	07	02	001	00408	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan.
2	1	07	02	001	00409	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan.
2	1	07	02	001	00410	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur.
2	1	07	02	001	00411	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik.
2	1	07	02	001	00412	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan.
2	1	07	02	001	00413	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan.
2	1	07	02	001	00414	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga.
2	1	07	02	001	00415	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi.
2	1	07	02	001	00416	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat.
2	1	07	02	001	00417	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
2	1	07	02	001	00418	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan.
2	1	07	02	001	00419	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian.
2	1	07	02	001	00420	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan.
2	1	07	02	001	00421	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial.
2	1	07	02	001	00422	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik.
2	1	07	02	001	00423	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	001	00424	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam.
2	1	07	02	001	00425	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam.
2	1	07	02	001	00426	Utang Kelebihan Pembayaran DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan.
2	1	07	02	001	00427	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative* (READ-SI)
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*rural empowerment and agricultural development scaling up initiative* (READ-SI).
2	1	07	02	001	00428	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project* (UPLAND).
2	1	07	02	001	00429	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia.
2	1	07	02	001	00430	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang *City Sewerage Project* (PCSP)
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah kota Palembang/Palembang *city sewerage project* (PCSP).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	001	00431	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape (BIO CF ISFL)
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape* (BIO CF ISFL).
2	1	07	02	001	00432	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan.
2	1	07	02	001	00433	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar.
2	1	07	02	001	00434	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
2	1	07	02	001	00435	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional.
2	1	07	02	001	00436	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional.
2	1	07	02	001	00437	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
2	1	07	02	001	00438	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
2	1	07	02	001	00439	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi layanan dasar.
2	1	07	02	001	00440	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
2	1	07	02	001	00441	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar.
2	1	07	02	001	00442	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional.
2	1	07	02	001	00443	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional.
2	1	07	02	001	00444	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional.
2	1	07	02	001	00445	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional.
2	1	07	02	001	00446	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
2	1	07	02	001	00447	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
2	1	07	02	001	00448	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak.
2	1	07	02	001	00449	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.
2	1	07	02	001	00450	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah.
2	1	07	02	001	00451	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan.
2	1	07	02	001	00452	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian.
2	1	07	02	001	00453	Utang Kelebihan Pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK)-DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
						Digunakan untuk mencatat utang utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran dana alokasi khusus (DAK)-dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian.
2	1	07	03	002	00015	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi.
2	1	07	03	002	00016	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bonus produksi panas bumi.
2	1	07	03	002	00017	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Bonus Tanda Tangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh
						Digunakan untuk mencatat utang jangka pendek lainnya yang belum dibayarkan pemerintah daerah berupa kelebihan pembayaran pendapatan bonus tanda tangan dan bonus produksi pemerintah Aceh.
2	2	06				Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah
2	2	06	01			Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah
2	2	06	01	001		Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah
2	2	06	01	001	00001	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah.
2	2	06	02			Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
2	2	06	02	001		Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
2	2	06	02	001	00001	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
2	2	06	03			Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
2	2	06	03	001		Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
2	2	06	03	001	00001	Utang Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
2	2	07				Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
2	2	07	01			Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
2	2	07	01	001		Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
2	2	07	01	001	00001	Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat utang pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
2	2	08				Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2	2	08	01			Utang Pinjaman Daerah dari LKB
2	2	08	01	001		Utang Pinjaman Daerah dari LKB
2	2	08	01	001	00001	Utang Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.
2	2	09				Utang Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2	2	09	01			Utang Pinjaman Daerah dari LKBB
2	2	09	01	001		Utang Pinjaman Daerah dari LKBB
2	2	09	01	001	00001	Utang Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat utang pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.

J. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING-PENYUSUNAN ANGGARAN DAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	05	008		Jasa Giro pada Rekening Kas Otonomi Khusus
4	1	04	05	008	00001	Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-Papua.
4	1	04	05	008	00002	Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua.
4	1	04	05	008	00003	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktrur-Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua.
4	1	04	05	008	00004	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua.
4	1	04	05	008	00005	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam SDA pertambangan gas alam-Papua.
4	1	04	05	008	0006	Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh.
4	1	04	05	008	00007	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam SDA pertambangan minyak bumi-Aceh.
4	1	04	05	008	00008	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam SDA pertambangan gas alam-Aceh.
4	1	04	05	009		Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah
4	1	04	05	009	00001	Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening kas dana abadi daerah.
4	1	04	15	016	01106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.
4	1	04	15	016	01108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.
4	1	04	15	016	01109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.
4	1	04	15	016	01110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.
4	1	04	15	016	01111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.
4	1	04	15	016	01112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.
4	1	04	15	016	01113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.
4	1	04	15	016	01114	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	15	016	01115	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
4	1	04	15	016	01116	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	15	016	01117	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
4	1	04	15	016	01118	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
4	1	04	15	016	01119	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
4	1	04	15	016	01120	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
4	1	04	15	016	01121	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
4	1	04	15	016	01122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01123	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	15	016	01124	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	15	016	01125	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4	1	04	15	016	01126	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
4	1	04	15	016	01127	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	15	016	01128	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
4	1	04	15	016	01129	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
4	1	04	15	016	01130	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01131	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
4	1	04	15	016	01132	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
4	1	04	15	016	01133	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
4	1	04	15	016	01134	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
4	1	04	15	016	01135	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
4	1	04	15	016	01136	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
4	1	04	15	016	01137	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
4	1	04	15	016	01138	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01139	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
4	1	04	15	016	01140	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
4	1	04	15	016	01141	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
4	1	04	15	016	01142	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
4	1	04	15	016	01143	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
4	1	04	15	016	01144	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
4	1	04	15	016	01145	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
4	1	04	15	016	01146	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
4	1	04	15	016	01147	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
4	1	04	15	016	01148	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box.
4	1	04	15	016	01149	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
4	1	04	15	016	01150	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
4	1	04	15	016	01151	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
4	1	04	15	016	01152	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
4	1	04	15	016	01153	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01154	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
4	1	04	15	016	01155	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
4	1	04	15	016	01156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.
4	1	04	15	016	01157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.
4	1	04	15	016	01158	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.
4	1	04	15	016	01159	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.
4	1	04	15	016	01160	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.
4	1	04	15	016	01161	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.
4	1	04	15	016	01162	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01163	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
4	1	04	15	016	01164	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01165	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01166	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01167	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01168	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01169	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01170	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01171	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01172	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
4	1	04	15	016	01173	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01174	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.
4	1	04	15	016	01175	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
4	1	04	15	016	01176	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.
4	1	04	15	016	01177	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan Bowling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan bowling.
4	1	04	15	016	01178	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
4	1	04	15	016	01179	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*).
4	1	04	15	016	01180	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.
4	1	04	15	016	01181	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron.
4	1	04	15	016	01182	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.
4	1	04	15	016	01183	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.
4	1	04	15	016	01184	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.
4	1	04	15	016	01185	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.
4	1	04	15	016	01186	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.
4	1	04	15	016	01187	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.
4	1	04	15	016	01188	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.
4	1	04	15	016	01189	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Film/*Slide*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame film/*slide*.
4	1	04	15	016	01190	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.
4	1	04	15	016	01191	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
4	1	04	15	016	01192	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.
4	1	04	15	016	01193	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
4	1	04	15	016	01194	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
4	1	04	15	016	01195	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
4	1	04	15	016	01196	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.
4	1	04	15	016	01197	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.
4	1	04	15	016	01198	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata.
4	1	04	15	016	01199	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.
4	1	04	15	016	01200	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.
4	1	04	15	016	01201	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.
4	1	04	15	016	01202	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu bentonit.
4	1	04	15	016	01203	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.
4	1	04	15	016	01204	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak felspar.
4	1	04	15	016	01205	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*).
4	1	04	15	016	01206	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.
4	1	04	15	016	01207	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit.
4	1	04	15	016	01208	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.
4	1	04	15	016	01209	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.
4	1	04	15	016	01210	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.
4	1	04	15	016	01211	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.
4	1	04	15	016	01212	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.
4	1	04	15	016	01213	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.
4	1	04	15	016	01214	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.
4	1	04	15	016	01215	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.
4	1	04	15	016	01216	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *opsidien* .
4	1	04	15	016	01217	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.
4	1	04	15	016	01218	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil.
4	1	04	15	016	01219	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.
4	1	04	15	016	01220	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.
4	1	04	15	016	01221	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat*.
4	1	04	15	016	01222	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak talk.
4	1	04	15	016	01223	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*).
4	1	04	15	016	01224	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome.
4	1	04	15	016	01225	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.
4	1	04	15	016	01226	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum).
4	1	04	15	016	01227	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.
4	1	04	15	016	01228	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif.
4	1	04	15	016	01229	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit.
4	1	04	15	016	01230	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal.
4	1	04	15	016	01231	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit.
4	1	04	15	016	01232	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
4	1	04	15	016	01233	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.
4	1	04	15	016	01234	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
4	1	04	15	016	01235	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
4	1	04	15	016	01236	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
4	1	04	15	016	01237	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
4	1	04	15	016	01238	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
4	1	04	15	016	01239	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
4	1	04	15	016	01240	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
4	1	04	15	016	01241	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
4	1	04	15	016	01242	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
4	1	04	15	016	01243	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
4	1	04	15	016	01244	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
4	1	04	15	016	01245	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
4	1	04	15	016	01246	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
4	1	04	15	016	01247	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
4	1	04	15	016	01248	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
4	1	04	15	016	01249	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
4	1	04	15	016	01250	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
4	1	04	15	016	01251	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
4	1	04	15	016	01252	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
4	1	04	15	016	01253	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
4	1	04	15	016	01254	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
4	1	04	15	016	01255	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
4	1	04	15	016	01256	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
4	1	04	15	016	01257	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
4	1	04	15	016	01258	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
4	1	04	15	016	01259	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
4	1	04	15	016	01260	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
4	1	04	15	016	01261	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
4	1	04	15	016	01262	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
4	1	04	15	016	01263	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
4	1	04	15	016	01264	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
4	1	04	15	016	01265	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
4	1	04	15	016	01266	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01267	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
4	1	04	15	016	01268	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
4	1	04	15	016	01269	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.
4	1	04	15	016	01270	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
4	1	04	15	016	01271	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.
4	1	04	15	016	01272	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.
4	1	04	15	016	01273	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.
4	1	04	15	016	01274	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01275	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
4	1	04	15	016	01276	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
4	1	04	15	016	01277	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
4	1	04	15	016	01278	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
4	1	04	15	016	01279	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
4	1	04	15	016	01280	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
4	1	04	15	016	01281	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01282	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
4	1	04	15	016	01283	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
4	1	04	15	016	01284	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
4	1	04	15	016	01285	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
4	1	04	15	016	01286	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
4	1	04	15	016	01287	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
4	1	04	15	016	01288	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01289	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
4	1	04	15	016	01290	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
4	1	04	15	016	01291	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
4	1	04	15	016	01292	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
4	1	04	15	016	01293	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	15	016	01294	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
4	1	04	15	016	01295	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
4	1	04	15	016	01296	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
4	1	04	15	016	01297	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
4	1	04	15	016	01298	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
4	1	04	15	016	01299	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
4	1	04	15	016	01300	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
4	1	04	15	016	01301	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
4	1	04	15	016	01302	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01303	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
4	1	04	15	016	01304	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
4	1	04	15	016	01305	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
4	1	04	15	016	01306	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
4	1	04	15	016	01307	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
4	1	04	15	016	01308	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
4	1	04	15	016	01309	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
4	1	04	15	016	01310	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
4	1	04	15	016	01311	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
4	1	04	15	016	01312	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
4	1	04	15	016	01313	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
4	1	04	15	016	01314	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
4	1	04	15	016	01315	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
4	1	04	15	016	01316	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01317	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
4	1	04	15	016	01318	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
4	1	04	15	016	01319	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
4	1	04	15	016	01320	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
4	1	04	15	016	01321	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
4	1	04	15	016	01322	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
4	1	04	15	016	01323	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01324	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
4	1	04	15	016	01325	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
4	1	04	15	016	01326	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
4	1	04	15	016	01327	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
4	1	04	15	016	01328	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
4	1	04	15	016	01329	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
4	1	04	15	016	01330	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01331	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
4	1	04	15	016	01332	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
4	1	04	15	016	01333	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
4	1	04	15	016	01334	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
4	1	04	15	016	01335	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
4	1	04	15	016	01336	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	016	01337	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
4	1	04	15	016	01338	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
4	1	04	15	016	01339	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
4	1	04	15	016	01340	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
4	1	04	15	016	01341	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
4	1	04	15	016	01342	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
4	1	04	15	018	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan *Block Seat*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan *block seat*.
4	1	04	15	018	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	080	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.
4	1	04	15	080	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.
4	1	04	15	080	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
4	1	04	15	080	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
4	1	04	15	080	00007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4	1	04	15	080	00008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.
4	1	04	15	080	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	080	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4	1	04	15	080	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.
4	1	04	15	080	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.
4	1	04	15	080	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.
4	1	04	15	080	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4	1	04	15	080	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.
4	1	04	15	080	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	080	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.
4	1	04	15	080	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.
4	1	04	15	080	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
4	1	04	15	080	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.
4	1	04	15	080	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.
4	1	04	15	080	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.
4	1	04	15	080	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	080	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.
4	1	04	15	080	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.
4	1	04	15	080	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.
4	1	04	15	080	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan.
4	1	04	15	080	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.
4	1	04	15	080	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.
4	1	04	15	080	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.
4	1	04	15	080	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.
4	1	04	15	080	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.
4	1	04	15	080	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.
4	1	04	15	080	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.
4	1	04	15	081	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.
4	1	04	15	081	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.
4	1	04	15	081	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
4	1	04	15	081	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
4	1	04	15	081	00007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4	1	04	15	081	00008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.
4	1	04	15	081	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.
4	1	04	15	081	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4	1	04	15	081	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.
4	1	04	15	081	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	081	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.
4	1	04	15	081	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4	1	04	15	081	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
4	1	04	15	081	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4	1	04	15	081	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.
4	1	04	15	081	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
4	1	04	15	081	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
4	1	04	15	081	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.
4	1	04	15	081	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
4	1	04	15	081	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.
4	1	04	15	081	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.
4	1	04	15	081	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.
4	1	04	15	081	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	081	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.
4	1	04	15	081	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
4	1	04	15	081	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.
4	1	04	15	081	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.
4	1	04	15	081	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.
4	1	04	15	081	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
4	1	04	15	081	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.
4	1	04	15	081	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.
4	1	04	15	081	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.
4	1	04	15	082	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.
4	1	04	15	082	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.
4	1	04	15	082	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
4	1	04	15	082	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	082	00007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4	1	04	15	082	00008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.
4	1	04	15	082	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.
4	1	04	15	082	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4	1	04	15	082	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.
4	1	04	15	082	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.
4	1	04	15	082	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.
4	1	04	15	082	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4	1	04	15	082	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
4	1	04	15	082	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4	1	04	15	082	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan.
4	1	04	15	082	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
4	1	04	15	082	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	082	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal.
4	1	04	15	082	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
4	1	04	15	082	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.
4	1	04	15	082	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.
4	1	04	15	082	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.
4	1	04	15	082	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.
4	1	04	15	082	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.
4	1	04	15	082	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
4	1	04	15	082	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.
4	1	04	15	082	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.
4	1	04	15	082	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.
4	1	04	15	082	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
4	1	04	15	082	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	082	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.
4	1	04	15	082	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.
4	1	04	15	083	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.
4	1	04	15	083	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.
4	1	04	15	083	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
4	1	04	15	083	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
4	1	04	15	083	00007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4	1	04	15	083	00008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.
4	1	04	15	083	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.
4	1	04	15	083	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4	1	04	15	083	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.
4	1	04	15	083	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.
4	1	04	15	083	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	083	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4	1	04	15	083	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.
4	1	04	15	083	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4	1	04	15	083	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.
4	1	04	15	083	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.
4	1	04	15	083	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
4	1	04	15	083	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.
4	1	04	15	083	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.
4	1	04	15	083	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.
4	1	04	15	083	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.
4	1	04	15	083	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.
4	1	04	15	083	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.
4	1	04	15	083	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	083	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.
4	1	04	15	083	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.
4	1	04	15	083	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.
4	1	04	15	083	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.
4	1	04	15	083	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral.
4	1	04	15	083	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.
4	1	04	15	083	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.
4	1	04	15	083	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus Daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.
4	1	04	15	084	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.
4	1	04	15	084	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.
4	1	04	15	084	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
4	1	04	15	084	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
4	1	04	15	084	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	084	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.
4	1	04	15	084	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.
4	1	04	15	084	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4	1	04	15	084	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.
4	1	04	15	084	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.
4	1	04	15	084	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.
4	1	04	15	084	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4	1	04	15	084	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
4	1	04	15	084	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4	1	04	15	084	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.
4	1	04	15	084	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.
4	1	04	15	084	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
4	1	04	15	084	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.
4	1	04	15	084	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
4	1	04	15	084	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.
4	1	04	15	084	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.
4	1	04	15	084	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.
4	1	04	15	084	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.
4	1	04	15	084	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	084	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.
4	1	04	15	084	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.
4	1	04	15	084	00035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.
4	1	04	15	084	00036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.
4	1	04	15	084	00037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
4	1	04	15	084	00038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.
4	1	04	15	084	00039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.
4	1	04	15	084	00040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.
4	1	04	15	084	00041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.
4	1	04	15	084	00042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.
4	1	04	15	084	00043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
4	1	04	15	084	00044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
4	1	04	15	084	00045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
4	1	04	15	084	00046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.
4	1	04	15	084	00047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.
4	1	04	15	084	00048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4	1	04	15	084	00049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.
4	1	04	15	084	00050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.
4	1	04	15	084	00051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	084	00052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
4	1	04	15	084	00053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
4	1	04	15	084	00054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
4	1	04	15	084	00055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.
4	1	04	15	084	00056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.
4	1	04	15	084	00057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	084	00058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.
4	1	04	15	084	00059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
4	1	04	15	084	00060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.
4	1	04	15	084	00061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.
4	1	04	15	084	00062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.
4	1	04	15	084	00063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.
4	1	04	15	084	00064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.
4	1	04	15	084	00065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.
4	1	04	15	084	00066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.
4	1	04	15	084	00067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.
4	1	04	15	084	00068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.
4	1	04	15	084	00069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
4	1	04	15	084	00070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	084	00071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.
4	1	04	15	084	00072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.
4	1	04	15	091		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa
4	1	04	15	091	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada BUMDesa.
4	1	04	15	091	00002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada BUMDesa.
4	1	04	15	091	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada BUMDesa.
4	1	04	15	092		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi
4	1	04	15	092	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi.
4	1	04	15	092	00002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi.
4	1	04	15	092	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kepada koperasi.
4	1	04	15	093		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah
4	1	04	15	093	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan sukuk daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	15	094		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
4	1	04	15	094	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah.
4	1	04	15	094	00002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
4	1	04	15	094	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
4	1	04	15	094	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
4	1	04	15	094	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.
4	1	04	15	094	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.
4	1	04	15	095		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
4	1	04	15	095	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga obligasi daerah.
4	1	04	26			Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
4	1	04	26	001		Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
4	1	04	26	001	00001	Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari pengelolaan dana cadangan.
4	1	04	27			Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001		Pendapatan Denda Pajak Daerah
4	1	04	27	001	00001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001	00009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00018	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00019	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang sedan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00020	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang *jeep* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00021	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang minibus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00022	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00023	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001	00024	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00025	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00026	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00027	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00028	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00029	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00030	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00031	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00032	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00033	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00034	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00035	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00036	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00037	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00038	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00039	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00040	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00041	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak air permukaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00042	Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak rokok yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00043	Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00044	Pendapatan Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak motel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00045	Pendapatan Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak losmen yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00046	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak gubuk pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00047	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak wisma pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00048	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pesanggrahan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00049	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00050	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00051	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak restoran dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00052	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00053	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00054	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kantin dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00055	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak warung dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00056	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bar dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00057	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00058	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tontonan film yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00059	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00060	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00061	Pendapatan Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pameran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00062	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00063	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00064	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak permainan biliar dan bowling yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00065	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00066	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00067	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pertandingan olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00068	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame papan/*billboard* /videotron/megat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00069	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame kain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001	00070	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame melekat/stiker yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00071	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame selebaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00072	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame berjalan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00073	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame udara yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00074	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame apung yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00075	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame suara yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00076	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame film/*slide* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00077	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak reklame peragaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00078	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00079	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak penerangan jalan sumber lain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00080	Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak parkir yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00081	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak air tanah yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00082	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak sarang burung walet yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00083	Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak asbes yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00084	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu tulis yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00085	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu setengah permata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00086	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu kapur yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001	00087	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu apung yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00088	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak batu permata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00089	Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bentonit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00090	Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak dolomit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00091	Pendapatan Denda Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak felspar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00092	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak garam batu (*halite*) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00093	Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak grafit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00094	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak granit/andesit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00095	Pendapatan Denda Pajak Gips

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak gips yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00096	Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kalsit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00097	Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak kaolin yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00098	Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak leusit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00099	Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak magnesit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00100	Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak mika yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00101	Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak marmer yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00102	Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak nitrat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00103	Pendapatan Denda Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak *opsidien* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001	00104	Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak oker yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00105	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pasir dan kerikil yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00106	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak pasir kuarsa yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00107	Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak perlit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00108	Pendapatan Denda Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak *phospat* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00109	Pendapatan Denda Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak talk yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00110	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tanah serap (*fullers earth*) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00111	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tanah diatome yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00112	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tanah liat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00113	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tawas (alum) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00114	Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak tras yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00115	Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak yarosif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00116	Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak zeolit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00117	Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak basal yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00118	Pendapatan Denda Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak trakit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00119	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00120	Pendapatan Denda Pajak Belerang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak belerang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00121	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00122	Pendapatan Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00123	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00124	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00125	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak alat berat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00126	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda opsen mineral bukan logam dan banguna yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00127	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001	00128	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00129	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00130	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00131	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00132	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00133	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00134	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00135	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00136	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00137	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00138	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00139	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00140	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00141	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00142	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00143	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00144	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00145	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00146	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00147	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00148	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001	00149	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00150	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00151	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00152	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00153	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00154	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	001	00155	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00156	Pendapatan Denda Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda opsen pajak kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00157	Pendapatan Denda Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	001	00158	Pendapatan Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda pelanggaran kewajiban pejabat pembuat akta tanah atau notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah
4	1	04	27	002		Pendapatan Bunga Pajak Daerah
4	1	04	27	002	00001	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00002	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00003	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00004	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-*Microbus*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00005	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00006	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00007	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00008	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00009	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00010	Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00011	Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	002	00012	Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00013	Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00014	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00015	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00016	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00017	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00018	Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00019	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00020	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00021	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00022	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00023	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00024	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00025	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00026	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00027	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00028	Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00029	Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00030	Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00031	Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00032	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00033	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00034	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00035	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00036	Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00037	Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00038	Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00039	Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00040	Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00041	Pendapatan Bunga Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak air permukaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00042	Pendapatan Bunga Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak rokok yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00043	Pendapatan Bunga Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00044	Pendapatan Bunga Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak motel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00045	Pendapatan Bunga Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak losmen yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00046	Pendapatan Bunga Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak gubuk pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00047	Pendapatan Bunga Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak wisma pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00048	Pendapatan Bunga Pajak Pesanggrahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pesanggrahan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00049	Pendapatan Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00050	Pendapatan Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00051	Pendapatan Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak restoran dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00052	Pendapatan Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00053	Pendapatan Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00054	Pendapatan Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kantin dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00055	Pendapatan Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak warung dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00056	Pendapatan Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bar dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00057	Pendapatan Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00058	Pendapatan Bunga Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tontonan film yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00059	Pendapatan Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00060	Pendapatan Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00061	Pendapatan Bunga Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pameran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00062	Pendapatan Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00063	Pendapatan Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00064	Pendapatan Bunga Pajak Permainan Biliar dan Bowling

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak permainan biliar dan bowling yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00065	Pendapatan Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00066	Pendapatan Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00067	Pendapatan Bunga Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pertandingan olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00068	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00069	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame kain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00070	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame melekat/stiker yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00071	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame selebaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	002	00072	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame berjalan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00073	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame udara yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00074	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame apung yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00075	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame suara yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00076	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame film/*slide* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00077	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak reklame peragaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00078	Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00079	Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00080	Pendapatan Bunga Pajak Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak parkir yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00081	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak air tanah yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00082	Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak sarang burung walet yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00083	Pendapatan Bunga Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak asbes yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00084	Pendapatan Bunga Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu tulis yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00085	Pendapatan Bunga Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu setengah permata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00086	Pendapatan Bunga Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu kapur yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00087	Pendapatan Bunga Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu apung yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00088	Pendapatan Bunga Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak batu permata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	002	00089	Pendapatan Bunga Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bentonit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00090	Pendapatan Bunga Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak dolomit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00091	Pendapatan Bunga Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak felspar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00092	Pendapatan Bunga Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak garam batu (*halite*) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00093	Pendapatan Bunga Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak grafit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00094	Pendapatan Bunga Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak granit/andesit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00095	Pendapatan Bunga Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak gips yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00096	Pendapatan Bunga Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kalsit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00097	Pendapatan Bunga Pajak Kaolin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak kaolin yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00098	Pendapatan Bunga Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak leusit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00099	Pendapatan Bunga Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak magnesit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00100	Pendapatan Bunga Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak mika yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00101	Pendapatan Bunga Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak marmer yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00102	Pendapatan Bunga Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak nitrat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00103	Pendapatan Bunga Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak *opsidien* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00104	Pendapatan Bunga Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak oker yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00105	Pendapatan Bunga Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pasir dan kerikil yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	002	00106	Pendapatan Bunga Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak pasir kuarsa yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00107	Pendapatan Bunga Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak perlit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00108	Pendapatan Bunga Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak *phospat* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00109	Pendapatan Bunga Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak talk yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00110	Pendapatan Bunga Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tanah serap (*fullers earth*) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00111	Pendapatan Bunga Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tanah diatome yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00112	Pendapatan Bunga Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tanah liat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00113	Pendapatan Bunga Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tawas (alum) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00114	Pendapatan Bunga Pajak Tras

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak tras yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00115	Pendapatan Bunga Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak yarosif yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00116	Pendapatan Bunga Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak zeolit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00117	Pendapatan Bunga Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak basal yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00118	Pendapatan Bunga Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak trakit yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00119	Pendapatan Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00120	Pendapatan Bunga Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak belerang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00121	Pendapatan Bunga Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00122	Pendapatan Bunga PBBP2

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00123	Pendapatan Bunga BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00124	Pendapatan Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00125	Pendapatan Bunga Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak alat berat yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00126	Pendapatan Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok opsen mineral bukan logam dan batuan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00127	Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00128	Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00129	Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00130	Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00131	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00132	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00133	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00134	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00135	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00136	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00137	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00138	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00139	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/ *resort* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00140	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00141	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00142	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00143	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00144	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00145	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00146	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00147	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00148	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00149	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00150	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00151	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00152	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00153	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00154	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	002	00155	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00156	Pendapatan Bunga Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	002	00157	Pendapatan Bunga Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003		Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Daerah
4	1	04	27	003	00001	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00002	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00003	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00004	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00005	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00006	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00007	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00008	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00009	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00010	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00011	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00012	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00013	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00014	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00015	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00016	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00017	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00018	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00019	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00020	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok BBNKB-mobil penumpang-jeep yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00021	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00022	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Microbus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-microbus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00023	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00024	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00025	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-light truck yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00026	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00027	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-blind van yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00028	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00029	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00030	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00031	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00032	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	003	00033	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00034	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00035	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up box yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00036	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00037	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00038	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00039	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00040	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00041	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak air permukaan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00042	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak rokok yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00043	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak hotel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00044	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak motel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00045	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak losmen yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00046	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00047	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00048	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00049	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00050	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00051	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00052	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00053	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00054	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00055	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00056	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00057	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00058	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tontonan film yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00059	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00060	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00061	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pameran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00062	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00063	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00064	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan Bowling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak permainan biliar dan bowling yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00065	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00066	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00067	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00068	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame papan/*billboard*/videotron/megatron yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00069	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame kain yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00070	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00071	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00072	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00073	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame udara yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00074	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame apung yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00075	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame suara yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00076	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Film/*Slide*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame film/*slide* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00077	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00078	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00079	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00080	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak parkir yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00081	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak air tanah yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00082	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00083	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak asbes yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	003	00084	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu tulis yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00085	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00086	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu kapur yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00087	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu apung yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00088	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak batu permata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00089	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bentonit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00090	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak dolomit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00091	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak felspar yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00092	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu (*Halite*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak garam batu (*halite*) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00093	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak grafit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00094	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak granit/andesit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00095	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak gips yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00096	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kalsit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00097	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak kaolin yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00098	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak leusit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00099	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak magnesit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00100	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak mika yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00101	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak marmer yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00102	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak nitrat yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00103	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak *opsidien* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00104	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak oker yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00105	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00106	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00107	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak perlit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00108	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Phospat*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak *phospat* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00109	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak talk yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00110	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tanah serap (*fullers earth*) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00111	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tanah diatome yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00112	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tanah liat yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00113	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00114	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak tras yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00115	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak yarosif yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00116	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Zeolit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak zeolit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00117	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak basal yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00118	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak trakit yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00119	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00120	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak belerang yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00121	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00122	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBP2
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00123	Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-pemindahan hak yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	27	003	00124	Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-pemberian hak baru yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00125	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak alat berat yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00126	Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00127	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00128	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00129	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00130	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00131	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00132	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00133	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00134	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00135	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00136	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00137	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00138	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok PBJT-jasa perhotelan-pesanggrahan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00139	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse* /bungalo/ *resort* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00140	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00141	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00142	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00143	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00144	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00145	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00146	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00147	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00148	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00149	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00150	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00151	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00152	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00153	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00154	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00155	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00156	Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	27	003	00157	Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang kurang dibayar yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28			Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah
4	1	04	28	001		Pendapatan Denda Retribusi Daerah
4	1	04	28	001	00001	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00002	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00003	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00004	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00005	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00006	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00007	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00008	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00009	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pelayanan pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00010	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00011	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00012	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00013	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00014	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00015	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	28	001	00016	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00017	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00018	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00019	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00020	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00021	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00022	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00023	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00024	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00025	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00026	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00027	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00028	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00029	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00030	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00031	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00032	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00033	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00034	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	28	001	00035	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00036	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00037	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00038	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00039	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00040	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00041	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00042	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00043	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00044	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00045	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00046	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00047	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00048	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00049	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00050	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00051	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00052	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00053	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	28	001	00054	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00055	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00056	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00057	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00058	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00059	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00060	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00061	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00062	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00063	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00064	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00065	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	28	001	00066	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00067	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00068	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00069	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00070	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00071	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00072	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00073	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00074	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00075	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00076	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00077	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00078	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	28	001	00079	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00080	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	001	00081	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002		Pendapatan Bunga Retribusi Daerah
4	1	04	28	002	00001	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00002	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00003	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00004	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00005	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00006	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00007	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00008	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00009	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pelayanan pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00010	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00011	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00012	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00013	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00014	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00015	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00016	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00017	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00018	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00019	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00020	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00021	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00022	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta penyediaan peta teknis (struktur) yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00023	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00024	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00025	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00026	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00027	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00028	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00029	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00030	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00031	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00032	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00033	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00034	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	28	002	00035	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00036	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00037	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00038	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00039	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00040	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00041	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00042	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00043	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00044	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00045	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00046	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00047	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00048	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00049	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00050	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00051	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00052	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00053	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00054	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00055	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00056	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00057	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00058	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00059	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	28	002	00060	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00061	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00062	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00063	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00064	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00065	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00066	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00067	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00068	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00069	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00070	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00071	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00072	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00073	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00074	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00075	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00076	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00077	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	1	04	28	002	00078	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00079	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00080	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	1	04	28	002	00081	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan atas sanksi administratif berupa bunga dari retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang terutang yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi daerah atau dokumen lain yang dipersamakan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah.
4	2	01	03	003	00002	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	003	00003	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	003	00004	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pengentasan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	003	00005	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	003	00006	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	003	00007	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	003	00008	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-pelaksanaan keistimewaan Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	003	00009	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus-Aceh-penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008		Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
4	2	01	03	008	'00001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	'00002	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	'00003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	'00004	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	'00005	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	'00006	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur energi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	'00007	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	03	008	'00008	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	'00009	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-infrastruktur telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00010	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00011	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00013	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00014	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00015	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00016	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00017	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	03	008	00018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	008	00019	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1%-Papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	009		DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
4	2	01	03	009	00001	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	009	00002	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	009	00003	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	009	00004	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	010		DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
4	2	01	03	010	00001	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	010	00002	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-kesehatan dan perbaikan gizi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	010	00003	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	010	00004	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	011		Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
4	2	01	03	011	00001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	011	00002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1,25%-Papua-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	011	00003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana otonomi khusus 1,25%-Papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	012		DTI-Papua
4	2	01	03	012	00001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	012	00002	DTI-Papua-Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-energi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	012	00003	DTI-Papua-Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	012	00004	DTI-Papua-Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	012	00005	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana tambahan infrastruktur-Papua-sanitasi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	03	013		DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
4	2	01	03	013	00001	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00002	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00003	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00004	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-infrastruktur energi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00005	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00006	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00007	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00008	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00009	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	03	013	00010	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00011	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penguatan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00012	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00013	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00014	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00015	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00016	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00017	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-implementasi syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	013	00018	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-penerapan syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	03	013	00019	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh-pengentasan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014		DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
4	2	01	03	014	00001	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00002	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00003	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00004	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-infrastruktur energi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00005	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00006	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-keistimewaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00007	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-kepemudaan dan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00008	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	03	014	00009	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemberdayaan masyarakat adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00010	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00011	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00012	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penguatan perdamaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00013	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00014	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00015	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00016	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-administrasi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00017	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-implementasi syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00018	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-penerapan syariat Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	03	014	00019	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh-pengentasan kemiskinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00103	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00104	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00105	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00106	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00107	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00109	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00110	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00111	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00112	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00113	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00114	DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00115	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00116	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	001	00117	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	002	00040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	002	00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	002	00042	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	002	00043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	002	00044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang bersumber dari APBN berupa dana alokasi khusus nonfisik-bantuan operasional penyuluh pertanian yang dialokasikan dan diperuntukkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	003		Hibah kepada Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	003	00001	Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	003	00002	Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	003	00003	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Mass Rapid Transit* (MRT) *Project*
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*mass rapid transit project* dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	003	00004	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative* (READ-SI)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*rural empowerment and agricultural development scaling up initiative* dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	003	00005	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project* dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	003	00006	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah Australia dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	2	01	09	003	00007	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang *City Sewerage Project* (PCSP)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk Kota Palembang/Palembang *City sewerage project* dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
4	2	01	09	003	00008	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BIO CF ISFL)
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dana alokasi khusus berupa hibah kepada daerah berupa hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape* dalam rangka mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03	05			Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
4	3	03	05	001		Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
4	3	03	05	001	00001	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03	06			Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi
4	3	03	06	001		Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi
4	3	03	06	001	00001	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bonus produksi panas bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4	3	03	07			Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh
4	3	03	07	001		Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh
4	3	03	07	001	00001	Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bonus tandatangan dan bonus produksi Pemerintah Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	001	00083	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru.
5	1	02	02	001	00084	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.
5	1	02	02	001	00085	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.
5	1	02	02	001	00086	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	001	00087	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.
5	1	02	02	001	00088	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.
5	1	02	02	001	00089	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.
5	1	02	02	001	00090	Belanja Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.
5	1	02	02	017		Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah
5	1	02	02	017	00001	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00002	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00003	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00004	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00005	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00006	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00007	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00008	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00009	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00010	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00011	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00012	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00013	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00014	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00015	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00016	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00017	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00018	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00019	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil penumpang-sedan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00020	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil penumpang-*jeep* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00021	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil penumpang-minibus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00022	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil bus-*microbus* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00023	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Bus-Bus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil bus-bus dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00024	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban-*pick up* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00025	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban-*light truck* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00026	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban-*truck* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00027	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban-*blind van* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00028	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda dua dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00029	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00030	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00031	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-kendaraan khusus alat berat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00032	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00033	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil penumpang-roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00034	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang-roda tiga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00035	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-mobil barang/beban-*pick up box* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00036	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan BBNKB-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00037	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan PBBKB-bahan bakar bensin dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00038	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan PBBKB-bahan bakar solar dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00039	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan PBBKB-bahan bakar gas dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00040	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan PBBKB-bahan bakar lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00041	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Air Permukaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak air permukaan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00042	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak rokok dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00043	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak hotel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00044	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak motel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00045	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak losmen dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00046	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak gubuk pariwisata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00047	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak wisma pariwisata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00048	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pesanggrahan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00049	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak rumah penginapan dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00050	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00051	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak restoran dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00052	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak rumah makan dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00053	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kafetaria dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00054	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kantin dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00055	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak warung dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00056	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak bar dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00057	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00058	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tontonan film dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00059	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00060	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00061	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pameran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00062	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00063	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak sirkus/akrobat/sulap dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00064	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Permainan Biliar dan Bowling
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak permainan biliar dan bowling dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00065	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00066	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00067	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pertandingan olahraga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00068	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Papan/*Billboard*/Videotron/Megatron
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame papan/billboard/videotron/megatron dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00069	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame kain dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00070	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Melekat/Stiker

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame melekat/stiker dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00071	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame selebaran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00072	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame berjalan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00073	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame udara dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00074	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame apung dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00075	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame suara dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00076	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame film/*slide* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00077	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak reklame peragaan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00078	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00079	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak penerangan jalan sumber lain dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00080	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak parkir dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00081	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak air tanah dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00082	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak sarang burung walet dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00083	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak asbes dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00084	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu tulis dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00085	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu setengah permata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00086	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu kapur dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00087	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu apung dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00088	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak batu permata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00089	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak bentonit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00090	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak dolomit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00091	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak felspar dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00092	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak garam batu (*halite*) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00093	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak grafit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00094	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak granit/andesit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00095	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak gips dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00096	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kalsit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00097	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak kaolin dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00098	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak leusit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00099	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak magnesit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00100	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak mika dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00101	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak marmer dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00102	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak nitrat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00103	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak *opsidien* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00104	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak oker dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00105	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pasir dan kerikil dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00106	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak pasir kuarsa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00107	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak perlit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00108	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak *phospat* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00109	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak talk dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00110	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tanah serap (*fullers earth*) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00111	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tanah diatome dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00112	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tanah liat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00113	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tawas (alum) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00114	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak tras dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00115	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Yarosif

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak yarosif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00116	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak zeolit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00117	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak basal dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00118	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak trakit dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00119	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00120	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak belerang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00121	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak MBLB Ikutan dalam suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00122	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBP2
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00123	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00124	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00125	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Alat Berat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak alat berat dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00126	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan opsen MBLB dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00127	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00128	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00129	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00130	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00131	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00132	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00133	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00134	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00135	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00136	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00137	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00138	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00139	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00140	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00141	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00142	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00143	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00144	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00145	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00146	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00147	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00148	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00149	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	017	00150	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00151	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00152	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00153	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00154	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00155	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00156	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen PKB

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	017	00157	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018		Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah
5	1	02	02	018	00001	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00002	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00003	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00004	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00005	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00006	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	018	00007	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00008	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00009	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00010	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00011	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00012	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00013	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00014	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00015	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00016	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00017	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00018	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00019	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00020	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00021	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00022	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00023	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00024	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00025	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00026	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00027	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00028	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	018	00029	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00030	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00031	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00032	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00033	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00034	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00035	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	018	00036	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00037	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00038	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00039	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00040	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00041	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00042	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00043	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	018	00044	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00045	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00046	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00047	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00048	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00049	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00050	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	018	00051	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00052	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00053	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00054	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00055	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00056	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00057	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00058	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	02	02	018	00059	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00060	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00061	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00062	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00063	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00064	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00065	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00066	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00067	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00068	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00069	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00070	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	018	00071	Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah dalam rangka efisiensi dan efektivitas pemungutan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	02	019		Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
5	1	02	02	019	00001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa pelayanan kesehatan bagi ASN.
5	1	02	05	001	00015	Belanja Penyediaan Jaminan *Block Seat*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja jaminan *block seat* dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	02	05	001	00016	Belanja Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam dalam rangka memberikan perlindungan kepada nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5	1	03	07			Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
5	1	03	07	001		Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah
5	1	03	07	001	00001	Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah.
5	1	03	07	001	00002	Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
5	1	03	07	001	00003	Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
5	1	03	07	002		Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
5	1	03	07	002	00001	Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
5	1	03	07	003		Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
5	1	03	07	003	00001	Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.
5	1	03	07	004		Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
5	1	03	07	004	00001	Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.
5	1	03	08			Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	1	03	08	001		Belanja Bunga Obligasi Daerah
5	1	03	08	001	00001	Belanja Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat belanja bunga obligasi daerah.
5	1	05	09			Belanja Hibah kepada BUMDesa
5	1	05	09	001		Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa
5	1	05	09	001	00001	Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada badan usaha milik desa.
5	1	05	09	002		Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa
5	1	05	09	002	00001	Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah barang kepada badan usaha milik desa.
5	1	05	09	003		Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa
5	1	05	09	003	00001	Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah jasa kepada badan usaha milik desa.
5	1	05	10			Belanja Hibah kepada Koperasi
5	1	05	10	001		Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
5	1	05	10	001	00001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat belanja hibah uang kepada koperasi.
5	1	05	10	002		Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
5	1	05	10	002	00001	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat belanja barang kepada koperasi.
5	1	05	10	003		Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
5	1	05	10	003	00001	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat belanja jasa kepada koperasi.
5	1	07				Belanja Imbalan
5	1	07	01			Belanja Imbalan Sukuk Daerah
5	1	07	01	001		Belanja Imbalan Sukuk Daerah
5	1	07	01	001	00001	Belanja Imbalan Sukuk Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja dalam rangka pembayaran imbalan atas penerbitan sukuk daerah.
5	4	02	01	002	00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5	4	02	01	002	00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
5	4	02	01	002	00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5	4	02	01	002	00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5	4	02	01	002	00006	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5	4	02	01	002	00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.
5	4	02	01	002	00008	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.
5	4	02	01	002	00009	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5	4	02	01	002	00010	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.
5	4	02	01	002	00011	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.
5	4	02	01	002	00012	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
5	4	02	01	002	00013	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5	4	02	01	002	00014	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5	4	02	01	002	00015	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5	4	02	01	002	00016	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
5	4	02	01	002	00017	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.
5	4	02	01	002	00018	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
5	4	02	01	002	00019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.
5	4	02	01	002	00020	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.
5	4	02	01	002	00021	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.
5	4	02	01	002	00022	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.
5	4	02	01	002	00023	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
5	4	02	01	002	00024	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.
5	4	02	01	002	00025	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.
5	4	02	01	002	00026	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.
5	4	02	01	002	00027	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
5	4	02	01	002	00028	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.
5	4	02	01	002	00029	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.
5	4	02	01	002	00030	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
5	4	02	01	002	00031	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.
5	4	02	01	002	00032	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.
5	4	02	01	002	00033	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.
5	4	02	02	002	00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5	4	02	02	002	00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
5	4	02	02	002	00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5	4	02	02	002	00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5	4	02	02	002	00006	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5	4	02	02	002	00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.
5	4	02	02	002	00008	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.
5	4	02	02	002	00009	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5	4	02	02	002	00010	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.
5	4	02	02	002	00011	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.
5	4	02	02	002	00012	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
5	4	02	02	002	00013	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5	4	02	02	002	00014	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5	4	02	02	002	00015	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5	4	02	02	002	00016	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
5	4	02	02	002	00017	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.
5	4	02	02	002	00018	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
5	4	02	02	002	00019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.
5	4	02	02	002	00020	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.
5	4	02	02	002	00021	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.
5	4	02	02	002	00022	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.
5	4	02	02	002	00023	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
5	4	02	02	002	00024	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.
5	4	02	02	002	00025	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.
5	4	02	02	002	00026	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.
5	4	02	02	002	00027	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
5	4	02	02	002	00028	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.
5	4	02	02	002	00029	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.
5	4	02	02	002	00030	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
5	4	02	02	002	00031	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.
5	4	02	02	002	00032	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.
5	4	02	02	002	00033	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.
5	4	02	03	002	00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5	4	02	03	002	00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
5	4	02	03	002	00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5	4	02	03	002	00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5	4	02	03	002	00006	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	02	03	002	00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.
5	4	02	03	002	00008	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.
5	4	02	03	002	00009	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5	4	02	03	002	00010	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.
5	4	02	03	002	00011	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.
5	4	02	03	002	00012	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
5	4	02	03	002	00013	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5	4	02	03	002	00014	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5	4	02	03	002	00015	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	02	03	002	00016	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
5	4	02	03	002	00017	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.
5	4	02	03	002	00018	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
5	4	02	03	002	00019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.
5	4	02	03	002	00020	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.
5	4	02	03	002	00021	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.
5	4	02	03	002	00022	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.
5	4	02	03	002	00023	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
5	4	02	03	002	00024	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.
5	4	02	03	002	00025	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	02	03	002	00026	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.
5	4	02	03	002	00027	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
5	4	02	03	002	00028	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.
5	4	02	03	002	00029	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.
5	4	02	03	002	00030	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
5	4	02	03	002	00031	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.
5	4	02	03	002	00032	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.
5	4	02	03	002	00033	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.
5	4	02	04	002	00002	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5	4	02	04	002	00003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	02	04	002	00004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5	4	02	04	002	00005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5	4	02	04	002	00006	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5	4	02	04	002	00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.
5	4	02	04	002	00008	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.
5	4	02	04	002	00009	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5	4	02	04	002	00010	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.
5	4	02	04	002	00011	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.
5	4	02	04	002	00012	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
5	4	02	04	002	00013	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5	4	02	04	002	00014	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5	4	02	04	002	00015	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5	4	02	04	002	00016	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
5	4	02	04	002	00017	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.
5	4	02	04	002	00018	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
5	4	02	04	002	00019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.
5	4	02	04	002	00020	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.
5	4	02	04	002	00021	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.
5	4	02	04	002	00022	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	02	04	002	00023	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
5	4	02	04	002	00024	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.
5	4	02	04	002	00025	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.
5	4	02	04	002	00026	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.
5	4	02	04	002	00027	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
5	4	02	04	002	00028	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.
5	4	02	04	002	00029	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.
5	4	02	04	002	00030	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
5	4	02	04	002	00031	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.
5	4	02	04	002	00032	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
5	4	02	04	002	00033	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.
5	4	02	05	002	00006	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5	4	02	05	002	00007	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
5	4	02	05	002	00008	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5	4	02	05	002	00009	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5	4	02	05	002	00010	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5	4	02	05	002	00011	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.
5	4	02	05	002	00012	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.
5	4	02	05	002	00013	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5	4	02	05	002	00014	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.
5	4	02	05	002	00015	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.
5	4	02	05	002	00016	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
5	4	02	05	002	00017	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5	4	02	05	002	00018	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5	4	02	05	002	00019	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5	4	02	05	002	00020	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
5	4	02	05	002	00021	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.
5	4	02	05	002	00022	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
5	4	02	05	002	00023	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.
5	4	02	05	002	00024	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.
5	4	02	05	002	00025	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.
5	4	02	05	002	00026	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.
5	4	02	05	002	00027	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
5	4	02	05	002	00028	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.
5	4	02	05	002	00029	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.
5	4	02	05	002	00030	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.
5	4	02	05	002	00031	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
5	4	02	05	002	00032	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.
5	4	02	05	002	00033	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.
5	4	02	05	002	00034	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
5	4	02	05	002	00035	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.
5	4	02	05	002	00036	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.
5	4	02	05	002	00037	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.
5	4	02	05	002	00038	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan.
5	4	02	05	002	00039	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
5	4	02	05	002	00040	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
5	4	02	05	002	00041	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
5	4	02	05	002	00042	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
5	4	02	05	002	00043	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang sosial.
5	4	02	05	002	00044	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang tenaga kerja.
5	4	02	05	002	00045	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
5	4	02	05	002	00046	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pangan.
5	4	02	05	002	00047	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanahan.
5	4	02	05	002	00048	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup.
5	4	02	05	002	00049	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5	4	02	05	002	00050	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.
5	4	02	05	002	00051	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
5	4	02	05	002	00052	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan.
5	4	02	05	002	00053	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang komunikasi dan informatika.
5	4	02	05	002	00054	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
5	4	02	05	002	00055	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang penanaman modal.
5	4	02	05	002	00056	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kepemudaan dan olahraga.
5	4	02	05	002	00057	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang statistik.
5	4	02	05	002	00058	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang persandian.
5	4	02	05	002	00059	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kebudayaan.
5	4	02	05	002	00060	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perpustakaan.
5	4	02	05	002	00061	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kearsipan.
5	4	02	05	002	00062	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan.
5	4	02	05	002	00063	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pariwisata.
5	4	02	05	002	00064	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang pertanian.
5	4	02	05	002	00065	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang kehutanan.
5	4	02	05	002	00066	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang energi dan sumber daya mineral.
5	4	02	05	002	00067	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perdagangan.
5	4	02	05	002	00068	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang perindustrian.
5	4	02	05	002	00069	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat belanja bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa dalam rangka urusan pemerintahan daerah bidang transmigrasi.
6	1	01	01	004	00025	Pelampauan Penerimaan PAD-Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan PAD-hasil pengelolaan dana cadangan.
6	1	01	01	004	00026	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pendapatan atas sanksi administrasi pajak daerah.
6	1	01	01	004	00027	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan asli daerah-pendapatan atas sanksi administrasi retribusi daerah.
6	1	01	02	001	00338	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat.
6	1	01	02	001	00339	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	1	01	02	001	00340	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Mass Rapid Transit* (MRT) Project
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*mass rapid transit project*.
6	1	01	02	001	00341	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus 1%-Papua.
6	1	01	02	001	00342	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua.
6	1	01	02	001	00343	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua.
6	1	01	02	001	00344	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana otonomi khusus 1,25%-Papua.
6	1	01	02	001	00345	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DTI-Papua
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana tambahan infrastruktur-Papua.
6	1	01	02	001	00346	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh.
6	1	01	02	001	00347	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur-DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana otonomi khusus dan dana tambahan infrastruktur-dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh.
6	1	01	02	001	00348	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative* (READ-SI)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*rural empowerment and agricultural development scaling up initiative*.
6	1	01	02	001	00349	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project*.
6	1	01	02	001	00350	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan Pemerintah Australia.
6	1	01	02	001	00351	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/ Palembang *City Sewerage Project* (PCSP)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk Kota Palembang/Palembang *City Sewerage Project*.
6	1	01	02	001	00352	Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer-Transfer Pemerintah Pusat-Dana Alokasi Khusus (DAK)-Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BIO CF ISFL)
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pendapatan transfer-transfer pemerintah pusat-dana alokasi khusus-hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape*.
6	1	01	03	003	00002	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan Hibah Dana BOS

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan hibah dana bantuan operasional sekolah.
6	1	01	03	003	00003	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada pemerintah.
6	1	01	03	003	00004	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Pemerintah Daerah Lainnya
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada pemerintah daerah lainnya.
6	1	01	03	003	00005	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada badan usaha milik negara.
6	1	01	03	003	00006	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada badan usaha milik daerah.
6	1	01	03	003	00007	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan hukum Indonesia
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah pada badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
6	1	01	03	003	00008	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Pengembalian Hibah Bantuan Keuangan pada Partai Politik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas pengembalian hibah bantuan keuangan pada partai politik.
6	1	01	03	003	00009	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Lain-lain Pendapatan-Pendapatan atas Dana *Reducing Emission from Deforestration and Forest Degradation Results Based Payment*
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-lain-lain pendapatan-pendapatan atas dana *reducing emission from deforestration and forest degradation results based payment*.
6	1	01	03	003	00010	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama.
6	1	01	03	003	00011	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah provinsi.
6	1	01	03	003	00012	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Penghasil dalam Provinsi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah kabupaten/kota penghasil dalam provinsi.
6	1	01	03	003	00013	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara-Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara-bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus atas pertambangan mineral logam dan batu bara kepada pemerintah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi.
6	1	01	03	003	00014	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
6	1	01	03	003	00015	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi.
6	1	01	03	003	00016	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bonus produksi panas bumi.
6	1	01	03	003	00017	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah-Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah-lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan-pendapatan bonus tandatangan dan bonus produksi Pemerintah Aceh.
6	1	01	04	001	00002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi.
6	1	01	04	001	00003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pencairan dana cadangan untuk pembayaran pokok sukuk.
6	1	01	04	005		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
6	1	01	04	005	00001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-penerimaan kembali pinjaman melalui badan layanan umum daerah.
6	1	01	04	005	00002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Divestasi BLUD
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-divestasi badan layanan umum daerah.
6	1	01	04	006		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah
6	1	01	04	006	00001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-penarikan pokok dana abadi daerah dalam kondisi darurat.
6	1	01	04	007		Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
6	1	01	04	007	00001	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Pinjaman Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-pinjaman daerah.
6	1	01	04	007	00002	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-obligasi daerah.
6	1	01	04	007	00003	Pelampauan Penerimaan Pembiayaan-Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat pelampauan penerimaan pembiayaan-sukuk daerah.
6	1	01	05	001	00040	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah-hibah kepada badan usaha milik desa.
6	1	01	05	001	00041	Penghematan Belanja Hibah-Hibah kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja hibah-hibah kepada koperasi.
6	1	01	05	001	00042	Penghematan Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja imbalan-imbalan sukuk daerah.
6	1	01	05	001	00043	Penghematan Belanja Bunga-Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga-pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah.
6	1	01	05	001	00044	Penghematan Belanja Bunga-Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penghematan belanja bunga-pembiayaan utang daerah-obligasi daerah.
6	1	01	10			Sisa Dana Otonomi Khusus
6	1	01	10	001		Sisa Dana Otonomi Khusus-Papua
6	1	01	10	001	00001	Sisa Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
						Digunakan untuk mencatat sisa dana otonomi khusus 1%-Papua.
6	1	01	10	001	00002	Sisa Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat sisa dana otonomi khusus 1,25%-Papua.
6	1	01	10	001	00003	Sisa Dana Tambahan Infrastruktur-Papua
						Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan infrastruktur-Papua.
6	1	01	10	001	00004	Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
						Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan dana bagi hasi sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua.
6	1	01	10	001	00005	Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua
						Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan dana bagi hasi sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua.
6	1	01	10	002		Sisa Dana Otonomi Khusus-Aceh
6	1	01	10	002	00001	Sisa Dana Otonomi Khusus-Aceh
						Digunakan untuk mencatat sisa dana otonomi khusus-Aceh.
6	1	01	10	002	00002	Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
						Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan dana bagi hasi sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh.
6	1	01	10	002	00003	Sisa Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
						Digunakan untuk mencatat sisa dana tambahan dana bagi hasi sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh.
6	1	02	02			Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
6	1	02	02	001		Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
6	1	02	02	001	00001	Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
						Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi.
6	1	02	03			Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
6	1	02	03	001		Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
6	1	02	03	001	00001	Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
						Digunakan untuk mencatat pencairan dana cadangan untuk pembayaran pokok sukuk.
6	1	08				Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
6	1	08	01			Pinjaman Daerah
6	1	08	01	001		Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6	1	08	01	001	00001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah.
6	1	08	01	001	00002	Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
6	1	08	01	001	00003	Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
6	1	08	01	002		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	1	08	01	002	00001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
6	1	08	01	003		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	1	08	01	003	00001	Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.
6	1	08	01	004		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	1	08	01	004	00001	Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.
6	1	08	02			Obligasi Daerah
6	1	08	02	001		Obligasi Daerah
6	1	08	02	001	00001	Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pembiayaan utang daerah berupa obligasi daerah yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atas dana hasil penjualan obligasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	1	08	03			Sukuk Daerah
6	1	08	03	001		Sukuk Daerah
6	1	08	03	001	00001	Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat pembiayaan utang daerah berupa sukuk daerah yang diterbitkan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah atas dana hasil penjualan sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	01	02			Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
6	2	01	02	001		Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
6	2	01	02	001	00001	Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi
						Digunakan untuk mencatat pembentukan dana cadangan untuk pembayaran pokok obligasi.
6	2	01	03			Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
6	2	01	03	001		Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk
6	2	01	03	001	00001	Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pembentukan dana cadangan untuk pembayaran pokok sukuk.
6	2	07				Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah
6	2	07	01			Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah
6	2	07	01	001		Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah
6	2	07	01	001	00001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah.
6	2	07	01	001	00002	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
6	2	07	01	001	00003	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang Diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
6	2	07	01	002		Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
6	2	07	01	002	00001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah lain.
6	2	07	01	003		Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
6	2	07	01	003	0001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.
6	2	07	01	004		Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
6	2	07	01	004	00001	Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.
6	2	07	02			Pembelian Kembali Obligasi Daerah
6	2	07	02	001		Pembelian Kembali Obligasi Daerah
6	2	07	02	001	00001	Pembelian Kembali Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat pembelian kembali obligasi daerah yang diterbitkan yang diperlakukan sebagai pelunasan atas obligasi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6	2	07	03			Pembelian Kembali Sukuk Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
6	2	07	03	001		Pembelian Kembali Sukuk Daerah
6	2	07	03	001	00001	Pembelian Kembali Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat pembelian kembali sukuk daerah yang diterbitkan yang diperlakukan sebagai pelunasan atas sukuk daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

K. KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING-LAPORAN OPERASIONAL

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	05	008		Jasa Giro pada Rekening Kas Otonomi Khusus-LO
7	1	04	05	008	00001	Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus 1% Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	008	00002	Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	008	00003	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktrur-Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan infrastruktur-Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	008	00004	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	008	00005	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Papua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	008	00006	Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana otonomi khusus-Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	008	00007	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	008	00008	Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-Aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	05	009		Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah-LO
7	1	04	05	009	00001	Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan yang berasal dari bunga atas rekening giro pada rekening kas dana abadi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01106	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan guru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01107	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01108	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01109	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan tenaga teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01110	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01111	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01112	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01113	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01114	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01115	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01116	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01117	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01118	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01119	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01120	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01121	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01122	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01123	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01124	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01125	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01126	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01127	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01128	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01129	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01130	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01131	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01132	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01133	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01134	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01135	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01136	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01137	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01138	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01139	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01140	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01141	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01142	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01143	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01144	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01145	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01146	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01147	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01148	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01149	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01150	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01151	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01152	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01153	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01154	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01155	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01156	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01157	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01158	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01159	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01160	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01161	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01162	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01163	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01164	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01165	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01166	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01167	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01168	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01169	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01170	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01171	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01172	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01173	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01174	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pamaeran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01175	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01176	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01177	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan *bowling* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01178	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01179	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01180	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01181	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/Megatron*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01182	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01183	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01184	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01185	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01186	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01187	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01188	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01189	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Film/*Slide*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame film/*slide* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01190	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01191	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01192	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01193	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01194	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01195	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01196	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01197	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01198	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01199	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01200	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01201	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01202	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01203	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01204	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01205	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu (*Halite*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01206	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01207	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01208	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01209	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01210	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01211	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01212	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01213	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01214	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01215	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01216	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Opsidien*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *opsidien* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01217	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01218	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01219	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01220	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01221	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Phospat*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01222	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Talk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01223	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01224	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01225	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01226	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01227	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01228	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01229	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01230	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01231	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01232	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01233	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01234	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01235	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01236	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01237	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01238	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01239	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01240	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01241	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga dan katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01242	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01243	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01244	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01245	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01246	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01247	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01248	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01249	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01250	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01251	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01252	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01253	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribasi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01254	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01255	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01256	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01257	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01258	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01259	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01260	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01261	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01262	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01263	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01264	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01265	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01266	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01267	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01268	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajang barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01269	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01270	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01271	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01272	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01273	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01274	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01275	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01276	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01277	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01278	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01279	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01280	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01281	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01282	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01283	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01284	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01285	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01286	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01287	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01288	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01289	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01290	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01291	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01292	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyedia peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01293	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01294	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01295	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01296	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01297	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01298	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01299	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01300	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01301	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01302	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01303	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01304	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01305	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01306	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01307	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01308	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01309	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01310	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01311	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01312	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01313	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01314	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01315	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01316	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan tempat pelelangan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01317	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01318	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01319	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01320	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainyya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01321	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01322	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01323	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01324	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01325	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01326	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01327	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01328	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01329	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01330	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01331	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01332	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01333	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01334	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01335	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01336	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01337	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01338	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01339	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01340	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	016	01341	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	016	01342	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	018	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan Block Seat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan block seat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	018	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	080	00007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi dan kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	080	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	081	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	081	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	081	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	082	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	082	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00008	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	083	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	083	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	083	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	083	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	084	00012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00014	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00015	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00016	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00017	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00018	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00019	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00020	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00021	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00022	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00023	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00024	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00026	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00027	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00028	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00029	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00030	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00033	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00034	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00035	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00036	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00038	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00039	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00040	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00041	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00043	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00044	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00045	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00046	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00047	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00048	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00049	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00050	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00051	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00053	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00054	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00055	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	084	00056	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00057	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00058	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00059	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00060	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00062	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	084	00063	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00065	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00066	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00067	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00068	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00069	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	15	084	00070	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	084	00072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	091		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-LO
7	1	04	15	091	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada BUMDesa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada badan usaha milik desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	091	00002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada BUMDesa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada badan usaha milik desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	091	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada BUMDesa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada badan usaha milik desa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	092		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-LO
7	1	04	15	092	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah uang kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	092	00002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah barang kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	092	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah jasa kepada koperasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	093		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah-LO
7	1	04	15	093	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan-Imbalan Sukuk Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan-imbalan sukuk daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	094		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-LO
7	1	04	15	094	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjamin Daerah dari Pemerintah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjamin daerah dari pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	094	00002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjamin daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	094	00003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	094	00004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah daerah lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	094	00005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	094	00006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	15	095		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah-LO
7	1	04	15	095	00001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Obligasi Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga obligasi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	26			Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	26	001		Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO
7	1	04	26	001	00001	Hasil Pengelolaan Dana Cadangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan dari hasil pengelolaan dana cadangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27			Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah-LO
7	1	04	27	001		Pendapatan Denda-LO
7	1	04	27	001	00001	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00002	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00003	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00004	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00005	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00006	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00007	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00008	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00009	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00010	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00011	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	001	00012	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00013	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00014	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00018	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00019	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00020	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00021	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00022	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00023	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00024	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00025	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00026	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00027	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00028	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00029	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00030	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00031	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00032	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00033	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00034	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00035	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00036	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00037	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00038	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00039	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00040	Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00041	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00042	Pendapatan Denda Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00043	Pendapatan Denda Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00044	Pendapatan Denda Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00045	Pendapatan Denda Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00046	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00047	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00048	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00049	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	001	00050	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak rumah rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00051	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00052	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00053	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00054	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00055	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00056	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00057	Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00058	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00059	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00060	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00061	Pendapatan Denda Pajak Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00062	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00063	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	001	00064	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak permainan biliar dan *bowling* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00065	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00066	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00067	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00068	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/ Megatron*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00069	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00070	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00071	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00072	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00073	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00074	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00075	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00076	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/*Slide*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame film/*slide* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00077	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	001	00078	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00079	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00080	Pendapatan Denda Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00081	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00082	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00083	Pendapatan Denda Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00084	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00085	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00086	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00087	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00088	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00089	Pendapatan Denda Pajak Bentonit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00090	Pendapatan Denda Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00091	Pendapatan Denda Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00092	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (*Halite*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak garam batu (*halite* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00093	Pendapatan Denda Pajak Grafit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00094	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00095	Pendapatan Denda Pajak Gips-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00096	Pendapatan Denda Pajak Kalsit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00097	Pendapatan Denda Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00098	Pendapatan Denda Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00099	Pendapatan Denda Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00100	Pendapatan Denda Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00101	Pendapatan Denda Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00102	Pendapatan Denda Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00103	Pendapatan Denda Pajak *Opsidien*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak *opsidien* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00104	Pendapatan Denda Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00105	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00106	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00107	Pendapatan Denda Pajak Perlit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00108	Pendapatan Denda Pajak *Phospat*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak *phospat* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00109	Pendapatan Denda Pajak Talk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00110	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tanah serap (*fullers earth*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00111	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00112	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00113	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00114	Pendapatan Denda Pajak Tras-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00115	Pendapatan Denda Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00116	Pendapatan Denda Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00117	Pendapatan Denda Pajak Basal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00118	Pendapatan Denda Pajak Trakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00119	Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00120	Pendapatan Denda Pajak Belerang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00121	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00122	Pendapatan Denda PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	001	00123	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00124	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00125	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00126	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00127	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00128	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00129	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00130	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00131	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00132	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00133	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00134	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	001	00135	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00136	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00137	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00138	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00139	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00140	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00141	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00142	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-penyediaan dan penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00143	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00144	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya secara langsung langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00145	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	001	00146	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00147	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00148	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00149	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00150	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00151	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00152	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00153	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00154	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00155	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	001	00156	Pendapatan Denda Opsen PKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00157	Pendapatan Denda Opsen BBNKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda opsen bea balik kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	001	00158	Pendapatan Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002		Pendapatan Bunga-LO
7	1	04	27	002	00001	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00002	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00003	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00004	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00005	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00006	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00007	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00008	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00009	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00010	Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00011	Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00012	Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00013	Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00014	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00015	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00016	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00017	Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00018	Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00019	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00020	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00021	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00022	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00023	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00024	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00025	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00026	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00027	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00028	Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00029	Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00030	Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00031	Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00032	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00033	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00034	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00035	Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00036	Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00037	Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00038	Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00039	Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00040	Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00041	Pendapatan Bunga Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00042	Pendapatan Bunga Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00043	Pendapatan Bunga Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00044	Pendapatan Bunga Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00045	Pendapatan Bunga Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00046	Pendapatan Bunga Pajak Gubuk Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00047	Pendapatan Bunga Pajak Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00048	Pendapatan Bunga Pajak Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pesanggarahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	002	00049	Pendapatan Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00050	Pendapatan Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00051	Pendapatan Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00052	Pendapatan Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00053	Pendapatan Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00054	Pendapatan Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00055	Pendapatan Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00056	Pendapatan Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00057	Pendapatan Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00058	Pendapatan Bunga Pajak Tontonan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00059	Pendapatan Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00060	Pendapatan Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00061	Pendapatan Bunga Pajak Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00062	Pendapatan Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	002	00063	Pendapatan Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00064	Pendapatan Bunga Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak permainan biliar dan *bowling* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00065	Pendapatan Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00066	Pendapatan Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00067	Pendapatan Bunga Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00068	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/ Megatron*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00069	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Kain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00070	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00071	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Selebaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00072	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00073	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Udara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00074	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00075	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00076	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Film/*Slide*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame film/*slide* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	002	00077	Pendapatan Bunga Pajak Reklame Peragaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00078	Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00079	Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00080	Pendapatan Bunga Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00081	Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00082	Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00083	Pendapatan Bunga Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00084	Pendapatan Bunga Pajak Batu Tulis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00085	Pendapatan Bunga Pajak Batu Setengah Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00086	Pendapatan Bunga Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00087	Pendapatan Bunga Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00088	Pendapatan Bunga Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00089	Pendapatan Bunga Pajak Bentonit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00090	Pendapatan Bunga Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00091	Pendapatan Bunga Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00092	Pendapatan Bunga Pajak Garam Batu (*Halite*)-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak garam batu (*halite* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00093	Pendapatan Bunga Pajak Grafit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00094	Pendapatan Bunga Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00095	Pendapatan Bunga Pajak Gips-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00096	Pendapatan Bunga Pajak Kalsit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00097	Pendapatan Bunga Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00098	Pendapatan Bunga Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00099	Pendapatan Bunga Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00100	Pendapatan Bunga Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00101	Pendapatan Bunga Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00102	Pendapatan Bunga Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00103	Pendapatan Bunga Pajak *Opsidien*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak *opsidien* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00104	Pendapatan Bunga Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00105	Pendapatan Bunga Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00106	Pendapatan Bunga Pajak Pasir Kuarsa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00107	Pendapatan Bunga Pajak Perlit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00108	Pendapatan Bunga Pajak *Phospat*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak *phospat* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00109	Pendapatan Bunga Pajak Talk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00110	Pendapatan Bunga Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tanah serap (*fullers earth*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00111	Pendapatan Bunga Pajak Tanah Diatome-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00112	Pendapatan Bunga Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00113	Pendapatan Bunga Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00114	Pendapatan Bunga Pajak Tras-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00115	Pendapatan Bunga Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00116	Pendapatan Bunga Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00117	Pendapatan Bunga Pajak Basal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00118	Pendapatan Bunga Pajak Trakit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00119	Pendapatan Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00120	Pendapatan Bunga Pajak Belerang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00121	Pendapatan Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan-mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	002	00122	Pendapatan Bunga PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00123	Pendapatan Bunga BPHTB-Pemindahan Hak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00124	Pendapatan Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00125	Pendapatan Bunga Pajak Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00126	Pendapatan Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00127	Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00128	Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00129	Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00130	Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00131	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00132	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00133	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00134	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00135	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00136	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00137	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00138	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00139	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00140	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00141	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00142	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00143	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*) yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00144	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00145	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pagelaran kesenian, musik tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00146	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00147	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00148	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00149	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00150	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00151	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00152	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00153	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00154	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00155	Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00156	Pendapatan Bunga Opsen PKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	002	00157	Pendapatan Bunga Opsen BBNKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003		Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak-LO
7	1	04	27	003	00001	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00002	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00003	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00004	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00005	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00006	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00007	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00008	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00009	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00010	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00011	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00012	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00013	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00014	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00015	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00016	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00017	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00018	Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00019	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00020	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00021	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00022	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00023	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00024	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00025	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00026	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00027	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00028	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00029	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00030	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00031	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00032	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00033	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00034	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00035	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00036	Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00037	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00038	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00039	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00040	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00041	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak air permukaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00042	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rokok-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak rokok yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00043	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00044	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00045	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00046	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00047	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00048	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00049	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak rumah penginapan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00050	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00051	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00052	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00053	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00054	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00055	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00056	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00057	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak jasa boga/katering dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00058	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tontonan film yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00059	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00060	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00061	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00062	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00063	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00064	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak permainan biliar dan *bowling* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00065	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00066	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00067	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00068	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/*Billboard*/*Videotron*/*Megatron*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame papan/*billboard*/*videotron*/*megatron* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00069	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame kain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00070	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00071	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame selebaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00072	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame berjalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00073	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame udara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00074	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00075	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame suara yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00076	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Film/*Slide*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame film/*slide* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00077	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak reklame peragaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00078	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00079	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00080	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00081	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak air tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00082	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak sarang burung walet yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00083	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Asbes-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak asbes yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00084	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu tulis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00085	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu setengah permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00086	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu kapur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00087	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu apung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	003	00088	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak batu permata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00089	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bentonit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bentonit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00090	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Dolomit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak dolomit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00091	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Felspar-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak felspar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00092	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu (*Halite*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak garam batu (*halite*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00093	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Grafit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak grafit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00094	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak granit/andesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00095	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gips-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak gips yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00096	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kalsit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kalsit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00097	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kaolin-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak kaolin yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00098	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Leusit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak leusit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00099	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Magnesit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak magnesit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00100	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mika-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak mika yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00101	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Marmer-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak marmer yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00102	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Nitrat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak nitrat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	27	003	00103	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Opsidien*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak *opsidien* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00104	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Oker-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak oker yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00105	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00106	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak pasir kuarsa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00107	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Perlit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak perlit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00108	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Phospat*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak *phospat* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00109	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Talk-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak talk yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00110	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tanah serap (*fullers earth*) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00111	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tanah diatome yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00112	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tanah liat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00113	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tawas (alum) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00114	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tras-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak tras yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00115	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Yarosif-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak yarosif yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00116	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Zeolit-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak zeolit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00117	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Basal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak basal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00118	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Trakit-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak trakit yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00119	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00120	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Belerang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak belerang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00121	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00122	Pendapatan Kenaikan Pokok PBBP2-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00123	Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00124	Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00125	Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak alat berat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00126	Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00127	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00128	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00129	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00130	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00131	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00132	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00133	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00134	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00135	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00136	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00137	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00138	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00139	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00140	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00141	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00142	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00143	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet* yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00144	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00145	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00146	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00147	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00148	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00149	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00150	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00151	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00152	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00153	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00154	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00155	Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00156	Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen PKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	27	003	00157	Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen BBNKB-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan kenaikan pokok opsen bea balim nama kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28			Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah-LO
7	1	04	28	001		Pendapatan Denda-LO
7	1	04	28	001	00001	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00002	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00003	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00004	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	001	00005	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00006	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00007	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang sejenis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00008	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00009	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00010	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00011	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00012	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00013	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00014	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00015	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00016	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00017	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00018	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00019	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00020	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00021	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00022	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00023	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00024	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00025	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00026	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00027	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00028	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00029	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00030	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00031	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00032	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00033	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00034	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00035	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	001	00036	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00037	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00038	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00039	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00040	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00041	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00042	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00043	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00044	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00045	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00046	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	001	00047	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00048	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00049	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00050	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00051	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00052	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00053	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00054	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00055	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00056	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00057	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	001	00058	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00059	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00060	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00061	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00062	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00063	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00064	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00065	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00066	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00067	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00068	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00069	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00070	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00071	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00072	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00073	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00074	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00075	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00076	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu intas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00077	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu intas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00078	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu intas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00079	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00080	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	001	00081	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002		Pendapatan Bunga-LO
7	1	04	28	002	00001	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00002	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00003	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00004	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00005	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00006	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00007	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	002	00008	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00009	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00010	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00011	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00012	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00013	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00014	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00015	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00016	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00017	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	002	00018	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta dasar (garis) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00019	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta foto yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00020	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta digital yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00021	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta tematik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00022	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan peta teknis (struktur) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00023	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00024	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00025	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00026	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00027	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00028	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	002	00029	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00030	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00031	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00032	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00033	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00034	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00035	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00036	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00037	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyewaan tanah dan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00038	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00039	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	002	00040	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00041	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00042	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00043	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00044	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00045	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00046	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00047	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00048	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00049	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00050	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00051	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00052	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00053	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00054	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00055	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00056	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan orang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00057	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyeberangan di air-pelayanan penyeberangan barang yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00058	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00059	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00060	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00061	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00062	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat usaha lainnya yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00063	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00064	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00065	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00066	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00067	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00068	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00069	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00070	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	1	04	28	002	00071	Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00072	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00073	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00074	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00075	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00076	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00077	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00078	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00079	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00080	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	1	04	28	002	00081	Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	03	003	00002	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	003	00003	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	003	00004	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	003	00005	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	003	00006	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	003	00007	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	003	00008	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-pelaksanaan keistimewaan aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	003	00009	Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus-aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008		Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-LO
7	2	01	03	008	00001	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00002	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00003	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00004	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00005	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur air bersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00006	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00007	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00008	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur sanitasi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00009	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00010	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00011	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00012	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00013	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00014	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00015	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00016	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00017	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00018	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	008	00019	Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1%-papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	009		DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	03	009	00001	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	009	00002	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-kesehatan dan perbaikan gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	009	00003	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	009	00004	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	010		DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-LO
7	2	01	03	010	00001	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	010	00002	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-kesehatan dan perbaikan gizi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	010	00003	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	010	00004	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	011		Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-LO
7	2	01	03	011	00001	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1,25%-papua-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	011	00002	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1,25%-papua-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	011	00003	Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat-LO
						Digunakan untuk mencatat dana otonomi khusus 1,25%-papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	012		DTI-Papua-LO
7	2	01	03	012	00001	DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-pembangunan infrastruktur perhubungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	012	00002	DTI-Papua-Energi Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	012	00003	DTI-Papua-Air Bersih-LO
						Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-air bersih yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	012	00004	DTI-Papua-Telekomunikasi-LO
						Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-telekomunikasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	012	00005	DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana tambahan infrastruktur-papua-sanitasi lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013		DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-LO
7	2	01	03	013	00001	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00002	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00003	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00004	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00005	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kebudayaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00006	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-keistimewaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00007	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00008	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemberdayaan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	03	013	00009	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00010	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00011	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00012	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00013	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pertanahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00014	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00015	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00016	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00017	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-implementasi syariat islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00018	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penerapan syariat islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	013	00019	DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014		DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-LO
7	2	01	03	014	00001	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pendidikan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00002	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00003	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00004	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00005	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur energi listrik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00006	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-keistimewaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00007	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kepemudaan dan olahraga yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00008	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemberdayaan ekonomi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00009	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemberdayaan masyarakat adat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00010	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00011	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan kelembagaan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00012	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00013	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan perdamaian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00014	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-sosial yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00015	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00016	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-administrasi pemerintahan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00017	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-implementasi syariat islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00018	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penerapan syariat islam yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	03	014	00019	DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pengentasan kemiskinan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00101	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00102	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00103	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00104	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00105	DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00106	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar-LO

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00107	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00108	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00109	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00110	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00111	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00112	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00113	DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00114	DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00115	DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00116	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	001	00117	DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	09	002	00040	DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	002	00041	DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	002	00042	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	002	00043	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	002	00044	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian-LO
						Digunakan untuk mencatat dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	003		Hibah kepada Daerah-LO
7	2	01	09	003	00001	Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	003	00002	Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat-LO
						Digunakan untuk mencatat penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	003	00003	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Mas Rapid Transit* (MRT) *Project* LO
						Digunakan untuk mencatat pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*mas rapid transit* (MRT) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	003	00004	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative* (READ-SI)-LO
						Digunakan untuk mencatat pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*rural empowerment and agricultural development scaling up initiative* (READ-SI) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	003	00005	Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)-LO
						Digunakan untuk mencatat pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project* (UPLAND) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	003	00006	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia-LO
						Digunakan untuk mencatat hibah luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah australia yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	2	01	09	003	00007	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang *City Sewerage Project* (PCSP)-LO
						Digunakan untuk mencatat hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota palembang/palembang *city sewerage project* (PCSP) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	2	01	09	003	00008	Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BIO CF ISFL)-LO
						Digunakan untuk mencatat hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape* (BIO CF ISFL) yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	05			Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO
7	3	03	05	001		Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO
7	3	03	05	001	00001	Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan klaim pelayanan kesehatan/nonkapitasi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	06			Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO
7	3	03	06	001		Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO
7	3	03	06	001	00001	Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bonus produksi panas bumi yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	3	03	07			Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh-LO
7	3	03	07	001		Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh-LO
7	3	03	07	001	00001	Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh-LO
						Digunakan untuk mencatat pendapatan bonus tandatangan dan bonus produksi pemerintah aceh yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	05			Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah
7	4	02	05	001		Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah
7	4	02	05	001	00001	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	05	001	00002	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	05	001	00003	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	05	002		Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
7	4	02	05	002	00001	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
7	4	02	05	003		Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
7	4	02	05	003	00001	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	05	004		Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
7	4	02	05	004	00001	Surplus Penyelesaian Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	06			Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah
7	4	02	06	001		Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah
7	4	02	06	001	00001	Surplus Penyelesaian Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian obligasi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
7	4	02	07			Surplus Penyelesaian Sukuk Daerah
7	4	02	07	001		Surplus Penyelesaian Sukuk Daerah
7	4	02	07	001	00001	Surplus Penyelesaian Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat selisih lebih atas penyelesaian sukuk daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	1	02	02	001	00083	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.
8	1	02	02	001	00084	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.
8	1	02	02	001	00085	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.
8	1	02	02	001	00086	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.
8	1	02	02	001	00087	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.
8	1	02	02	001	00088	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.
8	1	02	02	001	00089	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.
8	1	02	02	001	00090	Beban Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.
8	1	02	02	017		Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah
8	1	02	02	017	00001	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	02	02	017	00002	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	02	02	017	00003	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	02	02	017	00004	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	02	02	017	00005	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	02	02	017	00006	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	02	02	017	00007	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	02	02	017	00008	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
8	1	02	02	017	00009	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	017	00010	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
8	1	02	02	017	00011	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	02	02	017	00012	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	02	02	017	00013	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
8	1	02	02	017	00014	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	02	02	017	00015	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	02	02	017	00016	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	02	02	017	00017	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
8	1	02	02	017	00018	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
8	1	02	02	017	00019	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	02	02	017	00020	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	02	02	017	00021	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	02	02	017	00022	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*microbus*.
8	1	02	02	017	00023	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	02	02	017	00024	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	02	02	017	00025	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	02	02	017	00026	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.
8	1	02	02	017	00027	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	02	02	017	00028	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
8	1	02	02	017	00029	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	02	02	017	00030	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8	1	02	02	017	00031	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
8	1	02	02	017	00032	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	02	02	017	00033	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	02	02	017	00034	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	02	02	017	00035	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
8	1	02	02	017	00036	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-speda motor roda tiga penumpang.
8	1	02	02	017	00037	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
8	1	02	02	017	00038	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
8	1	02	02	017	00039	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
8	1	02	02	017	00040	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
8	1	02	02	017	00041	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak air permukaan.
8	1	02	02	017	00042	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak rokok.
8	1	02	02	017	00043	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak hotel.
8	1	02	02	017	00044	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Motel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak motel.
8	1	02	02	017	00045	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak losmen.
8	1	02	02	017	00046	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak gubuk pariwisata.
8	1	02	02	017	00047	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak wisma pariwisata.
8	1	02	02	017	00048	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pesanggrahan.
8	1	02	02	017	00049	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00050	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8	1	02	02	017	00051	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak restoran dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00052	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak rumah makan dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00053	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kafetaria dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00054	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kantin dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00055	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak warung dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00056	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Bar dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bar dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00057	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00058	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tontonan film.
8	1	02	02	017	00059	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pegelaran kesenian/musik/tari/busana.
8	1	02	02	017	00060	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00061	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pameran.
8	1	02	02	017	00062	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
8	1	02	02	017	00063	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak sirkus/akrobat/sulap.
8	1	02	02	017	00064	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak permainan biliar dan *bowling*.
8	1	02	02	017	00065	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
8	1	02	02	017	00066	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
8	1	02	02	017	00067	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pertandingan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pertandingan olahraga.
8	1	02	02	017	00068	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/ Megatron*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron*.
8	1	02	02	017	00069	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame kain.
8	1	02	02	017	00070	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame melekat/stiker.
8	1	02	02	017	00071	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame selebaran.
8	1	02	02	017	00072	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame berjalan.
8	1	02	02	017	00073	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame udara.
8	1	02	02	017	00074	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame apung.
8	1	02	02	017	00075	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame suara.
8	1	02	02	017	00076	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame film/*slide*.
8	1	02	02	017	00077	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak reklame peragaan.
8	1	02	02	017	00078	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
8	1	02	02	017	00079	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak penerangan jalan sumber lain.
8	1	02	02	017	00080	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak parkir.
8	1	02	02	017	00081	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak air tanah.
8	1	02	02	017	00082	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak sarang burung walet.
8	1	02	02	017	00083	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak asbes.
8	1	02	02	017	00084	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu tulis.
8	1	02	02	017	00085	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu setengah permata.
8	1	02	02	017	00086	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu kapur.
8	1	02	02	017	00087	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu apung.
8	1	02	02	017	00088	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak batu permata.
8	1	02	02	017	00089	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bentonit.
8	1	02	02	017	00090	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak dolomit.
8	1	02	02	017	00091	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak felspar.
8	1	02	02	017	00092	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Garam Batu (*Halite*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak garam batu (*halite*).
8	1	02	02	017	00093	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak grafit.
8	1	02	02	017	00094	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak granit/andesit.
8	1	02	02	017	00095	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak gips.
8	1	02	02	017	00096	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kalsit.
8	1	02	02	017	00097	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak kaolin.
8	1	02	02	017	00098	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak leusit.
8	1	02	02	017	00099	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak magnesit.
8	1	02	02	017	00100	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak mika.
8	1	02	02	017	00101	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak marmer.
8	1	02	02	017	00102	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak nitrat.
8	1	02	02	017	00103	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak *opsidien*.
8	1	02	02	017	00104	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak oker.
8	1	02	02	017	00105	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pasir dan kerikil.
8	1	02	02	017	00106	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Pasir Kuarsa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak pasir kuarsa.
8	1	02	02	017	00107	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak perlit.
8	1	02	02	017	00108	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak *phospat*.
8	1	02	02	017	00109	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak talk.
8	1	02	02	017	00110	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tanah serap (*fullers earth*).
8	1	02	02	017	00111	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tanah diatome.
8	1	02	02	017	00112	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tanah liat.
8	1	02	02	017	00113	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tawas (alum).
8	1	02	02	017	00114	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak tras.
8	1	02	02	017	00115	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak yarosif.
8	1	02	02	017	00116	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak zeolit.
8	1	02	02	017	00117	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak basal.
8	1	02	02	017	00118	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak trakit.
8	1	02	02	017	00119	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	017	00120	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak belerang.
8	1	02	02	017	00121	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
8	1	02	02	017	00122	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
8	1	02	02	017	00123	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
8	1	02	02	017	00124	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
8	1	02	02	017	00125	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak alat berat.
8	1	02	02	017	00126	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
8	1	02	02	017	00127	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
8	1	02	02	017	00128	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
8	1	02	02	017	00129	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
8	1	02	02	017	00130	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
8	1	02	02	017	00131	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
8	1	02	02	017	00132	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
8	1	02	02	017	00133	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
8	1	02	02	017	00134	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
8	1	02	02	017	00135	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
8	1	02	02	017	00136	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
8	1	02	02	017	00137	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
8	1	02	02	017	00138	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
8	1	02	02	017	00139	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
8	1	02	02	017	00140	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
8	1	02	02	017	00141	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
8	1	02	02	017	00142	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
8	1	02	02	017	00143	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
8	1	02	02	017	00144	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
8	1	02	02	017	00145	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
8	1	02	02	017	00146	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
8	1	02	02	017	00147	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
8	1	02	02	017	00148	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
8	1	02	02	017	00149	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
8	1	02	02	017	00150	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
8	1	02	02	017	00151	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	017	00152	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
8	1	02	02	017	00153	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
8	1	02	02	017	00154	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan panti refleksi.
8	1	02	02	017	00155	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
8	1	02	02	017	00156	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan opsen pajak kendaraan bermotor.
8	1	02	02	017	00157	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	02	02	018		Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah
8	1	02	02	018	00001	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.
8	1	02	02	018	00002	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling.
8	1	02	02	018	00003	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu.
8	1	02	02	018	00004	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
8	1	02	02	018	00005	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
8	1	02	02	018	00006	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
8	1	02	02	018	00007	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	02	02	018	00008	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	02	02	018	00009	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	02	02	018	00010	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir tepi jalan umum.
8	1	02	02	018	00011	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
8	1	02	02	018	00012	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
8	1	02	02	018	00013	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	018	00014	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	02	02	018	00015	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
8	1	02	02	018	00016	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
8	1	02	02	018	00017	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
8	1	02	02	018	00018	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
8	1	02	02	018	00019	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
8	1	02	02	018	00020	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
8	1	02	02	018	00021	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
8	1	02	02	018	00022	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
8	1	02	02	018	00023	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	018	00024	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
8	1	02	02	018	00025	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
8	1	02	02	018	00026	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
8	1	02	02	018	00027	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
8	1	02	02	018	00028	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan barang dalam keadaan terbungkus.
8	1	02	02	018	00029	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-penyelenggaraan pendidikan teknis.
8	1	02	02	018	00030	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-penyelenggaraan pelatihan teknis.
8	1	02	02	018	00031	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
8	1	02	02	018	00032	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
8	1	02	02	018	00033	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	018	00034	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
8	1	02	02	018	00035	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
8	1	02	02	018	00036	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
8	1	02	02	018	00037	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
8	1	02	02	018	00038	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
8	1	02	02	018	00039	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
8	1	02	02	018	00040	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
8	1	02	02	018	00041	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
8	1	02	02	018	00042	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
8	1	02	02	018	00043	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
8	1	02	02	018	00044	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
8	1	02	02	018	00045	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
8	1	02	02	018	00046	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyedian tempat pelelangan.
8	1	02	02	018	00047	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyedian fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
8	1	02	02	018	00048	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
8	1	02	02	018	00049	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
8	1	02	02	018	00050	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
8	1	02	02	018	00051	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
8	1	02	02	018	00052	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
8	1	02	02	018	00053	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	02	018	00054	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
8	1	02	02	018	00055	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
8	1	02	02	018	00056	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang.
8	1	02	02	018	00057	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan barang.
8	1	02	02	018	00058	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
8	1	02	02	018	00059	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
8	1	02	02	018	00060	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
8	1	02	02	018	00061	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
8	1	02	02	018	00062	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	1	02	02	018	00063	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
8	1	02	02	018	00064	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
8	1	02	02	018	00065	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
8	1	02	02	018	00066	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
8	1	02	02	018	00067	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
8	1	02	02	018	00068	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
8	1	02	02	018	00069	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan air.
8	1	02	02	018	00070	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
8	1	02	02	018	00071	Beban Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa kerja sama pemungutan retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
8	1	02	02	019		Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
8	1	02	02	019	00001	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban jasa pelayanan kesehatan aparatur sipil negara.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	02	05	001	00015	Beban Penyediaan Jaminan Block Seat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyediaan jaminan block seat.
8	1	02	05	001	00016	Beban Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.
8	1	03	07			Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah
8	1	03	07	001		Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah
8	1	03	07	001	00001	Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari pemerintah.
8	1	03	07	001	00002	Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
8	1	03	07	001	00003	Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
8	1	03	07	002		Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
8	1	03	07	002	00001	Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
8	1	03	07	003		Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
8	1	03	07	003	00001	Beban Bunga Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank.
8	1	03	07	004		Beban Bunga Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
8	1	03	07	004	00001	Beban Bunga Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank.
8	1	03	08			Beban Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
8	1	03	08	001		Beban Bunga Obligasi Daerah
8	1	03	08	001	00001	Beban Bunga Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bunga obligasi daerah.
8	1	05	09			Beban Hibah kepada BUMDesa
8	1	05	09	001		Beban Hibah Uang kepada BUMDesa
8	1	05	09	001	00001	Beban Hibah Uang kepada BUMDesa

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah uang kepada badan usaha milik desa.
8	1	05	09	002		Beban Hibah Barang kepada BUMDesa
8	1	05	09	002	00001	Beban Hibah Barang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah barang kepada badan usaha milik desa.
8	1	05	09	003		Beban Hibah Jasa kepada BUMDesa
8	1	05	09	003	00001	Beban Hibah Jasa kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah jasa kepada badan usaha milik desa.
8	1	05	10			Beban Hibah kepada Koperasi
8	1	05	10	001		Beban Hibah Uang kepada Koperasi
8	1	05	10	001	00001	Beban Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah uang kepada koperasi.
8	1	05	10	002		Beban Hibah Barang kepada Koperasi
8	1	05	10	002	00001	Beban Hibah Barang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah barang kepada koperasi.
8	1	05	10	003		Beban Hibah Jasa kepada Koperasi
8	1	05	10	003	00001	Beban Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban hibah jasa kepada koperasi.
8	1	07	04	005	00008	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1%-Papua.
8	1	07	04	005	00009	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1%-papua.
8	1	07	04	005	00010	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan Infrastruktrur-Papua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus 1,25%-papua.
8	1	07	04	005	00011	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua.
8	1	07	04	005	00012	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua.
8	1	07	04	005	00013	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Otonomi Khusus-Aceh
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana otonomi khusus-papua.
8	1	07	04	005	00014	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh.
8	1	07	04	005	00015	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Tambahan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening dana tambahan dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh.
8	1	07	04	005	00016	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Kas Dana Abadi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang jasa giro pada rekening kas dana abadi daerah.
8	1	07	04	015	04104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Uang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada bumdesa-hibah uang kepada badan usaha milik desa.
8	1	07	04	015	04105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Barang kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah barang kepada badan usaha milik desa.
8	1	07	04	015	04106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada BUMDesa-Hibah Jasa kepada BUMDesa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada badan usaha milik desa-hibah jasa kepada badan usaha milik desa.
8	1	07	04	015	04107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Uang kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah uang kepada koperasi.
8	1	07	04	015	04108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Barang kepada Koperasi

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah barang kepada koperasi.
8	1	07	04	015	04109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Koperasi-Hibah Jasa kepada Koperasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja hibah kepada koperasi-hibah jasa kepada koperasi.
8	1	07	04	015	04110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Imbalan Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja imbalan sukuk daerah.
8	1	07	04	015	04111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjamin Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah.
8	1	07	04	015	04112	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah.
8	1	07	04	015	04113	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah.
8	1	07	04	015	04114	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain.
8	1	07	04	015	04115	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank (LKB).
8	1	07	04	015	04116	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Pinjaman Daerah-Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-pinjaman daerah-pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank (LKBB).
8	1	07	04	015	04117	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bunga Pembiayaan Utang Daerah-Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bunga pembiayaan utang daerah-obligasi daerah.
8	1	07	04	015	04118	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Penyediaan Jaminan Block Seat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-penyediaan jaminan block seat.
8	1	07	04	015	04119	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-Bantuan Premi Nelayan, Pembudidayaan Ikan, dan Petambak Garam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat-bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam.
8	1	07	04	015	04120	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Guru
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan guru.
8	1	07	04	015	04121	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kependidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kependidikan.
8	1	07	04	015	04122	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga kesehatan.
8	1	07	04	015	04123	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Tenaga Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan tenaga teknis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04124	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Umum Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola umum operasional.
8	1	07	04	015	04125	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Operator Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan operator layanan operasional.
8	1	07	04	015	04126	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Pengelola Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan pengelola layanan operasional.
8	1	07	04	015	04127	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kantor-Jasa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada Jabatan Penata Layanan Operasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kantor-jasa pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu pada jabatan penata layanan operasional.
8	1	07	04	015	04128	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.
8	1	07	04	015	04129	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.
8	1	07	04	015	04130	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
8	1	07	04	015	04131	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan dan kawasan permukiman.
8	1	07	04	015	04132	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	1	07	04	015	04133	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.
8	1	07	04	015	04134	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.
8	1	07	04	015	04135	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	1	07	04	015	04136	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.
8	1	07	04	015	04137	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.
8	1	07	04	015	04138	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.
8	1	07	04	015	04139	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	1	07	04	015	04140	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat desa.
8	1	07	04	015	04141	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	1	07	04	015	04142	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.
8	1	07	04	015	04143	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.
8	1	07	04	015	04144	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	1	07	04	015	04145	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.
8	1	07	04	015	04146	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	04	015	04147	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.
8	1	07	04	015	04148	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04149	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.
8	1	07	04	015	04150	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.
8	1	07	04	015	04151	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.
8	1	07	04	015	04152	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan.
8	1	07	04	015	04153	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.
8	1	07	04	015	04154	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.
8	1	07	04	015	04155	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.
8	1	07	04	015	04156	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.
8	1	07	04	015	04157	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.
8	1	07	04	015	04158	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.
8	1	07	04	015	04159	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus antar daerah provinsi-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.
8	1	07	04	015	04160	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.
8	1	07	04	015	04161	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04162	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
8	1	07	04	015	04163	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	1	07	04	015	04164	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	1	07	04	015	04165	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.
8	1	07	04	015	04166	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.
8	1	07	04	015	04167	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04168	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.
8	1	07	04	015	04169	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.
8	1	07	04	015	04170	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.
8	1	07	04	015	04171	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	1	07	04	015	04172	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
8	1	07	04	015	04173	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04174	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.
8	1	07	04	015	04175	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
8	1	07	04	015	04176	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	1	07	04	015	04177	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.
8	1	07	04	015	04178	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	04	015	04179	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04180	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.
8	1	07	04	015	04181	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.
8	1	07	04	015	04182	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.
8	1	07	04	015	04183	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.
8	1	07	04	015	04184	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
8	1	07	04	015	04185	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04186	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.
8	1	07	04	015	04187	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.
8	1	07	04	015	04188	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
8	1	07	04	015	04189	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.
8	1	07	04	015	04190	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.
8	1	07	04	015	04191	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04192	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pendidikan.
8	1	07	04	015	04193	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kesehatan.
8	1	07	04	015	04194	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.
8	1	07	04	015	04195	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	1	07	04	015	04196	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	1	07	04	015	04197	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-sosial.
8	1	07	04	015	04198	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-tenaga kerja.
8	1	07	04	015	04199	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	1	07	04	015	04200	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pangan.
8	1	07	04	015	04201	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanahan.
8	1	07	04	015	04202	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-lingkungan hidup.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04203	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	1	07	04	015	04204	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
8	1	07	04	015	04205	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	1	07	04	015	04206	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perhubungan.
8	1	07	04	015	04207	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
8	1	07	04	015	04208	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	1	07	04	015	04209	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-penanaman modal.
8	1	07	04	015	04210	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	04	015	04211	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-statistik.
8	1	07	04	015	04212	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-persandian.
8	1	07	04	015	04213	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kebudayaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04214	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perpustakaan.
8	1	07	04	015	04215	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kearsipan.
8	1	07	04	015	04216	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
8	1	07	04	015	04217	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pariwisata.
8	1	07	04	015	04218	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-pertanian.
8	1	07	04	015	04219	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-kehutanan.
8	1	07	04	015	04220	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
8	1	07	04	015	04221	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perdagangan.
8	1	07	04	015	04222	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-perindustrian.
8	1	07	04	015	04223	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan antar daerah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten/kota-bantuan keuangan khusus antar daerah kabupaten/kota-transmigrasi.
8	1	07	04	015	04224	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04225	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.
8	1	07	04	015	04226	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
8	1	07	04	015	04227	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	1	07	04	015	04228	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	1	07	04	015	04229	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.
8	1	07	04	015	04230	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.
8	1	07	04	015	04231	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	1	07	04	015	04232	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.
8	1	07	04	015	04233	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.
8	1	07	04	015	04234	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.
8	1	07	04	015	04235	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04236	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.
8	1	07	04	015	04237	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	1	07	04	015	04238	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.
8	1	07	04	015	04239	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.
8	1	07	04	015	04240	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	1	07	04	015	04241	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.
8	1	07	04	015	04242	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	04	015	04243	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.
8	1	07	04	015	04244	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.
8	1	07	04	015	04245	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.
8	1	07	04	015	04246	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04247	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.
8	1	07	04	015	04248	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan perikanan.
8	1	07	04	015	04249	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisata.
8	1	07	04	015	04250	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.
8	1	07	04	015	04251	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.
8	1	07	04	015	04252	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral.
8	1	07	04	015	04253	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.
8	1	07	04	015	04254	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.
8	1	07	04	015	04255	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan kabupaten/kota ke daerah provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.
8	1	07	04	015	04256	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.
8	1	07	04	015	04257	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04258	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
8	1	07	04	015	04259	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	1	07	04	015	04260	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	1	07	04	015	04261	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.
8	1	07	04	015	04262	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.
8	1	07	04	015	04263	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	1	07	04	015	04264	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.
8	1	07	04	015	04265	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.
8	1	07	04	015	04266	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.
8	1	07	04	015	04267	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	1	07	04	015	04268	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04269	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	1	07	04	015	04270	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.
8	1	07	04	015	04271	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.
8	1	07	04	015	04272	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	1	07	04	015	04273	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.
8	1	07	04	015	04274	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	04	015	04275	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.
8	1	07	04	015	04276	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.
8	1	07	04	015	04277	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.
8	1	07	04	015	04278	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.
8	1	07	04	015	04279	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04280	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.
8	1	07	04	015	04281	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.
8	1	07	04	015	04282	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.
8	1	07	04	015	04283	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.
8	1	07	04	015	04284	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
8	1	07	04	015	04285	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.
8	1	07	04	015	04286	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.
8	1	07	04	015	04287	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.
8	1	07	04	015	04288	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.
8	1	07	04	015	04289	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.
8	1	07	04	015	04290	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04291	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	1	07	04	015	04292	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	1	07	04	015	04293	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.
8	1	07	04	015	04294	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.
8	1	07	04	015	04295	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaam perempuan dan perlindungan anak.
8	1	07	04	015	04296	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.
8	1	07	04	015	04297	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.
8	1	07	04	015	04298	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.
8	1	07	04	015	04299	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	1	07	04	015	04300	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat desa.
8	1	07	04	015	04301	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04302	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.
8	1	07	04	015	04303	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.
8	1	07	04	015	04304	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	1	07	04	015	04305	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.
8	1	07	04	015	04306	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	04	015	04307	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.
8	1	07	04	015	04308	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.
8	1	07	04	015	04309	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.
8	1	07	04	015	04310	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.
8	1	07	04	015	04311	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.
8	1	07	04	015	04312	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04313	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.
8	1	07	04	015	04314	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.
8	1	07	04	015	04315	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.
8	1	07	04	015	04316	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
8	1	07	04	015	04317	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.
8	1	07	04	015	04318	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.
8	1	07	04	015	04319	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa-Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa-bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.
8	1	07	04	015	04320	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	07	04	015	04321	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	07	04	015	04322	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	07	04	015	04323	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	07	04	015	04324	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	07	04	015	04325	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	07	04	015	04326	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	07	04	015	04327	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-Truck
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.
8	1	07	04	015	04328	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	07	04	015	04329	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
8	1	07	04	015	04330	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	07	04	015	04331	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diopersikan di air.
8	1	07	04	015	04332	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04333	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	07	04	015	04334	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	07	04	015	04335	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	07	04	015	04336	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
8	1	07	04	015	04337	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
8	1	07	04	015	04338	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	07	04	015	04339	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	07	04	015	04340	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	07	04	015	04341	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	07	04	015	04342	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	07	04	015	04343	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	07	04	015	04344	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	07	04	015	04345	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
8	1	07	04	015	04346	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	07	04	015	04347	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04348	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	07	04	015	04349	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8	1	07	04	015	04350	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
8	1	07	04	015	04351	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	07	04	015	04352	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	07	04	015	04353	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	07	04	015	04354	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
8	1	07	04	015	04355	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
8	1	07	04	015	04356	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
8	1	07	04	015	04357	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
8	1	07	04	015	04358	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
8	1	07	04	015	04359	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
8	1	07	04	015	04360	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air permukaan.
8	1	07	04	015	04361	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rokok.
8	1	07	04	015	04362	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak hotel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04363	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak motel.
8	1	07	04	015	04364	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak losmen.
8	1	07	04	015	04365	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gubuk pariwisata.
8	1	07	04	015	04366	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak wisma pariwisata.
8	1	07	04	015	04367	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pesanggrahan.
8	1	07	04	015	04368	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04369	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8	1	07	04	015	04370	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak restoran dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04371	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak rumah makan dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04372	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kafetaria dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04373	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kantin dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04374	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak warung dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04375	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bar dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04376	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04377	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tontonan film.
8	1	07	04	015	04378	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
8	1	07	04	015	04379	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04380	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pameran.
8	1	07	04	015	04381	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
8	1	07	04	015	04382	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sirkus/akrobat/sulap.
8	1	07	04	015	04383	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak permainan biliar dan *bowling*.
8	1	07	04	015	04384	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
8	1	07	04	015	04385	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
8	1	07	04	015	04386	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pertandingan olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04387	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/ Megatron*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron*.
8	1	07	04	015	04388	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame kain.
8	1	07	04	015	04389	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame melekat/stiker.
8	1	07	04	015	04390	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame selebaran.
8	1	07	04	015	04391	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame berjalan.
8	1	07	04	015	04392	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame udara.
8	1	07	04	015	04393	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame apung.
8	1	07	04	015	04394	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame suara.
8	1	07	04	015	04395	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Film/*Slide*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame film/*slide*.
8	1	07	04	015	04396	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak reklame peragaan.
8	1	07	04	015	04397	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
8	1	07	04	015	04398	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak penerangan jalan sumber lain.
8	1	07	04	015	04399	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak parkir.
8	1	07	04	015	04400	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak air tanah.
8	1	07	04	015	04401	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak sarang burung walet.
8	1	07	04	015	04402	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak asbes.
8	1	07	04	015	04403	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Tulis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu tulis.
8	1	07	04	015	04404	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu setengah permata.
8	1	07	04	015	04405	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu kapur.
8	1	07	04	015	04406	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu apung.
8	1	07	04	015	04407	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak batu permata.
8	1	07	04	015	04408	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bentonit.
8	1	07	04	015	04409	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak dolomit.
8	1	07	04	015	04410	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak felspar.
8	1	07	04	015	04411	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Garam Batu (*Halite*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak garam batu (*halite*).
8	1	07	04	015	04412	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak grafit.
8	1	07	04	015	04413	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak granit/andesit.
8	1	07	04	015	04414	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak gips.
8	1	07	04	015	04415	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kalsit.
8	1	07	04	015	04416	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak kaolin.
8	1	07	04	015	04417	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak leusit.
8	1	07	04	015	04418	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak magnesit.
8	1	07	04	015	04419	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mika.
8	1	07	04	015	04420	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak marmer.
8	1	07	04	015	04421	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak nitrat.
8	1	07	04	015	04422	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *opsidien*.
8	1	07	04	015	04423	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak oker.
8	1	07	04	015	04424	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir dan kerikil.
8	1	07	04	015	04425	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak pasir kuarsa.
8	1	07	04	015	04426	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak perlit.
8	1	07	04	015	04427	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak *Phospat*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak *phospat*.
8	1	07	04	015	04428	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak talk.
8	1	07	04	015	04429	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah serap (*fullers earth*).
8	1	07	04	015	04430	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah diatome.
8	1	07	04	015	04431	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah liat.
8	1	07	04	015	04432	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tanah tawas (alum).
8	1	07	04	015	04433	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak tras.
8	1	07	04	015	04434	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak yarosif .
8	1	07	04	015	04435	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Zeolit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak zeolit .
8	1	07	04	015	04436	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak basal .
8	1	07	04	015	04437	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak trakit .
8	1	07	04	015	04438	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
8	1	07	04	015	04439	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak belerang.
8	1	07	04	015	04440	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
8	1	07	04	015	04441	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak bumi dan bungunan perdesaan dan perkotaan.
8	1	07	04	015	04442	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
8	1	07	04	015	04443	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-BPHTB-Pemberian Hak Baru

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
8	1	07	04	015	04444	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak alat berat.
8	1	07	04	015	04445	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
8	1	07	04	015	04446	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
8	1	07	04	015	04447	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
8	1	07	04	015	04448	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
8	1	07	04	015	04449	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
8	1	07	04	015	04450	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04451	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
8	1	07	04	015	04452	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
8	1	07	04	015	04453	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
8	1	07	04	015	04454	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
8	1	07	04	015	04455	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
8	1	07	04	015	04456	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
8	1	07	04	015	04457	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
8	1	07	04	015	04458	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
8	1	07	04	015	04459	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
8	1	07	04	015	04460	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
8	1	07	04	015	04461	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
8	1	07	04	015	04462	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
8	1	07	04	015	04463	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
8	1	07	04	015	04464	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
8	1	07	04	015	04465	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
8	1	07	04	015	04466	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
8	1	07	04	015	04467	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
8	1	07	04	015	04468	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
8	1	07	04	015	04469	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
8	1	07	04	015	04470	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
8	1	07	04	015	04471	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04472	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
8	1	07	04	015	04473	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
8	1	07	04	015	04474	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
8	1	07	04	015	04475	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen pajak kendaraan bermotor.
8	1	07	04	015	04476	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Pajak Daerah-Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan pajak daerah-opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	07	04	015	04477	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas.
8	1	07	04	015	04478	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas keliling.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04479	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di puskesmas pembantu.
8	1	07	04	015	04480	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
8	1	07	04	015	04481	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
8	1	07	04	015	04482	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
8	1	07	04	015	04483	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	07	04	015	04484	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	07	04	015	04485	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	07	04	015	04486	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.
8	1	07	04	015	04487	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
8	1	07	04	015	04488	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
8	1	07	04	015	04489	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
8	1	07	04	015	04490	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	07	04	015	04491	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau alat pemadam kebakaran.
8	1	07	04	015	04492	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penanggulangan kebakaran.
8	1	07	04	015	04493	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau alat penyelamatan jiwa.
8	1	07	04	015	04494	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
8	1	07	04	015	04495	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
8	1	07	04	015	04496	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
8	1	07	04	015	04497	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
8	1	07	04	015	04498	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04499	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
8	1	07	04	015	04500	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
8	1	07	04	015	04501	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
8	1	07	04	015	04502	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
8	1	07	04	015	04503	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
8	1	07	04	015	04504	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
8	1	07	04	015	04505	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04506	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
8	1	07	04	015	04507	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
8	1	07	04	015	04508	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
8	1	07	04	015	04509	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
8	1	07	04	015	04510	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
8	1	07	04	015	04511	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
8	1	07	04	015	04512	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04513	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
8	1	07	04	015	04514	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
8	1	07	04	015	04515	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
8	1	07	04	015	04516	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
8	1	07	04	015	04517	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
8	1	07	04	015	04518	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
8	1	07	04	015	04519	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04520	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
8	1	07	04	015	04521	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
8	1	07	04	015	04522	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
8	1	07	04	015	04523	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
8	1	07	04	015	04524	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
8	1	07	04	015	04525	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
8	1	07	04	015	04526	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
8	1	07	04	015	04527	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
8	1	07	04	015	04528	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
8	1	07	04	015	04529	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.
8	1	07	04	015	04530	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
8	1	07	04	015	04531	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
8	1	07	04	015	04532	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air-pelayanan penyeberangan orang.
8	1	07	04	015	04533	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyeberangan air-pelayanan penyeberangan barang.
8	1	07	04	015	04534	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
8	1	07	04	015	04535	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
8	1	07	04	015	04536	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
8	1	07	04	015	04537	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
8	1	07	04	015	04538	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	1	07	04	015	04539	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	015	04540	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
8	1	07	04	015	04541	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir diluar badan jalan.
8	1	07	04	015	04542	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
8	1	07	04	015	04543	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
8	1	07	04	015	04544	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
8	1	07	04	015	04545	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
8	1	07	04	015	04546	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
8	1	07	04	015	04547	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Kerja Sama Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa kerja sama pemungutan retribusi daerah-retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
8	1	07	04	015	04548	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa-Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan dari pengembalian kelebihan pembayaran belanja jasa-jasa pelayanan kesehatan bagi aparatur sipil negara.
8	1	07	04	026		Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
8	1	07	04	026	00001	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Dana Cadangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hasil pengelolaan dana cadangan.
8	1	07	04	027		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Pajak Daerah
8	1	07	04	027	00001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	07	04	027	00002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	07	04	027	00003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	07	04	027	00004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	07	04	027	00005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	07	04	027	00006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-pick up.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	07	04	027	00008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-truck.
8	1	07	04	027	00009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	07	04	027	00010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
8	1	07	04	027	00011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	07	04	027	00012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang diperasikan di air.
8	1	07	04	027	00013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
8	1	07	04	027	00014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	07	04	027	00015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tida penumpang.
8	1	07	04	027	00019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	07	04	027	00020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	07	04	027	00021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	07	04	027	00022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	07	04	027	00023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	07	04	027	00024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	07	04	027	00025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	07	04	027	00026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
8	1	07	04	027	00027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	07	04	027	00028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	07	04	027	00030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8	1	07	04	027	00031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
8	1	07	04	027	00032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	07	04	027	00033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
8	1	07	04	027	00036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
8	1	07	04	027	00037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
8	1	07	04	027	00038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
8	1	07	04	027	00039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
8	1	07	04	027	00041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak air permukaan.
8	1	07	04	027	00042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak rokok.
8	1	07	04	027	00043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak hotel.
8	1	07	04	027	00044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak motel.
8	1	07	04	027	00045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak losmen.
8	1	07	04	027	00046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak gubuk pariwisata.
8	1	07	04	027	00047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak wisma pariwisata.
8	1	07	04	027	00048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pesanggrahan.
8	1	07	04	027	00049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8	1	07	04	027	00051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak restoran dan sejenisnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak rumah makan dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kafetaria dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kantin dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak warung dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bar dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tontonan film.
8	1	07	04	027	00059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pagelaran kesenian/musik/tari busana.
8	1	07	04	027	00060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pameran.
8	1	07	04	027	00062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak sirkus/akrobat/sulap.
8	1	07	04	027	00064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak biliar dan *bowling*.
8	1	07	04	027	00065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
8	1	07	04	027	00066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
8	1	07	04	027	00067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pertandingan olahraga.
8	1	07	04	027	00068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/ Megatron*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron*.
8	1	07	04	027	00069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame kain.
8	1	07	04	027	00070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame melekat/stiker.
8	1	07	04	027	00071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame selebaran.
8	1	07	04	027	00072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame berjalan.
8	1	07	04	027	00073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame udara.
8	1	07	04	027	00074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame apung.
8	1	07	04	027	00075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame suara.
8	1	07	04	027	00076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/*Slide*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame film/*slide*.
8	1	07	04	027	00077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak reklame peragaan.
8	1	07	04	027	00078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
8	1	07	04	027	00079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak penerangan sumber lain.
8	1	07	04	027	00080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak parkir.
8	1	07	04	027	00081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak air tanah.
8	1	07	04	027	00082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak sarang burung walet.
8	1	07	04	027	00083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak asbes.
8	1	07	04	027	00084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu tulis.
8	1	07	04	027	00085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu setengah permata.
8	1	07	04	027	00086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu kapur.
8	1	07	04	027	00087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu apung.
8	1	07	04	027	00088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak batu permata.
8	1	07	04	027	00089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bentonit.
8	1	07	04	027	00090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak dolomit.
8	1	07	04	027	00091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak felspar.
8	1	07	04	027	00092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak garam batu (*halite*).
8	1	07	04	027	00093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak grafit.
8	1	07	04	027	00094	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak granit/andesit.
8	1	07	04	027	00095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak gips.
8	1	07	04	027	00096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kalsit.
8	1	07	04	027	00097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak kaolin.
8	1	07	04	027	00098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak leusit.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00099	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak magnesit.
8	1	07	04	027	00100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak mika.
8	1	07	04	027	00101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak marmer.
8	1	07	04	027	00102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak nitrat.
8	1	07	04	027	00103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak *opsidien*.
8	1	07	04	027	00104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak oker.
8	1	07	04	027	00105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pasir dan kerikil.
8	1	07	04	027	00106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak pasir kuarsa.
8	1	07	04	027	00107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak perlit.
8	1	07	04	027	00108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak *phospat*.
8	1	07	04	027	00109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak talk.
8	1	07	04	027	00110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tanah serap (*fullers earth*).
8	1	07	04	027	00111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tanah diatome.
8	1	07	04	027	00112	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tanah liat.
8	1	07	04	027	00113	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tanah tawas (alum).
8	1	07	04	027	00114	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak tras.
8	1	07	04	027	00115	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak yarosif.
8	1	07	04	027	00116	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak zeolit.
8	1	07	04	027	00117	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak basal.
8	1	07	04	027	00118	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak trakit.
8	1	07	04	027	00119	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
8	1	07	04	027	00120	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak belerang.
8	1	07	04	027	00121	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam satu pertambangan mineral.
8	1	07	04	027	00122	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
8	1	07	04	027	00123	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
8	1	07	04	027	00124	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
8	1	07	04	027	00125	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak alat berat.
8	1	07	04	027	00126	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
8	1	07	04	027	00127	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
8	1	07	04	027	00128	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
8	1	07	04	027	00129	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
8	1	07	04	027	00130	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
8	1	07	04	027	00131	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
8	1	07	04	027	00132	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
8	1	07	04	027	00133	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00134	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
8	1	07	04	027	00135	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
8	1	07	04	027	00136	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
8	1	07	04	027	00137	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
8	1	07	04	027	00138	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
8	1	07	04	027	00139	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
8	1	07	04	027	00140	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
8	1	07	04	027	00141	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
8	1	07	04	027	00142	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
8	1	07	04	027	00143	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00144	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
8	1	07	04	027	00145	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
8	1	07	04	027	00146	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
8	1	07	04	027	00147	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
8	1	07	04	027	00148	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
8	1	07	04	027	00149	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
8	1	07	04	027	00150	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
8	1	07	04	027	00151	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
8	1	07	04	027	00152	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00153	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
8	1	07	04	027	00154	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
8	1	07	04	027	00155	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
8	1	07	04	027	00156	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda opsen pajak kendaraan bermotor.
8	1	07	04	027	00157	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	07	04	027	00158	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pejabat Pembuat Akta Tanah atau Notaris
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda pejabat pembuat akta tanah atau notaris.
8	1	07	04	027	00159	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	07	04	027	00160	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	07	04	027	00161	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	07	04	027	00162	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	07	04	027	00163	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Bus-Bus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	07	04	027	00164	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	07	04	027	00165	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	07	04	027	00166	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
8	1	07	04	027	00167	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	07	04	027	00168	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
8	1	07	04	027	00169	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	07	04	027	00170	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8	1	07	04	027	00171	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
8	1	07	04	027	00172	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	07	04	027	00173	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00174	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00175	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
8	1	07	04	027	00176	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
8	1	07	04	027	00177	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	07	04	027	00178	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	07	04	027	00179	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	07	04	027	00180	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	07	04	027	00181	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	07	04	027	00182	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	07	04	027	00183	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	07	04	027	00184	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00185	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	07	04	027	00186	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
8	1	07	04	027	00187	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	07	04	027	00188	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8	1	07	04	027	00189	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
8	1	07	04	027	00190	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	07	04	027	00191	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00192	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00193	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box.*
8	1	07	04	027	00194	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
8	1	07	04	027	00195	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Bensin

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
8	1	07	04	027	00196	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
8	1	07	04	027	00197	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
8	1	07	04	027	00198	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
8	1	07	04	027	00199	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak air permukaan.
8	1	07	04	027	00200	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak rokok.
8	1	07	04	027	00201	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak hotel.
8	1	07	04	027	00202	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak motel.
8	1	07	04	027	00203	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak losmen.
8	1	07	04	027	00204	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak gubuk pariwisata.
8	1	07	04	027	00205	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak wisma pariwisata.
8	1	07	04	027	00206	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pesanggrahan.
8	1	07	04	027	00207	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak rumah penginapan dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00208	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8	1	07	04	027	00209	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak restoran dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00210	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak rumah makan dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00211	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kafetaria dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00212	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kantin dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00213	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Warung dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak warung dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00214	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bar dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00215	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak jasa boga/katering dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00216	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tontonan film.
8	1	07	04	027	00217	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
8	1	07	04	027	00218	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00219	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pameran.
8	1	07	04	027	00220	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00221	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak sirkus/akrobat/sulap.
8	1	07	04	027	00222	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak biliar dan *bowling*.
8	1	07	04	027	00223	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
8	1	07	04	027	00224	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
8	1	07	04	027	00225	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pertandingan olahraga.
8	1	07	04	027	00226	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/ Megatron*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron*.
8	1	07	04	027	00227	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame kain.
8	1	07	04	027	00228	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame melekat/stiker.
8	1	07	04	027	00229	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Selebaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame selebaran.
8	1	07	04	027	00230	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame berjalan.
8	1	07	04	027	00231	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame udara.
8	1	07	04	027	00232	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame apung.
8	1	07	04	027	00233	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame suara.
8	1	07	04	027	00234	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Film/Slide
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak reklame film/slide.
8	1	07	04	027	00235	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak peragaan.
8	1	07	04	027	00236	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
8	1	07	04	027	00237	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak penerangan jalan sumber lain.
8	1	07	04	027	00238	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak parkir.
8	1	07	04	027	00239	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak air tanah.
8	1	07	04	027	00240	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak sarang burung walet.
8	1	07	04	027	00241	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Asbes

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak asbes.
8	1	07	04	027	00242	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu tulis.
8	1	07	04	027	00243	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu setengah permata.
8	1	07	04	027	00244	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu kapur.
8	1	07	04	027	00245	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu apung.
8	1	07	04	027	00246	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak batu permata.
8	1	07	04	027	00247	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bentonit.
8	1	07	04	027	00248	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak dolomit.
8	1	07	04	027	00249	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak felspar.
8	1	07	04	027	00250	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak garam batu (*halite*).
8	1	07	04	027	00251	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak grafit.
8	1	07	04	027	00252	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak granit/andesit.
8	1	07	04	027	00253	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Gips

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak gips.
8	1	07	04	027	00254	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kalsit.
8	1	07	04	027	00255	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak kaolin.
8	1	07	04	027	00256	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak leusit.
8	1	07	04	027	00257	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Magnesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak magnesit.
8	1	07	04	027	00258	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak mika.
8	1	07	04	027	00259	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak marmer.
8	1	07	04	027	00260	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak nitrat.
8	1	07	04	027	00261	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak *opsidien*.
8	1	07	04	027	00262	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak oker.
8	1	07	04	027	00263	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pasir dan kerikil.
8	1	07	04	027	00264	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak pasir kuarsa.
8	1	07	04	027	00265	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak perlit.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00266	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak *phospat*.
8	1	07	04	027	00267	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak talk.
8	1	07	04	027	00268	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tanah serap (*fullers earth*).
8	1	07	04	027	00269	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Diatome
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tanah diatome.
8	1	07	04	027	00270	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tanah liat.
8	1	07	04	027	00271	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tawas (alum).
8	1	07	04	027	00272	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak tras.
8	1	07	04	027	00273	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak yarosif.
8	1	07	04	027	00274	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak zeolit.
8	1	07	04	027	00275	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak basal.
8	1	07	04	027	00276	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak trakit.
8	1	07	04	027	00277	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
8	1	07	04	027	00278	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Belerang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak belerang.
8	1	07	04	027	00279	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
8	1	07	04	027	00280	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
8	1	07	04	027	00281	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemidahan hak.
8	1	07	04	027	00282	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
8	1	07	04	027	00283	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga alat berat.
8	1	07	04	027	00284	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga opsen pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB).
8	1	07	04	027	00285	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
8	1	07	04	027	00286	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
8	1	07	04	027	00287	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
8	1	07	04	027	00288	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00289	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
8	1	07	04	027	00290	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
8	1	07	04	027	00291	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
8	1	07	04	027	00292	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
8	1	07	04	027	00293	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
8	1	07	04	027	00294	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
8	1	07	04	027	00295	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
8	1	07	04	027	00296	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
8	1	07	04	027	00297	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*gusthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
8	1	07	04	027	00298	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
8	1	07	04	027	00299	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-glamping.
8	1	07	04	027	00300	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
8	1	07	04	027	00301	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
8	1	07	04	027	00302	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
8	1	07	04	027	00303	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana.
8	1	07	04	027	00304	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
8	1	07	04	027	00305	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
8	1	07	04	027	00306	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
8	1	07	04	027	00307	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
8	1	07	04	027	00308	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
8	1	07	04	027	00309	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.
8	1	07	04	027	00310	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
8	1	07	04	027	00311	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
8	1	07	04	027	00312	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan panti refleksi.
8	1	07	04	027	00313	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
8	1	07	04	027	00314	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga opsen pajak kendaraan bermotor.
8	1	07	04	027	00315	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	07	04	027	00316	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	07	04	027	00317	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-*Jeep*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	07	04	027	00318	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	07	04	027	00319	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	07	04	027	00320	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Bus-Bus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	07	04	027	00321	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	07	04	027	00322	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	07	04	027	00323	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
8	1	07	04	027	00324	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	07	04	027	00325	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
8	1	07	04	027	00326	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	07	04	027	00327	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00328	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat/alat besar.
8	1	07	04	027	00329	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	07	04	027	00330	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00331	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang-Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00332	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
8	1	07	04	027	00333	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kendaraan bermotor-sepeda motor-roda tiga penumpang.
8	1	07	04	027	00334	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-sedan.
8	1	07	04	027	00335	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-*Jeep*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-*jeep*.
8	1	07	04	027	00336	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-minibus.
8	1	07	04	027	00337	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-*Microbus*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-*microbus*.
8	1	07	04	027	00338	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Bus-Bus

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil bus-bus.
8	1	07	04	027	00339	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up*.
8	1	07	04	027	00340	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Light Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*light truck*.
8	1	07	04	027	00341	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Truck*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*truck*.
8	1	07	04	027	00342	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Blind Van*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*blind van*.
8	1	07	04	027	00343	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda dua.
8	1	07	04	027	00344	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga.
8	1	07	04	027	00345	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.
8	1	07	04	027	00346	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-kendaraan khusus alat berat.
8	1	07	04	027	00347	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil roda tiga.
8	1	07	04	027	00348	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil penumpang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00349	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang Roda Tiga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang-roda tiga.
8	1	07	04	027	00350	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Mobil Barang/Beban-*Pick Up Box*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-mobil barang/beban-*pick up box*.
8	1	07	04	027	00351	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea balik nama kendaraan bermotor-sepeda motor-sepeda motor roda tiga penumpang.
8	1	07	04	027	00352	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Bensin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar bensin.
8	1	07	04	027	00353	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Solar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar solar.
8	1	07	04	027	00354	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Gas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar gas.
8	1	07	04	027	00355	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBKB-Bahan Bakar Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bahan bakar kendaraan bermotor-bahan bakar lainnya.
8	1	07	04	027	00356	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Permukaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak air permukaan.
8	1	07	04	027	00357	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rokok
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak rokok.
8	1	07	04	027	00358	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak hotel.
8	1	07	04	027	00359	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Motel

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak motel.
8	1	07	04	027	00360	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak losmen.
8	1	07	04	027	00361	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gubuk Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak gubuk pariwisata.
8	1	07	04	027	00362	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak wisma pariwisata.
8	1	07	04	027	00363	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pesanggrahan.
8	1	07	04	027	00364	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak penginapan dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00365	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
8	1	07	04	027	00366	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Restoran dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak restoran dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00367	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak rumah makan dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00368	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kafetaria dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kafetaria dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00369	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kantin dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kantin dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00370	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Warung dan Sejenisnya

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak warung dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00371	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bar dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bar dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00372	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak boga/katering dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00373	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tontonan Film
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tontonan film.
8	1	07	04	027	00374	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pagelaran kesenian/musik/tari/busana.
8	1	07	04	027	00375	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00376	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pameran.
8	1	07	04	027	00377	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya.
8	1	07	04	027	00378	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sirkus/Akrobat/Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak sirkus/akrobat/sulap.
8	1	07	04	027	00379	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Permainan Biliar dan *Bowling*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak permainan biliar dan *bowling*.
8	1	07	04	027	00380	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00381	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (*Fitness Center*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitness center*).
8	1	07	04	027	00382	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pertandingan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pertandingan olahraga.
8	1	07	04	027	00383	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Papan/*Billboard/Videotron/ Megatron*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame papan/*billboard/videotron/megatron*.
8	1	07	04	027	00384	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Kain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame kain.
8	1	07	04	027	00385	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Melekat/Stiker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame melekat/stiker.
8	1	07	04	027	00386	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Selebaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame selebaran.
8	1	07	04	027	00387	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Berjalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame berjalan.
8	1	07	04	027	00388	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Udara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame udara.
8	1	07	04	027	00389	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Apung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame apung.
8	1	07	04	027	00390	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Suara
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame suara.
8	1	07	04	027	00391	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Film/*Slide*

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame film/*slide*.
8	1	07	04	027	00392	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Reklame Peragaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak reklame peragaan.
8	1	07	04	027	00393	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri.
8	1	07	04	027	00394	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak penerangan jalan sumber lain.
8	1	07	04	027	00395	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak parkir.
8	1	07	04	027	00396	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Air Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak air tanah.
8	1	07	04	027	00397	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Sarang Burung Walet
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak sarang burung walet.
8	1	07	04	027	00398	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Asbes
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak asbes.
8	1	07	04	027	00399	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Tulis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu tulis.
8	1	07	04	027	00400	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Setengah Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu setengah permata.
8	1	07	04	027	00401	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Kapur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu kapur.
8	1	07	04	027	00402	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Apung

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu apung.
8	1	07	04	027	00403	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Batu Permata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak batu permata.
8	1	07	04	027	00404	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Bentonit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bentonit.
8	1	07	04	027	00405	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Dolomit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak dolomit.
8	1	07	04	027	00406	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Felspar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak felspar.
8	1	07	04	027	00407	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Garam Batu (*Halite*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak garam batu (*halite*).
8	1	07	04	027	00408	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Grafit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak grafit.
8	1	07	04	027	00409	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Granit/Andesit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak granit/andesit.
8	1	07	04	027	00410	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Gips
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak gips.
8	1	07	04	027	00411	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kalsit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kalsit.
8	1	07	04	027	00412	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Kaolin
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak kaolin.
8	1	07	04	027	00413	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Leusit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak leusit.
8	1	07	04	027	00414	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Magnesit

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak magnesit.
8	1	07	04	027	00415	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak mika.
8	1	07	04	027	00416	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Marmer
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak marmer.
8	1	07	04	027	00417	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Nitrat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak nitrat.
8	1	07	04	027	00418	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Opsidien*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak *opsidien*.
8	1	07	04	027	00419	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Oker
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak oker.
8	1	07	04	027	00420	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir dan Kerikil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pasir dan kerikil.
8	1	07	04	027	00421	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Pasir Kuarsa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak pasir kuarsa.
8	1	07	04	027	00422	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Perlit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak perlit.
8	1	07	04	027	00423	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak *Phospat*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak *phospat*.
8	1	07	04	027	00424	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Talk
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak talk.
8	1	07	04	027	00425	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Serap (*Fullers Earth*)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tanah serap (*fullers earth*).
8	1	07	04	027	00426	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Diatome

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tanah diatome.
8	1	07	04	027	00427	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tanah Liat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tanah liat.
8	1	07	04	027	00428	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tawas (Alum)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tawas (alum).
8	1	07	04	027	00429	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Tras
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak tras.
8	1	07	04	027	00430	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Yarosif
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak yarosif.
8	1	07	04	027	00431	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Zeolit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak zeolit.
8	1	07	04	027	00432	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Basal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak basal.
8	1	07	04	027	00433	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Trakit
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak trakit.
8	1	07	04	027	00434	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan.
8	1	07	04	027	00435	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Belerang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak belerang.
8	1	07	04	027	00436	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak mineral bukan logam dan batuan ikutan dalam suatu pertambangan mineral.
8	1	07	04	027	00437	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBBP2
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00438	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemindahan Hak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemindahan hak.
8	1	07	04	027	00439	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok BPHTB-Pemberian Hak Baru
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok bea perolehan hak atas tanah dan bangunan-pemberian hak baru.
8	1	07	04	027	00440	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Pajak Alat Berat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak alat berat.
8	1	07	04	027	00441	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok opsen pajak mineral bukan logam dan batuan.
8	1	07	04	027	00442	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-restoran.
8	1	07	04	027	00443	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-makanan dan/atau minuman-penyedia jasa boga atau katering.
8	1	07	04	027	00444	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik dari sumber lain.
8	1	07	04	027	00445	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-tenaga listrik-konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.
8	1	07	04	027	00446	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hotel.
8	1	07	04	027	00447	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-hostel.
8	1	07	04	027	00448	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Vila

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-vila.
8	1	07	04	027	00449	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pondok wisata.
8	1	07	04	027	00450	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Motel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-motel.
8	1	07	04	027	00451	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-losmen.
8	1	07	04	027	00452	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-wisma pariwisata.
8	1	07	04	027	00453	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-pesanggrahan.
8	1	07	04	027	00454	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/*Guesthouse*/Bungalo/*Resort*/*Cottage*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/*resort*/*cottage*.
8	1	07	04	027	00455	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel.
8	1	07	04	027	00456	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Perhotelan-*Glamping*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa perhotelan-*glamping*.
8	1	07	04	027	00457	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir.
8	1	07	04	027	00458	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir *Valet*)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa parkir-pelayanan memarkirkan kendaraan (perkir *valet*).
8	1	07	04	027	00459	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu.
8	1	07	04	027	00460	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana.
8	1	07	04	027	00461	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes kecantikan.
8	1	07	04	027	00462	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-kontes binaraga.
8	1	07	04	027	00463	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pameran.
8	1	07	04	027	00464	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap.
8	1	07	04	027	00465	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor.
8	1	07	04	027	00466	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-permainan ketangkasan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	027	00467	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran.
8	1	07	04	027	00468	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang.
8	1	07	04	027	00469	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-panti pijat dan pijat refleksi.
8	1	07	04	027	00470	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotik, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok pajak barang dan jasa tertentu-jasa kesenian dan hiburan-diskotik, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
8	1	07	04	027	00471	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen PKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok opsen pajak kendaraan bermotor.
8	1	07	04	027	00472	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Kenaikan Pokok Opsen BBNKB
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan kenaikan pokok opsen bea balik nama kendaraan bermotor.
8	1	07	04	028		Beban Penyisihan Piutang Pendapatan atas Sanksi Administrasi Retribusi Daerah
8	1	07	04	028	00001	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.
8	1	07	04	028	00002	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling.
8	1	07	04	028	00003	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu.
8	1	07	04	028	00004	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
8	1	07	04	028	00005	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
8	1	07	04	028	00006	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
8	1	07	04	028	00007	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	07	04	028	00008	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	07	04	028	00009	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	07	04	028	00010	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan parkir tepi jalan umum.
8	1	07	04	028	00011	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
8	1	07	04	028	00012	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
8	1	07	04	028	00013	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
8	1	07	04	028	00014	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	07	04	028	00015	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
8	1	07	04	028	00016	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
8	1	07	04	028	00017	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
8	1	07	04	028	00018	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
8	1	07	04	028	00019	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
8	1	07	04	028	00020	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
8	1	07	04	028	00021	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	028	00022	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
8	1	07	04	028	00023	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
8	1	07	04	028	00024	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
8	1	07	04	028	00025	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.
8	1	07	04	028	00026	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
8	1	07	04	028	00027	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
8	1	07	04	028	00028	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
8	1	07	04	028	00029	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
8	1	07	04	028	00030	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
8	1	07	04	028	00031	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
8	1	07	04	028	00032	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
8	1	07	04	028	00033	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
8	1	07	04	028	00034	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
8	1	07	04	028	00035	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
8	1	07	04	028	00036	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
8	1	07	04	028	00037	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
8	1	07	04	028	00038	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
8	1	07	04	028	00039	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
8	1	07	04	028	00040	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	028	00041	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
8	1	07	04	028	00042	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
8	1	07	04	028	00043	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
8	1	07	04	028	00044	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.
8	1	07	04	028	00045	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
8	1	07	04	028	00046	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
8	1	07	04	028	00047	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
8	1	07	04	028	00048	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
8	1	07	04	028	00049	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
8	1	07	04	028	00050	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
8	1	07	04	028	00051	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
8	1	07	04	028	00052	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
8	1	07	04	028	00053	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.
8	1	07	04	028	00054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
8	1	07	04	028	00055	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
8	1	07	04	028	00056	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyebarangan di air-pelayanan penyeberangan orang.
8	1	07	04	028	00057	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyebarangan di air-pelayanan penyeberangan barang.
8	1	07	04	028	00058	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
8	1	07	04	028	00059	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
8	1	07	04	028	00060	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
8	1	07	04	028	00061	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak dan ikan.
8	1	07	04	028	00062	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	1	07	04	028	00063	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
8	1	07	04	028	00064	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
8	1	07	04	028	00065	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
8	1	07	04	028	00066	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
8	1	07	04	028	00067	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
8	1	07	04	028	00068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	028	00069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
8	1	07	04	028	00070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
8	1	07	04	028	00071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
8	1	07	04	028	00072	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
8	1	07	04	028	00073	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
8	1	07	04	028	00074	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.
8	1	07	04	028	00075	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
8	1	07	04	028	00076	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu.
8	1	07	04	028	00077	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.
8	1	07	04	028	00078	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.
8	1	07	04	028	00079	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
8	1	07	04	028	00080	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
8	1	07	04	028	00081	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat.
8	1	07	04	028	00082	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat.
8	1	07	04	028	00083	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat keliling.
8	1	07	04	028	00084	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat pembantu.
8	1	07	04	028	00085	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di balai pengobatan.
8	1	07	04	028	00086	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di rumah sakit umum daerah.
8	1	07	04	028	00087	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan kesehatan di tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis.
8	1	07	04	028	00088	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan denda retribusi jasa umum-pelayanan persampahan/kebersihan.
8	1	07	04	028	00089	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurukan serta pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	07	04	028	00090	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat-sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat.
8	1	07	04	028	00091	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan pelayanan parkir di tempat jalan umum.
8	1	07	04	028	00092	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Pelataran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-pelataran.
8	1	07	04	028	00093	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-los.
8	1	07	04	028	00094	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pasar-kios.
8	1	07	04	028	00095	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengujian kendaraan bermotor.
8	1	07	04	028	00096	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran.
8	1	07	04	028	00097	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penanggulangan kebakaran.
8	1	07	04	028	00098	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pemeriksaan alat pemadam kebakaran-pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat penyelamatan jiwa.
8	1	07	04	028	00099	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta dasar (garis).
8	1	07	04	028	00100	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta foto.
8	1	07	04	028	00101	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta digital.
8	1	07	04	028	00102	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta tematik.
8	1	07	04	028	00103	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penggantian biaya cetak peta-penyediaan peta teknis (struktur).
8	1	07	04	028	00104	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
8	1	07	04	028	00105	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-rumah tangga.
8	1	07	04	028	00106	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-perkantoran.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	028	00107	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair-Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengolahan limbah cair-industri.
8	1	07	04	028	00108	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya.
8	1	07	04	028	00109	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan tera/tera ulang-pengujian barang dalam keadaan terbungkus.
8	1	07	04	028	00110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan teknis.
8	1	07	04	028	00111	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pelatihan teknis.
8	1	07	04	028	00112	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan pendidikan-pelayanan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis.
8	1	07	04	028	00113	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
8	1	07	04	028	00114	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pelayanan persampahan.
8	1	07	04	028	00115	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-penyedian dan/atau penyedotan kakus.
8	1	07	04	028	00116	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pelayanan kebersihan-pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
8	1	07	04	028	00117	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Umum-Pengendalian Lalu Lintas
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa umum-pengendalian lalu lintas.
8	1	07	04	028	00118	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah dan bangunan.
8	1	07	04	028	00119	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan tanah.
8	1	07	04	028	00120	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-penyewaan bangunan.
8	1	07	04	028	00121	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian laboratorium.
8	1	07	04	028	00122	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian ruangan.
8	1	07	04	028	00123	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian kendaraan bermotor.
8	1	07	04	028	00124	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemakaian kekayaan daerah-pemakaian alat.
8	1	07	04	028	00125	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang yang dikontrakkan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	04	028	00126	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pasar grosir dan/atau pertokoan-penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan.
8	1	07	04	028	00127	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
8	1	07	04	028	00128	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya tempat pelelangan.
8	1	07	04	028	00129	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat perkir untuk kendaraan penumpang dan bus umum.
8	1	07	04	028	00130	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan tempat kegiatan usaha.
8	1	07	04	028	00131	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-terminal-pelayanan penyediaan fasilitas lainnya di lingkungan terminal.
8	1	07	04	028	00132	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Khusus Parkir
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat khusus parkir.
8	1	07	04	028	00133	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/vila.
8	1	07	04	028	00134	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Potong Hewan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah potong hewan.
8	1	07	04	028	00135	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan kepelabuhanan.
8	1	07	04	028	00136	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi dan olahraga.
8	1	07	04	028	00137	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang.
8	1	07	04	028	00138	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan barang.
8	1	07	04	028	00139	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih tanaman.
8	1	07	04	028	00140	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit ternak.
8	1	07	04	028	00141	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah berupa bibit atau benih ikan.
8	1	07	04	028	00142	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan produksi hasil usaha daerah selain bibit atau benih tanaman, ternak, dan ikan.
8	1	07	04	028	00143	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar, grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya.
8	1	07	04	028	00144	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan tempat pelelangan.
8	1	07	04	028	00145	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan-penyediaan fasilitas lainnya di tempat pelelangan.
8	1	07	04	028	00146	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Di Luar Badan Jalan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan.
8	1	07	04	028	00147	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan rumah pemotongan hewan ternak.
8	1	07	04	028	00148	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan jasa kepelabuhanan.
8	1	07	04	028	00149	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga.
8	1	07	04	028	00150	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air.
8	1	07	04	028	00151	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah.
8	1	07	04	028	00152	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Jasa Usaha-Pemanfaatan Aset Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi jasa usaha-pemanfaatan aset daerah.
8	1	07	04	028	00153	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol.
8	1	07	04	028	00154	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum.
8	1	07	04	028	00155	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha penangkapan ikan.
8	1	07	04	028	00156	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan.
8	1	07	04	028	00157	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan ruas jalan tertentu.
8	1	07	04	028	00158	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan koridor tertentu.
8	1	07	04	028	00159	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengendalian lalu lintas penggunaan kawasan tertentu.
8	1	07	04	028	00160	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-persetujuan bangunan gedung.
8	1	07	04	028	00161	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-penggunaan tenaga kerja asing (TKA).
8	1	07	04	028	00162	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Bunga Retribusi Perizinan Tertentu-Pengelolaan Pertambangan Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang pendapatan bunga retribusi perizinan tertentu-pengelolaan pertambangan rakyat.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	003	00012	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.
8	1	07	05	003	00013	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi Rakyat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pemberdayaan ekonomi rakyat.
8	1	07	05	003	00014	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pengentasan kemiskinan.
8	1	07	05	003	00015	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pendidikan.
8	1	07	05	003	00016	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-sosial.
8	1	07	05	003	00017	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-kesehatan.
8	1	07	05	003	00018	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Pelaksanaan Keistimewaan Aceh
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-pelaksanaan keistimewaan aceh.
8	1	07	05	003	00019	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus-aceh-penguatan perdamaian.
8	1	07	05	003	00020	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pendidikan.
8	1	07	05	003	00021	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-kesehatan.
8	1	07	05	003	00022	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-administrasi pemerintahan.
8	1	07	05	003	00023	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur.
8	1	07	05	003	00024	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur air bersih.
8	1	07	05	003	00025	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur energi listrik.
8	1	07	05	003	00026	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur perhubungan.
8	1	07	05	003	00027	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur sanitasi lingkungan.
8	1	07	05	003	00028	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Infrastruktur Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-infrastruktur telekomunikasi.
8	1	07	05	003	00029	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-kebudayaan.
8	1	07	05	003	00030	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	05	003	00031	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat.
8	1	07	05	003	00032	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pemberdayaan masyarakat adat.
8	1	07	05	003	00033	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
8	1	07	05	003	00034	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Kelembagaan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-penguatan kelembagaan.
8	1	07	05	003	00035	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-penguatan perdamaian.
8	1	07	05	003	00036	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-pertanahan.
8	1	07	05	003	00037	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-sosial.
8	1	07	05	003	00038	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1%-Papua-Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1%-papua-teknologi, informasi, dan komunikasi publik.
8	1	07	05	003	00039	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-pendidikan.
8	1	07	05	003	00040	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-kesehatan dan perbaikan gizi.
8	1	07	05	003	00041	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-infrastruktur.
8	1	07	05	003	00042	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat.
8	1	07	05	003	00043	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-pendidikan.
8	1	07	05	003	00044	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Kesehatan dan Perbaikan Gizi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-kesehatan dan perbaikan gizi.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	003	00045	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-infrastruktur.
8	1	07	05	003	00046	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Papua-Bantuan Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-papua-bantuan pemberdayaan masyarakat adat.
8	1	07	05	003	00047	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-papua-pendidikan.
8	1	07	05	003	00048	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-papua-kesehatan.
8	1	07	05	003	00049	Beban Penyisihan Piutang Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua-Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana otonomi khusus 1,25%-papua-pemberdayaan ekonomi masyarakat.
8	1	07	05	003	00050	Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Pendanaan Pembangunan Infrastruktur Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan.
8	1	07	05	003	00051	Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-energi listrik.
8	1	07	05	003	00052	Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Air Bersih
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-air bersih.
8	1	07	05	003	00053	Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Telekomunikasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-telekomunikasi.
8	1	07	05	003	00054	Beban Penyisihan Piutang DTI-Papua-Sanitasi Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana tambahan infrastruktur-papua-sanitasi lingkungan.
8	1	07	05	003	00055	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pendidikan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	003	00056	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kesehatan.
8	1	07	05	003	00057	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-infrastruktur.
8	1	07	05	003	00058	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-infrastruktur energi listrik.
8	1	07	05	003	00059	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kebudayaan.
8	1	07	05	003	00060	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-keistimewaan.
8	1	07	05	003	00061	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	05	003	00062	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemberdayaan ekonomi.
8	1	07	05	003	00063	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemberdayaan masyarakat adat.
8	1	07	05	003	00064	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
8	1	07	05	003	00065	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penguatan kelembagaan.
8	1	07	05	003	00066	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penguatan Perdamaian

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penguatan perdamaian.
8	1	07	05	003	00067	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pertanahan.
8	1	07	05	003	00068	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-sosial.
8	1	07	05	003	00069	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik.
8	1	07	05	003	00070	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik.
8	1	07	05	003	00071	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-implementasi syariat islam.
8	1	07	05	003	00072	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Penerapan Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-penerapan syariat islam.
8	1	07	05	003	00073	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Minyak Bumi-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan minyak bumi-aceh-pengentasan kemiskinan.
8	1	07	05	003	00074	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pendidikan.
8	1	07	05	003	00075	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kesehatan.
8	1	07	05	003	00076	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	003	00077	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Infrastruktur Energi Listrik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-infrastruktur energi listrik.
8	1	07	05	003	00078	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kebudayaan.
8	1	07	05	003	00079	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Keistimewaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-keistimewaan.
8	1	07	05	003	00080	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-kepemudaan dan olahraga.
8	1	07	05	003	00081	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Ekonomi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemberdayaan ekonomi.
8	1	07	05	003	00082	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemberdayaan Masyarakat Adat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemberdayaan masyarakat adat.
8	1	07	05	003	00083	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pemeliharaan dan Pelestarian Lingkungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
8	1	07	05	003	00084	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Kelembagaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan kelembagaan.
8	1	07	05	003	00085	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penguatan Perdamaian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penguatan perdamaian.
8	1	07	05	003	00086	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pertanahan.
8	1	07	05	003	00087	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Sosial

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-sosial.
8	1	07	05	003	00088	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-teknologi informasi dan komunikasi publik.
8	1	07	05	003	00089	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Administrasi Pemerintahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-administrasi pemerintahan.
8	1	07	05	003	00090	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Implementasi Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-implementasi syariat islam.
8	1	07	05	003	00091	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Penerapan Syariat Islam
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-penerapan syariat islam.
8	1	07	05	003	00092	Beban Penyisihan Piutang DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pengentasan Kemiskinan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana bagi hasil sumber daya alam pertambangan gas alam-aceh-pengentasan kemiskinan.
8	1	07	05	009	00140	Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Setempat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah setempat.
8	1	07	05	009	00141	Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Penerimaan Dalam Negeri yang Dihibahkan-Hibah Sanitasi-Air Limbah Terpusat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-penerimaan dalam negeri yang dihibahkan-hibah sanitasi-air limbah terpusat.
8	1	07	05	009	00142	Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Mas Rapid Transit* (MRT) *Project*
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*mas rapid transit* (MRT) *project*.
8	1	07	05	009	00143	Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Rural Empowerment and Agricultural Development Scaling Up Initiative* (READ-SI)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*rural empowerment and agricultural development scaling up initiative* (READ-SI).

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	1	07	05	009	00144	Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Pinjaman Luar Negeri yang Diterushibahkan-*The Development of Integrated Farming System at Upland Areas Project* (UPLAND)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-*the development of integrated farming system at upland areas project* (UPLAND).
8	1	07	05	009	00145	Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Hibah Air Minum Berbasis Kinerja Bantuan Pemerintah Australia
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-pinjaman luar negeri yang diterushibahkan-hibah air minum berbasis kinerja bantuan pemerintah australia.
8	1	07	05	009	00146	Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-Instalasi Pengolahan Air Limbah untuk Kota Palembang/Palembang *City Sewerage Project* (PCSP)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-instalasi pengolahan air limbah untuk kota palembang/palembang *city sewerage project* (PCSP).
8	1	07	05	009	00147	Beban Penyisihan Piutang Hibah kepada Daerah-Hibah Luar Negeri yang Diterushibahkan-*Bio Carbon Fund Initiative for Sustainable Forest Landscape* (BIO CF ISFL)
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang hibah kepada daerah-hibah luar negeri yang diterushibahkan-*bio carbon fund initiative for sustainable forest landscape* (BIO CF ISFL).
8	1	07	05	009	00148	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang kesehatan-penguatan sistem dan kapasitas pelayanan kesehatan.
8	1	07	05	009	00149	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-jalan layanan dasar.
8	1	07	05	009	00150	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
8	1	07	05	009	00151	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Jalan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-jalan-tematik kawasan produksi pangan nasional.
8	1	07	05	009	00152	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Konektivitas-Transportasi Perairan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang konektivitas-transportasi perairan-tematik kawasan produksi pangan nasional.
8	1	07	05	009	00153	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Layanan Dasar

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-layanan dasar.
8	1	07	05	009	00154	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Air Minum-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang air minum-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
8	1	07	05	009	00155	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-layanan dasar.
8	1	07	05	009	00156	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang sanitasi-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
8	1	07	05	009	00157	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Layanan Dasar
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-layanan dasar.
8	1	07	05	009	00158	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Irigasi-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang irigasi-tematik kawasan produksi pangan nasional.
8	1	07	05	009	00159	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pertanian-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pertanian-tematik kawasan produksi pangan nasional.
8	1	07	05	009	00160	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Pertanian-Pangan-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pangan pertanian-pangan-tematik kawasan produksi pangan nasional.
8	1	07	05	009	00161	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Pangan Akuatik-Tematik Kawasan Produksi Pangan Nasional
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang pangan akuatik-tematik kawasan produksi pangan nasional.
8	1	07	05	009	00162	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perdagangan-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perdagangan-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
8	1	07	05	009	00163	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Tematik Pengembangan Ekosistem dan Rantai Pasok Kawasan Industri

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang industri kecil dan menengah-tematik pengembangan ekosistem dan rantai pasok kawasan industri.
8	1	07	05	009	00164	Beban Penyisihan Piutang DAK Fisik-Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak-Perlindungan Perempuan dan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus fisik-bidang perlindungan perempuan dan anak-perlindungan perempuan dan anak.
8	1	07	05	009	00165	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-BOK-BOK Pengawasan Obat dan Makanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional kesehatan-bantuan operasional kesehatan pengawasan obat dan makanan.
8	1	07	05	009	00166	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-dana bantuan pengembangan program perpustakaan daerah.
8	1	07	05	009	00167	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pangan.
8	1	07	05	009	00168	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-dana ketahanan pangan dan pertanian-pertanian.
8	1	07	05	009	00169	Beban Penyisihan Piutang DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Penyuluh Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban penyisihan piutang dana alokasi khusus non fisik-bantuan operasional penyuluh pertanian.
8	1	09				Beban Imbalan
8	1	09	01			Beban Imbalan Sukuk Daerah
8	1	09	01	001		Beban Imbalan Sukuk Daerah
8	1	09	01	001	00001	Beban Imbalan Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban imbalan sukuk daerah.
8	2	02	01	002	00002	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pendidikan.
8	2	02	01	002	00003	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kesehatan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	01	002	00004	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.
8	2	02	01	002	00005	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	2	02	01	002	00006	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	2	02	01	002	00007	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-sosial.
8	2	02	01	002	00008	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-tenaga kerja.
8	2	02	01	002	00009	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	2	02	01	002	00010	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pangan.
8	2	02	01	002	00011	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanahan.
8	2	02	01	002	00012	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-lingkungan hidup.
8	2	02	01	002	00013	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	2	02	01	002	00014	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	01	002	00015	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	2	02	01	002	00016	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perhubungan.
8	2	02	01	002	00017	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-komunikasi dan informatika.
8	2	02	01	002	00018	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	2	02	01	002	00019	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-penanaman modal.
8	2	02	01	002	00020	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kepemudaan dan olahraga.
8	2	02	01	002	00021	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-statistik.
8	2	02	01	002	00022	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-persandian.
8	2	02	01	002	00023	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kebudayaan.
8	2	02	01	002	00024	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perpustakaan.
8	2	02	01	002	00025	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	01	002	00026	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kelautan dan perikanan.
8	2	02	01	002	00027	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pariwisata.
8	2	02	01	002	00028	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-pertanian.
8	2	02	01	002	00029	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-kehutanan.
8	2	02	01	002	00030	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-energi dan sumber daya mineral.
8	2	02	01	002	00031	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perdagangan.
8	2	02	01	002	00032	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-perindustrian.
8	2	02	01	002	00033	Beban Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kepada pemerintah provinsi-transmigrasi.
8	2	02	02	002	00002	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pendidikan.
8	2	02	02	002	00003	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kesehatan.
8	2	02	02	002	00004	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	02	002	00005	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	2	02	02	002	00006	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	2	02	02	002	00007	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-sosial.
8	2	02	02	002	00008	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-tenaga kerja.
8	2	02	02	002	00009	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	2	02	02	002	00010	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pangan.
8	2	02	02	002	00011	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pertanahan.
8	2	02	02	002	00012	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-lingkungan hidup.
8	2	02	02	002	00013	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	2	02	02	002	00014	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
8	2	02	02	002	00015	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	2	02	02	002	00016	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perhubungan.
8	2	02	02	002	00017	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
8	2	02	02	002	00018	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	2	02	02	002	00019	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-penanaman modal.
8	2	02	02	002	00020	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
8	2	02	02	002	00021	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-statistik.
8	2	02	02	002	00022	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-persandian.
8	2	02	02	002	00023	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kebudayaan.
8	2	02	02	002	00024	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perpustakaan.
8	2	02	02	002	00025	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	02	002	00026	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
8	2	02	02	002	00027	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pariwisata.
8	2	02	02	002	00028	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-pertanian.
8	2	02	02	002	00029	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-kehutanan.
8	2	02	02	002	00030	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
8	2	02	02	002	00031	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perdagangan.
8	2	02	02	002	00032	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-perindustrian.
8	2	02	02	002	00033	Beban Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus antar daerah pemerintah kabupaten/kota-transmigrasi.
8	2	02	03	002	00002	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pendidikan.
8	2	02	03	002	00003	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kesehatan.
8	2	02	03	002	00004	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	03	002	00005	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	2	02	03	002	00006	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	2	02	03	002	00007	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-sosial.
8	2	02	03	002	00008	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-tenaga kerja.
8	2	02	03	002	00009	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	2	02	03	002	00010	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pangan.
8	2	02	03	002	00011	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanahan.
8	2	02	03	002	00012	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-lingkungan hidup.
8	2	02	03	002	00013	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	2	02	03	002	00014	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pemberdayaan masyarakat dan desa.
8	2	02	03	002	00015	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	2	02	03	002	00016	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perhubungan.
8	2	02	03	002	00017	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-komunikasi dan informatika.
8	2	02	03	002	00018	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	2	02	03	002	00019	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-penanaman modal.
8	2	02	03	002	00020	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kepemudaan dan olahraga.
8	2	02	03	002	00021	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-statistik.
8	2	02	03	002	00022	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-persandian.
8	2	02	03	002	00023	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kebudayaan.
8	2	02	03	002	00024	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perpustakaan.
8	2	02	03	002	00025	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kearsipan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	03	002	00026	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kelautan dan perikanan.
8	2	02	03	002	00027	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pariwisata.
8	2	02	03	002	00028	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-pertanian.
8	2	02	03	002	00029	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-kehutanan.
8	2	02	03	002	00030	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-energi dan sumber daya mineral.
8	2	02	03	002	00031	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perdagangan.
8	2	02	03	002	00032	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-perindustrian.
8	2	02	03	002	00033	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah provinsi ke kabupaten/kota-transmigrasi.
8	2	02	04	002	00002	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pendidikan.
8	2	02	04	002	00003	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kesehatan.
8	2	02	04	002	00004	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pekerjaan umum dan penataan ruang.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	04	002	00005	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	2	02	04	002	00006	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	2	02	04	002	00007	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-sosial.
8	2	02	04	002	00008	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-tenaga kerja.
8	2	02	04	002	00009	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	2	02	04	002	00010	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pangan.
8	2	02	04	002	00011	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanahan.
8	2	02	04	002	00012	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-lingkungan hidup.
8	2	02	04	002	00013	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	2	02	04	002	00014	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pemberdayaan masyarakat dan desa.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	04	002	00015	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	2	02	04	002	00016	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perhubungan.
8	2	02	04	002	00017	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-komunikasi dan informatika.
8	2	02	04	002	00018	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	2	02	04	002	00019	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-penanaman modal.
8	2	02	04	002	00020	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kepemudaan dan olahraga.
8	2	02	04	002	00021	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-statistik.
8	2	02	04	002	00022	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-persandian.
8	2	02	04	002	00023	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kebudayaan.
8	2	02	04	002	00024	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perpustakaan.
8	2	02	04	002	00025	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kearsipan

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kearsipan.
8	2	02	04	002	00026	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kelautan dan perikanan.
8	2	02	04	002	00027	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pariwisatan.
8	2	02	04	002	00028	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-pertanian.
8	2	02	04	002	00029	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-kehutanan.
8	2	02	04	002	00030	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-energi dan sumber daya mineral.
8	2	02	04	002	00031	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perdagangan.
8	2	02	04	002	00032	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-perindustrian.
8	2	02	04	002	00033	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Kabupaten/Kota ke Provinsi-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus daerah kabupaten/kota ke provinsi-transmigrasi.
8	2	02	05	002	00006	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pendidikan.
8	2	02	05	002	00007	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kesehatan.
8	2	02	05	002	00008	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
8	2	02	05	002	00009	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	2	02	05	002	00010	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	2	02	05	002	00011	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-sosial.
8	2	02	05	002	00012	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-tenaga kerja.
8	2	02	05	002	00013	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	2	02	05	002	00014	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pangan.
8	2	02	05	002	00015	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanahan.
8	2	02	05	002	00016	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-lingkungan hidup.
8	2	02	05	002	00017	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	2	02	05	002	00018	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
8	2	02	05	002	00019	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	2	02	05	002	00020	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perhubungan.
8	2	02	05	002	00021	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Komunikasi dan Informatika
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-komunikasi dan informatika.
8	2	02	05	002	00022	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	2	02	05	002	00023	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-penanaman modal.
8	2	02	05	002	00024	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
8	2	02	05	002	00025	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-statistik.
8	2	02	05	002	00026	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-persandian.
8	2	02	05	002	00027	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kebudayaan.
8	2	02	05	002	00028	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perpustakaan.
8	2	02	05	002	00029	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kearsipan.
8	2	02	05	002	00030	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kelautan dan perikanan.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	05	002	00031	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pariwisata.
8	2	02	05	002	00032	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-pertanian.
8	2	02	05	002	00033	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-kehutanan.
8	2	02	05	002	00034	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
8	2	02	05	002	00035	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perdagangan.
8	2	02	05	002	00036	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-perindustrian.
8	2	02	05	002	00037	Beban Bantuan Keuangan Khusus Provinsi kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus provinsi kepada desa-transmigrasi.
8	2	02	05	002	00038	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pendidikan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pendidikan.
8	2	02	05	002	00039	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kesehatan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kesehatan.
8	2	02	05	002	00040	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pekerjaan umum dan penataan ruang.
8	2	02	05	002	00041	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
8	2	02	05	002	00042	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.
8	2	02	05	002	00043	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Sosial
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-sosial.
8	2	02	05	002	00044	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Tenaga Kerja
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-tenaga kerja.
8	2	02	05	002	00045	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
8	2	02	05	002	00046	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pangan.
8	2	02	05	002	00047	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanahan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanahan.
8	2	02	05	002	00048	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Lingkungan Hidup
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-lingkungan hidup.
8	2	02	05	002	00049	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
8	2	02	05	002	00050	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pemberdayaan masyarakat dan desa.
8	2	02	05	002	00051	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
8	2	02	05	002	00052	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perhubungan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perhubungan.
8	2	02	05	002	00053	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Komunikasi dan Informatika

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-komunikasi dan informatika.
8	2	02	05	002	00054	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-koperasi, usaha kecil, dan menengah.
8	2	02	05	002	00055	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Penanaman Modal
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-penanaman modal.
8	2	02	05	002	00056	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kepemudaan dan Olahraga
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kepemudaan dan olahraga.
8	2	02	05	002	00057	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Statistik
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-statistik.
8	2	02	05	002	00058	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Persandian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-persandian.
8	2	02	05	002	00059	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kebudayaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kebudayaan.
8	2	02	05	002	00060	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perpustakaan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perpustakaan.
8	2	02	05	002	00061	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kearsipan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kearsipan.
8	2	02	05	002	00062	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kelautan dan Perikanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kelautan dan perikanan.
8	2	02	05	002	00063	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pariwisata
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pariwisata.

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	2	02	05	002	00064	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Pertanian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-pertanian.
8	2	02	05	002	00065	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Kehutanan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-kehutanan.
8	2	02	05	002	00066	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Energi dan Sumber Daya Mineral
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-energi dan sumber daya mineral.
8	2	02	05	002	00067	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perdagangan
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perdagangan.
8	2	02	05	002	00068	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Perindustrian
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-perindustrian.
8	2	02	05	002	00069	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa-Transmigrasi
						Digunakan untuk mencatat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dalam bentuk konsumsi aset berupa beban bantuan keuangan khusus kabupaten/kota kepada desa-transmigrasi.
8	3	02	04			Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah
8	3	02	04	001		Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah
8	3	02	04	001	00001	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur denganperaturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	04	001	00002	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	04	001	00003	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah yang bersumber dari Hibah yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah yang bersumber dari hibah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	04	002		Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
8	3	02	04	002	00001	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari pemerintah daerah lain yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	04	003		Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Kode Akun						Uraian Akun
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek	
8	3	02	04	003	00001	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari LKB
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari lembaga keuangan bank yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	04	004		Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
8	3	02	04	004	00001	Defisit Penyelesaian Pinjaman Daerah dari LKBB
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian pinjaman daerah dari lembaga keuangan bukan bank yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	05			Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah
8	3	02	05	001		Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah
8	3	02	05	001	00001	Defisit Penyelesaian Obligasi Daerah
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian obligasi daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.
8	3	02	06			Defisit Penyelesaian Sukuk Daerah
8	3	02	06	001		Defisit Penyelesaian Sukuk Daerah
8	3	02	06	001	00001	Defisit Penyelesaian Sukuk Daerah
						Digunakan untuk mencatat selisih kurang atas penyelesaian sukuk daerah daerah yang saat pengakuannya dicatat sebagaimana diatur dengan peraturan kepala daerah mengenai kebijakan akuntansi.

II. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH

B. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.1.01.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru			
1.01.02.1.01.0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi			
1.01.02.1.01.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika			
1.01.02.1.01.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia			
1.01.02.1.01.0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer			
1.01.02.1.01.0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa			
1.01.02.1.01.0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA			
1.01.02.1.01.0017	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.01.0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.1.01.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi			
1.01.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.1.01.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia			
1.01.02.1.01.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer			
1.01.02.1.01.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa			
1.01.02.1.01.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA			
1.01.02.1.01.0030	Rehabilitasi Asrama Sekolah			
1.01.02.1.01.0031	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
1.01.02.1.01.0032	Rehabilitasi Fasilitas Parkir			
1.01.02.1.01.0033	Rehabilitasi Kantin Sekolah			
1.01.02.1.01.0034	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.01.0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.1.01.0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1.01.02.1.01.0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.01.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1.01.02.1.01.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.1.01.0048	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			
1.01.02.1.01.0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.1.02.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah			
1.01.02.1.02.0013	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.02.0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.1.02.0015	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah			
1.01.02.1.02.0017	Rehabilitasi Ruang Praktik Siswa			
1.01.02.1.02.0020	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah			
1.01.02.1.02.0021	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula			
1.01.02.1.02.0022	Rehabilitasi Asrama Sekolah			
1.01.02.1.02.0023	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
1.01.02.1.02.0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir			
1.01.02.1.02.0025	Rehabilitasi Kantin Sekolah			
1.01.02.1.02.0026	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.02.0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.1.02.0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1.01.02.1.02.0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.02.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1.01.02.1.02.0039	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1.01.02.1.02.0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			
1.01.02.1.02.0044	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi			
1.01.02.1.02.0049	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas			
1.01.02.1.02.0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.1.03.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah			
1.01.02.1.03.0011	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.03.0018	Rehabilitasi Ruang Kelas Sekolah			
1.01.02.1.03.0019	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.1.03.0020	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah			
1.01.02.1.03.0021	Rehabilitasi Perpustakaan Sekolah			
1.01.02.1.03.0022	Rehabilitasi Ruang Serba Guna/Aula			
1.01.02.1.03.0023	Rehabilitasi Asrama Sekolah			
1.01.02.1.03.0024	Rehabilitasi Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
1.01.02.1.03.0025	Rehabilitasi Fasilitas Parkir			
1.01.02.1.03.0026	Rehabilitasi Kantin Sekolah			
1.01.02.1.03.0027	Rehabilitasi Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.03.0041	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1.01.02.1.03.0043	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.1.03.0045	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1.01.02.1.03.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1.01.02.1.03.0047	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Khusus			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.1.03.0055	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas			
1.01.02.1.03.0061	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.3.04.0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.01.02.4.04.0032	Penerbitan Izin Akademi Komunitas yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.01.03.1.01.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Menengah			
1.01.03.1.02.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Khusus			
1.01.06.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Provinsi			
1.01.06.1.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			
1.01.06.1.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.06.1.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kewenangan Provinsi			
1.01.06.1.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Provinsi			
1.02.02.1.01.0003	Pengembangan Rumah Sakit			
1.02.02.1.01.0005	Pengembangan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan			
1.02.02.1.01.0011	Pengadaan Sarana di Fasilitas Layanan Kesehatan			
1.02.02.1.01.0012	Pengadaaaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			
1.02.02.1.01.0014	Pengadaan Bahan Habis Pakai Lainnya (Sprei, Handuk dan Habis Pakai Lainnya)			
1.02.02.1.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat-Alat Kesehatan/Peralatan Laboratorium Kesehatan			
1.02.02.1.01.0018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Layanan Kesehatan			
1.02.02.1.01.0019	Pemeliharaan Prasarana Fasilitas Layanan Kesehatan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.02.02.1.01.0021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1.02.02.1.01.0022	Pengadaan Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1.02.02.1.01.0023	Distribusi Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) ke Kabupaten/Kota			
1.02.02.1.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Khusus			
1.02.02.1.02.0027	Pendampingan Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1.02.02.1.02.0028	Pengelolaan Penelitian Kesehatan			
1.02.02.1.02.0029	Penilaian/Appraisal Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan Pasca Bencana			
1.02.02.1.03.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
1.02.02.1.03.0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.02.04.1.01.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK Berbasis Elektronik			
1.02.04.1.02.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin UKOT Berbasis Elektronik			
1.03.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			
1.03.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			
1.03.02.1.01.0003	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai			
1.03.02.1.01.0004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi			
1.03.02.1.01.0006	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.1.01.0007	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1.03.02.1.01.0008	Pembangunan Unit Air Baku			
1.03.02.1.01.0010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.1.01.0011	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
1.03.02.1.01.0012	Pembangunan Kanal Banjir			
1.03.02.1.01.0014	Pembangunan Polder/Kolam Retensi			
1.03.02.1.01.0016	Pembangunan Check Dam			
1.03.02.1.01.0017	Pembangunan Breakwater			
1.03.02.1.01.0018	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.1.01.0020	Rehabilitasi Bendungan			
1.03.02.1.01.0021	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			
1.03.02.1.01.0022	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1.03.02.1.01.0023	Rehabilitasi Unit Air Baku			
1.03.02.1.01.0024	Rehabilitasi Tanggul Sungai			
1.03.02.1.01.0025	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.1.01.0027	Rehabilitasi Kanal Banjir			
1.03.02.1.01.0029	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.1.01.0030	Rehabilitasi Bangunan Sabo			
1.03.02.1.01.0032	Rehabilitasi Breakwater			
1.03.02.1.01.0033	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.1.01.0034	Peningkatan Tanggul Sungai			
1.03.02.1.01.0035	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.1.01.0036	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
1.03.02.1.01.0037	Peningkatan Kanal Banjir			
1.03.02.1.01.0038	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir			
1.03.02.1.01.0039	Peningkatan Polder/Kolam Retensi			
1.03.02.1.01.0040	Peningkatan Bangunan Sabo			
1.03.02.1.01.0041	Peningkatan Check Dam			
1.03.02.1.01.0042	Peningkatan Breakwater			
1.03.02.1.01.0043	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.1.01.0044	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			
1.03.02.1.01.0045	Revitalisasi Danau			
1.03.02.1.01.0046	Normalisasi/Restorasi Sungai			
1.03.02.1.01.0047	Pembangunan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.1.01.0049	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1.03.02.1.01.0050	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah Untuk Air Baku			
1.03.02.1.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku			
1.03.02.1.01.0052	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku			
1.03.02.1.01.0053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			
1.03.02.1.01.0054	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir			
1.03.02.1.01.0056	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi			
1.03.02.1.01.0057	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo			
1.03.02.1.01.0058	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam			
1.03.02.1.01.0059	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.1.01.0060	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.1.01.0061	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			
1.03.02.1.01.0062	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi			
1.03.02.1.01.0063	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi			
1.03.02.1.01.0064	Operasi dan Pemeliharaan Danau			
1.03.02.1.01.0065	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			
1.03.02.1.01.0066	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1.03.02.1.01.0067	Operasi dan Pemeliharaan Situ			
1.03.02.1.01.0068	Revitalisasi Situ			
1.03.02.1.01.0069	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya			
1.03.02.1.01.0070	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya			
1.03.02.1.01.0076	Peningkatan Breakwater			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.1.01.0077	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.1.01.0078	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			
1.03.02.1.01.0082	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.1.01.0083	Peningkatan Bangunan Sabo			
1.03.02.1.01.0086	Pembangunan Breakwater			
1.03.02.1.01.0093	Operasi dan Pemeliharaan Insfrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1.03.02.1.01.0096	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.1.01.0100	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.1.01.0101	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			
1.03.02.1.01.0103	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.1.01.0105	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1.03.02.1.01.0106	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.1.01.0108	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.1.01.0112	Operasi dan Pemeliharaan Danau			
1.03.02.1.01.0113	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo			
1.03.02.1.01.0114	Peningkatan Check Dam			
1.03.02.1.01.0115	Rehabilitasi Breakwater			
1.03.02.1.01.0118	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.1.01.0120	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1.03.02.1.02.0001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
1.03.02.1.02.0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.1.02.0012	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.1.02.0018	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.1.02.0020	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa			
1.03.02.1.02.0025	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.1.02.0027	Operasional Unit Pengelola Irigasi			
1.03.02.1.02.0028	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
1.03.02.1.02.0029	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa			
1.03.02.1.02.0031	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.1.02.0033	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.1.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			
1.03.02.1.02.0035	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.1.02.0036	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.1.02.0037	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air di Daerah Irigasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.1.02.0038	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa			
1.03.02.1.02.0039	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa			
1.03.02.3.01.0067	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi			
1.03.02.4.01.0068	Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi			
1.03.03.1.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			
1.03.03.1.01.0002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM			
1.03.03.1.01.0003	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan			
1.03.03.1.01.0004	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan			
1.03.03.1.01.0005	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan			
1.03.03.1.01.0006	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan			
1.03.03.1.01.0007	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan SPAM Regional Lintas Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.03.1.01.0008	Pembinaan Teknis SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM Provinsi			
1.03.03.1.01.0009	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
1.03.03.1.01.0010	Survei dan Investigasi untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
1.03.03.1.01.0011	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
1.03.03.1.01.0012	Pembentukan Organisasi Pengelola SPAM Lintas Kabupaten/Kota			
1.03.03.1.01.0013	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
1.03.03.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
1.03.03.1.01.0016	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.04.1.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1.03.04.1.01.0002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1.03.04.1.01.0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1.03.04.1.01.0004	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1.03.04.1.01.0005	Peningkatan TPA/TPST/SPA Kewenangan Provinsi			
1.03.04.1.01.0006	Penyediaan Sarana Dan Prasarana Persampahan			
1.03.04.1.01.0007	Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota			
1.03.04.1.01.0008	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Infrastruktur Persampahan			
1.03.04.1.01.0009	Pembinaan Pengembangan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.05.1.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1.03.05.1.01.0002	Pemicuan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan Pembinaan Penyediaan Prasarana Cubluk			
1.03.05.1.01.0003	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			
1.03.05.1.01.0004	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional			
1.03.05.1.01.0005	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat			
1.03.05.1.01.0006	Pembinaan Teknis dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1.03.05.1.01.0007	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.05.1.01.0008	Fasilitasi Kerja Sama Pengelolaan Air Limbah Domestik Lintas Kabupaten/Kota			
1.03.05.1.01.0009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1.03.05.1.01.0010	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota			
1.03.05.1.01.0014	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
1.03.05.1.01.0017	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
1.03.06.1.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			
1.03.06.1.01.0002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
1.03.06.1.01.0003	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.06.1.01.0004	Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan			
1.03.06.1.01.0005	Penyediaan Drainase Perkotaan dan Sarana Pendukungnya			
1.03.06.1.01.0006	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			
1.03.07.1.01.0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1.03.07.1.01.0002	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1.03.07.1.01.0003	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1.03.07.1.01.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi			
1.03.07.1.01.0005	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0006	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.07.1.01.0007	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0008	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0009	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0010	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0011	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0012	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0013	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0014	Peningkatan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0015	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0016	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.07.1.01.0017	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0018	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0019	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0021	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0023	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0025	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0032	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0033	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat (IPAL) di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0034	Optimalisasi TPS-3R di Kawasan Strategis Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.07.1.01.0035	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0036	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.07.1.01.0037	Optimalisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat (IPLT) di Kawasan Strategis Provinsi			
1.03.08.1.01.0001	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1.03.08.1.01.0002	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1.03.08.1.01.0003	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
1.03.08.1.01.0004	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.08.1.01.0005	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Provinsi			
1.03.08.1.01.0006	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Provinsi			
1.03.08.1.01.0007	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya			
1.03.08.1.01.0009	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara			
1.03.08.1.01.0010	Pelaksanaan Pengelolaan Rumah Negara			
1.03.08.1.01.0011	Penyelenggaraan Penerbitan dan Perpanjangan Lisensi Arsitek			
1.03.08.6.01.0008	Pembinaan Teknis Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Penyelenggara Bangunan Gedung, dan Masyarakat			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.09.1.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.09.1.01.0002	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.1.01.0003	Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.1.01.0004	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.1.01.0006	Pembinaan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kab/Kota			
1.03.09.1.01.0007	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.1.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.09.1.01.0009	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.09.1.01.0010	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
1.03.09.1.01.0011	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.1.01.0012	Pembinaan Penataan Bangunan dan Lingkungan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.03.09.6.01.0005	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.10.1.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
1.03.10.1.01.0002	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.10.1.01.0003	Pengelolaan Leger Jalan			
1.03.10.1.01.0004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
1.03.10.1.01.0005	Pembangunan Jalan			
1.03.10.1.01.0006	Pelebaran Jalan Menuju Standar			
1.03.10.1.01.0007	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			
1.03.10.1.01.0008	Rekonstruksi Jalan			
1.03.10.1.01.0009	Rehabilitasi Jalan			
1.03.10.1.01.0010	Pemeliharaan Berkala Jalan			
1.03.10.1.01.0011	Pemeliharaan Rutin Jalan			
1.03.10.1.01.0012	Pembangunan Jembatan			
1.03.10.1.01.0013	Pembangunan Flyover			
1.03.10.1.01.0014	Pembangunan Underpass			
1.03.10.1.01.0015	Pembangunan Terowongan/Tunnel			
1.03.10.1.01.0016	Penggantian Jembatan			
1.03.10.1.01.0017	Pelebaran Jembatan			
1.03.10.1.01.0018	Rehabilitasi Jembatan			
1.03.10.1.01.0019	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
1.03.10.1.01.0020	Pemeliharaan Berkala Jembatan			
1.03.10.1.01.0021	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			
1.03.10.1.01.0022	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.10.1.01.0023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
1.03.10.1.01.0024	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi			
1.03.10.1.01.0025	Rehabilitasi Jembatan			
1.03.10.1.01.0026	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
1.03.10.1.01.0027	Pemeliharaan Berkala Jembatan			
1.03.10.1.01.0028	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
1.03.10.1.01.0029	Pelebaran Jembatan			
1.03.10.1.01.0032	Pembangunan Jembatan			
1.03.10.1.01.0033	Pemeliharaan Rutin Jalan			
1.03.10.1.01.0034	Pembangunan Terowongan/Tunnel			
1.03.10.1.01.0036	Penggantian Jembatan			
1.03.10.1.01.0037	Pembangunan Underpass			
1.03.10.1.01.0038	Pemeliharaan Berkala Jalan			
1.03.10.1.01.0039	Pembangunan Flyover			
1.03.10.1.01.0040	Pelebaran Jalan Menuju Standar			
1.03.10.1.01.0042	Pembangunan Jalan			
1.03.11.1.01.0001	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1.03.11.1.01.0002	Penyiapan Instruktur/Asesor/ Penyelenggara Pelatihan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.11.1.01.0003	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1.03.11.1.01.0004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1.03.11.1.01.0005	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
1.03.11.1.01.0006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi			
1.03.11.1.01.0007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			
1.03.11.1.01.0008	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi			
1.03.11.1.02.0001	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
1.03.11.1.02.0002	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
1.03.11.1.02.0003	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.11.1.02.0004	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU			
1.03.11.1.02.0005	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi			
1.03.11.1.03.0001	Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang-Undangan			
1.03.11.1.03.0002	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi			
1.03.11.1.03.0003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada Lintas Kabupaten/Kota			
1.03.11.4.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keahlian dan Teknik konstruksi bagi OAP			
1.03.12.1.01.0001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.12.1.01.0002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi			
1.03.12.1.01.0004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang			
1.03.12.1.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi			
1.03.12.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi			
1.03.12.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			
1.03.12.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			
1.03.12.1.03.0002	Sistem Informasi Penataan Ruang			
1.03.12.1.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			
1.03.12.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.13.5.01.0001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1.03.13.5.01.0002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1.03.13.5.01.0004	Penetapan RTR KSP DIY			
1.04.02.1.01.0001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Provinsi			
1.04.02.1.01.0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana			
1.04.02.1.01.0005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Provinsi			
1.04.02.1.02.0002	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak Atas Tanah dan Bangunan			
1.04.02.1.02.0003	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisame Akses Perumahan KPR-FLPP			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.02.1.02.0005	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			
1.04.02.1.03.0002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1.04.02.1.03.0003	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			
1.04.02.1.03.0005	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi			
1.04.02.1.04.0001	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi			
1.04.02.1.04.0002	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi atau Relokasi Program Provinsi			
1.04.03.1.01.0001	Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			
1.04.03.1.01.0002	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan/Pemukiman Kembali Permukiman kumuh			
1.04.03.1.01.0004	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.1.01.0005	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.1.01.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.1.01.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.1.01.0009	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.03.1.01.0010	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah			
1.04.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1.04.03.1.02.0004	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1.04.03.1.02.0006	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.03.1.02.0007	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha			
1.04.05.1.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			
1.04.05.1.01.0006	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman			
1.05.02.1.01.0001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
1.05.02.1.01.0002	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.02.1.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi			
1.05.02.1.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1.05.02.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
1.05.02.1.01.0006	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan			
1.05.02.1.01.0007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1.05.02.1.01.0009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			
1.05.02.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat			
1.05.02.1.01.0016	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
1.05.02.1.01.0017	Pencegahan Gangguan Ketenteraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			
1.05.02.1.01.0018	Peningkatan Kapasita SDM Satuan Polisi Pamongpraja melalui pelatihan Teknis termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.02.1.01.0019	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
1.05.02.1.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
1.05.02.1.02.0003	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
1.05.02.1.02.0004	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)			
1.05.02.1.02.0006	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur			
1.05.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.02.1.03.0002	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang Ditempat, Penguatan Sekretariat Bersama PPNS			
1.05.02.1.03.0006	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah			
1.05.03.1.01.0001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Provinsi			
1.05.03.1.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)			
1.05.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana			
1.05.03.1.02.0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
1.05.03.1.02.0003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1.05.03.1.02.0004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			
1.05.03.1.02.0005	Pengelolaan Risiko Bencana			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.03.1.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana			
1.05.03.1.02.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi			
1.05.03.1.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
1.05.03.1.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi			
1.05.03.1.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1.05.03.1.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
1.05.03.1.02.0012	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Daerah			
1.05.03.1.02.0014	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1.05.03.1.02.0015	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana			
1.05.03.1.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana			
1.05.03.1.02.0017	Penyusunan Rencana Kontijensi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.03.1.02.0018	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
1.05.03.1.02.0019	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1.05.03.1.02.0020	Pengelolaan Risiko Bencana			
1.05.03.1.02.0021	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Bencana			
1.05.03.1.03.0002	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana			
1.05.03.1.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana			
1.05.03.1.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
1.05.03.1.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
1.05.03.1.03.0006	Respon Cepat Bencana Non ALam Epidemi/Wabah Penyakit			
1.05.03.1.03.0007	Penyusunan Rencana Operasi Kedaruratan Bencana Provinsi			
1.05.03.1.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.03.1.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah			
1.05.03.1.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah			
1.05.03.1.04.0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			
1.05.03.1.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			
1.05.03.1.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi			
1.05.03.1.04.0015	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Dalam Penanganan Keadaan Darurat Provinsi			
1.05.03.1.04.0017	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			
1.05.03.1.04.0019	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.03.1.04.0020	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.04.1.01.0001	Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran			
1.05.04.1.01.0003	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota			
1.05.04.1.01.0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
1.05.04.1.01.0008	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.04.1.01.0010	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1.05.04.1.01.0011	Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Pelaporan Kebakaran dan Penyelamatan Secara Terintegrasi			
1.05.04.1.02.0001	Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1.06.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
1.06.02.1.02.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi			
1.06.02.1.02.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.06.02.3.02.0006	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.			
1.06.02.3.02.0007	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.			
1.06.02.3.02.0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi			
1.06.02.3.05.0001	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota			
1.06.02.4.02.0006	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.			
1.06.02.4.02.0007	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi.			
1.06.02.4.02.0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.06.02.4.05.0001	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota			
1.06.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal			
1.06.04.1.01.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			
1.06.04.1.01.0012	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar			
1.06.04.1.02.0002	Penyediaan Makanan			
1.06.04.1.02.0008	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, Nomor Induk Kependudukan, dan Kartu Identitas Anak			
1.06.04.1.02.0012	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Penganti			
1.06.04.1.02.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.06.04.1.03.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas			
1.06.04.1.03.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar			
1.06.04.1.03.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti			
1.06.04.1.04.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			
1.06.04.1.05.0008	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak			
1.06.05.1.02.0001	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			
1.06.05.1.02.0002	Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
1.06.06.1.01.0002	Penyediaan Sandang			
1.06.06.1.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.06.06.3.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah			
1.06.06.3.02.0002	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana			
1.06.06.3.03.0001	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda			
1.06.06.4.02.0001	Sosialisasi dan Edukasi Penanganan Bencana pada Anak Usia Sekolah			
1.06.06.4.02.0002	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana			
1.06.06.4.03.0001	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana Tingkat Muda			
2.07.02.1.01.0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			
2.07.04.1.06.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.07.05.1.03.0002	Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP)			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.07.05.1.03.0004	Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)			
2.08.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.01.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.01.0007	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.01.0008	Sosialisasi kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.02.1.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.02.0003	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.02.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.02.1.03.0003	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2.08.02.1.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi			
2.08.03.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Provinsi			
2.08.03.1.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.03.1.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
2.08.03.1.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
2.08.03.1.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Provinsi			
2.08.03.1.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.03.1.03.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.04.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota			
2.08.04.1.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Provinsi			
2.08.04.1.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
2.08.04.1.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.04.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
2.08.04.1.02.0003	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi			
2.08.04.1.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.05.1.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak Provinsi			
2.08.05.1.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data Provinsi			
2.08.06.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.06.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi			
2.08.06.1.01.0003	Advokasi, Sosialisasi dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi			
2.08.06.1.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
2.08.06.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			
2.08.06.1.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.06.1.02.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.06.1.02.0005	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota			
2.08.07.1.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.01.0003	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.07.1.01.0004	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.02.0001	Penyediaan Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi, Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.02.0004	Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.07.1.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.07.1.03.0004	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.03.0005	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.03.0007	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK Kewenangan Provinsi			
2.08.07.1.03.0008	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK Kewenangan			
2.09.02.1.01.0001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			
2.09.02.1.01.0002	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur			
2.09.02.1.01.0005	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan			
2.09.03.1.01.0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			
2.09.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.09.03.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			
2.09.03.1.01.0010	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Provinsi			
2.09.03.1.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Provinsi			
2.09.03.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			
2.09.03.1.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi			
2.09.03.3.01.0007	Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi			
2.09.03.3.02.0003	Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.09.03.3.02.0005	Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi			
2.09.03.3.02.0006	Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi			
2.09.03.3.03.0002	Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.09.03.4.01.0007	Penetapan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi			
2.09.03.4.02.0003	Penetapan kriteria dan status krisis pangan untuk skala provinsi			
2.09.03.4.02.0005	Penetapan Kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi melalui Peraturan Daerah Provinsi			
2.09.03.4.02.0006	Penyusunan kebijakan, program, dan pembiayaan untuk pengembangan sektor pangan dalam rangka kemandirian dan ketahanan pangan dengan berbasis pada sumber daya pertanian lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.09.03.4.03.0002	Penetapan kebijakan mengenai penentuan harga pangan lokal minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur			
2.09.04.1.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi			
2.09.05.1.01.0001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Provinsi			
2.09.05.1.01.0002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05.1.01.0003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05.1.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05.1.01.0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan			
2.09.05.3.02.0001	Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.09.05.4.02.0001	Pembinaan kelembagaan keamanan pangan kabupaten/kota			
2.10.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi			
2.10.03.1.01.0001	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum			
2.10.04.1.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.10.04.1.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.10.06.1.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah			
2.11.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi			
2.11.02.1.02.0001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.02.1.02.0003	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
2.11.02.1.02.0004	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			
2.11.02.1.02.0005	Pembinaan Penyelenggaraan KLHS			
2.11.02.1.02.0006	Pemantauan dan Evaluasi KLHS			
2.11.02.3.01.0003	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota			
2.11.02.3.02.0001	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota			
2.11.02.4.01.0003	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap RPPLH kabupaten/kota			
2.11.02.4.02.0001	Pembinaan, penilaian, evaluasi terhadap KLHS kabupaten/kota			
2.11.03.1.01.0003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi			
2.11.03.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			
2.11.03.1.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi			
2.11.03.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.03.1.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			
2.11.04.1.01.0002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			
2.11.04.1.01.0005	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			
2.11.05.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.11.06.1.01.0002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			
2.11.06.1.01.0003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
2.11.06.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.06.1.01.0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
2.11.08.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan			
2.11.08.1.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup			
2.11.10.1.01.0001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi			
2.11.10.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.10.1.01.0003	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi			
2.11.10.1.01.0004	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah			
2.11.10.1.01.0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi			
2.11.11.1.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional			
2.11.11.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus			
2.11.11.1.01.0006	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
2.11.11.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus			
2.11.11.1.01.0013	Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi			
2.13.07.4.03.0005	Bimbingan Teknis Administrasi Keuangan Kampung			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.1.01.0001	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)			
2.14.02.1.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Provinsi			
2.14.02.1.01.0003	Advokasi dan Sosialisasi GDPK			
2.14.02.1.01.0004	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal			
2.14.02.1.01.0005	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk SLTA-MA sesuai Kearifan Lokal			
2.14.02.1.01.0006	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Untuk Jalur Formal Melalui Kediklatan, Kepramukaan dan Jalur Nonformal Melalui Kelompok Kegiatan Masyarakat/Umum Sesuai Kearifan Lokal			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.1.01.0008	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA Melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK			
2.14.02.1.01.0009	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			
2.14.02.1.01.0010	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			
2.14.02.1.01.0011	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK dan Sektor Lain			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.1.01.0012	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan			
2.14.02.1.01.0015	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain			
2.14.02.1.01.0016	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Formal, Nonformal dan Informal Pada Jenjang SLTA-MA melalui Sekolah Siaga Kependudukan/SSK dan Pojok Kependudukan/PJK			
2.14.02.1.01.0017	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.1.02.0001	Pelaksanaan Survey/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) dan Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			
2.14.02.1.02.0002	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga			
2.14.02.1.02.0003	Pemetaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			
2.14.02.1.02.0004	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan			
2.14.02.1.02.0005	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)			
2.14.02.1.02.0006	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			
2.14.02.1.02.0007	Penyediaan Dukungan Penyelenggaraan Pendataan dan Pemutakhiran Data Keluarga			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.1.02.0008	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
2.14.03.1.01.0002	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2.14.03.1.01.0003	Penggunaan Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang untuk Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2.14.03.1.01.0004	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program KKBPK Melalui Mitra Kerja			
2.14.03.1.01.0005	Penguatan Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program KKBPK			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.03.1.01.0006	Pengembangan Strategi Operasional Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Sesuai dengan Kearifan Budaya Lokal			
2.14.03.1.01.0008	Pembinaan Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi			
2.14.03.1.02.0003	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program KKBPK			
2.14.04.1.01.0001	Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2.14.04.1.01.0002	Pengembangan Prototype Materi Pembangunan Keluarga Sesuai dengan Kearifan Lokal			
2.14.04.1.01.0003	Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
2.14.04.1.01.0004	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana			
2.14.04.1.01.0005	Pembinaan Peningkatan Akses dan Kualitas Ketahanan Keluarga dan Remaja			
2.14.04.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Pengelola dan Pelaksana Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R)			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.04.1.01.0007	Pengembangan dan Perbanyakan Materi Substansi Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R), Media Promosi, Alat Permainan Edukatif Remaja, dan Sarana Prasarana Lainnya yang Dibutuhkan			
2.14.04.1.01.0009	Penyediaan Kebijakan dalam rangka Penyiapan Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK)			
2.14.04.1.01.0010	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK			
2.14.04.1.01.0011	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK			
2.14.04.1.01.0012	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi IPK			
2.14.04.1.01.0013	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK			
2.14.04.1.01.0014	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			
2.14.04.1.01.0015	Penyediaan Sarana Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.04.1.01.0017	Pelaksanaan Fasilitasi, Pembimbingan, Pengembangan, dan Penguatan Penyiapan Pengasuhan 1000 HPK			
2.14.04.1.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			
2.14.04.1.01.0024	Penyediaan dan Pengembangan Materi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)			
2.14.04.1.02.0001	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)			
2.14.04.1.02.0002	Penguatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
2.14.04.1.02.0003	Sosialisasi dan Promosi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Pengelolaan Keuangan Keluarga			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.04.1.02.0004	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi KeMasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga			
2.14.04.1.02.0005	Fasilitasi Pengembangan Program Ketahanan Keluarga di Kampung KB			
2.15.02.1.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Provinsi			
2.15.02.1.03.0002	Pembangunan Gedung Terminal			
2.15.02.1.03.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			
2.15.02.1.03.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			
2.15.02.1.03.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe B			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.02.1.05.0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
2.15.02.1.06.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			
2.15.02.1.06.0002	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin			
2.15.02.1.06.0006	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			
2.15.02.1.07.0002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			
2.15.02.1.08.0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.02.1.10.0004	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.02.1.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.15.02.1.14.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Provinsi			
2.15.02.3.16.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			
2.15.02.3.16.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2.15.02.4.16.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			
2.15.02.4.16.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2.15.02.6.04.0002	Pembangunan Gedung Terminal Tipe A			
2.15.02.6.04.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal Tipe A			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.02.6.04.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe A			
2.15.03.1.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi pada Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi			
2.15.03.1.05.0001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
2.15.03.1.05.0002	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.03.1.10.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.03.1.10.0005	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.15.04.3.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara			
2.15.04.3.01.0002	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara			
2.15.04.4.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara			
2.15.04.4.01.0002	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara			
2.16.02.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
2.16.02.1.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.16.02.1.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
2.16.02.1.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
2.16.02.1.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
2.16.02.1.01.0006	Pelayanan Informasi Publik			
2.16.02.1.01.0007	Layanan Hubungan Media			
2.16.02.1.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
2.16.02.1.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis			
2.16.02.1.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			
2.16.02.1.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
2.16.02.1.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
2.16.02.1.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi			
2.16.03.1.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.16.03.1.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
2.16.03.1.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			
2.16.03.1.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi			
2.16.03.1.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2.16.03.1.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
2.16.03.1.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			
2.16.03.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			
2.16.03.1.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.16.03.1.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2.16.03.1.02.0008	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			
2.16.03.1.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Provinsi Cerdas dan Kota Cerdas			
2.16.03.1.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
2.16.03.1.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			
2.16.03.1.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
2.16.03.1.02.0014	Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
2.16.03.1.02.0015	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			
2.16.03.1.02.0016	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.16.03.1.02.0017	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			
2.16.03.1.02.0018	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Provinsi Cerdas			
2.16.03.1.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			
2.16.03.1.02.0025	Koordinasi penyusunan proses bisnis			
2.16.03.1.02.0026	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			
2.16.03.1.02.0027	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			
2.16.03.1.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			
2.16.03.1.02.0029	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.17.02.1.01.0001	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.17.02.1.02.0001	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
2.17.02.1.02.0002	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.17.03.1.01.0001	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.17.03.1.01.0002	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel			
2.17.03.1.02.0001	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat			
2.17.04.1.01.0001	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi			
2.17.04.1.01.0002	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi			
2.17.05.1.02.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			
2.17.06.1.01.0001	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.18.02.1.01.0002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
2.18.02.1.02.0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi			
2.18.03.1.01.0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi			
2.18.04.1.01.0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.18.04.1.01.0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
2.18.04.1.01.0003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
2.18.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.18.04.1.02.0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.18.04.1.02.0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			
2.18.04.1.02.0003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
2.18.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
2.18.05.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.18.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.18.05.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.18.06.1.01.0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
2.19.02.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Provinsi			
2.19.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Muda Provinsi			
2.19.02.1.01.0004	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			
2.19.02.1.01.0006	Pemberian Penghargaan kepada Pemuda dan Organisasi Pemuda Provinsi yang Berprestasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.19.02.1.01.0007	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
2.19.02.1.01.0008	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi			
2.19.02.1.01.0009	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			
2.19.02.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			
2.19.02.1.02.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan Provinsi			
2.19.02.3.03.0001	Pembentukan Paskibraka			
2.19.02.3.03.0002	Pelaksanaan Tugas Paskibraka			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.19.02.3.03.0003	Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera			
2.19.02.3.03.0004	PenyelenggaraanPelatihan pasukan pengibar bendera			
2.19.02.3.03.0005	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan			
2.19.02.4.03.0001	Pembentukan Paskibraka			
2.19.02.4.03.0002	Pelaksanaan Tugas Paskibraka			
2.19.02.4.03.0003	Penyelenggaraan seleksi pasukan pengibar bendera			
2.19.02.4.03.0004	PenyelenggaraanPelatihan pasukan pengibar bendera			
2.19.02.4.03.0005	Pembinaan terhadap Aktivitas Kepaskibrakaan			
2.19.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Provinsi			
2.19.03.1.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Provinsi			
2.19.03.1.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan Pekan Paralimpik Provinsi dan Pekan Paralimpik Pelajar Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.19.03.1.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan dalam Multi Event dan Single Event			
2.19.03.1.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			
2.19.03.1.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Provinsi			
2.19.03.1.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Provinsi			
2.19.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			
2.19.03.1.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan			
2.19.03.1.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
2.19.03.1.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			
2.20.02.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.20.02.1.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
2.20.02.1.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral			
2.20.02.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
2.20.02.1.01.0005	Pengembangan Infrastruktur			
2.20.02.1.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			
2.20.02.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
2.20.02.1.01.0008	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			
2.20.02.1.01.0009	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			
2.20.02.1.01.0010	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			
2.20.02.1.01.0011	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			
2.21.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.21.02.1.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
2.21.02.1.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
2.21.02.1.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			
2.21.02.1.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			
2.22.02.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan			
2.23.02.1.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			
2.23.02.1.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Provinsi			
2.23.02.1.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.23.02.1.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi			
2.23.03.1.03.0001	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
2.23.03.1.03.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
2.24.02.1.01.0001	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			
2.24.02.1.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			
2.24.02.1.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi			
2.24.02.1.02.0002	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis			
2.24.03.1.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
2.24.03.1.01.0002	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.24.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
2.24.04.1.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
2.24.04.1.01.0003	Penyusunan dan Penerapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dan/atau dikecualikan			
3.25.02.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil			
3.25.02.1.02.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			
3.25.02.1.02.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.02.1.02.0003	Pelaksanaan Fasilitasi Penerbitan Rekomendasi Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi bagi Masyarakat Lokal dan Tradisional			
3.25.02.1.02.0005	Pencatatan dan Pengadministrasian Izin Lokasi Perairan dalam Sistem Kadaster Laut			
3.25.03.1.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
3.25.03.1.02.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap			
3.25.03.1.02.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
3.25.03.1.03.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3.25.03.1.03.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.03.1.03.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3.25.03.1.04.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil			
3.25.03.1.04.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Bukan Dimiliki oleh Nelayan Kecil			
3.25.03.1.05.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			
3.25.03.1.05.0002	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.03.1.07.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3.25.03.1.08.0002	Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
3.25.03.1.09.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT			
3.25.03.1.10.0002	Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
3.25.04.1.05.0003	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien Apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.04.1.05.0005	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3.25.04.1.05.0006	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3.25.04.1.05.0008	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3.25.04.1.05.0009	Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.04.1.06.0001	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3.25.04.1.06.0002	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3.25.05.1.01.0001	Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil			
3.25.05.1.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil			
3.25.05.1.01.0003	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.05.1.01.0004	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)			
3.25.05.1.02.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			
3.25.05.1.02.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya			
3.25.05.1.02.0003	Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.06.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3.25.06.1.01.0002	Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3.25.06.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3.25.06.1.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.06.1.02.0002	Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing			
3.25.06.1.03.0003	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3.26.02.1.01.0002	Perancangan dan Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			
3.26.02.1.01.0003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			
3.26.02.1.01.0004	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi			
3.26.02.1.02.0003	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3.26.02.1.02.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.26.02.1.02.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi			
3.26.02.1.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3.26.02.1.03.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3.26.02.1.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi			
3.26.02.1.04.0001	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi			
3.26.02.1.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupten/Kota			
3.26.02.1.04.0003	Pengelolaan Investasi Pariwisata			
3.26.02.1.04.0004	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			
3.26.02.1.04.0005	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.26.02.1.04.0006	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah			
3.26.03.1.01.0002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri			
3.26.03.1.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik Dalam dan Luar Negeri			
3.26.03.1.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri			
3.26.04.1.01.0001	Layanan Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif			
3.26.04.1.01.0002	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik			
3.26.04.1.02.0001	Pengembangan Riset			
3.26.04.1.02.0002	Pengembangan Pendidikan			
3.26.04.1.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan			
3.26.04.1.02.0004	Penyediaan Infrastruktur			
3.26.04.1.02.0006	Pemberian Insentif			
3.26.04.1.02.0007	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.26.04.1.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas			
3.26.04.1.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif			
3.26.04.1.02.0018	Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual			
3.26.05.1.01.0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan			
3.26.05.1.01.0002	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
3.26.05.1.01.0003	Pelatihan Berbasis Kompetensi Bidang Homestay dan Pemandu Wisata (Tour Guide) Tingkat Lanjutan			
3.26.05.1.01.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)			
3.26.05.1.01.0006	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)			
3.26.05.1.01.0009	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.26.05.1.01.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3.26.05.1.01.0015	Diklat Teknis Kepariwisataan Tingkat Lanjutan bagi Pemerintah Daerah			
3.26.05.1.02.0002	Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha			
3.27.02.1.02.0002	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Hortikultura			
3.27.02.1.02.0003	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan			
3.27.02.1.02.0004	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Perkebunan			
3.27.02.1.02.0005	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Hortikultura, Tanaman Pangan, dan Perkebunan			
3.27.02.1.03.0001	Penilaian Kultivar SDG Hewan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.27.02.1.04.0002	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3.27.02.1.04.0003	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi			
3.27.02.1.05.0001	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
3.27.02.1.05.0002	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan			
3.27.02.1.07.0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain			
3.27.03.1.01.0002	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian			
3.27.03.1.01.0005	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.27.03.1.01.0006	Pembangunan dan Pemeliharaan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan			
3.27.03.1.01.0008	Pembangunan dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			
3.27.04.1.01.0001	Pengendalian Risiko dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			
3.27.04.1.01.0002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3.27.04.1.02.0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan			
3.27.04.1.02.0002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			
3.27.04.1.02.0003	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Provinsi			
3.27.04.1.04.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikasi Keamanan Produk Hewan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.27.04.1.04.0002	Pengembangan Kompetensi Petugas Penilai Penerapan Persyaratan Teknis			
3.27.04.1.05.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Kesejahteraan Hewan dan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)			
3.27.05.1.01.0004	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3.27.06.1.01.0003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			
3.27.07.1.01.0001	Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian ASN			
3.27.07.1.01.0002	Kerja Sama Pengembangan Kompetensi Penyuluh Pertanian Swadaya dan Swasta			
3.27.07.1.03.0001	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Koorporasi Petani			
3.27.07.1.03.0002	Pendampingan Manajemen Koorporasi Petani			
3.27.07.1.03.0003	Penilain Kelayakan dan Standarisasi Manajamen Koorporasi Petani			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.27.07.1.03.0004	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani			
3.27.07.3.02.0003	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi			
3.27.07.4.02.0003	Pengelolaan UPTD Penyuluhan Pertanian di Tingkat Provinsi			
3.28.03.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Operasionalisasi KPH			
3.28.03.1.01.0009	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penatagunaan Kawasan hutan			
3.28.03.1.03.0003	Pelayanan Perizinan Usaha/Kerja Sama Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani			
3.28.03.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Produksi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.28.03.1.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Izin Usaha atau Kerjasama Pemanfaatan di Kawasan Hutan Lindung			
3.28.03.1.03.0006	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Produksi			
3.28.03.1.03.0007	Penilaian Rencana Pengelolaan di Kawasan Hutan Lindung			
3.28.03.1.03.0008	Pelaksanaan Pemanfaatan Hutan di KPH			
3.28.03.1.03.0009	Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Jasa Lingkungan			
3.28.03.1.04.0005	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air Hutan dan Lahan			
3.28.03.1.04.0006	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan			
3.28.03.1.05.0001	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hutan			
3.28.03.1.05.0002	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan Hutan			
3.28.03.1.05.0003	Pencegahan dan Pembatasan Kerusakan Hasil Hutan			
3.28.03.1.05.0008	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.28.03.1.06.0001	Pengolahan Bahan Baku Hasil Hutan Bukan Kayu Hayati			
3.28.03.1.06.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHHBK) melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3.28.03.1.06.0003	Pembudidayaan Hasil Hutan Bukan Kayu dengan tidak Mengurangi Fungsi Pokoknya			
3.28.03.1.06.0004	Pengawasan Perizinan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu			
3.28.03.1.07.0001	Rencana Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			
3.28.03.1.07.0002	Pembinaan dan Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.28.03.1.07.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3.28.03.1.08.0001	Penetapan Rencana Pengelolaan Tempat Ibadah dan Wisata Rohani di Kawasan Hutan			
3.28.03.1.08.0002	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan KHDTK untuk Tempat Ibadah dan Wisata Rohani			
3.28.03.1.09.0001	Penetapan Pengadaan Benih dan Pengedar Benih dan/atau Bibit Terdaftar			
3.28.04.1.01.0001	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			
3.28.04.1.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi			
3.28.04.1.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Provinsi			
3.28.04.1.01.0004	Pengawetan Koridor Hidupan Liar			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.28.04.1.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Provinsi			
3.28.04.1.01.0009	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Provinsi			
3.28.04.1.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA			
3.28.04.1.03.0003	Perencanaan Pemanfaatan Ekosistem Lahan Basah			
3.28.05.1.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan dan SDM Bidang Kehutanan			
3.28.05.1.01.0003	Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial			
3.28.05.1.01.0006	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial			
3.28.06.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS			
3.28.06.1.01.0002	Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS			
3.28.06.1.01.0003	Penerapan Teknik Konservasi Tanah dan Air di Wilayah DAS			
3.28.06.1.01.0006	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan DAS			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.29.02.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			
3.29.02.1.02.0002	Penyusunan Rekomendasi Layanan Perizinan dan Informasi Izin Pengeboran, Izin Penggalian, Izin Pemakaian, dan Izin Pengusahaan Air Tanah			
3.29.02.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pengeboran, Penggalian, Pemakaian, dan Pengusahaan Air Tanah			
3.29.03.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.29.03.1.02.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			
3.29.03.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			
3.29.03.1.02.0004	Pengawasan Teknis Kaidah Pertambangan yang baik Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.29.03.1.03.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut			
3.29.03.1.04.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat			
3.29.03.1.05.0001	Penetapan Prosedur dan Pesyaratan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.29.03.1.05.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			
3.29.03.1.05.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama			
3.29.03.1.06.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.29.03.1.08.0001	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan			
3.29.03.1.09.0001	Pengelolaan dan Pengendalian Perizinan Usaha Pertambangan Operasi Produksi untuk Penjualan			
3.29.03.1.10.0001	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Kepemilikan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara			
3.29.03.1.11.0001	Pengelolaan dan Pengawasan Pengusahaan Pertambangan yang Dilakukan Pemegang Izin Usaha Pertambangan			
3.29.05.1.02.0001	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3.29.05.1.02.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.29.05.1.02.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
3.29.05.1.04.0001	Perumusan dan Penetapan Kebijakan Strategi dan Program Konservasi Energi			
3.29.05.1.04.0002	Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Pelaksanaan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			
3.29.05.1.04.0003	Sosialisasi secara Menyeluruh dan Komprehensif untuk Penggunaan Teknologi yang Menerapkan Konservasi Energi			
3.29.05.1.04.0004	Pengalokasian Anggaran untuk Program Konservasi Energi			
3.29.05.1.04.0005	Pemberian Insentif dan/atau Disinsentif Konservasi Energi			
3.29.05.1.04.0006	Bimbingan Teknis Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			
3.29.05.1.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan Konservasi Energi Kewenangan Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.29.06.1.02.0002	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Operasi yang Fasilitas Instalasinya dalam Daerah Provinsi			
3.29.06.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3.29.06.1.03.0002	Penentuan dan Penetapan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3.29.06.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Tarif Tenaga Listrik untuk Konsumen			
3.29.06.1.03.0004	Penetapan Prosedur dan Persyaratan Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3.29.06.1.03.0005	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.29.06.1.03.0006	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Pemanfaatan Jaringan untuk Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika dari Pemegang Izin yang Ditetapkan oleh Daerah Provinsi			
3.29.06.3.06.0008	Penyedia Solar Sel bagi Masyarakat Kampung			
3.30.02.1.02.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3.30.02.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan API melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			
3.30.04.1.03.0001	Pemeriksaan Dokumen Perizinan Kegiatan Distribusi			
3.30.05.1.01.0005	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			
3.30.06.1.02.0001	Verifikasi Mutu Produk			
3.30.06.1.02.0002	Pengembangan Layanan Pengujian			
3.30.06.1.02.0003	Pengembangan Layanan Sertifikasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.30.06.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen			
3.30.06.1.03.0002	Fasilitasi Penanganan terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Perlindungan Konsumen			
3.30.07.1.01.0001	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
3.30.07.1.02.0001	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
3.30.07.1.03.0001	Fasilitasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi			
3.30.07.1.03.0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			
3.31.03.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.31.03.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi			
4.02.02.1.04.0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			
4.02.04.3.01.0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya			
4.02.04.3.01.0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat Pada Umumnya			
4.02.04.3.02.0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota			
4.02.04.3.02.0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan			
4.02.04.3.02.0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi			
4.02.04.3.02.0004	Pelaksanaan Hak dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP			
4.02.04.3.02.0005	Penyusunan Peraturan MRP			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4.02.04.3.02.0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan			
4.02.05.4.01.0001	Bimbingan Teknis Penguatan Kapasitas Lembaga DPRD Kerjasama dengan Badan Diklat Kementerian Dalam Negeri			
4.02.05.4.01.0002	Penyediaan Dana General Check-up Pimpinan dan Anggota DPR PB			
4.02.05.4.01.0003	Pengawasan atas Pelaksanaan Otsus			
4.02.05.4.01.0004	Bimbingan Teknis Pembekalan bagi Anggota DPRD			
4.02.05.4.01.0005	Fasilitasi Forum Komunikasi DPR Papua Barat			
4.02.06.4.01.0001	Pemberian Saran, Pertimbangan, dan Persetujuan			
4.02.06.4.01.0002	Penyaluran Aspirasi Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat pada Umumnya			
4.02.06.4.01.0003	Fasilitasi dan Penyelesaian Permasalahan Berdasarkan Aspirasi dan Pengaduan Masyarakat Adat, Umat Beragama, Kaum Perempuan, dan Masyarakat Pada Umumnya			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
4.02.06.4.02.0001	Pelaksanaan Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota			
4.02.06.4.02.0002	Pelaksanaan Hak dalam Permintaan Keterangan			
4.02.06.4.02.0003	Pelaksanaan Hak dalam Peninjauan Kembali Perdasi			
4.02.06.4.02.0004	Pelaksanaan Hak Dalam Pengajuan Rencana Anggaran Belanja MRP			
4.02.06.4.02.0005	Penyusunan Peraturan MRP			
4.02.06.4.02.0006	Penunjang Fungsi Alat Kelengkapan			
7.01.02.6.01.0001	Perencanaan Rehab Total Rumah Dinas Camat			
7.01.02.6.01.0002	Pengadaan Peralatan dan Mebel Rumah Dinas Lurah			
7.01.02.6.01.0003	Pengadaan Peralatan dan Mebel Kantor Lurah			
7.01.02.6.01.0004	Rehab Berat Kantor Lurah Kota Administrasi			
7.01.02.6.01.0005	Rehab Sedang Rumah Dinas Camat Kota Administrasi			
7.01.02.6.01.0006	Perencanaan Rehab Total Kantor Lurah Kota Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.01.02.6.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemeliharaan dan Penanganan Kebersihan Lingkungan			
7.01.02.6.02.0002	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kelurahan			
7.01.02.6.02.0003	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kelurahan			
7.01.02.6.02.0004	Peningkatan Peran Kelembagaan RT, RW dan LMK Tingkat Kelurahan			
7.01.02.6.02.0005	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kelurahan			
7.01.02.6.02.0006	Penanganan Bencana Tingkat Kelurahan			
7.01.02.6.02.0007	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kelurahan			
7.01.02.6.02.0008	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kelurahan			
7.01.02.6.02.0009	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Keolahragaan Tingkat Kelurahan			
7.01.02.6.03.0001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus			
7.01.02.6.03.0002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.01.02.6.03.0003	Pemeliharaan KDO Kecamatan			
7.01.02.6.03.0004	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Petugas Kapal Dinas			
7.01.02.6.04.0001	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat Kecamatan			
7.01.02.6.04.0002	Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kecamatan			
7.01.02.6.04.0003	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pelestarian Kesenian dan Budaya Tingkat Kecamatan			
7.01.02.6.04.0004	Penyelenggaraan Posko Bersama Pemilu Tingkat Kecamatan			
7.01.02.6.05.0001	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Tingkat Kecamatan			
7.01.02.6.05.0002	Penyediaan Jasa dan Pengadaan Perlengkapan Pertamanan dan Pemakaman			
7.01.02.6.05.0003	Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan pada Wilayah Kabupaten Administrasi			
7.01.02.6.05.0004	Pembangunan Sarana dan Prasarana Taman dan Makam pada Wilayah Kabupaten Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.02.02.6.01.0001	Pengisian Alat Pemadam Api Ringan (APAR)			
7.02.02.6.02.0001	Penyediaan Jasa Perizinan KDO/KDO Khusus			
7.02.02.6.02.0002	Penyediaan BBM KDO/KDO Khusus			
7.02.02.6.02.0003	Pemeliharaan KDO/KDO Khusus Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0006	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Kinerja Walikota Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0007	Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0014	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi BOP dan BOS di Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0017	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0020	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan/Pembangunan/Rehab Total/Rehab Sedang Kantor Lurah Kota Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.02.02.6.03.0021	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sarana dan Prasarana Kota di Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0022	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan			
7.02.02.6.03.0023	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0029	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Kepariwisataan dan Ketenagakerjaan pada Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0030	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Perpasaran Swasta, UKM pada Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0031	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perhubungan serta Perindustrian dan Energi Kota Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.02.02.6.03.0032	Keikutsertaan Pemerintah Kota Administrasi pada Pelaksanaan MTQ Tingkat Provinsi DKI Jakarta			
7.02.02.6.03.0033	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0034	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Mental, Spiritual, Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0035	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0036	Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0037	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Tingkat Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0038	Pelaksanaan Koordinasi Bidang Perbendaharaan Kota Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.02.02.6.03.0040	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0042	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0045	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Administrasi			
7.02.02.6.03.0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.02.02.6.03.0046	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan di Bawah Koordinasi Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Kota Administrasi			
7.03.02.6.01.0001	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Kabupaten (FORKOPIMKAB)			
7.03.02.6.01.0002	Tatap Muka Bupati Beserta SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK, FKDM, FPK, DEKAB, TOMAS dan Lembaga Masyarakat Lainnya			
7.03.02.6.01.0003	Partisipasi Kabupaten Administrasi dalam APKASI			
7.03.02.6.01.0004	Penyusunan dan Evaluasi Standar dan Operasional dan Prosedur Kabupaten			
7.03.02.6.01.0005	Peningkatan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Kabupaten			
7.03.02.6.01.0006	Pelaksanaan Rapim dan Rakorwil Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.01.0007	Peningkatan Wawasan bagi Anggota LMK, RW, RT dan DEKAB			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.03.02.6.01.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Penataan Kawasan di Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.01.0009	Penagihan Kewajiban Fasos Fasum dan Sinkronisasi Data SIPPT Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.01.0010	Partisipasi Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pameran APKASI			
7.03.02.6.01.0011	Pemantauan Aksi Kebersihan Minggu Pagi (AKMP) dan Silaturahmi Minggu Pagi (SMP) Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.02.0001	Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Tingkat Kabupaten			
7.03.02.6.02.0002	Peningkatan dan Pembinaan Kota Peduli HAM (Hak Asasi Manusia)			
7.03.02.6.02.0003	Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten			
7.03.02.6.02.0004	Pengendalian dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tingkat Kabupaten Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.03.02.6.02.0005	Pekan Olahraga dan Seni Budaya bagi Anggota KORPRI			
7.03.02.6.02.0006	Pelaksanaan Character Building Pegawai Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.02.0007	Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai Keagamaan bagi Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.02.0008	PORSENIBUD Anggota KORPRI Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.02.0009	Pembekalan Pegawai yang akan Memasuki Batas Usia Pensiun di Lingkungan Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.02.0010	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan			
7.03.02.6.02.0011	Pembinaan dan Evaluasi Kecamatan dan Kelurahan			
7.03.02.6.03.0001	Pembinaan dan Pendampingan Wirausaha			
7.03.02.6.03.0002	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Layak Anak di Kota/Kabupaten			
7.03.02.6.03.0003	Pembinaan dan Pemantauan Pelaksanaan Perluasan Kerja, Penyaluran dan Penempatan Tenaga Kerja			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.03.02.6.03.0004	Pembinaan Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Kesejahteraan Pekerja			
7.03.02.6.03.0005	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Kota Sehat di Kabupaten			
7.03.02.6.03.0006	Perencanaan Penataan Sarana dan Prasarana PKL			
7.03.02.6.03.0007	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Sumber Daya Air, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan di Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.03.0008	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Perindustrian dan Energi, Pariwisata dan Kebudayaan, Perhubungan Tingkat Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.03.0009	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembentukan Kewirausahaan Baru pada Kabupaten Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.03.02.6.03.0010	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan dan Pemanfaatan Ruang Bangunan Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.03.0011	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian serta Lingkungan Hidup dan Kebersihan di Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.03.0012	Pelantikan Gugus Depan Tingkat Kwarcab Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.03.0013	Pelaksanaan Koordinasi, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dibawah Koordinasi Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten			
7.03.02.6.03.0014	Dialog Interaktif Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Tingkat Kabupaten Administrasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN PROVINSI	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
7.03.02.6.03.0015	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Kesehatan, Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk			
7.03.02.6.03.0016	Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Bidang Pendidikan, Olahraga dan Pemuda serta Perpustakaan dan Arsip			
7.03.02.6.03.0017	Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan Tingkat Kabupaten Administrasi			
7.03.02.6.03.0018	Pelatihan Keterampilan dan Ketenagakerjaan			
7.03.02.6.03.0019	Penyediaan Akomodasi Pengiriman Peserta Pelatihan ke Pusat Pelatihan Kerja Daerah			

C. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.2.01.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru			
1.01.02.2.01.0008	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas			
1.01.02.2.01.0012	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah			
1.01.02.2.01.0017	Pengadaan Perlengkapan Siswa			
1.01.02.2.01.0018	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan			
1.01.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah			
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar			
1.01.02.2.01.0022	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1.01.02.2.01.0023	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1.01.02.2.01.0024	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar			
1.01.02.2.01.0040	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.2.02.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.2.02.0013	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah			
1.01.02.2.02.0015	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah			
1.01.02.2.02.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama			
1.01.02.2.02.0028	Pengadaan Perlengkapan Siswa			
1.01.02.2.02.0029	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan			
1.01.02.2.02.0031	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.2.02.0033	Perlengkapan Dasar Buku Teks Peserta Didik			
1.01.02.2.02.0034	Perlengkapan Belajar Peserta Didik			
1.01.02.2.02.0035	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1.01.02.2.02.0036	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik			
1.01.02.2.02.0037	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			
1.01.02.2.02.0044	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU			
1.01.02.2.02.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kepala Sekolah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.2.02.0053	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.2.02.0057	Penyediaan infrastruktur TIK			
1.01.02.2.03.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
1.01.02.2.03.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
1.01.02.2.03.0005	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
1.01.02.2.03.0006	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD			
1.01.02.2.03.0010	Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD			
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD			
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD			
1.01.02.2.03.0014	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD			
1.01.02.2.03.0027	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.2.04.0001	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0004	Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0005	Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0006	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0007	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.2.04.0009	Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0011	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0012	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0013	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0019	Pembangunan Laboratorium			
1.01.02.2.04.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium			
1.01.02.2.04.0022	Penyelenggaraan Ujian bagi Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan			
1.01.02.2.04.0029	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.2.04.0050	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah			
1.01.02.3.05.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru			
1.01.02.3.05.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika			
1.01.02.3.05.0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.3.05.0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA			
1.01.02.3.05.0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.3.05.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi			
1.01.02.3.05.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika			
1.01.02.3.05.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia			
1.01.02.3.05.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer			
1.01.02.3.05.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa			
1.01.02.3.05.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA			
1.01.02.3.05.0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.3.05.0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1.01.02.3.05.0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.3.05.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1.01.02.3.05.0048	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.3.05.0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.3.06.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah			
1.01.02.3.06.0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.3.06.0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir			
1.01.02.3.06.0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.3.06.0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1.01.02.3.06.0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.3.06.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1.01.02.3.06.0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			
1.01.02.3.06.0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.4.05.0002	Penambahan Ruang Kelas Baru			
1.01.02.4.05.0004	Pembangunan Ruang Laboratorium Biologi			
1.01.02.4.05.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium Fisika			
1.01.02.4.05.0006	Pembangunan Ruang Laboratorium Kimia			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.4.05.0007	Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer			
1.01.02.4.05.0008	Pembangunan Ruang Laboratorium Bahasa			
1.01.02.4.05.0009	Pembangunan Ruang Laboratorium IPA			
1.01.02.4.05.0018	Pembangunan Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.4.05.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Biologi			
1.01.02.4.05.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Fisika			
1.01.02.4.05.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Kimia			
1.01.02.4.05.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Komputer			
1.01.02.4.05.0025	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium Bahasa			
1.01.02.4.05.0026	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium IPA			
1.01.02.4.05.0035	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.4.05.0042	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1.01.02.4.05.0044	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.4.05.0046	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.02.4.05.0048	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Atas			
1.01.02.4.05.0062	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.02.4.06.0002	Penambahan Ruang Kelas Sekolah			
1.01.02.4.06.0014	Pembangunan Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.4.06.0024	Rehabilitasi Fasilitas Parkir			
1.01.02.4.06.0027	Rehabilitasi Ruang/Sudut Baca			
1.01.02.4.06.0034	Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang Sekolah			
1.01.02.4.06.0036	Pemeliharaan Rutin Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah			
1.01.02.4.06.0038	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Siswa			
1.01.02.4.06.0040	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan			
1.01.02.4.06.0055	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan			
1.01.03.2.01.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.03.2.02.0001	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal			
1.01.05.3.04.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.01.05.3.04.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.01.05.4.04.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.01.05.4.04.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Izin PAUD,dan Pendidikan Non Formal/Kesetaraan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat			
1.01.06.2.01.0001	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah Kabupaten / Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.01.06.2.01.0003	Publikasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota			
1.01.06.2.01.0005	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota			
1.01.06.2.01.0006	Peningkatan Apresiasi Siswa Terhadap Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.02.02.2.01.0005	Pengembangan Rumah Sakit			
1.02.02.2.01.0012	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1.02.02.2.01.0013	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1.02.02.2.01.0016	Pengadaan Obat, Vaksin			
1.02.02.2.01.0017	Pengadaan Bahan Habis Pakai			
1.02.02.2.01.0018	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan			
1.02.02.2.01.0019	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.02.02.2.01.0021	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya			
1.02.02.2.02.0023	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus			
1.02.02.2.02.0031	Pengelolaan Penelitian Kesehatan			
1.02.02.2.02.0039	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga			
1.02.02.2.03.0001	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan			
1.02.02.2.03.0003	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet			
1.02.02.3.02.0049	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis			
1.02.02.3.02.0051	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria			
1.02.02.3.02.0063	Penanggulangan penyakit Malaria			
1.02.02.4.02.0049	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis			
1.02.02.4.02.0051	Pelayanan Kesehatan Penderita Malaria			
1.02.02.4.02.0063	Penanggulangan penyakit Malaria			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.02.04.2.01.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1.02.04.2.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)			
1.02.04.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga			
1.02.04.2.06.0002	Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga			
1.03.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya			
1.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Air Tanah dan Air Baku			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.2.01.0003	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai			
1.03.02.2.01.0004	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0005	Pembangunan Bendungan			
1.03.02.2.01.0006	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1.03.02.2.01.0007	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1.03.02.2.01.0008	Pembangunan Unit Air Baku			
1.03.02.2.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai			
1.03.02.2.01.0010	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.2.01.0011	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
1.03.02.2.01.0012	Pembangunan Kanal Banjir			
1.03.02.2.01.0014	Pembangunan Polder/Kolam Retensi			
1.03.02.2.01.0016	Pembangunan Check Dam			
1.03.02.2.01.0017	Pembangunan Breakwater			
1.03.02.2.01.0018	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.2.01.0020	Rehabilitasi Bendungan			
1.03.02.2.01.0021	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			
1.03.02.2.01.0022	Rehabilitasi Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1.03.02.2.01.0023	Rehabilitasi Unit Air Baku			
1.03.02.2.01.0024	Rehabilitasi Tanggul Sungai			
1.03.02.2.01.0025	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.2.01.0027	Rehabilitasi Kanal Banjir			
1.03.02.2.01.0029	Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi			
1.03.02.2.01.0030	Rehabilitasi Bangunan Sabo			
1.03.02.2.01.0032	Rehabilitasi Breakwater			
1.03.02.2.01.0033	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.2.01.0034	Peningkatan Tanggul Sungai			
1.03.02.2.01.0035	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.2.01.0036	Peningkatan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir			
1.03.02.2.01.0037	Peningkatan Kanal Banjir			
1.03.02.2.01.0038	Peningkatan Stasiun Pompa Banjir			
1.03.02.2.01.0039	Peningkatan Polder/Kolam Retensi			
1.03.02.2.01.0040	Peningkatan Bangunan Sabo			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.2.01.0041	Peningkatan Check Dam			
1.03.02.2.01.0042	Peningkatan Breakwater			
1.03.02.2.01.0043	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.2.01.0044	Peningkatan Flood Forecasting And Warning System (FFWS)			
1.03.02.2.01.0045	Revitalisasi Danau			
1.03.02.2.01.0046	Normalisasi/Restorasi Sungai			
1.03.02.2.01.0047	Pembangunan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1.03.02.2.01.0048	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan			
1.03.02.2.01.0049	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya			
1.03.02.2.01.0050	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Air Tanah untuk Air Baku			
1.03.02.2.01.0051	Operasi dan Pemeliharaan Embung Air Baku			
1.03.02.2.01.0052	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku			
1.03.02.2.01.0053	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai			
1.03.02.2.01.0054	Operasi dan Pemeliharaan Kanal Banjir			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.2.01.0055	Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir			
1.03.02.2.01.0056	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi			
1.03.02.2.01.0057	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sabo			
1.03.02.2.01.0058	Operasi dan Pemeliharaan Check Dam			
1.03.02.2.01.0059	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.2.01.0060	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0061	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0062	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0063	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0064	Operasi dan Pemeliharaan Danau			
1.03.02.2.01.0065	Operasi dan Pemeliharaan Sungai			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.2.01.0066	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1.03.02.2.01.0067	Revitalisasi Penampung Air Alami Lainnya			
1.03.02.2.01.0068	Operasi dan Pemeliharaan Penampung Air Alami Lainnya			
1.03.02.2.01.0070	Operasi dan Pemeliharaan Situ			
1.03.02.2.01.0071	Operasi dan Pemeliharaan Unit Air Baku			
1.03.02.2.01.0074	Operasi dan Pemeliharaan Breakwater/Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.2.01.0076	Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur untuk Melindungi Mata Air			
1.03.02.2.01.0077	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air WS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.03.02.2.01.0079	Operasi dan Pemeliharaan Danau			
1.03.02.2.01.0087	Peningkatan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.2.01.0092	Peningkatan Breakwater			
1.03.02.2.01.0094	Peningkatan Check Dam			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.2.01.0109	Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.2.01.0110	Rehabilitasi Bangunan Perkuatan Tebing			
1.03.02.2.01.0114	Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya			
1.03.02.2.01.0117	Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya			
1.03.02.2.02.0001	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
1.03.02.2.02.0003	Pembangunan Bendung Irigasi			
1.03.02.2.02.0006	Pembangunan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.2.02.0009	Peningkatan Bendung Irigasi			
1.03.02.2.02.0012	Peningkatan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.2.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi			
1.03.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.2.02.0020	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa			
1.03.02.2.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.02.2.02.0025	Operasi dan Pemeliharaan Sumur Jaringan Irigasi Air Tanah			
1.03.02.2.02.0027	Operasional Unit Pengelola Irigasi			
1.03.02.2.02.0028	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
1.03.02.2.02.0029	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa			
1.03.02.2.02.0031	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Konservasi Kawasan Rawa			
1.03.02.2.02.0032	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi			
1.03.02.2.02.0033	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemeliharaan Kawasan Rawa			
1.03.02.2.02.0034	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi			
1.03.02.2.02.0035	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa			
1.03.03.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM			
1.03.03.2.01.0002	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.03.2.01.0003	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
1.03.03.2.01.0004	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1.03.03.2.01.0005	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
1.03.03.2.01.0006	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1.03.03.2.01.0007	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
1.03.03.2.01.0008	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1.03.03.2.01.0009	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tarif Air Minum			
1.03.03.2.01.0010	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha Untuk Kebutuhan Sendiri			
1.03.03.2.01.0011	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan Kelompok Masyarakat			
1.03.03.2.01.0012	Fasilitasi Penyiapan Kerja Sama SPAM			
1.03.03.2.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kerja Sama SPAM			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.03.2.01.0014	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM			
1.03.03.2.01.0015	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan			
1.03.03.2.01.0016	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan			
1.03.03.2.01.0017	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1.03.03.2.01.0018	Peningkatan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1.03.03.2.01.0019	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1.03.03.2.01.0020	Perbaikan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan			
1.03.03.2.01.0021	Perbaikan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan			
1.03.03.2.01.0023	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			
1.03.04.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi, dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.04.2.01.0002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.03.04.2.01.0003	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1.03.04.2.01.0004	Rehabilitasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1.03.04.2.01.0005	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1.03.04.2.01.0006	Penyediaan Sarana Persampahan			
1.03.04.2.01.0007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Infrastruktur Persampahan			
1.03.04.2.01.0008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Penyediaan Sarana TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1.03.04.2.01.0010	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS			
1.03.04.2.01.0011	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan			
1.03.04.2.01.0014	Pembinaan Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan Desa			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.05.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.05.2.01.0002	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			
1.03.05.2.01.0003	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota			
1.03.05.2.01.0004	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota			
1.03.05.2.01.0005	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman			
1.03.05.2.01.0006	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat			
1.03.05.2.01.0007	Pembinaan Teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1.03.05.2.01.0008	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.05.2.01.0009	Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1.03.05.2.01.0010	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik			
1.03.05.2.01.0011	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman			
1.03.05.2.01.0012	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman			
1.03.05.2.01.0013	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja			
1.03.05.2.01.0014	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja			
1.03.05.2.01.0015	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT			
1.03.05.2.01.0016	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasa n Sarana dan Prasarana IPLT			
1.03.05.2.01.0017	Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan/Perluasan Sarana dan Prasarana IPLT			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.05.2.01.0035	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat			
1.03.05.2.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)			
1.03.06.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan			
1.03.06.2.01.0002	Penyusunan Outline Plan pada Kawasan Genangan			
1.03.06.2.01.0003	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan			
1.03.06.2.01.0004	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Perkotaan			
1.03.06.2.01.0005	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan			
1.03.06.2.01.0006	Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan			
1.03.06.2.01.0007	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.06.2.01.0008	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan			
1.03.06.2.01.0009	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase			
1.03.06.2.01.0010	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan			
1.03.06.2.01.0011	Pembinaan Teknik Sistem Drainase Lingkungan			
1.03.06.2.01.0013	Peningkatan Saluran Drainase Lingkungan			
1.03.06.2.01.0014	Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan			
1.03.06.2.01.0015	Penyediaan Sarana Sistem Drainase Lingkungan			
1.03.06.2.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan			
1.03.07.2.01.0001	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.07.2.01.0002	Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0003	Pengawasan dan Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0004	Pembinaan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0005	Peningkatan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0008	Optimalisasi TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0009	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0012	Peningkatan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0013	Pembangunan SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0014	Optimalisasi SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.07.2.01.0016	Peningkatan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0017	Pembangunan TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0019	Pembangunan TPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0022	Optimalisasi TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0023	Pembangunan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0027	Optimalisasi TPS di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0028	Peningkatan SPA di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0029	Peningkatan TPS-3R di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0031	Pembangunan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			
1.03.07.2.01.0035	Peningkatan TPST di Kawasan Strategis Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.08.2.01.0001	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG			
1.03.08.2.01.0002	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.08.2.01.0003	Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota			
1.03.08.2.01.0004	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.08.2.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Bangunan Gedung Negara Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.08.2.01.0006	Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.08.2.01.0007	Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota			
1.03.08.2.01.0008	Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.08.2.01.0009	Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan			
1.03.08.2.01.0010	Pendaftaran Huruf Daftar Nomor (HDNo) Bangunan Gedung Negara			
1.03.08.2.01.0011	Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi			
1.03.08.2.01.0012	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota			
1.03.08.2.01.0013	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.09.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota			
1.03.09.2.01.0002	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.2.01.0003	Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.2.01.0004	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.2.01.0005	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.2.01.0006	Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.2.01.0007	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan			
1.03.09.2.01.0008	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.09.2.01.0009	Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
1.03.10.2.01.0001	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
1.03.10.2.01.0002	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan			
1.03.10.2.01.0003	Pengelolaan Leger Jalan			
1.03.10.2.01.0004	Survey Kondisi Jalan/Jembatan			
1.03.10.2.01.0005	Pembangunan Jalan			
1.03.10.2.01.0006	Pelebaran Jalan Menuju Standar			
1.03.10.2.01.0007	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			
1.03.10.2.01.0008	Rekonstruksi Jalan			
1.03.10.2.01.0009	Rehabilitasi Jalan			
1.03.10.2.01.0010	Pemeliharaan Berkala Jalan			
1.03.10.2.01.0011	Pemeliharaan Rutin Jalan			
1.03.10.2.01.0012	Pembangunan Jembatan			
1.03.10.2.01.0013	Pembangunan Flyover			
1.03.10.2.01.0014	Pembangunan Underpass			
1.03.10.2.01.0015	Pembangunan Terowongan/Tunnel			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.10.2.01.0016	Penggantian Jembatan			
1.03.10.2.01.0017	Pelebaran Jembatan			
1.03.10.2.01.0018	Rehabilitasi Jembatan			
1.03.10.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
1.03.10.2.01.0020	Pemeliharaan Berkala Jembatan			
1.03.10.2.01.0021	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat			
1.03.10.2.01.0022	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
1.03.10.2.01.0023	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan			
1.03.10.2.01.0024	Pembangunan Jalan Strategis Desa			
1.03.10.2.01.0025	Rekonstruksi Jalan Strategis Desa			
1.03.10.2.01.0026	Pembangunan Jembatan Gantung			
1.03.10.2.01.0027	Penggantian/Rehabilitasi Jembatan Gantung			
1.03.10.2.01.0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			
1.03.10.2.01.0031	Penggantian Jembatan			
1.03.10.2.01.0032	Pembangunan Jalan			
1.03.10.2.01.0033	Rekonstruksi Jalan			
1.03.10.2.01.0034	Pemeliharaan Berkala Jalan			
1.03.10.2.01.0035	Pembangunan Flyover			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.10.2.01.0036	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa			
1.03.10.2.01.0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar			
1.03.10.2.01.0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan			
1.03.10.2.01.0039	Rehabilitasi Jembatan			
1.03.10.2.01.0040	Pembangunan Jembatan			
1.03.10.2.01.0041	Pelebaran Jalan Menambah Lajur			
1.03.10.2.01.0042	Pemeliharaan Berkala Jembatan			
1.03.10.2.01.0044	Rehabilitasi Jalan			
1.03.10.2.01.0045	Pembangunan Terowongan/Tunnel			
1.03.10.2.01.0046	Pemeliharaan Rutin Jalan			
1.03.10.2.01.0047	Pembangunan Underpass			
1.03.10.2.01.0048	Pelebaran Jembatan			
1.03.11.2.01.0001	Penyiapan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1.03.11.2.01.0002	Penyiapan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan			
1.03.11.2.01.0003	Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1.03.11.2.01.0004	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.11.2.01.0005	Identifikasi Potensi Kerja Sama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi			
1.03.11.2.01.0006	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi			
1.03.11.2.01.0007	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi			
1.03.11.2.01.0008	Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi			
1.03.11.2.02.0001	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
1.03.11.2.02.0002	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi			
1.03.11.2.02.0003	Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI			
1.03.11.2.02.0004	Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat Dilaksanakan dengan Skema KPDBU			
1.03.11.2.02.0005	Penyusunan Data dan Informasi Potensi Risiko Investasi Infrastruktur			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.11.2.02.0006	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha			
1.03.11.2.02.0007	Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan			
1.03.11.2.02.0008	Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi			
1.03.11.2.02.0009	Penyusunan Data dan Informasi Tertib Penyelenggaraan Pekerjaan Konstruksi			
1.03.11.2.02.0010	Penyusunan Data dan Informasi Kecelakaan Kerja Proyek Konstruksi			
1.03.11.2.02.0011	Penyusunan Data dan Informasi Kegagalan Bangunan/Konstruksi			
1.03.11.2.03.0001	Penyusunan Peraturan di Daerah dan SOP Terkait Penyelenggaraan IUJK Nasional di Kabupaten/Kota			
1.03.11.2.03.0002	Dukungan/Fasilitasi Penyelenggaraan Penerbitan Rekomendasi Teknis IUJK Nasional			
1.03.11.2.03.0003	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.11.2.03.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Terkait IUJK Nasional			
1.03.11.2.03.0005	Pemantauan dan Evaluasi IUJK Nasional yang telah Diterbitkan			
1.03.11.2.03.0006	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi			
1.03.11.2.03.0007	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota			
1.03.11.2.04.0001	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1.03.11.2.04.0002	Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			
1.03.11.2.04.0003	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.11.2.04.0008	Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi			
1.03.11.4.01.0009	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketehnikan konstruksi bagi OAP			
1.03.12.2.01.0001	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota			
1.03.12.2.01.0002	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota			
1.03.12.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang			
1.03.12.2.01.0012	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan pedoman Bidang Penataan ruang			
1.03.12.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			
1.03.12.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.03.12.2.02.0003	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang			
1.03.12.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah			
1.03.12.2.03.0002	Sistem Informasi Penataan Ruang			
1.03.12.2.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			
1.03.12.2.04.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang			
1.03.12.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang			
1.03.13.5.01.0001	Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang pada Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1.03.13.5.01.0002	Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten			
1.03.13.5.01.0004	Penetapan RTR KSP			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.02.2.01.0001	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.01.0005	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.02.0002	Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan Bangunan			
1.04.02.2.02.0003	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Perumahan KPR-FLPP			
1.04.02.2.02.0005	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana			
1.04.02.2.03.0002	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.03.0003	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.02.2.03.0005	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.04.0001	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.04.0002	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			
1.04.02.2.07.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)			
1.04.03.2.01.0002	Penyusunan dan/atau Review serta Legalisasi Rencana Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.03.2.02.0001	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.02.0002	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.02.0003	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.02.0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.02.0006	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.02.0007	Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Masyarakat Terdampak Program Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.03.2.02.0009	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah			
1.04.03.2.03.0001	Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.03.0005	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.03.0006	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh			
1.04.03.2.03.0008	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni			
1.04.04.2.01.0002	Kerja Sama Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Beserta PSU di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.04.04.2.01.0003	Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha			
1.04.05.2.01.0002	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
1.04.05.2.01.0004	Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang			
1.04.05.2.01.0005	Kerja Sama Penyediaan/Pengelolaan PSU Permukiman			
1.04.05.2.01.0007	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian			
1.04.05.3.01.0007	Pembangunan Rumah Khusus			
1.04.05.4.01.0008	Pembangunan Rumah Khusus			
1.05.02.2.01.0001	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.02.2.01.0002	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa			
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia			
1.05.02.2.01.0007	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum			
1.05.02.2.01.0009	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada			
1.05.02.2.02.0001	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1.05.02.2.02.0002	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.02.2.02.0003	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota			
1.05.02.2.03.0001	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS			
1.05.03.2.01.0001	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.01.0002	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)			
1.05.03.2.01.0003	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)			
1.05.03.2.02.0001	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.02.0002	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.02.0003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.03.2.02.0004	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1.05.03.2.02.0005	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.02.0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
1.05.03.2.02.0007	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.02.0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.02.0009	Penyusunan Rencana Kontijensi			
1.05.03.2.02.0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
1.05.03.2.02.0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
1.05.03.2.02.0012	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam			
1.05.03.2.02.0014	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.02.0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.03.2.02.0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.03.0004	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.03.0005	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
1.05.03.2.03.0006	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit			
1.05.03.2.03.0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			
1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.04.0006	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.04.0009	Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota			
1.05.03.2.04.0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.05.04.2.01.0006	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			
1.05.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran			
1.05.04.2.01.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga			
1.05.04.2.05.0003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi			
1.06.02.2.01.0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT			
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota			
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)			
1.06.02.3.03.0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan			
1.06.02.3.03.0008	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota			
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal			
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak			
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi			
1.06.06.3.02.0003	Peningkatan Kapasitas Relawan Taruna Siaga Bencana			
2.07.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro			
2.07.04.2.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG			
2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG			
2.08.02.2.01.0005	Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota			
2.08.02.2.01.0006	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			
2.08.02.2.01.0008	Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
2.08.02.2.02.0004	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi			
2.08.02.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.03.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.02.2.03.0004	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.02.2.03.0006	Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.01.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.03.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.03.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.03.0003	Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.03.2.03.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.04.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.01.0002	Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.01.0003	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.02.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.04.2.02.0003	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.04.2.03.0001	Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.05.2.01.0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.05.2.01.0002	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.02.0001	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.06.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.06.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.01.0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.07.2.01.0003	Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA			
2.08.07.2.01.0004	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA			
2.08.07.2.01.0005	Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota			
2.08.07.2.02.0001	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.07.2.02.0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.02.0004	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.02.0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.02.0006	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK			
2.08.07.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.08.07.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.08.07.2.03.0004	Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota			
2.08.07.2.03.0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			
2.08.07.2.03.0006	Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			
2.08.07.2.03.0008	Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.09.02.2.01.0001	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan			
2.09.02.2.01.0002	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur			
2.09.02.2.01.0005	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan			
2.09.03.2.01.0001	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan			
2.09.03.2.01.0004	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan			
2.09.03.2.01.0005	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan			
2.09.03.2.01.0006	Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia			
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota			
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan			
2.09.03.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota			
2.09.03.2.02.0004	Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.09.03.3.02.0005	Penyusuna kebijakan tata cara penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota melalui Peraturan Kabuapaten/Kota			
2.09.03.3.03.0002	Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota			
2.09.03.4.03.0002	Penyusunan Kebijakan mengenai penentuan harga Pangan Lokal Minimum daerah diatur dengan Peraturan Daerah, dan/atau Peraturan Bupati/Walikota			
2.09.04.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota			
2.09.05.2.01.0001	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05.2.01.0002	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05.2.01.0003	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.09.05.2.01.0005	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota			
2.09.05.3.02.0001	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro			
2.09.05.4.02.0001	Pembinaan keamanan pangan bagi pelaku usaha kecil dan mikro			
2.10.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha			
2.10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.10.06.2.01.0001	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah			
2.10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara			
2.11.02.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota			
2.11.02.2.02.0001	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.02.2.02.0003	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup			
2.11.03.2.01.0003	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota			
2.11.03.2.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar			
2.11.03.2.03.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Remediasi			
2.11.03.2.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi			
2.11.03.2.03.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi			
2.11.04.2.01.0002	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan			
2.11.04.2.01.0005	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya			
2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.05.2.01.0002	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3			
2.11.05.2.02.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.11.06.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup			
2.11.06.2.01.0003	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.11.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
2.11.08.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan			
2.11.10.2.01.0001	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota			
2.11.10.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan			
2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.10.2.01.0006	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota			
2.11.10.2.01.0007	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Penyidik PNS LHK Daerah			
2.11.11.2.01.0001	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota			
2.11.11.2.01.0002	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali			
2.11.11.2.01.0003	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota			
2.11.11.2.01.0006	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan			
2.11.11.2.01.0010	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanganan Sampah pada Kondisi Khusus			
2.11.11.2.01.0013	Pengurangan sampah melalui pemanfaatan kembali sampah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.11.11.2.01.0014	Penyediaan dan operasionalisasi sarana pemilahan sampah ke Fasilitas Pengelolaan Sampah Spesifik dan/atau Fasilitas Pengelolaan Sampah Lainnya			
2.11.11.2.01.0019	Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah			
2.11.11.2.01.0021	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan			
2.14.02.2.01.0001	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)			
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota			
2.14.02.2.01.0003	Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan			
2.14.02.2.01.0004	Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.2.01.0005	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			
2.14.02.2.01.0006	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal			
2.14.02.2.01.0007	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			
2.14.02.2.01.0008	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota			
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			
2.14.02.2.01.0010	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.2.01.0011	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan			
2.14.02.2.01.0012	Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			
2.14.02.2.01.0013	Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan			
2.14.02.2.01.0014	Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga			
2.14.02.2.01.0015	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK			
2.14.02.2.01.0018	Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal			
2.14.02.2.01.0019	Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.2.01.0020	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
2.14.02.2.01.0021	Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal			
2.14.02.2.01.0022	Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)			
2.14.02.2.02.0001	Perumusan Parameter Kependudukan			
2.14.02.2.02.0002	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan			
2.14.02.2.02.0003	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga			
2.14.02.2.02.0004	Pemetaan Kependudukan			
2.14.02.2.02.0005	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan			
2.14.02.2.02.0006	Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.02.2.02.0007	Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)			
2.14.02.2.02.0008	Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain			
2.14.02.2.02.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK			
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain			
2.14.02.2.02.0017	Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB			
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			
2.14.02.2.02.0020	Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.03.2.01.0001	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja			
2.14.03.2.01.0002	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal			
2.14.03.2.01.0003	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK			
2.14.03.2.01.0004	Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang			
2.14.03.2.01.0005	Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Sesuai Kearifan Budaya Lokal dalam Pencitraan Program KKBPK			
2.14.03.2.01.0006	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)			
2.14.03.2.01.0007	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK			
2.14.03.2.02.0001	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.03.2.02.0003	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
2.14.03.2.02.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			
2.14.03.2.03.0002	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB			
2.14.03.2.03.0009	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan			
2.14.03.2.03.0012	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.03.2.03.0014	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan			
2.14.03.2.04.0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			
2.14.03.2.04.0003	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB			
2.14.03.2.04.0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB			
2.14.04.2.01.0001	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.04.2.01.0002	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.14.04.2.01.0003	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.14.04.2.01.0004	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.14.04.2.01.0005	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.04.2.01.0006	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.14.04.2.01.0007	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			
2.14.04.2.01.0009	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK			
2.14.04.2.01.0010	Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK			
2.14.04.2.01.0011	Advokasi dan Promosi IPK			
2.14.04.2.01.0012	Sosialisasi IPK			
2.14.04.2.01.0013	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.04.2.01.0022	Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)			
2.14.04.2.02.0001	Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.14.04.2.02.0002	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)			
2.14.04.2.02.0004	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja			
2.15.02.2.01.0003	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.03.0002	Pembangunan Gedung Terminal			
2.15.02.2.03.0003	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal			
2.15.02.2.03.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			
2.15.02.2.03.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C			
2.15.02.2.06.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.02.2.06.0002	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			
2.15.02.2.06.0003	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.06.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.07.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin			
2.15.02.2.07.0002	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin			
2.15.02.2.07.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			
2.15.02.2.07.0007	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin			
2.15.02.2.08.0001	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ			
2.15.02.2.08.0002	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.02.2.08.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			
2.15.02.2.09.0001	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.14.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.15.02.2.15.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.02.2.15.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.15.02.2.16.0004	Penyelenggaraan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2.15.02.3.17.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			
2.15.02.3.17.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2.15.02.4.17.0001	Penyediaan Prasarana Transportasi Terminal, Fasilitas Pendukung dan Integrasi Moda			
2.15.02.4.17.0002	Penyediaan Sistem Manajemen Transportasi Cerdas			
2.15.03.2.06.0001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.03.2.06.0002	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Kapal dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terletak pada Jaringan Jalan Kabupaten/Kota dan/atau Jaringan Jalur Kereta Api Kabupaten/Kota dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.03.2.07.0001	Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.03.2.07.0002	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			
2.15.03.2.13.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau			
2.15.03.2.13.0005	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan pelabuhan Sungai dan Danau			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.15.04.2.01.0001	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter			
2.15.04.3.02.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara			
2.15.04.3.02.0002	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara			
2.15.04.4.02.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara/Lapangan Udara			
2.15.04.4.02.0002	Pengelolaan Bandara/Lapangan Udara			
2.16.02.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik			
2.16.02.2.01.0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			
2.16.02.2.01.0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			
2.16.02.2.01.0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			
2.16.02.2.01.0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik			
2.16.02.2.01.0006	Pelayanan Informasi Publik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.16.02.2.01.0007	Layanan Hubungan Media			
2.16.02.2.01.0008	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan			
2.16.02.2.01.0009	Manajemen Komunikasi Krisis			
2.16.02.2.01.0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik			
2.16.02.2.01.0011	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah			
2.16.02.2.01.0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas			
2.16.02.2.01.0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.01.0001	Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.01.0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.01.0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.16.03.2.02.0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			
2.16.03.2.02.0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2.16.03.2.02.0003	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah			
2.16.03.2.02.0004	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah			
2.16.03.2.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi			
2.16.03.2.02.0006	Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik			
2.16.03.2.02.0007	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik			
2.16.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah			
2.16.03.2.02.0009	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.16.03.2.02.0010	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah			
2.16.03.2.02.0011	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)			
2.16.03.2.02.0012	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE			
2.16.03.2.02.0014	Koordinasi penyusunan proses bisnis			
2.16.03.2.02.0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda			
2.16.03.2.02.0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah			
2.16.03.2.02.0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi			
2.16.03.2.02.0018	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah			
2.16.03.2.02.0020	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.16.03.2.02.0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah			
2.16.03.2.02.0022	Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah			
2.16.03.2.02.0023	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas			
2.16.03.2.02.0027	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas			
2.16.03.2.02.0028	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE			
2.16.03.2.02.0029	Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE			
2.16.03.2.02.0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE			
2.17.03.2.01.0001	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.17.03.2.01.0002	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.17.04.2.01.0002	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.17.05.2.02.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM			
2.17.05.2.03.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro			
2.17.06.2.01.0001	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
2.17.07.2.01.0001	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.17.07.2.01.0006	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan			
2.17.08.2.01.0001	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi			
2.18.02.2.01.0002	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			
2.18.02.2.02.0002	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota			
2.18.03.2.01.0001	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal			
2.18.04.2.01.0001	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.18.04.2.01.0002	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.18.04.2.01.0003	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan			
2.18.04.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah			
2.18.05.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.18.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.18.05.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal			
2.18.06.2.01.0001	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula			
2.19.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota			
2.19.02.2.01.0004	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan			
2.19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.19.02.2.01.0006	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota			
2.19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi			
2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda			
2.19.02.2.01.0009	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera			
2.19.02.2.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha			
2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.19.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pembinaan dan Pelatihan Olahraga serta Sekolah Olahraga yang Diselenggarakan oleh Masyarakat dan Dunia Usaha			
2.19.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar			
2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			
2.19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota			
2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota			
2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan			
2.19.03.2.03.0001	Seleksi Atlet Daerah			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)			
2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota			
2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota			
2.19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga			
2.19.03.2.04.0001	Standardisasi Organisasi Keolahragaan			
2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			
2.19.03.2.04.0003	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait			
2.19.03.2.04.0004	Pemberian Penghargaan bagi Organisasi Keolahragaan Berprestasi			
2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi			
2.19.03.2.05.0002	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi			
2.19.03.2.05.0004	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			
2.19.03.2.05.0005	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat			
2.20.02.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral			
2.20.02.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi			
2.20.02.2.01.0003	Membangun Metadata Statistik Sektoral			
2.20.02.2.01.0004	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
2.20.02.2.01.0005	Pengembangan Infrastruktur			
2.20.02.2.01.0006	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah			
2.20.02.2.01.0007	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral			
2.20.02.2.01.0008	Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.20.02.2.01.0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral			
2.20.02.2.01.0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia			
2.20.02.2.01.0011	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar			
2.21.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.01.0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.01.0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik			
2.21.02.2.01.0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.21.02.2.02.0001	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka			
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.02.0001	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.23.02.2.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca			
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial			
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno			
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan			
2.23.03.2.02.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
2.23.03.2.02.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara			
2.24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun			
2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup			
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap			
3.25.03.2.05.0002	Pelayanan Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
3.25.03.2.06.0002	Pelayanan Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT			
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.04.2.04.0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat			
3.25.04.2.04.0006	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
3.25.04.2.04.0007	Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat			
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
3.25.05.2.01.0002	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota			
3.25.06.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.25.06.2.02.0001	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil			
3.26.02.2.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.01.0002	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.01.0003	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.01.0004	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.02.0003	Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.02.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.02.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.03.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.26.02.2.04.0001	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.04.0002	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.02.2.04.0003	Pengelolaan Investasi Pariwisata			
3.26.02.2.04.0004	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata			
3.26.02.2.04.0005	Fasilitasi Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata			
3.26.02.2.04.0007	Pembinaan dan Pengawasan untuk memastikan Kepatuhan Pelaku Usaha Melaksanakan Standar Usaha Risiko Menengah Rendah di kabupaten/kota			
3.26.03.2.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri			
3.26.03.2.01.0002	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota			
3.26.04.2.02.0001	Pengembangan Riset			
3.26.04.2.02.0006	Pemberian Insentif			
3.26.04.2.02.0007	Fasilitasi Kekayaan Intelektual			
3.26.04.2.02.0008	Perlindungan Hasil Kreativitas			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.26.04.2.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif			
3.26.04.2.02.0013	Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)			
3.26.04.2.02.0021	Perlindungan Hasil Kreativitas			
3.26.05.2.01.0001	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			
3.26.05.2.01.0002	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata			
3.26.05.2.01.0003	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)			
3.26.05.2.01.0004	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			
3.26.05.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
3.26.05.2.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif			
3.27.02.2.02.0001	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.27.02.2.05.0001	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak			
3.27.02.2.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak			
3.27.02.2.05.0005	Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak			
3.27.02.2.06.0001	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain			
3.27.03.2.01.0001	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			
3.27.03.2.01.0002	Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B			
3.27.03.2.01.0004	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan			
3.27.03.2.02.0001	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.27.03.2.02.0005	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage			
3.27.03.2.02.0007	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Potong Hewan			
3.27.04.2.01.0001	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis			
3.27.04.2.01.0002	Pembebasan Penyakit Hewan Menular dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
3.27.04.2.02.0001	Penilaian Risiko Penyakit Hewan dan Keamanan Produk Hewan			
3.27.04.2.02.0002	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan			
3.27.04.2.02.0003	Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota			
3.27.04.2.04.0001	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan			
3.27.04.2.04.0003	Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis			
3.27.04.2.05.0001	Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.27.05.2.01.0005	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3.27.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian			
3.27.06.2.02.0004	Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan			
3.27.07.2.01.0004	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani			
3.27.07.3.01.0007	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota			
3.27.07.4.01.0007	Pengelolaan UPTD penyuluhan pertanian di Kabupaten/Kota			
3.28.04.2.01.0001	Pencegahan, Penanggulangan dan Pembatasan Kerusakan Kawasan TAHURA			
3.28.04.2.01.0002	Pengamanan Kawasan TAHURA Kabupaten/Kota			
3.28.04.2.01.0003	Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat TAHURA Kabupaten/Kota			
3.28.04.2.01.0004	Pengawetan Koridor Hidupan Liar			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.28.04.2.01.0005	Pemulihan Ekosistem atau Penutupan Kawasan Sesuai Rencana Pengelolaan TAHURA Kabupaten/Kota			
3.28.04.2.01.0009	Pengelolaan Daerah Penyangga TAHURA Kabupaten/Kota			
3.28.04.2.01.0010	Penyusunan Rencana Pengelolaan dan Penataan Blok TAHURA			
3.28.04.2.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Kabupaten/Kota			
3.30.05.2.01.0001	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota			
3.30.05.2.01.0006	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor			
3.30.07.2.01.0001	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
3.30.07.2.01.0002	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota			
3.30.07.2.01.0003	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan			

KODE	NOMENKLATUR URUSAN KABUPATEN/KOTA	KINERJA	INDIKATOR	SATUAN
3.31.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			
3.31.03.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota			
4.01.02.2.02.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing			
4.02.02.2.04.0003	Publikasi dan Dokumentasi Dewan			

H. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR SUMBER PENDANAAN

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah
Sumber Dana	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek		
1	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah	2026
1	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2026
1	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Umum	2025
1	2	01	03	01	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Umum	2025
1	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Umum	2025
1	2	01	03	02	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Umum	2025
1	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	2025
1	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh	2025
2	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama	2025
2	2	01	03	01	0002	Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua	2025
2	2	01	03	01	0003	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua	2025
2	2	01	03	01	0004	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua-Khusus	2025
2	2	01	03	01	0005	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua-Khusus	2025
2	2	01	03	02	0001	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua	2025
2	2	01	03	02	0002	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten/Kota Papua	2025
2	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus Dana Urusan Bersama	2025
2	2	01	03	03	0002	Dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat	2025
2	2	01	03	03	0003	Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2025
2	2	01	03	03	0004	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat-Khusus	2025
2	2	01	03	03	0005	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota pada Provinsi Papua Barat-Khusus	2025
2	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Provinsi Papua Barat	2025
2	2	01	03	04	0002	Dana Tambahan Otonomi Khusus/Dana Tambahan Infrastruktur Kabupaten/Kota Papua Barat	2025
2	2	01	03	05	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	2025
2	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	2025
2	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh	2025

I-K. PENONAKTIFAN KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR REKENING

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
1	1	01	05			Kas Dana BOS	-	2026
1	1	01	05	01		Kas Dana BOS	-	2026
1	1	01	05	01	0001	Kas Dana BOS	-	2026
1	1	06	05	04		Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	2026
1	1	06	05	04	0001	Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	2026
1	1	06	15	09	0077	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	2027
1	1	06	15	34	0010	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	-	2027
1	1	06	15	34	0011	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	-	2027
1	1	06	15	34	0012	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	-	2027
1	1	06	15	35		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	-	2026
1	1	06	15	35	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	2026
1	1	06	15	35	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	2026
1	1	06	15	35	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	2026
1	1	06	15	35	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	2026
1	1	06	15	88		Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2026
1	1	06	15	88	0001	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS	-	2026
1	1	06	15	88	0002	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	-	2026
1	1	06	15	88	0003	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	2026
1	1	06	15	88	0004	Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2026
1	1	10	01	04	3265	Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	2026
1	1	10	01	04	5718	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi	-	2027
1	1	10	01	04	5719	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi	-	2027
1	1	10	01	04	5720	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi	-	2027
1	1	10	01	04	5721	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	2026
1	1	10	01	04	5722	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	2026
1	1	10	01	04	5723	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	2026
1	1	10	01	04	5724	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	2026
1	1	10	01	04	6574	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Pegawai BOS	-	2026
1	1	10	01	04	6575	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Belanja Barang dan Jasa BOS	-	2026

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
1	1	10	01	04	6576	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	2026
1	1	10	01	04	6577	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2026
1	1	10	01	04	7656	Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	2027
2	1	06	01	02	0077	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	2027
2	1	06	01	88		Utang Belanja Pegawai BOS	-	2026
2	1	06	01	88	8888	Utang Belanja Pegawai BOS	-	2026
2	1	06	02	88		Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	-	2026
2	1	06	02	88	8888	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	-	2026
2	1	06	05	05	0010	Utang Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	-	2027
2	1	06	05	05	0011	Utang Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	-	2027
2	1	06	05	05	0012	Utang Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	-	2027
2	1	06	05	06		Utang Belanja Belanja Hibah Dana BOS	-	2026
2	1	06	05	06	0001	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	2026
2	1	06	05	06	0002	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	2026
2	1	06	05	06	0003	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	2026
2	1	06	05	06	0004	Utang Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	2026
2	1	06	07	88		Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	2026
2	1	06	07	88	8888	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	2026
2	1	06	10	88		Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2026
2	1	06	10	88	8888	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2026
2	1	07	01	04	3286	Utang Kelebihan Pembayaran Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	2026
2	1	07	01	04	5739	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi	-	2027
2	1	07	01	04	5740	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi	-	2027
2	1	07	01	04	5741	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi	-	2027
2	1	07	01	04	5742	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	2026
2	1	07	01	04	5743	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	2026
2	1	07	01	04	5744	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	2026
2	1	07	01	04	5745	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	2026
2	1	07	01	04	6595	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Pegawai BOS	-	2026
2	1	07	01	04	6596	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Barang dan Jasa BOS	-	2026

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
2	1	07	01	04	6597	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	2026
2	1	07	01	04	6598	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2026
2	1	07	01	04	7677	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	2027
4	1	04	05	04		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	2025	2026
4	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	2025	2026
4	1	04	12			Pendapatan Denda Pajak Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01		Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2026	2027
4	1	04	12	01	0015	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0016	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0017	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0018	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Sedan-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0019	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0020	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0021	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0022	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Jeep-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0023	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0024	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0025	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0026	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Minibus-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0027	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0028	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0029	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0030	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Microbus-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0031	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0032	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0033	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0034	Pendapatan Denda PKB-Mobil Bus-Bus-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0035	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0036	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0037	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0038	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0039	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0040	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0041	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0042	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0043	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0044	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0045	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0046	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Truck-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0047	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pribadi	2026	2027

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	1	04	12	01	0048	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0049	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0050	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0051	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0052	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0053	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0054	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0055	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0056	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0057	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0058	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0059	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0060	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0061	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0062	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0063	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0064	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0065	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0066	Pendapatan Denda PKB-Kendaraan Khusus Alat Berat/Alat Besar-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0067	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0068	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0069	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0070	Pendapatan Denda PKB-Mobil Roda Tiga-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0071	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0072	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0073	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0074	Pendapatan Denda PKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0075	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0076	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0077	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0078	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang-Roda Tiga-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0079	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0080	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0081	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0082	Pendapatan Denda PKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	01	0083	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pribadi	2026	2027
4	1	04	12	01	0084	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Umum	2026	2027
4	1	04	12	01	0085	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Pusat	2026	2027
4	1	04	12	01	0086	Pendapatan Denda PKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang-Pemerintah Daerah	2026	2027
4	1	04	12	02		Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2026	2027
4	1	04	12	02	0001	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Sedan	2026	2027
4	1	04	12	02	0002	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Jeep	2026	2027
4	1	04	12	02	0003	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Minibus	2026	2027
4	1	04	12	02	0004	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Microbus	2026	2027
4	1	04	12	02	0005	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Bus-Bus	2026	2027

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	1	04	12	02	0006	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up	2026	2027
4	1	04	12	02	0007	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Light Truck	2026	2027
4	1	04	12	02	0008	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Truck	2026	2027
4	1	04	12	02	0009	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Blind Van	2026	2027
4	1	04	12	02	0010	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Dua	2026	2027
4	1	04	12	02	0011	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga	2026	2027
4	1	04	12	02	0012	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Motor yang Dioperasikan di Air	2026	2027
4	1	04	12	02	0013	Pendapatan Denda BBNKB-Kendaraan Khusus Alat Berat	2026	2027
4	1	04	12	02	0014	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Roda Tiga	2026	2027
4	1	04	12	02	0015	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Penumpang-Roda Tiga	2026	2027
4	1	04	12	02	0016	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang-Roda Tiga	2026	2027
4	1	04	12	02	0017	Pendapatan Denda BBNKB-Mobil Barang/Beban-Pick Up Box	2026	2027
4	1	04	12	02	0018	Pendapatan Denda BBNKB-Sepeda Motor-Sepeda Motor Roda Tiga Penumpang	2026	2027
4	1	04	12	03		Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	2026	2027
4	1	04	12	03	0001	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Bensin	2026	2027
4	1	04	12	03	0002	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Solar	2026	2027
4	1	04	12	03	0003	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Gas	2026	2027
4	1	04	12	03	0004	Pendapatan Denda PPBKB-Bahan Bakar Lainnya	2026	2027
4	1	04	12	04		Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	2026	2027
4	1	04	12	04	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan	2026	2027
4	1	04	12	05		Pendapatan Denda Pajak Rokok	2026	2027
4	1	04	12	05	0001	Pendapatan Denda Pajak Rokok	2026	2027
4	1	04	12	06		Pendapatan Denda Pajak Hotel	2026	2027
4	1	04	12	06	0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	2026	2027
4	1	04	12	06	0002	Pendapatan Denda Pajak Motel	2026	2027
4	1	04	12	06	0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	2026	2027
4	1	04	12	06	0004	Pendapatan Denda Pajak Gubuk Pariwisata	2026	2027
4	1	04	12	06	0005	Pendapatan Denda Pajak Wisma Pariwisata	2026	2027
4	1	04	12	06	0006	Pendapatan Denda Pajak Pesanggrahan	2026	2027
4	1	04	12	06	0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	06	0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	2026	2027
4	1	04	12	07		Pendapatan Denda Pajak Restoran	2026	2027
4	1	04	12	07	0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	07	0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	07	0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	07	0004	Pendapatan Denda Pajak Kantin dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	07	0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	07	0006	Pendapatan Denda Pajak Bar dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	07	0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	08		Pendapatan Denda Pajak Hiburan	2026	2027
4	1	04	12	08	0001	Pendapatan Denda Pajak Tontonan Film	2026	2027
4	1	04	12	08	0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	2026	2027
4	1	04	12	08	0003	Pendapatan Denda Pajak Kontes Kecantikan, Binaraga, dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	08	0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	2026	2027
4	1	04	12	08	0005	Pendapatan Denda Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	2026	2027
4	1	04	12	08	0006	Pendapatan Denda Pajak Sirkus/Akrobat/ Sulap	2026	2027
4	1	04	12	08	0007	Pendapatan Denda Pajak Permainan Biliar dan Bowling	2026	2027
4	1	04	12	08	0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	2026	2027
4	1	04	12	08	0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	2026	2027
4	1	04	12	08	0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	2026	2027
4	1	04	12	09		Pendapatan Denda Pajak Reklame	2026	2027
4	1	04	12	09	0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	2026	2027
4	1	04	12	09	0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	2026	2027
4	1	04	12	09	0003	Pendapatan Denda Pajak Reklame Melekat/Stiker	2026	2027
4	1	04	12	09	0004	Pendapatan Denda Pajak Reklame Selebaran	2026	2027
4	1	04	12	09	0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	2026	2027
4	1	04	12	09	0006	Pendapatan Denda Pajak Reklame Udara	2026	2027
4	1	04	12	09	0007	Pendapatan Denda Pajak Reklame Apung	2026	2027
4	1	04	12	09	0008	Pendapatan Denda Pajak Reklame Suara	2026	2027
4	1	04	12	09	0009	Pendapatan Denda Pajak Reklame Film/Slide	2026	2027
4	1	04	12	09	0010	Pendapatan Denda Pajak Reklame Peragaan	2026	2027

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	1	04	12	10		Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	2026	2027
4	1	04	12	10	0001	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	2026	2027
4	1	04	12	10	0002	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	2026	2027
4	1	04	12	11		Pendapatan Denda Pajak Parkir	2026	2027
4	1	04	12	11	0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	2026	2027
4	1	04	12	12		Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2026	2027
4	1	04	12	12	0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	2026	2027
4	1	04	12	13		Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	2026	2027
4	1	04	12	13	0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	2026	2027
4	1	04	12	14		Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2026	2027
4	1	04	12	14	0001	Pendapatan Denda Pajak Asbes	2026	2027
4	1	04	12	14	0002	Pendapatan Denda Pajak Batu Tulis	2026	2027
4	1	04	12	14	0003	Pendapatan Denda Pajak Batu Setengah Permata	2026	2027
4	1	04	12	14	0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	2026	2027
4	1	04	12	14	0005	Pendapatan Denda Pajak Batu Apung	2026	2027
4	1	04	12	14	0006	Pendapatan Denda Pajak Batu Permata	2026	2027
4	1	04	12	14	0007	Pendapatan Denda Pajak Bentonit	2026	2027
4	1	04	12	14	0008	Pendapatan Denda Pajak Dolomit	2026	2027
4	1	04	12	14	0009	Pendapatan Denda Pajak Felspar	2026	2027
4	1	04	12	14	0010	Pendapatan Denda Pajak Garam Batu (Halite)	2026	2027
4	1	04	12	14	0011	Pendapatan Denda Pajak Grafit	2026	2027
4	1	04	12	14	0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	2026	2027
4	1	04	12	14	0013	Pendapatan Denda Pajak Gips	2026	2027
4	1	04	12	14	0014	Pendapatan Denda Pajak Kalsit	2026	2027
4	1	04	12	14	0015	Pendapatan Denda Pajak Kaolin	2026	2027
4	1	04	12	14	0016	Pendapatan Denda Pajak Leusit	2026	2027
4	1	04	12	14	0017	Pendapatan Denda Pajak Magnesit	2026	2027
4	1	04	12	14	0018	Pendapatan Denda Pajak Mika	2026	2027
4	1	04	12	14	0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer	2026	2027
4	1	04	12	14	0020	Pendapatan Denda Pajak Nitrat	2026	2027
4	1	04	12	14	0021	Pendapatan Denda Pajak Opsidien	2026	2027
4	1	04	12	14	0022	Pendapatan Denda Pajak Oker	2026	2027
4	1	04	12	14	0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	2026	2027
4	1	04	12	14	0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa	2026	2027
4	1	04	12	14	0025	Pendapatan Denda Pajak Perlit	2026	2027
4	1	04	12	14	0026	Pendapatan Denda Pajak Phospat	2026	2027
4	1	04	12	14	0027	Pendapatan Denda Pajak Talk	2026	2027
4	1	04	12	14	0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	2026	2027
4	1	04	12	14	0029	Pendapatan Denda Pajak Tanah Diatome	2026	2027
4	1	04	12	14	0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat	2026	2027
4	1	04	12	14	0031	Pendapatan Denda Pajak Tawas (Alum)	2026	2027
4	1	04	12	14	0032	Pendapatan Denda Pajak Tras	2026	2027
4	1	04	12	14	0033	Pendapatan Denda Pajak Yarosif	2026	2027
4	1	04	12	14	0034	Pendapatan Denda Pajak Zeolit	2026	2027
4	1	04	12	14	0035	Pendapatan Denda Pajak Basal	2026	2027
4	1	04	12	14	0036	Pendapatan Denda Pajak Trakit	2026	2027
4	1	04	12	14	0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2026	2027
4	1	04	12	14	0038	Pendapatan Denda Pajak Belerang	2026	2027
4	1	04	12	14	0039	Pendapatan Denda Pajak MBLB Ikutan Dalam Suatu Pertambangan Mineral	2026	2027
4	1	04	12	15		Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2026	2027
4	1	04	12	15	0001	Pendapatan Denda PBBP2	2026	2027
4	1	04	12	16		Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	2026	2027
4	1	04	12	16	0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	2026	2027
4	1	04	12	16	0002	Pendapatan Denda BPHTB-Pemberian Hak Baru	2026	2027
4	1	04	12	17		Pendapatan Denda Pajak Alat Berat	2026	2027
4	1	04	12	17	0001	Pendapatan Denda Pajak Alat Berat	2026	2027
4	1	04	12	18		Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2026	2027
4	1	04	12	18	0001	Pendapatan Denda Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)	2026	2027
4	1	04	12	19		Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	2026	2027
4	1	04	12	19	0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	2026	2027
4	1	04	12	19	0002	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	2026	2027
4	1	04	12	19	0003	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	2026	2027
4	1	04	12	19	0004	Pendapatan Denda PBJT-Tenaga Listrik-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	2026	2027
4	1	04	12	19	0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	2026	2027
4	1	04	12	19	0006	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hostel	2026	2027
4	1	04	12	19	0007	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Vila	2026	2027

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	1	04	12	19	0008	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pondok Wisata	2026	2027
4	1	04	12	19	0009	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Motel	2026	2027
4	1	04	12	19	0010	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Losmen	2026	2027
4	1	04	12	19	0011	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Wisma Pariwisata	2026	2027
4	1	04	12	19	0012	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Pesanggrahan	2026	2027
4	1	04	12	19	0013	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	2026	2027
4	1	04	12	19	0014	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	2026	2027
4	1	04	12	19	0015	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Glamping	2026	2027
4	1	04	12	19	0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	2026	2027
4	1	04	12	19	0017	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)	2026	2027
4	1	04	12	19	0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	2026	2027
4	1	04	12	19	0019	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	2026	2027
4	1	04	12	19	0020	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Kecantikan	2026	2027
4	1	04	12	19	0021	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Kontes Binaraga	2026	2027
4	1	04	12	19	0022	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pameran	2026	2027
4	1	04	12	19	0023	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	2026	2027
4	1	04	12	19	0024	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2026	2027
4	1	04	12	19	0025	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Permainan Ketangkasan	2026	2027
4	1	04	12	19	0026	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	2026	2027
4	1	04	12	19	0027	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	2026	2027
4	1	04	12	19	0028	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	2026	2027
4	1	04	12	19	0029	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	2026	2027
4	1	04	12	20		Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2026	2027
4	1	04	12	20	0001	Pendapatan Denda Opsen PKB	2026	2027
4	1	04	12	21		Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	2026	2027
4	1	04	12	21	0001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	2026	2027
4	1	04	13			Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2026	2027
4	1	04	13	01		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum	2026	2027
4	1	04	13	01	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2026	2027
4	1	04	13	01	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Keliling	2026	2027
4	1	04	13	01	0016	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pembantu	2026	2027
4	1	04	13	01	0017	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Balai Pengobatan	2026	2027
4	1	04	13	01	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	2026	2027
4	1	04	13	01	0019	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan-Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	2026	2027

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	1	04	13	01	0020	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	2026	2027
4	1	04	13	01	0021	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	2026	2027
4	1	04	13	01	0022	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat-Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat	2026	2027
4	1	04	13	01	0023	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	2026	2027
4	1	04	13	01	0024	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Pelataran	2026	2027
4	1	04	13	01	0025	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Los	2026	2027
4	1	04	13	01	0026	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar-Kios	2026	2027
4	1	04	13	01	0027	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-Pengujian Kendaraan Bermotor	2026	2027
4	1	04	13	01	0028	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	2026	2027
4	1	04	13	01	0029	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penanggulangan Kebakaran	2026	2027
4	1	04	13	01	0030	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran-Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Penyelamatan Jiwa	2026	2027
4	1	04	13	01	0031	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Dasar (Garis)	2026	2027
4	1	04	13	01	0032	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Foto	2026	2027
4	1	04	13	01	0033	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Digital	2026	2027
4	1	04	13	01	0034	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Tematik	2026	2027
4	1	04	13	01	0035	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta-Penyediaan Peta Teknis (Struktur)	2026	2027
4	1	04	13	01	0036	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2026	2027
4	1	04	13	01	0037	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Rumah Tangga	2026	2027
4	1	04	13	01	0038	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Perkantoran	2026	2027
4	1	04	13	01	0039	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair-Industri	2026	2027
4	1	04	13	01	0040	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	2026	2027
4	1	04	13	01	0041	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus	2026	2027
4	1	04	13	01	0042	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Teknis	2026	2027
4	1	04	13	01	0043	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pelatihan Teknis	2026	2027
4	1	04	13	01	0044	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan-Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	2026	2027
4	1	04	13	01	0045	Pendapatan Denda Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	2026	2027
4	1	04	13	01	0046	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pelayanan Persampahan	2026	2027
4	1	04	13	01	0047	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	2026	2027
4	1	04	13	01	0048	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kebersihan-Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	2026	2027
4	1	04	13	01	0049	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas	2026	2027
4	1	04	13	02		Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2026	2027
4	1	04	13	02	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	2026	2027
4	1	04	13	02	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	2026	2027
4	1	04	13	02	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	2026	2027
4	1	04	13	02	0015	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Laboratorium	2026	2027

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	1	04	13	02	0016	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Ruangan	2026	2027
4	1	04	13	02	0017	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Kendaraan Bermotor	2026	2027
4	1	04	13	02	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Pemakaian Alat	2026	2027
4	1	04	13	02	0019	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	2026	2027
4	1	04	13	02	0020	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	2026	2027
4	1	04	13	02	0021	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan	2026	2027
4	1	04	13	02	0022	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	2026	2027
4	1	04	13	02	0023	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	2026	2027
4	1	04	13	02	0024	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha	2026	2027
4	1	04	13	02	0025	Pendapatan Denda Retribusi Terminal-Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	2026	2027
4	1	04	13	02	0026	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir	2026	2027
4	1	04	13	02	0027	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila-Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	2026	2027
4	1	04	13	02	0028	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan-Pelayanan Rumah Potong Hewan	2026	2027
4	1	04	13	02	0029	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan	2026	2027
4	1	04	13	02	0030	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	2026	2027
4	1	04	13	02	0031	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang	2026	2027
4	1	04	13	02	0032	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan di Air-Pelayanan Penyeberangan Barang	2026	2027
4	1	04	13	02	0033	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	2026	2027
4	1	04	13	02	0034	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	2026	2027
4	1	04	13	02	0035	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	2026	2027
4	1	04	13	02	0036	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	2026	2027
4	1	04	13	02	0037	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya-Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	2026	2027
4	1	04	13	02	0038	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Tempat Pelelangan	2026	2027
4	1	04	13	02	0039	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya dalam Lingkungan Tempat Pelelangan-Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	2026	2027
4	1	04	13	02	0040	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan-Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	2026	2027
4	1	04	13	02	0041	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak-Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	2026	2027
4	1	04	13	02	0042	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan-Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	2026	2027
4	1	04	13	02	0043	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	2026	2027
4	1	04	13	02	0044	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air-Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air	2026	2027
4	1	04	13	02	0045	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah-Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	2026	2027

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
4	1	04	13	02	0046	Pendapatan Denda Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah - Pemanfaatan Aset Daerah	2026	2027
4	1	04	13	03		Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	2026	2027
4	1	04	13	03	0008	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol-Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	2026	2027
4	1	04	13	03	0009	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2026	2027
4	1	04	13	03	0010	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Penangkapan Ikan	2026	2027
4	1	04	13	03	0011	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha Perikanan-Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	2026	2027
4	1	04	13	03	0012	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Ruas Jalan Tertentu	2026	2027
4	1	04	13	03	0013	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Koridor Tertentu	2026	2027
4	1	04	13	03	0014	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-Pengendalian Lalu Lintas Penggunaan Kawasan Tertentu	2026	2027
4	1	04	13	03	0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	2026	2027
4	1	04	13	03	0017	Pendapatan Denda Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2026	2027
4	1	04	13	03	0018	Pendapatan Denda Retribusi Pengelolaan Pertambangan Rakyat	2026	2027
4	1	04	15	09	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2026	2027
4	1	04	15	34	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	2026	2027
4	1	04	15	34	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	2026	2027
4	1	04	15	34	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	2026	2027
4	1	04	15	88		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2025	2026
4	1	04	15	88	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS	2025	2026
4	1	04	15	88	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	2025	2026
4	1	04	15	88	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	2025	2026
4	1	04	15	88	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	2025	2026
4	1	04	15	35		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS	2025	2026
4	1	04	15	35	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2025	2026
4	1	04	15	35	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2025	2026
4	1	04	15	35	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2025	2026
4	1	04	15	35	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2025	2026
4	2	01	03	01	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua	2025	2026
4	2	01	03	01	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	2025	2026
4	2	01	03	02	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Papua Barat	2025	2026
4	2	01	03	02	0002	Dana Otonomi Khusus-Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	2025	2026
4	2	01	03	03	0001	Dana Otonomi Khusus-Provinsi Aceh	2025	2026
4	2	01	03	04	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua	2025	2026
4	2	01	03	04	0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua	2025	2026
4	2	01	03	05	0001	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat	2025	2026
4	2	01	03	05	0002	Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat	2025	2026
4	2	01	03	06	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Papua	2025	2026
4	2	01	03	07	0001	DBH Minyak dan Gas Otonomi Khusus Aceh	2025	2026
5	1	01	02	06	0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2026	2027
5	1	02	06			Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	2025	2026

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
5	1	02	06	01		Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	2025	2026
5	1	02	06	01	0001	Belanja Penunjang Otonomi Khusus*)	2025	2026
5	1	05	05	04		Belanja Hibah kepada Koperasi	2026	2027
5	1	05	05	04	0001	Belanja Hibah Uang kepada Koperasi	2026	2027
5	1	05	05	04	0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	2026	2027
5	1	05	05	04	0003	Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi	2026	2027
5	1	05	06			Belanja Hibah Dana BOS	2025	2026
5	1	05	06	01		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2025	2026
5	1	05	06	01	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	2025	2026
5	1	05	06	02		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2025	2026
5	1	05	06	02	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2025	2026
5	1	05	06	03		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2025	2026
5	1	05	06	03	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2025	2026
5	1	05	06	04		Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2025	2026
5	1	05	06	04	0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2025	2026
6	1	01	01	04	0012	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Pajak Daerah	2026	2027
6	1	01	01	04	0013	Pelampauan Penerimaan PAD-Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2026	2027
6	1	01	05	01	0025	Penghematan Belanja Hibah-Hibah Dana BOS	2025	2026
6	1	04				Penerimaan Pinjaman Daerah	2026	2027
6	1	04	01			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	2026	2027
6	1	04	01	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	01	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	01	02		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	01	02	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	01	03		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	01	03	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	01	04		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	01	04	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat-Penerusan Pinjaman Luar Negeri-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	01	05		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	01	05	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	01	06		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	01	06	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat- Sumber Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	02			Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain	2026	2027
6	1	04	02	01		Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	02	01	0001	Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	03			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	2026	2027
6	1	04	03	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	03	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	03	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	03	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	03	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	03	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	03	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	03	04	0001	Pinjaman Daerah dari LKB-BUMD-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	03	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	2026	2027

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
6	1	04	03	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	03	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	03	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	03	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	03	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	03	08		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	03	08	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	03	09		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	03	09	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-Swasta-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	04			Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	2026	2027
6	1	04	04	01		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	04	01	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	04	02		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	04	02	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	04	03		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	04	03	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	04	04		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	04	04	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	04	05		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	04	05	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	04	06		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	04	06	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMD-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	04	07		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	04	07	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Pendek	2026	2027
6	1	04	04	08		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	04	08	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Menengah	2026	2027
6	1	04	04	09		Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	04	09	0001	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-Swasta-Jangka Panjang	2026	2027
6	1	04	05			Pinjaman Daerah dari Masyarakat	2026	2027
6	1	04	05	01		Obligasi Daerah	2026	2027
6	1	04	05	01	0001	Obligasi Daerah	2026	2027
7	1	04	05	04		Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	-	2026
7	1	04	05	04	0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS-LO	-	2026
7	1	04	15	09	0077	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN-LO	-	2027
7	1	04	15	34	0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Koperasi-LO	-	2027
7	1	04	15	34	0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Koperasi-LO	-	2027
7	1	04	15	34	0012	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Jasa kepada Koperasi-LO	-	2027
7	1	04	15	35		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-LO	-	2026
7	1	04	15	35	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri-LO	-	2026
7	1	04	15	35	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta-LO	-	2026
7	1	04	15	35	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta-LO	-	2026

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
7	1	04	15	35	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta-LO	-	2026
7	1	04	15	88		Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	-	2026
7	1	04	15	88	0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS-LO	-	2026
7	1	04	15	88	0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS-LO	-	2026
7	1	04	15	88	0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS-LO	-	2026
7	1	04	15	88	0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-LO	-	2026
8	1	01	02	06	0067	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	2027
8	1	01	88			Beban Pegawai BOS	-	2026
8	1	01	88	88		Beban Pegawai BOS	-	2026
8	1	01	88	88	8888	Beban Pegawai BOS	-	2026
8	1	02	88			Beban Barang dan Jasa BOS	-	2026
8	1	02	88	88		Beban Barang dan Jasa BOS	-	2026
8	1	02	88	88	8888	Beban Barang dan Jasa BOS	-	2026
8	1	05	05	04		Beban Hibah kepada Koperasi	-	2027
8	1	05	05	04	0001	Beban Hibah Uang kepada Koperasi	-	2027
8	1	05	05	04	0002	Beban Hibah Barang kepada Koperasi	-	2027
8	1	05	05	04	0003	Beban Hibah Jasa kepada Koperasi	-	2027
8	1	05	06			Beban Hibah Dana BOS	-	2026
8	1	05	06	01		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	2026
8	1	05	06	01	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	2026
8	1	05	06	02		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	2026
8	1	05	06	02	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	2026
8	1	05	06	03		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	2026
8	1	05	06	03	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	2026
8	1	05	06	04		Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	2026
8	1	05	06	04	0001	Beban Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	2026
8	1	07	04	05	0004	Beban Penyisihan Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	-	2026
8	1	07	04	15	2212	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Uang kepada Koperasi	-	2027
8	1	07	04	15	2213	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Barang kepada Koperasi	-	2027
8	1	07	04	15	2214	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia-Hibah Jasa kepada Koperasi	-	2027
8	1	07	04	15	2215	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Negeri	-	2026
8	1	07	04	15	2216	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	2026
8	1	07	04	15	2217	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	-	2026
8	1	07	04	15	2218	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOS-Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	-	2026
8	1	07	04	15	3068	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Pegawai BOS	-	2026

Kode Akun						Uraian Akun	Tahun Penyusunan Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Daerah	Tahun Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
Akun	Kelompok	Jenis	Objek	Rincian Objek	Sub Rincian Objek			
8	1	07	04	15	3069	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Barang dan Jasa BOS	-	2026
8	1	07	04	15	3070	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	2026
8	1	07	04	15	3071	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS-Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2026
8	1	07	04	15	4054	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	-	2027

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

Dr. Asmawa, AP., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197410191993111003